

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

PADANG PARIAMAN
SAIYO SAKATO

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

LKJIP 2025

(0751) 478555
Parik Malintang Kecamatan Anam Lingkuang
www.padangpariamankab.go.id



Dr. H. JOHN KENEDY AZIS, SH, MH
BUPATI PADANG PARIAMAN

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah dapat menyelesaikan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah tahun anggaran berakhir.

LKjIP ini merupakan bentuk akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman yang memuat aspek akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan serta capaian kinerja dan tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2025. LKjIP juga merupakan konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kami berharap bahwa LKjIP ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan program dan kegiatan selanjutnya, serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam menetapkan kebijakan dan program pembangunan ke depan.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ini dapat bermanfaat bagi semua pihak baik sebagai informasi maupun sebagai evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Parit Malintang, 13 Maret 2026
BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

IKHTISAR
EKSEKUTIF

Seiring dengan telah berakhirnya pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2025, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025. Penyusunan LKjIP menjadi salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mendorong tata Kelola Pemerintahan yang baik Dimana Instansi Pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan Publik. LKJIP Kabupaten Padang Pariaman merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan tahun krusial sebagai fase transisi strategis dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Periode ini menandai titik temu antara penuntasan target RPJMD 2021-2026 sekaligus menjadi fondasi awal bagi implementasi arah kebijakan dalam RPJMD 2025-2029.

Secara administratif, masa transisi ini dipayungi oleh dua instrumen hukum utama, yaitu :

1. Penyelesaian Periode Sebelumnya: Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Guna memastikan target-target tersebut tetap relevan dengan dinamika pembangunan dan regulasi terkini, pemerintah daerah melakukan penajaman yang dituangkan melalui Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 38/KEP/BPP/2024 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024-2025.
2. Transisi ke Periode Baru: Memasuki fase pembangunan berikutnya, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menetapkan landasan strategis baru melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan menetapkan instrumen pengukuran kinerja melalui Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029, sebagai parameter keberhasilan pembangunan untuk lima tahun ke depan.

A. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2021-2026

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 22 Indikator Kinerja Utama (IKU), gambaran pencapaian kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Sebanyak 13 indikator (59,10%) tercapai dengan kategori Sangat Berhasil. Prestasi menonjol terlihat pada sektor investasi dengan Pertumbuhan Investasi mencapai 202,60% dari target 2%. Selain itu, kualitas birokrasi dan tata kelola digital menunjukkan kemajuan signifikan melalui Indeks SPBE (4,07) dan Indeks Pelayanan Publik (4,58) yang melampaui target, mempertahankan Opini WTP dari BPK RI serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari Usia Harapan Hidup (74,04 tahun) dan PDRB Per Kapita yang melebihi target perencanaan.



- Terdapat 7 indikator (31,82%) berada pada kategori Berhasil. Pemerintah daerah menunjukkan konsistensi dalam menjaga Tingkat Kemiskinan di angka 5,86% dan Nilai AKIP pada predikat BB (71,54). Meskipun beberapa realisasi seperti *Merit System* dan Kepatuhan Pelayanan Publik berada sedikit di bawah angka target nominal, namun secara fungsional tetap menunjukkan tren progresif yang mendukung stabilitas tata kelola pemerintahan.

Sebagai bagian dari akuntabilitas, terdapat dua area yang memerlukan perhatian khusus dan langkah intervensi pada periode RPJMD selanjutnya:

- Kategori Cukup Berhasil (4,54%): Sektor infrastruktur irigasi mencatatkan realisasi 47,17%, yang dipengaruhi oleh tantangan teknis dan pembiayaan sarana prasarana pertanian.
- Kategori Kurang Berhasil (4,54%) pada indikator Prevalensi Stunting menjadi tantangan utama dengan realisasi 26,6% terhadap target ambisius 14%. Poin ini ditetapkan sebagai prioritas intervensi lintas sektor dalam transisi menuju RPJMD 2025-2029.

Dari total persentase capaian indikator diatas maka didapatkan rata-rata capaian kinerja keseluruhan dari 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja pada tahun 2025 yakni sebesar 552,55% dengan kategori capaian “Sangat Berhasil”.

B. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029

Implementasi kinerja pembangunan pada tahun pertama periode RPJMD 2025-2029 menunjukkan performa yang progresif dan akuntabel. Dari total 47 indikator yang dievaluasi, mayoritas kinerja memperoleh hasil positif dengan 22 indikator (46,81%) dengan kategori Sangat Berhasil. Keberhasilan signifikan tercermin pada sektor investasi dengan Pertumbuhan Investasi yang melonjak hingga 202,60%, penguatan tata kelola pemerintahan melalui Indeks SPBE (4,07) dan Nilai SAKIP (71,54), serta terjaganya stabilitas keamanan daerah dan pelestarian nilai budaya. Pencapaian melampaui target ini menjadi modalitas kuat dalam mengakselerasi visi pembangunan jangka menengah daerah.



Selanjutnya, terdapat 19 indikator (40,43%) yang masuk dalam kategori Berhasil seperti Indeks Reformasi Birokrasi, pemenuhan akses air minum, serta berbagai indikator kesetaraan gender dan perlindungan anak yang tetap berada pada tren yang stabil. Meskipun beberapa indikator seperti angka prevalensi stunting dan indeks ketahanan pangan memerlukan perhatian berkelanjutan, namun secara umum pelaksanaan program tetap berada dalam jalur menuju target yang ditetapkan.

Sebagai bahan evaluasi, terdapat 6 indikator (12,76%) yang dikategorikan Kurang Berhasil, khususnya pada sektor pengelolaan lingkungan (pen golahan sampah), kapasitas air baku, serta rasio ekonomi kreatif dan dana pihak ketiga. Rendahnya capaian pada proporsi layanan pengumpulan sampah (0,54%) dan kapasitas air baku (0,03 m^3/detik) menjadi prioritas mendesak untuk dilakukan penajaman strategi dan realokasi sumber daya pada tahun anggaran berikutnya. Disamping itu, sektor kesehatan masyarakat juga perlu mendapatkan perhatian khusus, di mana Angka Kematian Ibu (AKI) mencatatkan realisasi sebesar 89 orang per 100.000 kelahiran hidup, angka ini masih berada jauh dibawah target sebesar 50 orang. Kondisi ini menjadi sinyal penting untuk melakukan penguatan pada sistem rujukan kesehatan dan layanan persalinan.

Secara akumulatif, rata-rata capaian kinerja dari 47 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2025 adalah sebesar 259,18%. Hal ini menunjukkan performa instansi yang Sangat Baik, di mana meskipun terdapat beberapa kendala di sektor infrastruktur air baku dan pengelolaan sampah, namun secara makro 87,24% indikator telah mencapai target yang direncanakan dalam RPJMD 2025-2029.

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat capaian realisasi untuk beberapa indikator yang belum memenuhi terget kinerja, hal ini tidak terlepas dari adanya beberapa hambatan dan kendala. Untuk itu sebagai upaya perbaikan kedepan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan melakukan langkah konkrit melalui analisis dan evaluasi baik internal dan eksternal agar dapat dilakukan perbaikan dimasa mendatang. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan melakukan upaya akselerasi untuk pencapaian tahun berikutnya, dan akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan, sehingga resiko kegagalan dapat ditekan dan dicarikan solusi untuk mengatasinya.

Langkah-langkah kedepan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi mendalam terhadap indikator yang memiliki selisih terlalu jauh antara target dan realisasi. Perlu dilakukan penyesuaian target pada dokumen perencanaan (Perubahan RPJMD atau RKPD) agar lebih realistis (SMART: *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*);
2. Mengalokasikan anggaran pemulihan pascabencana untuk perbaikan permanen pada titik-titik rawan banjir dan longsor, serta memastikan standar pembangunan infrastruktur ke depan memiliki ketahanan terhadap anomali cuaca ekstrim;
3. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam memperkuat sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan bencana guna meminimalisir dampak kerusakan infrastruktur publik di masa mendatangaten guna mendukung konektivitas ekonomi dan ketahanan pangan;
4. Digitalisasi dan Inovasi Pelayanan Publik;
5. Mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif dengan memfasilitasi akses pasar dan modal, serta mempertahankan tren pertumbuhan investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru;
6. Mengoptimalkan sistem pengelolaan dan pelaporan data kinerja yang terintegrasi (SIMAK Kinerja) yang selaras dengan target-target daerah dalam dokumen perencanaan daerah dan di manfaatkan oleh seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
7. Memastikan setiap indikator yang belum tercapai pada periode 2021-2026 mendapatkan perhatian khusus dalam implementasi strategi di periode RPJMD 2025-2029 demi keberlanjutan pembangunan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Padang Pariaman.

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai pedoman Reviu Atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Reviu bertujuan untuk memberikan Keyakinan terbatas lapopran kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

INSPEKTUR
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

HENDRA ASWARA, S.STP.,MM.CGCAE.,CFrA
Pembina TK I NIP 19810926 199912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF ii
PERNYATAAN TELAH DI REVIU iv
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR GRAFIK xv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Gambaran Umum 2
1.2.1 Kondisi Geografis 2
1.2.2 Demografis 4
1.2.3 Produk Domestik Regional 6
1.2.4 Pertumbuhan Ekonomi 8
1.3 Struktur Organisasi 8
1.4 Sumber Daya Manusia 11
1.5 Isu Strategis Dan Permasalahan Pembangunan 18
BAB II PERENCANAAN KINERJA 19
2.1.1 Visi 19
2.1.2 Misi 20
2.1.3 Tujuan dan Sasaran 21
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan 25
2.3 Perjanjian Kinerja 45
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 50
3.1 Pengukuran Kinerja 55
3.2 Pencapaian Indikator Kinerja Utama 56
3.3 Akuntabilitas Keuangan 467
3.4 Prestasi dan Penghargaan 469
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA 474
4.1 Kesimpulan 474
4.2 Kendala dan Hambatan 478
4.3 Langkah Perbaikan Ke Depan 479
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1	:	Luas Wilayah Per Kecamatan, Jumlah Nagari dan Korong di Kabupaten Padang Pariaman	3
1.2	:	Jumlah Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Berdasarkan Kecamatan Tahun 2025	5
1.3	:	Perkembangan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 – 2025	5
1.4	:	Jumlah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025	11
2.1	:	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026	21
2.2	:	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029	22
2.3	:	Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026	26
2.4	:	Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029	30
2.5	:	Perjanjian Kinerja Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2021-2026	45
2.6	:	Perjanjian Kinerja Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029	46
3.1	:	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Penanggung Jawab Pada RPJMD Tahun 2021-2026	50
3.2	:	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Penanggung Jawab Pada RPJMD Tahun 2025-2029	52
3.3	:	Pengukuran Dengan Skala Ordinal	56
3.4	:	Realisasi Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 dan Penyesuaian Pohon Kinerja Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024	57
3.5	:	Realisasi Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029	58
3.6	:	Lembaga Pendidikan Alqur'an Penghasil Hafizh/Hafizhah Menurut Kecamatan Tahun 2025	62
3.7	:	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizhah Tahun 2025	63
3.8	:	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dan Tahun 2025	64

3.9 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah Tahun 2025 67

3.10 : Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Tahun 2025 68

3.11 : Perbandingan Target dan Tahun Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Tahun 2024 dan Tahun 2025 69

3.12 : Perbandingan Realisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Tahun 2021-2025 dengan Target RPJMD 69

3.13 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Tahun 2025 73

3.14 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah Tahun 2025 74

3.15 : Potensi Konflik Sosial di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 74

3.16 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 76

3.17 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Persentase IKU Penanganan Konflik Sosial di Daerah Tahun 2025 79

3.18 : Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Warisan Cagar Budaya yang di Lestarikan Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2021-2026 80

3.19 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Warisan Cagar Budaya yang di Lestarikan Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029 81

3.20 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Warisan Cagar Budaya yang di Lestarikan Tahun 2024 dengan Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2021-2026 81

3.21 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Warisan Cagar Budaya yang di Lestarikan Tahun 2024 dengan Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029 82

3.22 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Warisan Cagar Budaya yang di Lestarikan Tahun 2025 dengan Target RPJMD 2025-2029 83

3.23 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Persentase Warisan Cagar Budaya yang Dilestariakan Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2021-2026 86

3.24 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Persentase Warisan Cagar Budaya yang Dilestariakan Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029 86

3.25 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2021-2026 87

3.26 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestariakan Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029 87

3.27 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan Tahun 2024 dengan Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2021-2026 88

3.28 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan Tahun 2024 dengan Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029 88

3.29 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan dengan Target RPJMD Tahun 2021-2026 89

3.30 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan Tahun dengan Target RPJMD Tahun 2025-2029 89

3.31 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun Indikator Kinerja Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2021-2026 93

3.32 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun Indikator Kinerja Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029 93

3.33 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang Tahun 2025 94

3.34 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang Tahun 2024 dengan Tahun 2025 95

3.35 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang Tahun 2025 98

3.36 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2025 98

3.37 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2024 dan Tahun 2025 99

3.38 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2025 101

3.39 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2025 102

3.40 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2024 dan Tahun 2025 103

3.41 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2024 dan Tahun 2025 105

3.42 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja PDRB Perkapita Tahun 2025 106

3.43 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja PDRB Perkapita Tahun 2024 dan tahun 2025 107

3.44 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja PDRB Perkapita Tahun 2025 113

3.45 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Pengeluaran Perkapita Tahun 2025 113

3.46	:	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Pengeluaran Perkapita Tahun 2024 dan Tahun 2025	114
3.47	:	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026	117
3.48	:	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029	118
3.49	:	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2024 dan Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026	118
3.50	:	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2024 dan Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029	119
3.51	:	Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Indikator Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah dengan Target Jangka Menengah Berdasarkan RPJMD 2025-2029	120
3.52	:	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat Tahun 2025	121
3.53	:	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Rata -Rata Lama Sekolah Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026	125
3.54	:	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Rata -Rata Lama Sekolah Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029	126
3.55	:	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Opini BPK atas LKPD Tahun 2025	127
3.56	:	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Opini BPK Atas LKPD Tahun 2024 dan Tahun 2025	128
3.57	:	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Opini BPK Atas LKPD Tahun 2021-2025 dengan Target RPJMD	129
3.58	:	Program dan Kegiatan Pendukung IKU Opini BPK terhadap LKPD Tahun 2025	129
3.59	:	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Opini BPK Atas LKPD Tahun 2025	132
3.60	:	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026	134
3.61	:	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029	134
3.62	:	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dan Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026	135
3.63	:	Nilai Aspek Evaluasi SAKIP Tahun 2024 dan Tahun 2025	135
3.64	:	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029	136
3.65	:	Perbandingan Realisasi IKU Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Tahun 2021-2025 dengan Target RPJMD Tahun 2021-2026	136

3.66	:	Perbandingan Realisasi IKU Nilai SAKIP Kabupaten Tahun 2025 dengan Target RPJMD Tahun 2025-2029	137
3.67	:	Hasil Nilai Evaluasi AKIP Pemda Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2025	137
3.68	:	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Tahun 2025	140
3.69	:	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Utama Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026	141
3.70	:	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029	142
3.71	:	Target dan Realisasi Nilai Indeks Merit System Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025	144
3.72	:	Penilaian Mandiri Sistem Merit Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025	144
3.73	:	Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Merit System Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dan Tahun 2025	145
3.74	:	Perbandingan Nilai Sistem Merit Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023, Tahun 2024 dengan Tahun 2025	145
3.75	:	Perbandingan Realisasi Indeks Merit System Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah	146
3.76	:	Pagu dan Realisasi Sub Kegiatan yang Menunjang Indikator Kinerja Indeks Merit System Tahun 2025	148
3.77	:	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Indeks Merit System Tahun 2025	149
3.78	:	Target dan Realisasi Nilai Indeks SPBE Kabupaten Padang Pariaman Pariaman Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2021-2026	150
3.79	:	Target dan Realisasi Nilai Indeks SPBE Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029	150
3.80	:	Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Indeks SPBE Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dan Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2021-2026	151
3.81	:	Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Indeks SPBE Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dan Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029	151
3.82	:	Perbandingan Target RPJMD 2025-2029 dengan Realisasi Indeks SPBE	152
3.83	:	Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator Kinerja Indeks SPBE	153
3.84	:	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Nilai Indeks SPBE Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2021-2026	159
3.85	:	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Nilai Indeks SPBE Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029	160
3.86	:	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025	161

3.87	:	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024 dengan Tahun 2025	162
3.88	:	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2025	163
3.89	:	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025	166
3.90	:	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025	167
3.91	:	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 dengan Tahun 2025	167
3.92	:	Perbandingan Realisasi Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2021-2025 dengan Target RPJMD	168
3.93	:	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025	171
3.94	:	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2021-2026	173
3.95	:	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029	173
3.96	:	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja UHH Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dan Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2021-2026	174
3.97	:	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dan Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029	174
3.98	:	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup dengan Target Jangka Menengah Berdasarkan RPJMD 2025-2029	175
3.99	:	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2021-2026	182
3.100	:	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Angka Harapan Hidup Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029	183
3.101	:	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Prevalensi Stunting Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2021-2026	184
3.102	:	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Prevalensi Stunting Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029	184
3.103		Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Prevalensi Stunting Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dan Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2021-2026	185
3.104		Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Prevalensi Stunting Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dan Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2029-2029	185
3.105	:	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Prevalensi Stunting dengan Target Jangka Menengah Tahun 2021-2025	186

3.106 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Prevalensi Stunting Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Tahun 2025-2029 186

3.107 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Prevalensi Stunting Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2021-2026 199

3.108 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Prevalensi Stunting Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029 199

3.109 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan Tahun 2025 200

3.110 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan Tahun 2024 dan Tahun 2025 201

3.111 : Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan Tahun 2021 - 2025 201

3.112 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan Tahun 2025 208

3.113 : Realisasi Investasi Menurut Sektor di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 209

3.114 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Investasi Tahun 2025 210

3.115 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Pertumbuhan Investasi Tahun 2024 dengan Tahun 2025 211

3.116 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Investasi Tahun 2021-2025 dengan Target RPJMD 211

3.117 : Efisiensi Sumberdaya Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Investasi Tahun 2025 219

3.118 : Persentase Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB Tahun 2024 dan Tahun 2025 221

3.119 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB Tahun 2025 221

3.120 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB Tahun 2024 dan Tahun 2025 222

3.121 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah 223

3.122 : Persentase Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB Tahun 2025 Kabupaten Padang Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat 223

3.123 : Efisiensi Sumber Daya Indikator Kinerja Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB tahun 2025 230

3.124 : Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 232

3.125 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 dan tahun 2025 232

3.126 : Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 dan tahun 2025 233

3.127 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 dengan Target RPJMD 2025-2029 233

3.128 : Program dan Kegiatan Pendukung IKU Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 234

3.129 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 237
3.130 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Survey Penilaian Integritas Tahun 2025 239
3.131 : Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK Tahun 2024 dan tahun 2025 239
3.132 : Perbandingan Realisasi IKU Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK dengan Target RPJMD 2025-2029 239
3.133 : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP 243
3.134 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025 244
3.135 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 245
3.136 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025 dengan Target RPJMD 2025-2029 245
3.137 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025 248
3.138 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2025 250
3.139 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2024 dan Tahun 2025 251
3.140 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah dengan Target RPJMD Tahun 2025-2029 251
3.141 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2025 256
3.142 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Assessment Tingkat Nasional 257
3.143 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Assessment Tingkat Nasional Tahun 2024 dan 2025 257
3.144 : Perbandingan Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Assessment Tingkat Nasional dengan Target RPJMD 2025-2029 258
3.145 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Assessment Tingkat Nasional (Literasi dan Numerasi) Tahun 2025 263
3.146 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Angka Kematian Ibu Tahun 2025 264
3.147 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Angka Kematian Ibu Tahun 2024 dan Tahun 2025 265
3.148 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Angka Kematian Ibu dengan Target RPJMD 2025-2029 265
3.149 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Tahun 2025 271
3.150 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Keluarga Tahun 2025 273

3.151 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Keluarga Tahun 2024 dan Tahun 2025 273

3.152 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Keluarga dengan Target RPJMD Tahun 2025-2029 274

3.153 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Keluarga Tahun 2025 281

3.154 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2025 282

3.155 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2024 dan Tahun 2025 282

3.156 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender dengan Target RPJMD Tahun 2025-2029 283

3.157 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2025 287

3.158 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2025 288

3.159 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2024 dan Tahun 2025 288

3.160 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Ketimpangan Gender dengan Target RPJMD Tahun 2025-2029 289

3.161 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2025 293

3.162 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Perlindungan Anak Tahun 2025 294

3.163 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Perlindungan Anak Tahun 2024 dan Tahun 2025 294

3.164 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Perlindungan Anak dengan Target RPJMD Tahun 2025-2029 295

3.165 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Indeks Perlindungan Anak Tahun 2025 299

3.166 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kesejahteraan Sosial Tahun 2025 300

3.167 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kesejateraan Sosial Tahun 2024 dan Tahun 2025 301

3.168 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kesejahteraan Sosial dengan Target RPJMD Tahun 2025-2029 301

3.169 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Indeks Kesejahteraan Sosial Tahun 2025 308

3.170 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2025 309

3.171 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun 2024 dan Tahun 2025 310

3.172 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan Target RPJMD Tahun 2025-2029 311

3.173 : Perbandingan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2024 dan 2025 312

3.174 : Perbandingan Produksi Tanaman Holtikultura Tahun 2024 dan 2025 313

3.175 : Hasil Produksi Daging Tahun 2025 Berdasarkan Kecamatan 313

3.176 : Hasil Produksi Komoditas Peternakan Tahun 2024 dan Tahun 2025 314

3.177 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2025 318

3.178 : Perbandingan Target dan Realisasi Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2025 321

3.179 : Perbandingan Realisasi Capaian Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2024 dan Tahun 2025 321

3.180 : Perbandingan Realisasi Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2025-2029 dengan Target RPJMD 322

3.181 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2025 325

3.182 : Perbandingan Target dan Realisasi Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Tahun 2025 326

3.183 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Tahun 2024 dan Tahun 2025 326

3.184 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB dengan Target RPJMD 2025-2029 327

3.185 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Tahun 2025 330

3.186 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Rasio PDRB Industri Pengolahan Tahun 2025 331

3.187 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Rasio PDRB Industri Pengolahan Tahun 2024 dan Tahun 2025 331

3.188 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Rasio PDRB Industri Pengolahan dengan Target RPJMD Tahun 2025-2029 332

3.189 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Rasio PDRB Industri Pengolahan Tahun 2025 335

3.190 : Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Berdasarkan Kebangsaan Tahun 2024 dan Tahun 2025 336

3.191 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara Tahun 2025 337

3.192 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara Tahun 2024 dan 2025 338

3.193 : Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah 338

3.194 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara Tahun 2025 342

3.195 : PDRB dan PDB Ekonomi Kreatif 343

3.196 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara Tahun 2025 344

3.197 : Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah 344

3.198 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2025 dengan Provinsi 345

3.199 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2025 347

3.200 : Perbandingan Realisasi Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2025-2029 dengan Target RPJMD 348

3.201 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Tahun 2024 dan 2025 349

3.202 : Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah 349

3.203 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Tahun 2025 dengan Provinsi 350

3.204 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Rasio PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2025 327

3.205 : Realisasi Investasi Menurut Sektor di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 353

3.206 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Investasi Tahun 2025 354

3.207 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Investasi Tahun 2024 dengan Tahun 2025 355

3.208 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Investasi Tahun 2025 dengan Target RPJMD 355

3.209 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Investasi Tahun 2025 Kabupaten dengan Provinsi 356

3.210 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Investasi Tahun 2025 361

3.211 : Perbandingan Target dan Realisasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PRDB) Tahun 2025 362

3.212 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PRDB) Tahun 2024 dengan Tahun 2025 362

3.213 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PRDB) Tahun 2025 dengan Target RPJMD 363

3.214 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PRDB) Tahun 2025 Kabupaten dengan Provinsi 363

3.215 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PRDB) Tahun 2025 365

3.216 : Perbandingan Target dan Realisasi Total Dana Pihak Ketiga/PDRB Tahun 2025 366

3.217 : Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Total Dana Pihak Ketiga/PDRB Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah 366

3.218 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%PRDB) Tahun 2025 369

3.219 : Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Transaksi Saham per Kapita Tahun 2025 370

3.220 : Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Transaksi Saham Per Kapita 2025 dengan Target Jangka Menengah 370

3.221 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Nilai Transaksi Saham per Kapita Tahun 2025 372

3.222 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2025 373

3.223 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2024 dengan Tahun 2025 374

3.224 : Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Ketahanan Pangan 2025 dengan Target Jangka Menengah 374

3.225 : Perkembangan Nilai Indeks Katahanan Pangan (IKP) Kab. Padang Pariaman Tahun 2022 s.d 2025 375

3.226 : Realisasi Anggaran Program Penunjang Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2025 377

3.227 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2025 377

3.228 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2025 379

3.229 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2024 dengan Tahun 2025 380

3.230 : Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Pengangguran Terbuka 2025 dengan Target Jangka Menengah 380

3.231 : Perbandingan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten dengan Provinsi 380

3.232 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2025 383

3.233 : Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2025 385

3.234 : Perbandingan Realisasi Capaian Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2024 dan Tahun 2025 385

3.235 : Perbandingan Realisasi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2025 dengan Target RPJMD 386

3.236 : Perbandingan Realisasi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten dengan Provinsi Tahun 2025 386

3.237 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2025 389

3.238 : Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2025 390

3.239 : Perbandingan Realisasi Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2024 dan Tahun 2025 390

3.240 : Perbandingan Realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2025 dengan Target RPJMD 390

3.241 : Perbandingan Realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten dengan Provinsi Tahun 2025 391

3.242 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2025 393

3.243 : Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi Tahun 2025 394

3.244 : Perbandingan Realisasi Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi Tahun 2025 dengan Target RPJMD 395

3.245 : Perbandingan Realisasi Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja Di Bidang Keahlian Menengah Tinggi dengan Realisasi Provinsi Tahun 2025 396

3.246 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja Di Bidang Keahlian Menengah Tinggi Tahun 2025 398

3.247 : Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal Tahun 2025 399

3.248 : Perbandingan Realisasi Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal Tahun 2025 dengan Target RPJMD 400

3.249 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal Tahun 2025 403

3.250 : Klasifikasi Status Desa/Nagari 405

3.251 : Data Status Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 405

3.252 : Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Desa Tahun 2025 406

3.253 : Perbandingan Realisasi Indeks Desa Tahun 2025 dengan Target RPJMD 406

3.254 : Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Realisasi Indikator Kinerja Indeks Desa Tahun 2025 408

3.255 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Indeks Desa Tahun 2025 410

3.256 : Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Tahun 2025 411

3.257 : Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Tahun 2025 dengan Target RPJMD 412

3.258 : Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Tahun 2025 413

3.259 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Tahun 2025 413

3.260 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan Tahun 2025 415

3.261 : Perbandingan Realisasi Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan Tahun 2025 dengan Target RPJMD 415

3.262 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan Tahun 2025 417

3.263	:	Nama Sumber Air Baku di Kabupaten Padang Pariaman Beserta Kapasitasnya	418
3.264	:	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Kapasitas Air Baku (m3/detik) Tahun 2025	419
3.265	:	Perbandingan Realisasi Kapasitas Air Baku (m3/detik) Tahun 2025 dengan Target RPJMD	419
3.266	:	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Kapasitas Air Baku (m3/detik) Tahun 2025	421
3.267	:	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Tahun 2025	422
3.268	:	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Tahun 2024 dan Tahun 2025	423
3.269	:	Perbandingan Realisasi Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Tahun 2025 dengan Target RPJMD	423
3.270	:	Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Tahun 2025 dengan Realisasi Provinsi	424
3.271	:	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Tahun 2025	426
3.272	:	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025	428
3.273	:	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dan Tahun 2025	428
3.274	:	Nilai IKLH, IKA, IKU dan IKL Tahun 2024 dan 2025	429
3.275	:	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	429
3.276	:	Kategori Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	430
3.277	:	Objek Pemantauan Indeks Kualitas Air	432
3.278	:	Titik Pemantauan Kualitas Udara di Kabupaten Padang Pariaman	433
3.279	:	Stasiun Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Padang Pariaman	434
3.280	:	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025	435
3.281	:	Neraca Pengelolaan Sampah Berdasarkan Data SIPSN	436
3.282	:	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Kinerja Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2025	437
3.283	:	Perbandingan Realisasi Kinerja Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	437
3.284	:	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2025	441
3.285	:	Perbandingan Target Dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025 Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	442

3.286 : Perbandingan Realisasi Kinerja Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah 442

3.287 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Tahun 2025 445

3.288 : Data Kejadian Bencana di Kabupaten Padang Pariaman Selama Tahun 2025 447

3.289 : Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Risiko Bencana Tahun 2025 448

3.290 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Risiko Bencana Tahun 2024 dan Tahun 2025 448

3.291 : Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Risiko Bencana Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah 449

3.292 : Perbandingan Realisasi Indeks Risiko Bencana Tahun 2025 Kabupaten dengan Provinsi 449

3.293 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Indeks Risiko Bencana Tahun 2025 454

3.294 : Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Keamanan Daerah Tahun 2025 456

3.295 : Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Keamanan Daerah Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah 456

3.296 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Indeks Kemanan Daerah Tahun 2025 458

3.297 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Angka Kriminalitas Tahun 2025 459

3.298 : Angka Kriminalitas Di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2025 459

3.299 : Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Angka Kriminalitas Tahun 2024 dan Tahun 2025 460

3.300 : Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Kriminalitas Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah 460

3.301 : Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025 463

3.302 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Angka Kriminalitas Tahun 2025 465

3.303 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 467

3.304 : Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 467

3.305 : Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 468

3.306 : Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 468

3.307 : Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2025 469

3.308 : Prestasi dan Penghargaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 469

DAFTAR GAMBAR

1.1	:	Peta Administrasi Kabupaten Padang Pariaman	4
1.2	:	Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman	10
2.1	:	Visi, Misi, dan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029	24
2.2	:	Bupati Padang Pariaman dampingi Presiden tinjau lokasi terdampak bencana dan resmikan Jembatan Bailey Padang Mantuang di Padang Pariaman	25
3.1	:	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Guru Mengaji	66
3.2	:	Wisuda Al-Quran dan Tahfidz Rumah Al-Quran Rahman Raqyan	66
3.3	:	Dialog Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 di Istana Seafood Putra Minang	70
3.4	:	Tradisi Mauluik Gadang sebagai Ekspresi Keagamaan yang Damai, Meriah dan Saling Menghargai Bagi Pemeluk Agama Lain disekitar	71
3.5	:	Goro Akbar Pembersihan Sungai Batang Ulakan	71
3.6	:	FGD Forkopinda Tentang ISU Sosial Politik di Kabupaten	78
3.7	:	Masyarakat 2x11 Kayu Tanam menyampaikan Aspirasi Masalah Tanah Tarok City ATR/BPN Kab. Padang Pariaman	78
3.8	:	Warisan Cagar Budaya Makam Syekh Burhanudin	85
3.9	:	Warisan Budaya Tak Benda Tahun 2025	92
3.10	:	Rehabilitasi Jalan	97
3.11	:	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	101
3.12	:	Pembahasan Pemanfaatan dan Peruntukan Ruang	104
3.13	:	Pengawasan dan Survey Dalam Mendistribusikan Pupuk Bersubsidi	110
3.14	:	Koordinasi dengan Berbagai Pihak dalam Rangka Kerjasama Pelaksanaan Bazar/Pasar Murah	111
3.15	:	Pemantauan Harga Kebutuhan Sembilan Bahan Pokok ke Pasar	111
3.16	:	Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kab. Padang Pariaman dan Program Kerja Tahun 2025	112
3.17	:	Zoom Meeting dan rapat Koordinasi tentang Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025	112
3.18	:	Bazar/ Pasar Murah	112
3.19	:	Proses Jual Beli Masyarakat Pada Salah Satu Pasar di Kabupaten Padang Pariaman	116

3.20	:	Kegiatan Manajemen Pelayanan Pendidikan	123
3.21	:	Kegiatan Pemberian Bantuan Kependidikan	123
3.22	:	Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Pendidikan Non-Formal	123
3.23	:	Program dan Kegiatan Pendukung IKU Opini BPK Terhadap LKPD Tahun 2025	131
3.24	:	Penghargaan dan Apresiasi dalam Ketepatan Penyetoran Iuran Wajib Pegawai (IWP 8%)	133
3.25	:	Pembahasan Rencana Aksi Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi AKIP Kabuapten Padang Pariaman Tahun 2024	138
3.26	:	Rapat Desk Capaian IKU Tahun 2024 oleh Tim SAKIP Kab. Padang Pariaman dengan Perangkat Daerah Pemangku IKU	138
3.27	:	Proses Verifikasi Pemarafan Dokumen SAKIP Perangkat Daerah (Paraf Verivikasi Tim SAKIP dan Paraf Reviu Berjenjang Tim Evaluator APIP)	138
3.28	:	Monitoring Penginputan data AKIP Perangkat Daerah pada Aplikasi SIMAK Kinerja	139
3.29	:	Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Eselon II, III, dan IV.	148
3.30	:	Pelaksanaan Profiling ASN	149
3.31	:	Pelaksanaan Assesment Center	149
3.32		Program dan Kegiatan Pendukung IKU Indeks SPBE Tahun 2025	155
3.33		Bupati Padang Pariaman menerima Penghargaan BAZNAS Award 2025	160
3.34	:	Pendampingan dan Evaluasi Internal PEKPPP	165
3.35	:	Publikasi Hasil Survei Kepuasan Msyarakat	165
3.36	:	Monev dan Pembinaan Kepatuhan Penyelenggraan Pelayanan Publik	170
3.37	:	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	171
3.38	:	Pertemuan Verifikasi dan Analisis Data MPDN	177
3.39	:	Pelaksanaan Aksi Bergizi di SMAN 1 Kayu Tanam	178
3.40	:	Promosi Air Bersih ke Pengelola Depot Air Minum	178
3.41	:	Pengadaan Alat Kesehatan untuk Menunjang Pelayanan Kuratif	179
3.42	:	Cek Kesehatan Gratis di IKK Kab. Padang Pariaman	180
3.43	:	Pengendalian Penyakit Prioritas di Puskesmas Koto Bangko	180
3.44	:	Imunisasi dasar Lengkap	180
3.45	:	Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK)	196
3.46	:	Bantuan Pangan Bergizi	196
3.47	:	Sosialisasi Pencegahan Stunting Bagi Remaja	196

3.48	:	Fasilitasi dan Pembinaan Penggerak PKK dalam Pencegahan Stunting	197
3.49	:	Pendampingan dan KPM dalam Rangka Launching Penerima PKH Tahun 2025	198
3.50	:	Penyerahan Bantuan Permakanan Untuk Lansia dan Disabilitas	206
3.51	:	Bantuan Usaha Untuk Ibu Yulidawati	207
3.52	:	Pengawasan Perizinan Berusaha dan Pelaporan Kegiatan Penenaman Modal (LKPM)	217
3.53	:	Pengawasan Perizinan Berusaha dan Pelaporan Kegiatan Penenaman Modal (LKPM)	217
3.54		Rangka Pengawasan Perizinan Berusaha dan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	218
3.55	:	Peninjauan Lapangan Menindaklanjuti Laporan Pengaduan Masyarakat	218
3.56	:	Penyaluran Bantuan Bibit/Benih Unggul Bersetifikat kepada Masyarakat Tani	228
3.57	:	Temu Teknis Peningkatan Kapasitas Nelayan Kecil Tahun Anggaran 2025	229
3.58	:	Kegiatan Sosialisasi Kepada Industri Kecil dan Menengah	229
3.59	:	Kegiatan Pembinaan Bagi Industri Kecil dan Menengah	229
3.60	:	Penyusunan Rencana Aksi RB General dan Tematik Tahun 2025	235
3.61	:	Monitoring Laporan Pelaksanaan Aksi RB General dan Tematik Tahun 2025 pada Portal RB	236
3.62	:	LHE Ex-Ante dan ON Goiing RB Tahun 2025	236
3.63	:	Perbandingan Capaian SPI Padang Pariaman	240
3.64	:	Pelaksanaan Kegiatan Capaian Indikator Kinerja SPI	242
3.65	:	Asistensi Nagari	242
3.66	:	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP	243
3.67	:	Validasi Lapangan IGA	246
3.68	:	Wakil Bupati Padang Pariaman memaparkan Inovasi Daerah pada Ajang IGA 2025	247
3.69	:	Penghargaan Indeks Inovasi Daerah Tertinggi Tahun 2025	248
3.70	:	Monitoring Proses Pembelajran di satuan Pendidikan	254
3.71	:	Proses Belajar di satuan Pendidikan PKBM (Paket A, B dan C)	254
3.72	:	Kegiatan Verbal Angka Tidak Sekolah dalam Pemetaan Angka Putus Sekolah Kab. Padang Pariaman	254
3.73	:	Bimtek Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan	262
3.74	:	Pengembangan Karir Pendidik melalui Kegiatan MGMP	262
3.75	:	Supervisi Fasilitas Program KIA	267

3.76	:	Bedah Kohort Ibu Hamil	268
3.77	:	Moniring dan Evaluasi Program	268
3.78	:	Pelaksanaan AMP-SR	268
3.79	:	Koordinasi Penyusunan Dokumen PJPK	276
3.80	:	Sosialisasi Pemutakhiran Data Keluarga	276
3.81	:	Sekolah Siaga Kependudukan	276
3.82	:	Pelayanan Keluarga Berencana	277
3.83	:	Pembinaan Faskes	278
3.84	:	Penyuluhan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	278
3.85	:	Pembinaan Kelompok Bina Keluarga	279
3.86	:	Pendampingan Kelarga Beresiko Stunting	279
3.87	:	Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)	279
3.88	:	Bimtek Anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI)	284
3.89		Launching Nagari Ramah Perempuan dan Peduli Anak	285
3.90	:	Penanganan Pelecehan Seksual Terhadap Anak	297
3.91	:	Penyerahan Bantuan Kursi Roda untuk Disabilitas dan Bantuan Sembako untuk Lansia Terlantar	304
3.92	:	Bantuan Usaha Untuk Ibu Yulidawati	304
3.93	:	Bantuan Logistik Bencana	305
3.94	:	Bantuan Benih Unggul Bersetifikat Kepada Masyarakat Tani	314
3.95	:	Bantuan Sarana Alsintan kepada Kelompok Tani	315
3.96	:	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	315
3.97	:	Berbagai Kegiatan Program Penyediaan dan Pengembangan Saran Pertanian	316
3.98	:	Kegiatan Sosialisasi Gemar Makan Ikan	317
3.99	:	Budidaya Ikan Dalam Ember	317
3.100		Kegiatan terkait Sektor Perdagangan	324
3.101	:	Dokumentasi Kegiatan terkait Koperasi	329
3.102	:	Sosialisasi Bagi IKM	334
3.103	:	Pembinaan Bagi IKM	334
3.104	:	Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kabupaten Padang Pariaman	341
3.105	:	Anugerah Harmoni Kontribusi Astra Tahun 2025	342
3.106	:	Padang Pariaman Creative Hub (Pachu Fest)	347
3.107	:	Kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Program Kejar	369
3.108	:	Bantuan Bibit Sayuran Untuk Pengembangan Pangan Pekarangan	376
3.109	:	Pengawasan Keamanan Pangan	376

3.110	:	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah	376
3.111	:	Penghargaan yang diraih dalam pencapaian Indeks Ketahanan Pangan	378
3.112	:	Dokumentasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka	383
3.113	:	Dokumentasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	388
3.114	:	Kegiatan Bazar UMKM di InJourney 2025	409
3.115	:	Monitoring dan Pembinaan BuMnag Desa/nagari Tahun 2025	409
3.116	:	Pembinaan Kelompok Dasawsima dan PKK Tahun 2025	409
3.117	:	Pemasangan Sambungan Rumah (SR)	417
3.118	:	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	421
3.119	:	Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Program Bantuan RTLH dari Baznas Kabupaten Padang Pariaman	425
3.120	:	Pemantauan Kualitas Air Tahun 2025	434
3.121	:	Pemantauan Kualitas Udara Tahun 2025	435
3.122	:	Sosialisasi terkait Perda Pengelolan Sampah	440
3.123	:	Melakukan Koordinasi Dengan Camat Terkait Pengelolaan Sampah	440
3.124	:	Melakukan Sosialisasi dan MoU SSK	445
3.125	:	Monitoring dan Pemasangan Spanduk Dilarang Membuang Sampah	445
3.126	:	Pemasangan Rambu Mitigasi Bencana Tsunami	452
3.127	:	Sosialisasi dan Latihan Evakuasi Mandiri Bencana Gempa Bumi	452
3.128	:	Kegiatan Survey dan Sosialisasi Pemasangan Early Warning System (EWS) dan Survey Lokasi di Nagari Ulakan dan Nagari Katapiang	453
3.129	:	Sosialisasi Pemasangan HF Radar Tsunami di Nagari Tapakih	453
3.130	:	Apel Siaga Bencana di Tugu Gempa, Korong Lubuak Laweh, Nagari Tandikat Utara, Kec. VII Koto Patamuan	453
3.131	:	Daftar Penghargaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025	471

DAFTAR GRAFIK

1.1	:	Perkembangan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 – 2025	6
1.2	:	Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman Atas Harga Berlaku Tahun 2021-2025	7
1.3	:	Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman Atas Harga Konstan Tahun 2021-2025	7
1.4	:	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2025	8
3.1	:	Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Kinerja Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/ Hafizhah Tahun 2021-2025	64
3.2	:	Perbandingan Realisasi Kinerja Kabupaten, Provinsi dan Nasional Terkait Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Tahun 2025	70
3.3	:	Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Kinerja Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah Tahun 2021-2025	77
3.4	:	Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Kinerja Persentase Warisan Cagar Budaya Yang di Lestarikan Tahun 2021-2025	82
3.5	:	Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang Tahun 2021-2025	95
3.6	:	Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2021-2025	99
3.7	:	Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2021-2025	103
3.8	:	Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi PDRB Per Kapita Tahun 2021-2025	107
3.9	:	Perbandingan Realisasi Kinerja Kabupaten, Provinsi dan Nasional Terkait PDRB Per Kapita Tahun 2025	108
3.10	:	Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Pengeluaran Per Kapita Tahun 2021-2025	114
3.11	:	Perbandingan Realisasi Kinerja Pengeluaran Per Kapita Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2025	115
3.12	:	Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2021-2025 Berdasarkan RPJMD 2021-2026	119
3.13	:	Perbandingan Target dan Realisasi Rata - Rata Lama Sekolah Padang Pariaman dengan Realisasi Provinsi dan Nasional Tahun 2025	120
3.14	:	Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Indeks SPBE Tahun 2021-2025	152

3.15	:	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks SPBE Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2025	153
3.16	:	Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Indeks Pelayanan Publik Tahun 2021-2025	162
3.17	:	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik Kabupaten dan Provinsi Tahun 2025	163
3.18	:	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik Kabupaten dan Provinsi Tahun 2025	169
3.19	:	Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Usia Harapan Hidup Tahun 2021-2025	175
3.20	:	Perbandingan Realisasi Kinerja Usia Harapan Hidup Kabupaten, Provinsi dan Standar Nasional Tahun 2025	176
3.21	:	Perbandingan Realisasi Kinerja Prevalensi Stunting Kabupaten dengan Provinsi dan Standar Nasional Tahun 2025	187
3.22	:	Persentase Balita Bermasalah Gizi Yang Tidak Memiliki JKN	188
3.23	:	Persentase Balita Bermasalah Gizi Yang Tidak Akses Air Bersih	189
3.24	:	Persentase Balita Bermasalah Gizi Yang Suspect Kecacingan	190
3.25	:	Persentase Balita Bermasalah Gizi Yang Suspect Kecacingan	191
3.26	:	Persentase Balita Bermasalah Gizi Yang Tidak Imunisasi	192
3.27	:	Persentase Balita Bermasalah Gizi Dengan Keluarga Merokok	193
3.28	:	Persentase Balita Bermasalah Dengan Riwayat Bumil KEK	194
3.29	:	Persentase Balita Bermasalah Gizi Dengan Penyakit Penyerta	195
3.30	:	Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2025	202
3.31	:	Perbandingan Realisasi Kinerja Kabupaten, Provinsi dan Nasional Terkait Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025	246
3.32	:	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2025 Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional	252
3.33	:	Perbandingan realisasi kinerja Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Assessment Tingkat Nasional Tahun 2025 Kabupaten Padang Pariaman Standar Nasional	259
3.34	:	Angka Kematian Ibu Tahun 2025	266
3.35	:	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Keluarga Tahun 2025 Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional	274
3.36	:	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2025 Kabupaten dengan Provinsi	283
3.37	:	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2025 Kabupaten dengan Provinsi	289

3.38 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Perlindungan Anak Tahun 2025 Kabupaten dengan Provinsi 295

3.39 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kesejahteraan Sosial Tahun 2025 Kabupaten dengan Provinsi 302

3.40 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun 2025 Kabupaten dengan Provinsi 311

3.41 : Perbandingan Realisasi Kinerja Kabupaten, Provinsi dan Nasional Terkait Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 322

3.42 : Perbandingan Realisasi Indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Tahun 2025 Kabupaten dengan Provinsi 327

3.43 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Rasio PDRB Industri Pengolahan Tahun 2025 Kabupaten dengan Provinsi 332

3.44 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Total Dana Pihak Ketiga/PDRB Tahun 2025 Kabupaten dengan Provinsi 367

3.45 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Transaksi Saham per Kapita Tahun 2025 Kabupaten dengan Provinsi 371

3.46 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat 381

3.47 : Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal Kabupaten dan Provinsi Tahun 2025 400

3.48 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Desa Tahun 2025 Kabupaten dengan Provinsi 407

3.49 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan Tahun 2025 Kabupaten dengan Provinsi 416

3.50 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kapasitas Air Baku Tahun 2025 Kabupaten dengan Provinsi 420

3.51 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 Kabupaten dengan Provinsi 430

3.52 : Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Timbulan Sampah Terolah pada Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2025 Kabupaten dengan Provinsi 438



Bab 1
Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG

LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) adalah dokumen pertanggungjawaban tahunan yang disusun instansi pemerintah untuk mengukur, mendokumentasikan, dan melaporkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan menjadi amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban kepada publik yaitu pertanggungjawaban atas capaian kinerja tahunan instansi, menilai tingkat keberhasilan/kegagalan target yang ditetapkan, serta menjadi alat evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. LKjIP mengintegrasikan sinergi antara aspek keuangan dan aspek kinerja, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bentuk akuntabilitas dan transparansi atas penggunaan anggaran publik dalam mencapai sasaran strategis yang tertuang di dalam dokumen perencanaan dan berfungsi sebagai alat evaluasi internal untuk memastikan keselarasan dengan RPJMD, umpan balik perencanaan berikutnya, serta pemenuhan kewajiban regulasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Good Governance and Clean Government merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Untuk itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab serta bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Hal ini selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat.

Menindaklanjuti amanat Peraturan Perundangan tersebut serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 dengan bertitik tolak pada Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjelaskan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan serta dikaitkan dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun.

1.2 GAMBARAN UMUM

1.2.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Padang Pariaman merupakan kabupaten dengan luas wilayah terkecil kedua di Sumatera Barat setelah Kabupaten Tanah Datar yaitu sebesar 1.343,09 km^2 atau sebesar 3,2 persen dari luas daratan wilayah Provinsi Sumatera Barat. Padahal dulunya kabupaten ini merupakan kabupaten dengan luas terbesar di Sumatera Barat sebelum diperluasnya Kota Padang pada Tahun 1980 serta pemekaran Kabupaten Mentawai pada Tahun 1999 dan Kota Pariaman pada Tahun 2002.

Secara administrasi Kabupaten Padang Pariaman memiliki batas wilayah administratif, yaitu:

Sebelah Utara : Kabupaten Agam
Sebelah Selatan : Kota Padang
Sebelah Timur : Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok
Sebelah Barat : Kota Pariaman dan Samudera Indonesia

Secara astronomis terletak antara 0° 19’ 15,68” - 0° 48’ 59,868” Lintang Selatan dan antara 99° 57’ 43,325” - 100° 27’ 28,94” Bujur Timur. Kabupaten Padang Pariaman memiliki 17 kecamatan yaitu Batang Anai, Lubuak Aluang, Sintuak Toboh Gadang, Ulakan Tapakih, Nan Sabaris, Anam Lingkuang, 2x11 Anam Lingkuang, 2x11 Kayu Tanam, VII Koto, VII Koto Patamuan, VII Koto Padang Sago, V Koto, V K oto Timur, Sungai Limau, Batang Gasan, Sungai Garinggiang, dan IV Koto Aua Malintang. Tercatat bahwa Kecamatan 2x11 Kayu Tanam memiliki wilayah paling luas dengan luas sebesar 188,55 km^2 dan wilayah dengan luas terkecil terdapat pada Kecamatan Nan Sabaris dengan luas sebesar 23,01 km^2 . Kabupaten Padang Pariaman memiliki pantai yang luas dengan panjang garis pantai sepanjang 42,11 kmKemudian rata-rata ketinggian wilayahnya berada pada kisaran 0-1.925 meter dari permukaan laut. Selain memiliki pantai yang panjang Kabupaten Padang Pariaman memiliki 2 pulau yang terletak di Kecamatan Batang Anai dan Ulakan Tapakih serta dilewati oleh 12 sungai.

Kabupaten Padang Pariaman memiliki jumlah curah hujan yang tinggi. Sepanjang Tahun 2025 tercatat rata-rata jumlah curah hujan dari Stasiun Meteorologi Minangkabau dan Stasiun Klimatologi Padang Pariaman sebanyak 4.911,10 mm/tahun dengan rata-rata jumlah hari hujan dari kedua stasiun tersebut sebanyak 211 hari. Bulan November tercatat sebagai bulan dengan curah hujan tertinggi yaitu dengan rata-rata 1.232 mm/Bulan dan rata-rata jumlah hari hujan tertinggi dari kedua stasiun ada pada bulan November dan Desember, yaitu sebanyak 24 hari terjadi hujan.

Kabupaten Padang Pariaman memiliki 17 Kecamatan, 103 Nagari dan 600 Korong sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 120/453/PEM-2016 tanggal 26 Mei 2016 serta Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Nama Kecamatan, Nagari, dan Korong di Kabupaten Padang Pariaman. Luas wilayah dan jumlah nagari setiap kecamatan berbeda- beda, dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

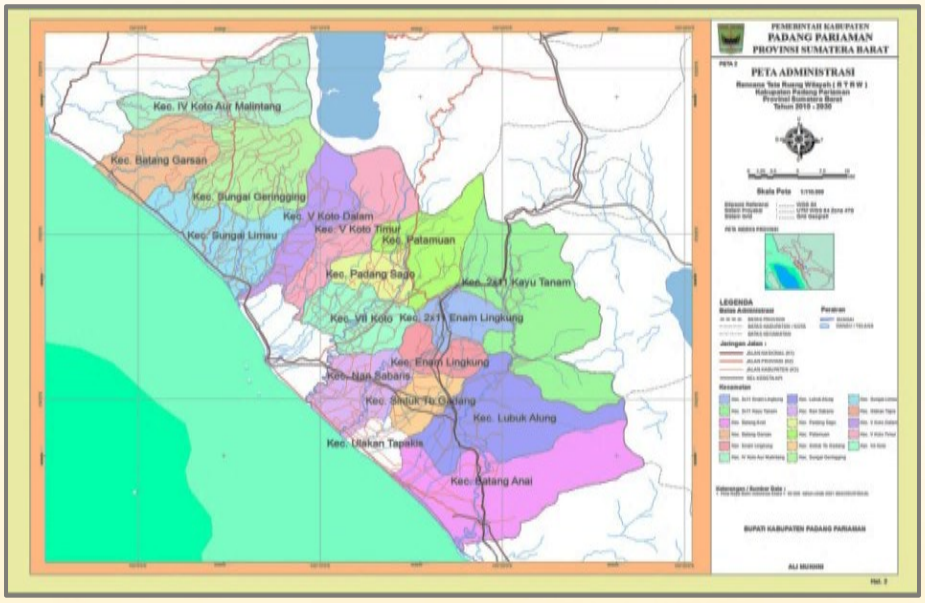
Tabel 1.1
Luas Wilayah Per Kecamatan, Jumlah Nagari dan Korong di Kabupaten Padang Pariaman

No.	Kecamatan	Luas (km2)	Jumlah Nagari	Jumlah Korong
1	Batang Anai	164,33	8	52
2	Lubuak Aluang	124,76	9	52
3	Sintuak Toboh Gadang	32,65	5	29
4	Ulakan Tapakih	23,01	8	53
5	Nan Sabaris	66,19	9	46
6	2x11 Anam Lingkuang	40,64	3	12
7	Anam Lingkuang	34,28	5	27
8	2x11 Kayu Tanam	188,55	4	21
9	VII Koto	64,14	12	66
10	Patamuan	77,95	6	41
11	Padang sago	34,93	6	24
12	V Koto Kampuang Dalam	66,68	8	49
13	V Koto Timur	66,79	4	28
14	Sungai Limau	90,36	4	28
15	Batang Gasan	76,26	3	15
16	Sungai Garinggiang	107,73	4	27
17	IV Koto Aua Malintang	84,29	5	30
	Jumlah	**1.343,56**	**103**	**600**

Sumber: *Padang Pariaman Dalam Angka,* ***2026***

Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam merupakan Kecamatan dengan wilayah terluas yakni 188,55 Km^2 sedangkan Kecamatan Ulakan Tapakih merupakan kecamatan dengan luas terkecil, yakni 23,01 Km^2. Kecamatan yang paling banyak memiliki nagari adalah Kecamatan VII Koto dengan 12 (dua belas) Nagari, sedangkan kecamatan yang paling sedikit memiliki nagari adalah Kecamatan 2 X 11 Anam Lingkuang dan Batang Gasan yang masing-masing hanya terdiri dari 3 (tiga) nagari.

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Padang Pariaman



Sumber: *Peta RTRW Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman*

1.2.2 Kondisi Demografis

Kondisi demografis suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Dari waktu ke waktu jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman terus mengalami peningkatan dengan proporsi jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki yang diukur melalui rasio jenis kelamin *(sex ratio).* Jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 adalah 460.452 jiwa yang terdiri dari 231.823 jiwa laki-laki dan 228.629 jiwa perempuan. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 458,310 jiwa yang terdiri dari 230.615 jiwa laki-laki dan 227.695 jiwa perempuan. Penyebaran jumlah penduduk bervariasi setiap kecamatannya dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Padang Pariaman
Berdasarkan Kecamatan Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	LUBUK ALUANG	25.857	25.019	**50.876**
2	BATANG ANAI	29.024	28.254	**57.278**
3	NAN SABARIS	15.860	15.965	**31.825**
4	2 X 11 ANAM LINGKUANG	9.835	9.818	**19.653**
5	VII KOTO	18.979	18.929	**37.908**
6	V KOTO	12.660	12.329	**24.989**
7	SUNGAI GARINGGIANG	17.294	17.110	**34.404**
8	SUNGAI LIMAU	15.828	15.414	**31.242**
9	IV KOTO AUA MALINTANG	11,147	11,251	**22.398**
10	ULAKAN TAPAKIH	11.120	10.851	**21.971**
11	SINTUAK TOBOH GADANG	10.672	10.673	**21.345**
12	VII KOTO PADANG SAGO	4.701	4.765	**9.466**
13	BATANG GASAN	5.984	5.754	**11.738**
14	V KOTO TIMUR	7.839	7.660	**15.449**
15	2 X 11 KAYU TANAM	14.824	14.616	**29.440**
16	KOTO PATAMUAN	9.328	9.259	**18.587**
17	ANAM LINGKUANG	10.871	10.962	**21.833**
	JUMLAH	**231.823**	**228.629**	**460,452**

***Sumber**: Data Kependudukandan Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025*

Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025, Kecamatan Batang Anai merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak yakni 57.278 jiwa, sementara kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan VII Koto Padang Sago dengan jumlah 9.466 jiwa.

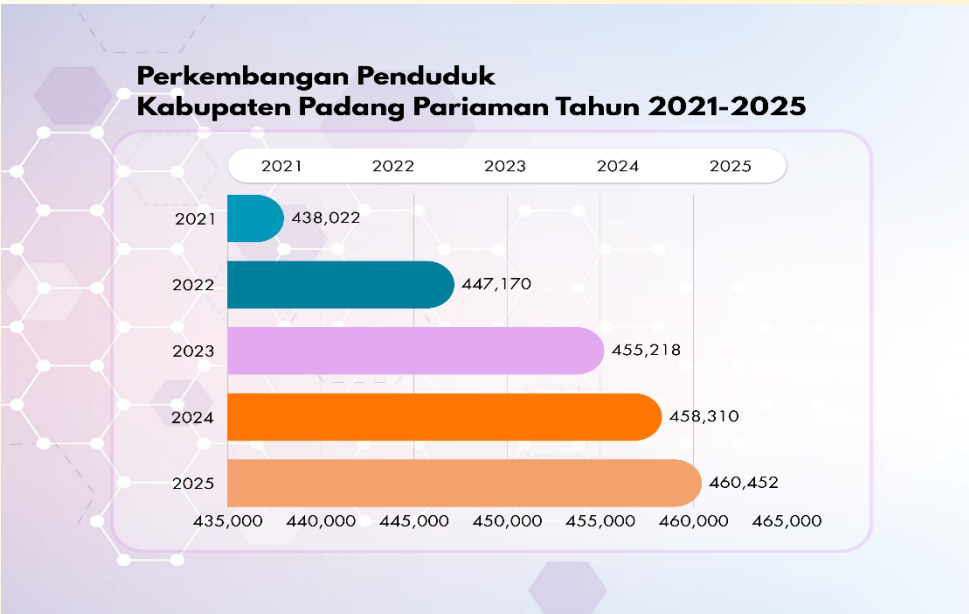
Jika dilihat perkembangan penduduk 4 tahun terakhir diketahui bahwa penduduk Kabupaten Padang Pariaman menunjukan peningkatan dari 438.022 pada tahun 2021 menjadi 460.452 pada tahun 2025. Untuk laju perkembangan penduduk Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.3
Perkembangan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2021–2025

Tahun	Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk	Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM 2)
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah			
2021	218.717	219.305	438.022	0,78	99,73	326
2022	223.792	223.378	447.170	2,09	100,19	333
2023	228.417	226.801	455.218	1,73	100,71	339
2024	230.615	227.695	458,310	1,73	100,91	342
2025	231.823	228.629	460.452	0,47	101,40	343

***Sumber**:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025*

Grafik 1.1
Perkembangan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2021-2025



***Sumber**: Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka, 2026*

1.2.3 Produk Domestik Regional

Produk Domestik Regional Bruto menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Dalam penyusunan PDRB dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu menurut lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya, sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Pada Tahun 2025, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Padang Pariaman sebesar 27.784,04 milyar rupiah, sedangkan untuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2025 (ADHK) terlihat sebesar 14.619,50 milyar rupiah. Nilai tersebut naik dibanding tahun sebelumnya karena adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2025 sebesar 1,74 persen. Angka ini menurun dibandingkan dengan Tahun 2024 yang bernilai 4,57 persen. Pertumbuhan terbanyak terjadi pada sektor jasa keuangan dan jasa lainnya dengan laju pertumbuhan masing-masing sebesar 8,63 persen dan 8,05 persen. Sedangkan Perkembangan lapangan usaha berdasarkan PDRB Kabupaten Padang Pariaman atas harga berlaku dan konstan ini dapat dilihat pada Grafik 1.2 dan Grafik 1.3 berikut ini :

Grafik 1.2
Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman
Atas Harga Berlaku Tahun 2022-2025



Sumber: *Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka, 2026*

Grafik 1.3
Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman
Atas Harga Konstan Tahun 2022-2025



Sumber *: Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka,* ***2026***

1.2.4 Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator makro yang digunakan untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi.Laju dari pertumbuhan ekonomi ini dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan data Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2025 sebesar 1,74 persen. Angka ini menurun dibandingkan dengan Tahun 2024 yang bernilai 4,57 persen. Pertumbuhan terbanyak terjadi pada sektor jasa keuangan dan jasa lainnya dengan laju pertumbuhan masing-masing sebesar 8,63 persen dan 8,05 persen. Sedangkan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan terendah adalah Konstruksi dengan pertumbuhan sebesar 4,49 persen.

Grafik 1.4
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2025



Sumber : *Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka,**2026***

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki struktur organisasi yang mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah terdiri dari :

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh :
   - Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama
   - Bagian Kesejahteraan Rakyat
   - Bagian Hukum

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan dibantu oleh :
   - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
   - Bagian Administrasi Pembangunan
   - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

c. Asisten Administrasi Umum dibantu oleh :
   - Bagian Umum
   - Bagian Organisasi
   - Bagian Protokol dan Dokumentasi Pimpinan
   - Bagian Perencanaan dan Keuangan

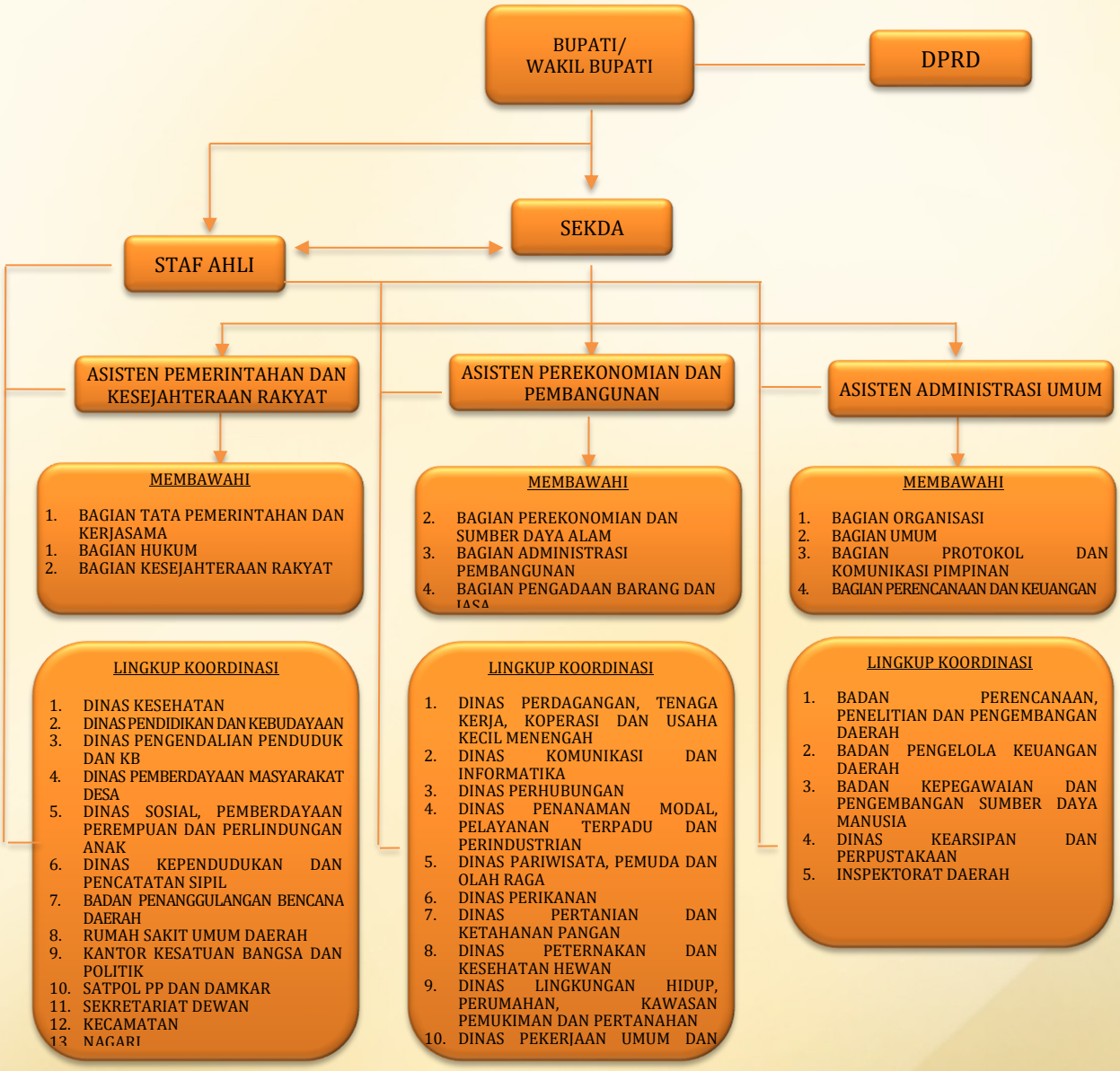
d. Staf Ahli terdiri dari :
   - Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
   - Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
   - Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya dan Sumber Daya Manusia

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotaterdiri dari :
   a. Bagian Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan
   b. Bagian Umum
   c. Bagian Hukum dan Persidangan
3. Inspektorat
4. Badan Daerah, terdiri dari :
   a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
   b. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
   c. Badan Pengelola Keuangan Daerah
   d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5. Dinas Daerah, terdiri dari :
   a. Dinas Kesehatan
   b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   c. Dinas Komunikasi dan Informatika
   d. Dinas Perhubungan
   e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   f. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
   g. Dinas Kearsipan danPerpustakaan
   h. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM
   i. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
   j. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
   k. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukimandan Pertanahan
   l. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

m. Dinas Periwisata, Pemuda dan Olah Raga
n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
o. Dinas Perikanan
p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
q. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8. 17 (Tujuh Belas) Kecamatan dan 103 (Seratus Tiga) Nagari.

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Pemerintah Daerah
Kabupaten Padang Pariaman



Sumber : *Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman*

1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas sangat menentukan dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2025, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 6.860 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 4.423 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 2.437 orang. Untuk Jumlah ASN Perempuan sebanyak 5.061 orang dan untuk Jumlah ASN laki-laki sebanyak 1.799 orang.

Tabel 1.4

Jumlah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	SD/Sederajat	2	2	4
2.	SLTP/Sederajat	21	2	23
3.	SLTA/Sederajat	144	71	215
4.	Diploma I	2	8	10
5.	Diploma II	14	31	45
6.	Diploma III	54	484	538
7.	Diploma IV	19	103	122
8.	Strata I	653	2.361	3.014
9.	Strata II	186	261	447
10.	Strata III	4	1	5
Jumlah		**1.099**	**3.324**	**4.423**

Sumber : *Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka, 2026*

Berdasarkan Tabel 1.4 di atas diketahui bahwa ASN di Kabupaten Padang Pariaman sebagian besar memiliki tingkat Pendidikan Strata I dengan jumlah 3.014 orang, diikuti Diploma IV sebanyak 122 orang dan Diploma III sebanyak 538 orang, Strata II sebanyak 447 orang dan Strata III sebanyak 5 orang. Tingkat pendidikan PNS ini menunjukan kualitas sumber daya manusia. Secara umum, kualitas PNS di Kabupaten Padang Pariaman sudah sangat baik dengan banyaknya PNS yang berpendidikan di atas SLTA sederajat mencapai 4.181 orang.

1.5 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

1.5.1 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan masyarakat di masa yang akan datang. RPJMD 2025-2029. Adapun yang menjadi Isu Strategis Daerah adalah sebagai berikut :

1. Tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas

Meskipun reformasi birokrasi telah dilaksanakan, akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah masih perlu ditingkatkan. Rendahnya keterbukaan informasi, pertanggungjawaban kinerja, serta pengelolaan keuangan dan asset daerah mempengaruhi kepercayaan publik dan efektivitas programpembangunan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan, pelaporan kinerja berbasis hasil, dan transparansi dalam pengambilan keputusan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan akuntabel.

Digitalisasi dan integrasi pelayanan publik masih belum optimal, sehingga efisiensi dan kualitas layanan kepada masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Keterbatasan infrastruktur digital, sistem yang belum terintegrasi, serta rendahnya literasi digital aparatur menjadi kendala dalam mempercepat transformasi layanan publik. Untuk itu, diperlukan percepatan implementasi digitalisasi layanan, integrasi sistem antar instansi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pelayanan publik lebih efektif, cepat, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

Lemahnya penerapan sistem berbasis merit menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan aparatur sipil negara di daerah. Kondisi ini menyebabkan kapasitas dan integritas ASN belum sepenuhnya terjaga, seleksi jabatan dan promosi karier belum selalu berbasis kompetensi, serta kualitas layanan publik berpotensi menurun. Oleh karena itu, perlu penguatan sistem manajemen ASN berbasis merit melalui penerapan prinsip kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahap rekrutmen, promosi, dan pengembangan karier, guna memastikan birokrasi yang profesional, efisien, dan akuntabel.

2. Peningkatan kualitas pendidikan dan cakupan layanan kesehatan

Peningkatan kualitas pendidikan serta perluasan cakupan layanan kesehatan merupakan isu strategis yang sangat esensial dalam mendorong pembangunan Kabupaten Padang Pariaman. Mutu pendidikan yang masih tergolong rendah disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain belum meratanya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh wilayah daerah, kurang optimalnya pelaksanaan kurikulum yang berorientasi pada pengembangan karakter dan literasi digital, minimnya program pengembangan profesi guru yang bersifat berkelanjutan, serta penyelenggaraan pendidikan vokasi yang belum dilaksanakan secara maksimal. Kondisi ini secara signifikan menghambat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yangunggul dan berdaya saing.

Selain itu, akses dan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Padang Pariaman juga

belum mencapai tingkat yang optimal. Keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan, distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, rendahnya kompetensi tenaga kesehatan, serta tingginya biaya pelayanan kesehatan menjadi kendala utama dalam penyelenggaraan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Akibatnya, derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan siklus hidupnya belum dapat tercapai secara menyeluruh, yang ditunjukkan oleh tingginya prevalensi stunting, angka kematian ibu yang masih signifikan, rendahnya usia harapan hidup, serta kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Disamping itu, upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular maupun tidak menular juga belum berjalan secara optimal.

Urgensi menjadikan peningkatan kualitas pendidikan dan cakupan layanan kesehatan sebagai isu strategis sangatlah penting, mengingat kedua sektor tersebut merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan secara signifikan akan memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan kompetitif, sehingga mampu mendukung percepatan Pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

3. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan anak

Pembangunan daerah yang berkelanjutan menuntut perhatian serius terhadap kesetaraan gender serta perlindungan terhadapperempuan dan anak. Di Kabupaten Padang Pariaman, masih dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan tingginya ketimpangan gender, serta belum optimalnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan. Kondisi ini berdampak pada masih terbatasnya partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun politik.

Selain itu, perlindungan terhadap anak juga masih menghadapi berbagai tantangan. Upaya pencegahan perkawinan usia anak, khususnya di bawah 19 tahun, belum berjalan maksimal sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak serta keberlangsungan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Fenomena ini juga sejalan dengan isu strategis nasional terkait penurunan angka perkawinan anak dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berdaya saing, dan berdaya tahan terhadap risiko sosial.

Oleh karena itu, penguatan kesetaraan gender dan perlindungan anak perlu menjadi fokus strategis pembangunan daerah. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas pembangunan keluarga, pemberdayaan perempuan di berbagai sektor kehidupan, serta penguatan sistem perlindungan anak yang komprehensif. Upaya tersebut tidak hanya mendukung tercapainya keadilan dan kesetaraan gender, tetapi juga menjadi landasan penting bagi terciptanya generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

4. Penguatan sektor perdagangan dan industri pengolahan

Sektor perdagangan dan industri pengolahan merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, di Kabupaten Padang Pariaman sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum terbangunnya sistem distribusi dan infrastruktur perdagangan yang memadai, rendahnya daya saing produk lokal, serta

terbatasnya promosi dan akses pasar. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya kontribusi sektor perdagangan dan industri pengolahan terhadap peningkatan nilai tambah produk serta perluasan kesempatan kerja.

Selain itu, lemahnya regulasi dan sistem perizinan usaha, minimnya kelembagaan dan kemitraan strategis, serta masih terbatasnya pemanfaatan inovasi dan teknologi dalam hilirisasi produk menyebabkan pelaku usaha, khususnya UMKM dan koperasi, belum mampu mengembangkan potensinya secara maksimal. Permasalahan ini semakin diperburuk oleh keterbatasan akses pembiayaan dan pendampingan usaha, serta rendahnya kompetensi pelaku usaha dalam manajemen, produksi, dan pemasaran.

Dengan demikian, penguatan sektor perdagangan dan industry pengolahan menjadi isu strategis yang harus diprioritaskan melalui pembangunan infrastruktur distribusi dan perdagangan, peningkatan kualitas dan daya saing produk lokal, serta penguatan kelembagaan dan kemitraan pelaku usaha. Di samping itu, dorongan terhadap pemanfaatan teknologi, inovasi, dan akses pembiayaan yang lebih luas industri pengolahan yang lebih berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

5. Pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal

Pariwisata merupakan salah satu sektor potensial yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja. Kabupaten Padang Pariaman memiliki beragam potensi wisata alam, budaya, dan kuliner yang dapat dikembangkan menjadi destinasi unggulan. Namun, pengelolaan dan promosi destinasi wisata tersebut belum optimal sehingga daya tarik dan jangkauan pasar wisata masih terbatas. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh terbatasnya infrastruktur pendukung pariwisata, seperti aksesibilitas, fasilitas umum, serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

Selain itu, keberadaan pelaku ekonomi kreatif dan pelaku wisata lokal belum sepenuhnya diberdayakan. Minimnya pelatihan dan pendampingan membuat mereka belum mampu meningkatkan kualitas layanan dan produk wisata yang berdaya saing. Kurangnya kolaborasi antara pemerintah daerah, komunitas, dan pelaku usaha juga menghambat terbentuknya ekosistem pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Padahal, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan destinasi wisata yang tidak hanya menarik bagi wisatawan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.

Oleh karena itu, pengembangan pariwisata di Kabupaten Padang Pariaman perlu difokuskan pada penguatan pengelolaan dan promosi destinasi unggulan, pembangunan infrastruktur pendukung, pemberdayaan pelaku wisata lokal dan ekonomi kreatif melalui pelatihan serta pendampingan, serta penguatan kolaborasi multipihak. Upaya ini diharapkan mampu menjadikan pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

6. Pemerataan akses terhadap infrastruktur dasar

Ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai merupakan prasyarat penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah. Di Kabupaten Padang Pariaman, pemerataan akses terhadap infrastruktur dasar masih menjadi tantangan.

Pembangunan jalan dan jembatan belum merata, sehingga konektivitas dan integrasi antarwilayah belum optimal. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya mobilitas masyarakat dan distribusi barang maupun jasa, serta menghambat pemerataan Pembangunan antarwilayah.

Selain itu, akses masyarakat terhadap layanan dasar masih relatif rendah. Cakupan air minum perpipaan dan infrastruktur sanitasi layak belum menjangkau seluruh masyarakat, sementara pengelolaan persampahan belum sesuai standar. Ketersediaan perumahan layak dan terjangkau juga masih terbatas, yang berdampak pada rendahnya kualitas permukiman. Di sisi lain, pengelolaan sumber daya air dan air baku belum optimal sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, terutama di wilayah pedesaan dan daerah rawan bencana.

Isu ini menjadi sangat penting mengingat infrastruktur dasar berfungsi sebagai fondasi pembangunan yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tanpa pemerataan akses, kesenjangan antarwilayah akan semakin melebar, kualitas sumber daya manusia terhambat, dan potensi ekonomi lokal sulit berkembang. Peningkatan infrastruktur dasar tidak hanya berperan sebagai layanan publik, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mempercepat transformasi sosial-ekonomi, memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

7. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap berbagai bencana, baik geologis maupun hidrometeorologis, seperti gempa bumi, banjir, longsor, abrasi pantai, dan cuaca ekstrem. Kondisi ini menuntut peningkatan kapasitas resiliensi daerah agar mampu mengurangi risiko, meminimalkan kerugian, serta mempercepat pemulihan pascabencana. Namun, tingkat resiliensi bencana di Kabupaten Padang Pariaman masih rendah. Hal ini terlihat dari terbatasnya infrastruktur pengurangan risiko bencana, rendahnya kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah, serta belum terintegrasinya kebijakan pembangunan dengan strategi mitigasi risiko bencana.

Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim masih rendah, sehingga upaya pengurangan risiko bencana belum berjalan optimal di tingkat komunitas. Sistem manajemen bencana dan peringatan dini juga belum berfungsi secara maksimal, yang menyebabkan potensi keterlambatan dalam respons terhadap bencana. Kelembagaan dan koordinasi antarinstansi dalam penanggulangan bencana pun masih belum optimal, sehingga penanganan bencana seringkali menghadapi kendala koordinasi dan keterbatasan kapasitas.

Isu ini menjadi semakin penting mengingat perubahan iklim secara global telah meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologis. Pada tingkat nasional, resiliensi bencana dan adaptasi perubahan iklim menjadi prioritas pembangunan yang selaras dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Oleh karena itu, Kabupaten Padang Pariaman perlu memperkuat strategi resiliensi bencana melalui pembangunan infrastruktur pengurangan risiko bencana, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat, serta integrasi

mitigasi risiko ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Upaya ini akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

8. Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan

Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan daerah, mengingat Kabupaten Padang Pariaman memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana alam dan dampak perubahan iklim. Saat ini, tingkat resiliensi lingkungan dan bencana masih rendah. Hal ini ditandai dengan masih terbatasnya infrastruktur pengurangan risiko bencana, rendahnya kesiapsiagaan, serta belum terintegrasinya kebijakan pembangunan dengan strategi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim. Kondisi tersebut menyebabkan daya dukung dan daya tampung lingkungan berisiko menurun, serta menghambat pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim. Kondisi tersebut menyebabkan daya dukung dan daya tampung lingkungan berisiko menurun, serta menghambat pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.

Kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana dan pentingnya pelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan. Sistem manajemen bencana dan peringatan dini belum berjalan optimal, sehingga respons terhadap ancaman lingkungan dan bencana sering kali terlambat. Selain itu, kapasitas kelembagaan dan koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan lingkungan dan penanggulangan bencana masih terbatas. Hal ini berdampak pada belum maksimalnya upaya konservasi, rehabilitasi lingkungan, serta pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Oleh karena itu, Kabupaten Padang Pariaman perlu memperkuat pengelolaan lingkungan dengan strategi terpadu, meliputi Pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta integrasi mitigasi bencana ke dalam perencanaan pembangunan. Dengan langkah tersebut, diharapkan tercapai keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan, sekaligus mewujudkan Pembangunan daerah yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

9. Penguatan nilai adat, budaya dan kearifan lokal

Adat, budaya, dan kearifan lokal merupakan identitas serta kekuatan sosial yang berperan penting dalam membentuk karakter masyarakat, menjaga kohesi sosial, serta mendukung Pembangunan yang berkelanjutan. Namun, di Kabupaten Padang Pariaman internalisasi nilai-nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat belum berjalan optimal. Hal ini tercermin dari belum terintegrasinya nilai-nilai budaya dalam sistem pendidikan formal, sehingga generasi muda belum sepenuhnya memahami dan menghayati warisan budaya daerah.

Selain itu, fungsi surau dan komunitas adat sebagai pusat pewarisan nilai dan pengetahuan budaya mengalami penurunan. Tingginya pengaruh modernisasi dan globalisasi turut menggeser pola pikir dan gaya hidup masyarakat, yang berpotensi melemahkan ikatan sosial dan memudarkan identitas budaya lokal. Kondisi ini diperburuk oleh masih minimnya regulasi daerah yang secara khusus mendukung pelestarian budaya

lokal serta pemberdayaan lembaga adat. Akibatnya, peran adat dan budaya dalam membangun masyarakat yang berkarakter, religius, dan harmonis belum dimanfaatkan secara maksimal.

Dalam konteks pembangunan daerah, filosofi "adat basandi syara, syara' basandi Kitabullah" menjadi landasan penting dalam menjaga harmonisasi antara adat dan agama, sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat Minangkabau. Filosofi ini tidak hanya menegaskan keterkaitan adat dan agama sebagai pedoman hidup, tetapi juga menjadi instrumen moral dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi.

1.5.2 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan dasar utama dalam penyusunan RPJMD, karena mencerminkan kondisi faktual dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Padang Pariaman di berbagai sektor. Identifikasi permasalahan dilakukan secara sistematis melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta *top-down dan bottomup*, dengan mengacu pada evaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya, capaian indikator makro dan sektoral, serta aspirasi masyarakat dan isu strategis. Permasalahan dirumuskan berdasarkan misi pembangunan daerah, sehingga menjadi pijakan dalam perumusan tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, dan program prioritas selama periode 2025–2029. Adapun yang menjadi Permasalahan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan Daerah terkait dengan Misi 1 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas merupakan prioritas utama pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman. Namun, masih terdapat berbagai kendala, seperti belum optimalnya tata kelola yang efektif, akuntabel, dan berintegritas, ditandai dengan rendahnya penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara. Pemanfaatan hasil riset dan inovasi pemerintah daerah juga belum maksimal, sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengambilan kebijakan berbasis bukti belum sepenuhnya tercapai. Selain itu, transformasi digital layanan publik masih terbatas akibat infrastruktur yang kurang memadai, kurangnya integrasi system informasi antar perangkat daerah, serta rendahnya literasi digital aparatur dan masyarakat. Kondisi ini menghambat layanan publik yang cepat, mudah, dan transparan. Oleh karena itu, penguatan tata Kelola pemerintahan menjadi kunci dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2. Permasalahan Daerah terkait dengan Misi 2 yaitu Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi penting dalam mendukung kemajuan Kabupaten Padang Pariaman, namun tantangan signifikan masih harus diatasi. Akses dan pemerataan pendidikan belum optimal, disertai mutu pendidikan yang masih rendah, sehingga berdampak pada keterbatasan kualitas SDM. Selain itu, akses dan kualitas layanan kesehatan belum memadai, sehingga derajat kesehatan masyarakat

sesuai siklus hidup belum tercapai sepenuhnya. Kualitas keluarga, kesetaraan gender, dan perlindungan Perempuan serta anak juga masih perlu ditingkatkan. Pencapaian kesejahteraan sosial yang adil dan merata menghadapi kendala dalam pemerataan akses dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, upaya penguatan di berbagai bidang tersebut menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

3. Permasalahan Daerah terkait dengan Misi 3 yaitu Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata

   Pembangunan ekonomi yang inklusif, maju, dan merata menjadi fokus utama dalam mendorong kemajuan Kabupaten Padang Pariaman. Namun, sejumlah permasalahan masih menjadi tantangan. Kontribusi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah masih rendah, sementara daya saing sektor perdagangan juga terbatas. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta industri belum optimal, dan nilai tambah dari sektor pariwisata serta ekonomi kreatif masih kurang maksimal. Selain itu, iklim investasi yang kompetitif belum tercipta secara menyeluruh, ketersediaan dan cadangan pangan masih terbatas, dan kesempatan kerja serta produktivitas tenaga kerja belum mencapai potensi penuh. Tingkat kemandirian desa atau nagari juga masih rendah, sehingga pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah belum sepenuhnya terwujud.

4. Permasalahan Daerah terkait dengan Misi 4 yaitu Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan

   Peningkatan kualitas dan keberlanjutan infrastruktur menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman. Namun, akses masyarakat terhadap infrastruktur yang berkualitas dan layak masih tergolong rendah, sehingga kebutuhan dasar dan pelayanan publik belum dapat dinikmati secara merata. Pengelolaan lingkungan hidup juga belum optimal, yang berkontribusi pada menurunnya kualitas lingkungan serta berkurangnya kapasitas daerah dalam menghadapi tekanan ekologis. Selain itu, tingkat resiliensi terhadap bencana masih rendah, baik dari segi kesiapsiagaan masyarakat, kapasitas kelembagaan, maupun infrastruktur mitigasi bencana, sehingga daerah rentan terhadap risiko bencana alam.

5. Permasalahan Daerah terkait dengan Misi 5 yaitu Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya

   Permasalahan pembangunan daerah terkait Misi 5 mencakup belum terwujudnya lingkungan sosial yang religius, aman, dan harmonis, sehingga interaksi sosial dan kualitas kehidupan masyarakat belum sepenuhnya kondusif. Internalisasi nilai-nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat juga belum optimal, sehingga potensi pembentukan identitas dan karakter sosial daerah belum maksimal. Selain itu, pelestarian dan perlindungan cagar budaya masih belum berjalan secara optimal, sehingga warisan budaya daerah berisiko mengalami kerusakan atau kehilangan nilai historisnya.



Bab II
Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Kabupaten Padang Pariaman dan diimplementasikan dalam bentuk Perjanjian Kinerja. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025. Pada tahun 2025 ini, Perencanaan kinerja Kabupaten Padang Pariaman berada pada fase krusial yang menjembatani akhir masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021-2026 dengan masa awal transisi menuju RPJMD periode 2025-2029. Dalam kerangka ini, pelaporan kinerja disusun dengan mensinergikan capaian target-target akhir dari periode sebelumnya sebagai fondasi keberlanjutan, sekaligus melakukan adaptasi terhadap arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan transisi. Penyelarasan ini bertujuan untuk memastikan tidak adanya kekosongan (gap) sasaran strategis, sehingga setiap program kerja tetap memiliki landasan hukum dan relevansi terhadap prioritas daerah yang sedang berkembang.

Seluruh dinamika transisi antara kedua periode RPJMD tersebut kemudian dioperasionalkan secara konkret ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025. Dokumen Perjanjian Kinerja tersebut tidak hanya menjadi alat kendali manajerial untuk memantau progres capaian secara periodik, tetapi juga berperan sebagai basis akuntabilitas publik untuk membuktikan bahwa masa transisi tidak menghambat produktivitas organisasi. Dengan demikian, sinkronisasi antara dokumen perencanaan jangka menengah dan dokumen perjanjian kinerja tahunan menjadi kunci dalam menjaga ritme pencapaian visi dan misi daerah secara berkesinambungan.

2.1 VISI DAN MISI

2.1.1 VISI

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Padang Pariaman tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan saja, tetapi juga sebagai landasan dalam penyusunan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, hingga kegiatan pembangunan yang terukur dan berorientasi pada hasil. Visi ini menjadi kompas arah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita bersama menuju kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 adalah:

PADANG PARIAMAN MAJU DAN SEJAHTERA

Visi Padang Pariaman Maju dan Sejahtera mengandung makna yang mencerminkan harapan dan tujuan utama pembangunan daerah selama lima tahun kedepan. Visi ini menjadi komitmen pemerintah daerah untuk mendorong transformasi menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, dengan fokus pada kemajuan daerah yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

- MAJU

Mencerminkan tekad Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk menciptakan daerah yang dinamis, kompetitif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. SEJAHTERA Pembangunan Padang Pariaman ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman lebih maju dalam berbagai aspek pembangunan termasuk :

1. Ekonomi : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan. Ini mencakup upaya untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Pendidikan dan Kesehatan, Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan. Program-program seperti Beasiswa Angkat Generasi Indonesia Terdepan (BANGKIT) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Sejahtera (JAMSEHAT) menjadi bagian dari strategi ini.
3. Tata Kelola Pemerintahan, Membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Hal ini termasuk penerapan teknologi dalam pemerintahan (smart city) untuk meningkatkan efisiensi layanan publik.

- SEJAHTERA

Tujuan akhir dari proses pembangunan, yaitu tercapainya kondisi kehidupan masyarakat yang layak, adil, dan bermartabat. Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah untuk meningkatkan kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak, meliputi :

1. Kesejahteraan Ekonomi : Masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, perumahan, dan pendidikan, termasuk juga pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.
2. Kesehatan dan Pendidikan, Kesejahteraan juga berarti adanya akses yang baik terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas, sehingga masyarakat dapat hidup sehat dan berpendidikan.
3. Kehidupan Sosial dan Budaya, Sejahtera juga mencakup aspek sosial dan budaya, di mana masyarakat dapat menjalani kehidupan yang harmonis, menjaga tradisi, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan social.

2.1.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Kabupaten Padang Pariaman telah menetapkan 5 (lima) misi yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 sebagai berikut :



2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN

Transisi periode perencanaan pembangunan daerah merupakan momentum krusial untuk memastikan keberlanjutan visi besar daerah. Dalam upaya menjaga kesinambungan tersebut, dilakukan pemetaan terhadap Tujuan dan Sasaran antara RPJMD Periode 2021-2026 dengan RPJMD Periode 2025-2029.

Langkah ini bukan sekadar pemenuhan administratif, melainkan upaya strategis untuk melihat sejauh mana capaian pada periode sebelumnya dilanjutkan, diperkuat, atau dilakukan penyesuaian terhadap dinamika zaman. Pada periode 2021-2026, fokus ditekankan pada pemulihan dan penguatan fondasi pasca-pandemi, sementara pada periode 2025-2029, arah kebijakan mulai bertransformasi menuju akselerasi daya saing dan integrasi ekonomi yang lebih inklusif. Berikut adalah tabel komparasi yang merinci pergeseran serta penguatan Tujuan dan Sasaran antara kedua dokumen perencanaan tersebut:

Tabel 2.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Jangka Menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Visi : Padang Pariaman Berjaya (unggul BErkelanjutan, Religius, seJAhtera dan berbudaYA)		
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**
Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban umum.	Terwujudnya kepribadian masyarakat yang religius beradat dan berbudaya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya
		Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang.	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi
		Meningkatnya Infrastruktur Sumber daya Air
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman
		Meningkatnya pemanfaatan kawasan sesuai dengan perencanaan tata ruang
Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasiskan pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan ,Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata
		Berkurangnya jumlah penduduk miskin
		Peningkatan daya beli masyarakat
		Kemandirian Desa
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakan sektor pendidikan non formal	Membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan	Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat
		Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar
		Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing
		Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga daerah
Mewujudkan tata kelola	Terwujudnya reformasi	Birokrasi yang bersih dan akuntabel

pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipasif dan transparan	birokrasi yang efektif dan efisien	Birokrasi yang efisien dan efektif (kapabel)
		Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayan masyarakat	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
		Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
		Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum
		Peningkatan pengelolaan air limbah domestik
		Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni
		Penguatan layanan kebencanaan
		Pengurangan resiko kebakaran
		Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat
		Peningkatan penanganan masalah sosial
Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.	Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pembangunan	Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah
	Meningkatkan nilai investasi/penanaman modal	Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman

***Sumber** : RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Periode 2021-2026*

Meskipun memiliki keterkaitan erat, rencana periode 2025-2029 melakukan penajaman pada beberapa sektor strategis guna merespons dinamika lingkungan global dan regional yang kian dinamis. Berikut adalah rincian Tujuan dan Sasaran untuk periode RPJMD Tahun 2025-2029 :

Tabel 2.2
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Jangka Menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Visi : MEMBANGUN PADANG PARIAMAN MAJU DAN SEJAHTERA		
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas
		Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah
		Meningkatnya transformasi digital layanan publik yang handal
Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berdaya Saing dan Inklusif	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing
		Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup
		Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak
		Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusi
Mewujudkan Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap

Inklusif, Maju dan Merata	yang Maju dan Inklusif	perekonomian daerah
		Meningkatnya kontribusi perdagangan, UMKM dan industri berbasis sektor unggulan
		Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif
		Meningkatnya Kemudahan Investasi
		Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau
		Meningkatnya kesempatan dan produktifitas tenaga kerja
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa
Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, berketahanan terhadap bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas
		Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup yang berkelanjutan
		Menurunnya resiko bencana
Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Tenteram Dan Harmonis Dalam Keberagaman Agama	Meningkatnya rasa aman dan kerukunan antarumat beragama dalam kehidupan masyarakat
		Meningkatnya pelestarian cagar dan warisan budaya

***Sumber** : RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Periode 2025-2029*

GAMBAR 2.1
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025-2029



2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah kebijakan merupakan cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dirancang secara konseptual, realistis, analitik, dan komprehensif. Strategi yang akan diwujudkan dalam bentuk suatu kebijakan dan program merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi pembangunan dan arah kebijakan sangat erat kaitannya karena arah kebijakan pada dasarnya merupakan keputusan dan intervensi pemerintah untuk dapat melaksanakan strategi pembangunan yang telah disusun. Dengan mengaitkan antara strategi dan arah kebijakan tersebut, maka pencapaian sasaran pembangunan akan menjadi lebih terjamin.



Gambar 2.2
Bupati Padang Pariaman dampingi Presiden tinjau lokasi terdampak bencana dan resmikan Jembatan Bailey Padang Mantuang di Padang Pariaman

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 disusun untuk menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan daerah secara efektif, efisien, terarah, dan terukur. Arah kebijakan ini merupakan turunan langsung dari visi, misi, tujuan, dan sasaran kepala daerah yang telah ditetapkan, serta memperhatikan isu strategis daerah, potensi lokal, dan tantangan global yang berkembang. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029, yaitu "Padang Pariaman Maju dan Sejahtera", telah ditetapkan sejumlah misi pembangunan daerah. Pada tahap pertama perencanaan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman merujuk pada kerangka pembangunan jangka menengah yang berfokus pada penuntasan target-target makro daerah. Dokumen ini menjadi pedoman utama dalam memastikan keberlanjutan program pembangunan yang telah berjalan, dengan penekanan pada peningkatan kualitas kehidupan beragama, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik. Adapun tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Jangka Menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
1.1	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama	Indeks Kesolehan Sosial (IKS)	1.1.1	Meningkatkan Kualitas Pemahaman Dan Pengalaman Ajaran Agama	Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah	1.1.1.1	Meningkatkan nilai-nilai keimanan kepada masyarakat melalui dakwah dan pendidikan yang berfokus kepada pengamalan nilai-nilai agama	1.1.1.1.1	Penguatan Tata kehidupan masyarakat agamais dan berbudaya
			1.1.2	Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	1.1.2.1	Melakukan pembinaan terhadap penerapan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah bagi generasi muda.	1.1.2.1.1	Peningkatan kehidupan sosial yang harmonis dalam suasana multy culture
			1.1.3	Meningkatnya Ketertiban Umum/Stabilitas	Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah	1.1.3.1	Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan	1.1.3.1.1	Penguatan wawasan kebangsaan, toleransi serta kemitraan dengan masyarakat dan instansi lainnya
2.1	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	2.1.1	Meningkatnya Pelestarian Warisan Cagar Budaya	Persentase Warisan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	2.1.1.1	Melakukan pembinaan terhadap penerapan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah bagi generasi muda.	2.1.1.1.1	Peningkatan Pemahaman Sejarah, Seni tradisional dan Warisan Budaya
					Persentase Warisan Cagar Budaya Tak Benda Yang Dilestarikan	2.1.1.2	Melakukan pembinaan terhadap penerapan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah bagi generasi muda.	2.1.1.2.1	Peningkatan Pemahaman Sejarah, Seni tradisional dan Warisan Budaya
3.1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	3.1.1	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayah	Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang	3.1.1.1	Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan	3.1.1.1.1	Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten

							Persentase Ketaatan RTRW	3.1.1.3	Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	3.1.1.3.1	Penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
							Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	3.1.1.4	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten	3.1.1.4.1	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
4.1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		Pertumbuhan Ekonomi	4.1.1	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi		PDRB Income Per Kapita	4.1.1.1	Meningkatkan produktifitas perekonomian masyarakat	4.1.1.1.1	Peningkatan kapasitas pelaku usaha perekonomian masyarakat
							Pengeluaran Per Kapita	4.1.1.1	Meningkatkan produktifitas perekonomian masyarakat	4.1.1.1.1	Peningkatan kapasitas pelaku usaha perekonomian masyarakat
5.1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		Pertumbuhan Ekonomi	5.1.1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat		Rata-Rata Lama Sekolah	5.1.1.1	Meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan	5.1.1.1.1	Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi
6.1	Meningkatnya Implementasi reformasi birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	6.1.1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel		Opini BPK atas LKPD	6.1.1.1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	6.1.1.1.1	Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis IT yang Terintegrasi
								6.1.1.2	Meningkatkan pengelolaan barang milik daerah	6.1.1.2.1	Peningkatan perencanaan pemanfaatan dan inventarisasi aset
							Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	5.1.1.3	Meningkatkan kualitas pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan	6.1.1.3.1	Pengintegrasian perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan berbasis IT
				6.1.2	Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel		Indeks Merit System	6.1.2.1	Meningkatkan profesionalitas aparatur daerah	6.1.2.1.1	Peningkatan kapasitas aparatur dan Penempatan Sumber Daya Aparatur sesuai Analisis Jabatan
										6.1.2.1.2	Peningkatan sistem manajemen kepegawaian
										6.1.2.1.3	Peningkatan Budaya kerja yang profesional
							Indeks SPBE	6.1.2.2	Meningkatkan infrasturktur e-Gov yang terintegrasi	6.1.2.2.1	Peningkatan sarana dan prasarana IT
				6.1.3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kualitas Pelayanan Publik	6.1.3.1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	6.1.3.1.1	Peningkatan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik
							Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	6.1.3.1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	6.1.3.1.1	Peningkatan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik
7.1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		Pertumbuhan Ekonomi	7.1.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Angka usia harapan hidup	7.1.1.1	Meningkatkan Capaian SPM Bidang Kesehatan	7.1.1.1.1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan
								7.1.1.2	Meningkatkan Kualitas dan	7.1.1.2.1	Peningkatan Pemenuhan Tenaga

								Kuantitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Kesehatan Sesuai standar
							7.1.1.3	Meningkatkan Kualitas sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman	7.1.1.3.1	Peningkatkan Pemenuhan Penyediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman
							7.1.1.4	Meningkatkan Budaya Hidup Sehat	7.1.1.4.1	Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
						Prevalensi Stunting	7.1.1.5	Menurunkan angka prevalensi stunting	7.1.1.5.1	pemetaan program, kegiatan dan sumber pembiayaan terkait percepatan pencegahan anak kerdil (stunting) hingga tingkat Nagari
									7.1.1.5.2	Percepatan penyusunan kebijakan dan melaksanakan kampanye perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi untuk percepatan pencegahan anak kerdil
									7.1.1.5.3	Peningkatan peran Nagari/Kelurahan dalam melakukan Konvergensi
8.1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		Pertumbuhan Ekonomi	8.1.1	Meningkatnya Investasi di Daerah	Persentase Pertumbuhan Investasi	8.1.1.1	Meningkatkan promosi dan kemitraan investasi	8.1.1.1.1	Peningkatan promosi investasi di sektor primer dan jasa berbasis IT
							8.1.1.2	Meningkatkan pelayanan investasi	8.1.1.2.1	Peningkatan kemudahan investasi berbasis IT dengan memperhatikan kesesuaian rencana tata ruang dan kearifan lokal
				8.1.2	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB	8.1.2.1	Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi komoditi unggulan dan	8.1.2.1.1	Peningkatan pemberdayaan petani pada sektor komoditi unggulan

									sumber daya yang tersedia di Kabupaten Padang Pariaman		
								8.1.2.2	Meningkatkan hilirisasi produktivitas perikanan tangkap	8.1.2.2.2	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap
										8.1.2.2.3	Pengoptimalan perikanan budidaya melalui pengembangan kawasan budidaya terpadu
										8.1.2.2.3	Peningkatan sarana dan prasarana produksi pengolahan ikan serta perluasan pemasaran produk hasil perikanan
								8.1.2.3	Mengembangkan pusat perdagangan dan terminal terpadu sebagai sentra ekonomi masyarakat	8.1.2.3.1	Peningkatan sarana dan prasarana di pusat perdagangan
								8.1.2.4	Mengembangkan potensi wilayah dengan klasterisasi industri	8.1.2.4.1	Pengembangan Pusat pertumbuhan baru sesuai dengan potensi wilayah masingmasing

***Sumber** : RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Periode 2021-2026*

Sejalan dengan dimulainya tahapan perencanaan periode baru, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melakukan reorientasi kebijakan yang berfokus pada transformasi tata kelola dan penguatan daya saing daerah. Dokumen RPJMD periode ini melakukan penajaman terhadap indikator-indikator pembangunan agar lebih relevan dengan tantangan terkini.

Langkah ini diambil sebagai bentuk adaptasi untuk menyelaraskan baseline data makro terbaru serta mengintegrasikan mandat pembangunan nasional ke dalam visi daerah. Penjabaran mengenai tujuan, sasaran, serta indikator kinerja strategis yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Jangka Menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran	Arah Kebijakan		Strategi	
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing	Indeks Reformasi Birokrasi	1.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas	1.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja dan terukur
					Nilai SAKIP Pemerintah Daerah			2.	Menata ulang kelembagaan dan restrukturisasi organisasi perangkat daerah
					Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK			3.	Menguatkan efektifitas pengelolaan keuangan dan asset daerah
								4.	Meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan pengawasan berbasisrisiko
								5.	Memperkuat budaya integritas dan penerapan zona integritas
								6.	Mengembangkan pusat layanan masyarakat yang terintegrasi di Kecamatan
								7.	Mengoptimalkan pengelolaan pendapatan
						2.	Penerapan prinsip meritokrasi	1.	Menerapkan prinsip merit dalam rekrutmen, promosi, dan mutasi ASN
								2.	Mengoptimalkan sistem *reward and punishment* berbasis kinerja
								3.	Mengembangkan sistem manajemen kinerja yang terintegrasi dan berbasis bukti (*evidence-based*)
								4.	Meningkatkan kualitas sistem penilaian kinerja ASN

								5.	Mendorong budaya kerja ASN yang berorientasi pada pelayanan publik
								6.	Menyusun dan memperkuat kebijakan serta regulasi
								7.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pengembangan kompetensi ASN
			1.2	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah	1.	Penguatan pemanfaatan hasil riset dan inovasi berbasis kebutuhan daerah	1.	Mengembangkan teknologi tepat guna dan membangun ekosistem inovasi yang inklusif dan kolaboratif.
								2.	Mendorong perumusan kebijakan pembangunan daerah berbasis riset, kajian, dan data
								3.	Memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan dunia usaha (*triple helix*)
								4.	Meningkatkan kapasitas daerah melalui pendirian pusat inovasi dan pelatihan kreativitas
								5.	Mengembangkan riset terapan yang sesuai dengan kebutuhan sektoral dan potensi ekonomi lokal
								6.	Mendorong pengembangan budaya inovasi masyarakat melalui program Nagari Inovatif
			1.3	Meningkatnya transformasi digital layanan publik yang handal	Indeks SPBE	1.	Transformasi digital layanan publik	1.	Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi yang andal dan aman
								2.	Memperkuat keamanan siber dan perlindungan data dalam sistem layanan digital
								3.	Meningkatkan literasi digital aparatur dan masyarakat guna mengoptimalkan pemanfaatan layanan publik digital.
								4.	Mengembangkan layanan publik digital yang responsif,

									transparan, ramah pengguna, serta adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
								5.	Meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik
								6.	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan data sectoral untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti
								7.	Mengoptimalkan dashboard data sektoral terintegrasi
2.	Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berdaya Saing dan Inklusif	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	2.1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing	Rata-Rata Lama Sekolah	1.	Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan	1.	Meningkatkan pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu
					Harapan Lama Sekolah			2.	Meningkatkan penyediaan seragam gratis bagi siswa SD dan SMP
					Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asessment tingkat Nasional:			3.	Meningkatkan pemerataan akses pendidikan antar wilayah
					-Literasi			4.	Meningkatkan pemerataan akses pendidikan antar wilayah
					-Numerasi			5.	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah
								6.	Meningkatkan literasi dan budaya baca masyarakat
								7.	Memperluas jangkauan layanan literasi dan perpustakaan berbasis inklusi sosial
								8.	Meningkatkan akses dan partisipasi layanan PAUD yang berkualitas dan inklusif.
						2.	Peningkatan mutu pendidikan berorientasi pada kompetensi, karakter, dan daya saing	1.	Meningkatkan kompetensi pendidik dan kualitas pembelajaran berbasis kompetensi
								2.	Menguatkan pendidikan karakter untuk membentuk profil pelajar

									yang berintegritas dan berdaya saing
								3.	Meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan
								4.	Mengintegrasikan program literasi dan budaya baca dalam ekosistem pembelajaran
								5.	Mengembangkan pendidikan vokasi dan pelatihan yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja
			2.2	Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup	Angka Harapan Hidup	1.	Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan	1.	Memperkuat kapasitas dan peran kader kesehatan dalam mendukung layanan kesehatan masyarakat
					Prevalensi Stunting			2.	Memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dengan pembangunan rumah sakit daerah tipe D
					Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)			3.	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi berbasis keluarga dan terintegrasi
								4.	Meningkatkan akses dan koordinasi layanan rujukan
						2.	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat sesuai siklus hidup	1.	Meningkatkan upaya promotif preventif berbasis Nagari
								2.	Memperkuat upaya pencegahan penyakit menular dan tidak menular
								3.	Meningkatkan intervensi gizi seimbang untuk penanggulangan stunting dan gizi buruk anak
								4.	Meningkatkan kesehatan ibu dan remaja melalui upaya promotif–preventif
								5.	Meningkatkan akses layanan kesehatan lansia melalui kunjungan langsung Dokter dan

									Perawat Keliling
								6.	Memperkuat layanan kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan untuk pencegahan stunting
								7.	Meningkatkan ketahanan gizi keluarga dan masyarakat secara berkelanjutan
						3.	Penguatan sistem ketahanan kesehatan daerah secara menyeluruh	1.	Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan koordinasi lintas program serta lintas sektor
								2.	Memperkuat komitmen dan koordinasi pemangku kepentingan
								3.	Mendorong penguatan layanan kesehatan primer dan rujukan
								4.	Memperluas akses layanan kesehatan melalui pemberian BPJS gratis
			2.3	Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Keluarga	1.	Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1.	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga
					Indeks Pembangunan Gender (IPG)			2.	Meningkatkan partisipasi keluarga melalui program pembinaan keluarga dan pusat informasi remaja.
					Indeks Ketimpangan Gender			3.	Menguatkan sistem data dan perencanaan pembangunan berbasis keluarga dan bukti.
					Indeks Perlindungan Anak			4.	Mengembangkan kemitraan lintas sektor
						2.	Penguatan perlindungan perempuan dan anak	1.	Meningkatkan partisipasi dan kapasitas perempuan dalam pendidikan, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan
								2.	Mengarusutamakan perspektif gender dalam seluruh siklus kebijakan pembangunan daerah
								3.	Meningkatkan edukasi

									kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan usia anak
								4.	Memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan perkawinan anak
								5.	Mengembangkan sistem perlindungan anak berbasis keluarga, komunitas, dan kebijakan lokal yang inklusif dan adaptif
								6.	Membangun sistem informasi digital terpadu untuk pelaporan, pemantauan, dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk perkawinan anak
			2.4	Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusi	Indeks Kesejahteraan Sosial	1.	Penguatan sistem perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif	1.	Meningkatkan layanan terpadu dan sistem perlindungan sosial yang adil, inklusif dan merata
								2.	Memperluas akses rumah layak huni, pendidikan inklusif, dan bantuan sosial
								3.	Memperkuat koordinasi lintas lembaga dan sektor dalam pemberdayaan sosial serta perlindungan masyarakat
								4.	Memperkuat sistem data terpadu kesejahteraan sosial
3.	Meningkatnya Perekonomian Daerah yang Maju dan Inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3.1	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap perekonomian daerah	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	1.	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dan peternakan	1.	Mendorong diversifikasi komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi
		PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)						2.	Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian

		Eksport Barang dan Jasa						3.	Memperkuat pengendalian kesehatan hewan dan layanan veteriner
		Gini Ratio						4.	Mengembangkan kelembagaan petani dan pelaku usaha serta mendorong regenerasi
		Tingkat Kemiskinan						5.	Meningkatkan akses pembiayaan dan kemitraan usaha
						2.	Pengembangan sektor perikanan untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi biru	1.	Meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan
								2.	Meningkatkan daya saing, nilai tambah, dan hilirisasi produk perikanan
								3.	Meningkatkan akses permodalan dan pembiayaan bagi pelaku usaha perikanan
								4.	Meningkatkan kelembagaan pelaku usaha perikanan
								5.	Pengembangan kelembagaan untuk peningkatan usaha manfataan usaha tambak (dukungan pengusaha) terhadap peningkatan ekonomi lokal
			3.2	Meningkatnya kontribusi perdagangan, UMKM dan industri berbasis sektor unggulan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	1.	Peningkatan nilai tambah dan daya saing sektor perdagangan	1.	Memperkuat infrastruktur dan sistem distribusi perdagangan
					Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB			2.	Meningkatkan kualitas perdagangan melalui standarisasi dan perlindungan konsumen
					Rasio PDRB Industri Pengolahan			3.	Memperkuat kelembagaan pelaku usaha serta membangun kemitraan perdagangan
						2.	Peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM dan industri pengolahan	1.	Meningkatkan nilai tambah produk koperasi dan UMKM

								2.	Menyederhanakan regulasi dan perizinan usaha mikro dan kecil
								3.	Memperluas akses pembiayaan mikro, teknologi digital sederhana, dan platform pemasaran online
								4.	Mengembangkan kapasitas pelaku usaha kecil
								5.	Mengembangan produk unggulan berbasis kawasan melalui OVOP (One Village One Product).
								6.	Mendorong inovasi dan hilirisasi produk industri pengolahan
								7.	Memperkuat regulasi, insentif, dan iklim investasi industri
								8.	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan efisiensi produksi
								9.	Mendorong kemitraan industri dengan lembaga riset, pendidikan vokasi, dan UMKM
			3.3	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	1.	Penguatan daya saing pariwisata berkualitas dan berkelanjutan	1.	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur destinasi pariwisata
					Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Nasional			2.	Mengembangkan atraksi wisata berbasis budaya, alam, dan kearifan local
					Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum			3.	Menguatkan promosi destinasi melalui media digital, event, dan kemitraan
								4.	Meningkatkan kompetensi pelaku pariwisata melalui pelatihan dan sertifikasi
								5.	Mendorong penguatan kelembagaan pariwisata nagari melalui revitalisasi POKDARWIS
						2.	Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual	1.	Meningkatkan kapasitas dan kreativitas pelaku ekonomi kreatif
								2.	Memperluas akses pasar produk kreatif melalui optimalisasi digitalisasi dan e-commerce

								3.	Memperkuat akses pembiayaan dan insentif bagi usaha kreatif
								4.	Meningkatkan perlindungan dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual
								5.	Menguatkan jejaring kolaborasi ekosistem ekonomi kreatif=
								6.	Memperkuat kelembagaan ekonomi kreatif daerah
								7.	Mengembangkan ruang publik kreatif dan pusat kegiatan kreativitas (Youth Centre)
								8.	Mengembangkan pusat wisata religi dan budaya Syech Burhannuddin
			3.4	Meningkatnya Kemudahan Investasi	Persentase Peningkatan Investasi	1.	Penguatan Ekosistem dan Iklim Investasi Daerah	1.	Menguatkan promosi, fasilitasi, dan koordinasi investasi terintegrasi
					Pembentukan Modal Tetap Bruto (PDRB)			2.	Mengembangkan kawasan industri dan sektor unggulan investasi
					Total Dana Pihak Ketiga / PDRB			3.	Meningkatkan literasi keuangan dan peran lembaga intermediasi
					Nilai Transaksi Saham per Kapita			4.	Menyederhanakan regulasi dan perizinan
								5.	Mengoptimalkan kapasitas fiskal daerah dan inovasi pembiayaan
								6.	Mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui KPBU
			3.5	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan	1.	Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan	1.	Meningkatkan produksi dan diversifikasi pangan lokal berbasis potensi wilayah dan teknologi ramah lingkungan
								2.	Memperkuat distribusi, logistik, cadangan, dan perlindungan sosial pangan
								3.	Mengoptimalkan konsumsi pangan Bahan Pangan Bergizi, Aman, Sehat, dan Halal (B2SA)

								4.	Mengembangkan infrastruktur ketahanan pangan
			3.6	Meningkatnya kesempatan dan produktifitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	1.	Penguatan ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, inklusif	1.	Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja
					Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja			2.	Memperluas akses informasi dan jejaring pasar kerja
					Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan			3.	Meningkatkan kesempatan kerja melalui program padat karya dan peluang kerja berkelanjutan
					Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi bekerja di bidang keahlian menengah tinggi			4.	Mengembangkan kewirausahaan lokal dan sosial berbasis potensi daerah
					Persentase disabilitas bekerja di sektor formal			5.	Mendorong kemitraan strategis antara tenaga kerja lokal dengan dunia usaha dan industri
								6.	Meningkatkan kreativitas dan kompetensi pemuda melalui pelatihan dan sertifikasi berbasis potensi lokal
			3.7	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Indeks Desa	1.	Peningkatan kemandirian dan daya saing perdesaan yang berkelanjutan	1.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan masyarakat
								2.	Memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan melalui koordinasi lintas sektor
								3.	Mengembangkan perekonomian desa melalui penguatan BUMDes, inovasi kewirausahaan, dan akses pasar
								4.	Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
								5.	Menguatkan ekonomi nagari melalui peran aktif petani milenial
								6.	Peningkatan ragam pemanfaatan dana desa/ nagari untuk

									pengembangan potensi lokal
4.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, berketahanan terhadap bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Infrastruktur Daerah	4.1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	1.	Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur air minum, sanitasi, dan persampahan	1.	Memperluas akses masyarakat terhadap layanan air minum, sanitasi, dan persampahan.
					Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan			2.	Menguatkan kelembagaan pengelola air minum dan sanitasi permukiman.
					Kapasitas Air Baku (m3/detik)			3.	Mengembangkan sistem penyediaan air minum regional (SPAM)
					Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau			4.	Mengembangkan tempat pemrosesan akhir (TPA) regional
								5.	Meningkatkan sanitasi berbasis masyarakat.
								6.	Meningkatkan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
								7.	Mengembangkan sistem drainase terpadu (ecodrain) secara bertahap
								8.	Meningkatkan kemitraan dalam pengembangan, pembiayaan, dan pengelolaan infrastruktur
						2.	Peningkatan pengelolaan sumber daya air dan tata ruang secara berkelanjutan	1.	Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan.
								2.	Meningkatkan sinergi pengelolaan air baku.
								3.	Mengembangkan regulasi air

									limbah domestik dan industri.
								4.	Implementasi perencanaan tata ruang (RTRW) dan zona pesisir
						3.	Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau	1.	Meningkatkan penataan kawasan permukiman kumuh secara terpadu melalui pengurangan rumah tidak layak huni (RTLH)
								2.	Meningkatkan perencanaan, penyediaan, dan tata kelola infrastruktur dasar permukiman (PSU) guna mendukung kelayakan dan keberlanjutan hunian
								3.	Mengendalikan dan mengawasi pembangunan kawasan permukiman agar selaras dengan rencana tata ruang
						4.	Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah	1.	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas jaringan jalan dan jembatan
								2.	Meningkatkan standar pelayanan dan keselamatan transportasi
								3.	Mengintegrasikan sistem transportasi antarmoda secara terpadu dan berkelanjutan
								4.	Memperkuat kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur transportasi
								5.	Mengoptimalkan fungsi sarana transportasi kereta api untuk mendukung konektivitas antarwilayah
								6.	Mengembangkan dermaga untuk memperkuat konektivitas wilayah pesisir dan pulau
			4.2	Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1.	Penguatan pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati	1.	Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dan limbah terpadu berbasis 3R dan prinsip circular economy

					Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah			2.	Meningkatkan pengelolaan limbah B3
					Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan penuh pengumpulan sampah			3.	Meningkatkan pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan, dan adaptasi perubahan iklim
								4.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kolaborasi multipihak dalam pengelolaan lingkungan
								5.	Memperkuat perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati
								6.	Menguatkan kapasitas, kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup
								7.	Menguatkan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan untuk pembangunan wilayah terpadu
								8.	Peningkatan luas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), Biopori, Sumur Resapan, dll.
								9.	Peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam pengendalian pertambangan mineral non logam
								10.	Pengembangan zonasi pemanfataan sumber daya alam (termasuk mineral non logam) melalui implementasi penataan ruang secara konsekuen
			4.3	Menurunnya resiko bencana	Indeks Risiko Bencana	1.	Peningkatan ketangguhan dan resiliensi terhadap bencana		Meningkatkan pembangunan infrastruktur berketahanan bencana
									Menguatkan kesiapsiagaan terhadap bencana
									Melaksanakan pemetaan risiko bencana dan pengarusutamaan mitigasi dalam perencanaan
									Meningkatkan kesadaran

									masyarakat terhadap risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim
									Mengembangkan sistem informasi kebencanaan dan peringatan dini
									Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan koordinasi dalam penanggulangan bencana
									Meningkatkan mitigasi pra, saat, dan pasca terjadi bencana
									Meningkatkan sarana dan prasarana dalam usaha evakuasi, pertolongan, penyelamatan korban bencana
									Optimalisasi penerapan sistem tanggap darurat bencana
									Meningkatkan pemutakhiran dalam penyusunan RPB terkait pengaruh perubahan iklim terhadap bahaya yang akan terjadi
5.	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Tenteram Dan Harmonis Dalam Keberagaman Agama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	5.1	Meningkatnya rasa aman dan kerukunan antarumat beragama dalam kehidupan masyarakat	Indeks Keamanan Daerah	1.	Perwujudan lingkungan sosial yang religius, aman dan harmonis	1.	Meningkatkan internalisasi nilai religius dalam keluarga dan komunitas
					Angka Kriminalitas			2.	Memperkuat peran tokoh agama, lembaga keagamaan, dan forum dialog lintas agama
								3.	Meningkatkan kapasitas aparat dan partisipasi masyarakat
								4.	Meningkatkan mekanisme penyelesaian dan pencegahan konflik di masyarakat
			5.2	Meningkatnya pelestarian cagar dan	Persentase Cagar Budaya yang	1.	Internalisasi nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam	1.	Pengintegrasian nilai-nilai budaya dalam pendidikan formal

				warisan budaya	dilestarikan		masyarakat		
					Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan			2.	Meningkatkan fungsi surau dan komunitas adat sebagai pusat pewarisan budaya
								3.	Meningkatnya pemanfaatan modernisasi dan globalisasi sebagai peluang untuk pelestarian budaya lokal
								4.	Memperkuat regulasi daerah yang mendukung pelestarian budaya lokal
						2.	Pelestarian budaya lokal dan perlindungan cagar budaya	1.	Meningkatkan pelestarian warisan budaya daerah
								2.	Mengembangkan pendidikan karakter dan nilai-nilai budaya lokal
								3.	Mengembangkan potensi seni, budaya, dan tradisi lokal
								4.	Mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan harmoni sosial
								5.	Mengapresiasi peran Tokoh Adat dan Tokoh Agama dalam penguatan nila2i-nilai adat dan agama serta pembentukan karakter generasi muda
								6.	Meningkatkan dukungan bagi seniman dan budayawan yang melestarikan budaya lokal

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan janji kinerja yang mewujudkan komitmen antara penerima amanah jabatan dengan pemberi amanah. Pada masa transisi perencanaan ini, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 menjadi instrumen krusial untuk memastikan bahwa target-target strategis dalam RPJMD 2021-2026 yang sedang menuju tahap akhir, tetap selaras dengan arah kebijakan baru dalam RPJMD 2025-2029.

Tahun 2025 merupakan periode peralihan strategis (transisi) di Kabupaten Padang Pariaman. Sebagai konsekuensi dari pergantian periode kepemimpinan dan sinkronisasi dengan target nasional, dokumen perencanaan kinerja tahun ini merujuk pada dua landasan hukum utama, yaitu akhir masa berlaku RPJMD 2021-2026 dan dimulainya implementasi RPJMD 2025-2029. Penyajian perencanaan kinerja dalam LKjIP ini dibagi menjadi dua bagian utama untuk memastikan seluruh janji pembangunan pada periode sebelumnya tetap dipantau ketercapaiannya, sembari mulai mengukur akselerasi target pada periode yang baru.

Berikut adalah perjanjian kinerja tahun 2025 berdasarkan kerangka RPJMD 2021-2026:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025
Berdasarkan RPJMD 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Persentase Lembaga Pendidikan Al Quran yang Menghasilkan Hafizh dan Hafizah	80%
2	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	72,15
3	Meningkatnya Ketertiban Umum/Stabilitas	Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah	100%
4	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Persentase Warisan Cagar Budaya yang di Lestarikan	100%
		Persentase Warisan Cagar Budaya Tak Benda yang di Lestarikan	100%
5	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayah	Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang	73%
		Persentase Ketaatan RTRW	71,04%
		Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	83%
6	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi	PDRB Per Kapita	57,25 (Rp. Juta)
		Pengeluaran Per Kapita	12,056 (Rp. Juta)
7	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata – Rata Lama Sekolah	8,54 Tahun
8	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Opini BPK terhadap LKPD	WTP
		Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	73,00 (BB)
9	Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Merit System	250
		Indeks SPBE	4,00

10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	4,57
		Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	91
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	71 Tahun
		Pravalensi Stunting	14%
12	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	5,80%
13	Meningkatnya Investasi di Daerah	Persentase Pertumbuhan Investasi	2%
14	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB	65%

***Sumber** : Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman Periode 2021-2026*

Adapun sebagai bentuk akselerasi terhadap visi pembangunan periode baru, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang berpedoman pada sasaran strategis dalam RPJMD Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025
Berdasarkan RPJMD 2025-2029

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2025
	Tujuan 1:		
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,68
	Sasaran :		
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing	Indeks Reformasi Birokrasi	80,00
		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	71,4
		Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK	78,00
2	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung Pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah	87,72
3	Meningkatnya Transformasi Digital Pelayanan Publik	Indeks SPBE	3,51
	Tujuan 2:		
	Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berdaya Saing dan Inklusif	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,82
	Sasaran :		
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing	Rata-Rata Lama Sekolah	8,79 Tahun
		Harapan Lama Sekolah	14,42 Tahun
		Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesment tingkat Nasional:	
		-Literasi	54,00%
		-Numerasi	46,50%
2	Tercapainya Masyarakat sehat dan Produktif	Angka Harapan Hidup	73,97 Tahun

	sesuai siklus Hidup	Prevalensi Stunting	23,9%
		Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	50 Orang/100.000 Kelahiran Hidup
3	Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Keluarga	57,8
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,3
		Indeks Ketimpangan Gender	0,715
		Indeks Perlindungan Anak	69,68%
4	Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusi	Indeks Kesejahteraan Sosial	57,50
	Tujuan 3:		
	Meningkatnya Perekonomian Daerah Yang Maju dan Inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,37%
		PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	63,57 (Rp. Juta)
		Eksport Barang dan Jasa	4,57%
		Gini Ratio	0,251%
		Tingkat Kemiskinan	5,01%
	Sasaran :		
1	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, Kehutanan, dan perikanan terhadap perekonomian daerah	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	20,34%
2	Meningkatnya kontribusi perdagangan, UMKM dan industri berbasis sektor unggulan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	11,85%
		Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB	0,150%
		Rasio PDRB Industri Pengolahan	8,43%
3	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	125 Ribu Orang
		Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Nasional	1,622%
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	1,36%
4	Meningkatnya Kemudahan Investasi	Persentase Peningkatan Investasi	2,58%
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (PDRB)	30,6%
		Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	8,76%
		Nilai Transaksi Saham per Kapita	Rp. 413.768

5	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan	86,2%
6	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,17%
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	71,78%
		Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	57,53-58,91%
		Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	71,20%
		Persentase disabilitas bekerja di sektor formal	26,39%
7	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Indeks Desa	70,00%
	Tujuan 4:		
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, berketahanan terhadap bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Infrastruktur Daerah	60,5
	Sasaran :		
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	60,02
		Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan	19%
		Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,95 m3/detik
		Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	60,25%
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	76,96
		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	16,34%
		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan penuh pengumpulan sampah	40,87%
3	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	150,89%
	Tujuan 5:		
	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tentram dan harmonis dalam keberagaman agama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	72,15%

	Sasaran :		
1	Meningkatnya rasa aman dan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan masyarakat	Indeks Keamanan Daerah	67,37%
		Angka Kriminalitas	196,25%
2	Meningkatnya pelestarian cagar dan warisan budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	85%
		Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	66%

***Sumber** : RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Periode 2025-2029*



Bab III
Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja bukan sekadar penyajian angka, melainkan refleksi dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan janji pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Berdasarkan dokumen perjanjian kinerja tahun 2025. Akuntabilitas kinerja periode transisi tahun 2025 ini menekankan bahwa keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya diukur dari angka statistik yang dicapai, tetapi dari sejauh mana integrasi antar perangkat daerah mampu dalam menjembatani capaian akhir RPJMD 2021-2026 menuju fondasi baru dalam RPJMD 2025-2029. Pada dokumen RPJMD 2021-2026 terdapat 14 (empat belas) sasaran strategis dengan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Utama serta anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah digunakan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lainnya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut.



Adapun 14 (empat belas) sasaran strategis dengan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Utama serta penanggung jawab data kinerja tiap-tiap Indikator Kinerja tersebut sebagaimana terlihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Penanggung Jawab pada RPJMD 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama	Persentase Lembaga Pendidikan Alqur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Daerah (Bagian Kesra), Kecamatan
2	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)
3	Meningkatnya Ketertiban Umum/Stabilitas	Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah	Kantor Kesatuan Bangsan dan Politik
4	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Persentase Warisan Cagar Budaya yang dilestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	
5	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayah	Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	

		Persentase ketaatan terhadap RTRW	
6	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi	PDRB Per Kapita	Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian & SDA)
		Pengeluaran Per Kapita	
7	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK terhadap LKPD	Seluruh Perangkat Daerah
		Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	Seluruh Perangkat Daerah
9	Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Merit System	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Indeks SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Stunting	Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	Meningkatnya Investasi di Daerah	Persentase Pertumbuhan Investasi	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
14	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian, Dnas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM

Sumber : *Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Sedangkan pada dokumen RPJMD 2025-2029, arah akuntabilitas kinerja mengalami pergeseran paradigma yang lebih progresif. Jika periode sebelumnya lebih bersifat penguatan fondasi, maka pada periode 2025-2029 ini, pemerintah daerah menekankan pada aspek transformasi dan keberlanjutan. Terdapat 19 (sembilan belas) sasaran strategis dengan 56 (lima puluh enam) Indikator Kinerja Utama, namun ada 1

(satu) Indikator Kinerja Utama yang ditargetkan mulai dilaksanakan pada tahun 2026, sehingga pada tahun 2025 ini sebanyak 55 (lima puluh lima) Indikator Kinerja Utama yang diuraikan.

Adapun 19 (sembilan belas) dengan 55 (lima puluh lima) Indikator Kinerja Utama serta penanggung jawab data kinerja tiap-tiap Indikator Kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Penanggung Jawab pada RPJMD 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
	Tujuan :		
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Setda - Bagian TPKS
	Sasaran :		
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Setda – Bag. Organisasi
		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Setda – Bag. Organisasi
		Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK	Inspektorat
2	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung Pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah	Bapelitbangda
3	Meningkatnya Transformasi Digital Pelayanan Publik	Indeks SPBE	Diskominfo
	Tujuan :		
2	Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berdaya Saing dan Inklusif	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Disdikbud
	Sasaran :		
4	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing	Rata-Rata Lama Sekolah	Disdikbud
		Harapan Lama Sekolah	
		Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asessment tingkat Nasional:	
		-Literasi	
		-Numerasi	
5	Tercapainya Masyarakat sehat dan Produktif sesuai siklus Hidup	Angka Harapan Hidup	Dinkes
		Prevalensi Stunting	
		Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	

6	Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Keluarga	DPPKB
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	DinsosP3A
		Indeks Ketimpangan Gender	
		Indeks Perlindungan Anak	
7	Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusi	Indeks Kesejahteraan Sosial	
	Tujuan :		
3	Meningkatnya Perekonomian Daerah Yang Maju dan Inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Bapelitbangda
		PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	DPMPTP
		Eksport Barang dan Jasa	
		Gini Ratio	Bapelitbangda, BPS
		Tingkat Kemiskinan	DinsosP3A
	Sasaran :		
8	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, Kehutanan, dan perikanan terhadap perekonomian daerah	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	DistanKP, Dis. Perikanan, Disnakkeswan
9	Meningkatnya kontribusi perdagangan, UMKM dan industri berbasis sektor unggulan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Disdagnakerkop dan UKM
		Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB	
		Rasio PDRB Industri Pengolahan	DPMPTP
10	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Disparpora
		Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Nasional	Disparpora
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Disparpora
11	Meningkatnya Kemudahan Investasi	Persentase Peningkatan Investasi	DPMPTP
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (PDRB)	
		Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	
		Nilai Transaksi Saham per Kapita	
12	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan	DistanKP
13	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Disdagnakerkop & UKM

		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	
		Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	
		Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	
		Persentase disabilitas bekerja di sektor formal	
14	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Indeks Desa	DPMD
	Tujuan :		
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, berketahanan terhadap bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Infrastruktur Daerah	DPUPR
	Sasaran :		
15	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	DPUPR
		Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan	DPUPR
		Kapasitas Air Baku (m3/detik)	DPUPR
		Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	DLHPKPP
16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	DLHPKPP
		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	DLHPKPP
		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan penuh pengumpulan sampah	DLHPKPP
17	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	BPBD
	Tujuan :		
5	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tentram dan harmonis dalam keberagaman agama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Setda-Bag. Kesra
	Sasaran :		
18	Meningkatnya rasa aman dan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan masyarakat	Indeks Keamanan Daerah	Satpol PP dan Damkar
		Angka Kriminalitas	

19	Meningkatnya pelestarian cagar dan warisan budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	Disdikbud
		Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	

Sumber : *RPJMD Kabupaten Padang Pariaman 2025-2029*

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabiltas dengan melakukan klarifikasi *out put* dan *out come* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun rumus pengukuran kinerja tersebut sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ X } 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Target - (Realisasi – Target)}}{\text{Target}} \text{ x } 100\%$$

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{(2x Target) - Realisasi}}{\text{Target}} \text{ x } 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi target penilaian yang lebih tinggi dari dua acuan antara ***Keputusan Kepala LAN dan Peraturan Mendagri*** dimaksud dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.3
Pengukuran Dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal (%)	Predikat / Kategori
x > 100	Sangat Berhasil
75 < x < 100	Berhasil
55 < x < 75	Cukup Berhasil
x < 55	Kurang Berhasil

***Sumber** : Keputusan Kepala LAN & Permendagri*

3.2 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Hasil pengukuran kinerja dievaluasi dan dianalisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya target yang ditetapkan.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
   Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menghitung efisiensi anggaran dan efisiensi kinerja. Efisiensi anggaran adalah selisih persentase realisasi anggaran ketika kinerja tercapai 100% atau lebih. Efisiensi kinerja adalah selisih antara capaian kinerja dengan capaian 100% target kinerja.
   Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan jumlah dari efisiensi anggaran dan efisiensi kinerja.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berupaya untuk mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan pada RPJMD Periode 2021-2026. Adapun capaian kinerja

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 pada 14 (empat belas) sasaran strategis dengan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel 3.4:

Tabel 3.4
Realisasi Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 dan Penyesuaian Pohon Kinerja Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Misi 1 : Meningkatnya kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban								
Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama								
1.	Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama	Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah	%	72	80	78,48	98,1	Berhasil
2.	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	71,81	72,15	78,08	103,90	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya Ketertiban Umum/Stabilitas	Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah	%	100	100	100	100	Sangat Berhasil
Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Kehidupan Berbudaya								
4.	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Persentase Warisan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100	Sangat Berhasil
		Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	100	100	100	100	Sangat Berhasil
Misi 2 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang								
Tujuan : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat								
5.	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayah	Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang	%	68,00	73	63,53	87,03	Berhasil
		Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	66,77	71,04	47,17	66,40	Cukup Berhasil
		Persentase Ketaatan terhadap RTRW	%	82,10	83	83,70	100,84	Sangat Berhasil
Misi 3 : Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasiskan pemberdayaan masyarakat								
Tujuan : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat								
6.	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi	PDRB Per Kapita	Rp. Juta	58,38	58,38	59,49	101,90	Sangat Berhasil
		Pengeluaran Per Kapita	Rp. Juta	11,756	12,056	12,089	100,27	Sangat Berhasil
Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakan sektor pendidikan non formal								
Tujuan 1 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat								

7.	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	8,42	8,54	8,78	102,81	Sangat Berhasil
Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan								
Tujuan : Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi								
8.	Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	Nilai	71,05 (BB)	73 (BB)	71,54 (BB)	98	Berhasil
		Opini BPK terhadap LKPD	Nilai	WTP	WTP	WTP	100	Sangat Berhasil
9.	Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Merit System	Indeks	N/A	250	211,5	84,60	Berhasil
		Indeks SPBE	Indeks	3,51	4,00	4,07	101,75	Sangat Berhasil
10.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,29	4,57	4,58	100,22	Sangat Berhasil
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	Indeks	89,86	91,00	70,78	77,78	Berhasil
Misi 6 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keinvestasiarifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat								
Tujuan 1 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat								
11.	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	70,10	71	74,04	104,79	Sangat Berhasil
		Prevalensi Stunting	%	26,6	14	26,6*	10	Kurang Berhasil
12.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	%	6,27	5,80	5,86	98,97	Berhasil
Misi 7 : Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi mealui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja								
Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat								
13.	Meningkatnya Investasi di Daerah	Persentase Pertumbuhan Investasi	%	185	2	202,60	10.130	Sangat Berhasil
14.	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB	%	59,27	65	59,95	92,23	Berhasil

***Sumber** : Analisis Capaian IKU Perangkat Daerah & Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2025*
**) Angka realisasi menggunakan data tahun 2024*

Setelah melihat capaian kumulatif pada periode sebelumnya, berikut ini tabel realisasi kinerja tahun 2025 berdasarkan indikator dalam RPJMD 2025-2029 yang terdiri dari 19 (sembilan belas) Sasasaran Stategis dengan 47 (empat puluh tujuh) indikator :

Tabel 3.5
Realisasi Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029

Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas								
Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas								
No	**Sasaran Kinerja**	**Indikator Kinerja Utama**	**Satuan**	**Realisasi Tahun 2024**	**Tahun 2025**			
					Target	**Realisasi**	**Capaian (%)**	**Kategori**
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	79,19	80,00	76,34*	95,42*	Berhasil
		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	71,05	71,4	71,54	106,69	Sangat Berhasil

		Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK	%	68,50	78,00	65,50	83,97	Berhasil
2.	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung Pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	85,73	87,72	82,48	94,03	Berhasil
3.	Meningkatnya Transformasi Digital Pelayanan Publik	Indeks SPBE	Indeks	3,51	4,00	4,07	101,75	Sangat Berhasil
Misi 2 : Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing								
Tujuan 2 : Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berdaya Saing dan Inklusif								
4.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,42	8,79	8,78	99,89	Berhasil
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,20	14,42	14,21	98,54	Berhasil
		Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesment tingkat Nasional:						
		-Literasi	%	63,57	54,00	62,4	115,56	Sangat Berhasil
		-Numerasi	%	56,6	46,50	53,9	115,91	Sangat Berhasil
5.	Tercapainya Masyarakat sehat dan Produktif sesuai siklus Hidup	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,10	73,97	74,04	100,09	Sangat Berhasil
		Prevalensi Stunting	%	26,6	23,9	26,6*	88,70	Berhasil
		Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Orang per 100.000 Kelahiran Hidup	83	50	89	12,36	Kurang Berhasil
6.	Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	56,32	57,8	58,4	101,10	Sangat Berhasil
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,32	94,3	93,92*	99,59*	Berhasil
		Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,722	0,715	0,722*	81,67*	Berhasil
		Indeks Perlindungan Anak	Indeks	61,57	69,68	61,57*	88,36*	Berhasil
7.	Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusi	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	N/A	57,50	57,50	100	Sangat Berhasil
Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata								
Tujuan 3 : Meningkatnya Perekonomian Daerah yang Maju dan Inklusif								
8.	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, Kehutanan, dan perikanan terhadap perekonomian daerah	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	%	20,17	20,34	20,70	101,77	Sangat Berhasil
9.	Meningkatnya kontribusi perdagangan, UMKM dan industri berbasis sektor unggulan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	10,19	11,85	10,38	87,59	Berhasil
		Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB	%	N/A	0,150	0,38	253,33	Sangat Berhasil
		Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	10,25	8,43	10,71	127,05	Sangat Berhasil

10.	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu. Orang	0,260	0,125	0,442	353,60	Sangat Berhasil
		Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Nasional	%	N/A	1,622	0,084	5,18	Kurang Berhasil
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,25	1,36	1,26	92,65	Berhasil
11.	Meningkatnya Kemudahan Investasi	Persentase Peningkatan Investasi	%	185	2,58	202,60	7.852,71	Sangat Berhasil
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (PDRB)	%	35,12	30,6	30,76	100,52	Sangat Berhasil
		Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	%	N/A	8,76	2,11	24,09	Kurang Berhasil
		Nilai Transaksi Saham per Kapita	Rupiah	N/A	413.768	533.131,21	128,85	Sangat Berhasil
12.	Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan Yang Berkualitas Dan Terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	70,85	86,2	69,14	86,21	Berhasil
13.	Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,59	6,17	6,48	94,98	Berhasil
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta	67,08	71,78	65,52	91,28	Berhasil
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	57,53	57,53-58,91	53,44	92,87	Berhasil
		Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian menengah tinggi	%	N/A	71,20	54,57	76,64	Berhasil
		Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	N/A	26,39	25	94,73	Berhasil
14.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Indeks Desa	Indeks	N/A	70,00	73,26	104,66	Sangat Berhasil
Misi 4 : Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan								
Tujuan 4 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, Berketahanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim								
15.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	N/A	60,02	76,33	127,17	Sangat Berhasil
		Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan	%	N/A	19,00	17,10	90	Berhasil
		Kapasitas Air Baku (m3/detik)	m3/detik	N/A	0,95	0,03	3,16	Kurang Berhasil
		Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian	%	59,03	60,25	61,48	102,04	Sangat Berhasil

		Layak dan Terjangkau						
16.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	67,02	76,96	77,55	100,77	Sangat Berhasil
		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	N/A	16,34	7,11	43,51	Kurang Berhasil
		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	N/A	40,87	0,54	1,32	Kurang Berhasil
17.	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	152,17	150,89	163,66	92,19	Berhasil
Misi 5 : Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya								
Tujuan 5 : Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Tentram dan Harmonis Dalam Keberagaman Agama								
18.	Meningkatnya rasa aman dan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan masyarakat	Indeks Keamanan Daerah	Indeks	N/A	67,37	91,57	135,92	Sangat Berhasil
		Angka Kriminalitas	Angka	197,53	196,25	188,21	104,10	Sangat Berhasil
19.	Meningkatnya pelestarian cagar dan warisan budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100	Sangat Berhasil
		Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	71,43	100	100	100	Sangat Berhasil

***Sumber** : Analisis Capaian IKU Perangkat Daerah & Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2026*

Sebagai tahun peralihan, realisasi kinerja 2025 tidak hanya diukur sebagai pencapaian tahunan semata, melainkan juga sebagai evaluasi komprehensif terhadap keberlanjutan program. Di satu sisi, pemerintah berupaya memaksimalkan sisa target yang tertuang dalam dokumen perencanaan sebelumnya, sementara di sisi lain, mulai menyelaraskan instrumen kebijakan dengan arah baru pembangunan daerah.

Guna memberikan gambaran kinerja yang utuh dan berkesinambungan, pembahasan dalam bab ini difokuskan pada dua dimensi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

A. Capaian IKU RPJMD Periode 2021-2026: Merupakan bentuk evaluasi terhadap efektivitas program-program yang telah berjalan selama lima tahun terakhir. Fokus utama adalah mengukur sejauh mana target-target jangka menengah telah terpenuhi dan memastikan seluruh janji pembangunan dalam fase ini dapat terselesaikan dengan standar kualitas yang optimal.
B. Capaian IKU RPJMD Periode 2025-2029: Sebagai langkah awal dalam siklus perencanaan yang baru, bagian ini menguraikan akselerasi dan kesiapan daerah dalam mengimplementasikan sasaran strategis baru. Pengukuran ini berfungsi sebagai *baseline* (titik awal) penting untuk menentukan arah kebijakan dan alokasi sumber daya pada tahun-tahun mendatang.

I. REALISASI KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2025 BERDASARKAN RPJMD TAHUN 2021-2026

Bagian ini menguraikan progres capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai parameter keberhasilan visi dan misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman periode 2021-2026. Fokus utama evaluasi ini adalah mengukur sejauh mana intervensi program pemerintah mampu menggerakkan variabel strategis daerah. Berikut ini uraian capaian kinerja masing-masing Sasaran Strategis RPJMD TAHUN 2021-2026 :

SASASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama merupakan sasaran strategis yang terdapat pada Misi 1 yaitu : "Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Serta Memelihara Kerukunan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum". Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait sasaran strategis ini adalah Persentase Lembaga pendidikan Al-Quran Yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah.

Lembaga Pendidikan Alqur'an merupakan lembaga pendidikan yang melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar Alqur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizhah serta lulus dalam seleksi Gerakan Seribu Penghafal Alquran (Gebu Pafa) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah merupakan alat untuk mengukur kinerja pemerintah dalam meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius.

Adapun formulasi pengukuran capaian realisasi Indikator Kinerja Utama ini yakni :

Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah Lembaga Pendidikan Al-Qur'an Yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah}}{\text{Jumlah Lembaga Pendidikan Al-Qur'an Keseluruhan}}$ **X 100%**

Berikut data Lembaga Pendidikan Alquran menurut Kecamatan pada tahun 2025 :

Tabel 3.6
Lembaga Pendidikan Alqur'an Penghasil Hafizh/Hafizhah
Menurut Kecamatan Tahun 2025

NO	KECAMATAN	LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN		JUMLAH HAFIZH/ HAFIZAH
		KESELURUHAN	PENGHASIL HAFIZH/HAFIZH AH	
1	Sintuk Toboh Gadang	42	35	52
2	Batang Gasan	9	8	10
3	V Koto Timur	12	10	12
4	2x11 Kayutanam	21	12	20
5	Sungai Limau	45	39	44
6	Sungai Geringging	17	13	15
7	Lubuk Alung	46	33	40
8	Ulakan Tapakis	32	26	37
9	IV Koto Aur Malintang	23	18	17

10	Batang Anai	59	43	51
11	VII Koto	49	40	51
12	Enam Lingkung	59	45	51
13	Nan Sabaris	67	63	80
14	2x11 Enam Lingkung	28	23	32
15	Padang Sago	34	28	35
16	V Koto Kampung Dalam	25	13	17
17	Patamuan	13	7	13
	Jumlah	581	456	577

Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa total Lembaga Pendidikan Alqur'an yang ada di Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2025 adalah sebanyak 581, sedangkan lembaga yang telah menghasilkan Hafizh/Hafizhah sebanyak 456 lembaga. Sehingga realisasi Persentase Lembaga Pendidikan Alqur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizhah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 adalah sebesar 78,48%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Persentase Lembaga Penghasil Hafizh/Hafizhah} = \frac{456}{581} \times 100\% = 78{,}48\%$$

a) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi Persentase Lembaga Pendidikan Alqur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizhah Kabupaten Padang Pariaman:

Tabel 3.7
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Lembaga Pendidikan Alqur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizhah Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah	%	80%	78,48	98,1	Berhasil

Sumber : *Bagian Kesra Setda Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Dari Tabel diatas, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2025 menetapkan target yang cukup tinggi, yaitu 80% untuk indicator kinerja "Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah" dengan realisasi yang berhasil dicapai tercatat sebesar 78,48% sehingga capaian kinerjanya 98,1% yang dikategorikan "Berhasil". Realisasi yang mendekati angka 100% dari target ini menandakan bahwa sistem pembinaan dan kurikulum tahfizh yang diterapkan telah berjalan secara optimal dan terukur di sebagian besar lembaga.

b) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

Perbandingan target dan realisasi Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah pada tahun 2024 dengan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah	45%	72%	160	80%	78,48%	98,1	Berhasil

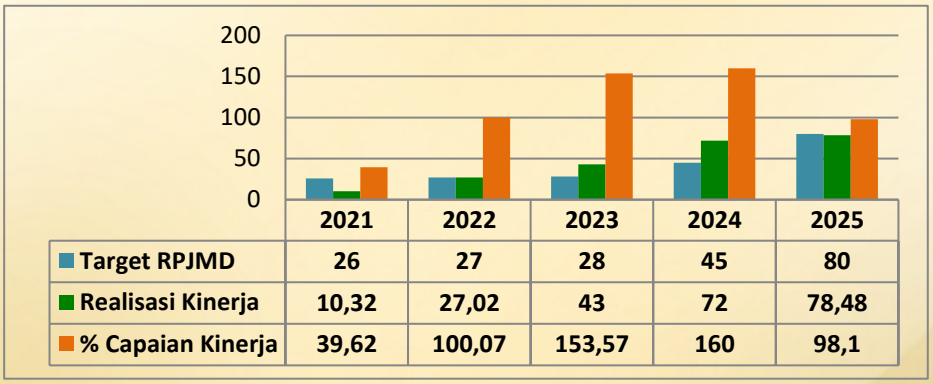
Sumber : *Bagian Kesra Setda Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja tahun 2024 dan 2025, terlihat adanya dinamika pertumbuhan yang sangat positif pada efektivitas Lembaga Pendidikan Al-Qur'an dalam mencetak Hafizh/Hafizhah. Pada tahun 2024, program ini menunjukkan akselerasi yang luar biasa di mana target moderat sebesar 45% berhasil dilampaui secara masif dengan realisasi mencapai 72%, sehingga menghasilkan angka capaian kinerja yang fantastis sebesar 160%. Keberhasilan ini kemudian mendorong penetapan target yang jauh lebih tinggi pada tahun 2025, yaitu sebesar 80%. Meskipun secara persentase capaian kinerja tahun 2025 berada di angka 98,1%, secara nominal realisasi yang dihasilkan sebenarnya meningkat menjadi 78,48% dengan interpretasi akhir berpredikat "Berhasil", yang membuktikan bahwa kualitas dan kuantitas lembaga yang produktif terus tumbuh secara berkelanjutan serta strategi pembinaan yang diterapkan selama dua tahun terakhir telah berjalan sangat efektif dan stabil, di mana peningkatan riil dari 72% ke 78,48% menjadi bukti nyata keberhasilan penguatan kapasitas lembaga dalam mencetak generasi penghafal Al-Qur'an yang terukur

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan target pada RPJMD 2021-2026 dengan realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Grafik 3.1
Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/ Hafizhah Tahun 2021-2025



Sumber : *Bagian Kesra Setda Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Berdasarkan data pada Grafik 3.1 Indikator Kinerja Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah periode 2021-2025, terlihat tren pertumbuhan yang sangat progresif baik dari sisi penetapan target maupun pencapaian kinerja. Pada awal periode yaitu tahun 2021, realisasi kinerja sempat berada di angka 10,32% dari target 26% (capaian 39,62%), namun grafik menunjukkan lonjakan performa yang luar biasa pada tahun-tahun berikutnya, di mana pada tahun 2022 realisasi berhasil menyentuh angka 27,02% yang berarti target 27% telah terpenuhi sepenuhnya dengan capaian 100,07%. Tren penguatan ini berlanjut secara masif pada tahun 2023 dan 2024, di mana realisasi kinerja (43% dan 72%) jauh melampaui target yang ditetapkan (28% dan 45%), sehingga menghasilkan persentase capaian kinerja yang sangat tinggi, masing-masing sebesar 153,57% dan 160%.

Memasuki tahun 2025, pemerintah menetapkan target yang jauh lebih menantang dan ambisius, yaitu sebesar 80%, yang merupakan kenaikan hampir dua kali lipat dari target tahun sebelumnya. Meskipun secara statistik persentase capaian kinerja pada tahun 2025 tercatat sebesar 98,1%, secara nominal angka realisasi kinerja tetap menunjukkan tren peningkatan positif ke titik tertinggi selama lima tahun terakhir, yaitu sebesar 78,48%. Secara keseluruhan, capaian merefleksikan keberhasilan transformasi lembaga pendidikan Al-Qur'an dalam mencetak generasi penghafal Al-Qur'an yang konsisten meningkat setiap tahunnya.

d) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja "Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah" diluncurkan inovasi kegiatan "Gerakan Menghafal Al-Qur'an Demi Terciptanya Masyarakat Madani" (Gema Insani) untuk memotivasi Lembaga Pendidikan Alqur'an yang ada di Kabupaten Padang Pariaman dalam menghasilkan Hafizh/Hafizhah dengan cara memberikan beasiswa/*reward* kepada para Hafizh/Hafizah.

Kemudian untuk meningkatkan jumlah Hafizh/Hafizhah di Kabupaten Padang Pariaman dilaksanakan juga program Gebu Sipafa (Gerakan Seribu Siswa Penghafal Al-Qur'an) sebagai upaya meningkatkan minat siswa SD dan SMP dalam menghafal Al-Qur'an.

Dalam mendukung Sasaran Strategis "Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama", selain meningkatkan jumlah Hafizh/Hafizhah dilaksanakan juga berbagai program/kegiatan berupa bantuan perbaikan sarana dan prasarana ibadah, pembinaan Guru Mengaji, pelaksanaan Pesantren Ramadhan bagi siswa/i SD/MI dan SMP/MTs, Safari Ramadhan dan pelaksanaan MTQ Tingkat TPA, Nagari sampai Kabupaten. Disamping itu, melalui pembiayaan Pemerintahan Nagari diberikan juga bantuan/honorarium kepada Guru Mengaji.

Adapun program yang menunjang pencapaian indikator kinerja ini adalah :

- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
  - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual dengan anggaran yang di alokasikan pada tahun 2025 sebesar Rp. 4.805.725.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 4.183.936.229,00. Persentase realisasi anggaran adalah 87,06%.

Gambar 3.1
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Guru Mengaji



Sumber : *Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

e) Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Adapun beberapa faktor penentu keberhasilan kinerja yang sudah dicapai sepanjang tahun 2025 ini adalah :

1. Tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya menghafal al-qur'an. Sehingga orang tua bersemangat untuk mengantarkan anaknya ke Lembaga Pendidikan Al-Quran;
2. Terjalinya hubungan yang baik antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Guru yang ada di Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang ada di Kabupaten Padang Pariaman;
3. Komitmen kepala daerah akan dalam upaya meningkatkan Iman dan Taqwa masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

Gambar 3.2
Wisuda Al-Qur'an dan Tahfidz Rumah Al-Qur'an Rahman Raqyan



Sumber : *Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Disamping faktor pendukung tersebut, ditemukan beberapa faktor yang menghambat dalam upaya pencapaian kinerja, yaitu :

1. Terbatasnya Anggaran Pemerintah Daerah, sehingga kegiatan "GEMA INSANI" tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2025.
2. Penguasaan Ilmu Tajwid yang masih kurang, sehingga santri kesulitan menghafal Al-Qur'an dengan Tajwid yang benar.

3. Belum optimalnya pembinaan secara intensif kepada para guru mengaji agar kualitas guru dapat meningkat.
4. Perlu pembinaan secara intensif kepada Guru-guru Al-Qur'an agar kualitas guru dapat ditingkatkan.

Adapun upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mencapai target kinerja antara lain :

1. Penguatan regulasi dan standardisasi kurikulum tahfizh di seluruh surau, TPA/TPSA, dan MDTA;
2. Peningkatan kompetensi guru mengaji secara berkala agar metode pengajaran lebih efektif dan terukur;
3. Mendorong motivasi santri melalui penyelenggaraan wisuda hifzhul Qur'an secara kolektif dan pemberian apresiasi bagi mereka yang mencapai target hafalan tertentu;

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Berikut tabel perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggaran tahun 2025 :

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/ Hafizhah Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama	Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/ Hafizhah	98,1%	87,06%	11,04%

Pada sasaran "Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama" dengan indikator utama Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah, tercatat capaian kinerja yang sangat optimal pada tahun 2025 sebesar 98,1%. Capaian ini didukung oleh alokasi pembiayaan sebesar Rp 4.805.725.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 4.183.936.229,00, atau setara dengan 87,06%. Berdasarkan perbandingan kedua data tersebut, diperoleh angka tingkat efisiensi sebesar 11,04%.

Hasil ini menunjukkan bahwa program pembinaan lembaga pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Padang Pariaman telah dilaksanakan secara sangat efisien, di mana target kinerja fisik hampir terpenuhi sepenuhnya (98,1%) meskipun anggaran yang digunakan lebih rendah dari pagu yang disediakan. Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya keuangan untuk menghasilkan *output* yang maksimal bagi masyarakat dengan prinsip penghematan anggaran yang terukur.

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama

Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama merupakan sasaran strategis yang terdapat pada Misi 1 yaitu : " Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Serta Memelihara Kerukunan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum". Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri (PBM) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, kerukunan yaitu: "Suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta bekerjasama dalam membangun masyarakat bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka mengukur tingkat kerukunan umat beragama di Kabupaten Padang Pariaman, telah dilaksanakan Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Tahun 2025. Survei ini mengukur beberapa aspek, yaitu :

1. Toleransi : Sikap menghormati dan menerima perbedaan agama dan kepercayaan
2. Kesetaraan : Sikap menghormati dan mengakui hak dan kewajiban yang sama bagi semua umat beragama
3. Kerjasama : Sikap bekerjasama dan berkolaborasi antar umat beragama untuk mencapai tujuan bersama

Adapun formulasi pengukuran realisasi IKU Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah sebagai berikut :

$$\text{Formulasi Pengukuran : } \frac{\text{Skor Toleransi + Skor Kesetaraan + Skor Kerjasama Sosial}}{3}$$

Hasil survei Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 memperoleh poin sebesar 71,81.

(a) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025

Berikut ini adalah target dan realisasi indikator kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025:

Tabel 3.10
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	75,15	78,08	103,90	Sangat Berhasil

Sumber : Bapelitbanga dan Bagian Kesra Setda Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Realisasi Indikator Kinerja Utama Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 yaitu 78,08 dari target yang ditetapkan sebesar

75,15, sehingga capaian ini melebihi target dengan capaian kinerja sebesar 103,90% dengan interpretasi " Sangat Berhasil".

(b) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

Tabel 3.11
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	65	71,81	110,48	75,15	78,08	103,90	Sangat Berhasil

Sumber : Bapelitbanga dan Bagian Kesra Setda Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Indikator Kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) pada tahun 2024 sebesar 71,81 dari target sebesar 65 dengan persentase capaian sebesar 110,48%. Sedangkan realisasi pada tahun 2025 meningkat yaitu sebesar 78,08 dari target sebesar 75,15 dengan persentase capaian sebesar 103,90%.

(c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan target pada RPJMD 2021-2026 dengan realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Tahun 2021-2025 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	N/A	N/A	N/A	65	75,15	N/A	N/A	N/A	71,81	78,08

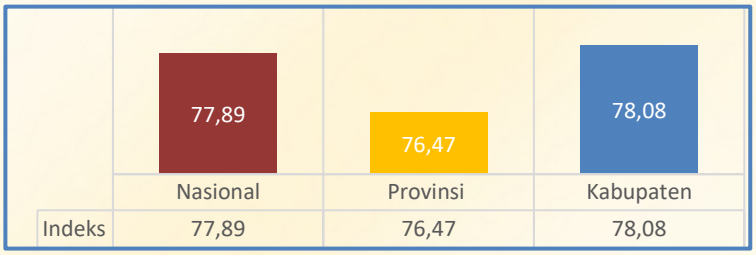
Sumber : Bapelitbanga dan Bagian Kesra Setda Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Tidak tersedia data Realisasi Indikator Kinerja "Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)" pada tahun 2021 s/d 2023. Hal ini dikarenakan indikator tersebut baru muncul setelah penyesuaian sasaran strategis pada pohon kinerja Kabupaten tahun 2024. Realisasi tahun 2024 sebesar 71,81 dari target 65 yang telah ditetapkan dengan persentase capaian kinerja 110,48% (Sangat Berhasil). Sedangkan tahun 2025 diperoleh realisasi sebesar 78,08 dari target sebesar 75,15 dengan persentase capaian sebesar 103,90% (Sangat Berhasil).

(d) Perbandingan Realisasi IKU Kabupaten, Provinsi dan Nasional Terkait Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Berikut ini adalah perbandingan realisasi IKU Kabupaten, Provinsi dan Nasional terkait Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah sebagai berikut :

Grafik 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Kabupaten, Provinsi dan Nasional Terkait Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Tahun 2025



Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2025 adalah 78,08 dan hasil ini termasuk kategori "Sangat Berhasil", dimana angka ini berada diatas capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sumatera Barat yaitu 76,47 dan capaian Nasional yaitu 77,89.

(e) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Realisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Padang Pariaman yang mencapai 78,08 pada tahun 2025 menunjukkan bahwa ada beberapa faktor pendukung yang berkontribusi terhadap tercapainya angka tersebut. Berikut adalah faktor-faktor yang dapat mendukung tercapainya tingkat kerukunan umat beragama di Kabupaten Padang Pariaman:

1. Optimalisasi Peran FKUB dan Tokoh Agama
   Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman secara konsisten memfasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) hingga ke tingkat kecamatan. Peran aktif ulama dan tokoh lintas agama dalam melakukan dialog preventif berhasil meminimalkan potensi gesekan sosial selama masa transisi pemerintahan.

Gambar 3.3
Dialog Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 di Istana Seafood Putra Minang



2. Implementasi Filosofi ABS-SBK yang Inklusif
   Penerapan nilai *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* di Padang Pariaman tidak hanya menjadi identitas, tetapi menjadi instrumen pemersatu. Nilai adat yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap tamu dan pendatang menciptakan ruang toleransi yang alami di tengah masyarakat.

Gambar 3.4
Tradisi Mauluik Gadang sebagai Ekspresi Keagamaan yang Damai, Meriah dan Saling Menghargai Bagi Pemeluk Agama Lain di Sekitarnya



Sumber : Bagian Kesra Setda Kabupaten Padang Pariaman, 2025

3. Aktivitas Sosial Bersama
   Kerukunan umat beragama di Kabupaten Padang Pariaman juga didorong oleh adanya kegiatan sosial yang melibatkan berbagai kelompok agama. Kegiatan seperti gotong royong, bakti sosial, dan kegiatan kemanusiaan lainnya menciptakan kesempatan untuk umat beragama saling bekerjasama, mempererat hubungan, dan memperlihatkan bahwa kerukunan adalah nilai yang praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Gambar 3.5
Goro Akbar Pembersihan Sungai Batang Ulakan



Sumber : Bagian Kesra Setda Kabupaten Padang Pariaman, 2025

4. Pengaruh Pemimpin Agama yang Bijaksana
   Pemimpin agama yang bijaksana dan moderat di Kabupaten Padang Pariaman berperan besar dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Mereka sering-

kali menjadi teladan dalam mengedepankan nilai-nilai toleransi dan saling menghargai antar kelompok agama. Pemimpin agama juga memiliki pengaruh besar dalam meredakan ketegangan sosial atau konflik yang berkaitan dengan agama. Umat beragama Kabupaten Padang Pariaman dipimpin oleh pemuka agama yang selalu mendorong sikap damai dan menghindari ekstremisme dalam ajaran agama masing-masing.

5. Adanya Organisasi Kemasyarakatan yang Mendukung
   Berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga keagamaan di Kabupaten Padang Pariaman juga mendukung terciptanya kerukunan umat beragama. Organisasi-organisasi ini seringkali mengadakan kegiatan yang melibatkan lintas agama dan menyuarakan pentingnya toleransi serta kerukunan.
   Contoh: Organisasi masyarakat yang bekerja sama dalam kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan, serta memiliki program untuk memfasilitasi pertemuan antar kelompok agama.
6. Pengaruh Budaya Lokal yang Mendukung Toleransi
   Budaya lokal di Padang Pariaman yang menjunjung tinggi nilai gotong royong, saling menghormati, dan hidup berdampingan dengan damai menjadi faktor pendukung utama dalam mencapai tingkat kerukunan yang tinggi. Masyarakat Padang Pariaman secara tradisional memiliki nilai budaya yang mendukung kehidupan harmonis antar berbagai suku, agama, dan budaya.
   Contoh: Adanya tradisi adat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian masalah, serta pengakuan terhadap keberagaman budaya dan agama.
7. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Sosial
   Keamanan dan ketertiban sosial yang terjaga dengan baik di Kabupaten Padang Pariaman memberikan rasa aman bagi seluruh umat beragama untuk beribadah dan menjalankan aktivitas agama mereka tanpa rasa takut. Hal ini mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif untuk kerukunan.Adanya kerja sama yang baik antara aparat keamanan dan tokoh agama untuk menjaga stabilitas sosial, mencegah potensi konflik, dan menjaga kedamaian antar umat beragama.

Faktor-faktor pendukung seperti pemahaman multikultural, dialog antar agama, kebijakan pemerintah yang inklusif, kegiatan sosial bersama, pengaruh pemimpin agama, budaya lokal yang mendukung, stabilitas keamanan, dan pemanfaatan teknologi telah berkontribusi besar terhadap capaian IKUB Kabupaten Padang Pariaman yang mencapai 71,81% pada tahun 2024. Meskipun angka ini sudah menunjukkan hasil yang positif, terus meningkatkan faktor-faktor ini dapat lebih memperkuat kerukunan antar umat beragama di masa depan.

Adapun strategi serta upaya untuk perbaikan kinerja kedepan antara lain :

- Meningkatkan komitmen dan kerja sama yang berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat;
- Menggiatkan moderasi beragama di Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki kondisi masyarakat majemuk;

- FKUB ke depan lebih efektif dan dinamis dalam menjalankan tugasnya, mengingat tantangan yang semakin kompleks dalam kerukunan antar umat beragama;
- Kebijakan pemerintah daerah perlu lebih menekankan prinsip non-diskriminasi dalam pelayanan publik; dan
- Penguatan forum-forum dialog dan kerjasama antarumat beragama dapat mendorong terciptanya proyek-proyek bersama yang bermanfaat bagi masyarakat;

(f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.13
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama (IKUB)	103,90%	-	3,90%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi sasaran "Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama" pada tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat positif, baik dari sisi pencapaian target fisik maupun efisiensi pemanfaatan sumber daya. Berdasarkan data evaluasi, Indikator Kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) berhasil mencapai angka 103,90% dari target yang telah ditetapkan.

Pencapaian yang melampaui target 100% ini mengindikasikan bahwa program penguatan toleransi dan harmoni sosial di masyarakat telah berjalan dengan sangat efektif. Dari sisi manajerial, efektivitas ini juga dibarengi dengan optimalisasi sumber daya yang sangat baik, di mana tercatat Tingkat Efisiensi sebesar 3,90%.

SASASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Ketertiban Umum/Stabilitas

Meningkatnya Ketertiban Umum/Stabilitas merupakan sasaran strategis untuk mencapai Misi 1 yaitu : " Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Serta Memelihara Kerukunan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum". Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait sasaran strategis ini adalah : Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah.

Adapun formulasi pengukuran realisasi IKU tersebut adalah :

$$\text{Formulasi Pengukuran :} \quad \frac{\text{Jumlah konflik sosial yang tertangani}}{\text{Jumlah konflik sosial yang terlaporkan keseluruhan}} \quad X\ 100\%$$

(a) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025

Dalam rangka meningkatkan ketertiban umum/stabilitas, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan beberapa *stakeholders* telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2025. Salah satunya adalah dengan meningkatkan Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah.

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah Kabupaten Padang Pariaman :

Tabel 3.14
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah	%	100	100	100%	Sangat Berhasil

Sumber : Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman, 2024

Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah tahun 2025 yaitu 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% dengan capaian 100% (interpretasi " Sangat Berhasil"). Hasil tersebut didapat dari total 3 laporan potensi konflik di daerah yang masuk, seluruhnya dapat ditindak lanjuti atau diselesaikan. Berikut ini merupakan potensi konflik yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2025 :

Tabel 3.15
Petensi Konflik Sosial di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

NO	Objek Potensi Konflik	Latar Belakang/Kronologi Konflik	Pihak yang Berkonflik	Lokasi	Jenis Konflik	Tindaklanjut/ Upaya Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Konflik Lahan Tarok City (eks HGU PT. Purna Karya	Masyarakat menuntut kejelasan ganti rugi tanaman dan bangunan	Masyarakat dengan Pemerintah Daerah	Nagari Kapalo Hilalang Kec. 2x11 Kayutanam	Sumber Daya Alam (SDA) /Lahan	Pemerintah melakukan audiensi dengan warga Kapalo Hilalang untuk mengevaluasi SK peruntukan lahan dan	Lanjutan Tahun Sebelumnya

		yang terdampak sejak 2016				memastikan transparansi pembayaran ganti rugi agar pembangunan infrastruktur (seperti kawasan pendidikan dan kesehatan) tetap berjalan tanpa merugikan warga	
2	Proses Pengadaan Tanah Jalan Tol	Status Tanah Ulayat dan Kepemilikan, Sengketa NIlai Ganti Rugi, Persoalan Administrasi dan Tumpang Tindih Klaim Dampak Sosial dan Geografis (Fragmentasi Lahan) Komunikasi dan sosila yang kurang menyetuh Belum Selesai	Masyarakat dengan Pemerintah Daerah dan Dengan Perusahaan pelaksana pembangunan jalan Tol	Kec. 2x11 Kayu Tanam	Sumber Daya Alam (SDA) /Lahan	Pemerintah melakukan audiensi dengan warga Kec. 2x11 Kayutanam untuk mengevaluasi SK peruntukan lahan dan memastikan transparansi pembayaran ganti rugi agar pembangunan Tol dapat dilanjutkan	Lanjutan Tahun sebelumnya

Sumber : Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Konflik sosial di Padang Pariaman umumnya berakar pada dinamika antara percepatan pembangunan infrastruktur dan perlindungan hak komunal (adat). Berdasarkan data terbaru hingga awal 2026, berikut adalah penyebab utama yang sering memicu ketegangan:

1. Sengketa Lahan dan Status Tanah Ulayat
   Merupakan pemicu paling dominan. Persoalan sering muncul ketika lahan yang diklaim sebagai tanah ulayat (tanah adat milik kaum) dialihkan statusnya menjadi tanah negara atau digunakan untuk kepentingan pembangunan tanpa kesepakatan yang jelas. Kasus Tarok City: Konflik di Nagari Kapalo Hilalang masih berlanjut hingga akhir 2025. Warga menuntut pengembalian hak atas lahan eks-perkebunan yang kini dijadikan kawasan pendidikan terpadu dan perkantoran, karena merasa janji kompensasi dan pelibatan masyarakat adat belum terpenuhi.
   Ketidakjelasan Batas: Kurangnya dokumen tertulis (sertifikat) pada tanah adat yang hanya didasarkan pada sejarah lisan sering kali menimbulkan benturan saat proses administrasi pertanahan modern.
2. Proyek Strategis Nasional (Jalan Tol)
   Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin menjadi pusat perhatian karena beberapa kendala sosial: nilai ganti rugi dimana ketidaksepakatan mengenai besaran nilai ganti rugi yang ditetapkan tim penilai (appraisal) sering dianggap tidak sesuai dengan nilai produktivitas lahan (seperti sawah produktif). Sosialisasi yang Kurang: Warga di beberapa titik (seperti Korong Pincuran Tujuh) sempat melakukan penolakan fisik karena merasa kurang dilibatkan dalam musyawarah penentuan trase (jalur) jalan tol.
3. Masalah Lingkungan dan Tambang (Galian C)
   Aktivitas tambang ilegal atau yang tidak ramah lingkungan di sepanjang aliran sungai (seperti Sungai Batang Anai) kerap memicu kemarahan warga lokal. Dampak Ekologis: Warga Lubuk Alung, misalnya, memprotes galian C yang menyebabkan sumur warga kering, kerusakan irigasi, dan hilangnya kearifan lokal seperti "lubuk larangan". Dugaan Beking: Kecurigaan adanya perlindungan dari

pihak tertentu terhadap tambang ilegal menambah ketegangan antara masyarakat dan aparat/pemerintah.

Penanganan konflik sosial di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2025 difokuskan pada penguatan regulasi penyelesaian sengketa lahan serta penanganan isu kekerasan sosial yang meningkat. Pemerintah daerah melakukan pendekatan melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Pemanfaatan kearifan lokal. Dalam pembentukan Timdu ini dan regulasi Bupati Padang Pariaman Menetapkan Keputusan Bupati Nomor 93/KEP/BPP/2025 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2025 ini bertujaun untuk melaksanakan koordinasi, pencegahan, penghentian, dan pemulihan pasca konflik sesuai mandat UU No. 7 Tahun 2012. Dan juga Perintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Leading sektornya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik meluncurkan Program Inovasi Non Digital DIDIK PAPA (Deteksi Dini Konflik Padang Pariaman).

(b) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah pada tahun 2024 dengan Tahun 2025 :

Tabel 3.16
PerbandinganTarget dan Realisasi Indikator Kinerja
Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah	%	100	100	100	100	100	100	Sangat Berhasil

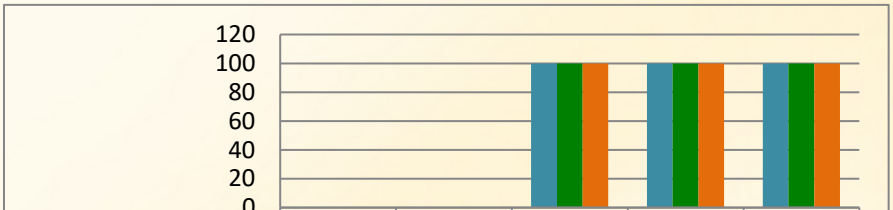
Sumber : Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa capaian realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah tahun 2025 sebesar 100%, dan pada tahun 2024 juga memperoleh realisasi sebesar 100%. Pencapaian 100% ini menggambarkan bahwa Padang Pariaman telah bertransformasi dari sekadar "pemadam kebakaran" saat konflik terjadi, menjadi daerah yang memiliki sistem imun sosial yang kuat. Keberhasilan di tahun 2024 memberikan fondasi stabilitas, sementara konsistensi di tahun 2025 membuktikan bahwa prosedur standar operasional (SOP) penanganan konflik telah berjalan secara institusional dan berkelanjutan.

(c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan target pada RPJMD 2021-2026 dengan realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Grafik 3.3
Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Target RPJMD	0	0	100	100	100
Realisasi Kinerja	0	0	100	100	100
% Capaian Kinerja	0	0	100	100	100

Sumber : Bagian Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Data Realisasi Indikator Kinerja "Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah" pada tahun 2021-2022 tidak tersedia karena indikator ini termasuk ke dalam indikator yang baru muncul setelah dilakukan penyesuaian pohon kinerja Kabupaten Padang Pariaman. Pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 100% dengan target RPJMD sebesar 100% dan pada tahun 2024 realisasi kinerja juga memperoleh angka sebesar 100% dari target RPJMD sebesar 100% dan realisasi tahun 2025 juga berhasil mencapai 100% . Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam upaya penanganan konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman.

(d) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Untuk mencapai indikator kinerja "Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah", Kantor Kesatuan Bangsa dan Poltik Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan Program/Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan indikator tersebut, yaitu:

1. Program Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
   a. Sub Kegiatan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah. . Jumlah anggaran Sub Kegiatan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah adalah sebesar Rp. 14.672.000,00 dan dengan realisasi anggarannya sebesar Rp. 14.550.000,00 persentase capaian sebesar 99,17%. Sub Kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :
      - ✓ Koordinasi ke Kantor Imigrasi dan Depnaker Sumbar tentang Keberdaan Orang Asing
      - ✓ Koordinasi dengan Kapolres Padang Pariaman terkait Konflik Sosial
      - ✓ Koordinasi dengan OPD yang terkait Konflik Sosial

- ✓ Koordinasi dengan Nagari Nagari terkait Konflik Sosial dan Keberadaan Orang Asing
- ✓ Pemantuan Keberadaan Orang Asing di Kabupaten Padang Pariaman

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini adalah FGD untuk menfasilitasi komunikasi pimpinan untuk membahasa masalah masalah sosial terjadi di Kabupaten Padang Pariaman dan untuk mencari solusi serta penyelesaian yang tepat. Kegiatan ini di Anggarkan sebesar Rp. 320.756.000,00 yang terealisasi sebesar 237.638.000,00 atau 74,09% yang delaksanakan sebanyak 9 kali pertemuan yang di ikuti oleh : Bupati Padang Pariaman, Kapolres Padang Pariaman, Dandim Pariaman, Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman dan Sekretaris Daerah Padang Pariaman.

Total pagu anggaran yang dialokasikan untuk kedua sub kegiatan strategis ini adalah sebesar Rp.335.428.000,00 dengan total realisasi keuangan sebesar Rp.252.188.000,00 atau menunjukkan persentase capaian rata-rata sebesar 75,18%.

Gambar 3.6
FGD Forkopimda Tentang Isu Sosial Politik di Kabupaten



Sumber : *Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Gambar 3.7
Masyarakat 2x11 Kayu Tanam Menyampaikan Aspirasi Masalah Tanah Tarok City di Kantor ATR/BPN Kab. Padang Pariaman



Sumber : Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman, 2025

(e) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Keberhasilan dari capaian indikator kinerja Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah yang ditindaklanjuti tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung sebagai berikut:

1. Keseriusan Pemerintah melakukan audiensi dengan masyarakat yang terdampak untuk mengevaluasi peruntukan lahan dan memastikan kepada masyarakat untuk transparansi pembayaran ganti rugi.
2. Pimpinan Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Forkopimda terkait Meakukan dialog besar yang melibatkan LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau), MUI, KAN dan Tokoh Masyarakat untuk mengaktifkan kembali Kontrol Sosial di tingkat Nagari di Padang Pariaman.
3. Peran adat untuk memanfaatkan kepemimpinan Datuak dalam system Adat Minangkabau di perkuat untuk menyelesaikan konflik internal kaum, terutama terkait tanah pusako agar tidak meluas menjadi konflik horizontal.
4. Adanya mediasi adat untuk mendorong penyelesaian sengketa melalui hukum adat yang lebih mengutamakan kedamaian jangka panjang dari pada menang-kalah secara hukum.

Adapun upaya atau strategi kedepan untuk pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran tokoh masyarakat dalam mencegah konflik.
2. Memperkuat lembaga mediasi untuk penyelesaian konflik secara damai.
3. Skema "Ganti Untung" yang Transparan
4. Mengoptimalkan peran media dalam memberikan informasi yang edukatif dan damai.
5. Revitalisasi Peran Nagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN)

(f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Berikut tabel perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggaran tahun 2025 :

Tabel 3.17
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja
Persentase IKU Penanganan Konflik Sosial di Daerah Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Ketertiban Umum/Stabilitas	Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah	100%	75,18%	24,82%

Pada tahun 2025 realisasi biaya untuk kegiatan penunjang indikator kinerja adalah Rp 335.428.000,00 sedangkan target biaya untuk semua program adalahRp 252.188.000,00 dengan capaian realisasi anggaran sebesar 75,18% dan persentase capaian kinerja sebesar 100%. Sehingga diperoleh efisiensi anggaran adalah 24,82%. Persentase efiseinsi ini dapat di asumsikan bahwa pada tahun 2025 secara umum terdapat efisiensi yang cukup baik dari penggunaan sumber daya dan sudah sangat efisien karena kegiatan kegiatan Penunjang Indikator Kinerja tersebut sangat mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Ketertiban Umum untuk menurunkan persentase konflik sosial masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman.

SASASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya Pelestarian Warisan Cagar Budaya

Meningkatnya Pelestarian Warisan Cagar Budaya merupakan sasaran strategis yang terdapat pada Misi 1 yaitu : "Meningkatnya kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban". Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait sasaran strategis ini adalah Persentase Warisan Cagar Budaya Yang di Lestarikan dan Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang di Lestarikan. Kedua indikator tersebut merupakan parameter krusial yang terjaga kesinambungannya dalam dokumen perencanaan daerah. Oleh karena itu indikator ini tercantum secara konsisten baik dalam RPJMD Periode 2021-2026 maupun dalam dokumen perencanaan terbaru, RPJMD Periode 2025-2029.

Kehadiran indikator ini di kedua dokumen tersebut menegaskan bahwa pelestarian nilai-nilai budaya merupakan prioritas strategis yang berkelanjutan. Pada tahun transisi 2025, pengukuran kinerja dilakukan dengan menyelaraskan target capaian yang telah ditetapkan, guna memastikan seluruh warisan cagar budaya tetap terdata, terjaga, dan terlindungi sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang berlaku.

A. Persentase Warisan Cagar Budaya Yang di Lestarikan

Warisan cagar budaya yang dilestarikan adalah jumlah situs atau objek cagar budaya yang mendapat perlindungan, perawatan dan pelestarian. Total warisan cagar budaya yang terdaftar adalah jumlah keseluruhan cagar budaya yang telah didata atau terdaftar dalam suatu wilayah atau kategori tertentu, merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten dalam rangka mencapai target sasaran strategis "Meningkatnya Pelestarian Warisan Cagar Budaya".

Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar budaya yang terdaftar}} \times 100\%$

(a) Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025

Berikut ini adalah target dan realisasi indikator kinerja Persentase Warisan Cagar Budaya Yang di Lestarikan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 berdasarkan RPJMD 2021-2026 :

Tabel 3.18
Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Persentase Warisan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Tahun 2025
Berdasarkan RPJMD 2021-2026

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Persentase Warisan Cagar Budaya Yang di Lestarikan	%	100	100	100	Sangat Berhasil

***Sumber** : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Indikator Kinerja Utama "Persentase Warisan Cagar Budaya Yang di Lestarikan" 100% dari target yang telah ditetapkan yaitu 100 % sehingga memperoleh capaian 100% dengan kategori "Sangat Berhasil". Cagar budaya yang dilestarikan sampai tahun 2025 sebanyak 98 cagar budaya dari 98 cagar budaya yang di tetapkan/terdaftar. Perhitungan warisan cagar budaya yang dilestarikan adalah sebagai berikut :
Jumlah cagar budaya yang dilestarikan : 98
Jumlah cagar budaya yang terdaftar : 98

Sedangkan untuk capaian tahun 2025 berdasarkan target RPJMD 2025-2029, dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.19
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Persentase Warisan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Tahun 2025
Berdasarkan RPJMD 2025-2029

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Persentase Warisan Cagar Budaya Yang di Lestarikan	%	85,00	100	117,65	Sangat Berhasil

Berdasarkan Tabel diatas, pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Persentase Warisan Cagar Budaya Yang Dilestarikan pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat positif. Dengan mengacu pada target RPJMD 2025-2029, parameter keberhasilan ditetapkan pada angka 85,00%.

Pada realisasinya, kinerja yang dicapai adalah 100%, yang berarti melampaui target yang telah ditentukan. Dengan nilai Capaian Kinerja sebesar 117,65%, predikat yang diberikan adalah Sangat Berhasil. Hal ini menunjukkan efektivitas yang luar biasa dalam pelaksanaan program pelestarian cagar budaya di tahun pertama periode RPJMD 2025-2029.

(b) Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024 dan Tahun 2025

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Warisan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Tahun 2024 dengan Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2021-2026

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Persentase Warisan Cagar Budaya Yang di Lestarikan	%	85,44	100	117,04	100	100	100	Sangat Berhasil

***Sumber** : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Berdasarkan data perbandingan tahun 2024 dan 2025, indikator Persentase Warisan Cagar Budaya yang Dilestarikan menunjukkan performa yang sangat stabil dan konsisten pada kategori Sangat Berhasil. Meskipun pada tahun 2024 nilai capaian kinerja sempat menyentuh angka 117,04% (akibat realisasi yang melampaui target awal yang lebih rendah), penetapan target 100% pada tahun 2025 merupakan langkah strategis untuk mengunci standar pelayanan maksimal. Keberhasilan mempertahankan realisasi di angka sempurna (100%) selama dua tahun berturut-turut mencerminkan manajemen pelestarian cagar budaya yang sudah mapan dan terstruktur.

Adapun perbandingan antara capaian tahun 2024 dan 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.21
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Warisan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Tahun 2024 dengan Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Persentase Warisan Cagar Budaya Yang di Lestarikan	%	85,44	100	117,04	85,00	100	117,65	Sangat Berhasil

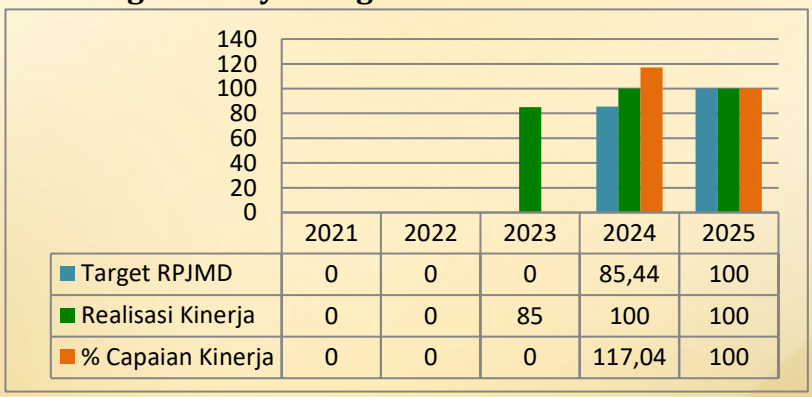
***Sumber** : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menetapkan target pelestarian warisan cagar budaya sebesar 85,44%. Dalam pelaksanaannya, realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 100%. Hal ini menunjukkan capaian kinerja sebesar 117,04% terhadap target yang ditetapkan.

Sedangkan tahun 2025, target yang ditetapkan berdasarkan RPJMD 2025-2029 sedikit disesuaikan menjadi 85,00%. Dengan komitmen yang konsisten, realisasi kembali menyentuh angka 100%, yang menghasilkan persentase capaian kinerja sebesar 117,65%.

(c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Grafik 3.4
Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Warisan Cagar Budaya Yang di Lestarikan Tahun 2021-2025



***Sumber** : Disdikbud Padang Pariaman, 2025*

Realisasi Indikator Kinerja "Persentase Warisan Cagar Budaya Yang di Lestarikan" merupakan indikator baru setelah dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pohon kinerja Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024 yang lalu. Hal ini mengakibatkan target jangka menengah dan realisasi kinerja 2021-2026 tidak dapat diperbandingkan. Namun pada tahun 2024 dari target 85,44% yang ditetapkan memperoleh realisasi kinerja sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 117,04% dan pada tahun 2025 realisasi kinerja meningkat menjadi 100%.

Sedangkan untuk perbandingan dengan target jangka menengah periode 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.22
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Warisan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Tahun 2025 dengan Target RPJMD 2025-2029

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Warisan Cagar Budaya Yang di Lestarikan	%	85,00	86,00	87,00	88,00	88,5	100	-	-	-	-

***Sumber** : Disdikbud Padang Pariaman, 2025*

Pemerintah daerah telah menetapkan sasaran pelestarian yang meningkat secara konsisten setiap tahunnya. Target dimulai pada angka 85,00% di tahun 2025 dan direncanakan mencapai 88,50% pada akhir periode RPJMD di tahun 2029. Peningkatan ini menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam perlindungan aset budaya daerah.

Pada tahun 2025, realisasi kinerja tercatat sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan hasil yang sangat memuaskan karena telah berhasil melampaui target tahunan yang ditetapkan (85,00%).

Realisasi ini sudah berada di atas target akhir periode RPJMD tahun 2029 (88,50%). Ini mengindikasikan bahwa akselerasi program pelestarian budaya yang dilakukan oleh Disdikbud berjalan sangat efektif dan melampaui ekspektasi perencanaan jangka menengah yang telah disusun.

(d) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Dalam pencapaian Indikator Kinerja "Persentase Warisan Cagar Budaya Yang di Lestarikan", terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan antara lain :

1. Seluruh Cagar Budaya yang telah di tetapkan tahun ini telah di tindak lanjuti dengan dilakukannya pelestarian (pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan) terhadap cagarbudaya tersebut.
2. Adanya dukungan tenaga ahli dan tim pelestarian cagar budaya (TACB) dalam kajian, rekomendasi, dan pendampingan teknis.
3. Adanya partisipasi aktif masyarakat dan pemilik objek dalam menjaga dan merawat cagar budaya.

Mengingat capaian kinerja indikator ini pada tahun 2025 sudah mencapai 100% (Sangat Berhasil), maka faktor penghambat yang relevan bukan lagi bersifat kegagalan target, melainkan hambatan dalam proses pelaksanaan atau tantangan keberlanjutan di

masa depan. Berikut adalah faktor penghambat yang umum ditemukan di Kabupaten Padang Pariaman terkait pelestarian Cagar Budaya:

1. Faktor Teknis dan Kelangkaan Tenaga Ahli
   - Kelangkaan Bahan Konservasi: Kesulitan mendapatkan material restorasi yang harus sesuai dengan bahan asli bangunan bersejarah (seperti kayu atau batu tertentu) sesuai kaidah pelestarian.
2. Faktor Status Kepemilikan dan Hukum
   - Kepemilikan Pribadi/Kaum: Banyak objek diduga cagar budaya (ODCB) di Padang Pariaman masih dimiliki oleh ahli waris atau kaum (tanah ulayat). Hal ini sering menghambat proses pemugaran atau renovasi karena diperlukan koordinasi dan izin keluarga yang panjang.
3. Faktor Lingkungan dan Geografis
   - Kerentanan Bencana: Kondisi geografis Padang Pariaman yang rawan gempa dan cuaca ekstrem mempercepat pelapukan struktur fisik bangunan cagar budaya yang rata-rata sudah berusia tua.
   - Alokasi Anggaran Pemeliharaan: Meskipun target tercapai, anggaran seringkali lebih fokus pada pendataan dan sertifikasi, sementara anggaran untuk pemeliharaan rutin atau restorasi fisik yang memakan biaya besar masih sangat terbatas.

Untuk mengatasi hambatan dalam pelestarian cagar budaya di Kabupaten Padang Pariaman, berikut adalah beberapa alternatif solusi strategis yang dapat diterapkan:

1. Penguatan Aspek Hukum dan Administrasi
   - Percepatan Penetapan Status: Mendorong Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) untuk mempercepat proses kajian terhadap Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) agar segera mendapatkan SK Penetapan Bupati sebagai payung hukum perlindungan.
   - Penyusunan Perda Pelestarian: Menginisiasi Peraturan Daerah khusus mengenai pengelolaan cagar budaya yang mengatur insentif bagi pemilik (keluarga/kaum) yang menjaga keaslian asetnya.
2. Solusi Konflik Kepemilikan (Tanah Ulayat/Pribadi)
   - Skema Hibah atau Pinjam Pakai: Melakukan pendekatan persuasif kepada ahli waris atau kaum untuk membuat kesepakatan pinjam pakai atau hibah pengelolaan kepada pemerintah daerah guna keperluan restorasi dan pengembangan wisata.
   - Pemberian Insentif Pajak: Memberikan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi pemilik bangunan cagar budaya sebagai kompensasi atas pembatasan renovasi fisik bangunan.
3. Peningkatan Kapasitas SDM dan Teknis
   - Sertifikasi Juru Pelihara: Melakukan pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga lokal sebagai juru pelihara (Jupel) yang bekerja sama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK).
   - Digitalisasi Data (E-Cagar Budaya): Membangun sistem pendataan berbasis GIS (Geographic Information System) untuk memantau kondisi fisik cagar budaya secara real-time guna deteksi dini kerusakan akibat faktor alam.
4. Strategi Pembiayaan Kreatif

- Kerja Sama CSR: Menggandeng sektor swasta atau BUMN/BUMD melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pembiayaan restorasi fisik yang membutuhkan biaya besar.
- Dana Desa untuk Pelestarian: Mendorong Pemerintah Nagari mengalokasikan sebagian dana desa untuk pemeliharaan situs sejarah yang memiliki potensi sebagai objek wisata edukasi tingkat nagari.

5. Sosialisasi dan Edukasi Berbasis Komunitas
   - Pembentukan Sahabat Cagar Budaya: Membentuk komunitas relawan dari generasi muda untuk mengkampanyekan kesadaran sejarah guna mencegah vandalisme.
   - Integrasi Kurikulum Lokal: Memasukkan pengenalan cagar budaya daerah ke dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah untuk menumbuhkan rasa memiliki sejak dini.

(e) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya pelestarian Warisan Cagar Budaya terdapat Program dan Kegiatan yang mendukung dari capaian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pembinaan Sejarah dengan Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 66.355.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.308.198,00.
2. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan anggaran sebesar Rp. 468.887.500,00 dan realisasi sebesar Rp. 113.797.589,00.

Secara akumulatif, dukungan anggaran untuk pencapaian sasaran Meningkatnya pelestarian Warisan Cagar Budaya di Kabupaten Padang Pariaman adalah sebesar Rp. 535.242.500,00. Dari total pagu tersebut, realisasi keuangan yang tercapai adalah sebesar Rp136.105.787,00 atau secara persentase sebesar 25,43%.

Gambar 3.8
Warisan Cagar Budaya Makam Syekh Burhanudin



***Sumber** : Disdikbud Padang Pariaman, 2025*

(f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan

anggaran. Berikut tabel perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggaran indikator kinerja tahun 2025 :

Tabel 3.23
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja
Persentase Warisan Cagar Budaya yang Dilestarikan Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2021-2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Pelestarian Warisan Cagar Budaya	Persentase Warisan Cagar Budaya Yang di Lestarikan	100%	25,43%	74,57%

Tingginya angka efisiensi pada tahun 2025 ini mengindikasikan bahwa seluruh program pelestarian cagar budaya tahun 2025 berhasil dilaksanakan melalui metode yang sangat hemat biaya, seperti penguatan koordinasi lintas sektor atau optimalisasi swadaya masyarakat tanpa bergantung sepenuhnya pada belanja daerah. Capaian ini menjadi hal yang positif dalam penerapan prinsip *Value for Money*, di mana output maksimal dapat dihasilkan melalui penggunaan sumber daya finansial yang minimal.

Sedangkan untuk melihat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya jika capaian kinerja berdasarkan target pada RPJMD 2025-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.24
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja
Persentase Warisan Cagar Budaya yang Dilestarikan Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Pelestarian Cagar dan Warisan Budaya	Persentase Warisan Cagar Budaya Yang di Lestarikan	117,65%	25,43%	92,22%

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2025 berdasarkan RPJMD tahun 2025-2029 maka tingkat efisiensi yang diperoleh jauh lebih tinggi yaitu sebesar 92,22%. Capaian efisiensi ini menegaskan komitmen daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, di mana pemanfaatan sumber daya yang minimal mampu memberikan dampak positif yang maksimal bagi pelestarian identitas budaya daerah.

B. Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang di Lestarikan

Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang di Lestarikan merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten yang diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka mencapai target sasaran strategis "Meningkatnya Pelestarian Warisan Cagar Budaya". Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) merupakan tradisi, ekspresi lisan, seni petunjukan adat istiadat, ritual, praktik sosial, pengetahuan tradisional, hingga keterampilan kerajinan yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Adapun formulasi pengukuran realisasi indikator ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Formulasi Pengukuran :} \quad \frac{\text{Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan}}{\text{Total warisan budaya tak benda yang terdata}} \times 100\%$$

a) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang di Lestarikan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 :

Tabel 3.25
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan Tahun 2025
Berdasarkan RPJMD 2021-2026

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	100	100	100	Sangat Berhasil

***Sumber** : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Indikator Kinerja Utama "Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang di Lestarikan" sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan yaitu 100 sehingga memperoleh capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori "Sangat Berhasil". Sampai dengan tahun 2025 jumlah warisan budaya tak benda yang terdaata sebanyak 14 warisan budaya dan yang dilestarikan sebanyak 14 warisan budaya tak benda. Perhitungan persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan adalah sebagai erikut :

Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan : 14
Total warisan budaya tak benda yang terdata : 14
Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang di Lestarikan : (Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan/Total warisan budaya tak benda yang terdata x 100) : (14/14 x 100 = 100%).

Khusus untuk tahun 2025 sebanyak 3 (tiga) warisan budaya tak benda yang ditetapkan diantaranya : Maniliak Bulan, Indang Tigo Sandiang dan Malacuik Marapulai.

Sedangkan realisasi kinerja tahun 2025 jika disandingkan dengan target pada RPJMD 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.26
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan Tahun 2025
Berdasarkan RPJMD 2025-2029

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang di Lestarikan	%	66,00	100	151,52	Sangat Berhasil

***Sumber** : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Mengacu pada target yang ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029, sasaran kinerja untuk tahun 2025 dipatok pada angka 66,00%.

Berdasarkan data laporan dari Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, realisasi yang berhasil dicapai di lapangan adalah sebesar 100%. Pencapaian ini menghasilkan rasio efektivitas kinerja sebesar 151,52%, yang secara kualitatif dikategorikan Sangat Berhasil.

Terlampauinya target ini membuktikan bahwa program pelestarian budaya tetap berjalan optimal di tengah masa transisi dokumen perencanaan dari RPJMD 2021-2026 menuju RPJMD 2025-2029. Hal ini sekaligus mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kontinuitas perlindungan kekayaan budaya tak benda sebagai prioritas lintas periode.

b) Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024 dan Tahun 2025

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.27
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan Tahun 2024 dengan Tahun 2025
Berdasarkan RPJMD 2021-2026

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang di Lestarikan	%	71,43	100	140	100	100	100	Sangat Berhasil

***Sumber** : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Pada tahun 2024, target pelestarian ditetapkan pada angka 71,43%. Namun, pada tahun 2025, instansi menunjukkan komitmen yang jauh lebih berani dengan menaikkan target menjadi 100%. Kenaikan target ini menunjukkan adanya peningkatan standar mutu dan rasa tanggung jawab yang lebih besar dalam melindungi warisan budaya. Meskipun target pada tahun 2025 ditingkatkan secara signifikan menjadi angka maksimal, realisasi di lapangan terbukti mampu menjawab tantangan tersebut dengan tetap mencapai angka 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kerja pelestarian telah mengalami penguatan kapasitas, sehingga target yang lebih tinggi tetap dapat diselesaikan dengan sempurna.

Tabel 3.28
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan Tahun 2024 dengan Tahun 2025
Berdasarkan RPJMD 2025-2029

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang di Lestarikan	%	71,43	100	140	66,00	100	151,52	Sangat Berhasil

***Sumber** : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Pada tahun 2024, target yang ditetapkan adalah sebesar 71,43%. Namun, realisasi di lapangan mencapai angka maksimal sebesar 100%. Hal ini menghasilkan persentase

capaian kinerja sebesar 140%, yang menandakan bahwa target tahun tersebut berhasil dilampaui secara signifikan.

Pada tahun 2025, meskipun target yang ditetapkan berdasarkan RPJMD 2025-2029 disesuaikan menjadi 66,00%, realisasi kinerja tetap konsisten berada di angka 100%. Penyesuaian target ini menyebabkan persentase capaian kinerja meningkat tajam menjadi 151,52%. Berdasarkan perbandingan dua tahun tersebut, instansi terkait berhasil mempertahankan realisasi 100% dalam upaya pelestarian warisan budaya tak benda. Dengan capaian kinerja yang selalu berada jauh di atas 100%, maka indikator ini dikategorikan ke dalam predikat "Sangat Berhasil".

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.29
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan dengan Target RPJMD 2021-2026

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang di Lestarikan	%	N/A	N/A	N/A	71,43	100	N/A	N/A	N/A	100	100

***Sumber** : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Meskipun indikator Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan baru muncul sejak tahun 2024 akibat penyesuaian pohon kinerja kabupaten, capaian yang dihasilkan sangat impresif. Dari nilai capaian 140% pada tahun 2024 hingga pemenuhan target maksimal 100% tahun 2025, seluruh target yang diamanatkan dalam sisa periode RPJMD telah tuntas dilaksanakan dengan predikat 'Sangat Berhasil'.

Sedangkan untuk melihat perbandingan dengan target jangka menengah periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.30
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan Tahun 2025 dengan Target RPJMD 2025-2029

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang di Lestarikan	%	66,00	68,00	70,00	72,00	74,00	100	-	-	-	-

***Sumber** : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan selama periode perencanaan RPJMD 2025-2029 ditetapkan meningkat secara bertahap setiap tahunnya, dimulai dari 66,00% pada tahun 2025 hingga mencapai 74,00% di akhir periode (tahun 2029).

Pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD (tahun 2025), efektivitas program menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Dengan target tahunan sebesar 66,00%, realisasi kinerja yang berhasil dicapai adalah sebesar 100%. Capaian ini tidak hanya

memenuhi target tahun 2025, tetapi secara substansi telah melampaui ambang batas target yang ditetapkan hingga akhir periode RPJMD di tahun 2029.

Keberhasilan mencapai angka 100% di awal periode ini mencerminkan akselerasi yang kuat dalam upaya pelestarian warisan budaya tak benda, sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi pemerintah daerah untuk mempertahankan serta meningkatkan kualitas pelestarian pada tahun-tahun berikutnya.

d) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Pada Indikator Kinerja Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan, terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Seluruh WBTB telah diusulkan, dicatat, dan ditetapkan, sehingga menjadi prioritas untuk dilestarikan.
2. Adanya peran aktif Pelaku seni dan komunitas budaya dalam pewarisan budaya.
3. Perlindungan terhadap cagar budaya yang dilindungi dilakukan melalui berbagai cara, termasuk pengawasan, pemeliharaan, restorasi, dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya menjaga warisan budaya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa warisan budaya yang ada di Kabupaten Padang Pariaman tetap bisa dilestarikan sehingga tetap terjaga dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang.
4. Pengakuan dan Pencatatan: Mengidentifikasi dan mencatat elemen-elemen warisan budaya tak benda yang penting melalui survei, penelitian, dan konsultasi dengan komunitas lokal dan para ahli budaya.
5. Pengembangan Kebijakan Perlindungan: Membuat undang-undang, regulasi, atau kebijakan khusus untuk melindungi dan mempromosikan warisan budaya tak benda, serta menetapkan status khusus dan pengakuan resmi terhadap elemen-elemen ini.
6. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya warisan budaya tak benda, mempromosikan apresiasi terhadap tradisi dan praktik budaya mereka, serta meningkatkan kesadaran akan ancaman yang mungkin dihadapi oleh warisan ini.
7. Partisipasi Komunitas: Melibatkan komunitas lokal dalam proses pengambilan keputusan tentang pelestarian dan pengembangan warisan budaya tak benda, serta memberdayakan mereka untuk mengambil peran aktif dalam menjaga dan memelihara tradisi mereka sendiri.
8. Pengembangan Program Pendidikan dan Pelatihan: Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan untuk memperkuat keterampilan dan pengetahuan tentang warisan budaya tak benda, baik di kalangan generasi muda maupun anggota masyarakat secara umum.
9. Kolaborasi Antar Pihak: Membangun kemitraan antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk mendukung upaya pelestarian dan pengembangan warisan budaya tak benda.

10. Pendokumentasian dan Penelitian: Melakukan dokumentasi lengkap tentang elemen-elemen warisan budaya tak benda, termasuk pengumpulan cerita, gambar, rekaman audio/video, dan data lainnya untuk keperluan penelitian dan pemeliharaan.
11. Pengembangan Program Budaya dan Festival: Mengadakan acara-acara budaya dan festival untuk mempromosikan warisan budaya tak benda, serta memperkuat identitas budaya dan kebanggaan masyarakat terhadap warisan mereka.
12. Penggunaan Teknologi dan Media: Memanfaatkan teknologi modern dan media sosial untuk mempromosikan dan membagikan informasi tentang warisan budaya tak benda dengan lebih luas, serta untuk mendukung upaya dokumentasi dan pendidikan.

Meskipun capaian kinerja menunjukkan hasil yang Sangat Berhasil (100%), terdapat beberapa faktor penghambat dalam proses pelaksanaan pelestarian di lapangan yang perlu menjadi catatan antara lain :

1. Tantangan Regenerasi Pelaku Budaya, misalnya menurunnya jumlah praktisi seni atau tradisi tertentu.
2. Kendala Geografis dan Aksesibilitas, yang menyulitkan tim pemantau dan peneliti dalam melakukan verifikasi, validasi, serta pendampingan berkelanjutan untuk memastikan WBTB tersebut tetap lestari dan aktif dipraktikkan oleh Masyarakat.

Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam capaian kinerja ini adalah:

1. Mendorong kolaborasi dengan pihak swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan mengintensifkan komunikasi dengan Pemerintah Nagari
2. Peningkatan dan Penguatan Tim Ahli Warisan Budaya (TAWB) Kabupaten Padang Pariaman.
3. Mendorong para pelaku budaya untuk mengemas warisan budaya menjadi atraksi wisata atau produk ekonomi kreatif yang bernilai jual.
4. Memperkuat kebijakan Muatan Lokal (Mulok) di tingkat SD dan SMP. Sekolah-sekolah dapat diwajibkan bekerja sama dengan tokoh budaya setempat untuk mengajarkan seni tradisi seperti: *Silek*, *Randai*, atau *Induang* secara langsung kepada siswa.
5. Mengadakan acara-acara budaya dan festival untuk mempromosikan warisan budaya tak benda, serta memperkuat identitas budaya dan kebanggaan masyarakat terhadap warisan mereka.
6. Memanfaatkan teknologi modern dan media sosial untuk mempromosikan dan membagikan informasi tentang warisan budaya tak benda dengan lebih luas, serta untuk mendukung upaya dokumentasi dan pendidikan.
7.

e) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU

Adapun Program pendukung capaian indikator kinerja ini Adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kebudayaan dengan anggaran sebesar Rp 1.721.909.700,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.271.470.618,00.
2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional dengan Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 23.725.000,00 dan realisasi Rp. 0,00.

Penyerapan pada program ini tergolong cukup tinggi dimana persentase realisasi anggaran mencapai 73,84% menunjukkan bahwa sebagian besar rencana kerja telah diimplementasikan secara efektif, meskipun masih terdapat sisa anggaran sekitar 26,16% yang belum terserap hingga akhir periode pelaporan.

Gambar 3.9
Warisan Budaya Tak Benda Tahun 2025



Indang Tigo Sandiang



Malacuik Marapulai



Maniliak Bulan

***Sumber** : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut tabel perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggaran indikator kinerja Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestariakan tahun 2025 :

Tabel 3.31
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja
Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan Tahun 2025
Berdasarkan RPJMD 2021-2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Pelestarian Warisan Cagar Budaya	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang di Lestarikan	100%	73,84%	26,16%

Pada tahun 2025 program yang mendukung sasaran Meningkatnya Pelestarian Warisan Cagar Budaya di Kabupaten Padang Pariaman mencatatkan erapan anggaran tercatat sebesar 73,84%. Terdapat selisih sebesar 26,16% antara anggaran yang dialokasikan dengan anggaran yang digunakan. Penyerapan yang tidak mencapai 100% dalam konteks ini tidak menunjukkan kegagalan penyerapan, melainkan mencerminkan optimalisasi biaya dalam pelaksanaan program.

Sedangkan untuk melihat tingkat efisiensi berdasarkan target yang ditetapkan pada RPJMD 2025-2029 dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.32
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja
Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan Tahun 2025
Berdasarkan RPJMD 2025-2029

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Pelestarian Warisan Cagar Budaya	Persentase Warisan Cagar Budaya Yang di Lestarikan	151,52%	73,84%	77,68%

Tabel di atas menggambarkan tingkat efisiensi yang sangat baik dalam pelaksanaan program kerja untuk sasaran "Meningkatnya Pelestarian Warisan Cagar Budaya". Pada tahun 2025, indikator Persentase Warisan Cagar Budaya Yang dilestarikan berhasil mencatatkan capaian kinerja yang luar biasa, yaitu sebesar 151,52%. Angka capaian yang jauh melampaui target ini menunjukkan bahwa program pelestarian dilaksanakan dengan efektivitas yang sangat tinggi.

Aspek yang paling menonjol dari data ini adalah perbandingan antara hasil kerja dengan penggunaan anggaran. Meskipun capaian kinerja melampaui target (151,52%), penyerapan anggaran yang digunakan hanya sebesar 73,84%. Hal ini menghasilkan nilai Tingkat Efisiensi sebesar 77,68%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa instansi terkait telah berhasil melakukan penghematan anggaran tanpa mengurangi kualitas output kerja, atau dengan kata lain, mampu meraih hasil maksimal dengan biaya yang lebih ekonomis dan efisien.

SASASARAN STRATEGIS 5

Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayah

Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayah merupakan sasaran strategis untuk mencapai Misi ke-2 yaitu : "Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Publik Secara Berkelanjutan dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Penataan Ruang", terdapat 3 (tiga) indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait sasaran strategis ini yaitu Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang, Persentase Ketaatan RTRW dan Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik.

A. Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang

Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka mencapai target sasaran strategis "Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayah".

Adapun formulasi pengukuran realisasi kinerjanya sebagai berikut :

$$\text{Formulasi Pengukuran} : \frac{\text{Panjang jalan memenuhi kondisi jaringan jalan baik dan sedang}}{\text{Panjang jaringan jalan kabupaten}} \times 100\%$$

a) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja "Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang" Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.33
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang
Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	%	73,00	63,53	87,03	Berhasil

***Sumber** : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Pada tahun 2025 panjang jalan yang memenuhi kondisi jaringan jalan baik dan sedang sepanjang 1.318,85 KM, sedangkan total panjang jalan kabupaten yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor:201/KEP/BPP/2025 tanggal 30 April 2025 tentang Penetapan Status Jalan Sebagai Jalan Kabupaten adalah 2.075,85 KM, sehingga didapatkan realisasi persentase tingkat kondisi jaringan jalan baik dan sedang sebesar 63,53% dari target

sebesar 73,00% dengan capaian kinerja yang diperoleh sebesar 87,03% dengan interpretasi 'Berhasil'.

b) Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024 dan Tahun 2025

Adapun perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang Tahun 2024 dengan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.34
Perbandingan Target Realisasi Indikator Kinerja
Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang
Tahun 2024 dengan Tahun 2025

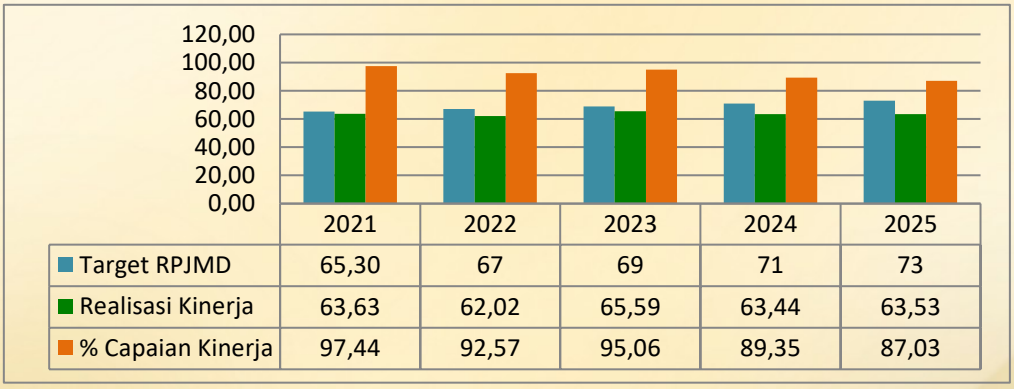
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang	%	71,00	63,44	89,35	73,00	63,53	87,03	Berhasil

***Sumber** : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Pada Tahun 2024 panjang kondisi jaringan jaringan jalan kabupaten baik dan sedang sepanjang 1.359,25 KM sedangkan pada tahun 2024 telah dilakukan rehabilitasi pada kondisi jalan rusak sepanjang 49,96 KM, sehingga total panjang kondisi jaringan jaringan jalan kabupaten baik dan sedang tahun 2024 sepanjang 1.409,21 KM dari total Panjang jalan kabupaten 2.072,40 KM.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Grafik 3.5
Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Indikator Kinerja
Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang
Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Target RPJMD	65,30	67	69	71	73
Realisasi Kinerja	63,63	62,02	65,59	63,44	63,53
% Capaian Kinerja	97,44	92,57	95,06	89,35	87,03

***Sumber** : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Realisasi indikator kinerja "Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang" pada tahun 2021 sebesar 63,63% dengan target RPJMD sebesar 65,30%.

Pada tahun 2022 realisasi menurun menjadi 62,02% dengan target RPJMD sebesar 67%, hal ini disebabkan adanya refocussing anggaran pasca penangan covid-19. Setelah itu pada tahun 2023 realisasi kinerja mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar 65,59% dari target RPJMD sebesar 69%. Pada tahun 2024 terjadi penurunan realisasi kinerja sebesar 63,44% dari target RPJMD sebesar 71% yang disebabkan oleh banyaknya kerusakan-kerusakan pada ruas jalan karena bencana alam. Sedangkan pada tahun 2025 realisasi mengalami sedikit peningkatan menjadi 63,53% dengan target RPJMD sebesar 73%.

d) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Dalam pencapaian Indikator Kinerja, terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

1. Pemeliharaan rutin jalan yang optimal turut mendukung dalam menjaga kondisi jalan tetap baik. Meskipun pada kegiatan pemeliharaan jalan ini hanya untuk permukaan jalan saja dan tidak mempunyai nilai konstruksi, tetapi dapat menutup lubang-lubang jalan yang ada, sehingga jalan menjadi lebih layak dilalui;
2. Perencanaan teknis yang baik dan pengawasan yang tepat dalam pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jalan;
3. Terinventarisasinya informasi jalan dan jembatan di Kabupaten Padang Pariaman melalui survei kondisi jalan dan jembatan secara berkala setiap tahun.

Adapun faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja tersebut antara lain :

1. Tingkat kerusakan jalan lebih cepat dibandingkan laju pembangunan jalan dan Jembatan.
2. Seringnya terjadi bencana alam seperti banjir, longsor dan gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan jalan dan jembatan
3. Perubahan tata guna lahan yang mengakibatkan timbulnya genangan air saat musim hujan di badan jalan sehingga mempercepat proses kerusakan konstruksi jalan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam upaya mencapai realisasi indikator kinerja, terdapat beberapa upaya yang dilakukan yaitu :

1. Perbaikan kondisi jalan dengan menyediakan sistem drainase yang lebih baik untuk mencegah banjir dan trotoar yang ramah pejalan kaki.
2. Peningkatan kualitas kemantapan jalan melalui pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan termasuk pemeliharaan rutin jalan serta pemenuhan kelengkapan jalan.
3. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi yang tangguh bencana di kawasan prioritas rawan bencana.

e) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU

Program Penyelenggaraan jalan dengan kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten/kota yang terdiri atas 6 sub kegiatan :

Program Penyelenggaraan jalan dengan kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten/kota yang terdiri atas 6 sub kegiatan :

1. Survei kondisi jalan/jembatan
2. Pembangunan jalan
   Pada sub kegiatan Pembangunan Jalan dilaksanakan pekerjaan Hotmix Jalan Koto Panjang Ulakan Tapakis
3. ehabilitasi jalan
   Pada sub kegiatan Pembangunan Jalan dilaksanakan pekerjaan Ruas jalan Balah Air - Sungai Ibur
4. Pemeliharaan rutin jalan
5. Pembangunan jembatan
   - Pembangunan Jembatan Padang Maduang
   - Pembangunan Jembatan Kampung Tanjung
   - Pembangunan Jembatan Kampung Tangah Lubuk Alung
6. Rehabilitasi Jembatan
   - Rehabilitasi Jembatan Korong Sunai Pingai Nagari III Koto Aur Malintang
   - Rehabilitasi Jembatan Simpang Toboh - Kampung Galapung Ulakan
   - Rehabilitasi Jembatan Tajung Basung
   - Rehabilitasi Jembatan Kasai Tapakih
   - Rehabilitasi Jembatan Kasai Batang Anai
   - Rehabilitasi Jembatan Palak Pisang

Pada Tahun 2025 realisasi biaya untuk Program Penyelenggaraan Jalan adalah Rp. 14.650.427.597,00 sedangkan target biaya untuk program adalah Rp 16.388.764.714,00. Pencapaian kinerja jalan sebesar 87,03% dengan penyerapan anggaran 89,39%.

Gambar 3.10
Rehabilitasi Jalan



***Sumber** : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Berikut tabel perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggaran indikator kinerja tahun 2025 :

Tabel 3.35
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayah	Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang	87,03%	89,39%	-2,36%

Pada Tahun 2025 realisasi biaya untuk Program Penyelenggaraan Jalan adalah Rp. 14.650.427.597,00 sedangkan target biaya untuk program adalah Rp 16.388.764.714,00. Pencapaian kinerja jalan sebesar 87,03% dengan penyerapan anggaran 89,39% menghasilkan selisih efisiensi sebesar -2,36%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menitikberatkan pada peningkatan standar kualitas (mutu) konstruksi di atas sekadar kuantitas fisik. Penggunaan anggaran yang sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian fisik merupakan langkah strategis untuk memastikan jalan memiliki daya tahan (durabilitas) jangka panjang, guna meminimalisir biaya pemeliharaan di tahun-tahun mendatang. Meskipun efisiensi negatif, namun target kemantapan jalan tetap mendekati sasaran utama demi keselamatan pengguna jalan

B. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Jaringan irigasi merupakan saluran, bangunan dan struktur tambahan membentuk satu kesatuan untuk mengatur air irigasi mulai dari penyediaan, pengumpulan, pendistribusian, pengelolaan, penggunaan dan pembuangan. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah indikator kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman yang perlu dilaksanakan demi pemberdayaan terhadap masyarakat.

Pengukuran indikator kinerja ini dilaksanakan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Formulasi Pengukuran :} \quad \frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kabupaten}} \quad \text{X } 100\%$$

(a) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025

Adapun capaian Indikator Kinerja Utama "Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik " tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.36
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	71,04	47,17	66,40	Cukup Berhasil

***Sumber** : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Pada Tahun 2025 Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah 12.080,98 Ha, sedangkan total luas irigasi kabupaten yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi adalah 25.611 Ha, sehingga didapatkan realisasi persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik sebesar 47,17% dari target sebesar 71,04% dengan capaian kinerja yang diperoleh sebesar 66,40% dengan interpretasi 'Cukup Berhasil'.

(b) Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024 dan Tahun 2025

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 dengan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.37
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2024 dan Tahun 2025

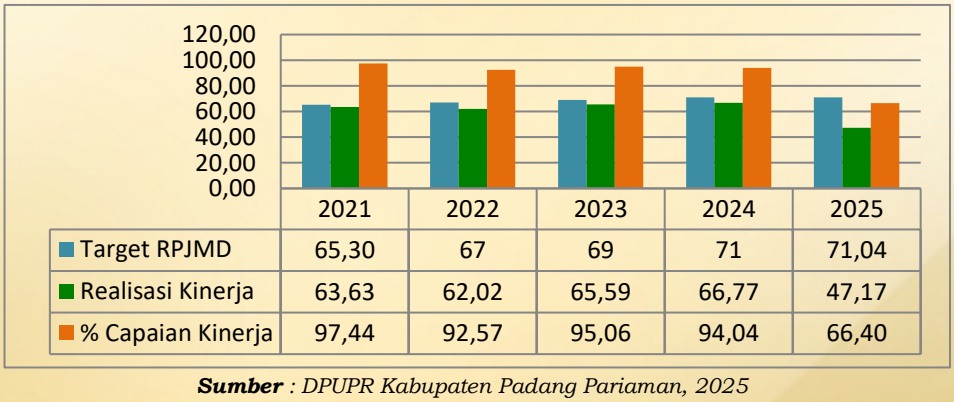
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	70,00	66,77	95,39	71,04	47,17	66,40	Cukup Berhasil

***Sumber** : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Pada tahun 2025 dilakukan perbaikan pada daerah irigasi dengan luas 3.441 Ha. Dari Tabel 3.25 diatas dapat dilihat terjadi penurunan capaian kinerja dari tahun 2024 sebesar 95,39% turun menjadi 90,65% pada tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh terjadinya bencana alam tanah longsor dan banjir yang mengakibatkan kerusakan daerah irigasi sebesar 6.678 Ha. Pada tahun 2025 dilakukan perbaikan pada daerah irigasi dengan luas 3.441 Ha.

(c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Grafik 3.6
Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Indikator Kinerja
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Target RPJMD	65,30	67	69	71	71,04
Realisasi Kinerja	63,63	62,02	65,59	66,77	47,17
% Capaian Kinerja	97,44	92,57	95,06	94,04	66,40

***Sumber** : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Realisasi Indikator Kinerja "Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik" pada tahun 2021 sebesar 69,30% dengan target RPJMD sebesar 54,82%. Pada tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 69,47% dengan target RPJMD sebesar 58,72%. Dan pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 68,50% dari target RPJMD sebesar 62,72%. Pada tahun 2024 realisasi kinerja menurun menjadi 66,77% dengan target RPJMD sebesar 70,00%. Sedangkan pada tahun 2025 menurun lagi menjadi 47,17% dengan target RPJMD sebesar 71,04%.

(d) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Dalam pencapaian realisasi indikator kinerja, terdapat beberapa hambatan-hambatan yang ada diantaranya adalah :

1. Terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang mengakibatkan kerusakan daerah irigasi sebanyak 6.678 Ha.
2. Belum semua kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air yang memiliki standar operasional yang baku.
3. Faktor iklim seperti perubahan debit air dan pencemaran air mengurangi efektivitas pengelolaan irigasi.

Adapun faktor penyebab keberhasilan yang menyebabkan realisasi indikator kinerja bisa tercapai adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data melalui e-PAKSI yang merupakan aplikasi survey berbasis Android yang digunakan untuk pengambilan data survey inventaris aset Jaringan Irigasi, Aset Non Jaringan Irigasi dan Kinerja Irigasi.
2. Adanya program P3ATGAI dari Kementerian Pekerjaan Umum yang dilaksanakan secara swakelola oeh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) untuk mendukung ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas pertanian dan memberdayakan masyarakat desa.
3. Operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dilakukan secara berkala.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam upaya mencapai realisasi indikator kinerja, terdapat beberapa upaya yang dilakukan yaitu :

1. Peningkatan Peraturan Pemerintah Daerah terkait pengelolaan Sumber Daya Air
2. Pemanfaatan lahan sub-optimalisasi melalui revitalisasi
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan irigasi

(e) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU

Program pengelolaan sumber daya air (SDA) dengan kegiatan Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam satu daerah kabupaten/kota, yang terdiri atas 4 sub kegiatan :

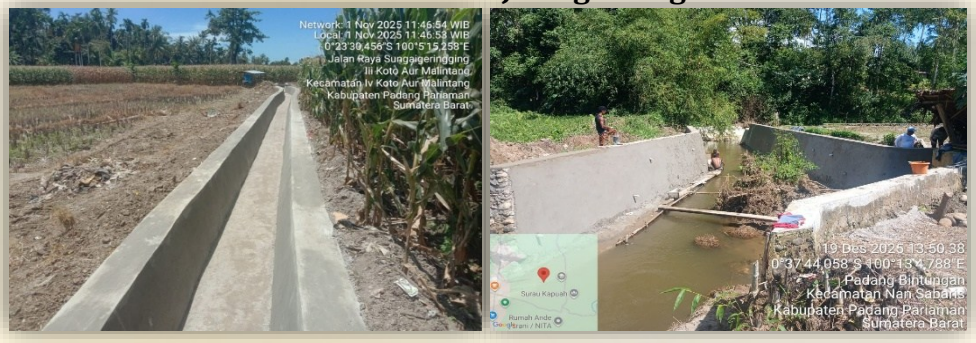
1. Pembangunan jaringan irigasi;
   Pada sub kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi dilaksanakan pekerjaan :
   - Perbaikan Jaringan Irigasi D.I. Sigabue Toboh Ketek

- Perbaikan Jaringan Irigasi D.I. Ampang Sungai Batuang
- Perbaikan Jaringan Irigasi D.I. Banda Piliang
- Perbaikan Jaringan Irigasi D.I. Duku I SPI
- Perbaikan Jaringan Irigasi D.I. Sakayan Paku (Asam Pulau)

2. Rehabilitasi jaringan irigasi,
3. Peningkatan Jaringan Irigasi,
4. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan.

Pada Tahun 2025 realisasi biaya untuk Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) adalah Rp. 2.386.538.700,00 sedangkan target biaya untuk program adalah Rp 2.251.083.200,00, persentase reaisasi anggaran adalah 94,32%.

Gambar 3.11
Rehabilitasi Jaringan Irigasi



***Sumber** : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

(f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas efisiensi sumber daya biaya dan efisiensi capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.38
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayah	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	66,40%	94,32%	-27,92%

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa terdapat selisih efisiensi sebesar Realisasi indikator Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik pada tahun 2025 mencatatkan capaian kinerja sebesar 66,40%. Dengan penyerapan anggaran yang cukup tinggi mencapai 94,32%, terdapat gap sebesar -27,92% pada tingkat efisiensi sumber daya. Angka negatif ini mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran belum berkorelasi linear dengan percepatan perbaikan kondisi fisik irigasi di lapangan. Hal ini menjadi catatan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas metode pelaksanaan pekerjaan serta ketepatan alokasi biaya pemeliharaan sarana prasarana dasar wilayah pada periode mendatang.

C. Persentase Ketaatan Terhadap RTRW

Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan. Penataan ruang merupakan proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang. Persentase ketaatan terhadap RTRW merupakan salah satu indikator kinerja untuk melihat ketercapaian sasaran strategis "Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayah".

Rencana tata ruang merupakan dokumen acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang memanfaatkan ruang. Konsekuensi logisnya adalah seluruh kegiatan pemanfaatan ruang harus terlebih dahulu memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR). Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang merupakan proses dalam mewujudkan kepatuhan terhadap rencana tata ruang.

Formulasi pengukuran realisasi indikator kinerja adalah sebagai berikut :

$$\text{Formulasi Pengukuran} : \frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100\%$$

a) Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tahun 2025

Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) "Persentase Ketaatan Terhadap RTRW" tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.39
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	%	83	83,70	100,84	Sangat Berhasil

***Sumber** : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Pada tahun 2025 realisasi RTRW sebesar 94.321,49 Ha sedangkan total rencana peruntukan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 adalah 102.580 Ha, sehingga didapatkan realisasi persentase ketaatan terhadap RTRW sebesar 83,70% dari target sebesar 83% dengan capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100,84% dengan interpretasi 'Sangat Berhasil'.

b) Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024 dan Tahun 2025

Adapun perbandingan realisasi Indikator Kinerja Utama "Persentase Ketaatan Terhadap RTRW" Tahun 2024 dengan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.40
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2024 dan Tahun 2025

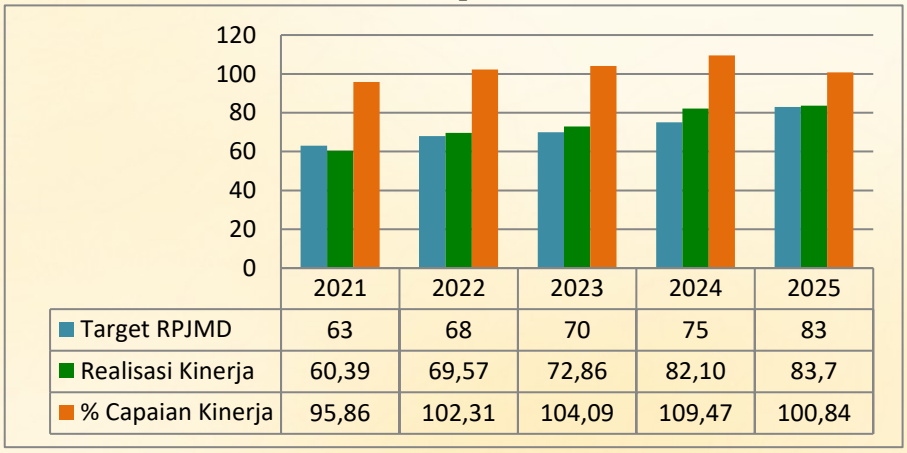
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	%	75	82,10	109,47	83	83,70	100,84	Sangat Berhasil

***Sumber** : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Pada Tahun 2024 realisasi RTRW adalah 92.275 Ha sedangkan pada tahun 2025 telah dilakukan penambahan realisasi RTRW sebesar 2.000 Ha, sehingga total realisasi RTRW tahun 2025 sebesar 94.275,00 Ha dari total rencana peruntukan sebesar 102.580 Ha. Dari Tabel 3.30 diatas dapat dilihat terjadi penurunan capaian kinerja dari tahun 2024 sebesar 109,47% menurun menjadi 100,84% pada tahun 2025.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Grafik 3.7
Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Indikator Kinerja
Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Target RPJMD	63	68	70	75	83
Realisasi Kinerja	60,39	69,57	72,86	82,10	83,7
% Capaian Kinerja	95,86	102,31	104,09	109,47	100,84

Dilihat dari grafik diatas, realisasi kinerja "Persentase Ketaatan Terhadap RTRW" dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 selalu meningkat..

d) Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Serta Upaya Yang Dilakukan Dalam Menunjang IKU

Dalam pencapaian realisasi indikator kinerja, terdapat beberapa hambatan-hambatan yaitu :

1. Konflik kepentingan para pihak dalam pemanfaatan ruang (ketidak seimbangan kepentingan Ekonomi, Ekologi, Sosial Budaya dan Institusional).
2. Kurang pahamnya masyarakat terhadap rencana Tata Ruang
3. Dinamika perkembangan pembangunan yang sangat cepat

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pencapaian realisasi indikator kinerja, terdapat juga beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian realisasi indikator kinerja antara lain :

1. Adanya kolaborasi Akademisi, Birokrasi, Dunia Usaha, Masyarakat (NGO Lingkungan) dan Dunia Pers dalam penyusunan rencana rinci Tata Ruang
2. Melakukan updating rencana tata ruaang secara berkala
3. Meningkatkan Koordinasi Lintas Perangkat Daerah

Selain faktor pendukung keberhasilan pencapaian realisasi indikator kinerja terdapat juga beberapa strategi dalam pemecahan masalah sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan strategi pengembangan infastruktur wilayah (perencanaan program dan pembiayaaan).
2. Sinkronisasi program pengembangan infrastruktur secara terpadu.
3. Meningkatkan sinergi perencanaan dan pemanfaatan ruang wilayah.
4. Penyusunan Kajian tata ruang yang sesuai dengan peruntukan lahan dan fungsinya.

e) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Capaian IKU

Program penunjang capaian IKU Persentase Ketaatan Terhadap RTRW adalah Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang.

Total Anggaran Program ini adalah Rp. 262.302.200,00 sedangkan target biaya untuk program adalah Rp. 374.858.352,00. Persentase realisasi anggaran program ini sebesar 69,97%.

Gambar 3.12
Pembahasan Pemanfaatan dan Peruntukan Ruang



***Sumber** : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas efisiensi biaya dan efisiensi kinerja. Pada Tahun 2025 realisasi biaya untuk Program Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah Rp. 262.302.200,00 sedangkan target biaya untuk program adalah Rp. 374.858.352,00. Dengan demikian diperoleh efisiensi biaya adalah 30,03%. Sedangkan untuk efisiensi

kinerja dengan capaian 100,84%, maka didapat efiensi kinerja sebesar 0,84%. Total tingkat efisiensi sebesar 0,84%. Perinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.41
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja
Persentase Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayah	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	100,84%	69,97%	30,87%

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan performa luar biasa dalam penegakkan tata ruang dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya mencapai 30,87%. Tingkat efisiensi ini tercipta berkat adanya sinergi yang kuat antara pemerintahswasta, dan masyarakat, sehingga banyak program pengawasan yang terlaksana melalui skema kolaborasi yang minim biaya APBD. Disamping itu juga merupakan bukti nyata bahwa keberhasilan pembangunan sarana dan prasarana dasar wilayah tidak selalu linier dengan besaran serapan anggaran, melainkan lebih ditentukan oleh ketepatan strategi di lapangan.

SASASARAN STRATEGIS 6

Meningkatnya Pembangunan Ekonomi

Meningkatnya Pembangunan Ekonomi merupakan sasaran strategis yang terdapat pada Misi 3 yaitu : "Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasiskan pemberdayaan masyarakat". Terdapat 2 (dua) indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait sasaran strategis ini yaitu PDRB Per Kapita dan Pengeluaran Per Kapita. Salah satu indikator tingkat perekonomian di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena, itu besar kecil nya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mensunjukkan nilai PDRB perkepala atau per satu orang penduduk.

A. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah hasil pembagian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. PDRB per kapita merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah. besar kecil nya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB perkepala atau per satu orang penduduk.

Formulasi pengukuran PDRB Per Kapita adalah sebagai berikut :

$$\text{Formulasi Pengukuran} : \frac{\text{Nilai PDRB}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Untuk realisasi tahun 2025 digunakan angka PDRB Per Kapita yang dirilis oleh BPS dalam "Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2026 yaitu sebesar Rp. 59,49 Juta.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi dan capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.42
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
PDRB Per Kapita Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Interpretasi
PDRB Per Kapita	Rp. Juta	58,38	59,49	101,90	Sangat Berhasil

Sumber : Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa realisasi kinerja PDRB Per Kapita Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 59,49 Juta dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 58,38 Juta dengan persentase capaian sebesar 101,90% (Sangat Berhasil).

b) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi PDRB pada tahun 2024 dengan Tahun 2025 :

Tabel 3.43
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja PDRB Per Kapita Tahun 2024 dan Tahun 2025

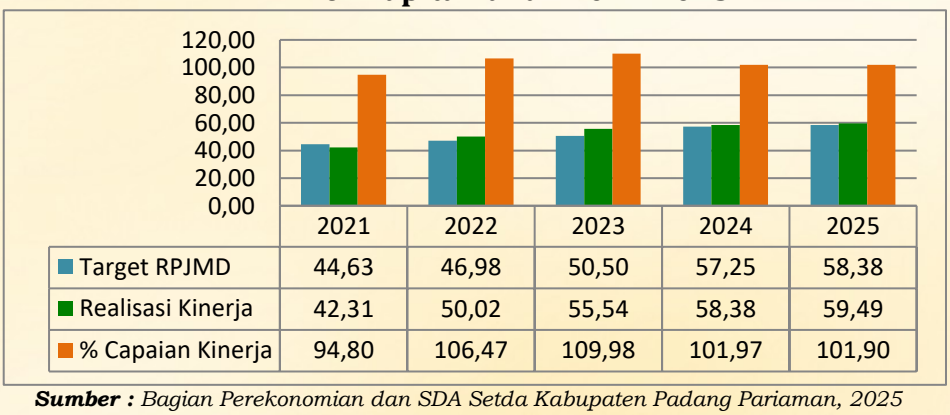
Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024				Tahun 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Interpretasi
PDRB Per Kapita	Juta	57,25	58,38	101,97	58,38	59,49	101,90	Sangat Berhasil

Sumber : Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Realisasi indikator PDRB Per Kapita pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp. 58,38 Juta, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp. 57,25 Juta dengan tingkat capaian 101,97%. Pada tahun 2025 realisasi indikator ini naik menjadi Rp. 59,49 Juta atau meningkat sebesar Rp. 1,11 Juta.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Grafik 3.8
Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Indikator Kinerja PDRB Per Kapita Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Target RPJMD	44,63	46,98	50,50	57,25	58,38
Realisasi Kinerja	42,31	50,02	55,54	58,38	59,49
% Capaian Kinerja	94,80	106,47	109,98	101,97	101,90

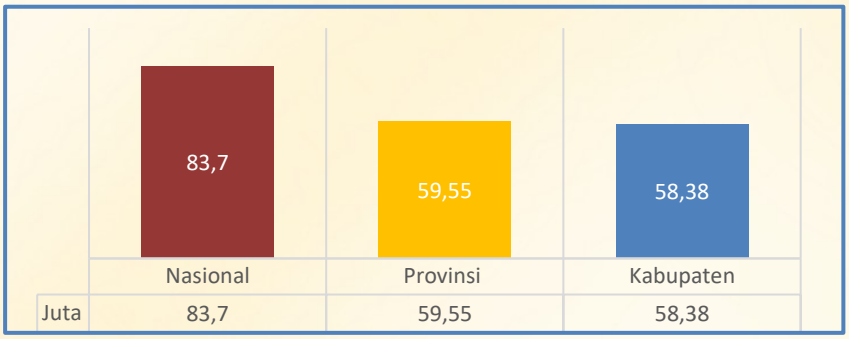
Sumber : *Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Pada tahun 2021, realisasi kinerja berada di angka Rp. 42,31 Juta (94,80%). Namun, memasuki tahun 2022 dan 2023, terjadi lonjakan performa yang signifikan di mana realisasi mampu melampaui target secara agresif dengan capaian masing-masing sebesar 106,47% dan 109,98%. Hal ini menunjukkan efektivitas strategi percepatan ekonomi pasca-pandemi. Meskipun Target RPJMD terus dinaikkan secara bertahap dari Rp. 44,63 Juta di tahun 2021 menjadi Rp. 58,38 Juta di tahun 2025, Pemerintah Kabupaten mampu menjawab tantangan tersebut dengan konsistensi realisasi yang selalu berada di zona hijau (di atas atau setara target). Tahun 2025 menjadi momentum krusial di mana realisasi menyentuh angka 59,49 (101,90%). Keberhasilan meningkatkan realisasi kinerja pada tahun 2025 menunjukkan bahwa daerah telah berhasil membangun fondasi ekonomi yang kokoh dan stabil pada level tertinggi dalam lima tahun terakhir.

d) Perbandingan Realisasi IKU Kabupaten, Provinsi dan Nasional Terkait PDRB PDRB Per Kapita

Berikut ini adalah perbandingan realisasi IKU Kabupaten, Provinsi dan Nasional terkait PDRB Per Kapita adalah sebagai berikut :

Grafik 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Kabupaten, Provinsi dan Nasional Terkait Indikator Kinerja PDRB Per Kapita Tahun 2025



Sumber : BPS dan Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Grafik perbandingan PDRB Per Kapita tahun 2025 menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Padang Pariaman mengalami pertumbuhan, angkanya masih berada di bawah realisasi Provinsi dan Nasional. Hal ini mengindikasikan perlunya akselerasi sektor-sektor produktif unggulan daerah guna memperkecil kesenjangan pendapatan per kapita terhadap rata-rata wilayah dan nasional.

e) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Serta Solusi Yang Telah Dilakukan

Meningkatnya capaian PDRB Per Kapita dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung yaitu:

1. Membaiknya ekonomi pasca banjir dan tanah longsor dan usaha ekonomi masyarakat berangsur-angsur pulih sehingga meningkatnya kebutuhan dan pendapatan masyarakat
2. Pemulihan Sektor Logistik dan Transportasi
3. Resiliensi Sektor Pertanian dan Perikanan
4. Stabilitas Penanaman Modal
5. Kerja sama TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) dalam menjaga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau
6. Stabilitas daya beli masyarakat tetap stabil bahkan saat menghadapi tekanan inflasi global

Disamping faktor pendukung tersebut, terdapat beberapa hal yang menghambat pencapaian kinerja antara lain :

1. Banjir dan tanah longsor merusak lahan produktif, terutama pada subsektor tanaman pangan (padi) yang mengalami penurunan luas panen.

2. Akses jalan yang terganggu menghambat distribusi barang dari dan menuju Bandara Internasional Minangkabau (BIM), yang merupakan penggerak utama sektor transportasi dan pergudangan di kabupaten ini.
3. Pasca selesainya fase utama jalan tol Padang-Sicincin, belum ada investasi infrastruktur baru berskala besar yang masuk untuk menggantikan volume ekonomi sektor konstruksi tersebut.
4. Inflasi menekan daya beli masyarakat. Karena struktur PDRB Sumbar (termasuk Padang Pariaman) masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga, kenaikan harga kebutuhan pokok otomatis memperlambat laju pertumbuhan PDRB dari sisi pengeluaran.
5. Dengan segala keterbatasan baik anggaran, sarana prasarana dan sumber daya alam yang tersedia, kita masih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya sembako yang beredar dipasar, walaupun daya beli masyarakat menurun karna adanya kenaikan harga yang sangat tinggi;

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian Nilai PDRB/Income Per Kapita adalah sebagai berikut :

1. Menstabilkan harga kebutuhan pokok supaya daya beli masyarakat meningkat dengan cara menurunkan tingkat inflasi dengan menanam tanaman cabe, bawang dan sayur-sayuran di pekarangan rumah.
2. Melakukan penanaman disaat iklim yang mendukung jika tidak bisa untuk mengganti dengan penanaman yang tahan terhadap iklim yang kurang baik (misal penanaman ubi kayu atau daun singkong) atau peningkatan produksi pada saat iklim baik dan bisa untuk melakukan penyimpanan cadangan pada saat iklim yang kurang baik.
3. Menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat supaya tidak terjadi lagi pengangguran.
4. Berhemat dalam konsumsi barang-barang yang kurang begitu penting, atau meningkatkan produktivitas untuk penambahan income (usaha tambahan dan pekerjaan *part time*)
5. Mengonsumsi kebutuhan yang lebih penting dan utama (primer) dibandingkan dengan kebutuhan tersier.
6. Memberikan modal usaha kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian.

f) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang IKU

Pada tahun 2025 Dinas Pertanian dan Pertahanan Pangan pada bulan Maret mengadakan Bazar dan Operasi Pasar Murah Ramadhan 1445 H di Nagari Lubuk Pandan Kec. 2x11 Enam Lingkung dan Nagari Sungai Geringging. Selanjutnya Bazar dan Operasi Pasar Murah juga dilakukan pada bulan Juli hingga Oktober tahun 2025 di Kantor Camat Lubuk Alung, Kantor Walinagari Kayutanam, dan di Lingkungan Kantor Bupati Padang Pariaman pada saat moment peringatan Mauluik Gadang. Selama tahun 2025 mengadakan pemantauan harga di Pasar Pakandangan, Pasar Sicincin, Pasar Kayutanam, Pasar Lubuk Alung dan Pasar Sei. Limau.

Berikut ini program dan/atau kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang daya beli masyarakat:

1. Kegiatan Pengendalian Distribusi dan Perekonomian
   ✓ Sub kegiatan untuk pencapaian IKU dengan total anggaran Rp. 20.009.000 dan realisasi sebesar Rp. 19.410.000 dengan capaian 97%. Bagian Perekonomian dan SDA dengan melakukan survey harga ke pasar-pasar nagari di lingkungan kabupaten padang pariaman (di Pasar Pakandangan, Pasar Sicincin, Pasar Kayutanam, Pasar Lubuk Alung dan Pasar Sei. Limau), hal ini dilakukan agar para penjual tidak melakukan penimbunan stock barang dan menaikan harga yang tidak wajar agar bisa terjadinya keseimbangan pasar. Dari dinas Perdagangan tenaga kerja koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk kegiatan survei pasar di lingkungan Kab. Padang Pariaman dengan anggaran sebesar Rp. 6.800.000. Dinas Pertanian dan ketahanan pangan untuk kegiatan survai pasar dengan anggaran Rp. 55.192.000,00. Sedangkan dinas Perikanan dengan anggaran Rp. 800.000,00
2. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perikanan, Pertanian dan Perikanan
   - Melaksanakan Rapat Koordinasi bersama perangkat daerah terkait mengenai pengawasan pendistribusian pupuk subsidi dan pestisida.
   - Melakukan pengawasan dan survey dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi ke kios-kios pupuk yang ada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
   -

Gambar 3.13
Pengawasan dan Survey dalam Mendistribusikan Pupuk Bersubsidi



3. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Energi Air
   - Melakukan koordinasi ke Dinas ESDM dan Biro perekonomian Provinsi Sumatera Barat mengenai data tambang yang ada di kabupaten padang pariaman.
   - Melakukan koordinasi ke Dinas ESDM dan Biro Provinsi Sumatera Barat mengenai izin penggunaan air tanah di Kabupaten Padang Pariaman.
4. Kegiatan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM adalah operasi survey harga kebutuhan sembilan bahan pokok ke Pasar-pasar nagari dan pasar induk yaitu pasar di kecamatan Lubuk Alung .
5. Koordinasi dengan Dinas terkait dalam melakukan kerjasama dengan TTIC, Disdagnakerkop dan UKM, Baznas serta BI dan Bank Nagari untuk dilaksanakan Bazar/Pasar Murah agar membantu masyarakat dalam meningkatkan daya beli.

Gambar 3.14
Koordinasi dengan Berbagai Pihak dalam Rangka Kerjasama Pelaksanaan Bazar/Pasar Murah




6. Kegiatan Dinas Peternakan dan kesehatan hewan mengadakan survey harga kebutuhan sembilan bahan pokok ke Pasar-pasar nagari di Kab.Padang Pariaman terutama harga daging sapi,daging ayam,telur.
7. Kegiatan Dinas Perikanan survey harga kebutuhan sembilan bahan pokok ke Pasar-pasar nagari di Kab.Padang Pariaman terutama harga ikan.
8. Kegiatan pemantauan harga kebutuhan sembilan bahan pokok ke pasar dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dari Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab. Padang Pariaman.

Gambar 3.15
Pemantauan Harga Kebutuhan Sembilan Bahan Pokok Ke Pasar



9. Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Padang Pariaman dan Program Kerja Tahun 2025.

Gambar 3.16
Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Padang Pariaman dan Program Kerja Tahun 2025



10. Melaksanakan Zoom Dan Rapat Koordinasi Tentang Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025.

Gambar 3.17
Zoom Meeting Dan Rapat Koordinasi
Tentang Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025



11. Melakukan Bazar/Pasar Murah di Nagari Lubuk Pandan Kec. 2x11 Enam Lingkung, Nagari Sungai Geringging, Kantor Camat Lubuk Alung, Kantor Walinagari Kayutanam, dan di Lingkungan Kantor Bupati Padang Pariaman.

Gambar 3.18
Bazar/Pasar Murah



g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut tabel perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggaran indikator kinerja tahun 2025 :

Tabel 3.44
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja
PDRB Per Kapita Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Pembangunan Ekonomi	PDRB Per Kapita	101,90%	97%	4,9%

Realisasi indikator PDRB Per Kapita pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat positif dengan capaian kinerja sebesar 101,90%, melampaui target yang ditetapkan. Performa ini dicapai dengan penyerapan anggaran yang optimal sebesar 97%, sehingga menghasilkan Tingkat Efisiensi sebesar 4,9%.

B. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama setahun baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Formulasi Pengukuran} : \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama setahun}}{\text{Banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli}} \times 100\%$$

Untuk realisasi tahun 2025 digunakan angka Pengeluaran Per Kapita yang dirilis oleh BPS dalam "Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2026" yaitu sebesar 11,756 Juta.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Adapun perbandingan realisasi dan target kinerja indikator kinerja utama ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.45
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Pengeluaran Per Kapita Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Pengeluaran Per Kapita	Rp. Juta	12,056	12,089	100,27	Sangat Berhasil

Sumber : Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka, 2025

Realisasi indikator Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp12,089 Juta, melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 12,056 Juta. Dengan persentase capaian kinerja mencapai 100,27%, indikator ini masuk dalam kategori Sangat Berhasil. Capaian ini mencerminkan terjaganya daya beli masyarakat serta efektivitas program penguatan ekonomi domestik di wilayah Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2025.

b) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi Pengeluaran Per Kapita pada tahun 2024 dengan Tahun 2025 :

Tabel 3.46
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Pengeluaran Perkapita Tahun 2024 dan Tahun 2025

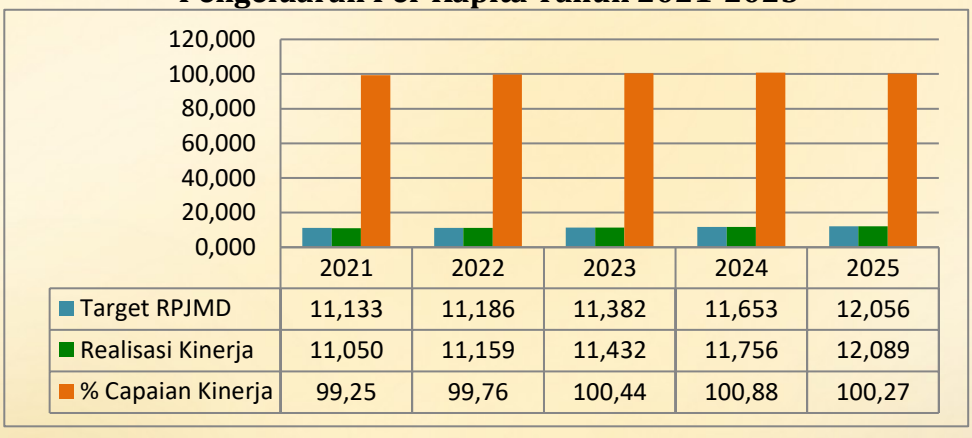
Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024				Tahun 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Pengeluaran Per Kapita	Rp. Juta	11,653	11,756	100,88	12,056	12,089	100,27	Sangat Berhasil

Sumber : Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Pengeluaran Per Kapita penduduk Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 333 Ribu dari tahun 2024. Jika target dan realisasi tahun 2024 dan tahun 2025 diperbandingkan, capaian kinerja Kabupaten Padang Pariaman pada indikator ini menurun sebesar 0,61%. Hal ini menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil terutama terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Sehingga dapat dikatakan pendapatan masyarakat cukup stabil dan membuat pengeluaran masyarakat secara tidak langsung meningkat juga.Hal ini menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil terutama terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Sehingga dapat dikatakan pendapatan masyarakat cukup stabil dan membuat pengeluaran masyarakat secara tidak langsung meningkat juga.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Grafik 3.10
Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Indikator Kinerja Pengeluaran Per Kapita Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Target RPJMD	11,133	11,186	11,382	11,653	12,056
Realisasi Kinerja	11,050	11,159	11,432	11,756	12,089
% Capaian Kinerja	99,25	99,76	100,44	100,88	100,27

Sumber : *Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

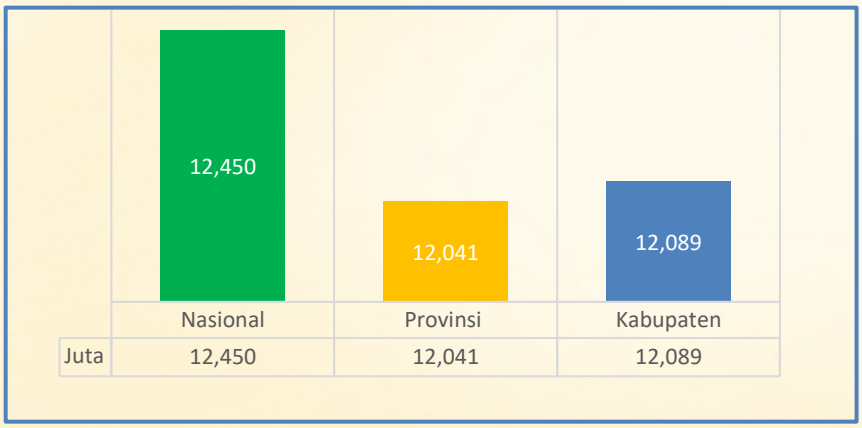
Jika dilihat dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja "Pengeluran Per Kapita" selalu mengalami peningkatan dari tahun 2021-2025.

Peningkatan capaian kinerja dari tahun 2021-2025 disebabkan karena sudah membaiknya pertumbuhan ekonomi atau PDRB Padang Pariaman sehingga meningkatkan daya beli masyarakat terutama bagi kalangan muda yang mengeluarkan pendapatannya untuk meningkatkan kepuasan dalam berbelanja. Selain itu, kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Dengan demikian kenaikan ini mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

d) Perbandingan Realisasi IKU Kabupaten, Provinsi dan Nasional Terkait Pengeluaran Per Kapita

Berikut ini adalah perbandingan realisasi IKU Kabupaten, Provinsi dan Nasional terkait Pengeluaran Per Kapita Tahun 2025:

Grafik 3.11
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Pengeluaran Per Kapita Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2025



Sumber : Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2025 lebih tinggi jika dibandingkan realisasi Provinsi Sumatera Barat, namun masih jauh lebih rendah dari realisasi Nasional. Hal ini memperlihatkan bahwa tingkat konsumsi Kabupaten Padang Pariaman lebih tinggi daripada rata-rata Provinsi Sumatera Bar

at, namun jauh lebih rendah daripada tingkat Nasional.

e) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Serta Solusi Yang Telah Dilakukan

Meningkatnya indikator kinerja Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Padang Pariaman dipengaruhi oleh faktor-faktor, diantaranya :

1. Kenaikan tingkat pendapatan masyarakat
2. Urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi
3. Perkembangan ekonomi

Gambar 3.19
Proses Jual Beli Masyarakat Pada Salah Satu Pasar di Kabupaten Padang Pariaman



***Sumber** : Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Disamping faktor pendukung tersebut, terdapat beberapa hal yang menghambat pencapaian kinerja antara lain :

1. Menurunnya pendapatan masyarakat
2. karena faktor iklim

Adapun upaya ke depan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Pengeluaran Per Kapita adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Jumlah UMKM dan produksi rumahan.
2. Meningkatkan produktifikas dan kreatifitas kaum muda untuk membuka usaha sesuai dengan minat atau bakat.
3. Meningkatkan investasi di Kabupaten Padang Pariaman.
4. Mengembangkan sektor pariwisata

f) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang IKU

1. Program Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan
   Upaya utama difokuskan pada peningkatan pendapatan masyarakat ekonomi lemah agar konsumsi per kapita meningkat:
   - Pemberdayaan Fakir Miskin dan PPKS: Memberikan fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
   - Optimalisasi Bantuan Sosial: Melakukan verifikasi data DTKS serta monitoring penyaluran bantuan seperti Rastra dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk menjamin stabilitas konsumsi rumah tangga.
   - Program PKH: Menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai instrumen perlindungan sosial sekaligus pendorong pengeluaran keluarga di sektor pendidikan dan kesehatan.

2. Pengembangan Sektor Unggulan (Titik Ungkit Ekonomi)
Pemerintah daerah melakukan intervensi strategis pada sektor yang menyerap banyak tenaga kerja lokal:

- Sinergi Hulu-Hilir Pertanian: Mengintegrasikan rantai produksi hingga pemasaran untuk memastikan petani mendapatkan nilai tambah ekonomi yang lebih besar.
- Branding Produk Lokal dan UMKM: Mendorong identitas kuat pada produk unggulan daerah agar lebih kompetitif di pasar, sehingga meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro.

SASASARAN STRATEGIS 7

Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat

Pendidikan adalah salah satu pilar utama pembangunan suatu negara. Perkembangan pendidikan menjadi fokus utama dalam upaya mencapai kemajuan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu indikator penting dalam dunia pendidikan adalah angka Rata-Rata Lama Sekolah. Indikator Kinerja Utama "Rata-Rata Lama Sekolah" merupakan indikator kinerja dari Sasaran Strategis "Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat.

Rata-rata lama sekolah menunjukan jumlah tahun rata-rata yang telah dihabiskan oleh penduduk dalam menempuh pendidikan formal, baik tingkat SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah, akan semakin baik tingkat pendidikan di suatu wilayah, artinya semakin baik kualitas sumber daya manusia wilayah tersebut, yang pada akhirnya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pemerintah dapat menggunakan indikator rata-rata lama sekolah untuk merancang kebijakan pendidikan, seperti program wajib belajar atau bantuan pendidikan.

Mengingat sifatnya yang berdampak jangka panjang, indikator ini tetap dipertahankan secara konsisten dalam dua periode perencanaan, yakni RPJMD 2021-2026 dan dilanjutkan dalam RPJMD 2025-2029. Penempatan indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah pada kedua dokumen tersebut menunjukkan adanya kesinambungan visi pembangunan yang tidak terputus. Pada tahun transisi 2025, pelaporan kinerja dilakukan dengan mengintegrasikan target-target yang telah ditetapkan, guna memastikan bahwa upaya peningkatan durasi pendidikan formal bagi masyarakat tetap berjalan selaras dengan arah kebijakan nasional maupun daerah yang dinamis. Hal ini memastikan bahwa setiap capaian tahun berjalan merupakan bagian dari upaya kumulatif untuk mencapai target makro pendidikan di masa depan.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Berikut capaian dan target dari angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 berdasarkan RPJMD 2021-2026:

Tabel 3.47
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2021-2026

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,54	8,78	102,81	Sangat Berhasil

***Sumber** : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025*

Pencapaian Angka Rata-rata Lama Sekolah Selama Tahun 2025 di Kabupaten Padang Pariaman bisa dikatakan Sangat Berhasil dengan capaian sebesar 8,78 Tahun dari Target 8,54 Tahun sehingga persentase ketercapaian nya sebesar 102,81%. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas telah

menempuh pendidikan hingga mendekati jenjang kelas IX atau setara dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Adapun untuk melihat capaian IKU Rata-Rata Lama Sekolah berdasarkan target yang terdapat pada RPJMD 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.48
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,79	8,78	99,89	Berhasil

***Sumber** : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025*

Berdasarkan Tabel diatas,s Indikator Kinerja Utama (IKU) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2025 jika diukur berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2025-2029 sebesar 8,79 tahun mencatatkan realisasi kinerja sebesar 8,78 tahun. Secara kalkulasi, rasio pencapaian kinerja terhadap target tahunan adalah sebesar 99,89%.

Meskipun terdapat selisih tipis dari target yang direncanakan, capaian ini secara kualitatif diklasifikasikan ke dalam interpretasi Berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan rata-rata lama sekolah tetap berada pada jalur yang tepat mendekati target optimal yang telah ditetapkan dalam perencanaan jangka menengah.

b) Perbandingan Realisasi IKU Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dan Tahun 2025

Adapun perbandingan realisasi IKU “Rata-Rata Lama Sekolah” tahun 2024 dan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.49
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Rata - Rata Lama Sekolah Tahun 2024 dan 2025
Berdasarkan RPJMD 2021-2026

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,29	8,42	101,57	8,54	8,78	102,81	Sangat Berhasil

***Sumber** : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Dilihat dari tabel diatas, realisasi rata-rata lama sekolah pada tahun 2025 mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar 0,36. Peningkatan realisasi kinerja indikator rata-rata lama sekolah ini mencerminkan bahwa efektivitas program wajib belajar, dukungan pembiayaan pendidikan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Pendidikan.

Tabel 3.50
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Rata - Rata Lama Sekolah Tahun 2024 dan 2025
Berdasarkan RPJMD 2025-2029

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,29	8,42	101,57	8,79	8,78	99,89	Berhasil

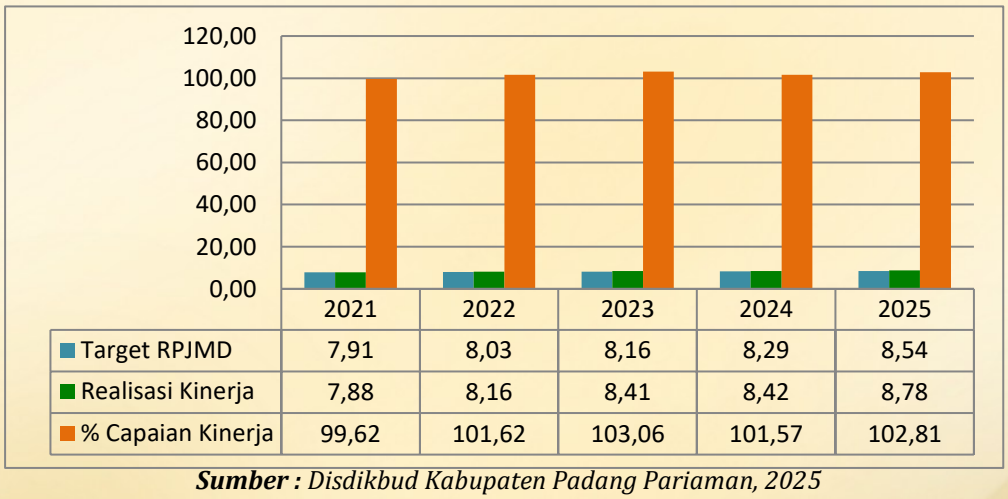
Pada tahun 2024, target yang ditetapkan adalah sebesar 8,29 tahun. Realisasi di lapangan menunjukkan angka yang lebih baik, yakni mencapai 8,42 tahun, sehingga menghasilkan persentase capaian kinerja sebesar 101,57%. Hal ini menunjukkan bahwa target pada tahun tersebut berhasil dilampaui.

Pada tahun 2025, target ditingkatkan secara signifikan sesuai rencana jangka menengah menjadi 8,79 tahun. Realisasi yang dicapai adalah sebesar 8,78 tahun. Meskipun secara angka riil terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya (dari 8,42 ke 8,78), namun jika dibandingkan dengan target baru yang lebih tinggi, persentase capaian kinerjanya adalah 99,89%.

Walaupun capaian kinerja tahun 2025 berada sedikit di bawah angka 100% (selisih tipis 0,11%), secara umum kinerja indikator ini tetap dikategorikan "Berhasil". Hal ini dikarenakan tren angka riil Rata-Rata Lama Sekolah terus menunjukkan pertumbuhan positif, yang mencerminkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas serta akses pendidikan di masyarakat.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Grafik 3.12
Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Indikator Kinerja
Rata-Rata Lama Sekolah dengan Target Jangka Menegah



	2021	2022	2023	2024	2025
Target RPJMD	7,91	8,03	8,16	8,29	8,54
Realisasi Kinerja	7,88	8,16	8,41	8,42	8,78
% Capaian Kinerja	99,62	101,62	103,06	101,57	102,81

Sumber : *Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Dari grafik 3.12 diatas dapat dilihat ketercapaian angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Padang Pariaman dari Tahun 2021 sampai Tahun 2025 sudah melampaui

target yang ada di Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman kecuali pada Tahun 2021.

Sedangkan untuk melihat perbandingan dengan target jangka menengah periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.51
Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Indikator Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah dengan Target Jangka Menegah Berdasarkan RPJMD 2025-2029

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Rata-Rata Lama Sekolah	%	8,79	8,95	9,14	9,34	9,55	8,78	-	-	-	-

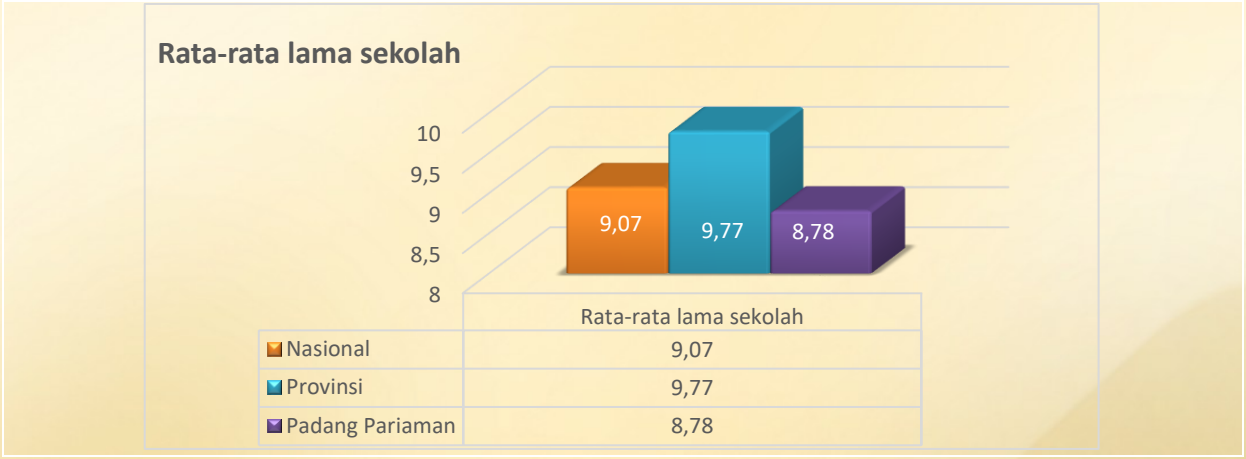
***Sumber** : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Pada tahun pertama pelaksanaan periode ini (tahun 2025), Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mencatatkan realisasi kinerja sebesar 8,78%. Angka realisasi ini menunjukkan pencapaian yang sangat mendekati target awal yang ditetapkan, dengan selisih yang sangat tipis sebesar 0,01%. Meski demikian, capaian ini memberikan gambaran bahwa upaya peningkatan durasi pendidikan masyarakat berada pada jalur yang tepat menuju target jangka menengah. Pemerintah daerah terus berkomitmen untuk mengakselerasi program-program pendidikan guna memastikan target-target pada tahun berikutnya, yakni 8,95% di tahun 2026 dan seterusnya, dapat tercapai secara optimal.

d) Perbandingan Realisasi Rata-Rata Lama Sekolah Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2025

Perbandingan realisasi rata – rata lama sekolah nasional, provinsi dan kabupaten padang pariaman dapat dilihat dari grafik yang ada di bawah ini:

Grafik 3.13
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Rata - Rata Lama Sekolah Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2025



Sumber : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Dengan melihat perbandingan pada grafik diatas maka realisasi rata–rata lama sekolah di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2025 sebesar 8,78 tahun masih berada dibawah realisasi rata–rata lama sekolah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Diperlukan upaya peningkatan akses dan partisipasi pendidikan, seperti penguatan program wajib belajar, dukungan biaya pendidikan, serta pencegahan angka putus sekolah, agar capaian RLS dapat meningkat dan setidaknya menyamai atau melampaui rata-rata nasional sebesar 9,07 tahun.

Adapun realisasi indikator rata-rata lama sekolah pada 19 (sembilan belas) Kabupaten/Kota di Provisni Sumatera Barat tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.52
Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota
Se-Sumatera Barat Tahun 2025

No	Nama Pemerintah Daerah	Realisasi Tahun 2025
1	Kota Padang Panjang	12,01
2	Kota Bukittinggi	11,66
2	Kota Padang	11,64
3	Kota Solok	11,38
4	Kota Pariaman	11,32
5	Kota Payakumbuh	11,08
6	Kota Sawahlunto	10,54
7	Kabupaten Agam	9,57
8	Kabupaten Tanah Datar	9,46
9	Kabupaten Dharmasraya	9,31
10	Kabupaten Pasaman Barat	9,28
11	Kabupaten Solok Selatan	9,2
12	Kabupaten Pesisir Selatan	9,06
13	**Kabupaten Padang Pariaman**	**8,78**
14	Kabupaten Sijunjung	8,66
15	Kabupaten Pasaman	8,49
16	Kabupaten Lima Puluh Kota	8,49
17	Kabupaten Solok	8,25
18	Kabupaten Kepulauan Mentawai	11,65
19	Kota Payakumbuh	10,89
20	**Provinsi Sumatera Barat**	**9,77**

***Sumber** : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Sumatera Barat, Capaian Angka rata-rata lama sekolah dikabupaten Padang Pariaman berada di posisi 13 dari 19 provinsi. Capaian ini menunjukan butuh Upaya lebih besar agar capaian rata-rata lama sekolah di kabupaten Padang Pariaman ini.

e) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang IKU

Keberhasilan pencapaian angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Padang Pariaman di dukung oleh Program dan kegiatan yang berkaitan dengan mutu Pendidikan dan akses Pendidikan. Rata-rata lama sekolah dapat dikategorikan **"Berhasil"** karena didukung oleh beberapa faktor berikut :

Program yang mendukung rata-rata lama sekolah yaitu program pengelolaan pendidikan dan program pendidik dan tenaga kependidikan dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama.
   Dukungan pembiayaan pendidikan dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik melalui penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tingkat satuan SD dan SMP. Bantuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak usia sekolah mendapatkan hak nya untuk memperoleh pendidikan tanpa dibebankan biaya sekolah sehingga dapat mencegah angka putus sekolah.Anggaran pengelolaan dana BOS sekolah dasar pada tahun 2025 adalah sebesar Rp.414.894.700.000,00 dan BOS SMP sebesar Rp. 16.381.200.000,00.
b. Pengadaan perlengkapan peserta didik SD
   Pemerintah daerah berperan dalam memberikan bantuan biaya sekolah berupa pemberian seragam sekolah kepada peserta didik baru tingkat SD. Bantuan pengadaan seragam diberikan kepada 6.862 siswa baru tingkat SD pada tahun 2025 dengan anggaran Rp. 2.734.197.455,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.284.787.142,00
c. Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas dan sarana prasarana sekolah
   Infrastruktur sekolah menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan rata-rata lama sekolah. Bangunan sekolah yang layak dan aman serta sarana dan prasarana pendidikan yang memadai akan menumbuhkan minat untuk bersekolah. Pada tahun 2025 total anggaran untuk Pembangunan ruang kelas untuk tingkat SD adalah sebesar Rp 7.648.476.787,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.031.795.557,00.
d. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
   Kegiatan ini untuk memastikan proses pembelajaran dan kegiatan evaluasi pembelajaran/ujian disatuan pendidikan nonformal/kesetaraan. Proses pembelajaran yang dimaksud yaitu paket A (setingkat SD) Paket B (setingkat SMP) dan Paket C (setingkat SMA). Saat ini terdapat 9 (sembilan) satuan Pendidikan nonformal yang ada di kabupaten padang pariaman sebagai alternatif untuk pengentasan angka putus sekolah.Pada tahun 2025 anggaran Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik kesetaraan sebesar Rp.37.620.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 21.600.000,00.
e. Program Peningkatan mutu Pendidik
   Pada program ini diutamakan untuk meningkatkan kualitas bagi pendidik (guru) dengan mengutamakan beberapa program seperti peningkatan kapasitas dan kualitas guru mengajar melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Selain itu program nasional yaitu guru penggerak yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mengembangkan nilai kepemimpinan bagi tenaga pendidik.
   Kondisi keterbatasan tenaga pendidik pada jenjang Pendidikan SD dan SMP dipenuhi dengan tambahan tenaga pendidik dan kependidikan yang bersifat honor yang

didukung oleh anggaran berupa insentif kepada guru honor, operator dan penjaga sekolah. Pada jenjang SD diberikan pagu anggaran sebesar Rp.7,450.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.7.450.100.000,00 atau sebesar 99,90%. Sementara untuk jenjang SMP diberikan pagu sebesar Rp.1.476.000.000,00- yang terealisasi sebesar Rp. 1.474.500.000,00 atau sekitar 99,90%.

Secara akumulatif, dukungan anggaran untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2025 adalah sebesar Rp441.696.194.242,00. Dari total pagu tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berhasil merealisasikan sebesar Rp440.614.082.699,00 atau mencapai persentase realisasi anggaran sebesar 99,75%.

Gambar 3.20
Kegiatan Manajemen Pelayanan Pendidikan



Sumber : *Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Gambar 3.21
Kegiatan Pemberian Bantuan Kependidikan



Sumber : *Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Gambar 3.22
Kegiatan Penyelengaraan Proses Belajar Pendidikan Non Formal



Sumber : *Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

g) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Serta Solusi Yang Telah Dilakukan

Faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilan capaian Rata–Rata Lama Sekolah dapat antara lain :

1. Tersedianya infrastruktur pendidikan di satuan pendidikan yang digunakan dalam menunjang proses pembelajaran seperti gedung belajar yang layak serta sarana prasarana yang memadai dan lingkungan belajar yang kondusif sehingga siswa lebih termotivasi untuk menyelesaikan pendidikan.
2. Penguatan program wajib belajar dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah yang disalurkan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) guna untuk memastikan anak usia sekolah mendapatkan hak nya untuk bersekolah dan mencegah terjadi nya putus sekolah.
3. Faktor ekonomi juga menjadi faktor penentu dalam capaian rata-rata lama sekolah.Masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang memadai cenderung mampu mempertahankan anak-anaknya untuk tetap bersekolah hingga jenjang menengah bahkan tinggi. Pendidikan tidak lagi dipandang sebagai beban biaya, melainkan sebagai investasi masa depan.
4. Meningkatnya kesadaran Masyarakat tentang pentingnya pendidikan dimana Orang tua mendorong anak-anak untuk menyelesaikan pendidikan minimal hingga tingkat menengah sehingga dapat menekan angka putus sekolah dan angka pernikahan dini.
5. Meningkatnya pemahaman Masyarakat mengenai korelasi antar tingkat pendidikan dan dunia kerja sehingga memotivasi Masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ketingkat lebih lanjut.

Berdasarkan pola permasalahan daerah dan karakteristik sosio-ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman, berikut adalah beberapa **faktor penghambat** yang umumnya mempengaruhi pencapaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS):

1. Faktor Ekonomi Keluarga
   - Pekerjaan Dini: Masih adanya kecenderungan anak usia sekolah (khususnya tingkat SMP/SMA) yang memilih membantu orang tua bekerja di sektor pertanian, perkebunan, atau perikanan guna menambah penghasilan keluarga.
   - Biaya Personal: Meskipun dana BOS telah menggratiskan biaya operasional sekolah, biaya personal (uang saku, transportasi, dan kebutuhan penunjang lainnya) masih menjadi beban berat bagi keluarga kurang mampu.
2. Faktor Sosial dan Budaya
   - Budaya Merantau: Adanya pola pikir tradisional di sebagian masyarakat yang menganggap merantau lebih cepat memberikan hasil ekonomi dibandingkan menuntaskan pendidikan formal yang panjang.
   - Pernikahan Dini: Masih ditemukannya kasus pernikahan di usia sekolah yang secara otomatis menghentikan keberlanjutan pendidikan formal siswa, terutama di wilayah perdesaan.

3. Kurangnya Kesadaran Pendidikan Nonformal
   - Stigma Paket A/B/C: Masyarakat masih memandang sebelah mata pendidikan kesetaraan (nonformal). Padahal, optimalisasi program ini adalah kunci tercepat untuk meningkatkan angka RLS bagi penduduk usia dewasa yang sudah terlanjur putus sekolah.
4. Dampak Pasca Pandemi dan Digitalisasi
   - Kehilangan Minat Belajar *(Learning Loss)*: Dampak jangka panjang pandemi terkadang menyisakan penurunan motivasi belajar yang menyebabkan siswa rentan berhenti di tengah jalan jika tidak mendapatkan pendampingan yang intensif.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut berikut alternatif solusi yang dilakukan untuk Upaya pemecahan masalah tersebut antara lain:

1. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan yang dilakukan melalui Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas, Pembangunan/rehabilitasi ruang laboratorium dan Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana.
2. Pengembangan pendidikan nonformal dan kesetaraan, seperti Paket A, B, dan C, menjadi alternatif bagi masyarakat yang terlanjur putus sekolah. Melalui jalur ini, warga tetap memiliki kesempatan meningkatkan lama sekolahnya meskipun tidak melalui jalur formal.
3. Penguatan program zonasi/domisili dalam proses Penerimaaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang membantu memastikan anak usia sekolah memperoleh tempat belajar yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya sehingga mengurangi risiko putus sekolah akibat jarak dan biaya transportasi.
4. Program bantuan perlengkapan dasar sekolah ke peserta didik tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berupa baju seragam sekolah.
5. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan pelatihan dan pengembangan kompetensi melalui salah satu nya dengan kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).
6. Penguatan pemantauan dan pencegahan putus sekolah dimana Dinas pendidikan bekerja sama dengan sekolah dan nagari dalam mengidentifikasi siswa yang putus sekolah maupun yang berpotensi untuk putus sekolah.

h) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut tabel perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggaran indikator kinerja tahun 2025 :

Tabel 3.53
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja
Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2021-2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	102,81%	99,75%	3,06%

Pencapaian sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat melalui indikator Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan capaian kinerja sebesar 102,81% (melampaui target). Efektivitas program ini didukung oleh penyerapan anggaran yang optimal sebesar 99,75%, sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sumber daya sebesar 3,06%. Hal ini mengonfirmasi bahwa alokasi anggaran pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman telah dikelola secara produktif dan tepat sasaran, di mana penggunaan sumber daya yang tersedia mampu menghasilkan output kinerja yang melebihi target perencanaan yang ditetapkan.

Sedangkan untuk melihat Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan target yang ditetapkan pada RPJMD 2025-2029 diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.54
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja
Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas dan Berdaya Saing	Rata-Rata Lama Sekolah	99,89%	99,75%	0,14%

Indikator Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat optimal dengan Capaian Kinerja sebesar 99,89%. Angka ini merepresentasikan efektivitas program pendidikan yang hampir mencapai target sempurna sesuai perencanaan RPJMD 2025-2029. Pemanfaatan Anggaran: Sejalan dengan capaian kinerjanya, Penyerapan Anggaran untuk mendukung program ini tercatat sebesar 99,75%. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan telah terserap secara maksimal dan digunakan secara tepat sasaran untuk mendukung indikator pendidikan tersebut.

Dari perbandingan antara capaian kinerja dan penyerapan anggaran, diperoleh nilai Tingkat Efisiensi sebesar 0,14%. Nilai yang positif ini menunjukkan adanya keseimbangan (proporsionalitas) yang sangat baik antara dana yang dikeluarkan dengan output kinerja yang dihasilkan, di mana pemerintah daerah berhasil memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk mendekati target yang telah ditetapkan.

SASASARAN STRATEGIS 8

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Akuntabel

Sasaran Strategis "Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Akuntabel" merupakan turunan dari Misi Kabupaten Padang Pariaman yang ke-5 yakni "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Bersih Berkeadilan, Demokratis Melalui Penyelenggaraan Pemerintah Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif, dan Transparan. Sasaran Strategis ini diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu : Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten. Masing-masing capaian Indikator Kinerja Utama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Opini BPK Atas LKPD

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion* adalah opini audit tertinggi dari BPK terkait pengelolaan keuangan. Opini ini diterbitkan jika laporan keuangan dianggap telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan bebas dari salah saji materi. Oleh sebab itu, opini WTP merupakan keharusan bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman karena merupakan cerminan terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang efektif, akuntabel dan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan dan juga terwujudnya pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

(a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dalam urusan penunjang dibidang keuangan telah melakukan berbagai strategi dalam pengelolaan keuangan daerah yang didukung dengan pengawasan yang efektif dari Inspektorat.

Berikut ini perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2025 :

Tabel 3.55
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Opini BPK Atas LKPD Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Interpretasi
Opini BPK Atas LKPD	WTP	WTP	100%	Sangat Berhasil

***Sumber** : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berhasil meraih Opini WTP Atas Laporan Keuangan Daerah dari BPK RI sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan ini merupakan Opini WTP ke-12 (dua belas) kali sejak tahun 2013.

(b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Adapun perbandingan realisasi Indikator Kinerja Utama "Opini WTP Atas Laporan Keuangan Daerah" adalah sebagai berikut :

Tabel 3.56
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Opini BPK Atas LKPD Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	Sangat Berhasil

***Sumber** : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Jika dilihat capaian indikator kinerja tahun 2024 dan tahun 2025, dapat dilihat bahwa capaian IKU Kabupaten Padang Pariaman "Opini BPK terhadap LKPD" ini konsisten dikarenakan realisasi yang didapatkan adalah sama yaitu "WTP".

Adapun kriteria yang dijadikan perhatian BPK dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut :

1. Kesesuaian dengan Standard Akuntansi Pemerintahan
2. Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia (SAP).
3. Kecukupan Pengungkapan (*Adequate Disclosures*)
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
5. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping kelima kriteria utama tersebut LKPD yang disajikan harus didukung dengan bukti-bukti audit yang mencukupi, tidak terdapat ketidakpastian dan kesalahan yang cukup berarti (*no material uncertainties*), pengelolaan atas *cash flow* dikontrol dengan baik, dan pengelolaan atas aset daerah dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi yang lengkap. Artinya, laporan keuangan yang disajikan telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang sifatnya material.

Terkait dengan penilaian opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 sudah mengatur tentang jenis opini yang diberikan sebagai salah satu bentuk hasil audit atas laporan keuangan Daerah yang terdiri atas :

1. Wajar Tanpa Pengecualian / WTP *(Unqualified Opinion)*
2. Wajar dengan Pengecualian / WDP *(Qualified Opinion)*
3. Tidak Wajar *(Adverse Opinion)*
4. Tidak Memberikan Pendapat *(Disclaimer Opinion)*

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan hasil penilaian kerja setiap pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang diamanatkan kepadanya, tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menjelaskan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu.

Opini WTP ini menjadi ukuran penting dari akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Perkembangan yang baik terhadap opini WTP ini dari tahun ke tahun menjadi penting dari kondusifnya pemerintahan daerah yang sedang berlangsung. Tindak lanjut rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bisa saja berbeda antar entitas pemerintah daerah yang satu dengan entitas pemerintah daerah lainnya, tergantung kualitas SDM, keterbatasan sarana dan prasarana, luasan wilayah, serta kompleksitas permasalahan yang ada di daerah.

Sehingga pada tahun 2025 Kabupaten Padang Pariaman melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai perangkat daerah penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Opini ini tertuang dalam LHP BPK RI Nomor 64/S-HP/XVIII.PDG/05/2025 tentang Hasil Pemeriksaaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 pada tanggal 22 Mei 2025. Sedangkan untuk kinerja tahun anggaran 2025 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Padang Pariaman masih dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah :

Tabel 3.57
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Opini BPK Atas LKPD
Tahun 2021-2025 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Opini BPK Atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

***Sumber** : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Realisasi Indikator Kinerja "Opini BPK terhadap LKPD" pada tahun 2021-2025 selalu meraih hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Artinya, realisasi kinerja pada IKU ini selalu mencapai target yang telah ditetapkan pada Dokumen RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

d) Perbandingan Realisasi Capaian IKU dengan Realisasi Provinsi Tahun 2025

Pada tahun 2025, seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat termasuk Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) nya. Hal ini memperlihatkan Kabupaten Padang Pariaman berhasil meraih Opini WTP, sama dengan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat.

e) Analisis Program dan Kegiatan Pencapaian IKU

Sebagai upaya memperoleh opini WTP dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Padang Pariaman, maka Badan Pengelola Keuangan Daerah didukung dengan beberapa program dan kegiatan pada tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.58
Program dan Kegiatan Pendukung IKU Opini BPK terhadap LKPD
Tahun 2025

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	100%
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	100%
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	100%

		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100%
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	100%
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	100%
		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	100%
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%
		Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	100%
		Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	100%
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	100%
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	100%
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100%
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	100%
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100%
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	100%
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	100%
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100%
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100%
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100%
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	100%
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100%
		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	100%
2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	100%
		Penyusunan Standar Harga	100%
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%
		Pengamanan Barang Milik Daerah	100%
		Penilaian Barang Milik Daerah	100%
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100%
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100%
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100%

***Sumber** : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Badan Pengelola Keuangan Daerah mengampu 4 (empat) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 52 (lima puluh dua) sub kegiatan dengan pagu belanja sebesar Rp 220.143.049.131,00 Pada Tahun 2025 realisasi belanja Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp 202.926.506.672,00 atau sebesar 92,18%, dimana pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah mencapai 92.80%, Program Pengelolaan BMD 76,74%, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencapai 88,26% dan Program Pengelolaan Pendapatan mencapai 47,62%.

Gambar 3.23
Program dan Kegiatan Pendukung IKU Opini BPK terhadap LKPD
Tahun 2025



SOSIALISASI DAN REKONSILIASI DENGAN TASPEN


KOORDINASI DAN KONSULTASI DENGAN KPPN PADANG


REKON BOS


RAPAT INTERNAL PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH


KOORDINASI TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN BPK RI


INVENTARISASI KIB A, B DAN C KE UPTD


REKONSILIASI SEMESTER


RAPAT KOPERASI MERAH PUTIH

***Sumber** : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

f) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Serta Solusi Yang Telah Dilakukan

Faktor penunjang keberhasilan indikator kinerja "Opini BPK terhadap LKPD" adalah sebagai berikut :

a. Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran terhadap tata kelola yang baik;
b. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif Pemanfaatan dan implementasi SIPD dengan maksimal;
c. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
d. Pengelolaan aset yang tertib;
e. Penyusunan laporan keuangan tepat waktu dan akurat; dan
f. Tindak lanjut rekomendasi BPK.

Disamping faktor pendukung tersebut, terdapat juga faktor yang menghambat pencapaian kinerja antara lain :

a. Pengendalian internal yang belum optimal;
b. Belum mempedomani terhadap regulasi pengelolaan keuangan terbaru;
c. Pengamanan dan Pemeliharaan BMD kurang optimal oleh perangkat daerah sebagai pengguna barang;
d. Tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam menyampaikan laporan keuangan dan aset yang belum optimal;
e. Belum Terintegrasinya Proses Perencanaan dan Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan; dan
f. Tindak lanjut temuan BPK yang belum dilaksanakan segera.

Adapun beberapa upaya yang dilakukan untuk meraih kembali opini WTP atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman :

1. Penguatan SPIP dan manajemen risiko;
2. Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan;
3. Optimalisasi sistem informasi keuangan daerah;
4. Rekonsiliasi dan validasi data keuangan dan aset secara berkala;
5. Monitoring dan evaluasi rutin atas pelaksanaan anggaran; dan
6. Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK tepat waktu;

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.59
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Kinerja Opini BPK Atas LKPD Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Opini BPK terhadap LKPD	100%	92,18%	7,82%

***Sumber** : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7.82% dari efisiensi anggaran dan capaian kinerja 100% berdasarkan hasil opini BPK terhadap Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa Pemerintah

Kabupaten Padang Pariaman telah berhasil menerapkan sistem pengendalian internal yang ketat dan manajemen risiko yang efektif. Efisiensi anggaran sebesar **7,82%** tersebut merupakan hasil dari optimalisasi belanja operasional tanpa mengorbankan output kerja yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD

h) Penghargaan Yang Diterima

Kabupaten Padang Pariaman menerima beberapa penghargaan dalam pengelolaan keuangan pada tahun 2025 sebagai berikut :

Gambar 3.24
Penghargaan dan Apresiasi dalam Ketepatan Penyetoran Iuran Wajib Pegawai (IWP 8%), Iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Iuran Program Jaminan Kematian (JKM) Tahun 2025



***Sumber** : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

B. Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Evaluasi akuntabilitas kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil *(outcome)* terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada *hasil (result oriented government)* serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Indikator "Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten" ini merupakan instrumen kendali mutu yang terjaga kesinambungannya dalam 2 (dua) dokumen perencanaan jangka menengah daerah yakni : RPJMD Periode 2021-2026 dengan indikator "Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten" dan RPJMD Periode 2025-2029 dengan indikator "Nilai SAKIP Pemerintah Daerah". Pencantuman indikator Nilai Evaluasi SAKIP secara konsisten dalam dua periode RPJMD tersebut menegaskan bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terhadap tata kelola keuangan yang transparan dan kinerja yang akuntabel bukan sekadar target jangka pendek.

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/78/AA.05/2025 Tanggal 29 Desember 2025 Perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 diketahui bahwa

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memperoleh nilai **71,54** atau predikat **"BB"**. Capaian ini mengalami peningkatan jika dibandingan dengan tahun 2024. Berikut perbandingan capaian Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 berdasarkan target pada RPJMD 2021-2026 dan RPJMD 2025-2029:

a) Perbandingan Target dengan Realisasi IKU "Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten" Tahun 2025

Tabel 3.60
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2021-2026

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	73,00 (BB)	71,54 (BB)	98	Sangat Berhasil

Sumber : *Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja "Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten" dengan total nilai sebesar 71,54 yang dikategorikan kedalam Tingkat Akuntabilitas Kinerja dengan perdikat "BB" kategori Sangat Baik, dengan capaian 98% pada 2025 memastikan bahwa target-target reformasi birokrasi dan tata kelola yang dicanangkan pada periode perencanaan 2021-2026 telah mendekati titik optimal. Predikat BB yang berhasil dipertahankan menjadi bukti stabilitas kualitas birokrasi daerah. Mengingat indikator ini kembali ditetapkan sebagai IKU pada RPJMD 2025-2029 yaitu "Nilai SAKIP Pemerintah Daerah", maka realisasi tahun 2025 ini secara otomatis menjadi *baseline* (titik awal) yang kuat, berikut ini perbandingan target dan realisasi IKU Nilai SAKIP Pemerintah Daerah berdasarkan pada RPJMD 2025-2029 :

Tabel 3.61
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	71,4 (BB)	71,54 (BB)	100,20	Sangat Berhasil

Sumber : *Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Pada tahun 2025, pemerintah daerah menetapkan target nilai SAKIP sebesar 71,4 dengan predikat "BB". Target ini merupakan sasaran penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 71,54, yang tetap mempertahankan predikat "BB". Meskipun secara angka kenaikannya terlihat tipis dari target, namun pencapaian ini menghasilkan persentase Capaian Kinerja sebesar 100,20%. Dengan capaian yang berada di atas 100%, kinerja indikator ini masuk ke dalam kategori "Sangat Berhasil". Hal ini membuktikan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas akuntabilitas kinerja dan efektivitas birokrasi, sekaligus menjadi landasan atau baseline yang solid untuk periode perencanaan selanjutnya dalam RPJMD 2025-2029.

b) Perbandingan Realisasi IKU "Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten" Tahun 2024 dan Tahun 2025

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama "Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten" Tahun 2024 dan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.62
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dan 2025
Berdasarkan RPJMD 2021-2026

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	71,00 (BB)	71,05 (BB)	100,07	73,00 (BB)	71,54 (BB)	98

Sumber : *Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Padang Pariaman mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2024 dari 71,05 (BB) menjadi 71,54 (BB) meningkat 0,49 poin. Peningkatan nilai tersebut menunjukkan bahwa adanya keseriusan dan komitmen penuh dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam meningkatkan implementasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman guna mewujudkan visi dan misi daerah.

Berikut ini perbandingan perolehan nilai SAKIP Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 dengan tahun 2025 berdasarkan aspek evaluasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah :

Tabel 3.63
Nilai Aspek Evaluasi SAKIP Tahun 2024 dan 2025

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	2024	2025	Kenaikan
1	Perencanaan Kinerja	30	22,84	23,04	0,20
2	Pengukuran Kinerja	30	22,27	22,35	0,08
3	Pelaporan Kinerja	15	11,11	11,32	0,21
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,83	14,83	0
Nilai Hasil Evaluasi			**71,05**	**71,54**	
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			**BB**	**BB**	

Sumber *: LHE AKIP dari KemenPANRB, 2025*

Dilihat dari tabel diatas, komponen pelaporan kinerja adalah komponen yang mendapatkan peningkatan nilai paling besar dari 11,11 pada tahun 2024 menjadi 11,32 pada tahun 2025, meningkat 0,21 poin. Sedangkan komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal tidak mengalami kenaikan. Hal ini memperlihatkan bahwa komponen pelaporan kinerja pada tahun 2025 mendapatkan penilaian lebih baik karena Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan.

Sedangkan perbandingan realisasi dan target berdasarkan RPJMD 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.64
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan 2025
Berdasarkan RPJMD 2025-2029

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	71,00 (BB)	71,05 (BB)	100,07	71,4 (BB)	71,54 (BB)	100,20

Pada tahun 2024, kinerja diawali dengan realisasi sebesar 71,05 dari target 71,00. Dengan predikat "BB", instansi berhasil mencapai persentase kinerja sebesar 100,07%, yang menunjukkan bahwa fondasi akuntabilitas telah berjalan sesuai rencana awal.

Pada tahun 2025, meskipun target ditingkatkan menjadi 71,4, pemerintah daerah mampu menjawab tantangan tersebut dengan mencatatkan realisasi yang lebih tinggi, yakni 71,54. Capaian kinerja ini meningkat menjadi 100,20% dengan tetap mempertahankan predikat "BB".

Perbandingan dua tahun tersebut membuktikan adanya peningkatan yang stabil. Keberhasilan melampaui target yang terus meningkat setiap tahunnya menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja bukan sekadar berjalan di tempat, melainkan mengalami penguatan kualitas secara bertahap, menjadikannya modal berharga untuk mencapai target jangka menengah RPJMD 2025-2029.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.65
Perbandingan Realisasi IKU Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten
Tahun 2021-2025 dengan Target RPJMD 2021-2026

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	Nilai	B	B	BB	71 (BB)	73,00 (BB)	68,50 (B)	68,86 (B)	69,19 (B)	71,05 (BB)	71,54 (BB)

***Sumber** : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, 2025*

Berdasarkan target jangka menengah pada RPJMD tahun 2021-2026, Indikator Kinerja "Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten" ditargetkan menjadi BB pada tahun 2023, tetapi baru dapat tercapai pada tahun 2024 dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2025 ini. Realisasi kinerja nilai evaluasi AKIP Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2021-2025 selalu mengalami peningkatan.

Guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai posisi capaian tahun berjalan dalam kerangka perencanaan strategis daerah, berikut disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029 :

Tabel 3.66
Perbandingan Realisasi IKU Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan Target RPJMD 2025-2029

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	71,4	72,19	72,99	73,79	74,59	71,54	-	-	-	-

Dalam dokumen RPJMD 2025-2029, target Nilai SAKIP Pemerintah Daerah ditetapkan dengan tren meningkat secara konsisten, dimulai dari 71,4 di tahun 2025 hingga mencapai 74,59 di akhir periode perencanaan (tahun 2029).

Pada tahun pertama pelaksanaan periode perencanaan ini (tahun 2025), Pemerintah Daerah menunjukkan performa yang sangat positif dengan mencatatkan realisasi nilai sebesar 71,54. Capaian ini secara faktual telah melampaui target awal tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 71,4. Terlampauinya target tahun pertama ini bukan sekadar pencapaian angka, melainkan indikasi kuat atas keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan penguatan tata kelola pemerintahan, efisiensi penggunaan anggaran, serta integrasi sistem perencanaan dan penganggaran.

d) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Provinsi dan Kabupaten Tahun 2025

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Kabupaten Padang Pariaman dengan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat terkait IKU dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.67
Hasil Nilai Evaluasi AKIP Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2025

NO	KABUPATEN/KOTA	NILAI
1	KOTA PADANG	78,84
2	KOTA PAYAKUMBUH	76,31
3	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	71,54
4	KOTA BUKITTINGGI	71,49
5	KABUPATEN PESISIR SELATAN	69,19
6	KOTA SOLOK	68,89
7	KABUPATEN SOLOK	68,74
8	KABUPATEN TANAH DATAR	67,77
9	KABUPATEN DHARMASRAYA	67,42
10	KABUPATEN AGAM	67,45
11	KABUPATEN SIJUNJUNG	66,58
12	KAB.KEPULAUAN MENTAWAI	66,50
13	KOTA PADANG PANJANG	65,06
14	KOTA SAWAHLUNTO	64,44
15	KABUPATEN PASAMAN	63,55
16	KABUPATEN PASAMAN BARAT	63,52
17	KABUPATEN 50 KOTA	62,09
18	KABUPATEN SOLOK SELATAN	61,57
19	KOTA PARIAMAN	61,56
20	**PROVINSI SUMATERA BARAT**	**78,85**

Sumber : *Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 berada pada posisi ke-3 jika dibandingkan dengan seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, dimana merupakan satu-satunya Pemerintah Kabupaten se-Sumatera Barat yang sudah memperoleh predikat dari "BB". Namun jika dibandingkan dengan Nilai Evaluasi AKIP Provinsi Sumatera Barat sebesar 78,85 (BB), masih perlu upaya peningkatan yang cukup signifikan dalam implementasi SAKIP di Kabupaten Padang Pariaman.

Gambar 3.25
Pembahasan Rencana Aksi Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024



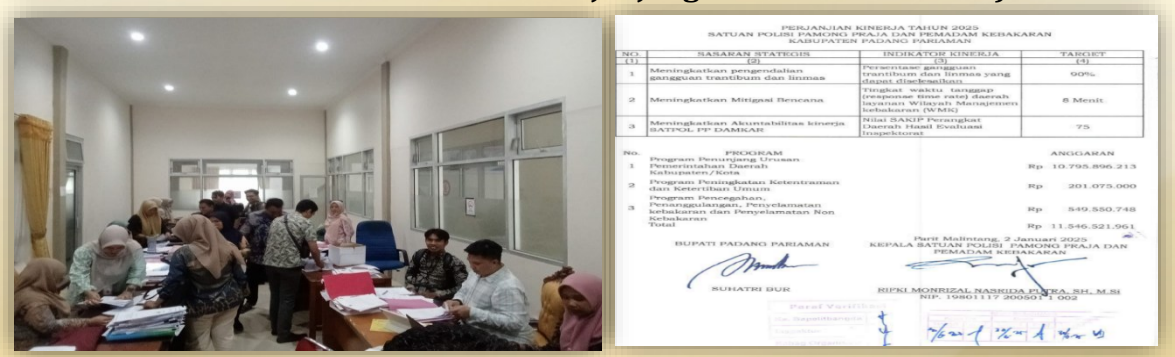
***Sumber** : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, 2025*

Gambar 3.26
Rapat Desk Capaian IKU Tahun 2024 Tim SAKIP Kabupaten Padang Pariaman dengan Perangkat Daerah Pengampu IKU



***Sumber** : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, 2025*

Gambar 3.27
Proses Verifikasi Pemarafan Dokumen SAKIP Perangkat Daerah (Paraf Verifikasi Tim SAKIP dan Paraf Reviu Berjenjang Tim Evaluator APIP)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO.	SASARAN STATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan pengendalian gangguan trantibum dan linmas	Persentase gangguan trantibum dan linmas yang dapat ditindaklanjuti	90%
2	Meningkatkan Mitigasi Bencana	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen kebakaran (WMK)	8 Menit
3	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja SATPOL PP DAMKAR	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	75

No.	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 10.795.896.213
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum/m	Rp 201.075.000
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 549.550.748
Total		Rp 11.546.521.961

Pariaman, 2 Januari 2025
BUPATI PADANG PARIAMAN
SUHATRI BUR
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
RIPKI MONRIZAL NASKIDA PUTRA, SH, M.Si
NIP. 19801117 200501 1 002

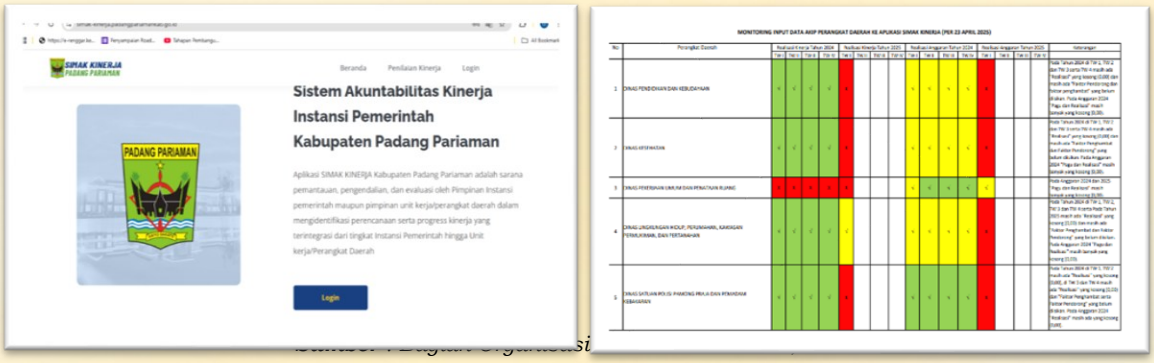
***Sumber** : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, 2025*

(e) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama "**Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten**", Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah merumuskan beberapa Program dan kegiatan diantaranya Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Penataan Organisasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Melalui program-program tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berhasil mencapai target Nilai Evaluasi AKIP dengan predikat BB (71,54). Keberhasilan ini dicapai karena adanya faktor-faktor pendukung diantaranya :

1. Melakukan evaluasi indikator kinerja perangkat daerah;
2. Menyelaraskan Renstra, renja dan rencana aksi Perangkat Daerah;
3. Melakukan desk terkait capaian indikator kinerja utama pemerintah daerah dan seluruh perangkat daerah;
4. Memverifikasi dan memvalidasi seluruh dokumen AKIP perangkat daerah dengan membubuhkan paraf verifikasi oleh Bapelitbangda, Inspektorat dan Bagian Organisasi;
5. Koordinasi antara Tim SAKIP dengan Dinas Komunikasi dan Informatika terkait pengembangan fitur pada aplikasi SIMAK Kinerja;
6. Melakukn pemantauan dan pengendalian capaian kinerja Perangkat Daerah secara berkala dengan menggunakan aplikasi SIMAK Kinerja setiap triwulan;
7. Melakukan verifikasi dan memberikan catatan perbaikan terhadap Laporan Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan Perbup Pedoman SAKIP; dan
8. Meningkatkan Kapabilitas Evaluator Internal (APIP).

Gambar 3.28
Monitoring Penginputan Data AKIP Perangkat Daerah
pada Aplikasi SIMAK Kinerja



Disamping faktor-faktor pendukung tersebut, terdapat faktor penghambat dalam upaya peningkatan Nilai AKIP, diantaranya :

1. Kurangnya kualitas sumber daya manusia di bidang perencanaan dan pengelolaan kinerja.
2. Keterbatasan anggaran dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan implementasi AKIP, seperti : peningkatan kapasitas SDM dalam bentuk

Bimtek, sosialisasi, dan lain sebagainya, pengembangan aplikasi-aplikasi yang terkait dengan implementasi AKIP.

3. Masih lemahnya sistem monitoring dan evaluasi kinerja internal pada perangkat daerah.
4. Kurang optimalnya beberapa perangkat daerah dalam memanfaatkan aplikasi SIMAK Kinerja dalam melaporkan data realisasi kinerja secara *real time.*

Untuk meningkatkan nilai AKIP, berikut upaya dan langkah kedepan yang harus dilakukan:

1. Komitmen yang kuat dari Kepala Daerah (Bupati Padang Pariaman) dalam rangka mendorong peran serta seluruh Perangkat Daerah guna peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Padang Pariaman.
2. Peningkatan komitmen dari seluruh perangkat daerah dan pegawai untuk mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati Padang Pariaman dalam mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD.
3. Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja (Simak Kinerja) Kabupaten Padang Pariaman.
4. Integrasi aplikasi kinerja individu dengan SIMAK Kinerja
5. Optimalisasi kinerja Tim Penyusun LKjIP Kabupaten dengan Tim Reviu dan Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah dengan melakukan pendampingan terhadap seluruh OPD dan Kecamatan dalam pelaksanaan Reviu LAKIP Pemerintah Daerah dan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah.
6. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan faktor penghambat pencapaian kinerja.
7. Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal.
8. Melakukan reviu atas keselarasan antara kegitan, program serta sasaran strategis untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran efektif dalam pencapaian kinerja dan melakukan pengukuran efisiensi atas perbaikan manajemen kinerja yang telah dilakukan.

(f) Analisis Program dan Kegiatan Pencapaian IKU "Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten"

Tabel 3.68
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Perencanaan,	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp. 597.642.500,00	Rp. 579.068.173,00	96,89

	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 16.000.000,00	Rp. 7.590.500,00	47,44
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	Rp. 26.818.000,00	Rp. 16.767.000,00	62,52
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 40.000.000,00	Rp. 20.008.540,00	50,02
4	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp. 407.384.000,00	Rp. 401.016.699,00	98,43

Sumber : *BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Berdasarkan data realisasi anggaran program dan kegiatan pada Tabel diatas, Secara akumulatif, kelima kegiatan pendukung ini memiliki total alokasi pagu sebesar Rp. 1.087.844.500,00 dengan total realisasi keuangan sebesar Rp. 1.024.450.912,00. Dengan demikian, tingkat penyerapan anggaran mencapai 94,17%, yang menunjukkan kinerja keuangan yang sangat baik dengan total efisiensi anggaran sebesar Rp. 63.393.588,00.

(g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja "Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten" tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.69
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Utama
Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2021-2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	98%	94,17%	3,83%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2025 efisiensi sumber daya untuk mencapai target indikator "Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten" adalah sebesar 3,83%. Adanya efisiensi ini menjadi bukti bahwa kualitas akuntabilitas kinerja tidak selalu berbanding lurus dengan besarnya uang yang dikeluarkan, melainkan pada ketepatan strategi dan integritas sistem.

Sedangkan untuk melihat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan RPJMD 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.70
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Utama
Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	100,20%	94,17%	6,03%

Sejalan dengan capaian kinerja yang tinggi sebesar 100,20%, tingkat Penyerapan Anggaran untuk mendukung kegiatan ini tercatat sebesar 94,17%. Penggunaan anggaran yang berada di bawah angka 100% namun tetap mampu menghasilkan output yang melampaui target menunjukkan adanya ketepatan dalam alokasi dana.

Dari perbandingan antara hasil kerja dan dana yang terserap, diperoleh nilai Tingkat Efisiensi sebesar 6,03%. Angka positif ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara efisien, di mana sasaran strategis dapat tercapai dengan sempurna tanpa harus menghabiskan seluruh pagu anggaran yang tersedia.

SASASARAN STRATEGIS 9

Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel

Sasaran Strategis "Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel" merupakan turunan dari Misi ke-5 Kabupaten Padang Pariaman. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis ini diantaranya adalah Indeks Merit System dan Indeks SPBE. Sistem merit merupakan salah satu sistem dalam manajemen sumber daya manusia yang menjadikan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam proses perencanaan, perekrutan, penggajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin, dan pensiun pegawai.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

A. Indeks Merit System

Indeks Merit System merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana prinsip-prinsip sistem merit diterapkan dalam manajemen sumber daya manusia (SDM) di lingkungan pemerintahan, khususnya dalam hal perekrutan, promosi, penilaian kinerja, dan pengembangan karier pegawai.

Pada tahun 2024, realisasi Indeks Merit System Kabupaten Padang Pariaman tidak dapat disajikan karena tidak dilakukan penilaian. Sesuai dengan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor : B-2187/SM.00.00/07/2024 Perihal Penilaian Sistem Merit Manajemen ASN tahun 2024 tanggal 09 Juli 2024, untuk Tahun 2024 Penilaian Sistem Merit hanya dilakukan pada Provinsi, Kabupaten dan Kota yang terpilih. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2024 penilaian Indeks Merit System mengalami transisi dari KASN ke Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 91 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2021 tentang Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi tanggal 23 Agustus 2024 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 04 tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan dan Pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara tanggal 4 September 2024.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Merit System Tahun 2025

Berikut perbandingan target dan realisasi capaian kinerja tahun 2025 indikator kinerja Indeks Merit System :

Tabel 3.71
Target dan Realisasi Nilai Indeks Merit System Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	2025		Capaian Kinerja (%)	Interpestasi
	Target	Realisasi		
Indeks Merit Sytem	250	211,5	84,6	Kurang Berhasil

***Sumber** : BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menetapkan target Indeks Merit System sebesar 250 untuk tahun 2025. Target ini ditetapkan bukan tanpa alasan, melainkan sebagai upaya untuk memenuhi standar nilai minimal agar daerah dapat dikategorikan dalam kriteria "Baik" sesuai dengan standar nasional. Namun, realisasi yang berhasil diraih pada tahun 2025 ini adalah sebesar 211,5 atau kriteria “Kurang”. Secara persentase, capaian kinerja ini berada pada angka 84,6%.

Berdasarkan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Instansi Pemerintah. Terdapat 8 Aspek penilaian sistem merit yaitu : a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai, b. Pengadaan, Pembinaan Karir, c. Promosi dan Mutasi, d. Manajemen Kinerja, e. Penggajian Penghargaan dan Disiplin, f. Perlindungan dan Pelayanan, g. Sistem Informasi. Adapun penilaian mandiri sistem merit pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :

Tabel 3.72
Penilaian Mandiri Sistem Merit Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

No	Aspek	Tahun 2025
1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai	32.5
2	Pengadaan	38
3	Pembinaan Karir	25
4	Promosi dan Mutasi	12,5
5	Manajemen Kinerja	62,5
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	25
7	Perlindungan dan Pelayanan	2
8	Sistem Informasi	14
Total Akhir Verifikasi		**211,5**

***Sumber** : BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan penilaian mandiri penerapan sistem merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang dilakukan oleh Tim Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit yang dilaksanakan pada Rapat Pleno Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dengan memperhatikan dokumen serta bukti-bukti administrasi terkait penerapan Sisem Merit sesuai Permenpan RB Nomor 40 Tahun 2018 dan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019.

b) Perbandingan Realisasi Nilai Indeks Merit System Tahun 2024 dan Tahun 2025

Adapun perbandingan capaian realisasi Indeks Merit System tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.73
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Merit System
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	2024			2025			Interpestasi
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Indeks Merit System	250	N/A	N/A	250	211,5	84,6	Kurang Berhasil

***Sumber** : BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Pada tahun 2024 indikator Indeks Merit System tidak ada penilaian untuk Kabupaten Padang Pariaman. Oleh karena itu, tidak dapat dilakukan analisis perbandingan tahun 2024 dan tahun 2025.

Namun demikian, untuk mendapatkan gambaran dari indikator ini, dapat dilihat pada capaian tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.74
Perbandingan Nilai Sistem Merit Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2023, 2024 dengan Tahun 2025

No	Aspek	2023	2024	2025
1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai	35	0	32.5
2	Pengadaan	30	0	38
3	Pembinaan Karir	12.5	0	25
4	Promosi dan Mutasi	10	0	12,5
5	Manajemen Kinerja	15	0	62,5
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	25	0	25
7	Perlindungan dan Pelayanan	2	0	2
8	Sistem Informasi	11	0	14
Total Akhir Verifikasi		**140,5**	**0**	**211,5**

***Sumber** : BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2025 mendapat predikat “Kurang” dengan nilai 211,5, mengalami kenaikan dari tahun 2023 dan 2024. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi masih rendahnya penilaian sistem merit tahun 2025 tersebut, antara lain : Kepemimpinan yang kurang kuat dan komitmen terhadap penerapan Sistem Merit belum dilakukan secara maksimal, Sistem informasi ini dapat digunakan untuk mengelola data pegawai secara akurat dan terintegrasi, sehingga memudahkan instansi pemerintah dalam melakukan Penilaian Kinerja, Promosi, dan Mutasi Pegawai.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.75
Perbandingan Realisasi Indeks Merit System
Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Merit System	Nilai	N/A	N/A	N/A	250	250	N/A	158,5	140,5	N/A	211,5

Indikator Kinerja "Indeks Merit System" tidak dapat diperbandingkan realisasi kinerjanya dengan target RPJMD karena merupakan indikator yang baru digunakan pada tahun 2024. Selain itu, pada tahun 2024 di Kabupaten Padang Pariaman tidak dilakukan penilaian indeks merit system dan hanya dilakukan pada Provinsi, Kabupaten dan Kota yang terpilih. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2024 penilaian Indeks Merit System mengalami transisi dari KASN ke Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

d) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Dalam menerapkan sistem merit, terdapat beberapa faktor penghambat sebagai berikut :

- **Resistensi terhadap Perubahan:** Beberapa individu atau kelompok mungkin enggan menerima perubahan yang dibawa oleh sistem merit, terutama jika merasa nyaman dengan sistem lama yang mungkin lebih subjektif.
- **Kurangnya Pemahaman:** Pemahaman yang kurang memadai tentang konsep dan tujuan sistem merit dapat menghambat implementasinya. Sosialisasi dan edukasi yang efektif sangat penting untuk mengatasi hal ini.
- **Keterbatasan Sumber Daya:** Implementasi sistem merit yang efektif memerlukan sumber daya yang memadai, baik finansial maupun sumber daya manusia. Keterbatasan dalam hal ini dapat menjadi kendala.
- **Budaya Organisasi:** Budaya organisasi yang tidak mendukung nilai-nilai merit seperti transparansi, akuntabilitas, dan kinerja dapat menjadi penghambat.
- **Intervensi Politik:** Intervensi politik dalam proses rekrutmen, promosi, atau penempatan pegawai dapat merusak sistem merit.
- **Lemahnya Penegakan Hukum:** Penegakan hukum yang lemah terhadap pelanggaran prinsip-prinsip merit dapat mengurangi efektivitas sistem ini.

Adapun faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja indeks merit system adalah sebagai berikut :

- **Komitmen Pimpinan:** Dukungan yang kuat dari pimpinan organisasi sangat penting untuk keberhasilan implementasi sistem merit.
- **Sosialisasi dan Edukasi:** Program sosialisasi dan edukasi yang efektif dapat meningkatkan pemahaman tentang sistem merit dan mengurangi resistensi terhadap perubahan.

- **Sistem Informasi yang Handal:** Sistem informasi yang handal diperlukan untuk mengelola data kinerja pegawai, kompetensi, dan informasi lain yang relevan dengan sistem merit.
- **Pengembangan Kapasitas:** Program pengembangan kapasitas yang berkelanjutan dapat meningkatkan kompetensi pegawai dan mendukung implementasi sistem merit.
- **Transparansi dan Akuntabilitas:** Sistem merit yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi.
- **Penghargaan dan Sanksi:** Sistem penghargaan dan sanksi yang jelas dan adil dapat mendorong kinerja pegawai dan mendukung implementasi sistem merit.

Dengan mengatasi faktor penghambat, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman diharapkan dapat meningkatkan implementasi sistem merit dan mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, seperti peningkatan kinerja pegawai, pelayanan publik yang lebih baik, dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Berikut ini merupakan upaya atau strategi perbaikan kinerja kedepan, antara lain:

a. Penguatan Komitmen Pimpinan:
   - Pimpinan harus menunjukkan komitmen yang kuat terhadap implementasi sistem merit.
   - Komitmen ini harus tercermin dalam tindakan dan kebijakan, bukan hanya kata-kata.
   - Pimpinan harus menjadi contoh dalam penerapan prinsip-prinsip merit.
b. Sosialisasi dan Edukasi yang Efektif:
   - Program sosialisasi dan edukasi yang komprehensif tentang sistem merit perlu dirancang dan dilaksanakan.
   - Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman seluruh pegawai tentang konsep, tujuan, dan manfaat sistem merit.
   - Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti seminar, workshop, pelatihan, dan media komunikasi lainnya.
c. Penyempurnaan Sistem Informasi:
   - Sistem informasi yang handal dan terintegrasi diperlukan untuk mendukung implementasi sistem merit.
   - Sistem ini harus mampu mengelola data kinerja pegawai, kompetensi, kualifikasi, dan informasi lain yang relevan.
   - Data ini akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait rekrutmen, promosi, mutasi, dan pengembangan pegawai.
d. Pengembangan Kapasitas SDM:
   - Program pengembangan kapasitas yang berkelanjutan perlu dirancang untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
   - Pelatihan dan pengembangan harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan individu.
   - Pengembangan kapasitas juga mencakup peningkatan pemahaman tentang sistem merit dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukungnya.
e. Penegakan Transparansi dan Akuntabilitas:
   - Proses rekrutmen, promosi, mutasi, dan pengembangan pegawai harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik.

e) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU

Untuk pencapaian indikator Indeks Merit System, pada tahun 2025 didukung oleh beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.76
Pagu dan Realisasi Sub Kegiatan yang Menunjang Indikator Kinerja Indeks Merit System Tahun 2025

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
Penyusunan Rencana Kebutuhan formasi Pelaksanaan Pengadaan ASN	Rp. 12.000.600,00	Rp. 10.060.600,00	Rp. 1.940.000,00
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Rp. 338.854.050,00	Rp. 311.984.387,00	Rp. 26.869.663,00
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp. 23.220.000,00	Rp. 22.210.520,00	Rp. 1.009.480,00
Pengelolaan Mutasi ASN	Rp. 19.500.000,00	Rp. 19.430.000,00	Rp. 70.000,00
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Rp. 112.924.385,00	Rp. 111.479.272,00	Rp. 1.445.113,00
Pengelolaan Promosi ASN	Rp. 101.136.150,00	Rp. 97.531.150,00	Rp. 3.605.000,00
Pengelolaan Assesment Center	Rp. 141.787.000,00	Rp. 141.718.402,00	Rp. 68.598,00
Evaluasi Hasil Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp. 14.360.500,00	Rp. 14.300.000,00	Rp. 60.500,00
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Rp. 12.000.000,00	Rp. 11.882.528,00	Rp. 117.472,00
Pembinaan Disiplin ASN	Rp. 47.009.200,00	Rp. 6.913.700,00	Rp. 40.095.500,00
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Rp. 56.359.100,00	Rp. 28.175.600,00	Rp. 28.183.500,00
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Rp. 508.485.000,00	Rp. 411.647.606,00	Rp. 96.837.394,00
JUMLAH	**Rp. 1.387.635.985,00**	**Rp. 1.187.333.165,00**	**Rp. 200.302.220,00**

***Sumber** : BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Secara keseluruhan, total pagu anggaran yang dialokasikan untuk menunjang Indikator Kinerja Indeks Merit System tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.387.635.985,00, dengan realisasi sebesar Rp. 1.187.333.165,00 atau mencapai persentase penyerapan sebesar 85,57%. Terdapat sisa anggaran (Silpa) sebesar Rp. 200.302.220,00 yang sebagian besar berasal dari efisiensi belanja dan rasionalisasi kegiatan pada bidang pembinaan disiplin

Gambar 3.29
Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Eselon II, III, dan IV



***Sumber** : BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Gambar 3.30
Pelaksanaan Profiling ASN



***Sumber** : BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Gambar 3.31
Pelaksanaan *Assessment Center*



***Sumber** : BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut tabel perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggaran indikator kinerja indeks merit system tahun 2025 :

Tabel 3.77
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja
Indeks Merit System Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Merit System	84,6%	85,56%	-0,96%

Nilai efisiensi sebesar -0,96% menunjukkan bahwa penggunaan anggaran berjalan sangat selaras (*in-line*) dengan output kinerja yang dihasilkan. Selisih negatif yang sangat tipis (di bawah 1%) mengindikasikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan hampir sepenuhnya berkontribusi langsung terhadap kenaikan poin pada Indeks Merit System.

B. Indeks SPBE

Nilai Indeks SPBE ditentukan berdasarkan hasil Evaluasi dari KemenpanRB terhadap seluruh K/L/D. Indeks SPBE ini diukur berdasarkan tingkat kematangan berdasarkan struktur domain (terdiri dari empat (4) domain), aspek (terdiri dari delapan (8) aspek) dan indikator (terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) indikator). Keempat domain meliputi Domain Kebijakan, Domain Tata Kelola, Domain Manajemen dan Domain Layanan SPBE.

Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan indikator kinerja utama yang bersifat strategis dan lintas sektor bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Mengingat pentingnya akselerasi tata kelola pemerintahan digital, indikator ini ditetapkan secara berkelanjutan dalam dua dokumen perencanaan jangka menengah daerah, yaitu RPJMD Periode 2021-2026 dan RPJMD Periode 2025-2029.

Penetapan target Indeks SPBE untuk tahun anggaran 2025 merupakan fase krusial dalam masa transisi perencanaan ini. Dalam penyusunan target tahun 2025 pada dokumen RPJMD terbaru (2025-2029), Pemerintah Daerah melakukan evaluasi mendalam terhadap capaian tahun-tahun sebelumnya.

Sesuai dengan Laporan Hasil Pementauan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Tahun 2025 yang ditetapkan, maka Nilai Indeks SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah 4,07 dengan predikat "Sangat Baik".

(a) Perbandingan Target dan Realisasi Nilai SPBE Tahun 2025

Berikut perbandingan target dan realisasi capaian kinerja tahun 2025 berdasarkan RPJMD Periode 2021-2026 :

Tabel 3.78
Target dan Realisasi Nilai Indeks SPBE Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2021-2026

Indikator Kinerja Utama	2025		%	Interpestasi
	Target	Realisasi		
Indeks SPBE	4,00	4,07	101,75	Sangat Berhasil

***Sumber** : Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Pada tahun 2025 Nilai Indeks SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah 4,07 dari target yang ditetapkan pada pencapaian IKU tahun 2025 yaitu 4,00 sehingga persentase capaian kinerja yang diperoleh sebesar 101,75% dikategorikan Sangat Berhasil karena melebihi target yang telah ditetapkan.

Adapun perbandingan target dan realisasi capaian kinerja tahun 2025 berdasarkan RPJMD Periode 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 3.79
Target dan Realisasi Nilai Indeks SPBE Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029

Indikator Kinerja Utama	2025		%	Interpestasi
	Target	Realisasi		
Indeks SPBE	3,51	4,07	115,95	Sangat Berhasil

***Sumber** : Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Berdasarkan dokumen RPJMD 2025-2029, target Indeks SPBE yang ditetapkan untuk tahun 2025 adalah sebesar 3,51. Namun, melalui komitmen kuat dalam penguatan arsitektur SPBE dan integrasi layanan aplikasi, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berhasil mencatatkan realisasi yang jauh melampaui ekspektasi, yaitu sebesar 4,07.

(b) Perbandingan Realisasi Nilai SPBE Tahun 2024 dan Tahun 2025

Adapun perbandingan capaian realisasi Nilai SPBE tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.80
Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Indeks SPBE
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dan Tahun 2025
Berdasarkan RPJMD 2021-2026

Indikator Kinerja Utama	2024			2025			Interpestasi
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Indeks SPBE	3,12	3,51	112,50	4,00	4,07	101,75	Sangat Berhasil

***Sumber** : Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Keberhasilan menembus angka 4,07 pada tahun 2025 menandakan bahwa sistem pemerintahan di Kabupaten Padang Pariaman telah memasuki level kematangan yang sangat baik, di mana integrasi layanan publik digital dan manajemen data sudah berjalan secara sistematis. Terjadi kenaikan poin absolut sebesar 0,56 dari tahun 2024 ke 2025. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi informasi tidak hanya berhenti pada pemenuhan standar administratif, tetapi terus berkembang menuju layanan yang lebih *user-centric*. Meskipun target tahun 2025 jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi tetap mampu melampaui target tersebut (101,75%). Ini membuktikan adanya komitmen kuat dari seluruh perangkat daerah dalam mendukung integrasi proses bisnis pemerintahan ke dalam platform elektronik.

Adapun perbandingan realisasi kinerja Indeks SPBE tahun 2024 dengan tahun 2025 berdasarkan RPJMD 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.81
Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Indeks SPBE
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dan Tahun 2025
Berdasarkan RPJMD 2025-2029

Indikator Kinerja Utama	2024			2025			Interpestasi
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Indeks SPBE	3,12	3,51	112,50	3,51	4,07	115,95	Sangat Berhasil

***Sumber** : Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Pada tahun 2024, indeks SPBE ditargetkan pada angka 3,12, namun realisasi di lapangan mampu menyentuh angka 3,51. Hal ini menghasilkan persentase capaian kinerja sebesar 112,50%, yang menunjukkan efektivitas awal dalam integrasi platform elektronik.

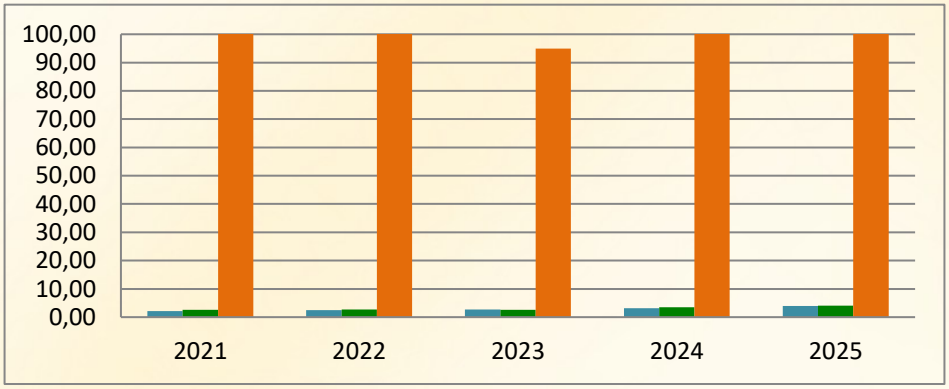
Memasuki tahun 2025 (target awal periode RPJMD 2025-2029), target ditingkatkan menjadi 3,51 (setara dengan realisasi tahun sebelumnya). Pemerintah daerah berhasil melakukan akselerasi luar biasa dengan mencapai realisasi sebesar 4,07. Capaian ini menghasilkan persentase kinerja sebesar 115,95%.

Kenaikan realisasi dari 3,51 ke 4,07 menunjukkan peningkatan kualitas layanan digital yang sangat pesat. Dengan capaian kinerja yang konsisten berada di atas 100%, indikator Indeks SPBE ini dikategorikan ke dalam predikat "Sangat Berhasil". Pencapaian ini menjadi bukti nyata komitmen daerah dalam mempercepat integrasi proses bisnis pemerintahan ke dalam ekosistem digital.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Berikut ini perbandingan realisasi capaian indikator kinerja utama "Indeks SPBE" dengan Target pada RPJMD Tahun 2021-2025 :

Grafik 3.14
Perbandingan Target RPJMD 2021-2026 dengan Realisasi Indeks SPBE Tahun 2021-2025



Sumber : *Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Realisasi Indikator Kinerja "Indeks SPBE" dari tahun 2021 sampai dengan 2025 relatif selalu meningkat, hanya pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan. Demikian juga capaian kinerjanya relatif selalu tercapai sesuai dengan target kecuali tahun 2023. Namun jika dilihat dari realisasi per tahun, realisasi tahun 2024 adalah kenaikan terbesar sejak tahun 2021, mencapai 0,89 poin. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah berhasil menuntaskan target RPJMD 2021-2025 untuk indikator Indeks SPBE dengan hasil yang sangat memuaskan. Realisasi akhir sebesar 4,07 di tahun 2025 menjadi landasan yang sangat kuat bagi penyusunan target pada periode RPJMD berikutnya.

Untuk mengukur sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dalam mencapai sasaran jangka panjang, tabel di bawah ini memaparkan keselarasan antara realisasi kinerja saat ini dengan proyeksi target yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2025-2029:

Tabel 3.82
Perbandingan Target RPJMD 2025-2029 dengan Realisasi Indeks SPBE

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks SPBE	Indeks	3,51	3,91	4,10	4,21	4,26	4,07	-	-	-	-

Sumber : *Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Dalam dokumen perencanaan RPJMD 2025-2029, target indeks ini dirancang untuk meningkat secara progresif, dimulai dari sasaran awal sebesar 3,51 pada tahun 2025 hingga mencapai target akhir sebesar 4,26 di tahun 2029.

Pada tahun pertama pelaksanaan periode ini (tahun 2025), efektivitas transformasi digital menunjukkan hasil yang sangat impresif. Realisasi Indeks SPBE yang berhasil dicapai adalah sebesar 4,07. Capaian ini secara faktual tidak hanya melampaui target

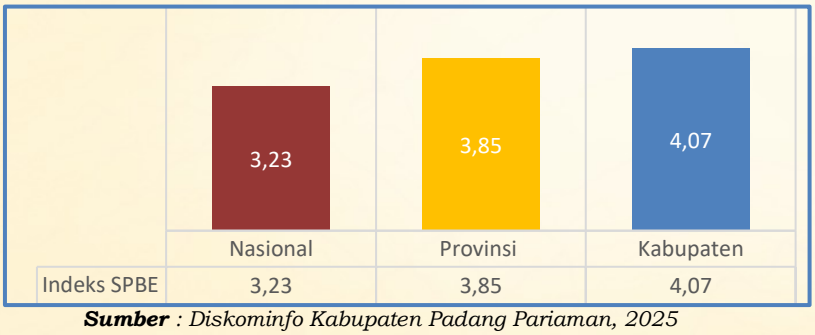
tahun berjalan (3,51), tetapi juga telah mendekati target jangka menengah yang semula baru diproyeksikan akan tercapai pada tahun 2027 (target 4,10).

Keberhasilan mencapai angka 4,07 di awal periode perencanaan ini membuktikan komitmen tinggi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Hasil yang sangat memuaskan ini menjadi fondasi yang kokoh bagi Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik digital dan integrasi sistem pada tahun-tahun mendatang.

d) Perbandingan Realisasi Nilai SPBE Kabupaten dengan Realisasi Provinsi dan Nasional Tahun 2025

Adapun perbandingan realisasi Indeks SPBE Kabupaten Padang Pariaman dengan realisasi Provinsi Sumatera Barat dan realisasi Nasional pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Grafik 3.15
Perbandingan Realisasi Indeks SPBE Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2025



***Sumber** : Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Grafik di atas menunjukkan capaian performa SPBE Kabupaten Padang Pariaman yang cukup signifikan pada tahun 2025. Terlihat bahwa indeks yang diraih Kabupaten Padang Pariaman mampu melampaui rata-rata realisasi Provinsi Sumatera Barat maupun capaian rata-rata Nasional. Hal ini menunjukkan adanya komitmen kuat Pemerintah Daerah dalam menjaga ritme implementasi teknologi informasi agar tetap selaras dengan standar target digitalisasi nasional, sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Padang Pariaman dalam ekosistem pemerintahan berbasis elektronik di tingkat regional.

e) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU

Pencapaian indikator Indeks SPBE didukung oleh beberapa program, yaitu :

Tabel 3.83
Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator Kinerja Indeks SPBE

1.	**Program**	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	
	Kegiatan	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
	Tahun	2024	2025
	Jumlah Anggaran	Rp. 2.578.540.750,00	Rp. 2.379.987.500,00
2.	Program	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	

	Kegiatan	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	
	Tahun	2024	2025
	Jumlah Anggaran	Rp. 10.180.000,00	Rp. 3.840.000,00
3.	Program	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
	Kegiatan	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan	Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	
	Tahun	2024	2025
	Jumlah Anggaran	Rp. 72.678.000,00	Rp. 22.070.000
4.	Program	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
	Kegiatan	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan	Pembangunan dan/Atau Pengembangan Aplikasi Khusus Yang Sesuai Dengan Arsitektur Dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	
	Tahun	2024	2025
	Jumlah Anggaran	Rp. 10.000.000,00	Rp. 35.368.400,00
5.	Program	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
	Kegiatan	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
	Tahun	2024	2025
	Jumlah Anggaran	Rp. 9.870.000,00	Rp. 4.410.000,00
6.	Program	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
	Kegiatan	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	
	Tahun	2024	2025
	Jumlah Anggaran	Rp. 15.000.000,00	Rp. 4.320.000,00
7.	Program	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
	Kegiatan	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
	Tahun	2024	2025
	Jumlah Anggaran	Rp. 9.000.000,00	Rp. 6.000.000,00
8.	Program	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	
	Kegiatan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan	Pelayanan Informasi Publik	
	Tahun	2024	2025
	Jumlah Anggaran	10.000.000	3.900.000

***Sumber** : Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Dalam upaya mendukung keberlanjutan transformasi digital dan pencapaian target Indeks SPBE di Kabupaten Padang Pariaman, pemerintah daerah telah mengalokasikan sumber daya finansial yang terfokus pada program-program strategis informatika. Pada tahun 2025, total alokasi anggaran yang dikelola untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 2.459.895.900,00 dana realisasi anggaran sebesar Rp. 2.394.963.063,00 atau menunjukkan tingkat penyerapan yang sangat baik, yakni mencapai 97,36%.

Gambar 3.32
Program dan Kegiatan Pendukung IKU Indeks SPBE Tahun 2025



RAPAT KERJA PERSIAPAN EVALUASI PENYELENGGARAAN SMART CITY KABUPATEN PADANG PARIAMAN



MOU BERSAMA FORKOPIMDA GUNA PEMENUHAN TARGET DAN KEBERLANJUTAN SMART CITY DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN



RAKOR OPD SE-PADANG PARIAMAN BERSAMA BUPATI GUNA PEMENUHAN TARGET SPBE PEMKAB. PADANG PARIAMAN



BUPATI PADANG PARIAMAN MELAKUKAN MOU DENGAN PT. ICONNET+ INDONESIA GUNA MENGHADIRKAN JARINGAN INTERNET YANG BERKUALITAS TINGGI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN



DINAS KOMINFO MENERIMA KUNJUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) KAB. PADANG PARIAMAN MENYUKSESKAN PENYUSUNAN PADANG PARIAMAN DALAM ANGKA TAHUN 2025

***Sumber** : Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

f) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

1) **<u>Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE</u>**

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah dengan adanya Kebijakan Internal Perbub No. 59 Tahun 2023, tentang referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE sebagai kebijakan internal Arsitektur SPBE, Peta Rencana dan Manajemen Data. Pembangunan Aplikasi, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Manajemen Keamanan Informasi dan Kebijakan Internal Audit TIK. Kep Bup No. 236 Tahun 2023 tentang Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Tentang Pembentukan Tim Koordinasi SPBE merupakan kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE.

- **Kekuatan**
  Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola ini dapat terlihat adanya Kekuatan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yaitu: Kebijakan Internal Perbub No. 59 Tahun 2023, tentang referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE sebagai kebijakan internal Arsitektur SPBE, Peta Rencana dan Audit TIKyang merupakan kebijakan baru menggantikan Perbub No. 25 Tahun 2021.
- **Kelemahan**
  Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tidak memiliki kelemahan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

2) **Perencanaan Strategis SPBE**

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah dengan adanya Kep Bup No. 81 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Dokumen Arsitektur SPBE Kep Bup No. 79 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Peta Rencana SPBE Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE yang telah dikonsultasikan dengan unit pengelola TIK serta Inovasi Proses Bisnis yang telah dilakukan berdasarkan Proses Bisnis yang ada.

- **Kekuatan**
  Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman belum memiliki Kekuatan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE
- **Kelemahan**
  Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tidak memiliki Kelemahan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE

3) **Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah dengan adanya dokumen siklus pengembangan aplikasi yang dikonsultasikan dengan unit pengelola TIK Layanan Data telah dimanfaatkan seluruh unitdan juga telah memanfaatkan Pusat Data Nasional (PDN) Layanan Jaringan Intra telah dimanfaatkan seluruh unit dan telah terkoneksi dengan jaringan intra Provinsi Layanan Sistem Penghubung telah dimanfaatkan seluruh unit dan telah mengintegrasikan berbagai layanan

- **Kekuatan**
  Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi ini dapat terlihat adanya Layanan Data yang telah dimanfaatkan seluruh unitdan juga telah memanfaatkan Pusat Data Nasional (PDN) Layanan Jaringan Intra telah dimanfaatkan seluruh unit dan telah terkoneksi dengan jaringan intra Provinsi Layanan Sistem Penghubung telah dimanfaatkan seluruh unit dan telah mengintegrasikan berbagai layanan. Ketiga layanan ini merupakan kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
- **Kelemahan**
  Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tidak memiliki Kelemahan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi

4) **Penyelenggara SPBE**

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah dengan adanya Pelaksanaan tugas tim koordinasi sesui dengan surat tugas terkait. Kolaborasi juga sudah laksanakan oleh tim yang dibentuk tim kolaborasi secara formal

- **Kekuatan**
  Pada Aspek Penyelenggara SPBE ini dapat terlihat adanya kegiatan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi sesuai dengan tugas yang dinyatakan pada kebijakan yang digunakan sebagai acuan Tim Koordinasi, dan menjadi kekuatan dalam Aspek Penyelenggara SPBE pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
- **Kelemahan**
  Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tidak memiliki Kelemahan pada Aspek Penyelenggara SPBE

5) **Penerapan Manajemen SPBE**

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah dengan telah dilaksanakannya Penerapan Manajemen resiko dengan Pedomanyang telah disahkan oleh Kep Bub No 110Tahun 2023 Penerapan Manajemen Keamanan Informasi dengan Pedoman yang telah disahkan oleh KepBub No 106 Tahun 2023 Penerapan Manajemen Data dengan Pedoman yang telah disahkan oleh KepBub No 105 Tahun 2023 Penerapan Manajemen Aset TIK dengan Pedoman yang telah disahkan oleh KepBub No 79 Tahun 2023 Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE dengan Pedoman yang telah disahkan oleh Kep Bub No 111 Tahun 2023 Penerapan Manajemen Pengetahuan dengan Pedoman yang telah disahkan oleh KepBub No 108 Tahun 2023 Penerapan Manajemen Perubahan dengan Pedoman yang telah disahkan oleh Kep Bub No 109 Tahun 2023 Penerapan Manajemen Layanan SPBE dengan Pedoman yang telah disahkan oleh KepBub No 107 Tahun 2023.

- **Kekuatan**
  Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman belum memiliki Kekuatan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE
- **Kelemahan**
  Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tidak memiliki Kelemahan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE

6) **Audit TIK**

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah dengan adanya Pekasanaan Audit Infrastruktur dan Aplikasi SPBE berdasarkan peta rencana SPBE 2023-2027dan dilaksanakan oleh tim Auditor Internal yang ditetapkan pada KepBup No 23 tahun 2023.

- **Kekuatan**
  Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman belum memiliki Kekuatan pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK
- **Kelemahan**
  Namun disisi lain, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman masih belum melaksanakan Audit Keamanan, meskipun sudah memiliki pedoman pelaksanaan Audit

7) **Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah dengan adanya Pelaksanaan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Keuangan menggunakan SIPD yang telah terintegrasi satu sama lain, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang telah menggunakan SPSE Layanan Kepegawaian dengan menggunakan aplikasi kepegawaian yg telah terintegrasi dengan aplikasi SIKAP untuk layanan kinerja pegawai. Layanan kearsipan telah menggunakan aplikasi berbagi pakai Srikandi. Layanan Pengelolaan barang milik daerah menggunakan SIMDA BMD Pengawasan internal dibantu dengan sistem elektronik Whistle

Blowing System (WBS) Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi menggunakan aplikasi SIMAK Kinerja.

- **Kekuatan**
  Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Pelaksanaan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Keuangan menggunakan SIPD yang telah terintegrasi satu sama lain. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang telah menggunakan SPSE. Layanan Kepegawaian dengan menggunakan aplikasi kepegawaian yang telah terintegrasi dengan aplikasi SIKAP untuk layanan kinerja pegawai. Layanan kearsipan telah menggunakan aplikasi berbagi pakai Srikandi Layanan-layanan tersebut merupakan kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
- **Kelemahan**
  Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tidak memiliki Kelemahan pada Aspek Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik.

8) **<u>Layanan Publik Berbasis Elektronik</u>**

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah dengan adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik menggunakan aplikasi SP4N Lapor Layanan Data terbuka menggunakan system http://data.padangpariamankab.go.id/. Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) menggunakan system http://jdih.padangpariamankab.go.id/. Layanan Sektor Publik Ke-1 adalah aplikasi E_BPHTB mempermudah masyarakat untuk melakukan pembayaran dan memonitoring keweajiban pajak Layanan Sektor Publik Ke-2 yaitu e-LIFE PADANG PARIAMAN adalah aplikasi yang bertujuan untuk pelaporan dan pencatatan proses kehidupan mulai dari lahir sampai meninggal, dalam implementasinya berkolaborasi dengan beberapa instansi. Layanan Sektor Publik Ke-3 adalah aplikasi "SIMPEL" (Sistem Informasi Perizinan Elektronik), merupakan aplikasi untuk memudahkan masyarakat mengurus perizinan secara online. Terakhir yang terbaru adalah Layanan Sektor Publik Ke-4 adalah "LAPOR AJO" (Layanan Aplikasi Pengaduan Rakyat melalui Asisten Virtual Jaringan Online) adalah aplikasi pengaduan masyarakat berbasis digital dan chatbot WhatsApp yang diluncurkan oleh Pemkab Padang Pariaman untuk melaporkan keluhan, saran, atau informasi layanan publik secara cepat. Layanan ini dapat diakses melalui **WhatsApp: 0811 660 1112**.

- **Kekuatan**
  Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya beberapa kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, yaitu adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik menggunakan aplikasi SP4N Lapor. Layanan Sektor Publik Ke-1 adalah aplikasi E_ BPHTB mempermudah masyarakat untuk melakukan pembayaran dan memonitoring keweajiban pajak. Layanan Sektor Publik Ke-2 yaitu e-LIFE PADANG PARIAMAN adalah aplikasi yang bertujuan untuk pelaporan dan pencatatan proses kehidupan mulai dari lahir sampai meninggal, dalam implementasinya berkolaborasi dengan beberapa instansi. Layanan Sektor Publik Ke-3 adalah aplikasi "SIMPEL" (Sistem Informasi Perizinan Elektronik), merupakan aplikasi untuk memudahkan masyarakat mengurus perizinan secara online, dan Layanan Sektor Publik Ke-4 adalah "LAPOR AJO" (Layanan Aplikasi Pengaduan Rakyat melalui Asisten Virtual Jaringan Online) adalah aplikasi pengaduan masyarakat berbasis digital dan chatbot WhatsApp.
- **Kelemahan**
  Namun disisi lain, pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki dua kelemahan layanan publik berbasis

elektronik, yaitu: Layanan Data terbuka dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Data dukung yang disampaikan tidak terdapat bukti adanya fitur transaksi pada aplikasi yang digunakan untuk mendukung layanan tersebut.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pencapaian indikator ini, diperlukan upaya sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan baru yang mengatur secara rinci tentang layanan pusat data, pembangunan aplikasi, dan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai.
2. Melakukan sosialisasi intensif terkait kebijakan yang telah disusun agar dapat diimplementasikan di semua OPD.
3. Menyusun dokumen rencana strategis SPBE yang terintegrasi dengan RPJMD dan visi pembangunan daerah.
4. Menyelaraskan kebijakan SPBE dengan kebijakan nasional untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas penerapannya.
5. Membentuk tim khusus untuk mengawasi implementasi rencana strategis SPBE.
6. Menyusun SOP yang mendukung implementasi kebijakan, manajemen perubahan, pelaksanaan audit keamanan SPBE dan pengelolaan dan pembaruan data.
7. Meningkatkan kapasitas server dan infrastruktur pendukung lainnya untuk memastikan layanan SPBE berjalan stabil dan aman.
8. Melakukan audit berkala terhadap sistem teknologi informasi untuk memastikan keandalan layanan.
9. Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja tim koordinasi SPBE.
10. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan tentang manajemen risiko, keamanan informasi, dan manajemen data.
11. Mengintegrasikan sistem pengelolaan data berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi.

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan yang menungang pencapaian indikator kinerja “Indeks SPBE” Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.84
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Nilai Indeks SPBE Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2021-2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks SPBE	101,75%	97,36%	4,39%

Realisasi Indeks SPBE Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat impresif dengan capaian kinerja sebesar 101,75%, melampaui target yang ditetapkan. Capaian optimal tersebut didukung oleh penyerapan anggaran sebesar 97,36%, sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sumber daya sebesar 4,39%. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berhasil menerapkan

prinsip *value for money*, di mana target kinerja dapat dilampaui dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat dan tepat guna.

Sedangkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan RPJMD 2025-209 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.85
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Nilai Indeks SPBE Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Transformasi Digital Pelayanan Publik	Indeks SPBE	115,95%	97,36%	18,59%

Indikator Indeks SPBE pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat impresif dengan Capaian Kinerja mencapai 115,95%. Hal ini membuktikan bahwa implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik berjalan jauh lebih efektif dibandingkan ekspektasi yang ditetapkan dalam perencanaan.

Keberhasilan kinerja tersebut didukung oleh Penyerapan Anggaran sebesar 97,36%. Penggunaan anggaran yang terkontrol di bawah angka 100% namun mampu menghasilkan output di atas 115% menunjukkan bahwa program transformasi digital dikelola secara sangat cermat dan tepat sasaran.

Dari perbandingan antara hasil kerja dengan anggaran yang terserap, diperoleh nilai Tingkat Efisiensi sebesar 18,59%. Angka efisiensi yang cukup tinggi ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan penghematan sumber daya tanpa mengorbankan kualitas layanan digital, yang pada akhirnya memberikan nilai tambah bagi akuntabilitas kinerja daerah.

h) Penghargaan Yang Diraih

Gambar 3.33
Bupati Padang Pariaman menerima BAZNAS Award 2025 sebagai Kepala Daerah Pendukung Gerakan Zakat Indonesia serta Pengelolaan Informasi Publik terhadap Zakat di Kabupaten Padang Pariaman



***Sumber** : Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

SASARAN STRATEGIS 10

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh instansi pemerintah didasarkan pada mandat utama untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara secara adil dan berkelanjutan. Saat ini, narasinya bergeser dari sekadar pemenuhan administratif menjadi transformasi digital yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh instansi pemerintah wajib berfokus pada kebutuhan masyarakat dengan asas dan nilai utama pelayanan publik berlandaskan pada prinsip kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, akuntabilitas, dan profesionalisme. Sedangkan penyelenggara wajib bersikap ramah, jujur, transparan, dan tidak diskriminatif. Prinsip prima pada penyelenggaraan pelayanan harus sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Transformasi digital dan reformasi birokrasi terus digalakkan untuk menciptakan pelayanan yang cepat, tidak berbelit-belit, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat *(customer-focused)*.

Keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Padang Pariaman dilihat dari 2 indikator yaitu : Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

A. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan publik yang mencakup aspek kebijakan, SDM, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi, pengaduan, dan inovasi. Indeks Pelayanan Publik merupakan hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) KemenPANRB.

Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Daerah Tahun 2025, memperoleh nilai **4,58** kategori **"A"** atau **Sangat Baik**.

a) Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025

Tabel 3.86
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Interpretasi
Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,57	4,58	100,22	Sangat Berhasil

***Sumber** : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Berdasarkan Tabel diatas, pada tahun 2025 nilai indeks pelayanan publik Kabupaten Padang Pariaman sebesar 4,58 (Kategori Sangat Baik) dan terealisasi melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 4,57 sehingga mampu memperoleh capaian 100,22%. Hal ini memperlihatkan tingginya ekspektasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan masih diperlukan upaya peningkatan pada seluruh aspek pelayanan publik.

b) Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024 dan Tahun 2025

Perbandingan realisasi IKU "Indeks Pelayanan Publik" tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.87
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,57	3,88	93,87	4,57	4,58	100,22	Sangat Berhasil

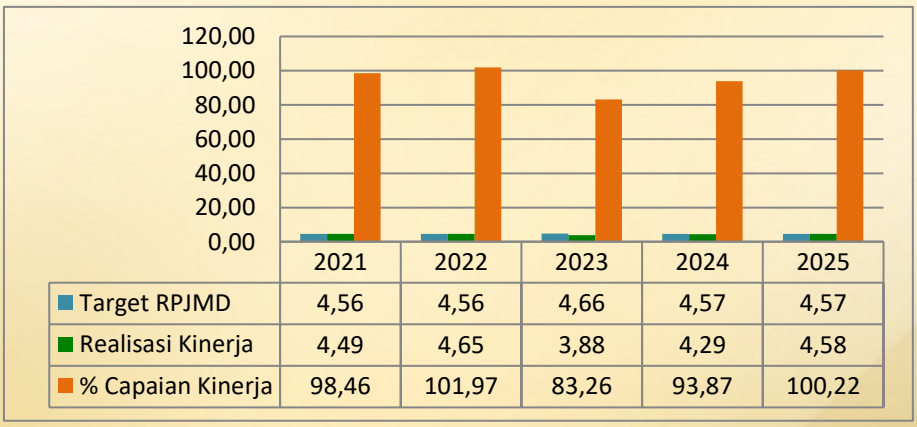
***Sumber** : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi nilai indeks pelayanan publik Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 sebesar 4,58 dan tahun 2024 sebesar 4,29. Jika dibandingkan, capaian kinerja pada tahun 2025 mengalami kenaikan 0,29 poin. Hal ini memperlihatkan bahwa terdapat peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik pada tahun 2025.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Berikut ini perbandingan realisasi capaian indikator kinerja utama "Indeks Pelayanan Publik " dengan Target pada RPJMD Tahun 2021-2025 :

Grafik 3.16
Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Indeks Pelayanan Publik Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Target RPJMD	4,56	4,56	4,66	4,57	4,57
Realisasi Kinerja	4,49	4,65	3,88	4,29	4,58
% Capaian Kinerja	98,46	101,97	83,26	93,87	100,22

Realisasi Indikator Kinerja "Indeks Pelayanan Publik" tahun 2025 jika dibandingkan dengan capaian-capaian tahun sebelumnya sangat baik dan meningkat lebih tinggi dibanding tahun 2024. Realisasi terbaik dicapai pada tahun 2022 dengan realisasi kinerja 4,65 (predikat Pelayanan Prima) dan persentase capaian kinerjanya melebihi target yaitu sebesar 101,97%. Secara keseluruhan, Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2025 rata-rata mencapai kinerja "Sangat Baik".

d) Perbandingan Capaian Realisasi IKU Kabupaten dan Provinsi Tahun 2025

Grafik 3.17
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik Kabupaten dan Provinsi Tahun 2025



Sumber : *Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Tabel 3.88
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2025

NO	KAB/KOTA	IPP KAB/KOTA	KATEGORI
1	KOTA PAYAKUMBUH	4,35	A-
2	KABUPATEN PESISIR SELATAN	N/A	N/A
3	KABUPATEN SOLOK	4,44	A-
4	KABUPATEN SIJUNJUNG	N/A	N/A
5	KOTA PARIAMAN	3,10	B-
6	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	4,58	A
7	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	4,21	A-
8	KABUPATEN TANAH DATAR	4,15	A-
9	KOTA PADANG PANJANG	4,47	A-
10	KABUPATEN PASAMAN	N/A	N/A
11	KOTA BUKITTINGGI	3,05	B-
12	KOTA SOLOK	2,93	C-
13	KABUPATEN SOLOK SELATAN	4,03	A-
14	KABUPATEN PASAMAN BARAT	N/A	N/A
15	KOTA PADANG	3,38	B-
16	KAB.KEPULAUAN MENTAWAI	N/A	N/A
17	KABUPATEN AGAM	3,78	B
18	KABUPATEN DHARMASRAYA	4,25	A-
19	KOTA SAWAHLUNTO	3,04	B-

Sumber : *Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Capaian realisasi Indikator Kinerja "Indeks Pelayanan Publik" Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 sebesar 4,58 adalah lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Provinsi Sumatera Barat sebesar 3,70. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, capaian realisasi Kabupaten Padang Pariaman berada pada posisi 1 (satu) atau peringkat pertama. Artinya, pelayanan publik di Kabupaten Padang Pariaman lebih baik dari rata-rata Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

e) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Untuk memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna layanan, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan, namun dalam pelaksanaan pelayanan publik tersebut terdapat beberapa faktor pendukung tercapainya target kinerja, antara lain sebagai berikut :

1. Koordinasi dan kolaborasi yang baik antara Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik (UKPP) dengan *stakeholders* dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Menjadikan hasil evaluasi dan rekomendasi KemenPANRB pada tahun sebelumnya sebagai salah satu patokan dalam perbaikan pelayanan.
3. Adanya monitoring, evaluasi dan pembinaan serta pendampingan terhadap UKPP yang menjadi lokus evaluasi.
4. Respon yang maksimal dari UKPP yang di evaluasi/yang dinilai, termasuk juga komitmen dari Kepala Dinas terkait/UKPP dalam mempersiapkan dokumen maupun sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan publik.

Dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan juga tidak terlepas dari hambatan dan masalah yang terjadi diantaranya adalah :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana layanan di UKPP.
2. Keterbatasan SDM dalam pelaksanaan pelayanan yang sesuai dengan kompetensi jabatan pada UKPP.
3. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan.

Adapun upaya yang dilakukan untuk peningkatan pelayanan publik kedepan adalah :

1. Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan publik.
3. Mengembangkan inovasi pelayanan publik dengan meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan publik.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam seluruh proses pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
5. Meningkatkan pengelolaan pengaduan sebagai umpan balik (*feedback)* untuk perbaikan pelayanan publik.
6. Meningkatkan transparasi dalam pengelolaan pelayanan publik.

f) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU

Untuk mencapai Indikator kinerja Nilai Indeks Pelayanan Publik tersebut Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan beberapa program/kegiatan/sub kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan tersebut diantaranya:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan anggaran sebesar Rp. 125.207.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 106.848.130,00 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 85,34%. Program ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan.
2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
   Anggaran pada Sub Kegiatan ini adalah Rp. 41.905.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 39.662.870,00 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 94,64%. Sub Kegiatan ini digunakan untuk monitoring dan evaluasi persiapan penyelenggaraan PEKPPP. Disamping itu, juga dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dan hasilnya menjadi salah satu acuan untuk perbaikan kualitas pelayanan publik yang tertuang sebagai janji perbaikan layanan pada UKPP.

Gambar 3.34
Pendampingan dan Evaluasi Internal PEKPPP



***Sumber** : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Gambar 3.35
Publikasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat



***Sumber** : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Selaras dengan Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah se Kabupaten Padang Pariaman bahwa Perangkat Daerah wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Perangkat Darah. Hal ini bertujuan agar penyelenggaraan pelayanan publik semakin meningkat dan berkualitas sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pada tahun 2025 Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan (UKPP) yang dilakukan survei sebanyak 11 (Sebelas) UKPP dengan landasan dasar pengukuran SKM sesuai PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks rata-rata SKM Padang Pariaman tahun 2025 adalah 85.86 dengan mutu pelayanan 'B' (baik).

g) Analisis Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.89
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	100,22%	94,68%%	5,54%

Pada capaian indikator ini, terdapat tingkat efisiensi sumber daya sebesar 5,54%. Angka ini hanya berasal dari efisiensi anggaran, tidak termasuk efisiensi kinerja karena realisasi kinerja melampaui target.

B. Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik

Upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan adanya penilaian dan sekaligus pengawasan dari Ombudsman Republik Indonesia terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota se-Indonesia dalam kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik. Penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik bertujuan untuk melihat kemampuan, melihat keberhasilan dan melihat kekurangan dalam proses pengembangan lembaga pelayanan publik agar semakin efektif, akuntabel dan transparan. Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik menjadi tolok ukur kualitas penyelenggaraan pelayanan publik suatu Daerah. Sebagai Unit Kerja Penyelenggaraan Pelayanan berkewajiban untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Ombudsman RI Nomor 26 Tahun 2026 tentang Hasil Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025. Berdasarkan surat keputusan tersebut, Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan nilai

70.79 dengan Opini Kualitas Sedang kategori (C). Unit Kerja yang menjadi lokus penilaian dalam penyelenggaraan Kepatuhan Pelayanan Publik adalah 3 (tiga) Unit Kerja yaitu : Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Masing-masing Unit Kerja Pelayanan mendapatkan Nilai Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik yang berbeda dengan Opini Kualitas Baik dan Opini Kualitas Sedang. Untuk Rumah sakit Umum Daerah Padang Pariaman mendapat nilai 79.78 dengan kualitas Opini Baik, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapat nilai 67.80 dengan kualitas Opini Cukup dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendapat nilai 64.75 dengan kualitas Opini Sedang.

a) Perbandingan Capaian Target dan Realisasi IKU Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025

Realisasi Indikator Kinerja Utama "Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik" tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.90
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Interpretasi
Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	Indeks	91	70,78	77,78	Berhasil

***Sumber** : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Sesuai dengan tabel diatas, realisasi Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik" sebesar 70,78 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk tahun 2025 capaian target realisasi hanya 77,78% dengan kategori "Berhasil".

b) Perbandingan Capaian Realisasi IKU Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 dan Tahun 2025

Perbandingan realisasi IKU "Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik" tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.91
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	Indeks	82,83	89,86	108,48	91	70.78	77.78	Berhasil

***Sumber** : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Dari tabel diatas dapat dilihat Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 mengalami penurunan yang cukup siginifikan sebesar 19.08 poin dimana realisasi 2025 dengan nilai 70.78 dan realisasi 2024 dengan nilai 89,86. Penurunan angka ini menyebabkan Indek Kepatuhan Padang pariaman yang pada tahun 2024 dengan Nilai Opini Kualitas Tertinggi (A) menjadi Nilai Opini dengan Kualitas Sedang (C) pada tahun 2025.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.92
Perbandingan Realisasi Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2021-2025 dengan Target RPJMD

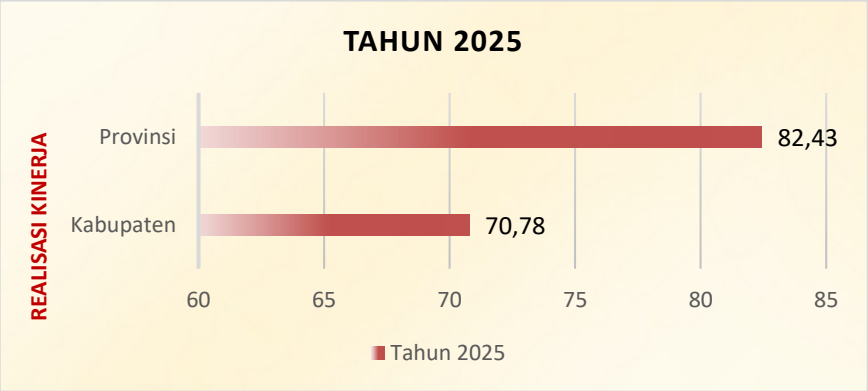
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	Indeks	N/A	N/A	N/A	82,83	91.0	75,31	78,2	81,23	89,86	70.78

Untuk Indikator kinerja Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik baru dipakai 2 (dua) tahun dalam mengukur sasaran "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik" di Kabupaten Padang Pariaman yaitu pada tahun 2024 dan tahun 2025. Oleh karena itu, tidak terdapat target kinerja Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang ditetapkan pada dokumen RPJMD untuk tahun 2021– 2023. Sehingga hanya dapat dianalisis berdasarkan realisasi kinerja dari tahun 2021-2025. Terjadi penurunan nilai Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang cukup signifikan pada tahun 2025. Pada tahun 2024 Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik mendapat nilai 89.86 dengan kategori Kulaitas Tinggi (A) namun pada tahun 2025 Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik memperoleh nilai sebesar 70,78 dengan kategori kualitas Pelayanan Sedang (C).

Dari tabel diatas, dapat dilihat Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik mengalami penurunan dari tahun 2024 ke tahun 2025, hal ini menggambarkan komitmen yang telah dibangun dan disepakati tidak berjalan sesuai kesepakatan dalam meningkatkan perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Padang Pariaman. Adanya efesiensi anggaran, juga sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan penyelenggaran pelayanan.

d) Perbandingan Capaian Realisasi IKU Provinsi dan Kabupaten Tahun 2025

Grafik 3.18
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik Kabupaten dan Provinsi Tahun 2025



Sumber : *Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Nilai Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 juga menagalami penurunan yang mana pada tahun 2024 dengan nilai 91.65 sedangkan pada tahun 2025 realisasi kinerjanya hanya mencapai 82.43 dengan kategori (B) Opini Kualitas Baik dengan Potensi Maladministrasi atau tingkat kepatuhan rendah. Sementara nilai Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Padang Pariaman realisasi kinerja hanya mencapai 70.78 dengan kategori (C) Opini Kualitas Sedang dan tingkat kepatuhan sedang.

e) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Kepatuhan dalam penyelenggaraan pelayanan bagi pengguna layanan, dapat di tunjang oleh empat faktor yang sangat memengaruhi pelayanan, dan faktor pendukung dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pada dimensi input, kompetensi SDM menjadi faktor penunjang utama dalam penyelenggaraan pelayanan. Secara keselurhan SDM pelaksana pelayanan sudah memahami tugas dan kewenanganSemua UKPP telah mempunyai standar pelayanan.
2. Pada dimensi proses: semua UKPP telah berupaya maksimal menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
3. Pada Dimensi Output : dalam menyelenggarakan pelayanan, UKPP menyadari arti penting menghindari maladministrasi penyelenggaraan pelayanan.
4. Adanya monitoring dan evaluasi serta pembinaan dalam penyelenggaraan pelayanan dan persiapan evaluasi kepatuhan.

Dalam penyelenggaraan kepatuhan terhadap pelayanan publik juga tidak terlepas dari hambatan dan masalah diantaranya adalah :

1. Pada dimensi input, keterbatasan anggaran untuk peremajaan sarana dan prasarana pelayanan publik.
2. Pada dimensi proses: masih kurangnya partisipasi publik dalam proses penetapan

dan pengawasan standar pelayanan.

3. Pada Dimensi Pengaduan: masih rendahnya kapasitas penyelenggara pelayanan dalam mengelola pengaduan sebagai bagian dari masukan pelanggan untuk perbaikan pelayanan publik.
4. Kompetensi SDM yang masih belum memadai terkait penyelenggaraan pelayanan mulai dari pimpinan unit penyelenggara sampai kepada staf penyelenggara pelayanan yang masih kurang memahami terhadap regulasi dan konsep pelayanan publik.
5. Belum semua produk layanan yang memiliki standar pelayanan.
6. Adanya efesiensi anggaran menjadikan salah satu faktor penghambat pelaksanaan pelayanan berjalan dengan baik.

f) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU

Penilaian sekaligus pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia menghasilkan Nilai Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan beberapa program/kegiatan/sub kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan tersebut salah satunya:

- Sub Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana

  Pada Sub Kegiatan ini pada tahun 2025 di anggarkan sebesar Rp. 13.462.000,00 dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 13.345.000,00 atau dengan persentase 99,13%. Anggaran dugunakan untuk pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan pelayanan publik ke Unit Kerja Pelayanan. Unit Kerja yang menjadi prioritas pembinaan adalah Unit Kerja yang menjadi Lokus penilaian kepatuhan standar pelayanan oleh Ombudsman RI setiap tahunnya dan Lokus yang menjadi pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik oleh Kementerian PANRB Republik Indonesia . Tahun 2024 hasil penilaian Kepatuhan penyelenggaraan pelayanan Padang Pariaman berada pada Zona Hijau dengan indeks kepatuhan rata-rata 89,86 dengan Opini Kepatuhan Kualitas Tertinggi.

Gambar 3.36
Monev dan Pembinaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik



Sumber : *Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Gambar 3.37
Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik



Sumber : *Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Nilai Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Padang Pariaman diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Pada Tahun 2025 Lokus Unit Penyelenggara Pelayanan yang dinilai adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian dan Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman. Untuk tahun 2025 dikarenakan penilaian dengan metode baru, maka Lokus Penilaian tahun 2025 hanya untuk 3 (tiga) lokus. Pada Tahun 2025 hasil dari penilaian Ombudsman bukan lagi berupa indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik akan tetapi hasilnya adalah Opini Ombudsman Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penilaian penyelenggaraan kepatuhan pelayanan publik terdiri dari 4 (empat) dimensi yaitu Dimensi Input, Dimensi Proses, Dimensi Output dan Dimensi Pengaduan serta di tambah dengan kepercayaan masyarakat dengan bobot nilai 30%. Untuk itu seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan wajib memenuhi seluruh unsur pada masing-masing Dimensi penilaian yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.93
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	77,78%	99,13%	-21,35%

Seperti yang terlihat pada tabel, bahwa tidak terjadi efesiensi pada Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dengan tidak tercapainya target kinerja maka terjadi minus pada tingkat efisiensi sumber daya. Target kinerja yang tidak tercapai disebabkan beberapa faktor penghambat yang ada pada internal Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan. Namun untuk kedepanya Tim pembinaan dan pemdamping penyelenggaraan pelayanan publik harus bekerja lebih maksimal dalam melakukan evaluasi, monitoring dan pembinaan, agar semua unsur terkait penyelenggaraan pelayanan pada Unit Penyelenggara bisa lebih baik dan lebih optimal.

SASASARAN STRATEGIS 11

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran Strategis "Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat" merupakan penjabaran dari Misi Kabupaten Padang Pariaman yang Ke-6 yakni "Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Dasar Dengan Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Kearifan Lokal Melalui Pemberdayaan Masyarakat". Indikator Kinerja Utama dari sasaran ini adalah "Angka Usia Harapan Hidup dan Prevalensi Stunting".

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini terlihat dari tetap digunakannya indikator Angka Usia Harapan Hidup dan Prevalensi Stunting dalam dua periode perencanaan berturut-turut, meskipun dibungkus dalam sasaran strategis dengan penekanan yang berbeda:

1. Periode 2021-2026: Fokus pada Derajat Kesehatan
   Pada periode ini, pembangunan kesehatan diarahkan pada sasaran strategis **"Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat"**.
2. Periode 2025-2029: Fokus pada Produktivitas Siklus Hidup
   Memasuki periode perencanaan terbaru, terdapat pergeseran paradigma menuju sasaran strategis yang lebih komprehensif, yaitu **"Tercapainya Masyarakat Sehat dan Produktif Sesuai Siklus Hidup"**.

A. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Usia (*Age Spesific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun–tahun sehingga dimungkinan dibuat tabel kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Usia Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program *Mortpak Lite*. Metode ini mengharuskan ketersediaan data jumlah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. *Metode Trussel* selama ini dianggap cukup moderat untuk menghitung Usia Harapan Hidup dibandingkan dengan metode lainnya.

Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Usia Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Berikut ini adalah perbandingan target dan capaian indikator kinerja Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman :

a) Perbandingan Target dan Realisasi Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Berdasarkan data dari Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2026, capaian UHH Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2025 yaitu 74,04. Capaian ini dapat dibandingkan dengan target tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.94
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2021-2026

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		Capaian (%)	Interpretasi
		Target	Realisasi		
Usia Harapan Hidup	Tahun	71	74,04	104,28	Sangat Berhasil

***Sumber** : Dinkes Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Dari tabel di atas dapat dilihat, Angka Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten padang Pariaman tahun 2025 sebesar 74,04 tahun telah melebihi target yang ditetapkan pada RPJMD 2021-2026 sebesar 71 tahun dengan kategori Sangat berhasil , artinya realisasi ini telah melampaui target danmembuktikan komitmen Kabupaten Padang Pariaman dalam mewujudkan visi RPJMD 2021-2026, khususnya dalam menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan produktif.

Tabel 3.95
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		Capaian (%)	Interpretasi
		Target	Realisasi		
Angka Harapan Hidup	Tahun	73,97	74,04	100,09	Sangat Berhasil

Pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD periode 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menetapkan target UHH sebesar 73,97 tahun. Berdasarkan data Padang Pariaman Dalam Angka, realisasi yang dicapai pada tahun 2025 adalah sebesar 74,04 tahun dengan persentase capaian sebesar 100,09%. Meskipun telah melampaui target, angka 74,04 tahun ini menjadi standar baru (*baseline*) yang menantang untuk tahun-tahun berikutnya. Diperlukan konsistensi dalam menjaga kualitas jaminan kesehatan masyarakat dan edukasi gaya hidup sehat agar tren peningkatan UHH terus terjaga.

b) Perbandingan Target dan Realisasi Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dan Tahun 2025

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi UHH pada tahun 2024 dengan Tahun 2025:

Tabel 3.96
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja UHH
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dan Tahun 2025
Berdasarkan RPJMD 2021-2026

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Usia Harapan Hidup	Tahun	69,90	70,10	100,29	73,97	74,04	100,09	Sangat Berhasil

***Sumber** : Dinkes Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja Usia Harapan Hidup tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi indikator UHH tahun 2024 yaitu sebesar 70,10 Artinya, harapan hidup penduduk Kabupaten Padang Pariaman bertambah 3,94 tahun dibandingkan dengan tahun 2024.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja Angka Harapan Hidup tahun 2024 dengan tahun 2025 berdasarkan RPJMD 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.97
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dan Tahun 2025
Berdasarkan RPJMD 2025-2029

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Angka Harapan Hidup	Tahun	69,90	70,10	100,29	73,97	74,04	100,09	Sangat Berhasil

***Sumber** : Dinkes Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

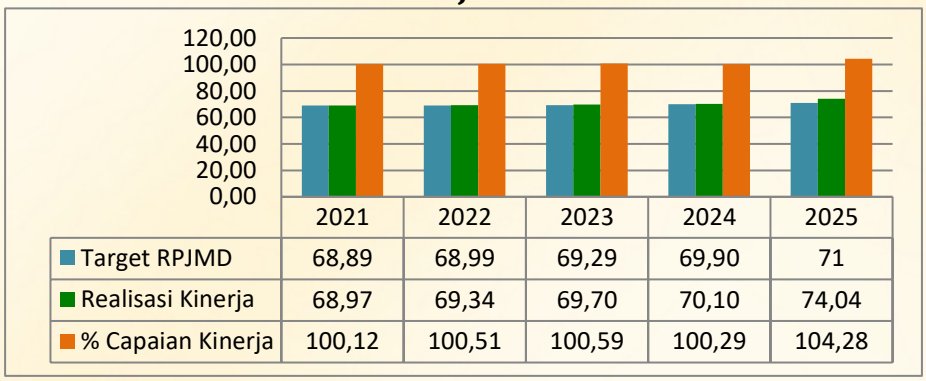
Pada tahun 2024, Angka Harapan Hidup ditargetkan sebesar 69,90 tahun. Realisasi yang dicapai melampaui ekspektasi dengan angka 70,10 tahun, sehingga menghasilkan persentase capaian kinerja sebesar 100,29%.Pada tahun 2025 target ditingkatkan secara signifikan menjadi 73,97 tahun. Pemerintah daerah berhasil menjawab tantangan tersebut dengan mencatatkan realisasi sebesar 74,04 tahun. Meskipun target jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya, persentase capaian kinerja tetap terjaga di level optimal, yakni sebesar 100,09%.

Konsistensi realisasi yang selalu berada di atas target (di atas 100%) menempatkan indikator ini pada kategori interpretasi "Sangat Berhasil". Hal ini mencerminkan efektivitas berbagai program intervensi kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan, sehingga mampu menjaga tren kenaikan usia harapan hidup penduduk.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi UHH pada tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 berdasarkan RPJMD 2021-2026 :

Grafik 3.19
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja UHH dengan Target Jangka Menengah Berdasarkan RPJMD 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Target RPJMD	68,89	68,99	69,29	69,90	71
Realisasi Kinerja	68,97	69,34	69,70	70,10	74,04
% Capaian Kinerja	100,12	100,51	100,59	100,29	104,28

***Sumber** : Dinkes Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Berdasarkan grafik diatas, realisasi kinerja selama lima tahun terakhir (2021–2025) jika dibandingkan dengan RPJMD 2021-2026, Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan tren pertumbuhan UHH yang sangat progresif. Dimana tahun 2021 realisasi tercatat sebesar 68,87 tahun, sangat tipis di bawah target 68,89 tahun. Hal ini dipengaruhi oleh dinamika pemulihan pasca-pandemi yang berdampak pada derajat 175esehatan 175eseha secara umum. Pada tahun 2022–2024 realisasi kinerja berhasil melampaui target secara konsisten. Pada tahun 2024, realisasi mencapai 70,10 tahun dari target 69,90 tahun, menunjukkan efektivitas program 175esehatan yang mulai stabil. Sedangkan tahun 2025 ini terjadi lonjakan signifikan di mana realisasi mencapai 74,04 tahun dari target 71,00 tahun. Ini menunjukkan surplus pencapaian sebesar 3,04 tahun dari perencanaan awal.

Sedangkan adalah perbandingan target dan realisasi UHH pada tahun 2025 berdasarkan RPJMD 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.98
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup dengan Target Jangka Menengah Berdasarkan RPJMD 2025-2029

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Angka Harapan Hidup	Tahun	73,97	74,07	74,17	74,27	74,37	74,04	-	-	-	-

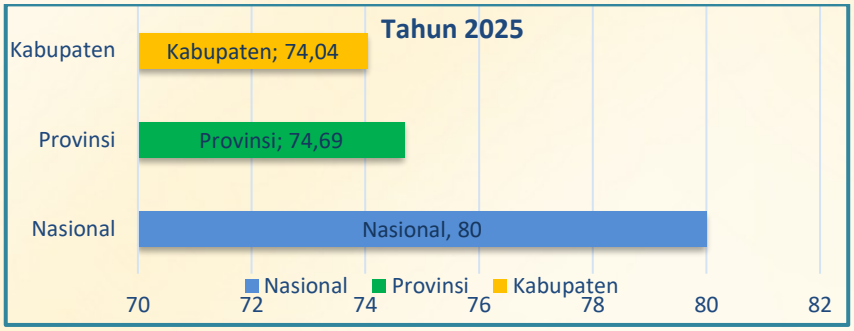
Pada tabel tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2025 terealisasi 74,04 tahun, melampaui target 73,97 tahun dengan capaian 100,09%. Hal ini mencerminkan perbaikan kondisi kesehatan masyarakat secara umum serta keberhasilan intervensi kesehatan yang berkelanjutan.Keberhasilan melampaui target di tahun pertama periode RPJMD ini memberikan sinyal optimisme bahwa target akhir di tahun 2029 sebesar 74,37 tahun sangat mungkin tercapai, bahkan berpotensi untuk dilampaui lebih awal. Realisasi ini

menjadi modalitas penting dalam mencapai target akhir periode 2029 dengan lebih optimis.

d) Perbandingan Realisasi IKU Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Tahun 2025

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Grafik 3.20
Perbandingan Realisasi Kinerja Usia Harapan Hidup Kabupaten dengan Provinsi dan Standar Nasional Tahun 2025



***Sumber** : Dinkes Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Pada grafik diatas sasaran "Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat", capaian indikator dibandingkan dengan standar menunjukkan hasil yang bervariasi. Angka Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 sebesar 74,04 tahun masih berada dibawah standar nasional yaitu 80 tahun dan juga dibawah realisasi provinsi sebesar 74,69 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat sudah mendekati standar yang ditetapkan, meskipun masih terdapat gap dengan standar nasional sekitar 5,96 tahun yang perlu dikejar melalui penguatan layanan kesehatan promotif dan preventif. Secara umum, indikator UHH menunjukkan posisi yang relatif baik.

e) Faktor Pendukung/Penghambat Pencapaian IKU Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Beberapa Faktor Pendukung dalam Pencapaian IKU Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, antara lain :

1. Adanya Upaya Pemerintah untuk mendorong pola hidup sehat secara masif melalui kegiatan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas;
2. Upaya dalam menurunkan kematian Ibu, Bayi dan Balita;
3. Peningkatan cakupan dan kualitas pencegahan penyakit;
4. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular;
5. Peningkatan cakupan masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan.

Beberapa faktor penghambat dalam Pencapaian IKU Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, antara lain :

1. Keterbatasan pemerataan akses pelayanan kesehatan;
2. Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) belum optimal;

3. Keterbatasan sumber daya kesehatan baik dari sisi tenaga maupun Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan (SPA) yang belum mencapai standar minimal 60% pada sebagian besar Puskesmas.

Berbagai upaya strategis telah dan akan terus dilakukan untuk mengatasi beberapa faktor penghambat yang masih dihadapi, diantaranya:

1. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Kematian Bayi
   Upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan bagian penting dari strategi peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang berdampak langsung terhadap peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH). Kedua indikator tersebut merefleksikan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, akses terhadap layanan kesehatan dasar, serta efektivitas upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
   Pada tahun 2025, Angka Kematian Ibu tercatat sebanyak 5 kasus, sedikit di atas target yang ditetapkan sebesar 4 kasus. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar intervensi kesehatan ibu telah berjalan, masih terdapat risiko dan tantangan tertentu, terutama pada kehamilan dengan komplikasi dan keterlambatan rujukan. Namun demikian, secara umum sistem pelayanan kesehatan ibu tetap berfungsi dengan baik dan mampu mencegah lonjakan angka kematian ibu. Sementara itu, Angka Kematian Bayi tercatat sebanyak 41 kasus, yang telah lebih baik dibandingkan target sebesar 44 kasus. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan berbagai program kesehatan bayi dan anak, seperti peningkatan cakupan persalinan di fasilitas kesehatan, pelayanan neonatal esensial, imunisasi dasar lengkap, pemantauan tumbuh kembang, serta perbaikan status gizi bayi dan balita. Meskipun target AKI belum sepenuhnya tercapai, kinerja pelayanan kesehatan secara keseluruhan tetap memberikan dampak positif terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini tercermin dari Usia Harapan Hidup yang meningkat menjadi 74,04 tahun, melampaui target yang ditetapkan sebesar 73,97 tahun, serta menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 70,10 tahun. Peningkatan UHH tersebut mengindikasikan bahwa secara agregat penduduk Kabupaten Padang Pariaman memiliki peluang hidup yang lebih panjang dan sehat.
   Berikut ini adalah kegiatan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dalam menurunkan AKI AKB:

Gambar 3.38
Pertemuan Verifikasi dan Analisis Data MPDN



***Sumber** : Dinkes Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

2. Penguatan Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
   Kegiatan promosi PHBS dilaksanakan melalui penyuluhan, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat di rumah tangga, sekolah, tempat kerja, dan fasilitas umum. Edukasi mengenai aktivitas fisik rutin, konsumsi buah dan sayur, tidak merokok, serta penggunaan jamban sehat berkontribusi dalam menurunkan risiko penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung, yang merupakan penyebab utama kematian pada usia dewasa dan lanjut usia. Penurunan risiko penyakit kronis tersebut berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan memperpanjang usia harapan hidup masyarakat.
3. Penguatan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
   Implementasi Germas dilakukan melalui kampanye aktivitas fisik, konsumsi gizi seimbang, pemeriksaan kesehatan berkala, serta pengendalian faktor risiko kesehatan di tingkat masyarakat. Germas mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju pola hidup sehat, sehingga menurunkan beban penyakit dan meningkatkan angka harapan hidup penduduk secara berkelanjutan.

Gambar 3.39
Pelaksanaan Aksi Bergizi di SMAN I Kayu Tanam



***Sumber** : Dinkes Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

4. Promosi Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi
   Upaya preventif melalui peningkatan akses air bersih, penggunaan jamban sehat, serta pengelolaan lingkungan yang sehat berkontribusi dalam menurunkan kejadian penyakit berbasis lingkungan, seperti diare dan penyakit kulit. Lingkungan yang sehat mendukung terciptanya kondisi hidup yang lebih aman dan nyaman, terutama bagi kelompok rentan, sehingga turut meningkatkan usia harapan hidup.

Gambar 3.40
Promosi Air Bersih ke Pengelola Depot Air Minum



***Sumber** : Dinkes Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

5. Peningkatan Layanan Kuratif dan Rehabilitatif
   Salah satu upaya dalam peningkatan layanan kuratif dan rehabilitatif adalah penyediaan sarana, prasarana, obat, dan alat kesehatan yang memadai.
   Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman secara berkelanjutan melakukan pemenuhan dan peningkatan sarana serta prasarana pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas rawat inap, dan jejaring pelayanan kesehatan lainnya. Upaya ini meliputi penyediaan bangunan yang layak, ruang pelayanan sesuai standar, serta fasilitas pendukung yang menunjang keselamatan dan kenyamanan pasien. Kondisi sarana dan prasarana yang memadai memungkinkan tenaga kesehatan memberikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif secara optimal.Pada tahun 2025, dilaksanakan 63 Unit pengadaan alat kesehatan untuk menunjang pelayanan kuratif.

Gambar 3.41
Pengadaan Alat Kesehatan Untuk Menunjang Pelayanan Kuratif



Sumber *: Dinkes Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

6. Pemerataan Pelayanan Kesehatan Hingga Wilayah Terpencil
   Dalam rangka meningkatkan Usia Harapan Hidup (UHH), Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan pemerataan pelayanan kesehatan hingga ke wilayah terpencil dan sulit dijangkau melalui berbagai inovasi pelayanan. Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah penyelenggaraan pelayanan PAPA SEHAT (Padang Pariaman Sehat) yang menjangkau nagari dan korong dengan keterbatasan akses transportasi serta jarak yang jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan.
7. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
   Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular merupakan upaya strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menekan angka kesakitan serta kematian. Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan pendekatan terpadu melalui Cek Kesehatan Gratis dan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas sebagai bagian dari penguatan layanan promotif dan preventif yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis difokuskan pada deteksi dini faktor risiko dan kasus penyakit sejak tahap awal. Kegiatan ini mencakup skrining penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes melitus, gangguan metabolik, serta pemantauan status gizi, sekaligus menjadi pintu masuk dalam pengendalian penyakit menular melalui identifikasi gejala awal dan rujukan cepat. Deteksi dini memungkinkan penanganan dilakukan lebih cepat, mencegah komplikasi, serta mengurangi risiko kematian dini akibat penyakit yang tidak tertangani.

Gambar 3.42
Cek Kesehatan Gratis di IKK Kab Padang Pariaman



***Sumber** : Dinkes Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Gambar 3.43
Pengendalian Penyakit Prioritas di Puskesmas Koto Bangko



***Sumber** : Dinkes Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

8. Imunisasi Dasar Lengkap
   Imunisasi dasar lengkap merupakan salah satu intervensi utama Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan bayi dan balita sebagai fondasi peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH). Melalui pemberian imunisasi dasar, anak-anak terlindungi dari berbagai penyakit menular yang berisiko menimbulkan kesakitan, kecacatan, hingga kematian pada usia dini.

Gambar 3.44
Imunisasi Dasar Lengkap



***Sumber** : Dinkes Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

f) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Capaian IKU Usia Harapan Hidup Tahun 2025

Secara umum, penggunaan anggaran Tahun 2025 dapat dikategorikan efisien dan terkendali, dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program.

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua Usia Harapan Hidup adalah sebanyak 5 program adapun pencapaian masing – masing program adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 97.761.623.767- dan realisasi keuangan mencapai Rp 93.783.200.718,-. atau sekitar 95.93% Terdapat efisiensi dari anggaran yang sudah di alokasikan untuk kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman sebesar 4.07% , yang termasuk dalam program ini adalah kegiatan :
   a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
   e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera
   f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
   Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 48.497.959.114,99 dan realisasi keuangan mencapai Rp 44.053.064.741,- atau sekitar 90.83 % , terdapat efisiensi dari anggaran yang sudah di alokasikan untuk kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman sebesar 9,17 % yang termasuk dalam program ini adalah kegiatan :
   - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
   - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
   - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
   Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.101.525.600,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 1.262.412.600,- atau sekitar 60.07% , terdapat efisiensi dari anggaran yang sudah di alokasikan untuk kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman sebesar 39.93% , yang termasuk dalam program ini adalah kegiatan :
   a) Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
   b) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
   c) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 474.341.000,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 183.131.174,- berarti realisasi keuangan 38.61 % , terdapat efisiensi dari anggaran yang sudah di alokasikan untuk kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman sebesar 61.39% yang termasuk dalam program ini adalah kegiatan :

a) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
b) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
c) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
d) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 341.290.000,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 324.751.444,- atau sekitar 95.15 % , terdapat efisiensi dari anggaran yang sudah di alokasikan untuk kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman sebesar 4.85% , yang termasuk dalam program ini adalah kegiatan :

a) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
b) Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
c) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Secara keseluruhan, total pagu anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian Usia Harapan Hidup melalui lima program strategis di Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman adalah sebesar Rp 149.176.739.482 (Seratus empat puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah). Dari total alokasi tersebut, realisasi keuangan yang berhasil dicapai adalah sebesar Rp 139.606.560.677. Dengan demikian, total persentase penyerapan anggaran secara kolektif mencapai 93,58%.

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.99
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2021-2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	100,09%	93,58%	6,11%

Berdasarkan data capaian kinerja pada sasaran "Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat", indikator Angka Usia Harapan Hidup pada tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat memuaskan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100,09%. Keberhasilan melampaui target ini dicapai dengan dukungan penyerapan anggaran yang terkendali, yakni sebesar 93,58%. Hal ini mencerminkan adanya sinergi yang efektif antara perencanaan program kesehatan dengan pemanfaatan sumber daya keuangan yang tersedia di lapangan.

Lebih lanjut mengenai hubungan antara output kinerja dan input anggaran menghasilkan nilai Tingkat Efisiensi sebesar 6,11%. Angka positif ini membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Kesehatan berhasil mengoptimalkan program-program kesehatan untuk meningkatkan usia harapan hidup masyarakat secara melampaui target, namun dengan biaya yang lebih rendah dari pagu anggaran yang dialokasikan. Efisiensi sebesar 6,11% ini menunjukkan manajemen anggaran yang akuntabel, di mana setiap rupiah yang dikeluarkan mampu memberikan dampak nyata yang maksimal terhadap derajat kesehatan masyarakat.

Adapun Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya indikator kinerja Angka Harapan Hidup berdasarkan RPJMD 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.100
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Angka Harapan Hidup Tahun 2025
Berdasarkan RPJMD 2025-2029

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Tercapainya Masyarakat Sehat dan Produktif Sesuai Siklus Hidup	Angka Harapan Hidup	104,28%	93,58%	10,7%

Tingkat efisiensi sebesar 10,7% ini menegaskan bahwa perangkat daerah mampu melakukan penghematan anggaran tanpa mengurangi kualitas hasil. Hal ini membuktikan adanya tata kelola anggaran yang akuntabel, di mana setiap rupiah yang dikeluarkan mampu memberikan dampak nyata yang maksimal terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya dalam memperpanjang usia harapan hidup penduduk.

B. Prevalensi Stunting

Upaya perbaikan gizi masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, antara lain melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan gizi serta kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029, menyatakan bahwa arah kebijakan pembangunan bidang Kesehatan adalah meningkatkan pelayanan Kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar *(primary health care)* dengan mendorong peningkatan upaya promotive dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi, yang dicapai melalui 5 (lima) strategi, yaitu: Peningkatan Kesehatan ibu, anak, KB dan Kesehatan reproduksi, 2) Percepatan perbaikan gizi masyarakat, 3) Peningkatan pengendalian penyakit, 4) Pemberdayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), dan 5) Penguatan system Kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.

Selain itu, salah satu komponen IMM (Indeks Modal Manusia) dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 adalah Prevalensi Stunting. IMM adalah metode ukur yang merefleksikan potensi SDM terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan keterjangkauan akses dan kualitas pembangunan yang terjadi selama proses tumbuh kembang manusia. Berdasarkan hasil survey SSGI tahun 2024, prevalensi Stunting di Kabupaten Padang Pariaman adalah 26,6 %. Angka ini masih dipakai untuk prevalensi stunting tahun 2025 karena survey SSGI hanya dilakukan sekali 2 tahun.

Berikut ini adalah perbandingan target dan capaian indikator kinerja Prevalensi Stunting Kabupaten Padang Pariaman :

a) Perbandingan Target dan Realisasi Prevalensi Stunting Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Prevalensi Stunting Kabupaten Padang Pariaman Berdasarkan RPJMD 2021-2026 :

Tabel 3.101
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Prevalensi Stunting Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2021-2026

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		Capaian (%)	Interpretasi
		Target	Realisasi		
Prevalensi Stunting	%	14	26,6*	10*	Kurang Berhasil

***Sumber** : SSGI (2024)*

Berdasarkan tabel diatas, angka realisasi yang disajikan sebesar 26,6% masih menggunakan data hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024. Penggunaan data ini merupakan upaya paling objektif dalam menggambarkan kondisi eksisting di lapangan, mengingat data resmi untuk periode 2025 belum dirilis. Target yang ditetapkan untuk tahun 2025 adalah sebesar 14% sehingga indikator ini dikategorikan "Kurang Berhasil". Dengan realisasi di angka 26,6%, terdapat selisih sebesar 12,6%. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa tantangan dalam menekan angka stunting di Kabupaten Padang Pariaman realisasi kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program-program pencegahan stunting telah berjalan, akselerasi penurunannya belum mencapai laju yang diharapkan untuk memenuhi target jangka menengah daerah.

Adapun realisasi indikator kinerja Prevalensi Stunting tahun 2025 berdasarkan RPJMD 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.102
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Prevalensi Stunting Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		Capaian (%)	Interpretasi
		Target	Realisasi		
Prevalensi Stunting	%	23,90	26,6*	88,70	Berhasil

***Sumber** : SSGI (2024)*

Berdasarkan tabel diatas, prevalensi stunting di Kabupaten Padang Pariaman sebesar 26,6% dari target yang ditetapkan sebesar 23,90% dengan capaian 88,70% atau interpretasi “Berhasil.

b) Perbandingan Target dan Realisasi Prevalensi Stunting Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dan Tahun 2025

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi Prevalensi Stunting pada tahun 2024 dengan Tahun 2025:

Tabel 3.103
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Prevalensi Stunting Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dan Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2021-2026

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Prevalensi Stunting	%	14	26,6	10	14	26,6*	10*	Kurang Berhasil

***Sumber** : SSGI, 2024*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Prevalensi Stunting tahun 2024 adalah 26,6% dari target 14 % dengan persentase capaian kinerja 52,63. Bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja Prevalensi Stunting tahun 2025 berdasarkan target pada RPJMD 2021-2026 diperoleh capaian kinerja sebesar 10% dimana masih menggunakan capaian tahun 2024 dengan interpretasi "Kurang Berhasil".

Sedangkan untuk melihat perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Prevalensi Stunting Tahun 2024 dan 2025 berdasarkan RPJMD 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.104
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Prevalensi Stunting Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dan Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Prevalensi Stunting	%	14	26,6	10	23,90	26,6*	88,70	Berhasil

***Sumber** : SSGI, 2024*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Prevalensi Stunting tahun 2024 adalah 26,6% dari target 14 % dengan persentase capaian kinerja 52,63. Bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja Prevalensi Stunting tahun 2025 yang masih menggunakan capaian tahun 2024 yaitu sebesar 26,6% (SSGI dilakukan sekali 2 tahun, sehingga angka capaian dipakai untuk capaian 2 tahun yang berdampingan) dari target 23,90% diperoleh persentase capaian kinerja 88,70% dengan interpretasi "Berhasil".)

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi Prevalensi Stunting pada tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025:

Tabel 3.105
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Prevalensi Stunting dengan Target Jangka Menengah Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Prevalensi Stunting	%	21,1	18,4	16	14	14	28,3	25	19,4	26,6	26,6*

***Sumber** : Dinkes Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025*

Realisasi Indikator Kinerja "Prevalensi Stunting" pada tahun 2021 sampai dengan 2023 angka prevalensi stunting semakin menurun. Hal ini memperlihatkan bahwa kinerja untuk penurunan prevalensi stunting selalu meningkat.

Sedangkan untuk melihat perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah periode 2025-2029 diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.106
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Prevalensi Stunting Tahun 2025
dengan Target Jangka Menengah Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Prevalensi Stunting	%	23,90	22,65	21,40	20,15	18,90	26,6*	-	-	-	-

***Sumber** : Dinkes Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025*

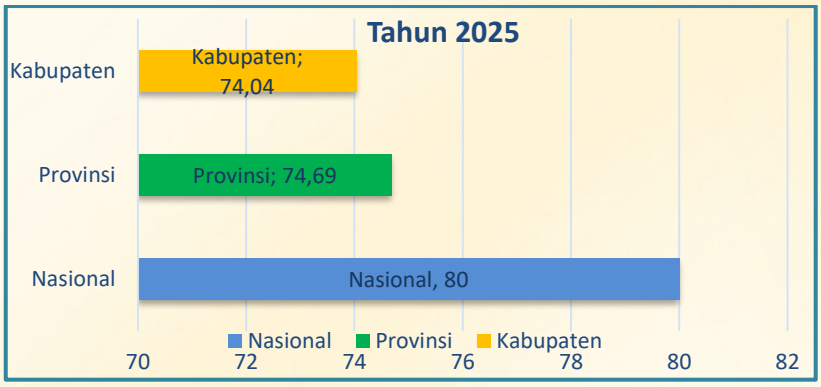
Pada periode 2025-2029, pemerintah daerah menetapkan target penurunan prevalensi stunting secara bertahap, yang dimulai dari 23,90% pada tahun 2025 dan diproyeksikan menurun hingga 18,90% pada akhir periode di tahun 2029. Penetapan ini menunjukkan komitmen daerah untuk terus menekan angka stunting secara berkelanjutan. Realisasi kinerja pada awal periode ini tercatat sebesar 26,6%. Angka ini masih menggunakan data tahun 2024 sebagai referensi capaian terkini. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yang sebesar 23,90%, maka terdapat selisih sebesar 2,7%.

Adanya selisih antara realisasi data 2024 dengan target 2025 ini memberikan gambaran objektif mengenai besarnya upaya yang harus dilakukan pada tahun berjalan. Capaian 26,6% ini menjadi *baseline* bagi perangkat daerah untuk melakukan akselerasi program agar target 23,90% di akhir tahun 2025 dapat tercapai secara maksimal.

d) Perbandingan Realisasi IKU Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Tahun 2025

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Grafik 3.21
Perbandingan Realisasi Kinerja Prevalensi Stunting Kabupaten dengan Provinsi dan Standar Nasional Tahun 2025



***Sumber** : Dinkes Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Pada grafik diatas sasaran "Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat", capaian indikator dibandingkan dengan standar menunjukkan hasil yang bervariasi. Angka Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 sebesar 74,04 tahun masih berada dibawah standar nasional yaitu 80 tahun dan juga dibawah realisasi provinsi sebesar 74,69 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat sudah mendekati standar yang ditetapkan, meskipun masih terdapat gap dengan standar nasional sekitar 5,96 tahun yang perlu dikejar melalui penguatan layanan kesehatan promotif dan preventif. Secara umum, indikator UHH menunjukkan posisi yang relatif baik.

e) Faktor Pendukung/Penghambat Pencapaian IKU Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

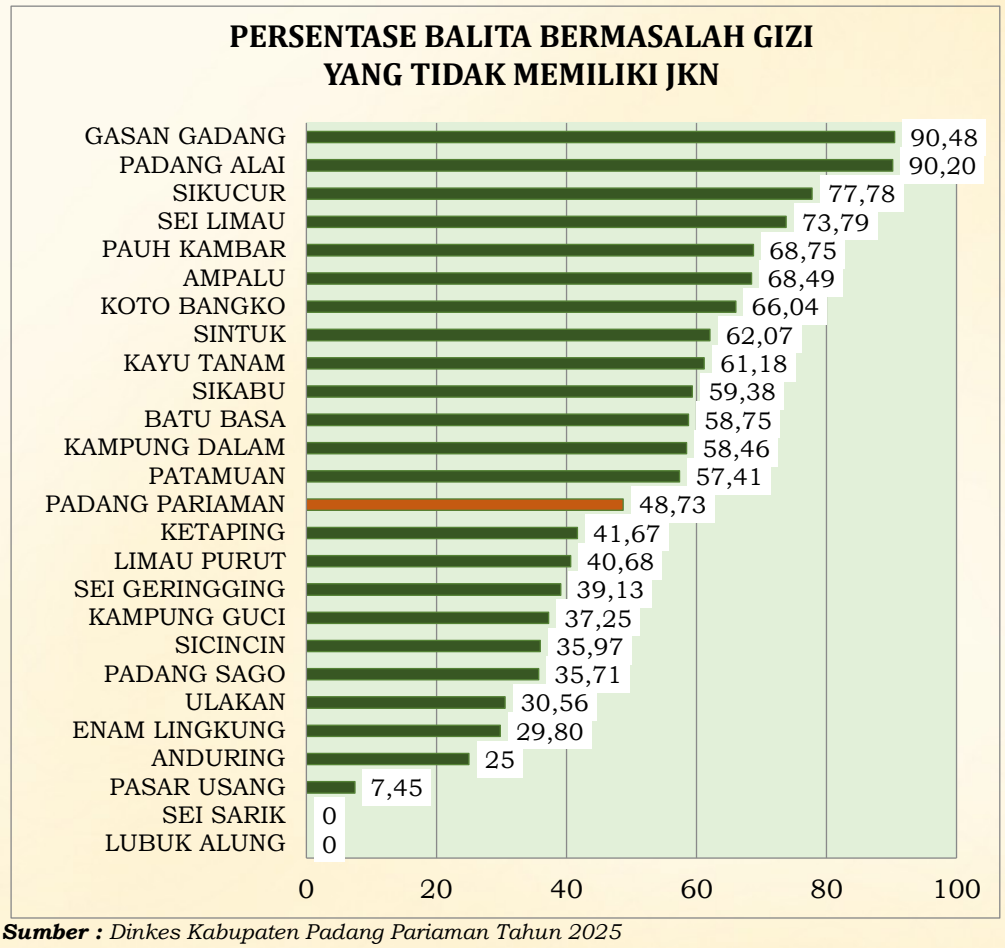
Beberapa Faktor Pendukung dalam Pencapaian Penurunan Prevalensi Stunting Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, antara lain :

1. Adanya komitmen yang kuat oleh kepala daerah (kepemimpinan) kepada semua sektor yang di implementasikan dalam Aksi Konvergensi Stunting
2. Sinergitas Program Penurunan Stunting oleh Lintas Sektor (OPD)
3. Penguatan Kader Posyandu
4. Alokasi anggaran Khusus Dana Desa dalam program Kesehatan dan Penurunan Stunting
5. Akses Air Bersih dan Jamban Sehat
6. Ketersediaan dan Validitas Data sasaran program Prioritas Penurunan stunting
7. Kemitraan Swasta (CSR) dalam Intervensi Penurunan Stunting

Beberapa faktor penghambat dalam Pencapaian Penurunan Pevalensi Stunting Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, antara lain :

1. Tidak memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/BPJS
   Berikut adalah Grafik Persentase balita bermasalah gizi yang tidak memiliki JKN di Kabupaten Padang Pariaman :

Grafik 3.22
Persentase Balita Bermasalah Gizi Yang Tidak Memiliki JKN



Sumber : *Dinkes Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025*

Pada grafik diatas dapat disimpulkan bahwa dari 2.237 balita bermasalah gizi yang direcall, sebagian besar balita yang bermasalah gizi belum memiliki JKN di Kabupaten Padang Pariaman yaitu sekitar 48,73%. Puskesmas tertinggi dengan balita bermasalah gizi yang tidak memiliki JKN adalah Puskesmas Gasan Gadang yaitu dari 105 balita yang direcall diketahui 95 balita tidak memiliki JKN/BPJS (90,48%). Balita bermasalah gizi yang tidak memiliki JKN diatas 50% ada sebanyak 13 Puskesmas di Kab. Padang Pariaman. Puskesmas belum melaporkan faktor determinan penyebab masalah gizi yaitu Puskesmas Lubuk Alung dan Puskesmas Sungai Sariak.

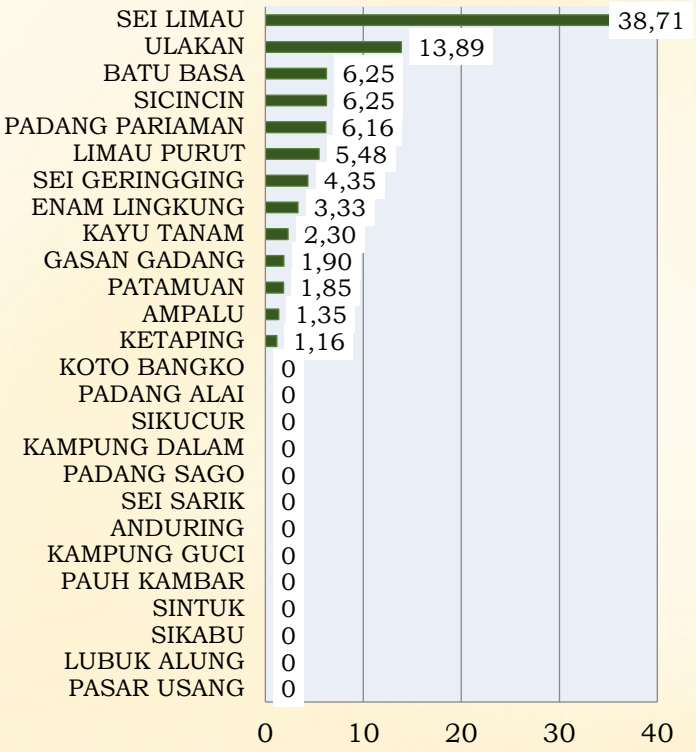
2. Sumber Air Bersih Terbatas

   Balita yang hidup di lingkungan dengan akses air bersih yang terbatas lebih rentan mengalami penyakit infeksi seperti diare, cacingan, dan infeksi saluran pencernaan. Penyakit-penyakit tersebut dapat menyebabkan gangguan penyerapan zat gizi, kehilangan cairan dan elektrolit, serta penurunan nafsu makan sehingga berkontribusi pada munculnya masalah gizi seperti wasting, gizi kurang, dan stunting. Kondisi ini menunjukkan bahwa kecukupan gizi bukan

hanya bergantung pada makanan yang dikonsumsi, tetapi juga pada kemampuan tubuh untuk mencernakan dan menyerap nutrisi yang masuk.

Berikut adalah Grafik Persentase balita bermasalah gizi yang tidak memiliki Akses Air Bersih di Kabupaten Padang Pariaman :

Grafik 3.23
Persentase Balita Bermasalah Gizi Yang Tidak Akses Air Bersih



Sumber : *Dinkes Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025*

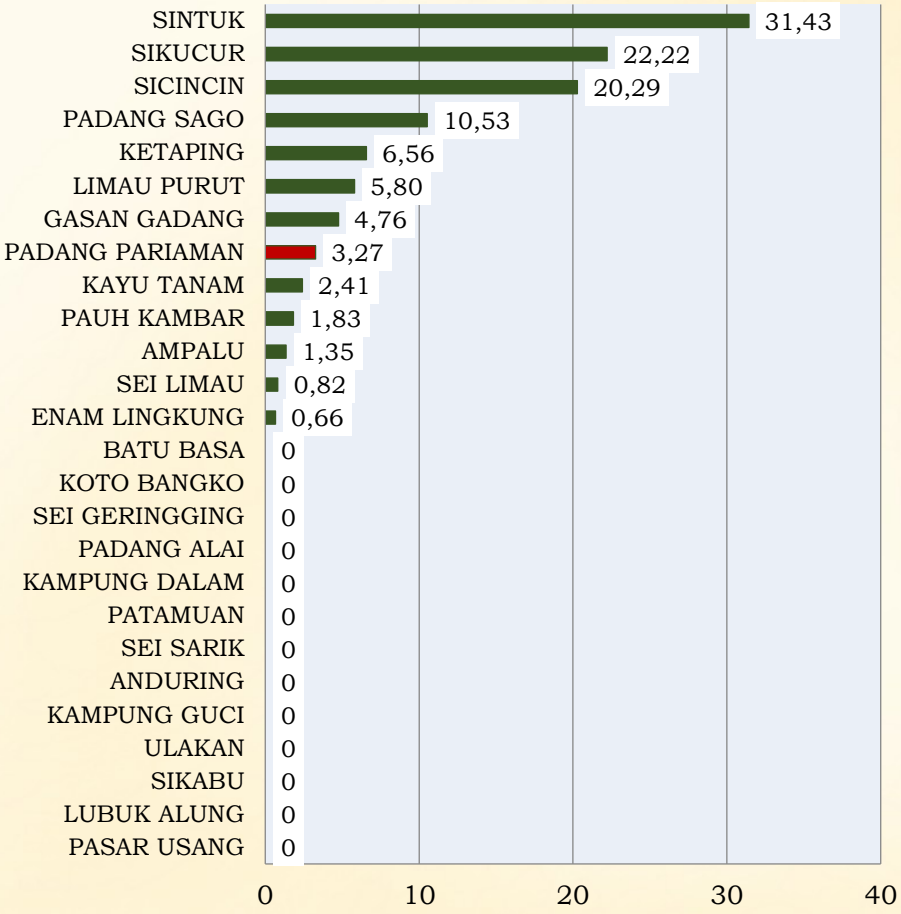
Pada grafik diatas dapat disimpulkan bahwa dari 2.290 balita bermasalah gizi yang direcall, masih ada sekitar 141 (6,16%) keluarga balita bermasalah gizi yang belum memiliki akses air bersih di Kabupaten Padang Pariaman. Puskesmas yang tertinggi belum mendapat akses air bersih adalah Puskesmas Sungai Limau yaitu sekitar 96 KK (38,71%). Puskesmas yang belum melaporkan faktor determinan penyebab masalah gizi yaitu Puskesmas Lubuk Alung dan Puskesmas Sungai Sariak.

3. Kecacingan

Infeksi kecacingan memiliki hubungan yang erat dengan status gizi karena parasit cacing hidup di saluran pencernaan dan memanfaatkan nutrisi dari tubuh inangnya. Pada anak yang mengalami kecacingan, nutrisi seperti protein, zat besi, vitamin A, dan mikronutrien penting lainnya tidak sepenuhnya diserap tubuh karena sebagian digunakan oleh cacing.

Berikut adalah Grafik Persentase balita bermasalah gizi yang *suspect* kecacingan di Kabupaten Padang Pariaman:

Grafik 3.24
Persentase Balita Bermasalah Gizi Yang Suspect Kecacingan



Sumber : *Dinkes Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025*

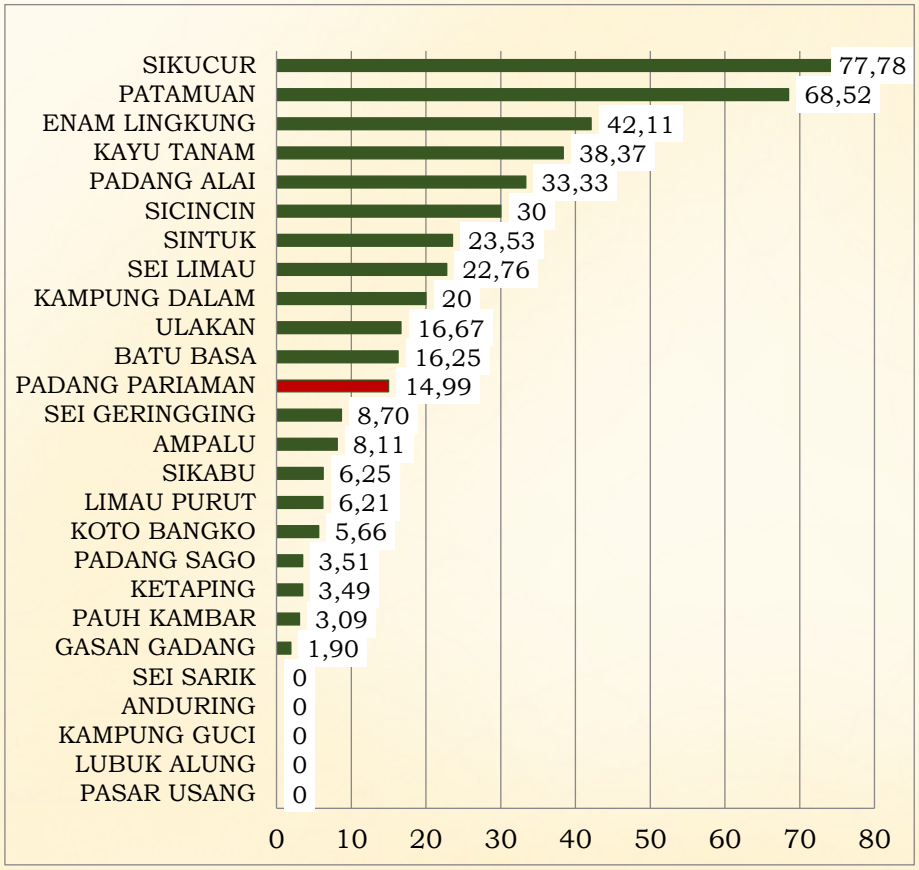
Pada grafik diatas dapat disimpulkan bahwa dari 2.202 balita bermasalah gizi yang direcall, masih ada sekitar 72 balita (3,27%) keluarga balita bermasalah gizi ditemukan suspect kecacingan. Puskesmas yang tertinggi ditemukan suspect kecacingan adalah Puskesmas Sintuk yaitu sekitar 11 balita (31,4%) balita bermasalah gizi diduga mengalami kecacingan.

4. Akses Jamban Sehat

Akses terhadap jamban sehat memiliki hubungan yang signifikan dengan status gizi balita karena fasilitas sanitasi yang memadai berperan penting dalam mencegah penularan penyakit infeksi, terutama diare dan kecacingan. Balita yang tinggal di lingkungan tanpa jamban sehat atau masih melakukan praktik buang air besar sembarangan (BABS) lebih rentan terpapar bakteri, virus, dan parasit dari lingkungan yang terkontaminasi. Infeksi diare dan kecacingan menyebabkan gangguan penyerapan zat gizi, kehilangan cairan, peningkatan kebutuhan metabolik, serta menurunnya nafsu makan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan masalah gizi seperti wasting, gizi kurang, dan stunting.

Berikut adalah Grafik Persentase balita bermasalah gizi yang tidak memiliki Akses Jamban Sehat di Kabupaten Padang Pariaman :

Grafik 3.25
Persentase Balita Bermasalah Gizi Yang Suspect Kecacingan



Sumber : *Dinkes Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025*

Pada grafik diatas dapat disimpulkan bahwa dari 2.281 balita bermasalah gizi yang direcall, masih ada sekitar 342 balita (14,99%) keluarga balita yang belum memiliki akses jamban sehat. Rata-rata keluarga balita bermasalah gizi yang tidak memiliki akses jamban sehat masih menggunakan sistem pembuangan ke Kolom. Puskesmas yang tertinggi yang masih menggunakan sistem pembuangan yang tidak sehat adalah Puskesmas Sikucur (77,8%). Puskesmas yang belum melaporkan faktor determinan penyebab masalah gizi yaitu Puskesmas Lubuk Alung dan Puskesmas Sungai Sariak.

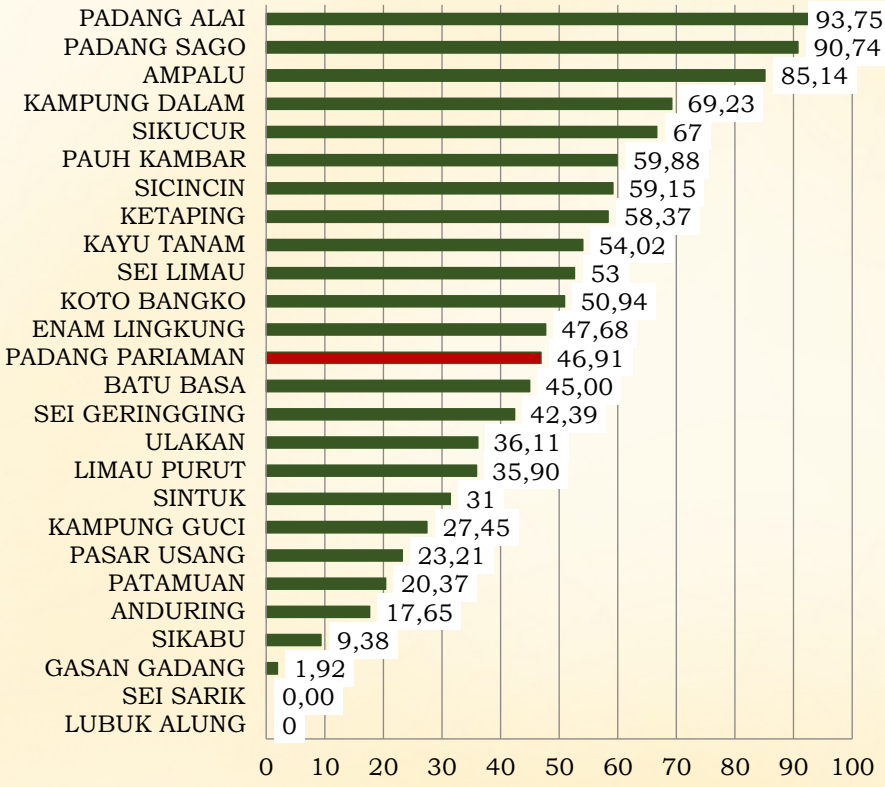
5. Imunisasi

Imunisasi memiliki peranan penting dalam menentukan status gizi balita karena imunisasi berfungsi melindungi anak dari berbagai penyakit infeksi yang dapat menghambat proses tumbuh kembang. Penyakit infeksi dapat menurunkan nafsu makan, mengganggu penyerapan nutrisi, meningkatkan kebutuhan energi, dan menyebabkan proses katabolisme tubuh meningkat. Kondisi ini dapat

menyebabkan balita mudah mengalami gizi kurang, wasting, dan dalam jangka panjang dapat berkontribusi pada stunting.

Berikut adalah Grafik Persentase balita bermasalah gizi yang tidak imunisasi lengkap di Kabupaten Padang Pariaman :

Grafik 3.26
Persentase Balita Bermasalah Gizi Yang Tidak Imunisasi



Sumber : *Dinkes Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025*

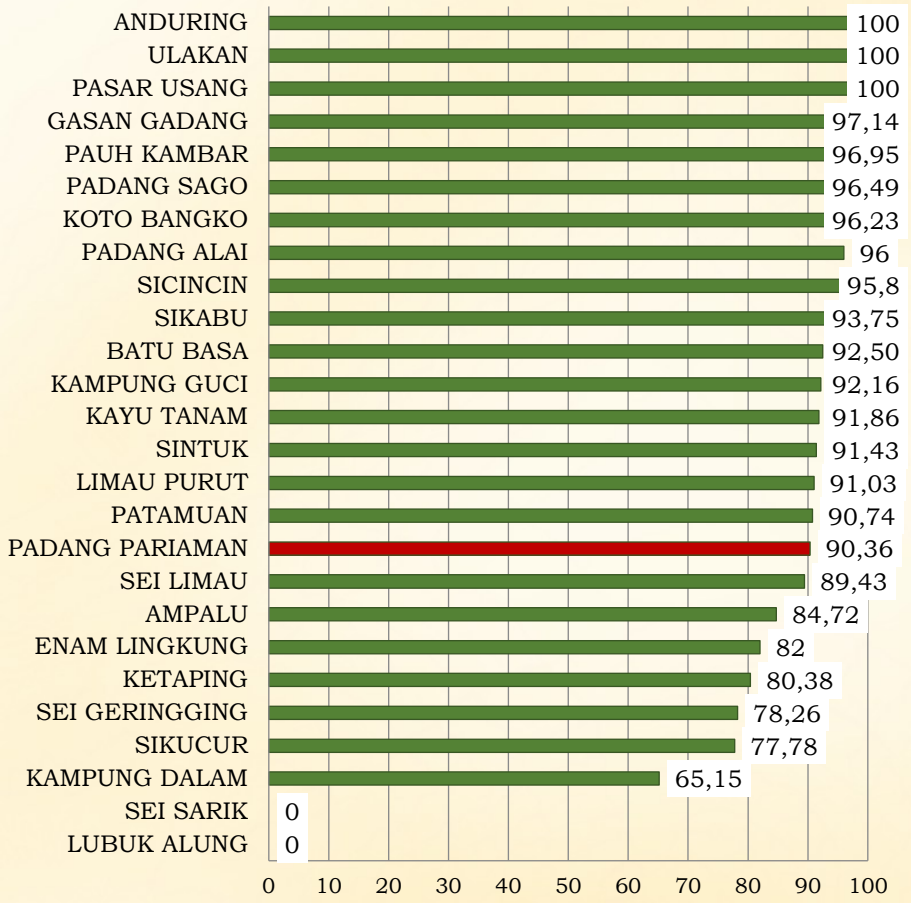
Pada grafik diatas dapat disimpulkan bahwa dari 2.247 balita bermasalah gizi yang direcall, Terdapat 1054 (46,91%) balita yang tidak di Imunisasi lengkap. Puskesmas tertinggi dengan balita yang tidak imunisasi lengkap adalah Puskesmas Padang Alai (93,75%). Ada 11 Puskesmas di Dinas Kesehatan Kab. Padang Pariaman yang tidak di Imunisasi lengkap. Puskesmas yang belum melaporkan faktor determinan penyebab masalah gizi yaitu Puskesmas Lubuk Alung dan Puskesmas Sungai Sariak.

6. Keluarga Merokok

Kebiasaan merokok dalam keluarga memiliki hubungan yang signifikan dengan status gizi balita karena paparan asap rokok dapat memengaruhi kesehatan, nafsu makan, serta proses pertumbuhan anak. Balita yang tinggal serumah dengan perokok rentan terpapar asap rokok atau *secondhand smoke*, yang mengandung berbagai zat kimia berbahaya seperti karbon monoksida, nikotin, dan tar.

Berikut adalah Grafik Persentase balita bermasalah dengan keluarga merokok di Kabupaten Padang Pariaman :

Grafik 3.27
Persentase Balita Bermasalah Gizi Dengan Keluarga Merokok



Sumber : *Dinkes Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025*

Pada grafik diatas dapat disimpulkan bahwa dari 2.283 balita bermasalah gizi yang direcall, hampir sebagian besar balita bermasalah gizi berasal dari keluarga dengan kebiasaan merokok. Puskesmas yang belum melaporkan faktor determinan penyebab masalah gizi yaitu Puskesmas Lubuk Alung dan Puskesmas Sungai Sariak.

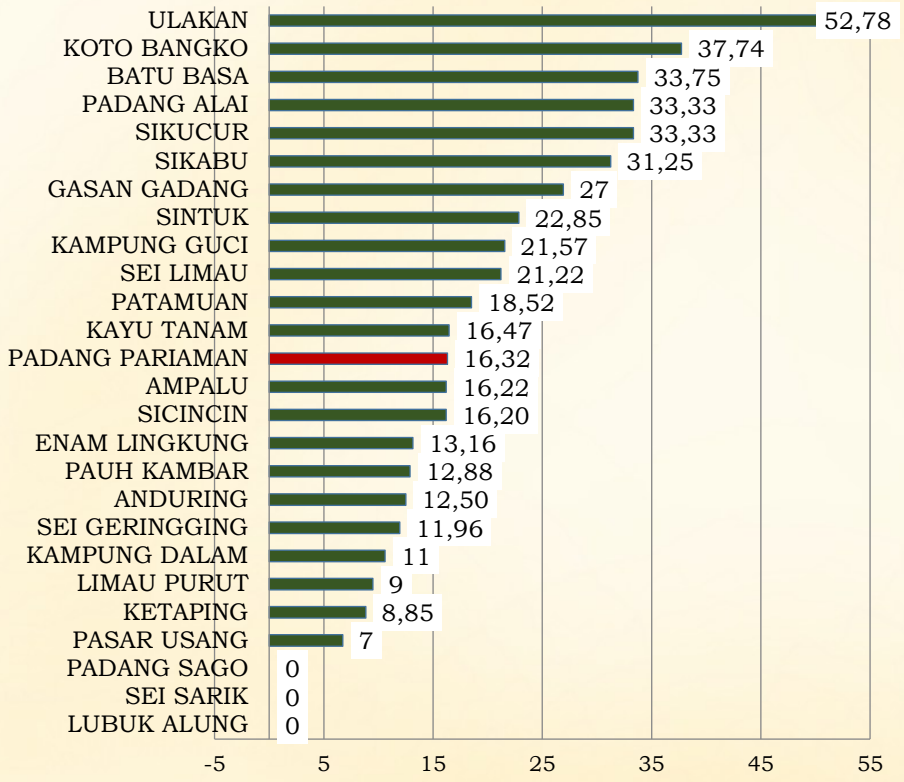
7. Ibu Hamil Riwayat KEK

Riwayat Kurang Energi Kronik (KEK) pada ibu hamil memiliki hubungan yang sangat erat dengan status gizi balita karena kondisi KEK mencerminkan ketidakcukupan asupan energi dan protein dalam jangka waktu lama selama kehamilan. Ketika ibu mengalami KEK, suplai nutrisi ke janin melalui plasenta menjadi terbatas, sehingga berdampak pada pertumbuhan janin dalam kandungan. Ibu dengan KEK berisiko melahirkan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan panjang badan lahir yang tidak optimal, yang keduanya

merupakan faktor risiko utama terjadinya masalah gizi pada masa balita seperti stunting, *underweight, dan wasting*.

Berikut adalah Grafik Persentase balita bermasalah dengan Riwayat bumil KEK di Kabupaten Padang Pariaman :

Grafik 3.28
Persentase Balita Bermasalah Dengan Riwayat Bumil KEK



Sumber : *Dinkes Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025*

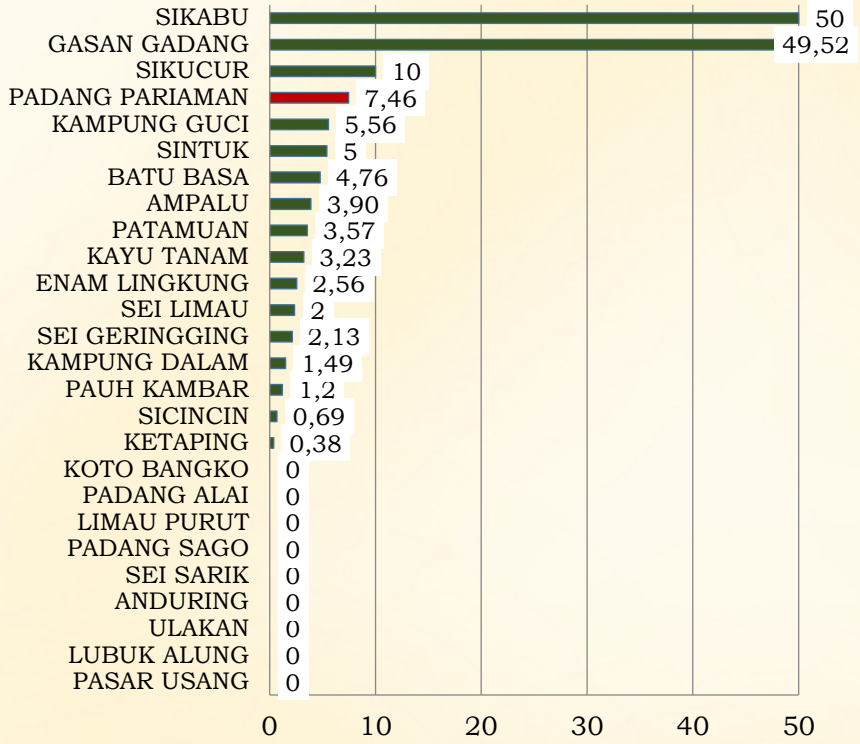
Pada grafik diatas dapat disimpulkan bahwa dari 2.255 balita bermasalah gizi yang direcall, terdapat 368 (16,32%) balita dengan riwayat ibu hamil mangalami KEK. Puskesmas Ulakan adalah Puskesmas tertinggi dengan balita bermasalah gizi memiliki riwayat ibu hamil KEK. Balita dengan riwayat ibu hamil KEK lebih dari 30% tersebar pada 6 Puskesmas yang ada di Dinas kesehatan Kabupaten Padang Pariaman. Puskesmas yang belum melaporkan faktor determinan penyebab masalah gizi yaitu Puskesmas Lubuk Alung dan Puskesmas Sungai Sariak.

8. Penyakit Penyerta

Penyakit penyerta memiliki hubungan kuat dengan status gizi balita karena dapat menyebabkan penurunan asupan makan, gangguan penyerapan nutrisi, peningkatan kebutuhan energi, dan hilangnya nutrien dari tubuh. Hubungan ini bersifat dua arah: penyakit memperburuk status gizi, sementara gizi buruk meningkatkan risiko dan keparahan penyakit. Oleh karena itu, upaya penanganan gizi pada balita harus diintegrasikan dengan pencegahan dan pengobatan penyakit melalui imunisasi, sanitasi yang baik, asupan bergizi, serta akses layanan kesehatan.

Berikut adalah Grafik Persentase balita bermasalah gizi dengan penyakit penyerta di Kabupaten Padang Pariaman :

Grafik 3.29
Persentase Balita Bermasalah Gizi Dengan Penyakit Penyerta



Sumber : *Dinkes Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025*

Pada grafik diatas dapat disimpulkan bahwa dari 2.279 balita bermasalah gizi yang direcall, ditemukan sebanyak 170 balita (7,46%) balita bermasalah gizi dengan penyakit penyerta diantaranya penyakit atau kelainan bawaan, Infeksi dan lain-lain. Puskesmas Sikabu adalah Puskesmas Tertinggi dengan penyakit penyerta pada balita bermasalah gizi yaitu ada 32 balita dari 64 balita yang di recall. Puskesmas yang belum melaporkan faktor determinan penyebab masalah gizi yaitu Puskesmas Lubuk Alung dan Puskesmas Sungai Sariak.

Sebagai upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, berikut alternatif Solusi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, antara lain :

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Padang Pariaman memiliki peran strategis dalam upaya percepatan penurunan prevalensi stunting melalui pendampingan keluarga berisiko stunting. Pendampingan ini difokuskan pada penguatan fungsi keluarga sejak tahap pra nikah, kehamilan, hingga masa tumbuh kembang anak, sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting secara berkelanjutan.

Gambar 3.45
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK)



***Sumber** : Dinkes Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Selain edukasi, DPPKB memastikan keluarga baduta berisiko stunting memperoleh dukungan yang komprehensif, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pemanfaatan bantuan sosial, serta dukungan pangan bergizi sesuai kewenangan masing-masing OPD. Pendekatan ini memastikan intervensi nutrisi tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan layanan kesehatan dan perlindungan sosial.

Gambar 3.46
Bantuan Pangan Bergizi



***Sumber** : Dinkes Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Selain itu, kegiatan sosialisasi pencegahan stunting bagi remaja dalam rangkaian kegiatan Satya Gatra yang diselenggarakan di Kecamatan Enam Lingkung pada Minggu, 7 Desember 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya preventif yang berfokus pada peningkatan pemahaman remaja sebagai calon orang tua dalam rangka pencegahan stunting sejak dini. Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, DPPKB memberikan edukasi kepada remaja mengenai pentingnya kesehatan reproduksi, pemenuhan gizi seimbang, pencegahan anemia, serta perencanaan kehidupan berkeluarga.

Gambar 3.47
Sosialisasi Pencegahan Stunting Bagi Remaja



***Sumber** : Dinkes Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Padang Pariaman memiliki peran strategis dalam mendukung percepatan penurunan prevalensi stunting melalui penguatan pemberdayaan masyarakat di tingkat nagari. Salah satu bentuk kontribusi utama DPMD adalah fasilitasi dan pembinaan Tim Penggerak PKK sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, DPMD memfasilitasi sinergi program TP PKK dengan pemerintah nagari melalui pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung kegiatan pencegahan stunting, sesuai dengan kewenangan dan regulasi yang berlaku. Pendekatan ini memastikan bahwa intervensi sensitif stunting dapat menjangkau keluarga sasaran secara langsung dan berkelanjutan di tingkat desa/nagari.

Gambar 3.48
Fasilitasi dan Pembinaan Tim Penggerak PKK dalam Pencegahan Stunting



***Sumber** : Dinkes Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu instrumen perlindungan sosial yang berperan strategis dalam mendukung upaya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Padang Pariaman. Melalui penyaluran bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), program ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, khususnya pemenuhan gizi bagi anak balita dan ibu hamil.

Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman berperan aktif dalam memastikan penyaluran PKH tepat sasaran serta mendorong pemanfaatan bantuan secara optimal, antara lain dengan mengarahkan KPM untuk memprioritaskan pembelian makanan bergizi, seperti sumber protein hewani, sayur, dan buah, guna mendukung tumbuh kembang anak balita dan kesehatan ibu hamil. Pelaksanaan PKH di Kabupaten Padang Pariaman dilaksanakan secara terintegrasi dengan program kesehatan, melalui koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan pendamping PKH di tingkat nagari. Sinergi ini diwujudkan dalam pemantauan kepatuhan KPM terhadap komitmen kesehatan, seperti kunjungan ibu hamil ke fasilitas kesehatan, pemantauan pertumbuhan balita, serta pemanfaatan layanan Posyandu.

Gambar 3.49
Pendamping dan KPM dalam rangka *Launching* Penerima PKH tahun 2025



***Sumber** : Dinkes Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

f) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Capaian IKU Prevalensi Stunting Tahun 2025

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian Prevalensi Stunting adalah sebanyak 2 (dua) program adalah sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

   Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran untuk Sub Kegiatan sebesar Rp. 8.555.814.292,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp. 8.116.118.669,00 atau sekitar 95% , terdapat efisiensi dari anggaran yang sudah di alokasikan untuk kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman sebesar 5% yang termasuk dalam program ini adalah kegiatan/ sub kegiatan :

   a) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak, Imunisasi, Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
   b) Penyediaan Fasilitas Pelayananan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan Pengadaan Alkes / alat penungjang medisk fasilitas pelayanan kesehatan, Pemeliharaan rutin dan berkala alkes/ alat penungjang medisk fasilitas pelayanan kesehatan, dan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Ckasin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

   Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran untuk Sub Kegiatan sebesar Rp. 1.370.949.000,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp. 853.198.700,00 atau sekitar 62,23% , terdapat efisiensi dari anggaran yang sudah di alokasikan untuk kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman sebesar 38,77%.

g) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai indikator kinerja Prevalensi Stunting, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menganggarkan total pagu sebesar Rp. 9.926.763.292,00 dengan total realisasi mencapai Rp. 8.969.317.369,00 (90,35%).

Tabel 3.107
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Prevalensi Stunting Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2021-2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	10%*	90,35%	-80,35%

Nilai efisiensi yang menunjukkan angka negatif (-80,35%) mengindikasikan bahwa penggunaan sumber daya belum berjalan secara efisien terhadap output yang dihasilkan. Hal ini terjadi karena penyerapan anggaran yang cukup tinggi (di atas 90%) belum dibarengi dengan pencapaian target kinerja yang optimal pada tahun evaluasi ini. Kondisi ini menjadi catatan penting bagi perangkat daerah untuk melakukan evaluasi terhadap ketepatan sasaran program dan juga penetapan target kinerja yang sesuai dengan kondisi riil yang terjadi di daerah. Sedangkan untuk periode RPJMD 2025-2029 dapat dilihat Tingkat efisiensinya sebagai berikut :

Tabel 3.108
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Prevalensi Stunting Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD 2025-2029

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Tercapainya Masyarakat Sehat dan Produktif Sesuai Siklus Hidup	Prevalensi Stunting	88,70%*	90,35%	-1,65%

Dalam upaya mewujudkan sasaran "Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat", indikator kinerja Prevalensi Stunting pada tahun 2025 mencatatkan realisasi capaian sebesar 88,70%. Pencapaian ini didukung oleh penyerapan anggaran yang cukup signifikan, yakni sebesar 90,35% atau senilai Rp8.969.317.369,00 dari total pagu alokasi sebesar Rp9.926.763.292,00. Secara administratif, analisis hubungan antara output kinerja dan input keuangan menghasilkan Tingkat Efisiensi sebesar -1,65%. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan sumber daya berjalan secara kompetitif dan linear guna mengejar target penurunan angka stunting di Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan alokasi yang telah direncanakan.

SASASARAN STRATEGIS 12

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

Sasaran strategis "Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat" merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi ke-6 yaitu "Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat". Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah Tingkat Kemiskinan.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

Formulasi : Jumlah Penduduk Miskin / Jumlah Penduduk Seluruhnya x 100%

Adapun realisasi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, berdasarkan buku Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2026 adalah 5,86%.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan target dan realisasi kinerja IKU "Tingkat kemiskinan" pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.109
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Tingkat Kemiskinan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			
		Target	Realisasi	Capaian	Interpretasi
Tingkat kemiskinan	%	5,80	5,86	98,97	Berhasil

***Sumber** : Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka, 2026*

Dari tabel diatas dapat dilihat Tingkat Kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 adalah 5,86%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu 5,80%, maka capaian kinerja indikator ini adalah 98,98% dengan interpretasi "Berhasil". Meskipun penurunan ini belum mencapai target pada tahun 2025, namun keberhasilan ini patut diapresiasi. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah berupaya keras untuk mengentaskan kemiskinan melalui berbagai program dan kegiatan, seperti program bantuan sosial, pelatihan vokasional, dan pengembangan infrastruktur.

b) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Adapun perbandingan target dan realisasi kinerja IKU "Tingkat Kemiskinan" tahun 2024 dan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.110
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Tingkat Kemiskinan Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Tingkat Kemiskinan	%	5,80	6,27	91,90	5,80	5,86	98,97	Berhasil

***Sumber** : Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 Kabupaten Padang Pariaman memperoleh capaian IKU "Tingkat Kemiskinan" dengan realisasi sebesar 5,86% dari target 5,80%. Persentase capaian sebesar 98,98% dengan interpretasi "Berhasil". Hasil ini lebih baik jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 6,27% dari target 5,80% dengan persentase capaian 91,90%. Persentase peningkatan capaian kinerja dari tahun 2024 ke 2025 adalah sebesar 7,08%.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.111
Perbandingan Target RPJMD dengan Realisasi Indikator Kinerja
Tingkat Kemiskinan Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Jangka Menengah					Interprestasi
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
Tingkat Kemiskinan	%	7,11	6,99	5,80	5,80	5,80	7,22	6,25	6,34	6,27	5,86	Berhasil

***Sumber :** Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Realisasi Indikator Kinerja "Tingkat Kemiskinan" pada tahun 2021 sebesar 7,22% dengan target RPJMD sebesar 7,11%. Pada tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 6,25% dengan target RPJMD sebesar 6,99%. Sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 6,34% dari target RPJMD sebesar 5,80%. Dan pada tahun 2024 realisasi kinerja sebesar 6,27% dari target RPJMD 5,80%. dan pada tahun 2025 realisasi kinerja sebesar 5,86% dari target RPJMD sebesar 5,80%

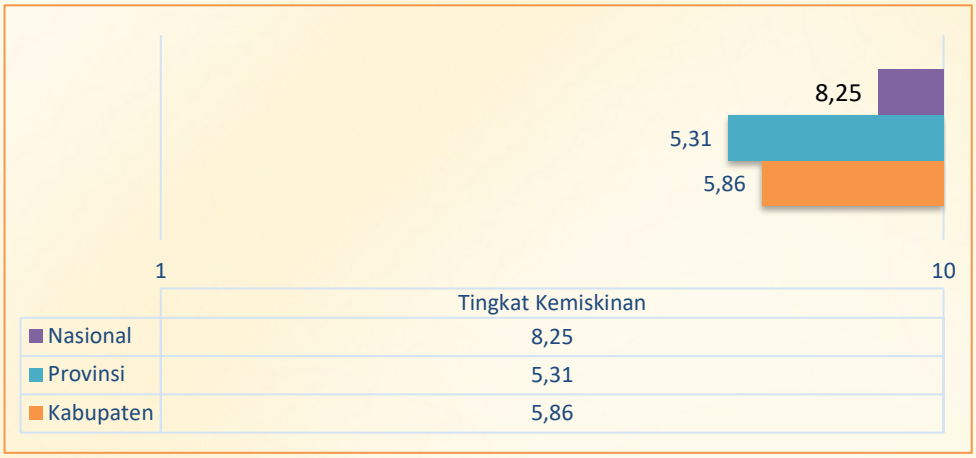
Keberhasilan ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan telah menunjukkan hasil yang positif. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh. Pemerintah dan masyarakat perlu terus bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.

Dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman perlu terus meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan, seperti memperluas cakupan program bantuan sosial, meningkatkan bantuan usaha bagi masyarakat miskin, dan mempercepat pengembangan infrastruktur. Dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, diharapkan target penurunan tingkat kemiskinan dapat tercapai pada tahun-tahun mendatang.

d) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2025

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.30
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2025



***Sumber** : DinsosP3A Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Grafik tersebut menunjukkan perbandingan indikator kinerja tingkat kemiskinan di tiga level wilayah yang berbeda, yaitu tingkat Kabupaten (Padang Pariaman), tingkat Provinsi, dan tingkat Nasional. Berdasarkan data yang bersumber dari DinsosP3A Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025, angka kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman tercatat sebesar 5,86.

Jika dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas, posisi Kabupaten Padang Pariaman berada di atas rata-rata angka kemiskinan Provinsi yang sebesar 5,31, namun masih berada jauh di bawah angka kemiskinan Nasional yang mencapai 8,25. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat kemiskinan di tingkat kabupaten sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi, performa penekanan angka kemiskinan di daerah ini secara umum jauh lebih baik dibandingkan dengan rata-rata capaian di tingkat nasional.

e) Faktor Pendukung/Penghambat Pencapaian IKU Tingkat Kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Berikut ini adalah faktor-faktor yang mendukung pencapaian indikator kinerja Tingkat Kemiskinan :

1. Penguatan Program Perlindungan Sosial Optimalisasi program Bantuan Sosial seperti PKH, BPNT/Sembako, dan bantuan sosial lainnya berkontribusi dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin. Penyaluran bantuan yang tepat sasaran melalui pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) meningkatkan efektivitas intervensi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat

2. Peningkatan Akses Dasar
   Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial turut menekan risiko kemiskinan ekstrem. Intervensi pada kelompok rentan, termasuk ibu hamil, balita, lansia, dan penyandang disabilitas, membantu mencegah kemiskinan antargenerasi.
3. Penurunan Angka Kemiskinan
   Data BPS menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman menurun dari 7,22% pada tahun 2021 menjadi 6,25% pada tahun 2022, mencerminkan efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan. Tingkat kemiskinan th 2025 sebesar 5,86% sedangkan tahun 2024 6,27% turun sebesar 0,41%
4. Komitmen Pemerintah Daerah:
   Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Disamping faktor-faktor pendukung tersebut, terdapat pula hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja Tingkat Kemiskinan :

1. Ketergantungan pada sektor pertanian tradisional
   Banyak masyarakat di Padang Pariaman menggantungkan hidup pada sektor pertanian, namun dengan metode yang masih tradisional, hasil produksi rendah dan rentan terhadap cuaca ekstrem serta fluktuasi harga pasar.
2. Keterbatasan infrastruktur
   Masih adanya keterbatasan akses jalan, jembatan, irigasi, dan transportasi yang menyulitkan distribusi barang dan akses ke pasar, pendidikan, maupun layanan kesehatan.
3. Rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan kerja
   Tingkat pendidikan yang masih relatif rendah menghambat masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal atau mengembangkan usaha secara mandiri
4. Bencana alam dan risiko geografis
   Padang Pariaman termasuk wilayah rawan bencana (gempa, banjir, longsor). Ini sering menghambat pembangunan dan membuat masyarakat kehilangan mata pencaharian secara tiba-tiba.
5. Kurangnya akses terhadap pembiayaan dan modal usaha.
   UMKM lokal sering kesulitan mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan, baik karena kurangnya jaminan, literasi keuangan, atau syarat administrasi yang rumit.
6. Program bantuan yang belum tepat sasaran
   Kadang program sosial atau bantuan pemerintah tidak menyentuh akar masalah atau kurang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan jangka panjang masyarakat miskin.

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Kabupaten Padang Pariaman pada tahun mendatang, terdapat beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain :

1) Meningkatkan upaya menurunkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui :
   a. Pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PPKS lainnya dengan melakukan kegiatan fasilitasi manajemen usaha bagi masyarakat miskin, PKH, verifikasi dan validasi basis DTKS, serta penyaluran dan monitoring bantuan Rastra dan BPNT.
   b. Pelaksanaan program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) dengan melakukan kegiatan rehabilitasi bagi eks pengguna NAPZA, dan pelayanan penyandang masalah sosial di masyarakat.
   c. Pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan melakukan kegiatan pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana, pembinaan lanjut usia terlantar, dan pengadaan bahan logistik bagi korban bencana.
   d. Pelaksanaan program pembinaan anak terlantar dengan melakukan kegiatan pemulangan dan penanganan anak, orang terlantar ke daerah asal dan pelayanan rehabilitasi bagi anak terlantar.
   e. Pelaksanaan program pembinaan para penyandang cacat dan trauma dengan melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma, dan usaha ekonomi produktif bagi penyandang disabilitas
   f. Pelaksanaan program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dengan melakukan kegiatan peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat, pemberdayaan 4 pilar sosial, pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial, pemeliharaan TMP kusuma bangsa dan tugu perjuangan lainnya, forum komunikasi eks pejuang dan bulan bakti karang taruna.
2) Meningkatkan kualitas hidup korban bencana melalui penyaluran bantuan melalui pelaksanaan program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial, pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan kegiatan Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di *Trauma Centre* Termasuk bagi korban bencana dan pengadaan bahan logistik bagi korban bencana.
3) Mengoptimalkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui melalui :
   a. Pelaksanaan program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan kegiatan peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak, kegiatan Penyuluhan Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA) serta kegiatan Pemantauan dan Pelaporan Pangarusutamaan Gender Kabupaten Padang Pariaman.
   b. Pelaksanaan program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan melakukan kegiatan Pembinaan Pemberdayaan

Perempuan, dan Peningkatan Kapasitas SDM Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI).

c. Pelaksanaan Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dengan melakukan kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usahanya.

f) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU

Untuk mewujudkan agar indikator ini tercapai, maka Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan berbagai upaya. Adapun program yang dilakukan untuk mendukung sasaran ini adalah :

1. Program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.
   a. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.
      Kegiatan ini dilaksanakan berupa :
      - Penyaluran bantuan sembako berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2025 diberikan kepada keluarga miskin berdasarkan data DTKS Kementerian Sosial RI, penyaluran bantuan melalui transfer kerekening KPM untuk pembelian kebutuhan sembako melalui PT POS Indonesia yang ditunjuk. Nilai bantuan yang disalurnya sebesar Rp. 200.000,00 per bulan. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 25.110 KPM dengan anggaran sebesar Rp. 60.264.000.000,-
2. Program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp. 211.166.600,- dan APBN sebesar Rp. 294.205.000,-. Kegiatan pada program ini diantaranya adalah :
   a. Kegiatan Penyediaan Permakanan
      Kegiatan ini berupa pemberian bantuan sembako dengan rincian sebagai berikut :
      - Pemberian bantuan sembako kepada 30 orang disabilitas terlantar dari anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya dan 61 orang disabilitas terlantar dari APBN Kemensos RI;
      - Pemberian bantuan sembako kepada 30 Orang lansia terlantar dari anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya dan 85 orang lansia terlantar dari APBN Kemensos RI.
      - Pemberian bantuan sembako kepada 40 orang anak terlantar dari anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya dan dan 39 orang anak terlantar dariAPBN Kemensos RI
   b. Kegiatan Penyediaan Sandang
      Kegiatan ini berupa pemberian bantuan sandang dengan rincian sebagai berikut :
      - Pemberian bantuan sandang kepada 61 orang disabilitas terlantar dari APBN Kemensos RI

- Pemberian bantuan sandang kepada 85 orang lansia terlantar dari APBN Kemensos RI.
- Pemberian bantuan sandang kepada 50 orang anak terlantar dari anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya dan 39 orang anak terlantar dari APBN Kemensos RI.

c. Kegiatan Pemberian Alat Bantu
Kegiatan ini berupa pemberian bantuan alat bantu. Kegiatan tersebut menggunakan anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya, dengan rincian sebagai berikut :
- Pemberian alat bantu kepada 10 orang lansia terlantar

d. Kegiatan Pemberian Alat Bantu
Kegiatan ini berupa pemberian bantuan alat bantu. Kegiatan tersebut menggunakan APBN Kemensos RI, dengan rincian sebagai berikut :
- Pemberian alat bantu kepada 8 orang Disabilitas terlantar.
- Pemberian alat bantu kepada 27 orang lansia terlantar.
- Pemberian alat bantu kepada 4 orang Anak terlantar

e. Kegiatan pemberian bimbingan sosial keluarga penyadang disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar serta gelandangan
Kegiatan ini berupa pembinaan dan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga. Kegiatan tersebut menggunakan anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya, dengan rincian sebagai berikut :
- Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas sebanyak 10 orang
- Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lansia terlantar sebanyak 10 orang
- Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar sebanyak 10 orang

Gambar 3.50
Penyerahan Bantuan Permakanan untuk Lansia dan Disabilitas



Sumber : DinsosP3A Kabupaten Padang Pariaman,2025

3. Program Perlindungan Jaminan Sosial
Telah dilakukan fasilitasi penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah Keluarga penerima PKH 15.715 KPM dengan anggaran yang bersumber dari APBN Kemensos RI.
4. Program Penanganan Bencana

Program ini bertujuan untuk meringankan kebutuhan dasar korban bencana dengan anggaran DAU yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp. 749.974.000,-

- Penyedian Permakanan dan Sandang
  Telah disalurkan bantuan makanan dan sandang sebanyak 31.430 jiwa yang mengalami kejadian bencana alam dan bencana sosial.
- Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memberikan bantuan sembako kepada kelompok rentan sebanyak 15 orang.
- TAGANA Masuk Sekolah
  Pada tahun 2025 DinsosP3A telah melaksanakan TAGANA (Taruna Siaga Bencana) Masuk Sekolah sebanyak 4 Sekolah Dasar Negeri.
- Bantuan Penguatan Usaha :
  Plt Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Padang Pariaman Siska Primadona berikan bantuan kepada Yulidawati warga Korong Simpang Balai Kamih Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, pada Jumat (31/10).

Gambar 3.51
Bantuan Usaha Untuk Ibu Yulidawati



***Sumber** : DinsosP3A Kabupaten Padang Pariaman,2025*

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2025 anggaran program dan kegiatan yang berkaitan dengan Kemiskinan memperoleh pagu sebesar Rp. 1.710.977.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.492.661.719,- dengan persentase sebesar 87,24%. Adapun efisiensi yang diperoleh sebesar Rp. 218.315.381,- atau 12,75%.

Berikut ini adalah analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator kinerja Tingkat Kemiskinan :

Tabel 3.112
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	98,97	87,24%	11,73%

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah berhasil melakukan efisiensi anggaran. Dan jika di total dengan efisiensi kinerja maka diperoleh tingkat efisiensi sebesar 11,73%. Tingkat efisiensi ini sangat baik dan menunjukkan bahwa Kabupaten Padang Pariaman berupaya serius untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan.

SASASARAN STRATEGIS 13

Meningkatnya Investasi di Daerah

Sasaran Strategis "Meningkatnya Investasi di Daerah" berada pada Misi ke-7 RPJMD Kabupaten Padang 2021-2026 yaitu: Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja. Adapun Indikator Kinerja Utama pada sasaran ini adalah "Persentase Pertumbuhan Investasi".

Adapun formulasi perhitungan untuk IKU ini adalah sebagai berikut :

Formulasi : (Nilai Investasi Periode Sekarang - Nilai Investasi Periode Sebelumnya) / Nilai Investasi Periode Sebelumnya x 100%

Dengan menggunakan formulasi pengukuran diatas dan berdasarkan nilai realisasi investasi yang dihimpun Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman, maka dapat diuraikan persentase pertumbuhan investasi di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\frac{(\text{Jumlah Investasi 2025} - \text{Jumlah Investasi 2024})}{\text{Jumlah Investasi 2024}} \times 100\%$$

$$\frac{10.391.656.928.848 - 3.434.127.422.221}{3.434.127.422.221} \times 100\% = 202{,}60\%$$

Peningkatan realisasi investasi Tahun 2025, tersebar pada berbagai sektor yaitu sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.113
Realisasi Investasi Menurut Sektor di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

No	Realisasi Investasi per Sektor	TW I sd TW IV (Rp)	Persentase Capaian (%)
1	Hotel dan Restoran	2.221.779.516	**0,02 %**
2	Industri	19.483.709.395	**0,19 %**
3	Jasa	6.010.530.000	**0,06 %**
4	Konstruksi	10.227.166.725.508	**98,42 %**
5	Listrik, Gas dan Air	44.506.730.535	**0,43 %**
6	Perdagangan dan Reparasi	22.742.096.226	**0,22 %**
7	Perikanan	12.008.800.000	**0,12 %**
8	Pertambangan	9.360.000.000	**0,09 %**
9	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	535.000.000	**0,01 %**
10	Tanaman Pangan, Perkebunan & Peternakan	10.984.596.297	**0,11 %**
11	Transportasi, Gedung & Telekomunikasi	36.636.961.364	**0,35 %**
	TOTAL	**10.391.656.928.841**	**100 %**

***Sumber** : Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Berdasarkan tabel di atas, Realisasi investasi Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 didominasi oleh Sektor Konstruksi dengan kontribusi sebesar 98,42%, menunjukkan fokus investasi pada pembangunan infrastruktur. Sektor lainnya seperti transportasi, peternakan, industri, dan perdagangan memberikan kontribusi pendukung meskipun dalam proporsi yang relatif kecil, namun tetap berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara sektoral.

Grafik menunjukkan realisasi investasi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 yang tersebar pada berbagai sektor usaha. Sektor konstruksi masih menjadi penyumbang terbesar realisasi investasi, yang mencerminkan tingginya aktivitas pembangunan infrastruktur daerah. Sektor lainnya seperti transportasi, peternakan, industri, dan perdagangan turut mendukung pertumbuhan investasi meskipun dengan kontribusi yang lebih kecil, namun berperan penting dalam diversifikasi ekonomi daerah.

Perkembangan investasi di sektor-sektor tersebut mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung diversifikasi ekonomi. Peningkatan investasi di sektor Kontruksi. diharapkan dapat meningkatkan lapangan kerja, pendapatan daerah, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Berikut Indikator Kinerja Utama pada sasaran ini adalah "Persentase pertumbuhan Investasi".

Persentase Petumbuhan Investasi di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

a) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Capaian indikator kinerja utama "Persentase Pertumbuhan Investasi" pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.114
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Persentase Pertumbuhan Investasi Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		Capaian (%)	Interpretasi
		Target	Realisasi		
Persentase Pertumbuhan Investasi	%	2	202,60	10.130	Sangat Berhasil

***Sumber** : DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Indikator Persentase Pertumbuhan Investasi pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 2%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi yang dicapai adalah 202,60%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 10.130%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pada indikator ini berada pada kategori sangat tinggi/sangat berhasil, karena realisasi pertumbuhan investasi jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendorong peningkatan investasi telah berjalan secara efektif dan optimal.

Tingginya realisasi pertumbuhan investasi mencerminkan meningkatnya minat dan kepercayaan investor terhadap iklim investasi, yang didukung oleh perbaikan pelayanan perizinan, kemudahan berusaha, serta adanya peluang investasi yang menarik. Selain itu,

masuknya investasi baru maupun pengembangan usaha dari investor yang sudah ada turut memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian indikator ini.

Meskipun capaian kinerja tergolong sangat berhasil, kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi dalam penetapan target ke depan. Target yang relatif rendah dibandingkan dengan potensi aktual dapat menyebabkan capaian terlihat sangat tinggi. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian target yang lebih realistis dan menantang pada periode selanjutnya, agar kinerja yang dihasilkan tetap terukur dan berorientasi pada keberlanjutan pertumbuhan investasi.

b) Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2024 dan Tahun 2025

Tabel 3.115
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Pertumbuhan Investasi Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		Capaian	Tahun 2025		Capaian (%)	Interpretasi
		Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi		
Persentase Pertumbuhan Investasi	%	10	185	1.850	2	202,29	18.390	Sangat Berhasil

***Sumber** : DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Pada tahun 2024, realisasi persentase pertumbuhan investasi berada pada angka 185%, sedangkan pada tahun 2025 sebesar 202,29% mengalami kenaikan dari tahun 2024 sebesar 17,29%. Hal ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan investasi di Padang Pariaman pada tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.116
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Investasi Tahun 2021-2025 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja					Capaian 2025 (%)
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
Persentase Pertumbuhan Investasi	%	N/A	N/A	N/A	10	2,0	-25	-53,53	159,92	185	202,29	18.390

***Sumber**: BKPM dan DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Berdasarkan data target dan realisasi kinerja tahun 2021–2025, dapat dijelaskan bahwa pada periode 2021–2023 indikator Persentase Pertumbuhan Investasi belum ditetapkan target kinerja (N/A). Meskipun demikian, realisasi kinerja pada periode tersebut menunjukkan capaian yang sangat tinggi, yaitu 648,41% pada tahun 2021, 53,53% pada tahun 2022, dan 159,92% pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan investasi tetap berlangsung secara signifikan meskipun belum didukung oleh penetapan target yang terukur.

Pada tahun 2024, indikator ini mulai memiliki target jangka menengah sebesar 1,0%, dengan realisasi mencapai 1,85%. Dengan demikian, kinerja tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan, menunjukkan mulai terbangunnya keselarasan antara perencanaan dan capaian kinerja.

Selanjutnya pada tahun 2025, target Persentase Pertumbuhan Investasi ditetapkan sebesar 2,0%, dengan capaian kinerja sebesar 202,29%. Capaian ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja tahun 2025 jauh melampaui target jangka menengah, sehingga indikator ini dikategorikan sangat tinggi/sangat berhasil.

Secara keseluruhan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah menunjukkan tren kinerja yang sangat positif dan meningkat, khususnya sejak indikator mulai ditetapkan target pada tahun 2024. Namun demikian, tingginya capaian dibandingkan target juga mengindikasikan bahwa penetapan target jangka menengah masih relatif rendah dibandingkan potensi aktual, sehingga diperlukan peninjauan kembali target pada periode perencanaan berikutnya agar lebih realistis, menantang, dan mencerminkan kondisi riil pertumbuhan investasi.

d) Faktor Pendukung/Penghambat Pencapaian IKU Persentase Pertumbuhan Investasi di Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Faktor Pendukung tercapainya target indikator kinerja persentase pertumbuhan investasi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 antara lain :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan
   Optimalisasi pelayanan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) serta pendampingan langsung kepada pelaku usaha telah mempermudah proses perizinan dan mempercepat realisasi investasi di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Peran Aktif Pemerintah Daerah dalam Fasilitasi Investasi
   Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman secara aktif melakukan fasilitasi dan pendampingan kepada investor, mulai dari tahap perencanaan hingga realisasi usaha, sehingga mengurangi hambatan administratif dan teknis di lapangan.
3. Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah
   Pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah, seperti pertanian, perikanan, perdagangan, dan jasa, menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Padang Pariaman.
4. Stabilitas Kondisi Sosial dan Keamanan Daerah
   Kondisi sosial yang kondusif serta dukungan masyarakat terhadap kegiatan usaha memberikan rasa aman dan kepastian bagi investor dalam menjalankan kegiatan investasinya

Faktor Penghambat tercapainya target indikator kinerja persentase pertumbuhan investasi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 yaitu:

Di samping capaian kinerja yang tinggi, masih terdapat beberapa faktor penghambat antara lain:

1. Keterbatasan Infrastruktur Pendukung Investasi
   Belum meratanya infrastruktur pendukung, seperti akses jalan ke lokasi usaha dan ketersediaan utilitas dasar, dapat menjadi kendala bagi investor dalam mengembangkan usahanya. Peran aktif Pemerintah Daerah dalam Fasilitasi Investasi
2. Ketergantungan pada Jenis Investasi Tertentu
   Pertumbuhan investasi masih didominasi oleh sektor tertentu, sehingga apabila sektor tersebut mengalami perlambatan, akan berdampak pada penurunan pertumbuhan investasi secara keseluruhan.
3. Kendala Koordinasi Lintas Sektor
   Pelaksanaan kegiatan investasi sering memerlukan koordinasi dengan berbagai perangkat daerah dan instansi vertikal, yang dalam beberapa kasus dapat mempengaruhi kecepatan realisasi investasi.
4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Lokal
   Ketersediaan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan investor masih terbatas, sehingga berpotensi menghambat pengembangan usaha.
5. Belum tersedianya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan Peta Potensi Peluang Investasi.

Langkah kedepan yang dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kimerja antara lain :

1. Peningkatan Kualitas dan Kecepatan Pelayanan Perizinan
   Penyederhanaan proses perizinan, peningkatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi layanan OSS dan pendampingan pelaku usaha
2. Penguatan Promosi Investasi Daerah
   Penyusunan dan penyebarluasan informasi peluang investasi daerah serta partisipasi dalam kegiatan promosi investasi tingkat provinsi dan nasional.
3. Peningkatan Koordinasi dan Sinergi
   Mendorong pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendukung secara bertahap sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
4. Peningkatan Infrastruktur Pendukung Investasi
   Mendorong pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendukung secara bertahap sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
5. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Investasi
   Pelaksanaan pemantauan secara berkala terhadap realisasi investasi guna memastikan keberlanjutan dan dampak ekonomi dari investasi yang masuk.
6. Penyusunan Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan Peta Potensi Peluang Investasi.

e) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Dengan Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah dengan target yang di tetapkan yaitu 80% sedangkan pagu Anggaran Rp. 18.390.900,00,- dan Terealisasi 80% dan realisasi anggaran Rp. 15.945.750,00,- atau 86,70% ditunjang oleh:

Kegiatan:

Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan target yang di tetapkan yaitu 1 dokumen sedangkan pagu Anggaran Rp. 3.112.500,00,- dan Terealisasi 1 dokumen dan realisasi anggaran Rp. 1.935.750,00,- atau 62,19%.

Sub Kegiatan:

- Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
  Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan:

Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

dengan target yang di tetapkan yaitu 1 dokumen sedangkan pagu Anggaran Rp. 15.278.400,00,- dan Terealisasi 1 dokumen dan realisasi anggaran Rp. 14.010.000,00,- atau 91,69%.

Sub Kegiatan:

- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)
- Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

2. Program Promosi Penanaman Modal

Program promosi penanaman modal merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menarik investasi ke suatu daerah atau sektor tertentu. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan potensi investasi dan mendorong masuknya dana dari investor, baik domestik maupun asing, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur.

Program promosi penanaman modal merupakan instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Program ini harus dirancang secara komprehensif dengan memperhatikan kemudahan berinvestasi, penyediaan informasi yang akurat, serta pengembangan infrastruktur dan sumber daya

manusia. Keberhasilan program promosi dapat terlihat dari meningkatnya volume investasi, terciptanya lapangan pekerjaan, dan berkembangnya sektor-sektor ekonomi lokal yang strategis, dengan target yang di tetapkan yaitu 1 dokumen sedangkan pagu Anggaran Rp. 9.683.000,00,- dan Terealisasi 1 dokumen dan realisasi anggaran Rp. 7.400.000,00,- atau 76,42%

Kegiatan:
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan target yang di tetapkan yaitu 1 dokumen sedangkan pagu Anggaran Rp. 9.683.000,00,- dan Terealisasi 1 dokumen dan realisasi anggaran Rp. 7.400.000,00,- atau 76,42%.
Sub Kegiatan:

- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Program Pelayanan Penanaman Modal
   Untuk mewujudkan Pelaksanaan program ini ada 1 kegiatan
   Kegiatan:
   Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dialokasikan anggaran sebesar Rp. 26.222.015,00,- dengan realisasi anggaran Rp. 23.207.000,00 atau 88.50 %.
   Sub Kegiatan:
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
   - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik.
   - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
   - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

4. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
   Untuk mewujudkan Pelaksanaan program ini ada 1 Kegiatan yaitu
   Kegiatan:
   Terlaksananya Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinanan Berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.250.000,00,- dengan realisasi anggaran Rp.1.290.000,00,- atau 57,33%.
   Sub Kegiatan:
   - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
   Untuk mewujudkan Pelaksanaan program ini ada 1 Kegiatan yaitu

Kegiatan:
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaannya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 26.950.000,00, - terealisasi sebesar Rp. 26.256.200,00,- atau 97,42%.

Sub Kegiatan:
- Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
- Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
- Pengawasan Penanaman Modal

f) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU

Faktor Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja diantaranya adalah:
1. Ketersediaan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik
   Sistem OSS (Online Single Submission) sudah tersedia dan dapat dimanfaatkan sebagai sarana utama pengolahan dan penyajian data perizinan.
2. Koordinasi antar perangkat daerah terkait
   Adanya kerja sama dan pertukaran data antara OPD pendukung membantu kelancaran pemanfaatan data perizinan.
3. Kompetensi SDM pengelola data
   Aparatur pelaksana memiliki pemahaman dasar terkait pengolahan dan pemanfaatan data perizinan berbasis sistem elektronik.
4. Efisiensi pelaksanaan kegiatan
   Sebagian kegiatan dapat dilaksanakan tanpa menggunakan seluruh alokasi anggaran karena optimalisasi sarana dan prasarana yang telah tersedia.

Faktor Kegagalan Pencapaian Kinerja diantaranya adalah:
1. Tidak seluruh komponen kegiatan membutuhkan dukungan anggaran, sehingga realisasi anggaran tidak mencapai target yang direncanakan.
2. Keterbatasan volume dan kualitas data
3. Data perizinan yang masuk melalui sistem belum sepenuhnya lengkap atau sesuai kebutuhan analisis dan penyajian informasi.
4. Perubahan kebijakan dan regulasi perizinan
5. Penyesuaian terhadap regulasi baru menyebabkan beberapa rencana kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.
6. Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan
7. Jadwal pelaksanaan yang terbatas menghambat optimalisasi pengolahan dan pemanfaatan data perizinan secara menyeluruh.

Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- Melakukan Kegiatan kunjungan lapangan Dalam Rangka Pengawasan Perizinan Berusaha dan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ke PT. Dofla Land, Alana dan Dynamid Properti di Kec. Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman

Gambar 3.52
Pengawasan Perizinan Berusaha dan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ke PT. Dofla Land, Alana dan Dynamid Properti




- Melakukan Kegiatan kunjungan lapangan Dalam Rangka Pengawasan Perizinan Berusaha dan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ke PT. Obit Sejahtera Gemilang dan Olga Mulya gemilang di Kec. Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman

Gambar 3.53
Pengawasan Perizinan Berusaha dan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) PT. Obit Sejahtera Gemilang dan Olga Mulya gemilang






- Melakukan Kegiatan kunjungan lapangan Dalam Rangka Pengawasan Perizinan Berusaha dan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ke PT. Kunango Jantan di Kec. Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.

Gambar 3.54
Rangka Pengawasan Perizinan Berusaha dan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ke PT. Kunango Jantan



- Melakukan Kegiatan kunjungan lapangan Dalam rangka Peninjauan Lapangan menindak lanjuti laporan pengaduan masyarakat terkait Kandang Ayam Yang berlokasi Di Nagari Balah Aie Timur Kecamatan VII Koto Sungai Sariak.

Gambar 3.55
Peninjauan Lapangan Menindaklanjuti Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Kandang Ayam



***Sumber** : DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut ini adalah analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Investasi di Daerah Tahun 2025 :

Tabel 3.117
Efisiensi Sumberdaya Indikator Kinerja
Persentase Pertumbuhan Investasi Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Investasi di Daerah	Persentase Pertumbuhan Investasi	18.390%	82,83%	18.407,17%

Sumber : *DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Berdasarkan tabel kinerja sasaran "Meningkatnya Investasi di Daerah" dengan indikator Persentase Pertumbuhan Investasi, dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2025 realisasi pertumbuhan investasi sebesar 202,29% dengan target yang ditetapkan sebesar 2% dengan persentase capaian kinerja sebesar 18.390%.

Dari sisi pengelolaan anggaran, penyerapan anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut tercatat sebesar 82,83%. Tingkat efisiensi pada indikator ini sangat tinggi sebesar 18.407,17%.

Secara keseluruhan, kinerja sasaran meningkatnya investasi di daerah menunjukkan hasil yang sangat baik, baik dari sisi pencapaian indikator maupun efisiensi penggunaan anggaran. Ke depan, perlu dilakukan penyesuaian target kinerja yang lebih realistis dan menantang agar capaian kinerja dapat lebih mencerminkan kondisi dan potensi investasi daerah secara proporsional.

SASASARAN STRATEGIS 14

Meningkatnya Perekonomian Masyarakat

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Penentuan PDRB atas harga konstan, biasanya diperlukan untuk mengeluarkan pengaruh inflasi.

Dalam rangka melihat keberhasilan pencapaian sasaran strategis ”Meningkatnya Perekonomian Masyarakat, digunakan indikator ”Kontribusi Ekonomi Sektor Riil terhadap PDRB. Kontribusi Ekonomi Sektor Riil terhadap PDRB merupakan persentase nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor riil (seperti pertanian, industri manufaktur, perdagangan, konstruksi, dan jasa non-keuangan) terhadap total PDRB suatu wilayah dalam periode tertentu. Sektor riil mencerminkan aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang nyata digeluti oleh masyarakat suatu wilayah tersebut dan merupakan indikator penting untuk mengukur peran dan dampak sektor riil dalam pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

Formulasi Pengukuran $\frac{\text{Nilai Tambah Sektor Riil}}{\text{Total PDRB}}$

Sektor riil Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan 8 sektor usaha yaitu :

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*
2. Industri Pengolahan/*Manufacturing*
3. Konstruksi/*Construction*
4. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor /*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*
5. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*
6. Real Estat/*Real Estate Activities*
7. Jasa Pendidikan/*Education*
8. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities

Berdasarkan data Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Padang Pariaman, 2021–2025 yang tersaji pada buku Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka, 2025, dapat disajikan kontribusi ekonomi sektor riil terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dan 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.118
Persentase Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB
Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Sektor Lapangan Usaha	Pesentase Kontribusi	
		Tahun 2024	Tahun 2025
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*	20,17%	20,70%
2	Industri Pengolahan/*Manufacturing*	10,25%	10,71%
3	Konstruksi/*Construction*	10,10%	9,40%
4	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor /*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	10,14%	10,38%
5	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*	1,24%	1,26%
6	Real Estat/*Real Estate Activities*	1,03%	1,08%
7	Jasa Pendidikan/*Education*	5,43%	5,65%
8	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	0,71%	0,77%
Jumlah		**59,07%**	**59,95%**

Sumber : *data diolah dari Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka 2026*

Adapun sektor pendorong utama kenaikan ini adalah sektor Pertanian sebesar 20,70% dan sektor Industri Pengolahan yang juga tumbuh ke angka 10,71%. Sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa sektor Konstruksi merupakan satu-satunya sektor yang mengalami penurunan kontribusi yang cukup signifikan, yakni dari 10,10% merosot ke angka 9,40%, yang menandakan adanya perlambatan aktivitas pembangunan fisik pada periode tersebut.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Adapun perbandingan target dan realisasi capaian IKU "Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB" pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.119
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB Tahun 2025

IKU	Satuan	Tahun 2025		Capaian (%)	Interpretasi
		Target	Realisasi		
Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB	%	65	59,95	92,23	Berhasil

Sumber *: Kab. Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2026*

Pada tahun 2025, pemerintah menetapkan target kontribusi sektor riil terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 65%. Berdasarkan data statistik akhir

tahun, realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 59,95%. Jika dibandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan, maka tingkat capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 92,23%. Capaian tersebut masuk ke dalam kategori "Berhasil".

b) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Berikut akan disajikan perbandingan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama "Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB" tahun 2024 dengan tahun 2025.

Tabel 3.120
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB
Tahun 2024 dan Tahun 2025

IKU	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Capaian (%)	Interpretasi
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB	%	62	59,07	65	59,95	92,23	Berhasil

Sumber : *Kab. Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2026*

Secara makro, kontribusi sektor riil terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan tren penguatan. Total kontribusi delapan sektor lapangan usaha utama meningkat dari 59,07% pada tahun 2024 menjadi 59,95% pada tahun 2025. Kenaikan sebesar 0,88% poin ini mengindikasikan bahwa sektor-sektor produksi dan jasa fisik semakin dominan dalam menggerakkan ekonomi daerah.

Mayoritas sektor riil mengalami peningkatan kontribusi dari tahun 2024 ke tahun 2025. Beberapa catatan penting di antaranya:

- Pertumbuhan Tertinggi: Sektor Pertanian memimpin kenaikan dengan tambahan kontribusi sebesar 0,53% poin.
- Sektor Jasa Sosial: Jasa Pendidikan serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial menunjukkan tren positif yang konsisten, meskipun kontribusi Jasa Kesehatan masih menjadi yang terkecil di angka 0,77%.
- Sektor Penunjang: Real Estat serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami kenaikan tipis, mencerminkan adanya pemulihan aktivitas pariwisata dan properti yang stabil namun perlahan.

Sektor Konstruksi menjadi pengecualian tunggal dalam tren pertumbuhan positif tahun ini. Di saat tujuh sektor riil lainnya mengalami penguatan pangsa pasar, kontribusi sektor Konstruksi justru menunjukkan kontradiksi dengan mengalami penurunan dari 10,10% pada tahun 2024 menjadi 9,40% pada tahun 2025.

Penurunan sebesar 0,70% poin ini mengisyaratkan adanya perlambatan aktivitas pembangunan fisik atau telah berakhirnya siklus proyek infrastruktur besar yang tidak langsung diikuti oleh proyek baru di tahun berjalan.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.121
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB	%	N/A	N/A	N/A	62%	65%	65,33	61,52	59,63	59,07	59,95

Sumber : *Kab. Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2026*

Pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa target jangka menengah dari Indikator Kinerja "Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB" tahun 2021-2023 tidak ada. Hal ini dikarenakan adanya perubahan indikator kinerja utama pada tahun 2024, sehingga target dan indikator tidak terdapat pada RPJMD.

Jika dilihat dari realisasi pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB selalu mengalami penurunan kontribusi. Hal ini memperlihatkan bahwa perekonomian nyata yang melibatkan sebagian besar masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dari tahun ke tahun mengalami perlambatan. Namun pada tahun 2025 mengalami peningkatan dari 59,07% menjadi 59,95%. Kenaikan di tahun terakhir ini menjadi bukti bahwa kebijakan stimulasi ekonomi mulai membuahkan hasil, memberikan momentum yang kuat untuk mengejar target jangka menengah yang lebih tinggi di periode berikutnya.

d) Perbandingan Realisasi Kontribusi Ekonomi Sektor Riil terhadap PDRB Kabupaten dengan Realisasi Provinsi Tahun 2025

Berikut ini Adalah tabel perbandingan Persentase Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB Tahun 2025 Kabupaten Padang Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat :

Tabel 3.122
Persentase Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB Tahun 2025 Kabupaten Padang Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat

No	Sektor Lapangan Usaha	Pesentase Kontribusi Ekonomi Sektor Riil terhadap PDRB Tahun 2025	
		Provinsi	Kabupaten
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*	22,12%	20,70%
2	Industri Pengolahan/*Manufacturing*	8,55%	10,71%
3	Konstruksi/*Construction*	9,47%	9,40%
4	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor /*Wholesale and Retail Trade; Repair of*	16,65%	10,38%

	Motor Vehicles and Motorcycles		
5	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*	1,37%	1,26%
6	Real Estat/*Real Estate Activities*	2,12%	1,08%
7	Jasa Pendidikan/*Education*	4,50%	5,65%
8	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	1,78%	0,77%
Jumlah		**66,56%**	**59,95%**

Sumber : *Kab. Padang Pariaman Dalam Angka, Prov. Sumatera Barat Dalam Angka 2026*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa ekonomi Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2025 menunjukkan karakteristik yang unik dengan tingkat kemandirian yang kuat pada sektor-sektor produksi fisik. Meskipun secara agregat kontribusi sektor riil berada di angka 59,95%, atau sedikit di bawah rata-rata Provinsi (66,56%), terdapat beberapa poin keunggulan strategis yang menonjol.

Salah satu poin paling impresif adalah peran Industri Pengolahan di Padang Pariaman yang mencapai 10,71%. Angka ini melampaui rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang berada di level 8,55%. ektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap menjadi tulang punggung utama dengan kontribusi sebesar 20,70%. Meskipun secara persentase sedikit di bawah angka Provinsi (22,12%), sektor ini tetap menjadi penyumbang terbesar bagi PDRB Kabupaten Padang Pariaman. Menariknya, kontribusi Jasa Pendidikan di Padang Pariaman (5,65%) justru lebih tinggi dibandingkan level Provinsi (4,50%). Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Padang Pariaman mulai bertransformasi menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia, yang merupakan investasi jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi di masa depan.

e) Faktor Pendukung/Penghambat Pencapaian IKU Kontribusi Ekonomi Sektor Riil terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Dari hasil capaian dan interpretasi kinerja seperti uraian sebelumnya, dapat diuraikan beberapa faktor pendukung capaian IKU antara lain :

1. Bantuan benih/bibit tanaman pangan (Padi dan Jagung) kepada masyarakat tani;
2. Bantuan sarana produksi alsintan (alat mesin pertanian pertanian), kepada masyarakat tani. Alsintan yang dipinjamkan berupa alat pengolahan tanah (Handtraktor), melalui Kegiatan Operasional Brigade Tanam. Kegiatan ini memiinjam pakaikan Handtraktor yang ada pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Masyarakat tani melalui kelompok tani dapat memanfaatkan alsintan ini dengan mengajukan surat permohonan peminjaman
3. Pembangunan/rehabilitasi prasarana pertanian;
4. Jumlah Penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan cukup banyak sekitar 1.739 orang;
5. Potensi Sumber Daya Ikan masih memadai;
6. Adanya peningkatan mekanisasi armada dan alat tangkap;
7. Keragaman alat tangkap yang dimiliki nelayan cukup bervariasi;
8. Meningkatnya jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara berdampak langsung pada kenaikan tingkat hunian hotel, penginapan, serta konsumsi di restoran dan rumah makan.

9. Penyelenggaraan event pariwisata, festival budaya, serta promosi destinasi unggulan daerah mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi pada sektor akomodasi dan makan minum.
10. Sumberdaya Pelaku Usaha (SDM) sudah meningkat, keterampilan dan keahlian dalam memproduksi produk sudah bertambah sehingga konsistensi produk tetap terjaga;
11. Sosialisasi kepada pelaku Industri Kecil dan menengah tentang ketersediaan akses permodalan dan pembiayaan (bank, Koperasi , KUR, Kredit Industri Padat Karya (KIPK);
12. Keinginan IKM untuk tetap produksi karena usaha mereka pada umumnya penunjang ekonomi keluarga
13. Keinginan IKM untuk terus mengembangkan produk yang dihasilkannya dengan melakukan pendampingan dalam produksi
14. Adanya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

Selain faktor pendukung diatas, terdapat pula faktor-faktor penghambat keberhasilan capaian kinerja pada tahun 2024 antara lain :

1. Serangan hama penyakit (OPT);
2. Bencana hidrometeorologi yang terjadi pada Bulan Novemver 2025 sangat berdampak pada kerusakan lahan pertanian, terutama pada lahan tanaman pangan;
3. Rendahnya kualitas SDM Nelayan dalam hal teknologi penangkapan ikan, dibuktikan dengan massih rendahnya pemilikan dan pemanfaatan sarana penangkapan yang berteknologi tinggi;
4. Kurang maksimalnya jam kerja yang digunakan oleh nelayan dalam penangkapan ikan (berangkat pagi pulang sore);
5. Fasilitas pendaratan ikan tidak memadai bagi perahu yang kapasitas besar;
6. Belum adanya kelembagaan koperasi nelayan yang akan memfasilitasi permodalan, sarana prasarana dan pemasaran hasil perikanan;
7. Biaya produksi budidaya cukup tinggi terutama pakan ikan;
8. Keterbatasan kewenangan dan ruang lingkup perangkat daerah dalam mendorong peningkatan nilai tambah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum bersifat tidak langsung sehingga mempengaruhi capaian indikator kinerja;
9. Keterbatasan Sarana produksi berupa peralatan mesin dan pada umumnya masih mengolah produk dengan cara tradisional mengakibatkan terbatasnya diversifikasi hasil produk yang dibuat oleh pelaku usaha industri kecil dan menengah;
10. Masih rendahnya kemampuan dan keterampikan pelaku usaha kecil dan menengah dalam memproduksi produknya;
11. Keterbatasan anggaran dalam melaksanakan kegiatan pendampingan pada pelaku usaha Industri kecil dan menengah.

Adapun upaya-upaya perbaikan atau langkah kedepan yang harus dilakukan untuk mencapai keberhasilan kinerja antara lain :

1. Meningkatkan penggunaan sarana produksi seperti, bibit unggul bersertifikasi;
2. Penggunaan alat dan mesin pertanian dalam pengusahaan usaha tani;
3. Melakukan rehabilitasi dan pembangunan prasarana pertanian, seperti jaringan irigasi tersier, dam parit, jalan usaha tani dan prasarana pendukung lainnya;

4. Melakukan pengendalian organisme penggagu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, seperti pengendalian hama tikus, wereng, tungro dan hama penyakit lainnya;
5. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tani secara berkesinambungan;
6. Meningkatan promosi daerah baik berupa peluang investaasi, produk daerah maupun promosi bahan komoditi yang ada di Kabupaten Padang Pariaman;
7. Pembinaan untuk nelayan dengan kolaborasi antara petugas teknis dinas dan penyuluh perikanan dalam hal peningkatan kapasitas nelayan tentang teknis penangkpan ikan, perbaikan dan perawatan mesin alat tangkap, serta penguatan kelembagaan nelayan;
8. Memperkuat kapasitas wanita nelayan melalui pelatihan yang mengarah kepada diversifikasi produk olahan perikanan sehingga akan meningkatkan produksi olahan perikanan yang akan berdampak positif capaian kontribusi sektor riil terhadap PDRB;
9. Peningkatan kolaborasi dengan *stakeholder* terkait dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir untuk meningkatkan nilai tukar nelayan;
10. Pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan pariwisata daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang berlaku, sebagai upaya mendorong peningkatan aktivitas sektor penyediaan akomodasi dan makan minum;
11. Fasilitasi dan pembinaan pelaku usaha dengan melakukan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi kepada pelaku usaha sektor penyediaan akomodasi dan makan minum;
12. Pembinaan dan pelatihan bagi IKM
13. Percepatan hilirisasi produk unggulan lokal;
14. Penguatan Rantai Pasok *(Supply Chain).*

f) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Indikator Kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Kontribusi Ekonomi Sektor Riil terhadap PDRB ini tidak terlepas dari adanya dukungan berbagai program yang telah dilaksanakan, diantaranya :

- **Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**
  Pelaksanaan Program ini dialokasikan anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 328.538.650,00 dan realisasi sebesar Rp. 309.449.400,00.
  Adapun kegiatan yang terdapat dalam program ini, antara lain:
  1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian; dan
  2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota.
- **Program Penyuluhan Pertanian**
  Pelaksanaan Program ini dialokasikan anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 552.528.687,00 .dan realisasi sebesar Rp. 529.269.650,00.
  Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat dalam program ini yaitu Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota, dan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian.

- **Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**
  Pelaksanaan Program ini dialokasikan anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 919.119.150,00 dan realisasi sebesar Rp. 895.374.165,00. Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat dalam program ini yaitu Perberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI),
- **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**
  Pelaksanaan Program ini dialokasikan anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 50.946.460,00 dengan realisasi sebesar Rp. 50.676.000,00. Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat dalam program ini yaitu Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil dan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- **Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**
  Pelaksanaan Program ini dialokasikan anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 12.440.938,00 dengan realisasi sebesar Rp. 11.990.000,00. Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat dalam program ini yaitu Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil dan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko.
- **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**
  Pelaksanaan Program ini dialokasikan anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 6.978.000,00. dengan realisasi sebesar Rp 6.875.500,00. Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat dalam program ini yaitu Pembangunan dan Pengelola sarana distribusi perdagangan dan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.
- **Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**
  Anggaran program pada tahun 2025 sebesar Rp. 13.500.500,00 dengan realisasi anggarannya adalah sebesar Rp. 12.574.400,00. Kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat dalam program ini yaitu Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota.
- **Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**
  Anggaran program pada tahun 2025 sebesar Rp. 200.841.600,00 dengan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 197.612.200,00. Adapun Kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat dalam program ini yaitu Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota.
- **Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri.**
  Pelaksanaan Program ini dialokasikan anggaran tahun 2025 sebesar Rp.16.250.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.170.200,00.

Adapun kegiatan yang terdapat dalam program ini, antara lain: Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

- **Program Pengendalian Izin Usaha Industri.**
  Pelaksanaan Program ini dialokasikan anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 5.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.510.000,00. Adapun kegiatan yang terdapat dalam program ini, antara lain: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA).
- **Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.**
  Pelaksanaan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional ini dialokasikan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 4.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.072.850,00. Adapun kegiatan yang terdapat dalam program ini, antara lain: Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas; Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas.

Secara keseluruhan, pelaksanaan berbagai program penguatan ekonomi sektor riil pada tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat efektif dan akuntabel. Dari total alokasi anggaran sebesar Rp2.110.943.985,00, pemerintah berhasil merealisasikan sebesar Rp2.037.574.365,00 dengan rata-rata persentase capaian realisasi sebesar 96,52%. Keberhasilan mencapai angka realisasi tersebut membuktikan komitmen pemerintah daerah dalam mengonversi anggaran menjadi kerja nyata. Fokus pada sarana prasarana, penyuluhan, dan stabilisasi pasar telah menciptakan fondasi yang kokoh bagi keberlanjutan sektor riil di masa mendatang.

Gambar 3.56
Penyaluran Bantuan Bibit/Benih Unggul Bersertifikat kepada Masyarakat Tani



Sumber *DistanKP Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Gambar 3.57
Temu Teknis Peningkatan Kapasitas Nelayan Kecil Tahun Anggaran 2025



Sumber *Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Gambar 3.58
Kegiatan Sosialisasi kepada Industri Kecil dan Menengah



Sumber *DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Gambar 3.59
Kegiatan Pembinaan bagi Industri Kecil dan Menengah



Sumber *DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.123
Efisiensi Sumber Daya Indikator Kinerja
Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB	92,23%	96,52%	-4,29%

Sumber : *DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Pada tahun 2025, sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui indikator Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB mencatatkan capaian kinerja sebesar 92,23%. Capaian ini didukung oleh penyerapan anggaran yang sangat tinggi, yakni mencapai 96,52%.

Berdasarkan perbandingan kedua angka tersebut, diperoleh tingkat efisiensi sebesar -4,29%. Nilai efisiensi negatif ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran berjalan lebih cepat dibandingkan realisasi output kinerjanya. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan sumber daya belum mencapai titik optimal, di mana biaya yang dikeluarkan untuk intervensi sektor riil (seperti bantuan sarana dan penyuluhan) belum sepenuhnya terkonversi menjadi peningkatan nilai kontribusi PDRB sesuai target yang ditetapkan. Evaluasi ke depan diperlukan untuk mempertajam ketepatan sasaran belanja agar setiap rupiah anggaran mampu memberikan daya ungkit yang lebih besar terhadap capaian kinerja ekonomi daerah.

II. REALISASI KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2025 BERDASARKAN RPJMD TAHUN 2025-2029

Bagian ini memaparkan capaian awal Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam siklus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025-2029. Sebagai fase transisi strategis, realisasi pada tahun pertama ini menjadi fondasi krusial untuk menentukan arah pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dalam lima tahun ke depan. Berikut ini uraian capaian kinerja masing-masing Sasaran Strategis RPJMD TAHUN 2025-2029 :

SASASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan daerah yang berkualitas. Sasaran strategis ini difokuskan pada penguatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui penerapan prinsip transparansi, efisiensi penggunaan anggaran, serta penegakan integritas aparatur.

Sasaran Strategis "Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas" merupakan turunan dari Misi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 yang ke-1 yakni "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas. Sasaran Strategis ini diukur dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yaitu : Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai SAKIP Pemerintah Daerah dan Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK. Ketiga instrumen ini menjadi standar baku dalam menilai sejauh mana birokrasi telah berjalan secara efisien, berorientasi hasil, dan bersih dari praktik korupsi.

Khusus untuk **Nilai SAKIP Pemerintah Daerah, substansi capaian dan analisis mendalamnya telah diuraikan secara rinci pada bagian realisasi kinerja sasaran strategis RPJMD 2021-2026**. Penjelasan tersebut mencakup tren perkembangan nilai serta efektivitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mendukung efisiensi penggunaan anggaran daerah. Dengan demikian, uraian berikut akan lebih memfokuskan pada progres Indeks Reformasi Birokrasi dan hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) sebagai penguat tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

A. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) merupakan instrumen utama untuk mengukur sejauh mana Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melakukan transformasi mendasar pada sistem tata kelola organisasi. Secara fundamental, pengukuran ini terbagi menjadi dua ranah utama, yaitu RB General dan RB Tematik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang diperkuat melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPANRB) Nomor 182 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Berikut ini perbandingan target dan realisasi capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025 :

Tabel 3.124
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Ideks Reformasi Birokrasi Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Interpretasi
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	80,00	76,34*	95,42	Berhasil

***Sumber** : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Padang Pariaman, 2026*

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berhasil mencatatkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 76,34 dari target yang ditetapkan sebesar 80,00. Dengan persentase capaian kinerja mencapai 95,42%, predikat pencapaian ini dikategorikan "Berhasil". Angka ini merefleksikan efektivitas penguatan RB General dalam memperbaiki tata kelola internal, serta akseleras

i RB Tematik yang berdampak langsung pada masyarakat.

Perlu ditegaskan bahwa angka realisasi 76,34 merupakan data sementara *(preliminary)* yang saat ini masih dalam tahapan verifikasi lanjutan dan periode sanggah. Nilai akhir (final) yang bersifat tetap diprediksi akan dirilis secara resmi oleh Kementerian PANRB pada Maret 2026.

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Adapun perbandingan realisasi Indikator Kinerja Utama “Indeks Reformasi Birokrasi” adalah sebagai berikut :

Tabel 3.125
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	TAHUN 2024			TAHUN 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	N/A	79,19	N/A	80,00	76,34*	95,42	Berhasil

***Sumber** : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Padang Pariaman, 2026*

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mencatatkan realisasi Indeks RB yang sangat kuat di angka 79,19. Memasuki tahun 2025, pemerintah menetapkan target yang lebih progresif sebesar 80,00 (naik dari capaian tahun sebelumnya). Meskipun realisasi sementara tahun 2025 tercatat sebesar 76,34, angka ini tetap menunjukkan performa birokrasi yang stabil dalam koridor standar kualitas yang tinggi.

Meskipun terdapat sedikit penurunan angka indeks secara nominal dari tahun 2024 ke 2025 (dari 79,19 ke 76,34), hal ini perlu dilihat secara objektif berkaitan dengan penerapan pedoman evaluasi baru melalui KepmenPANRB Nomor 182 Tahun 2024. Pengetatan kriteria pada aspek RB Tematik dan dampak nyata di lapangan menjadi tantangan baru yang sedang diadaptasi oleh perangkat daerah. Penting untuk Diperhatikan: Angka realisasi tahun 2025 sebesar 76,34 ini bersifat sementara karena

masih dalam masa sanggah dan verifikasi akhir dan berpotensi mengalami penyesuaian yang akan memperkuat posisi capaian daerah dalam peta Reformasi Birokrasi nasional.

Berikut adalah tabel hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dan Tahun 2025 :

Tabel 3.126
Hasil Evaluasi Indikator Kinerja
Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Penilaian	Bobot	2024	2025
A	RB General	100	69,25	66,8
B	RB Tematik	20	9,87	9,54
C	Indeks RB	120	79,12	76,34*
	Predikat		**BB**	**BB**

***Sumber** : Portal RB Nasional KemenPAN RB, 2026*

Secara keseluruhan, Indeks RB Kabupaten Padang Pariaman tercatat sebesar 76,34 pada tahun 2025 dari total bobot 120. Meskipun angka ini secara nominal berada di bawah capaian tahun 2024 (79,12), capaian tersebut masih dikategorikan berhasil karena mampu menjaga nilai di ambang batas predikat BB.

Terjadi pergeseran angka pada dua komponen utama penilaian sementara Indeks RB Tahun 2025:

- **RB General:** Realisasi pada tahun 2024 sebesar 69,25 mengalami penurunan menjadi 66,8 pada tahun 2025. Komponen ini tetap menjadi penyumbang bobot terbesar (100) dalam struktur penilaian, yang mencerminkan upaya berkelanjutan dalam perbaikan tata kelola internal.
- **RB Tematik:** Realisasi tahun 2024 sebesar 9,87 sedikit menurun menjadi 9,54 pada tahun 2025. Penurunan tipis ini mengindikasikan perlunya penguatan kembali pada aspek dampak nyata birokrasi terhadap isu-isu strategis seperti kemiskinan dan investasi.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Indeks Reformasi Birokrasi dengan Target Jangka Menengah 2025-2029

Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah 2025-2029:

Tabel 3.127
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 dengan Target RPJMD 2025-2029

Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Reformasi Birokrasi	80,00	82,00	83,00	85,00	86,00	76,34*	N/A	N/A	N/A	N/A

***Sumber** : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Padang Pariaman, 2026*

Pemerintah Daerah telah menetapkan target Indeks RB yang progresif, dimulai dari angka 80,00 pada tahun 2025 hingga mencapai 86,00 pada akhir periode (2029). Realisasi sementara pada tahun 2025 sebagai tahun pertama pada periode RPJMD 2025-2029 tercatat sebesar 76,34. Angka ini merepresentasikan pemenuhan sebesar 95,42% dari target tahunan yang ditetapkan. Meskipun realisasi ini berada sedikit di bawah target nominal (selisih 3,66

poin), capaian ini tetap memberikan landasan yang kuat untuk tahun-tahun berikutnya. Selisih tersebut menjadi bahan evaluasi bagi seluruh perangkat daerah untuk melakukan akselerasi pada komponen RB General dan Tematik agar selaras dengan peningkatan target di tahun 2026 (82,00).

d) Perbandingan Realisasi Capaian IKU dengan Realisasi Provinsi Tahun 2025

Hingga laporan ini disusun, perbandingan capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Padang Pariaman dengan realisasi rata-rata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 belum dapat disajikan secara komprehensif. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor teknis sebagai berikut:

- **Status Evaluasi Nasional:** Proses evaluasi oleh Kementerian PANRB terhadap seluruh pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota masih terus berjalan.
- **Periode Rilis Data:** Berdasarkan siklus penilaian nasional, hasil akhir evaluasi Indeks RB tahun 2025 dijadwalkan baru akan dirilis secara resmi pada Maret 2026.
- **Masa Sanggah:** Saat ini data realisasi Kabupaten Padang Pariaman sebesar **76,34** masih bersifat sementara karena sedang dalam tahapan verifikasi lanjutan dan masa sanggah, sehingga belum dapat diperbandingkan secara valid dengan angka final provinsi.

e) Analisis Program dan Kegiatan Pencapaian IKU

Sebagai upaya memperoleh Nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang maksimal, maka Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman didukung dengan beberapa program dan kegiatan pada tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.128
Program dan Kegiatan Pendukung IKU Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025

No	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 854.020.293.551,74	Rp. 874.457.106.085,00
2	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp. 326.293.500,00	Rp. 276.461.870,00
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 125.207.000,00	Rp. 106.848.130,00
4	Program Pengelolaan Arsip	Rp. 44.278.850,00	Rp. 42.711.250,00
7	Program Kepegawaian Daerah	Rp. 1.243.348.965,00	Rp. 851.769.114,00
9	Program Pegelolaan Keuangan Daerah	Rp. 1.629.224.760,00	Rp. 1.419.544.456,00
10	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 1.063.707.140,00	Rp. 816.307.299,00
11	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 1.288.805.800,00	Rp. 585.209.466,00
12	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 728.642.500,00	Rp. 688.471.008,00
13	Program Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 241.736.800,00	Rp. 229.194.305,00
15	Progran Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 592.335.047,20	Rp. 401.016.699,00
16	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp. 82.060.000,00	Rp. 75.871.800,00
	Jumlah	**Rp. 861.385.933.913,94**	**Rp. 879.950.511.482,00**

***Sumber** : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Berdasarkan hasil rekapitulasi terhadap program yang menjadi penopang Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun anggaran 2025, total alokasi Pagu Anggaran yang ditetapkan adalah sebesar Rp861.385.933.913,94. Total realisasi anggaran mencapai Rp879.950.511.482,00. Dengan demikian, jika dipersentasekan terhadap pagu, maka rata-rata capaian realisasi anggaran secara akumulatif adalah sebesar 102,15%.

Rangkaian Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2025 Kabupaten Padang Pariaman

1. Tahap Perencanaan: Penyusunan Rencana Aksi RB General dan Tematik

Sebagai langkah awal penguatan tata kelola pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah telah memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2025. Kegiatan ini dilakukan melalui koordinasi intensif dengan seluruh Perangkat Daerah penanggung jawab. Fokus perencanaan dibagi menjadi dua pilar utama:

- RB General: Menitikberatkan pada perbaikan tata kelola internal instansi pemerintah (penguatan institusi).
- RB Tematik: Difokuskan pada penyelesaian masalah hilir, dan tema yang menjadi prioritas nasional, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual Presiden serta menyusun Rencana Aksi untuk 4 (empat) tema RB Tematik terbaru tahun 2025, yaitu : RB Mendorong Hilirisasi, RB Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan, RB Mendorong Ketahanan Pangan, dan RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan.

Gambar 3.60
Penyusunan Rencana Aksi RB General dan Tematik Tahun 2025


PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
SEKRETARIAT DAERAH

Pariaman, 29 September 2025

Nomor : 000.8.6/6/ORG/IX/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rapat Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik pada Periode Transisi Tahun 2025

Kepada Yth
Kepala Perangkat Daerah (daftar terlampir)
di
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025, Tanggal 31 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025, menyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan regulasi selama proses penetapan *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045 dan Peraturan terkait Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RARBN) 2025-2026, maka instansi pemerintah diharapkan menyusun Rencana Aksi untuk 4 (empat) tema RB Tematik terbaru, yaitu: **RB Mendorong Hilirisasi, RB Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan, RB Mendorong Ketahanan Pangan, dan RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan.**

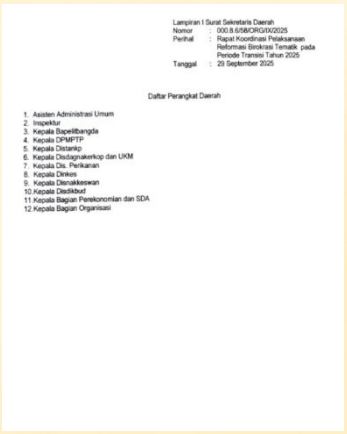
Menindaklanjuti hal tersebut, dan dengan telah dimulainya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2025, perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2025 dan realisasinya sampai dengan triwulan III tahun 2025.

Untuk itu, diminta kehadiran Saudara bersama pejabat teknis yang membidangi dengan membawa data terkait pada :

Hari / Tanggal : Kamis/02 Oktober 2025
Waktu : 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Rapat LPSE Lt. III RK Parit Malintang
Agenda : Pembahasan Pelaksanaan Rencana Aksi RB Tematik pada Periode Transisi Tahun 2025

Demikian disampaikan agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,


Lampiran I Surat Sekretaris Daerah
Nomor : 000.8.6/6/ORG/IX/2025
Perihal : Rapat Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik pada Periode Transisi Tahun 2025
Tanggal : 29 September 2025

Daftar Perangkat Daerah

1. Asisten Administrasi Umum
2. Inspektur
3. Kepala Bapelitbangda
4. Kepala DPMPTP
5. Kepala Distarkp
6. Kepala Disdagnakerkop dan UKM
7. Kepala Dis. Perikanan
8. Kepala Dinkes
9. Kepala Dinsikkeswan
10. Kepala Disdikbud
11. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA
12. Kepala Bagian Organisasi

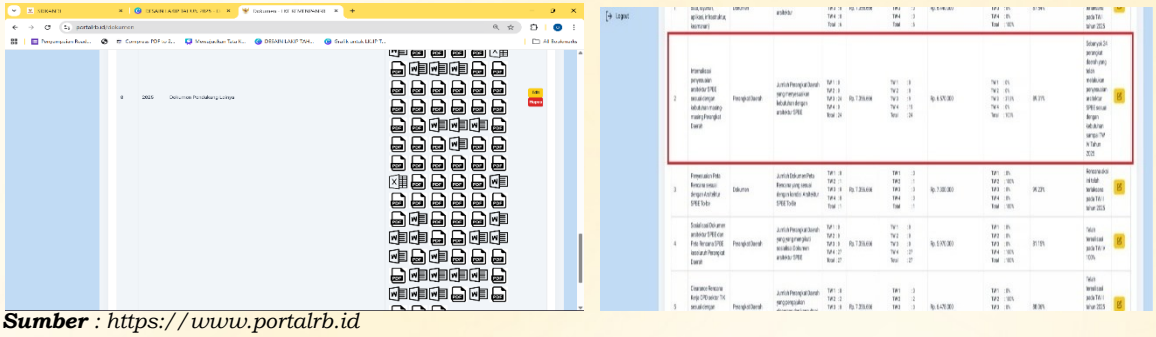


2. Pelaporan dan Monitoring Pelaksanaan RB *(On-Going)*

Sepanjang tahun anggaran 2025, Bagian Organisasi sebagai admin pemerintah daerah secara berkala melaporkan hasil perencanaan dan progres pelaksanaan RB yang diberikan oleh perangkat daerah penanggungjawab pelaksanaan RB Tahun 2025 melalui kanal pelaporan resmi Portal RB Nasional KemenPAN RB. Pemantauan dilakukan secara *ongoing* (berkelanjutan) dari Triwulan (TW) I sampai dengan IV. Laporan ini mencakup capaian

indikator kinerja utama serta pemenuhan bukti dukung (*evidence*) yang telah dikerjakan oleh masing-masing unit kerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Aksi.

Gambar 3.61
Monitoring Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi RB General Dan Tematik Tahun 2025 Pada Portal RB



***Sumber** : https://www.portalrb.id*

3. Mekanisme Pengendalian: Reviu Internal oleh Inspektorat

Untuk menjamin akuntabilitas dan validitas data capaian, Inspektorat melakukan reviu internal. Proses reviu ini dilakukan melalui dua pendekatan:

- Reviu Ex-Ante: Dilakukan pada tahap awal untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan dan Rencana Aksi telah selaras dengan pedoman terbaru dari Kementerian PANRB.
- Reviu Ongoing (TW I s.d. IV): Dilakukan di setiap akhir triwulan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta memberikan rekomendasi perbaikan secara tepat waktu sebelum periode evaluasi nasional dimulai.

Gambar 3.62
LHE Ex-Ante dan On Going RB Tahun 2025



***Sumber** : Inspektorat Kab. Padang Pariaman, 2025*

f) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan

Faktor penunjang keberhasilan indikator kinerja "Indeks Reformasi Birokrasi" adalah sebagai berikut :

1. Adanya penyusunan Rencana Aksi RB General dan Tematik yang melibatkan seluruh perangkat daerah penanggung jawab memastikan setiap indikator memiliki target yang jelas.
2. Pelaksanaan reviu internal oleh Inspektorat, baik secara *ex-ante* (sebelum pelaksanaan) maupun *ongoing* (saat pelaksanaan) dari Triwulan I hingga IV, berfungsi sebagai filter untuk menjaga kualitas bukti dukung (*evidence*) sebelum dinilai oleh tim pusat.
3. Kedisiplinan dalam melaporkan hasil perencanaan dan pelaksanaan RB secara berkala (TW I s.d. IV) memastikan progres kegiatan terpantau dan hambatan dapat dideteksi lebih dini.
4. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang intensif menciptakan stabilitas sosial yang mendukung kelancaran program-program strategis di lapangan.

Disamping faktor pendukung tersebut, terdapat juga faktor yang menghambat pencapaian kinerja antara lain :

1. Fokus birokrasi yang masih sangat kuat pada aspek administrasi internal membuat dampak nyata di masyarakat (seperti penurunan angka kemiskinan atau peningkatan investasi) belum terlihat signifikan pada nilai RB Tematik;
2. Kesenjangan Kompetensi SDM;
3. Lemahnya Kualitas Bukti Dukung (kegiatan sudah dilaksanakan, namun pendokumentasian secara sistematis sesuai standar portal RB Nasional belum maksimal);
4. Kurangnya kesadaran atau komitmen dari perangkat daerah pengampu dalam pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi serta pelaporan dalam pelaksanaan terbut.

Adapun beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut adalah :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi tidak hanya di akhir tahun, tetapi sejak penyusunan Rencana Aksi (Ex-Ante) untuk memastikan program kerja sudah tepat sasaran dan terealisasi dengan baik;
2. Membangun sistem monitoring internal yang dapat memantau progres pengisian data per perangkat daerah secara transparan, sehingga pimpinan daerah dapat melihat langsung perangkat daerah mana yang menghambat capaian indeks.

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.129
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Indeks Refromasi Birokrasi Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	95,42%	102,15%	-6,73%

***Sumber** : Bagian Organisasi Setda Kab. Padang Pariaman, 2025*

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Hal ini dibuktikan dengan raihan Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi (RB) sebesar 95,42%. Angka ini merepresentasikan keberhasilan hampir menyeluruh dalam memenuhi target-target strategis RB, yang mencakup perbaikan tata kelola internal maupun upaya konkret pada sektor RB Tematik. Penyerapan anggaran mencapai 102,15%. Melampauinya angka 100% ini dipandang sebagai bentuk responsivitas pemerintah dalam menghadapi dinamika kebutuhan di lapangan selama tahun 2025. Penyerapan ini mencerminkan tingginya intensitas kegiatan pendukung yang dilakukan demi mengejar target indeks RB, termasuk percepatan koordinasi lintas sektoral dan pemenuhan bukti dukung yang bersifat mendesak.

Interpretasi Tingkat Efisiensi sebesar -6,73% dipahami bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai sebuah investasi sumber daya untuk menjaga stabilitas kinerja. Selisih ini menjadi indikator penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan kalibrasi ulang dalam perencanaan anggaran di periode mendatang. Fokus ke depan adalah bagaimana menyelaraskan efisiensi pembiayaan agar tetap sebanding dengan capaian output yang sudah sangat baik ini. Capaian kinerja yang mendekati target 100% merupakan prestasi yang patut dipertahankan. Pemerintah berkomitmen untuk terus menyempurnakan ketepatan perencanaan anggaran (Pagu) agar sejalan dengan realitas pelaksanaan di lapanga, langkah ini bertujuan untuk mengubah angka efisiensi menjadi positif.

B. Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK

Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK adalah survei nasional yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengukur tingkat integritas dan risiko korupsi pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. SPI menilai persepsi dan pengalaman pegawai internal, pengguna layanan, serta mitra kerja terhadap praktik pelayanan publik, budaya organisasi, dan sistem pengendalian internal. Hasil SPI berupa skor 0–100 yang digunakan sebagai alat pencegahan (*early warning system*) untuk mengidentifikasi area rawan korupsi dan mendorong perbaikan tata kelola, bukan sebagai audit atau dasar sanksi individu.

Pelaksanaan SPI menjadi bagian dari upaya penguatan integritas dan reformasi birokrasi. Skor SPI digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja instansi dan pimpinan, penyusunan rencana aksi perbaikan, serta penentuan prioritas pembinaan dan pengawasan. Keikutsertaan dan kejujuran responden dilindungi karena survei bersifat anonim dan berorientasi pada perbaikan sistem, bukan penghukuman. Berikut perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Survey Penilaian Integritas Tahun 2025:

a) Perbandingan Target dengan Realisasi IKU "Survey Penilaian Integritas" Tahun 2025

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan Berdaya Saing melalui Inspektorat Daerah telah melakukan berbagai Upaya selama tahun 2025. Salah satunya meningkatkan nilai Survey Penilaian Integritas di daerah. Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Nilai Survey Penilaian Integritas :

Tabel 3.130
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Survey Penilaian Integritas Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK	Nilai	78	65,50	83,97	Berhasil

Sumber : *Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Target nilai SPI yang ditetapkan sebesar 78, sedangkan realisasi yang diperoleh mencapai 65,50. Dengan demikian, persentase capaian kinerja tercatat sebesar 83,97 persen, yang mencerminkan tingkat pencapaian kinerja yang cukup baik meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

b) Perbandingan Realisasi IKU "Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten" Tahun 2024 dan Tahun 2025

Berikut ini Adalah perbandingan target dan realisasi Nilai Survey Penilaian Integritas di daerah pada tahun 2024 dan tahun 2025 :

Tabel 3.131
Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK
Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK	Nilai	NA	68,50	NA	78	65,50	83,97	Berhasil

Sumber : *Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya diketahui terdapat sedikir penurunan nilai yaitu pada tahun 2024 dengan nilai 68,50 dan pada tahun 2025 dengan nilai 65,50. Namn perbandingan capaian kinerja tidak bisa dianalisa dikarenakan SPI KPK merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang baru diterapkan di tahun 2025.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025-2029 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.132
Perbandingan Realisasi IKU Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK
dengan Target RPJMD 2025-2029

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK	Nilai	78	78,4	78,8	79,2	79,6	65,50	NA	NA	NA	NA

Sumber : *Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Tahun 2025 merupakan awal dari pelaksanaan RPJMD 2025 s.d 2029, indikator Survey Penilaian Integritas salah satu indikator yang terdapat dalam RPJMD yang mendukung tercapainya misi ke-1. Dalam tabel bisa dilihat bahwa capaian 2025 yaitu 65,50 dengan target 78.

d) Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tahun 2025 dengan Capaian Regional dan Nasional

Gambar 3.63
Perbandingan Capaian SPI Padang Pariaman
dengan Capaian Regional dan Nasional



Sumber : *Jaga.id KPK RI*

Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tercatat sebesar 65,50, yang berada di bawah Indeks Nasional sebesar 72,32 serta di bawah rerata nilai se-Provinsi Sumatera Barat sebesar 73,03., Berdasarkan hal tersebut diperlukan penguatan tata kelola, budaya integritas, serta perbaikan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

e) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketercapaian indikator Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung
   - Komitmen pimpinan daerah dan pimpinan perangkat daerah dalam mendukung kebijakan pencegahan korupsi secara konsisten.
   - Tersedianya regulasi internal seperti kode etik ASN, pengendalian gratifikasi, dan sistem pengaduan masyarakat.
   - Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mulai mengarah pada pengawasan berbasis risiko.
   - Penerapan digitalisasi layanan publik yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
   - Meningkatnya kesadaran sebagian ASN dan unit layanan terhadap pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Faktor Penghambat
   - Budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung nilai integritas dan antikorupsi.

- Pemahaman ASN dan pelaksana layanan terhadap tujuan dan manfaat SPI KPK yang masih terbatas.
- Pengendalian internal dan manajemen risiko yang belum berjalan optimal di seluruh perangkat daerah.
- Kualitas dan standar pelayanan publik yang belum merata antar unit kerja.
- Tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan dan hasil SPI yang belum sepenuhnya konsisten dan terukur.

3. Solusi dan Strategi Perbaikan
   - Memperkuat keteladanan pimpinan melalui kebijakan nyata dan penegakan disiplin yang adil dan konsisten.
   - Meningkatkan sosialisasi dan internalisasi SPI KPK kepada ASN dan unit layanan secara berkelanjutan.
   - Mengoptimalkan peran APIP dalam pengawasan, manajemen risiko, dan pemantauan tindak lanjut.
   - Meningkatkan kualitas serta transparansi pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur dan digitalisasi.
   - Menjabarkan hasil dan rekomendasi SPI KPK ke dalam rencana aksi perbaikan yang terintegrasi dengan dokumen kinerja daerah.

f) Analisis Program dan Kegiatan Pencapaian IKU "Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK"

Untuk mencapai indikator kinerja Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK di daerah. Inspektorat Daerah melaksanakan 2 program yang mendukung pencapaian target antara lain, yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan anggaran Rp592.335.047.2 dengan realisasi Rp584.399.699 atau 98.66% dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan anggaran Rp82.060.000 dengan realisasi Rp75.871.800 atau 92,46%. Program pengawasan di Inspektorat dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sebagian besar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan pencegahan, karena peran Inspektorat saat ini yaitu sebagai *early warning system*. Pengawasan Inspektorat dilakukan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, dan asistensi. Beberapa bentuk pengawasan yang telah dilakukan oleh Inspektorat pada tahun 2025 yaitu :

1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah seperti Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, Reviu Pelayanan Publik, dan lainnya
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah seperti Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah, Reviu Pengarusutamaan Gender (PUG), Reviu DAU yang Ditentukan Penggunannya.
3. Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Publik (SAKIP) pada seluruh perangkat daerah.
4. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, SKPD, dan BLUD.
5. Pengawasan Desa.
6. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal.

7. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu seperti Audit BOS, Penanganan Pengaduan Masyarakat, Probity Audit, dan lainnya.
8. Asistensi dan Pendampingan Manajemen Risiko, Evaluasi Zona Integritas,
9. Koordinasi *Monitoring, Controlling, Surveillance, For Prevention* (MCSP) Tahun 2025.
10. Monitoring dan Pendampingan Pelaporan LHKPN Penyelenggaran negara di daerah.

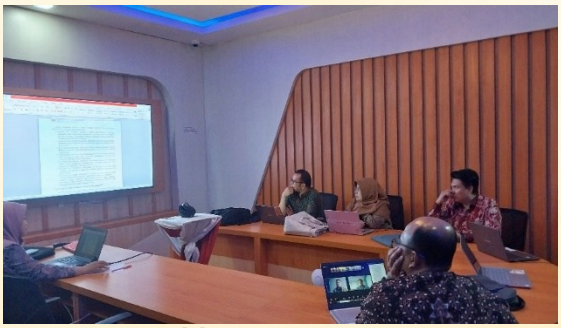
Gambar 3.64
Pelaksanaan Kegiatan Capaian Indikator Kinerja
Survei Penilaian Integritas (SPI)



Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dan Sosialisasi Anti Korupsi



Pelaksanaan Reviu LKPD



Pelaksanaan Reviu LKJIP



Evaluasi Zona Integritas

Sumber : *Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Gambar 3.65
Asistensi Nagari



Gambar 3.66
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP



g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut analisa efisiensi pada Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terhadap capaian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.133
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP

Keterangan	Target/Anggaran	Realisasi	Capaian
Efisiensi Capaian Kinerja	78	65,50	83,97%
Efisiensi Penyerapan Anggaran	Rp.674.395.047	Rp660.271.499	97,91%

Keterangan	Target/Anggaran	Realisasi	Capaian
Efisiensi Capaian Kinerja	100%	83,97%	16,03%
Efisiensi Penyerapan Anggaran	100%	97,91%	2,09%
Total Efisiensi			-13,94%

Sumber : *Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Capaian kinerja Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK mencapai 83,97% dari target yang ditetapkan, sementara penyerapan anggaran mencapai 97,91% dari total anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa output kinerja yang dihasilkan belum sepenuhnya sebanding dengan besarnya sumber daya anggaran yang digunakan, sehingga secara relatif efisiensi pelaksanaan program masih perlu ditingkatkan. Dilihat dari sisi selisih terhadap kondisi ideal (100%), terdapat gap efisiensi kinerja sebesar 16,03%, sedangkan gap efisiensi penyerapan anggaran hanya 2,09%. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran sudah cukup optimal dari sisi penyerapan, namun efektivitasnya dalam menghasilkan capaian kinerja belum maksimal.

SASASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Peran Riset dan inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sisten pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaran pemerintah daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan yang menjadi kewenangan. Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah. Data Indeks Inovasi Daerah merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 386 menyatakan bahwa "Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi". Sebagai bentuk penjabaran dari perundangan tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, pada pasal 2 huruf (b) disebutkan bahwa"Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memacu dan memotivasi pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan Inovasi dan kreativitas sesuai dengan bentuk Inovasi". Sejalan dengan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, telah terbit pula Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah, dimana Bupati Padang Pariaman melalui Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mendorong semua pihak untuk melakukan inovasi.

Sasaran Strategis "Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah" merupakan sasaran strategis yang terdapat pada Misi ke-1 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini secara terukur dan objektif, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menetapkan Indeks Inovasi Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RPJMD 2025-2029. Pemilihan indikator ini didasarkan pada urgensi penciptaan ekosistem kompetisi positif antar-perangkat daerah dalam melahirkan terobosan pelayanan publik maupun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan inovatif.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Berikut ini perbandingan target dan realisasi capaian kinerja Indeks Inovasi Daerah tahun 2025 :

Tabel 3.134
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Interpretasi
Indeks Inovasi Daerah	Indeks	87,72	82,48	94,03	Berhasil

***Sumber** : Bapelitbangda, 2025*

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berhasil mencatatkan nilai Indeks Berdasarkan hasil pemetaan Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2025 yang telah dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6097 Tahun 2025 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Kabupaten Padang Pariaman berada pada peringkat ke-24 Tingkat Nasional dengan skor nilai indeks 82,48.

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Adapun perbandingan realisasi Indikator Kinerja Utama "Indeks Inovasi Daerah" Tahun 2024 dan Tahun 2025 :

Tabel 3.135
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	TAHUN 2024			TAHUN 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Inovasi Daerah	Indeks	-	85,73	-	87,72	82,48	94,03	Berhasil

***Sumber** : Bapelitbangda, 2025*

Pada tahun 2024, Kabupaten Padang Pariaman mencatatkan realisasi skor yang sangat tinggi sebesar 85,73. Angka ini menjadi basis penetapan target yang optimis untuk tahun 2025 sebesar 87,72. Meskipun realisasi tahun 2025 berada pada angka 82,48, capaian kinerja tetap berada pada level 94,03% dengan interpretasi "Berhasil".

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Indeks Inovasi Daerah dengan Target Jangka Menengah 2025-2029

Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi capaian indikator Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah 2025-2029:

Tabel 3.136
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025
dengan Target RPJMD 2025-2029

Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Inovasi Daerah	87,72	88,3	88,87	89,44	90,04	82,48	N/A	N/A	N/A	N/A

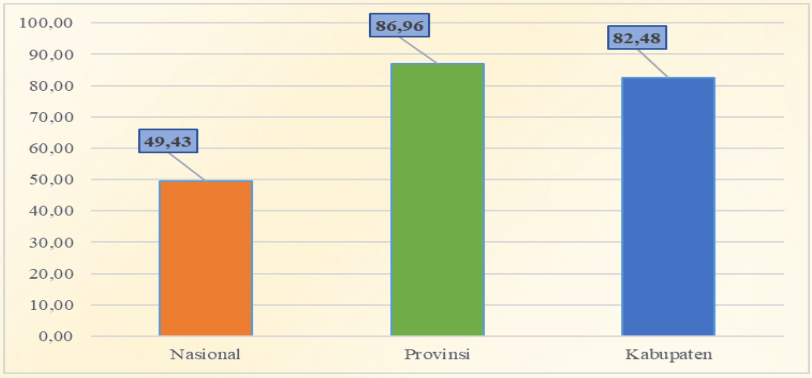
***Sumber** : Bapelitbangda, 2025*

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menetapkan target progresif dalam RPJMD, yang dimulai dari skor 87,72 pada tahun 2025 dan diproyeksikan meningkat secara konsisten hingga menyentuh angka 90,04 pada tahun 2029. Realisasi kinerja pada tahun 2025 sebesar 82,48 menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil mencapai 94,03% dari target tahun pertama.

d) Perbandingan Realisasi Capaian IKU dengan Realisasi Provinsi dan Nasional Tahun 2025

Berikut ini adalah perbandingan realisasi IKU Kabupaten, Provinsi dan Nasional terkait Indeks Inovasi Daerah :

Grafik 3.31
Perbandingan Realisasi Kinerja Kabupaten, Provinsi dan Nasional Terkait Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025



***Sumber** : Bapelitbangda, 2025*

e) Analisis Program dan Kegiatan Pencapaian IKU

Program yang terkait dengan Indeks Inovasi Daerah adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan anggaran Rp.507.802.400 realisasi Rp.446.447.349. Persentase capaian penyerapan anggaran adalah sebesar 87,92%.

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang pencapaian Indeks Inovasi Daerah antara lain :

1. Melakukan Identifikasi Masalah dan Peluang (Rapat Koordinasi Inovasi dan Coaching Clinic)
2. Pengembangan Kapasitas SDM (Workshop Pengelola Inovasi, Bimbingan teknis Inovasi)
3. Kolaborasi dan jejaring (Pendampingan Inovasi Masyarakat)
4. Monitoring, evaluasi dan Pembelajaran (Evaluasi Berkala, Monitoring Inovasi OPD)
5. Alokasi Sumberdaya (Menyusun Roadmap)
6. Pembentukan Ekosistem Inovasi (Membentuk SK Tim, Tim Inovasi Daerah).

Gambar 3.67
Validasi lapangan *Innovative Government Award* (IGA) 2025 di Kabupaten Padang Pariaman berlangsung pada November 2025



***Sumber** : Bapelitbangda, 2025*

Gambar 3.68
Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, Memaparkan Inovasi Daerah pada Ajang *Innovative Government Award* (IGA) 2025 di Kemendagri pada November 2025



***Sumber** : Bapelitbangda, 2025*

h) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan

Faktor penunjang keberhasilan indikator kinerja "Indeks Inovasi" adalah sebagai berikut :

1. Kepemimpinan dan komitmen organisasi
2. Sumber Daya Manusia (SDM), dengan mengadakan pelatihan, workshop, dan peningkatan kapasitas inovasi.
3. penghargaan atau reward untuk inovasi.

Disamping faktor pendukung tersebut, terdapat juga faktor yang menghambat pencapaian kinerja antara lain :

1. Terbatasnya pengembangan teknologi tepat guna yang relevan dengan potensi dan masalah daerah.
2. Belum terbangunnya ekosistem inovasi yang inklusif dan kolaboratif
3. Kebijakan belum sepenuhnya berbasis bukti *(evidence-based policy)*
4. Kurangnya fasilitas kolaboratif antara perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pemerintah daerah.

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian Indeks Inovasi Daerah adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Regulasi dan Kebijakan Inovasi
2. Peningkatan Kapasitas SDM
3. Penguatan Tata Kelola dan Dokumentasi
4. Penguatan Ekosistem Inovasi
5. Monitoring dan Evaluasi Berkala

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut tabel perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggaran indikator kinerja tahun 2025 :

Tabel 3.137
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	94,03%	87,92%	6,11%

Efisiensi capaian kinerja = 94,03% -100% = -5,97%
Efisiensi penyerapan anggaran = 100% - 87,92% = 12,08%
Total Efisiensi = -5,97% + 12,08% = 6,11%
Efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator ini sebesar 12,08% dan efisiensi kinerja sebesar -5,97%. Sehingga total efisiensi pada indikator kinerja ini sebesar 6,11%, yang dapat diasumsikan efisiensi sumberdaya pada pencapaian indikator Indeks Inovasi Daerah "sangat baik".

g) Penghargaan-Penghargaan Yang Diperoleh Tahun 2025

Gambar 3.69
Penghargaan Indeks Inovasi Daerah Tertinggi Tahu 2025



***Sumber** : Bapelitbangda, 2025*

SASASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Transformasi Digital Pelayanan Publik

Dalam upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menetapkan Sasaran 3, yaitu "Meningkatnya Transformasi Digital Pelayanan Publik". ntuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut, digunakan dua indikator kinerja utama sebagai instrumen evaluasi, yakni:

1. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik): Indikator ini memotret tingkat kematangan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah daerah secara menyeluruh.
2. Indeks Pemerintahan Digital Indonesia (Pemdi): Indikator ini berfokus pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan digital yang berorientasi pada kualitas output pelayanan publik dan keterpaduan data.

Mengingat **Indeks SPBE merupakan indikator yang terdapat dalam dua periode perencanaan sekaligus, yakni RPJMD 2021–2026 dan RPJMD 2025–2029, maka uraian detail mengenai realisasi kinerjanya telah dipaparkan pada bagian evaluasi RPJMD periode 2021–2026 pada Sasaran "Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel" guna menjaga konsistensi pelaporan capaian antar-periode.**

Berbeda dengan SPBE, indikator Pemerintahan Digital Indonesia (Pemdi) merupakan indikator kinerja baru yang baru diaduksi dalam perencanaan terkini. Oleh karena itu, indikator Pemdi belum memiliki target pada tahun 2025 dan saat ini masih dalam tahap pengumpulan data dasar (*baseline*) serta penyesuaian instrumen pengukuran nasional.

SASASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas dan Berdaya Saing

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas dan Berdaya Saing merupakan perwujudan langsung dari pelaksanaan Misi ke-2 dalam dokumen RPJMD 2025–2029. Fokus utama sasaran ini adalah memastikan setiap individu di Padang Pariaman memiliki kompetensi yang unggul dan relevan dengan kebutuhan zaman. Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja utama, yaitu:

1. Rata-Rata Lama Sekolah : Indikator Rata-Rata Lama Sekolah merupakan instrumen kinerja yang bersifat berkelanjutan karena terdapat dalam dua periode perencanaan, yakni RPJMD 2021–2026 dan RPJMD 2025–2029. Oleh karena itu, uraian mendalam mengenai realisasi kinerja indikator ini telah dipaparkan pada bagian evaluasi berdasarkan RPJMD periode 2021-2026.
2. Harapan Lama Sekolah.
3. Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada *assessment* tingkat Nasional :
   - Literasi.
   - Numerasi.

A. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah merupakan indikator kualitas penduduk yang memberikan gambaran mengenai masa depan pendidikan di suatu daerah. Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang yang merupakan cerminan dari investasi modal manusia. Semakin tinggi angka HLS, semakin besar peluang daerah tersebut memiliki angkatan kerja yang cerdas, memiliki literasi tinggi, dan berdaya saing di masa depan. Berdasarkan data dari "Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2026", diketahui bahwa Harapan Lama Sekolah pada tahun 2025 tercatat sebesar 14,21 tahun. Secara teoritis, angka ini mencerminkan peluang atau prospek pendidikan bagi generasi muda, di mana anak-anak di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2025 diharapkan memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi. Berikut adalah tabel perbandingan target dan realisasi kinerja Harapan Lama Sekolah :

(a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Berikut ini perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2025 :

Tabel 3.138
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Interpretasi
Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,42	14,21	98,54	Berhasil

***Sumber** : Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka 2026*

Pada tahun 2025 capaian Harapan Lama Sekolah adalah 14,21 dari target 14,42 dengan persesntase capaian sebesar 98,45% predikat "Berhasil". Capaian tersebut mengambarkan bahwa anak-anak usia sekolah di daerah ini memiliki peluang menempuh pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi.

(b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Adapun perbandingan realisasi Indikator Kinerja Utama " Harapan Lama Sekolah" adalah sebagai berikut :

Tabel 3.139
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	TAHUN 2024			TAHUN 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,27	14,20	99,51	14,42	14,21	98,54	Berhasil

***Sumber** : Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka 2026*

Realisasi indikator kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2024 sebesar 14,20 tahun dan pada tahun 2025 meningkat menjadi 14,21 tahun. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun peningkatan tersebut relatif kecil, tren ini tetap mencerminkan arah yang positif dalam pembangunan sektor pendidikan. Kenaikan HLS mengindikasikan adanya keberlanjutan akses pendidikan serta meningkatnya peluang anak usia sekolah untuk menempuh pendidikan dalam jangka waktu yang lebih lama. Peningkatan yang kecil ini juga menunjukkan bahwa program perluasan akses, penanganan anak putus sekolah, serta dukungan pembiayaan pendidikan masih berjalan dan memberikan dampak, walaupun belum signifikan.

(c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU dengan Target Jangka Menengah

Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah :

Tabel 3.140
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah dengan Target RPJMD Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Harapan Lama Sekolah	14,42	14,56	14,68	14,85	14,98	14,21	-	-	-	-

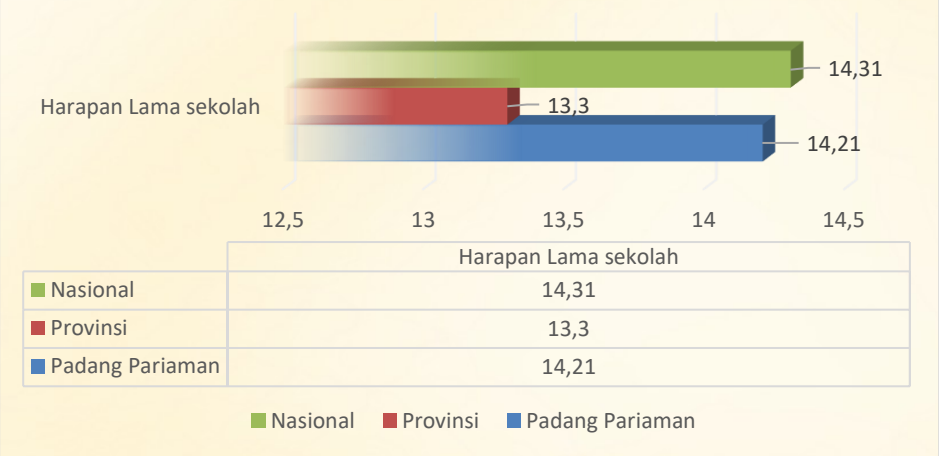
***Sumber** : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Realisasi Indikator Kinerja "Harapan Lama Sekolah" Pada tahun pertama periode RPJMD 2025–2029, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menetapkan target sebesar 14,42 tahun. Berdasarkan data realisasi yang tercatat sebesar 14,21 tahun, maka capaian kinerja pada tahun 2025 berada pada angka 98,54%. Meski secara nominal terdapat

selisih tipis sebesar 0,21 poin, capaian ini menunjukkan performa yang sangat stabil dan mendekati target yang direncanakan. Melalui konsistensi program pendidikan yang cerdas dan inklusif, Kabupaten Padang Pariaman berada pada jalur yang tepat untuk mewujudkan SDM unggul yang menjadi syarat mutlak pencapaian seluruh target pembangunan dalam periode RPJMD ini.

(d) Perbandingan Realisasi Capaian IKU dengan Realisasi Provinsi Tahun 2025

Grafik 3.32
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2025 Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional



***Sumber** : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Pada tahun 2025 capaian harapan lama sekolah kabupaten Padang Pariaman berada dibawah capaian Nasional dengan selisih 0.1 sementara jika dibandingkan dengan capaian Provinsi, harapan lama sekolah kabupaten Padang Pariaman unggul dengan selisih sebesar 0,91. Kondisi ini menggambarkan bahwa secara umum akses dan partisipasi pendidikan di Kabupaten sudah relatif baik dibandingkan dengan tingkat nasional. Posisi tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk usia sekolah di Kabupaten memiliki peluang yang cukup besar untuk mengenyam pendidikan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam memperluas akses pendidikan menengah dan tinggi, meningkatkan keberlanjutan sekolah, serta menekan angka putus sekolah, khususnya pada kelompok rentan.

(e) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja

Program yang mendukung Harapan lama sekolah yaitu program pengelolaan pendidikan dan program pendidik dan tenaga kependidikan dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama.
   Dukungan pembiayaan pendidikan dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik melalui penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tingkat satuan SD dan SMP. Bantuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak usia sekolah

mendapatkan hak nya untuk memperoleh pendidikan tanpa dibebankan biaya sekolah sehingga dapat mencegah angka putus sekolah.Anggaran pengelolaan dana BOS sekolah dasar pada tahun 2025 adalah sebesar Rp.41.894.700.000,00 dan BOS SMP sebesar Rp. 16.381.200.000,00.

2. Pengadaan perlengkapan peserta didik SD
   Pemerintah daerah berperan dalam memberikan bantuan biaya sekolah berupa pemberian seragam sekolah kepada peserta didik baru tingkat SD. Bantuan pengadaan seragam diberikan kepada 6.862 siswa baru tingkat SD pada tahun 2025 dengan anggaran Rp. 2.734.197.455,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.284.787.142,00
3. Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas dan sarana prasarana sekolah
   Infrastruktur sekolah menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan rata-rata lama sekolah. Bangunan sekolah yang layak dan aman serta sarana dan prasarana pendidikan yang memadai akan menumbuhkan minat untuk bersekolah. Pada tahun 2025 total anggaran untuk Pembangunan ruang kelas untuk tingkat SD adalah sebesar Rp 7.648.476.787,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.031.795.557,00.
4. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
   Kegiatan ini untuk memastikan proses pembelajaran dan kegiatan evaluasi pembelajaran/ujian disatuan pendidikan nonformal/kesetaraan. Proses pembelajaran yang dimaksud yaitu paket A (setingkat SD) Paket B (setingkat SMP) dan Paket C (setingkat SMA). Saat ini terdapat 9 (sembilan) satuan Pendidikan nonformal yang ada di kabupaten padang pariaman sebagai alternatif untuk pengentasan angka putus sekolah.Pada tahun 2025 anggaran Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik kesetaraan sebesar Rp.37.620.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 21.600.000,00.
5. Penyediaan Pendidik dan tenaga kependidikan
   Kondisi keterbatasan tenaga pendidik pada jenjang Pendidikan SD dan SMP dipenuhi dengan tambahan tenaga pendidik dan kependidikan yang bersifat honor yang didukung oleh anggaran berupa insentif kepada guru honor, operator dan penjaga sekolah. Pada jenjang SD diberikan pagu anggaran sebesar Rp.7.338.887.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.7.091.350.000,00 atau sebesar 96.63%. Sementara untuk jenjang SMP diberikan pagu sebesar Rp 1.464.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 1.359.000.000,-
6. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan
   Kegiatan ini berfokus untuk meningkatkan kualitas bagi pendidik (guru) dengan mengutamakan beberapa program seperti peningkatan kapasitas dan kualitas guru mengajar melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Selain itu program nasional yaitu guru penggerak yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mengembangkan nilai kepemimpinan bagi tenaga pendidik. Anggaran pengembangan karir pendidik di tingkat SD adalah sebesar Rp. 18.089.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.050.560,- dan Anggaran untuk tingkat SMP Rp. 26.976.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.850.000,-

Secara akumulatif, dukungan anggaran untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2025 adalah sebesar Rp.77.544.146.242,00. Dari total pagu tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

berhasil merealisasikan sebesar Rp.17.811.433.259 atau mencapai persentase realisasi anggaran sebesar 23%.

Gambar 3.70
Monitoring Proses Pembelajaran di Satuan Pendidikan



Gambar 3.71
Proses Belajar di Satuan Pendidikan PKBM (Paket A, B dan C)



Gambar 3.72
Kegiatan Verval Angka Tidak Sekolah Dalam Pemetaan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Padang Pariaman



***Sumber** : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

f) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Serta Solusi Yang Telah Dilakukan

Faktor penunjang keberhasilan indikator kinerja "Harapan Lama Sekolah" adalah sebagai berikut :

1. Program wajib belajar 13 tahun yang mewajibkan anak usia sekolah untuk mengikuti pendidikan. Program tersebut didukung dengan bantuan pembiayaan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah melalui dana BOS dan PIP.
2. Perluasan akses pendidikan dengan menyediakan sekolah dari tingkat dasar sampai menengah dengan sarana prasarana yang layak dan Lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.
3. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan.
4. Siswa yang dari keluarga kalangan ekonomi memadai cendrung untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih lanjut.
5. Tenaga pendidik yang berkualitas.

Disamping faktor pendukung tersebut, terdapat juga faktor yang menghambat pencapaian kinerja antara lain :

1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat masih menjadi tantangan utama, terutama bagi keluarga rentan yang menghadapi keterbatasan biaya pendidikan tidak langsung seperti transportasi, perlengkapan sekolah, dan kebutuhan pendukung lainnya sehingga anak usia sekolah rentan menjadi putus sekolah.
2. Keterbatasan akses pendidikan mengakibatkan peluang dan potensi anak untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi menurun sehingga berdampak rendahnya angka harapan lama sekolah. Sebaliknya, ketika akses pendidikan diperluas melalui pembangunan unit sekolah baru, peningkatan sarana dan prasarana, penyediaan transportasi sekolah, serta pemberian bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, maka angka partisipasi sekolah cenderung meningkat. Kondisi tersebut akan mendorong kenaikan proyeksi lama sekolah yang diharapkan.
3. Angka putus sekolah yang masih tinggi dikabupaten Padang Pariaman yang masih tinggi. Bedasarkan data dari verval angka tidak sekolah Kemendikdasmen terdapat 3.263 putus sekolah dari tingkatan SD sampai SMA dan 2.444 anak yang lulus tidak melanjutkan.

Adapun beberapa upaya yang dilakukan mengatasi hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Pengembangan pendidikan nonformal/kesetaraan (Paket A, B dan C) sebagai alternatif dalam mengatasi putus sekolah.
2. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan yang dilakukan melalui Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas, Pembangunan/rehabilitasi ruang laboratorium dan Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana..
3. Penguatan program zonasi/domisili dalam proses Penerimaaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang membantu memastikan anak usia sekolah memperoleh tempat belajar yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya sehingga mengurangi risiko putus sekolah akibat jarak dan biaya transportasi.

4. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan pelatihan dan pengembangan kompetensi melalui salah satu nya dengan kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).
5. Penguatan pemantauan dan pencegahan putus sekolah dimana Dinas pendidikan bekerja sama dengan sekolah dan nagari dalam mengidentifikasi siswa yang putus sekolah maupun yang berpotensi untuk putus sekolah.

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.141
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas dan Berdaya Saing	Harapan Lama Sekolah	98,54%	23%	75,54%

***Sumber** : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas dan Berdaya Saing melalui indikator Harapan Lama Sekolah pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang memuaskan dengan capaian kinerja sebesar 98.54% (melampaui target). Efektivitas program ini didukung oleh penyerapan anggaran yang optimal sebesar 23%, sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sumber daya sebesar 75,54%. Hal ini mengonfirmasi bahwa alokasi anggaran pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman telah dikelola secara produktif dan tepat sasaran, di mana penggunaan sumber daya yang tersedia mampu menghasilkan output kinerja yang melebihi target perencanaan yang ditetapkan

B. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada *Assessment* Tingkat Nasional (Literasi dan Numerasi)

Dalam upaya mewujudkan Misi ke-2 yaitu "Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing", Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tidak hanya fokus pada kuantitas lama sekolah, tetapi juga sangat menekankan pada kualitas output Pendidikan.

Indikator Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum merupakan instrumen evaluasi yang digunakan untuk memotret kualitas proses belajar-mengajar di setiap sekolah. Pengukuran ini difokuskan pada dua aspek fundamental, yaitu:

- Literasi: Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah. Target capaian literasi pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 54,00%.
- Numerasi: Kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Target capaian numerasi pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 46,50%.
-

a) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.142
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada *Assessment* Tingkat Nasional

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
Literasi	%	54,00	62,4	115,56	Sangat Berhasil
Numerasi		46,50	53,9	115,91	Sangat Berhasil

***Sumber** : Rapor Pendidikan, 2025*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Capaian indikator Literasi pada tahun 2025 tercatat sebesar 62,4, yang melampaui target yang ditetapkan sebesar 54,00. Dengan persentase capaian kinerja mencapai 115,56%, indikator ini mendapatkan interpretasi "Sangat Berhasil". Hal ini mencerminkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan minat baca dan kemampuan pemahaman teks siswa telah melampaui ekspektasi perencanaan awal.

Serupa dengan literasi, sektor Numerasi juga mencatatkan performa luar biasa dengan realisasi sebesar 53,9 dari target 46,50. Capaian sebesar 115,91% yang masuk dalam kategori "Sangat Berhasil" menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kemampuan berpikir logis dan matematis siswa di Kabupaten Padang Pariaman.

b) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada *Assessment* Tingkat Nasional" Tahun 2024 dan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.143
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada *Assessment* Tingkat Nasional Tahun 2024 dan 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Literasi	%	-	63,57	-	54,00	62.4	115,56	Sangat Berhasil
Numerasi		-	56,6	-	46,50	53.9	115,91	Sangat Berhasil

***Sumber** : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Pada tahun 2025, target kinerja literasi ditetapkan sebesar 54,00%. Realisasi yang dicapai sebesar 62,4%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 115,56% dengan interpretasi Sangat Berhasil. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang mencapai 63,57%, terlihat adanya sedikit fluktuasi, namun performa di tahun 2025 tetap berada jauh di atas target minimal yang ditetapkan dalam RPJMD.

Disamping itu, indikator numerasi menunjukkan performa yang sangat positif dengan target tahun 2025 sebesar 46,50% dan realisasi mencapai 53,9%. Capaian ini menghasilkan nilai kinerja sebesar 115,91% yang dikategorikan Sangat Berhasil. Meskipun realisasi tahun 2024 berada di angka 56,6%, keberhasilan melampaui target tahun 2025 secara signifikan membuktikan bahwa satuan pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman mampu mempertahankan standar kualitas yang tinggi dalam kemampuan berpikir logis dan matematis siswa.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.144
Perbandingan Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada *Assessment* Tingkat Nasional dengan Target RPJMD 2025-2029

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Literasi	%	54,00	54,46	54,92	55,38	55,84	62.4	-	-	-	-
Numerasi		46,50	46,97	47,44	47,90	48,38	53.9	-	-	-	-

***Sumber** : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

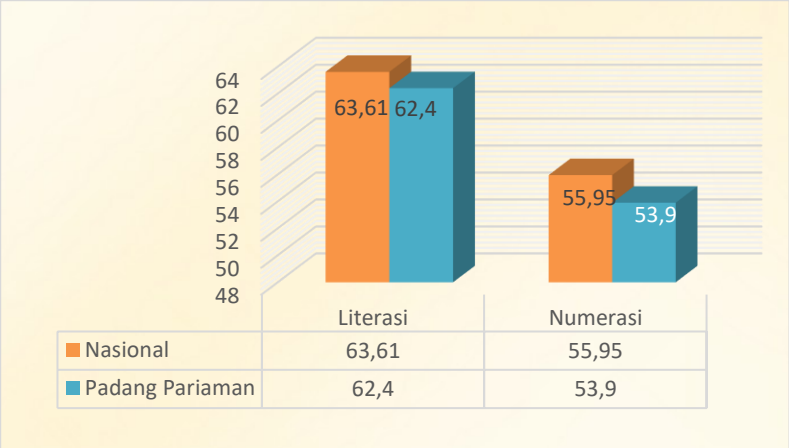
Kabupaten Padang Pariaman telah berhasil mencatatkan performa awal yang melampaui target akhir periode. Keberhasilan ini memperkuat posisi daerah dalam mewujudkan Misi ke-2 dan memberikan kepastian bahwa arah pembangunan SDM yang cerdas dan berdaya saing sedang berada pada tren yang sangat positif. emerintah daerah menetapkan target literasi yang meningkat secara bertahap, dimulai dari 54,00% di tahun 2025 hingga mencapai 55,84% pada tahun 2029. Realisasi tahun 2025 yang mencapai 62,4% menunjukkan bahwa capaian saat ini telah melampaui target akhir periode RPJMD (tahun 2029). Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas literasi di Kabupaten Padang Pariaman memiliki akselerasi yang jauh lebih cepat dari proyeksi awal.

Pada sektor numerasi, target ditetapkan bergerak dari 46,50% di tahun 2025 menuju 48,38% di tahun 2029. Dengan realisasi tahun 2025 sebesar 53,9%, kinerja numerasi saat ini juga telah berhasil menembus target jangka panjang yang ditetapkan untuk lima tahun ke depan.

d) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Kabupaten dengan Standar Nasional Tahun 2025

Perbandingan realisasi kinerja Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada *Assessment* Tingkat Nasional tahun 2025 Kabupaten Padang Pariaman Standar Nasional dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.33
Perbandingan realisasi kinerja Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada *Assessment* Tingkat Nasional Tahun 2025 Kabupaten Padang Pariaman Standar Nasional



***Sumber** : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Dari grafik diatas dapat dilihat pada aspek Literasi, Kabupaten Padang Pariaman mencatatkan realisasi sebesar 62,4. Angka ini menunjukkan performa yang cukup kompetitif jika dibandingkan dengan capaian Nasional yang berada di angka 63,61. Terdapat selisih tipis sebesar 1,21 poin di bawah rata-rata nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar satuan pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman telah memiliki fondasi kemampuan membaca dan mengolah informasi yang hampir setara dengan standar nasional. Sedangkan pada aspek Numerasi, Kabupaten Padang Pariaman meraih angka 53,9, sementara angka Nasional berada pada 55,95. Terdapat gap sebesar 2,05 poin. Sebagaimana tren yang terjadi di tingkat nasional, capaian numerasi memang cenderung lebih rendah dibandingkan literasi. Namun, capaian daerah yang mendekati angka nasional ini menunjukkan upaya yang konsisten dalam peningkatan kemampuan nalar matematis peserta didik di tingkat satuan pendidikan.

e) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama "Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada *Assessment* Tingkat Nasional", berikut ini merupakan faktor-faktor pendukung diantaranya :

1. Tenaga pendidikan memiliki kompentensi literasi yang memadai berkaitan dengan keberhsilan capaian kemampuan literasi peserta didik. tenaga pendidikan yang memiliki literasi yang baik cenderung lebih adaptif terhadap perubahan kurikulum dan model asesmen, termasuk dalam memahami karakteristik soal berbasis penalaran seperti pada Asesmen Nasional. Hal ini

berdampak langsung pada kesiapan peserta didik dalam menghadapi asesmen yang menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi.

2. Tersedianya sarana pendukung yang memadai seperti ketersedian buku bacaan yang lengkap dan variatif di perpustakaan sekolah. Dengan koleksi buku yang beragam, peserta didik memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai jenis teks, mulai dari fiksi, nonfiksi, hingga referensi ilmiah, sehingga kemampuan membaca, memahami, dan menganalisis informasi dapat berkembang secara optimal.
3. Kurikulum sekolah yang terintegrasi dengan pengembangan kompetensi literasi. Dengan penerapan kurikulum yang terintegrasi dengan literasi, sekolah dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, memperkuat budaya literasi, dan memastikan peserta didik mampu mencapai Standar Kompetensi Minimum (SKM) dalam Asesmen Nasional. Integrasi ini menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan peningkatan kemampuan literasi secara sistematis dan berkelanjutan.
4. Tenaga pendidik yang memiliki kompentensi numerasi yang memadai. Guru yang memiliki kompetensi numerasi memadai mampu merancang pembelajaran yang jelas, sistematis, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik, sehingga mempermudah pemahaman konsep bilangan, operasi hitung, dan penalaran matematis
5. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pembelajar berupa media pembelajaran numerasi, buku latihan, dan teknologi pendidikan mendukung peserta didik memahami konsep secara lebih interaktif.

Disamping faktor-faktor pendukung tersebut, terdapat faktor penghambat dalam upaya peningkatan kinerja, diantaranya :

1. Perbedaan kemampuan awal siswa menyebabkan sebagian peserta didik kesulitan mengikuti ritme pembelajaran numerasi.
2. Perpustakaan sekolah belum sepenuhnya berfungsi sebagai pusat kegiatan literasi. Di sisi lain, media atau alat bantu pembelajaran numerasi yang kontekstual juga belum dimanfaatkan secara optimal untuk membantu siswa memahami konsep secara lebih konkret.
3. Pembentukan budaya literasi yang belum kuat
4. Program peningkatan literasi dan numerasi di beberapa sekolah belum dilaksanakan secara konsisten dan terintegrasi

Untuk meningkatkan capaian kinerja berikut upaya dan langkah kedepan yang harus dilakukan:

1. Mengintegrasikan literasi dan numerasi dalam proses pembelajaran di berbagai mata Pelajaran
2. Sekolah melakukan Penguatan budaya literasi yang mendorong kebiasaan membaca dilingkungan sekolah.
3. Meningkatkan kapasitas dan kompetemsi tenaga pendidik dalam merancang pembelajaran berbasis literasi dan numerasi.

satuan pendidikan, maka semakin besar peluang meningkatnya capaian kompetensi literasi dan numerasi peserta didik. Pada tahun 2025 anggaran penyelengaraan pembelajaran adalah sebesar Rp. 6.540.000 dengan realisasi Rp. 6.540.000 untuk tingkat SD. Sementara untuk tingkat SMP anggaran sebesar Rp. 7.100.000 dengan realisasi Rp. 7.100.000,-

Secara akumulatif, dukungan anggaran untuk Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas dan Berdaya Saing melalui indikator Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada *Assessment* Tingkat Nasional (Literasi dan Numerasi).Pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 9.262.419.400,00. Dari total pagu tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berhasil merealisasikan sebesar Rp.8.840.322.260,00 atau mencapai persentase realisasi anggaran sebesar 95%.

Gambar 3.73
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan



Gambar 3.74
Pengembangan Karir Pendidik melalui Kegiatan MGMP
(Musyawarah Guru Mata Pelajaran)



***Sumber** : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

4. Memanfaatkan data hasil asesmen nasional sebagai dasar perbaikan pembelajaran.

f) Analisis Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja

Program yang mendukung Literasi dan Numerasi yaitu program pengelolaan pendidikan dan program pendidik dan tenaga kependidikan dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
   Dalam kegiatan ini Melakukan analisis formasi pendidik dan tenaga kependidikan menggunakan aplikasi dari Kemendikdasmen.kegiatan ini bertujuan agar Pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan. Pada tahun 2025 anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 203.827.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 191.031.700.
2. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama
   Pendidik menjadi salah satu unsur penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Dalam memaksimalkan pembelajaran untuk peningkatan kemampuan literasi siswa, maka perlu diketahui pemetaan jumlah pendidik yang tersedia dan yang dibutuhkan. Pada tahun 2025 anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 7.338.887.000 (SD) dengan realisasi Rp.dan Rp. 1.464.000.000 (SMP).
3. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama
   Pendidik dan tenaga pendidikan yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang memadai berbanding lurus dengan kualitas pembelajaran terkait literasi dan numerasi. Pada tahun 2025 anggaran kegiatan pengembangan karir pendidik tingkat SD sebesar Rp. 18.089.000 dengan realisasi sebesar Rp. 18.050.560. sementara untuk tingkat SMP anggaran pengembangan karir pendidik sebesar Rp. 26.976.000 dengan realisasi Rp. 4.850.000,-
4. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan.
   Pendidik dan tenaga kependidikan diberikan pelatihan untuk peningkatan kompetensi sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Kegiatan bimtek kapasitas pendidik ini dilaksanakan untuk pendidik satuan sekolah dasar dengan anggaran sebesar Rp. 197.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 162.400.000,-
5. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
   Proses pembelajaran memiliki keterkaitan yang signifikan terhadap capaian literasi dan numerasi. Proses pembelajaran yang efektif ditandai dengan penerapan metode pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik. Semakin baik kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakan di

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.145
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada *Assessment* Tingkat Nasional (Literasi dan Numerasi) Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas dan Berdaya Saing **Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas dan Berdaya Saing**	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada *Assessment* Tingkat Nasional (Literasi)	115,56%	95%	20,56%
	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada *Assessment* Tingkat Nasional (Numerasi)	115,91%		20,91%

Secara kolektif, penggunaan sumber daya untuk pencapaian standar kompetensi minimum di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2025 dikategorikan "Sangat Efisien". Pemerintah daerah terbukti mampu mencapai efektivitas kinerja di atas 100% (melampaui target) meskipun terdapat sisa anggaran (efisiensi biaya) sebesar 5%.

Hasil ini mengindikasikan bahwa manajemen program pendidikan telah dijalankan dengan sangat profesional, di mana intervensi yang dilakukan tepat sasaran sehingga daya ungkit kinerjanya sangat besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan.

SASARAN STRATEGIS 5

Tercapainya Masyarakat Sehat dan Produktif Sesuai Siklus Hidup

Mencapai masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup berarti membangun sebuah sistem yang antisipatif, bukan sekadar responsif. Ini adalah upaya strategis untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kapasitas fungsional yang optimal untuk memenuhi peran sosial dan ekonominya di setiap tahapan perkembangan merek. Sasaran "Tercapainya Masyarakat Sehat dan Produktif Sesuai Siklus Hidup" merupakan turunan dari Misi ke-2 yang diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama diantaranya : Angka Harapan Hidup, Prevalensi Stunting dan Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup).

Sebagaimana telah disajikan dalam capaian RPJMD 2021-2026 sebelumnya pada Sasaran “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” sehingga indikator kinerja Usia Harapan Hidup (UHH) dan Prevalensi Stunting tidak lagi diuraikan secara mendalam dalam bagian ini. Dengan demikian, bagian ini akan berfokus sepenuhnya pada ulasan mengenai Angka Kematian Ibu (AKI). Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kedalaman analisis dan menghindari pengulangan informasi, sehingga evaluasi terhadap faktor-faktor risiko kematian ibu dapat dibahas secara lebih tajam dan solutif.

Berikut ini perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Angka Kematian Ibu Tahun 2025 :

a) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2025

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator strategis dalam mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan, khususnya dalam mendukung tujuan “Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup.” Indikator ini menggambarkan kualitas pelayanan kesehatan ibu mulai dari masa kehamilan, persalinan, hingga nifas.

Berikut ini adalah target dan realisasi indikator kinerja Angka Kematian Ibu Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025:

Tabel 3.146
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Angka Kematian Ibu Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	per 100.000 Kelahiran Hidup	50	89	12,36	Kurang Berhasil

Sumber : Dinkes Kabupaten Padang Pariaman, 2025

Realisasi Indikator Kinerja Utama indikator Angka Kematian Ibu (AKI) belum mencapai target. Dengan target 50 per 100.000 kelahiran hidup, realisasi sebesar 89 per 100.000 kelahiran hidup menghasilkan capaian 12,36% (Kurang Berhasil). Hal ini

menunjukkan masih adanya tantangan dalam pelayanan kesehatan maternal dan faktor risiko kehamilan yang perlu mendapat penguatan intervensi.

b) Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

Tabel 3.147
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Angka Kematian Ibu
Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Orang per 100.000 Kelahiran Hidup	-	83	-	50	89	12,36	Kurang Berhasil

***Sumber** : Dinkes Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Berdasarkan data capaian kinerja pada tabel di atas, Indikator Kinerja Utama Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukkan dinamika yang memerlukan perhatian khusus. Pada tahun 2024, realisasi AKI tercatat sebesar 83 orang per 100.000 Kelahiran Hidup (KH). Namun, pada tahun 2025, angka tersebut justru mengalami peningkatan menjadi 89 orang per 100.000 KH. Dengan target ambisius sebesar 50 orang per 100.000 KH pada tahun 2025, maka persentase capaian kinerja yang dihasilkan hanya sebesar 12,36%, yang secara interpretasi dikategorikan dalam predikat 'Kurang Berhasil'."

Kenaikan dari angka 83 orang per 100.000 KH (tahun 2024) ke 89 orang per 100.000 KH (tahun 2025) menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan belum mampu menekan faktor risiko kehamilan secara efektif. Hal ini menjadi catatan kritis bagi organisasi untuk memperkuat integrasi layanan rujukan dan deteksi dini komplikasi pada ibu hamil.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan target pada RPJMD 2021-2026 dengan realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.148
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Angka Kematian Ibu
dengan Target RPJMD 2025-2029

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Orang per 100.000 Kelahiran Hidup	50	50	50	50	50	89	-	-	-	-

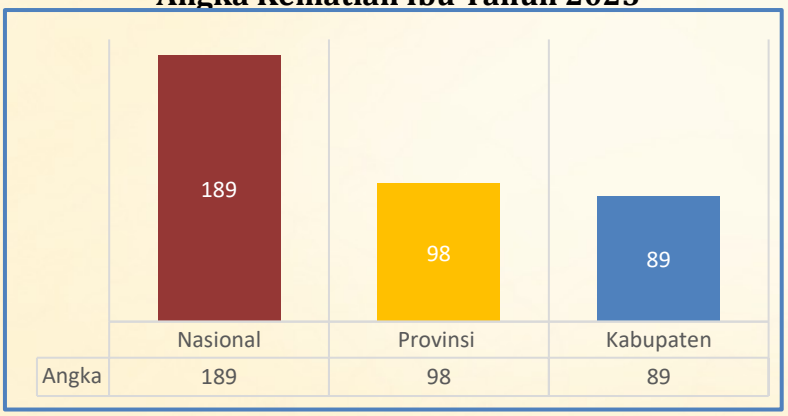
***Sumber** : Dinkes Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Berdasarkan tabel perbandingan realisais kinerja dengan target RPJMD periode 2025-2029 diatas, pemerintah daerah telah menetapkan target ambisius untuk menekan Angka

Kematian Ibu pada level 50 orang per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) secara konsisten setiap tahunnya. Namun, pada tahun pertama periode ini (2025), realisasi kinerja tercatat sebesar 89 orang per 100.000 KH. Ketidakberhasilan ini terlihat dari selisih sebesar orang per 100.000 Kelahiran Hidup jauh dibawah target. Jika dikonversi ke dalam persentase capaian kinerja menggunakan rumus indikator negatif, angka ini hanya menghasilkan nilai capaian sebesar 12,36%. Hal ini merepresentasikan kondisi yang kritis, karena jumlah kematian ibu di lapangan hampir mencapai dua kali lipat dari batas toleransi yang direncanakan dalam dokumen RPJMD. Tingginya angka ini menjadi sinyal kuat bahwa intervensi layanan kesehatan maternal pada tahun 2025 belum berjalan efektif dan memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rujukan serta kualitas penanganan kegawatdaruratan di fasilitas Kesehatan.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Kabupaten, Provinsi dan Nasional

Grafik 3.34
Angka Kematian Ibu Tahun 2025



***Sumber** : Dinkes Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Berdasarkan grafik tersebut, capaian indeks pada tingkat nasional sebesar 189/ 100.000 Kelahiran, sedangkan pada tingkat provinsi sebesar 98/100.000 Kelahiran dan kabupaten sebesar 89/100.000 Kelahiran. Hal ini menunjukkan bahwa capaian di tingkat kabupaten masih berada di bawah capaian provinsi maupun nasional. Selisih capaian tersebut mengindikasikan masih perlunya peningkatan kinerja program dan penguatan pelaksanaan kegiatan di tingkat daerah.

e) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Berikut ini adalah beberapa faktor penghambat pencapaian target kinerja indikator Angka Kematian Ibu:

1. Pelaksanaan PWS KIA yang Belum Optimal
   Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) KIA belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai alat kendali program secara aktif dan real time. Analisis tren ibu hamil risiko tinggi serta tindak lanjut kasus belum berjalan secara konsisten di seluruh fasilitas pelayanan.
2. Kualitas Pelayanan Antenatal Care (ANC) yang Belum Maksimal

Pelaksanaan ANC belum seluruhnya memenuhi standar pelayanan terpadu dan komprehensif. Deteksi dini faktor risiko serta penatalaksanaan awal komplikasi masih perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kegawatdaruratan.

3. Kualitas SDM dalam Penanganan Kegawatdaruratan Maternal dan Perinatal
   Kompetensi tenaga kesehatan dalam penanganan kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal masih memerlukan penguatan, baik melalui pelatihan berkelanjutan maupun pembinaan teknis di lapangan.
4. Analisis Data di Tingkat Puskesmas Belum Maksimal
   Pengelolaan dan pemanfaatan data program KIA belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Analisis kohort ibu hamil dan identifikasi risiko belum dilakukan secara optimal dan sistematis.
5. Pengawasan dan Perawatan Alat Gardamatneo yang Belum Optimal
   Sarana dan prasarana kegawatdaruratan maternal dan neonatal (Gardamatneo) di beberapa Puskesmas masih memerlukan peningkatan pengawasan, pemeliharaan, serta dukungan lintas sektor agar selalu dalam kondisi siap pakai.
6. Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal-Surveilans dan Respons (AMP-SR) yang belum maksimal
7. Pelaksanaan AMP-SR belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai mekanisme pembelajaran sistem.
8. Tindak lanjut rekomendasi audit dan implementasi perbaikan layanan masih perlu diperkuat agar berdampak langsung terhadap pencegahan kasus serupa.

Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Kesehatan telah melaksanakan berbagai upaya strategis yang terintegrasi melalui pendekatan pembinaan, pengendalian mutu layanan, serta penguatan sistem rujukan maternal. Adapun upaya yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Supervisi Fasilitatif Program KIA
   Supervisi dilakukan secara berkala ke Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk memastikan pelaksanaan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) berjalan sesuai standar pelayanan. Kegiatan ini tidak hanya bersifat pengawasan, tetapi juga pembinaan teknis dan pendampingan dalam peningkatan mutu pelayanan antenatal, persalinan, nifas, serta deteksi dini kehamilan risiko tinggi.

Gambar 3.75
Supervisi Fasilitatif Program KIA



2. Bedah Kohort Ibu Hamil
   Kegiatan bedah kohort dilakukan untuk mengidentifikasi secara rinci ibu hamil risiko tinggi melalui analisis data kohort. Dengan pendekatan ini, setiap kasus

risiko dapat dipetakan dan ditindaklanjuti secara lebih terarah, termasuk perencanaan rujukan persalinan dan pengawasan ketat terhadap ibu dengan faktor risiko.

Gambar 3.76
Bedah Kohort Ibu Hamil



3. Monitoring dan Evaluasi Program
   Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai capaian indikator pelayanan KIA, kepatuhan terhadap standar pelayanan, serta efektivitas sistem rujukan. Hasil monitoring menjadi dasar dalam pengambilan keputusan perbaikan program dan penyesuaian strategi intervensi di lapangan.

Gambar 3.77
Monitoring dan Evaluasi Program



4. Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal – Surveilans dan Respons (AMP-SR)
Pelaksanaan AMP-SR dilakukan terhadap setiap kasus kematian ibu untuk mengidentifikasi faktor penyebab langsung maupun tidak langsung, termasuk aspek keterlambatan (delay) dalam penanganan.

Gambar 3.78
Pelaksanaan AMP-SR



Melalui rangkaian upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen untuk memperkuat kualitas pelayanan kesehatan maternal secara berkelanjutan, meningkatkan deteksi dini faktor risiko, serta memastikan respons cepat dan tepat terhadap kegawatdaruratan obstetri guna menekan angka kematian ibu.

Ke depan, diperlukan penguatan intervensi promotif dan preventif secara lebih terintegrasi serta peningkatan kewaspadaan terhadap kehamilan risiko tinggi guna menekan angka kematian ibu secara berkelanjutan.

f) Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua **Usia Harapan Hidup** adalah sebanyak 5 program adapun pencapaian masing – masing program adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 97.761.623.767- dan realisasi keuangan mencapai Rp 93.783.200.718,-. atau sekitar 95.93% Terdapat efisiensi dari anggaran yang sudah di alokasikan untuk kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman sebesar 4.07% , yang termasuk dalam program ini adalah kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 48.497.959.114,99 dan realisasi keuangan mencapai Rp 44.053.064.741,- atau sekitar 90.83 % , terdapat efisiensi dari anggaran yang sudah di alokasikan untuk kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman sebesar 9,17 % yang termasuk dalam program ini adalah kegiatan :

- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
- Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.101.525.600,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 1.262.412.600,- atau sekitar 60.07% , terdapat efisiensi dari anggaran yang sudah di alokasikan untuk kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman sebesar 39.93% , yang termasuk dalam program ini adalah kegiatan :

- Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
- Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 474.341.000,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 183.131.174,- berarti realisasi keuangan 38.61 % , terdapat efisiensi dari anggaran yang sudah di alokasikan untuk kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman sebesar 61.39% yang termasuk dalam program ini adalah kegiatan :

- Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
- Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
- Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 341.290.000,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 324.751.444,- atau sekitar 95.15 % , terdapat efisiensi dari anggaran yang sudah di alokasikan untuk kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman sebesar 4.85% , yang termasuk dalam program ini adalah kegiatan :

- Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian Prevalensi Stunting adalah sebanyak 2 program adalah sebagai berikut :

6. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran untuk Sub Kegiatan sebesar Rp 8.555.814.292,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 8.116.118.669,- atau sekitar 95 % , terdapat efisiensi dari anggaran yang sudah di alokasikan untuk kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman sebesar 5 % yang termasuk dalam program ini adalah kegiatan/ sub kegiatan :

- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, Pengelolaan

Upaya Kesehatan Ibu dan Anak, Imunisasi, Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

- Penyediaan Fasilitas Pelayananan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan Pengadaan Alkes / alat penungjang medisk fasilitas pelayanan kesehatan, Pemeliharaan rutin dan berkala alkes/ alat penungjang medisk fasilitas pelayanan kesehatan, dan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Ckasin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran untuk Sub Kegiatan sebesar Rp 1.370.949.000,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 853.198.700,- atau sekitar 62.23% , terdapat efisiensi dari anggaran yang sudah di alokasikan untuk kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman sebesar 38.77 % , yang termasuk dalam program ini adalah kegiatan/ Sub kegiatan :

- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

8. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 185.149.600,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 65.581.100,- atau sekitar 33.8 % , terdapat efisiensi dari anggaran yang sudah di alokasikan untuk kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman sebesar 66.2% , yang termasuk dalam program ini adalah kegiatan :

- Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.149
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Tercapainya Masyarakat Sehat dan Produktif Sesuai Siklus Hidup	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	12,36%	93,59%	-81,23%

Berdasarkan data tahun 2025, indikator Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) mencatatkan Capaian Kinerja sebesar 12,36% dengan tingkat Penyerapan Anggaran mencapai 93,59%.

Hasil perbandingan antara output kinerja dan input finansial ini menunjukkan Tingkat Efisiensi sebesar -81,23%. Nilai efisiensi negatif yang cukup signifikan ini mengindikasikan bahwa serapan anggaran yang tinggi belum berbanding lurus dengan pencapaian target kinerja pada tahun berjalan. Hal ini memberikan sinyal perlunya evaluasi mendalam terhadap ketepatan strategi intervensi dan alokasi sumber daya pada program-program penurunan angka kematian ibu, agar setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan dampak yang lebih optimal terhadap peningkatan kesehatan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman.

SASASARAN STRATEGIS 6

Meningkatnya Kualitas Keluarga, Kesetaraan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak

Meningkatnya Kualitas Keluarga, Kesetaraan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan Sasaran Strategis yang terdapat pada Misi ke-2 yaitu Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berdaya Saing dan Inklusif. Meningkatnya Kualitas Keluarga, Kesetaraan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak didefinisikan sebagai keberhasilan daerah dalam mewujudkan ketahanan keluarga yang mandiri, memperkecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan, serta menjamin rasa aman bagi kelompok rentan (perempuan dan anak) dari segala bentuk tindak kekerasan melalui penguatan sistem layanan perlindungan yang terintegrasi.

Pencapaian sasaran ini diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja utama yang saling berinterintegrasi, yaitu: Indeks Pembangunan Keluarga, Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Ketimpangan Gender dan Indeks Perlindungan Anak. Berikut adalah analisis mendalam mengenai capaian kinerja masing-masing indikator pada tahun 2025:

A. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga adalah merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. iBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut:

- iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40.
- iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40 - 70.
- iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.

Untuk memahami struktur pembentuk kualitas keluarga di Kabupaten Padang Pariaman secara komprehensif, maka dilakukan pembedahan melalui beberapa dimensi utama

1. **Dimensi Ketentraman**
   Ketenteraman adalah kondisi keluarga yang didalamnya memiliki rasa aman, tenang, baik hati maupun pikiran dalam kehidupan berkeluarga. Untuk mengukur dimensi ketentraman ini dengan menggunakan 4 indikator yaitu : Kegiatan Ibadah, Legalitas Keluarga, Jaminan Kesehatan dan Keharmonisan Keluarga.
2. **Dimensi Kemandirian**
   Kemandirian adalah kemampuan keluarga untuk bertindak sesuai dengan keadaan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa meminta atau tergantung pada keluarga lain. Untuk mengukur Dimensi kemandirian ini menggunakan 5 indikator yaitu : Pemenuhan kebutuhan dasar, Jaminan keuangan, keberlangsungan Pendidikan, Kesehatan keluarga dan Akses Media Online.

3. Dimensi Kebahagiaan

Kebahagiaan Adalah kondisi keluarga yang didalamnya terdapat unsur kasih sayang, menerima kondisi keluarga dan lingkungannya serta mampu mengaktualisasikan diri. Untuk mengukur Dimensi kebahagiaan ini menggunakan 2 indikator yaitu : Interaksi Keluarga dan Interaksi Sosial

Realisasi capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2025 sebesar 58,4 berdasarkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 284/KEP/L/2025 tentang Hasil Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Berdasarkan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Berikut ini perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2025 :

Tabel 3.150
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Indeks Pebangunan Keluarga Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Interpretasi
Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	57,8	58,4	101,03	Sangat Berhasil

***Sumber** : DPPKB Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indeks pembangunan keluarga pada tahun 2025 yaitu sebesar 58,4 lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Secara persentase capaian iBangga sebesar 101,03 dan dapat di interprestasikan Sangat Berhasil. Meskipun secara administratif target tahunan telah terlampaui, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memandang hasil ini sebagai batu loncatan yang optimis untuk mencapai standar ideal nasional. Dengan realisasi 58,4, daerah kini memiliki fondasi yang kuat untuk mengakselerasi program-program inovatif guna mengejar skor di atas 70 agar masuk dalam kategori "Baik" (Tangguh).

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Adapun perbandingan realisasi Indikator Kinerja Utama “Indeks Pembangunan Keluarga” adalah sebagai berikut :

Tabel 3.151
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Keluarga Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	TAHUN 2024			TAHUN 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	-	56,32	-	57,8	58,4	101,03	Sangat Berhasil

***Sumber** : DPPKB Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Pada Tahun 2024 capaian iBangga adalah sebesar 56,32 Sedangkan Realisasi pada tahun 2025 adalah sebesar 58,4. Jika dibandingkan dengan tahun 2025 terdapat peningkatan sebesar 2,08. Peningkatan ini menunjukan adanya perbaikan kinerja pembangunan keluarga. Meskipun terjadi peningkatan capaian dari Tahun 2024 ke Tahun 2025, realisasi Tahun 2025 masih belum mencapai target yang ditetapan. Hal ini menunjukan bahwa Upaya untuk peningkatan kualitas keluarga masih perlu diperkuat.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU dengan Target Jangka Menengah

Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah :

Tabel 3.152
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Keluarga dengan Target RPJMD Tahun 2025-2029

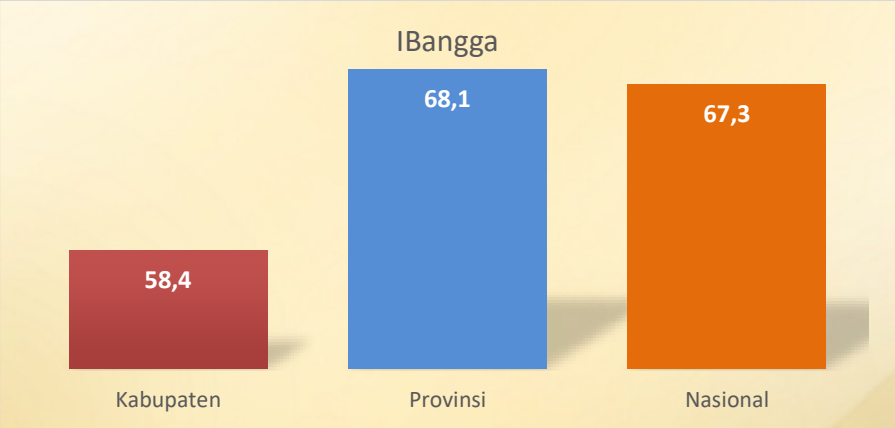
Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Pembangunan Keluarga	57,8	59,2	60,5	61,8	63,1	58,4	-	-	-	-

***Sumber** : DPPKB Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memandang pencapaian Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 58,4 ini sebagai modalitas penting. Meskipun secara administratif target tahunan telah terpenuhi dengan predikat "Sangat Berhasil", pemerintah derah tetap optimis untuk terus meningkatkan kualitas hidup keluarga agar mampu menembus skor di atas 70 (Kategori Baik). Tren positif pada tahun 2025 ini memperkuat keyakinan untuk mewujudkan keluarga yang tentram, mandiri, dan bahagia di seluruh wilayah Padang Pariaman dapat terakselerasi sebelum periode RPJMD berakhir.

d) Perbandingan Realisasi Capaian IKU dengan Realisasi Provinsi dan Nasional

Grafik 3.35
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Keluarga Tahun 2025 Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional



***Sumber** : DPPKB Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Realisasi Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Padang Pariaman (58,4) masih berada di bawah realisasi Provinsi yang menyentuh angka 68,1. Terdapat selisih sebesar 9,7 poin yang menjadi tantangan strategis bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga di daerah. Secara nasional, Indeks Pembangunan Keluarga berada pada angka 67,3. Realisasi Kabupaten Padang Pariaman memiliki selisih sebesar 8,9 poin dibandingkan nasional. Mengingat standar kategori "Baik" secara nasional adalah skor di atas 70, maka posisi Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi, maupun Nasional pada tahun 2025 masih berproses menuju kategori ideal tersebut

e) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja

Program Penunjang IKU Indeks Pembangunan Keluarga yaitu Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana dan Program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.

- Program Pengendalian Penduduk

  Program Pengendalian Penduduk berkontribusi dalam menciptakan keluarga yang lebih terencana melalui pengendalian pertambahan jumlah penduduk dan penguatan pemahaman Masyarakat tentang kependudukan.

  Program pengendalian penduduk untuk pencapain IKU dengan total anggaran Rp. 493.445.000 dan realisasi sebesar Rp. 486.671.700 dengan capaian 98.63%.

  Bentuk Kegiatan Program Pengendalian Penduduk untuk pencapaian IKU antara lain:

  1. Pemutakhiran Data Keluarga
     Kegiatan memperbarui dan memperbaiki data keluarga secara berkala untuk memastikan data yang tersedia akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi riil keluarga, meliputi aspek kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Pemutakhiran Data keluarga ini dilakukan dua kali dalam setahun.
  2. Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan.
     Peta Jalan Pembangunan Kependudukan disusun untuk mewujudkan arah pembangunan kependudukan yang terarah, terukur dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
  3. Kegiatan Sekolah Siaga Kependudukan.
     Serangkaian aktivitas edukatif di lingkungan sekolah yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta didik terkait isu kependudukan dan pembangunan keluarga, melalui integrasi materi kependudukan ke dalam pembelajaran dan kegiatan sekolah.
  4. Pengolah dan Pelaporan data
     Kegiatan untuk menghimpun, memverifikasi, mengolah dan menyajikan data kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga secara akurat, mutakhir dan terintegrasi.

Gambar 3.79
Koordinasi Penyusunan Dokumen PJPK



***Sumber** : DPPKB Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Gambar 3.80
Sosialisasi Pemutakhiran Data Keluarga



***Sumber** : DPPKB Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Gambar 3.81
Sekolah Siaga Kependudukan



***Sumber** : DPPKB Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

- Program Pembinaan Keluarga Berencana
  Program Pembinaan Keluarga Berencana berperan penting dalam meningkatkan dimensi ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang menjadi komponen utama Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Melalui pengaturan kelahiran dan peningkatan kualitas keluarga, program ini berkontribusi langsung terhadap

peningkatan kualitas hidup keluarga. Program Pembinaan Keluarga Berencana untuk pencapain IKU dengan total anggaran Rp. 7.452.049.500 dan realisasi sebesar Rp. 7.051.857.151 dengan capaian 94.63%. Bentuk Kegiatan Program Pembinaan Keluarga Berencana untuk pencapaian IKU antara lain:

1. Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana
   Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga melalui pengaturan kelahiran. Pelayanan ini mencakup penyediaan akses yang merata dan berkualitas, peningkatan kepesertaan KB aktif, pemenuhan kebutuhan ber-kb yang tidak terpenuhi. Melalui pelayanan KB keluarga memiliki kesiapan fisik, psikologis dan dan ekonomi yang lebih baik, sehingga berkontribusi langsung terhadap indeks pembangunan keluarga.
2. Pembinaan di Fasilitas Kesehatan
   Kegiatan pembinaan dan penguatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan, Melalui pembinaan di fasilitas kesehatan mutu pelayanan kepada keluarga meningkat sehingga mendukung peningkatan ketahan dan kesejahteraan keluarga
3. Pembinaan Petugas Lini Lapangan
   Kegiatan peningkatan kapasitas dan profesionalisme petugas lapangan (PLKB/PKB dan kader) agar mampu melaksanakan pendataan, KIE, dan pembinaan keluarga secara efektif dan berkelanjutan. Melalui pembinaan ini petugas lini lapangan dapat memberikan layanan yang tepat sasaran dan berkualitas, sehingga mendukung peningkatan ketahanan serta kesejahteraan keluarga dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).
4. Penyuluhan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
   Merupakan kegiatan edukasi dan komunikasi, informasi, serta edukasi (KIE) kepada masyarakat kampung KB dalam rangka meningkatkan pemahaman dan partisipasi keluarga terhadap program pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.

Gambar 3.82
Pelayanan Keluarga Berencana



***Sumber** : DPPKB Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Gambar 3.83
Pembinaan Faskes



***Sumber** : DPPKB Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Gambar 3.84
Penyuluhan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas



***Sumber** : DPPKB Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

  Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera berperan strategis dalam meningkatkan ketahanan, kemandirian dan kesejahteraan keluarga yang merupakan komponen utama dalam Indeks pembangunan keluarga.

  Program pembinaan keluarga berencana untuk pencapaian IKU dengan total anggaran Rp.1.987.000.000 dan realisasi sebesar Rp.1.961.433.600 dengan capaian 98.71%. Bentuk Kegiatan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera untuk pencapaian IKU antara lain :

  1. Pembinaan Kelompok Bina Keluarga
     Pelaksanaan pembinaan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anggota keluarga.
  2. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
     Kegiatan peningkatan keterampilan dan kapasitas ekonomi keluarga melalui Kelompok UPPKA dan kegiatan usaha produktif keluarga guna mendorong kemandirian dan kesejahteraan keluarga.
  3. Pendampingan Keluarga Berisko Stunting

Pendampingan bagi keluarga yang memiliki balita, remaja, lansia, dan keluarga berisiko stunting untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan keluarga.

4. Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)
   Kegiatan ini berkontribusi langsung terhadap pencapaian IKU Indeks pembangunan keluarga (iBangga), khusunya pada aspek ketahanan dan kualitas remaja.

Gambar 3.85
Pembinaan Kelompok Bina Keluarga



***Sumber** : DPPKB Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Gambar 3.86
Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting



***Sumber** : DPPKB Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Gambar 3.87
Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)



***Sumber** : DPPKB Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

f) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Serta Solusi Yang Telah Dilakukan

Faktor penunjang keberhasilan indikator kinerja "Indeks Pembangunan Keluarga" adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kegiatan pembangunan keluarga yang dilakukan secara keberlanjutan dan konsisten seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL).
2. Keterlibatan dan Peran Aktif Kader dan Petugas Lapangan dalam pendampingan keluarga.
3. Adanya dukungan regulasi, perencanaan program serta alokasi anggaran turut memperkuat pelaksanaan kegiatan pembangunan keluarga.
4. Pelaksanaan Pemutkhiran Data Keluarga sebagai dasar penghitungan iBangga.
5. Meningkatnya kesadaran keluarga terhadap ketahanan keluarga melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan komunikasi informasi edukasi (KIE).
6. Keberadaan Kampung Keluarga Berkualitas sebagai wadah pelaksanaan kegiatan pembangunan keluarga seperti Bina Keluaga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pelayanan Kb, Kesehatan Keluarga dan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga.
7. Adanya Dukungan Lintas Sektor dalam pencapaian iBangga.

Disamping faktor pendukung tersebut, terdapat juga faktor yang menghambat pencapaian kinerja antara lain :

1. Kualitas dan Pemutakhiran Data Keluarga Belum Optimal karena belum dilakukan sepenuhnya secara rutin.
2. Keterbatan Kapasitas Kader dimana kader belum sepenuhnya belum memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas pembinaan dan pendampingan keluarga.
3. Cakupan Program Pembangunan Keluarga Belum merata, artinya pelaksanaan program belum menjangkau seluruh keluarga sasaran.
4. Koordinasi dan Integrasi Lintas sektor belum optimal.
5. Partisipasi dan kesadaran keluarga belum merata.

Adapun beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan mengatasi hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Melakukan Pemutakhiran dan Validasi Data Keluarga secara berkala yaitu 2 kali dalam setahun.
2. Peningkatan Koordinasi dan Sinergi Lintas Sektor.
3. Meningkatkan Kualitas Pembinaan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Kampung Keluarga Berkualitas.
4. Penguatan Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat dengan meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait pembangunan keluarga.

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.153
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Keluarga Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Keluarga, Kesetaraan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Keluarga	101,03%	96,18%	4,85%

***Sumber** : DPPKB Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Efisiensi capaian kinerja = 101,03 -100% = 1,03%
Efisiensi penyerapan anggaran = 100% - 96,18% = 3,82%
Total efesiensi = 1,03% + 3,82% = 4,85%

Efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator ini sebesar 3,82 % dan efisiensi kinerja sebesar 1,03%. Sehingga total efisiensi pada indikator kinerja ini sebesar 4,85%, yang dapat diasumsikan efisiensi sumberdaya pada pencapaian indikator kinerja utama indeks pembangunan keluarga"sangat baik".

B. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara Pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.

Berikut ini rumus perhitungan realisasi indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender :

IPG = (IPM Perempuan / IPM Laki-laki) x 100

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2025 sampai dengan saat ini belum dipublikasikan secara resmi oleh instansi yang berwenang, baik oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sumatera Barat maupun lembaga statistik terkait. Oleh karena itu, dalam penyusunan laporan kinerja Tahun 2025 masih menggunakan data realisasi IPG Tahun 2024 sebesar 93,92 sebagai data sementara. Nilai tersebut digunakan sebagai dasar dalam menggambarkan kondisi pembangunan gender di daerah sambil menunggu rilis resmi data IPG Tahun 2025.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Berikut ini perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2025 :

Tabel 3.154
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,30	93,92*	99,59	Berhasil

***Sumber** : DinsosP3A Kabupaten Padang Pariaman, 2025*
**) Realisasi Tahun 2025 menggunakan data capaian Tahun 2024*

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa Indeks Pembangunan Gender ditetapkan dengan target sebesar 94,30. Berdasarkan evaluasi akhir periode, realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 93,92 persentase capaian kinerja sebesar 99,59%. Angka yang sangat mendekati 100% ini menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Padang Pariaman telah berhasil diminimalisir secara konsisten sesuai rencana strategis. Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan keadilan gender ke dalam berbagai sektor pembangunan manusia

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Adapun perbandingan realisasi Indikator Kinerja Utama "Indeks Pembangunan Gender" adalah sebagai berikut :

Tabel 3.155
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	TAHUN 2024			TAHUN 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	-	93,92	-	94,3	93,92*	99,59	Berhasil

***Sumber** : DinsosP3A Kabupaten Padang Pariaman, 2025*
**) Realisasi Tahun 2025 menggunakan data capaian Tahun 2024*

Indikator IPG baru secara resmi ditetapkan dan dimuat ke dalam dokumen RPJMD Periode 2025-2029. Oleh karena itu, tahun 2024 berfungsi sebagai tahun dasar (*baseline*) dengan realisasi sebesar 93,92 dan belum ada penetapan target tertentu. Angka realisasi tahun 2025 Jika dibandingkan dengan target tahun berjalan, diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 99,59% dengan interpretasi "Berhasil".

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU dengan Target Jangka Menengah

Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah :

Tabel 3.156
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender dengan Target RPJMD Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Pembangunan Gender	94,3	94,68	95,06	95,44	95,82	93,92*	-	-	-	-

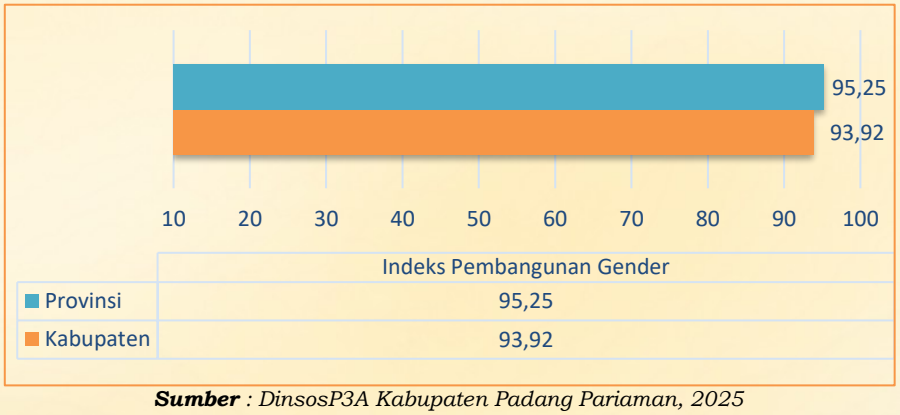
***Sumber** : DinsosP3A Kabupaten Padang Pariaman, 2025*
**) Realisasi Tahun 2025 menggunakan data capaian Tahun 2024*

Pada tahun awal perencanaan yaitu 2025, indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender ditargetkan pada angka 94,30, yang kemudian direncanakan naik menjadi 94,68 pada tahun 2026, 95,06 pada tahun 2027, 95,44 pada tahun 2028, hingga mencapai puncak target sebesar 95,82 pada akhir periode tahun 2029. Penetapan target yang meningkat rata-rata 0,38 poin setiap tahunnya ini menunjukkan komitmen kuat daerah dalam mengecilkan kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan secara konsisten.

Mengenai capaian riil pada tahun berjalan, realisasi kinerja IPG untuk tahun 2025 tercatat sebesar 93,92. Penting untuk diketahui bahwa angka realisasi 93,92 ini merupakan rujukan data capaian dari tahun 2024 yang digunakan sebagai data *baseline*, mengingat hasil penghitungan resmi IPG untuk tahun berjalan masih dalam tahap finalisasi

d) Perbandingan Realisasi Capaian IKU dengan Realisasi Provinsi Tahun 2025

Grafik 3.36
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2025 Kabupaten dengan Provinsi



***Sumber** : DinsosP3A Kabupaten Padang Pariaman, 2025*
**) Realisasi Tahun 2025 menggunakan data capaian Tahun 2024*

Realisasi capaian Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Padang Pariaman berada pada angka 93,92. Jika dikomparasikan dengan capaian tingkat Provinsi yang berada pada angka 95,25, maka terdapat selisih sebesar 1,33 poin. Meskipun angka capaian kabupaten sedikit di bawah rata-rata provinsi, nilai 93,92 tetap menunjukkan kualitas pembangunan gender yang kompetitif dan berada pada level yang sangat baik dalam skala indeks pembangunan manusia. Upaya pengejaran selisih tersebut selaras dengan

target-target progresif yang telah disusun dalam RPJMD 2025-2029 guna memastikan kesetaraan pembangunan manusia yang inklusif di seluruh wilayah kabupaten.

e) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja

Adapun Program dan kegiatan penunjang IKU Indeks Pembangunan Gender Adalah sebagai berikut :

- PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN dengan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan dengan pagu sebesar Rp. 324.999.900,-dengan realisasi sebesar Rp.290.606.250,- dengan persentase sebesar 89,42%.
  Adapun Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut:
  1. Sosialisasi terhadap Anggota Gabungan Organisasi Wanita (GOW) di Kab. Padang Pariaman bisa merubah pola pikir tentang keberadaan organisasi perempuan dan fungsi lembaga yang ada sebagai motivasi dan pemberi informasi yang membangun.
  2. Dharma Wanita Persatuan yang merupakan kumpulan istri-istri Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat membantu suami dalam penyebaran informasi tentang pemberdayaan perempuan baik dalam rumah tangga maupun lingkungannya, pembinaan anak dan remaja kearah yang lebih baik .
  3. Dalam peringatan Hari Ibu yang ke 96 Tingkat Kab. Padang Pariaman, GOW dan DWP juga ikut berpartisipasi,Acara yang mengusung tema “Perempuan Berdaya, Indonesia Maju,” diselenggarakan dalam rangka Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-96 tahun 2025.
  4. Untuk Tahun 2023 Padang Pariaman juga telah menseleksi Perempuan Berjasa dan Berprestasi di Bidang Kesehatan, diusulkan untuk Tingkat Provinsi yaitu Ondani dari Nagari III Koto Aur Malintang Kec. IV Koto Aur Malintang.
  5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) menyelenggarakan Pelatihan peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik dan pengambilan Keputusan, diikuti 50 perempuan dari berbagai latar belakang, mulai dari aktivis perempuan, kader partai politik, hingga Perempuan yang ingin berkarier di bidang politik.

Gambar 3.88
Bimtek Anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI)
Tanggal 11 November 2025



Gambar 3.89
***Launching* Nagari Ramah Perempuan dan Peduli Anak**



***Sumber** : DinsosP3A Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

f) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Serta Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam meraih realisasi kinerja yang positif dalam indikator Indeks Pembangunan Gender ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain :

1. Komitmen Kebijakan Daerah
   - Adanya regulasi dan Perda tentang Pengarusutamaan Gender (PUG)
   - Dukungan Bupati dan DPRD terhadap keterwakilan perempuan
   - Integrasi isu gender dalam RPJMD dan Renstra OPD
2. Kelembagaan PUG yang sudah terbentuk
   - Pokja PUG tingkat kabupaten
   - *Focal point* gender di perangkat daerah
   - Dukungan DINSOSP3A sebagai *leading sector* pemberdayaan perempuan
3. Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan
   - Adanya kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif
   - Meningkatnya minat perempuan dalam organisasi kemasyarakatan dan politik
4. Dukungan Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
   - Pelatihan UMKM perempuan
   - Bantuan modal usaha bagi perempuan kepala keluarga
   - Program ekonomi kreatif berbasis nagari
5. Akses Pendidikan Perempuan yang Relatif Baik
   - Angka partisipasi sekolah perempuan yang tinggi
   - Kesetaraan akses pendidikan dasar dan menengah
6. Dukungan Data dan Statistik Gender
   - Tersedianya data terpilah gender dari BPS
   - Penguatan perencanaan berbasis data (gender responsive budgeting)

Disamping faktor pendukung tersebut, terdapat pula beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja, antara lain :

1. Budaya patriarki yang kuat
   Di banyak daerah di Sumatera Barat, termasuk Padang Pariaman, budaya patriarki dan nilai-nilai adat yang memposisikan laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga dan masyarakat
2. Rendahnya partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan
   Pada tahun 2025, representasi perempuan dalam legislatif maupun lembaga-lembaga pengambil keputusan di daerah masih sangat rendah
3. Kurangnya program dan anggaran yang berpihak pada gender
   Pada 2025, kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) masih dalam tahap awal implementasi. Banyak pemerintah daerah belum memiliki pemahaman dan kapasitas untuk mengintegrasikan isu gender dalam perencanaan pembangunan.
4. Ketergantungan ekonomi perempuan
   Banyak perempuan masih bergantung secara ekonomi pada laki-laki, sehingga membatasi ruang gerak dan kesempatan mereka untuk mandiri serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial.

Adapun solusi atau upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja antara lain :

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan bagi Perempuan
   Mengurangi angka putus sekolah dengan pendekatan berbasis keluarga dan komunitas.
2. Mengintegrasikan pendidikan kesetaraan gender dalam kurikulum sekolah
3. Meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak, termasuk akses ke fasilitas persalinan yang aman.
4. Pelatihan tenaga medis dengan perspektif gender.
5. Pelatihan kewirausahaan dan keterampilan kerja untuk perempuan, terutama di sektor informal dan UMKM, fasilitasi akses perempuan ke pembiayaan, seperti kredit mikro berbasis gender.
6. Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan
7. Peningkatan representasi perempuan dalam jabatan struktural pemerintahan dan lembaga legislatif daerah.
8. Pendidikan politik dan kepemimpinan untuk perempuan.
9. Penguatan forum perempuan desa dan organisasi masyarakat sipil berbasis gender.
10. Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak
11. Pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, termasuk layanan pengaduan dan pendampingan hukum.
12. Sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak.
13. Pembentukan unit layanan terpadu (ULT) dan rumah aman bagi korban kekerasan. Pelatihan aparat pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG).

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.157
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Keluarga, Kesetaraan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender	99,59%*	89,42%	10,17%

***Sumber** : DinsosP3A Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Efisiensi capaian kinerja = 99,59% -100% = -0,41%
Efisiensi penyerapan anggaran = 100% - 89,42% = 10,58%
Total efesiensi = -0,41% + 10,58% = 10,17%

Sasaran "Meningkatnya Kualitas Keluarga, Kesetaraan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak" pada indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG), tercatat capaian kinerja sebesar 99,59%. Capaian yang hampir menyentuh target sempurna ini didukung oleh penyerapan anggaran yang sangat efisien, yaitu sebesar 89,42% dari total pagu yang dialokasikan. Berdasarkan perbandingan tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui instansi terkait berhasil membukukan total tingkat efisiensi sebesar 10,17%.

Tingkat efisiensi ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat deviasi tipis pada capaian kinerja, penghematan sumber daya keuangan sebesar 10,58% mampu memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi organisasi secara keseluruhan.

C. Indeks ketimpangan Gender (IPG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan. Berikut ini rumus perhitungan realisasi indikator kinerja Indeks Ketimpangan Gender :

$$IKG = 1 - \frac{HARM(G_P, G_L)}{(G_{P,L})}$$

Keterangan:
- GP = Indeks Perempuan
- GL = Indeks Laki-laki
- HARM(GP,GL) = Agregasi indeks perempuan dan laki laki dengan rata-rata harmonic
- G_{PL} = Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometric

Catatan :
- Semakin mendekati **0** → semakin kecil ketimpangan
- Semakin mendekati **1** → semakin besar ketimpangan

Data Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Tahun 2025 sampai dengan saat ini belum dipublikasikan secara resmi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sumatera Barat selaku instansi yang mengelola data tersebut. Oleh karena itu, dalam penyusunan laporan kinerja Tahun 2025 masih menggunakan data realisasi Tahun 2024, dimana IKG Kabupaten Padang Pariaman tercatat sebesar 0,722 sebagai data sementara. Nilai tersebut digunakan sebagai acuan dalam menggambarkan kondisi ketimpangan gender di daerah sambil menunggu rilis resmi data IKG Tahun 2025.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Berikut ini perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2025 :

Tabel 3.158
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,715	0.722*	99,02	Berhasil

***Sumber** : DinsosP3A Kabupaten Padang Pariaman, 2025*
**) Realisasi Tahun 2025 menggunakan data capaian Tahun 2024*

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi capaian untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2025. Dalam perencanaan tahun berjalan, pemerintah daerah menetapkan target IKG sebesar 0,715. Berdasarkan hasil pemantauan kinerja, realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 0,722. Dari perbandingan kedua angka tersebut, diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 99,02% dan dikategorikan ke dalam interpretasi "Berhasil". Secara keseluruhan, stabilitas angka IKG ini menjadi indikator positif bagi keberlanjutan program pengarusutamaan gender di Kabupaten Padang Pariaman.

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Adapun perbandingan realisasi Indikator Kinerja Utama “Indeks Ketimpangan Gender” adalah sebagai berikut :

Tabel 3.159
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	TAHUN 2024			TAHUN 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	-	0.722*	-	0,715	0.722*	99,02	Berhasil

***Sumber** : DinsosP3A Kabupaten Padang Pariaman, 2025*
**) Realisasi Tahun 2025 menggunakan data capaian Tahun 2024*

Pada tahun 2024, tidak ditetapkan target angka Indeks Ketimpangan Gender secara spesifik karena indikator ini merupakan bagian dari target yang baru dimuat dalam periode RPJMD 2025-2029, sehingga tahun 2024 berfungsi sebagai tahun basis (*baseline*) dengan realisasi sebesar 0,722. Memasuki tahun awal pelaksanaan rencana strategis pada 2025, Pemerintah Kabupaten menetapkan target IKG yang lebih kompetitif sebesar 0,715. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi yang dicatatkan adalah sebesar 0,722, yang menghasilkan persentase capaian kinerja sebesar 99,02%.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU dengan Target Jangka Menengah

Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah :

Tabel 3.160
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Ketimpangan Gender dengan Target RPJMD Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Ketimpangan Gender	0,715	0,708	0,701	0,694	0,687	0,715*	-	-	-	-

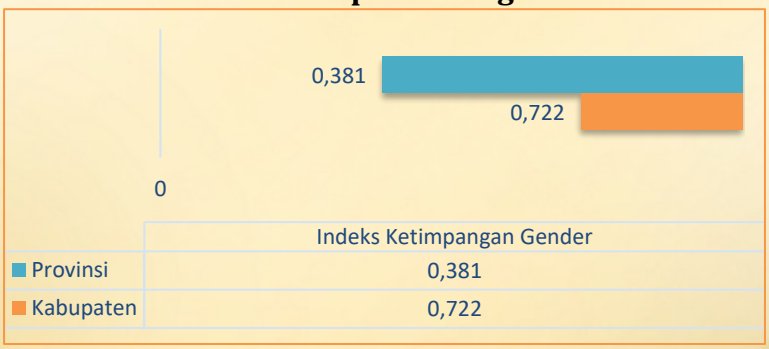
***Sumber** : DinsosP3A Kabupaten Padang Pariaman, 2025*
**) Realisasi Tahun 2025 menggunakan data capaian Tahun 2024*

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menetapkan target IKG untuk tahun 2025 sebesar 0,715. Realisasi yang berhasil dicatat adalah sebesar 0,715*, di mana angka ini merujuk pada data capaian tahun 2024 sebagai data *baseline* pelaporan tahun berjalan. Dengan keselarasan antara target dan realisasi tersebut, persentase capaian kinerja fisik mencapai 99,03%. Berdasarkan skala penilaian akuntabilitas, capaian ini berada pada kategori interpretasi "Berhasil".

Target IKG direncanakan menurun secara bertahap dari 0,715 di tahun 2025, menjadi 0,708 pada 2026, 0,701 pada 2027, 0,694 pada 2028, hingga mencapai target akhir periode sebesar 0,687 pada tahun 2029. Penurunan angka IKG ini menjadi sasaran utama guna memastikan keadilan akses dan peran bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang gender.

d) Perbandingan Realisasi Capaian IKU dengan Realisasi Provinsi Tahun 2025

Grafik 3.37
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2025 Kabupaten dengan Provinsi



***Sumber** : DinsosP3A Kabupaten Padang Pariaman, 2025*
**) Realisasi Tahun 2025 menggunakan data capaian Tahun 2024*

Realisasi Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Padang Pariaman dengan realisasi dan capaian Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025. Berdasarkan visualisasi data tersebut, tercatat bahwa angka IKG Kabupaten Padang Pariaman berada pada level 0,722, sementara angka IKG tingkat Provinsi berada pada level 0,381. Dalam indikator ketimpangan gender, semakin kecil angka indeks yang dicapai, maka semakin rendah tingkat ketimpangan yang terjadi, atau dengan kata lain, semakin baik kesetaraan gender di wilayah tersebut.

Melihat perbandingan angka tersebut, terlihat adanya selisih sebesar 0,341 poin di mana angka kabupaten masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun Kabupaten Padang Pariaman telah menunjukkan kinerja yang "Berhasil" dalam memenuhi target internalnya sendiri (mencapai 99,03% dari target kabupaten), namun jika dibandingkan secara regional, masih terdapat ruang yang cukup besar untuk melakukan perbaikan di berbagai dimensi ketimpangan, seperti kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.

e) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja

Adapun Program dan kegiatan penunjang IKU Indeks Ketimpangan Gender adalah sebagai berikut :

- PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN dengan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan dengan pagu sebesar Rp. 324.999.900,-dengan realisasi sebesar Rp.290.606.250,- dengan persentase sebesar 89,42%.
  Adapun Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut:
  1. Sosialisasi terhadap Anggota Gabungan Organisasi Wanita (GOW) di Kab. Padang Pariaman bisa merubah pola pikir tentang keberadaan organisasi perempuan dan fungsi lembaga yang ada sebagai motivasi dan pemberi informasi yang membangun.
  2. Dharma Wanita Persatuan yang merupakan kumpulan istri-istri Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat membantu suami dalam penyebaran informasi tentang pemberdayaan perempuan baik dalam rumah tangga maupun lingkungannya, pembinaan anak dan remaja kearah yang lebih baik .
  3. Dalam peringatan Hari Ibu yang ke 96 Tingkat Kab. Padang Pariaman, GOW dan DWP juga ikut berpartisipasi,Acara yang mengusung tema “Perempuan Berdaya, Indonesia Maju,” diselenggarakan dalam rangka Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-96 tahun 2025.
  4. Untuk Tahun 2023 Padang Pariaman juga telah menseleksi Perempuan Berjasa dan Berprestasi di Bidang Kesehatan, diusulkan untuk Tingkat Provinsi yaitu Ondani dari Nagari III Koto Aur Malintang Kec. IV Koto Aur Malintang.
  5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) menyelenggarakan Pelatihan peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik dan pengambilan Keputusan, diikuti 50 perempuan dari berbagai latar belakang, mulai dari aktivis perempuan, kader partai politik, hingga Perempuan yang ingin berkarier di bidang politik.

f) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Serta Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam meraih realisasi kinerja yang positif dalam indikator Indeks Ketimpangan Gender ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain :

1. Komitmen Pemerintah Daerah
   - Dukungan Bupati dan DPRD terhadap program PUG
   - Integrasi isu gender dalam RPJMD dan Renstra OPD
   - Adanya Perda/Perbup terkait PUG dan perlindungan perempuan & anak
2. Penguatan Implementasi PUG
   - Focal Point Gender di OPD
   - Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP)
   - Penganggaran Responsif Gender (ARG)
   - Pelaporan data terpilah laki-laki & perempuan
3. Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
   - Pelatihan UMKM perempuan
   - Akses bantuan modal usaha
   - Pendampingan kelompok usaha perempuan
   - Program PKH & BPNT yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan perempuan
4. Akses Pendidikan yang Semakin Baik
   - Meningkatnya angka partisipasi sekolah perempuan
   - Dukungan beasiswa bagi anak perempuan dari keluarga miskin
   - Sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak
5. Peningkatan Layanan Kesehatan
   - Ketersediaan layanan kesehatan ibu dan anak
   - Program penurunan stunting
   - Edukasi kesehatan reproduksi remaja
6. Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak
   - Keberadaan UPTD PPA
   - Rumah Perlindungan / Rumah Aman
   - Kerjasama lintas sektor (Dinas Kesehatan, Disdik, Kemenag, dll)
7. Dukungan Masyarakat dan Lembaga
   - Peran PKK dan organisasi perempuan
   - Keterlibatan tokoh adat dan agama
   - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan gender

Disamping faktor pendukung tersebut, terdapat pula beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja, antara lain :

1. Faktor Ekonomi Keluarga
   - Keterbatasan pendapatan keluarga menyebabkan prioritas pendidikan lebih diberikan kepada anak laki-laki.
   - Anak perempuan lebih sering diminta membantu pekerjaan domestik atau ekonomi keluarga.
2. Dampak Kehamilan Remaja

- Kehamilan di usia sekolah menjadi salah satu penyebab utama putus sekolah perempuan.
- Stigma sosial terhadap remaja perempuan yang hamil menghambat keberlanjutan pendidikan.

3. Terbatasnya Lapangan Kerja Formal
   - Struktur ekonomi daerah yang masih didominasi sektor informal dan pertanian.
   - Kurangnya industri atau sektor padat karya yang ramah tenaga kerja perempuan.
4. Keterbatasan Anggaran Responsif Gender
   - Belum adanya alokasi anggaran khusus atau tagging anggaran responsif gender secara konsisten.
   - Program pemberdayaan perempuan belum menjadi prioritas utama.
5. Keterbatasan Sarana dan Prasarana
   - Fasilitas kesehatan belum merata kualitas dan kelengkapannya.
   - Ketersediaan alat kesehatan dan layanan spesifik (misalnya kesehatan reproduksi) masih terbatas di wilayah tertentu.
6. Keterbatasan Tenaga Kesehatan
   - Distribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan belum merata.
   - Kekurangan tenaga bidan/dokter spesialis di fasilitas kesehatan tingkat pertama
7. Norma Tradisional yang Mengakar
   - Nilai dan kebiasaan turun-temurun yang membatasi ruang gerak perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, dan politik.
   - Resistensi terhadap perubahan peran gender yang lebih setara.

Adapun solusi atau upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja antara lain :

1. Penguatan Partisipasi Ekonomi Perempuan
   - Pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar kerja
   - Penguatan UMKM perempuan dan akses permodalan (KUR, UEP).
   - Pengembangan kewirausahaan berbasis nagari
   - Fasilitasi pemasaran digital bagi pelaku usaha perempuan
2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Perempuan
   - Sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak berbasis nagari
   - Kolaborasi dengan Dinas Pendidikan untuk intervensi anak perempuan berisiko putus sekolah.
   - Fasilitasi beasiswa bagi anak perempuan dari keluarga rentan.
3. Penguatan Kesehatan Reproduksi dan Layanan Ibu-Anak
   - Peningkatan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi
   - Penguatan layanan ibu hamil dan balita melalui Posyandu dan Puskesmas.
   - Integrasi data keluarga berisiko stunting dan rentan sosial
4. Optimalisasi Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)
   - Penguatan Pokja PUG Kabupaten
   - Pelatihan penyusunan GAP dan GBS bagi perangkat daerah
   - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG secara berkala
   - Integrasi indikator gender dalam perjanjian kinerja daerah

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.161
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Kinerja Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Keluarga, Kesetaraan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Ketimpangan Gender	99,02%*	89,42%	9,56%

***Sumber** : DinsosP3A Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Sasaran "Meningkatnya Kualitas Keluarga, Kesetaraan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak" pada indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mencatatkan persentase capaian kinerja sebesar 99,02%. Capaian yang hampir menyentuh target sempurna tersebut didukung oleh realisasi penyerapan anggaran yang sangat efisien, yaitu sebesar 89,42% dari total pagu yang dialokasikan.

Melalui perbandingan antara realisasi kinerja dan penyerapan keuangan tersebut, diperoleh nilai Total Efisiensi sebesar 9,56%. Angka efisiensi ini merupakan hasil penjumlahan dari efisiensi capaian kinerja sebesar -0,98% dan efisiensi penyerapan anggaran sebesar 10,58% yang berasal dari penghematan belanja. Hal ini merefleksikan keberhasilan instansi dalam menjalankan prinsip optimasi anggaran, di mana target kinerja dalam menekan ketimpangan gender tetap dapat terpenuhi secara maksimal meskipun terdapat sisa anggaran.

D. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Indikator ini menggambarkan pencapaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak meliputi hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus. Berikut ini rumus perhitungan realisasi indikator kinerja Indeks Perlindungan Anak:

$$IPA = \sum_{J=1}^{5} (W_j \; x \; Indeks \; K_j)$$

Data Indeks Perlindungan Anak Tahun 2025 sampai dengan saat ini belum dipublikasikan secara resmi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sumatera Barat selaku instansi yang mengelola data tersebut. Oleh karena itu, dalam penyusunan laporan kinerja Tahun 2025 masih menggunakan data realisasi Tahun 2024, dimana IPA Kabupaten Padang Pariaman tercatat sebesar 67,51% sebagai data sementara.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.162
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Indeks Perlindungan Anak Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
Indeks Perlindungan Anak	%	69,68	67,51*	96,89	Berhasil

***Sumber** : DinsosP3A Kabupaten Padang Pariaman, 2025*
**) Realisasi Tahun 2025 menggunakan data capaian Tahun 2024*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Realisasi Indeks Perlindungan Anak ditetapkan dengan target sebesar 69,68%. Realisasi yang berhasil dicapai berdasarkan evaluasi terkini adalah sebesar 67,51%. Jika dibandingkan antara realisasi terhadap target yang telah ditentukan, maka diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 96,89% menempatkan performa daerah dalam kategori interpretasi "Berhasil". Angka ini mencerminkan efektivitas program-program perlindungan anak yang dijalankan oleh pemerintah daerah dalam menjaga standar kesejahteraan dan pemenuhan hak anak.

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Adapun perbandingan realisasi Indikator Kinerja Utama “Indeks Perlindungan Anak” adalah sebagai berikut :

Tabel 3.163
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Indeks Perlindungan Anak Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	TAHUN 2024			TAHUN 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Perlindungan Anak	%	-	61,57*	-	69,68	67,51*	96,88	Berhasil

***Sumber** : DinsosP3A Kabupaten Padang Pariaman, 2025*
**) Realisasi Tahun 2025 menggunakan data capaian Tahun 2024*

Pada tahun 2024, tidak ditetapkan target angka secara spesifik dalam tabel ini karena indikator Indeks Perlindungan Anak merupakan bagian dari target yang baru dimuat secara resmi dalam dokumen RPJMD Periode 2025-2029 sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan realisasi kinerja antara tahun 2024 dengan tahun 2025 dan realisasi tahun 2024 berfungsi sebagai tahun dasar (*baseline*) sebesar 61,57%. Memasuki tahun awal pelaksanaan RPJMD pada 2025, Pemerintah Kabupaten menetapkan target yang lebih tinggi sebesar 69,68% dengan persentase capaian kinerja sebesar 96,88%. Dengan capaian yang mendekati angka 100% tersebut, kinerja daerah dalam aspek perlindungan anak dikategorikan ke dalam interpretasi "Berhasil". Hasil ini menunjukkan adanya tren positif yang berkelanjutan dalam penguatan sistem perlindungan anak di Kabupaten Padang Pariaman.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU dengan Target Jangka Menengah

Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah :

Tabel 3.164
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Perlindungan Anak dengan Target RPJMD Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Perlindungan Anak	69,68%	69,87%	70,05%	70,23%	70,42%	61,57%*	-	-	-	-

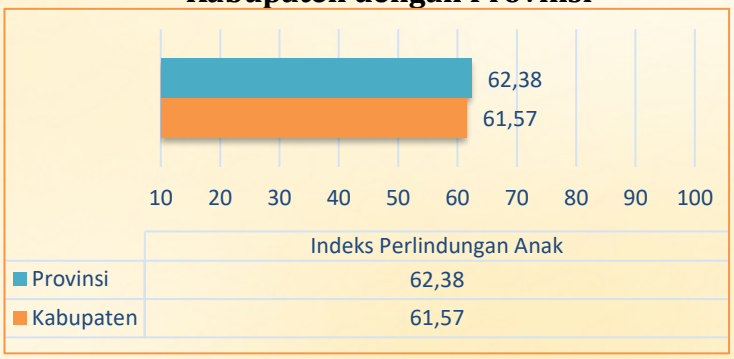
***Sumber** : DinsosP3A Kabupaten Padang Pariaman, 2025*
**) Realisasi Tahun 2025 menggunakan data capaian Tahun 2024*

Indikator Kinerja Indeks Perlindungan Anak diproyeksikan mengalami peningkatan konsisten setiap tahunnya guna mencapai kondisi ideal di akhir periode. Untuk tahun 2025, target ditetapkan sebesar 69,68% dan direncanakan terus tumbuh secara moderat menjadi 69,87% pada 2026, 70,05% pada 2027, 70,23% pada 2028, hingga mencapai puncaknya di angka 70,42% pada tahun 2029.

Pada fase awal pelaksanaan rencana strategis ini, realisasi sementara yang tercatat adalah sebesar 61,57. Meskipun terdapat jarak (*gap*) antara realisasi saat ini dengan target tahun 2025, stabilitas angka tersebut menjadi landasan penting bagi DinsosP3A Kabupaten Padang Pariaman untuk melakukan akselerasi program di sisa tahun berjalan

d) Perbandingan Realisasi Capaian IKU dengan Realisasi Provinsi Tahun 2025

Grafik 3.38
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Perlindungan Anak Tahun 2025 Kabupaten dengan Provinsi



***Sumber** : DinsosP3A Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa realisasi Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman tercatat sebesar 61,57, sementara capaian di tingkat Provinsi berada sedikit di atasnya, yakni pada angka 62,38. Perbedaan tipis sebesar 0,81 poin ini menunjukkan bahwa kualitas perlindungan anak di tingkat lokal telah berjalan cukup progresif dan mampu mengimbangi performa pembangunan perlindungan anak di tingkat regional. Di samping itu, hasil ini juga merefleksikan bahwa Kabupaten Padang Pariaman berada pada jalur yang benar dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak secara sistemik dan menjadi instrumen penting bagi Pemerintah Kabupaten, khususnya DinsosP3A, untuk terus melakukan penguatan program-program strategis agar di masa mendatang Kabupaten Padang Pariaman tidak hanya menyamai, namun mampu melampaui standar capaian provinsi dalam menciptakan lingkungan yang benar-benar ramah dan aman bagi anak.

e) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja

Adapun Program dan kegiatan penunjang IKU Indeks Pembangunan Gender Adalah sebagai berikut :

- PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK dengan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan dengan pagu sebesar Rp. 84.352.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 69.506.200,00 dengan persentase sebesar 82,40%.
  Adapun kegiatan terdapat pada program ini adalah sebagai berikut:
  1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
     - Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang diperoleh adalah Madya.
     - Telah dilaksanakan Bimtek Konveksi Hak Anak bagi Pilar-pilar sosial (TKSK, TAGANA dan Pendamping PKH) yang terdiri dari 96 peserta yang terdiri dari TKSK, TAGANA dan Pendamping PKH.
  2. Kagiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
     - Telah dilaksanakan sosialisasi dan advokasi penyediaan layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dengan peserta 68 orang yang terdiri dari unsur kecamatan, kader PKK, Bundo Kanduang dan Pengelola PAUD/TK.
- PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK dengan pagu sebesar Rp. 107.606.900,00 dengan realisasi sebesar Rp. 84.998.000,00 dengan persentase sebesar 78,99%.
  Adapun kegiatan terdapat pada program ini adalah sebagai berikut:
  1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
     - Telah dilaksanakan sosialisasi dan advokasi pembentukan PATBM Nagari dengan peserta yang terdiri dari nagari-nagari dan kecamatan.
     - Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Manajemen Kasus bagi penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak dengan jumlah peserta 78 orang yang terdiri dari petugas penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak di Nagari dan Kecamatan.
  2. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
     - Pendampingan psykolog dengan jumlah peserta 37 orang yang terdiri dari anak korban kekerasan seksual dan fisik.
     - Telah dilakukan respon kasus kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 37 kasus.

Total anggaran yang dialokasikan untuk kedua program strategis perlindungan dan pemenuhan hak anak adalah sebesar Rp. 191.959.300,00. Dari jumlah tersebut, realisasi keuangan secara keseluruhan mencapai Rp. 154.504.200,00 atau setara dengan 80,49%.

Gambar 3.90
Penanganan Pelecehan Seksual terhadap Anak



***Sumber** : DinsosP3A Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

f) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Serta Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam meraih realisasi kinerja yang positif dalam indikator Indeks Perlindungan Anak ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain :

1. Komitmen Pemerintah Daerah
   - Dukungan kebijakan Bupati terhadap Kabupaten Layak Anak (KLA)
   - Integrasi isu perlindungan anak dalam RPJMD dan Renstra OPD
   - Penganggaran untuk program perlindungan anak melalui Dinsosp3a
2. Kelembagaan Perlindungan Anak yang Aktif
   - Keberadaan UPTD PPA
   - Rumah Perlindungan/Rumah Aman
   - Satgas Perlindungan Anak di tingkat nagari/desa
   - Forum Anak daerah yang aktif
3. Koordinasi Lintas Sektor
   - Kerja sama dengan Dinas Pendidikan (pencegahan bullying & kekerasan di sekolah)
   - Dinas Kesehatan (layanan kesehatan anak & stunting)
   - Polres & Kejaksaan (penanganan kasus kekerasan)
   - Kemenag (edukasi pencegahan perkawinan anak)
4. Program Pencegahan dan Edukasi
   - Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak
   - Kampanye Stop Perkawinan Usia Anak
   - Edukasi parenting bagi keluarga
   - Sekolah Ramah Anak
5. Dukungan Program Perlindungan Sosial
   - PKH dan BPNT membantu pemenuhan kebutuhan dasar anak
   - Bantuan sosial bagi anak rentan dan keluarga miskin
   - Intervensi percepatan penurunan stunting
6. Partisipasi Masyarakat
   - Peran PKK dan kader Posyandu
   - Keterlibatan tokoh adat dan tokoh agama
   - Meningkatnya kesadaran pelaporan kasus kekerasan

Disamping faktor pendukung tersebut, terdapat pula beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja, antara lain :

1. Keterbatasan Anggaran
   - Alokasi anggaran perlindungan anak belum sepenuhnya proporsional dibanding kebutuhan kasus.
   - Belum semua OPD mengintegrasikan anggaran responsif anak dalam perecanaan (PPRG).
2. Terbatasnya SDM Profesional
   - Jumlah pendamping kasus, psikolog, dan konselor masih terbatas.
   - Kompetensi teknis SDM dalam penanganan kasus kompleks perlu ditingkatkan.
3. Jangkauan Layanan Belum Merata
   - Layanan perlindungan anak belum optimal hingga seluruh nagari.
   - Akses masyarakat terhadap layanan masih terkendala jarak dan informasi.
4. Koordinasi Lintas Sektor yang Belum Maksimal
   - Mekanisme rujukan antar OPD dan APH belum sepenuhnya terintegrasi.
   - Sinkronisasi data kasus antar lembaga belum real time.
5. Faktor Sosial dan Budaya
   - Stigma terhadap korban kekerasan menyebabkan rendahnya pelaporan.
   - Masih adanya praktik perkawinan usia anak.
   - Pola asuh yang belum sepenuhnya berbasis hak anak.
6. Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga
   - Kemiskinan dan tekanan ekonomi meningkatkan risiko kekerasan dan eksploitasi anak.
   - Kurangnya pemahaman orang tua tentang pengasuhan positif.
7. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat
   - Peran masyarakat dalam deteksi dini dan pelaporan kasus masih rendah.
   - Belum optimalnya fungsi Satgas Perlindungan Anak di tingkat nagari.

Adapun solusi atau upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja antara lain :

1. Penguatan Anggaran Responsif Anak
   - Mendorong integrasi anggaran perlindungan anak dalam PPRG seluruh OPD.
   - Advokasi peningkatan alokasi APBD untuk layanan perlindungan anak.
   - Optimalisasi dukungan CSR dan kemitraan lembaga non-pemerintah.
2. Peningkatan Kapasitas dan Kuantitas SDM
   - Pelatihan teknis penanganan kasus anak bagi pendamping dan Satgas.
   - Penambahan relawan/pekerja sosial berbasis nagari.
   - Kerja sama dengan psikolog, akademisi, dan lembaga profesional.
3. Perluasan Jangkauan Layanan hingga Nagari
   - Pembentukan dan penguatan Satgas Perlindungan Anak di seluruh nagari.
   - Penyediaan layanan pengaduan berbasis digital dan hotline aktif.
   - Mobilisasi layanan jemput bola untuk wilayah terpencil.
4. Penguatan Koordinasi dan Integrasi Data
   - Pengembangan sistem data kasus anak terintegrasi lintas OPD dan APH.
   - Rapat koordinasi rutin penanganan kasus dan monitoring evaluasi.
   - Penetapan SOP rujukan layanan yang lebih cepat dan terpadu.

5. Pencegahan Berbasis Keluarga dan Masyarakat
   - Sosialisasi pengasuhan positif dan pencegahan kekerasan secara masif.
   - Edukasi pencegahan perkawinan usia anak.
   - Kampanye anti-stigma terhadap korban kekerasan.
   - Pelibatan tokoh adat, agama, dan masyarakat dalam perlindungan anak.
6. Integrasi dengan Program Penanggulangan Kemiskinan
   - Sinkronisasi data keluarga rentan dengan program PKH dan BPNT.
   - Pendampingan keluarga berisiko tinggi.
   - Penguatan intervensi sosial bagi anak dalam keluarga miskin.

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.165
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Kinerja Indeks Perlindungan Anak Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Keluarga, Kesetaraan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Perlindungan Anak	96,89%*	80,49%	16,37%

***Sumber** : DinsosP3A Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Berdasarkan ringkasan pada diatas, indikator Indeks Perlindungan Anak menunjukkan tingkat ketercapaian kinerja yang sangat solid di angka 96,89%. Keberhasilan capaian ini dibarengi dengan manajemen keuangan yang disiplin, di mana realisasi penyerapan anggaran hanya sebesar 80,49% dari pagu yang tersedia.

Perpaduan antara tingginya capaian kinerja dan rendahnya realisasi anggaran ini menghasilkan Tingkat Efisiensi yang cukup signifikan, yaitu sebesar 16,37%.

Tingkat efisiensi ini menunjukkan bahwa program-program yang dijalankan, seperti penguatan lembaga penyedia layanan dan perlindungan khusus anak, mampu menghasilkan dampak yang luas tanpa harus menggunakan seluruh alokasi dana secara berlebihan.

SASASARAN STRATEGIS 7

Meningkatnya Kesehjateraan Sosial yang Inklusi

Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif merupakan salah satu sasaran strategis dalam penjabaran Misi ke-2 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman periode 2025-2029 yaitu "Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing". Sasaran ini difokuskan pada upaya penciptaan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan, agar dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata dan tanpa diskriminasi.

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama (IKU) yaitu Indeks Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan peta jalan pembangunan periode 2025-2029, target Indeks Kesejahteraan Sosial telah disusun secara progresif untuk memastikan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat setiap tahunnya.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

$$IKS = \sum_{i=1}^{n} (wi \times Ii)$$

- IKS = Indeks Kesejahteraan Sosial
- Nilai indikator ke-i (sudah dinormalisasi)
- Bobot indikator ke-i
- Jumlah indikator
- $\Sigma w_i = 1$ (100%)

Nilai Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Nilai Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat. Berikut perbandingan target dan realisasi kinerja indikator Indeks Kesejahteraan Sosial :

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.166
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Indeks Kesejahteraan Sosial Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	57,50	45,52	79,16	Berhasil

***Sumber** : DinsosP3A Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan target dan realisasi tahun 2025 bahwa Sasaran IKU Indeks Kesejahteraan Sosial dinilai berhasil dengan realisasi 45,52 dari target 57,50. Persentase capaian sebesar 79,16% dengan interpretasi "Berhasil". Meskipun capaian ini belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu 57,50 pada tahun 2025, namun keberhasilan ini patut diapresiasi. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah berupaya keras untuk Meningkatkan IKESOS (Indeks Kesejahteraan Sosial) melalui

berbagai program dan kegiatan, seperti program bantuan sosial, pelatihan vokasional, dan pengembangan infrastruktur.

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Adapun perbandingan realisasi Indikator Kinerja Utama "Indeks Kesejahteraan Sosial" adalah sebagai berikut :

Tabel 3.167
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Indeks Kesejateraan Sosial Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	TAHUN 2024			TAHUN 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	-	-	-	57,50	45,52	79,16	Berhasil

***Sumber** : DinsosP3A Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Tidak ada data realisasi indikator kinerja Indeks Kesejahteraan Sosial tahun 2024, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2025.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU dengan Target Jangka Menengah

Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah :

Tabel 3.168
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kesejahteraan Sosial
dengan Target RPJMD Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kesejahteraan Sosial	57,50	57,50	63,30	66,30	72,30	45,52	-	-	-	-

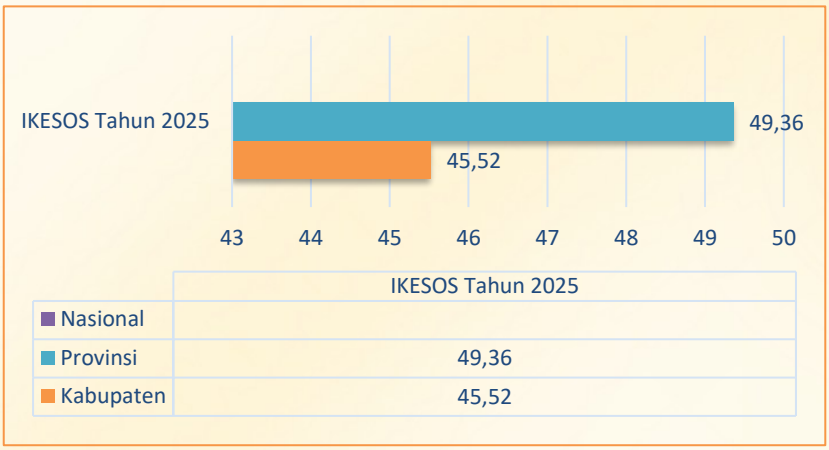
***Sumber** : DinsosP3A Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menetapkan target Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) sebesar 57,50 sebagai bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang inklusif di masyarakat. Target ini tercantum dalam dokumen perencanaan kinerja daerah sebagai tolok ukur pencapaian kondisi sosial yang lebih baik.

Meski terdapat selisih antara realisasi 45,52 dengan target awal 57,50 di tahun 2025, fokus utama kita adalah pada tren eskalasi yang telah direncanakan. Dengan target yang akan melonjak ke 63,30 di tahun 2027 hingga mencapai puncaknya di 72,30 pada akhir periode, realisasi tahun 2025 ini merupakan alarm sekaligus motivasi untuk melakukan akselerasi program yang lebih masif dan terukur guna menutup celah kinerja. Kesenjangan antara target dan realisasi ini mencerminkan perlunya evaluasi dan langkah percepatan dalam program-program sosial untuk mencapai standar kesejahteraan yang diharapkan.

d) Perbandingan Realisasi Capaian IKU dengan Realisasi Provinsi Tahun 2025

Grafik 3.39
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kesejahteraan Sosial Tahun 2025 Kabupaten dengan Provinsi



***Sumber** : DinsosP3A Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa realisasi kinerja Indeks Kesejahteraan Sosial Kabupaten berada pada angka 45,52, sementara realisasi di tingkat Provinsi mencatatkan angka yang lebih tinggi, yaitu 49,36. Selisih sebesar 3,84 poin ini menunjukkan adanya tantangan sekaligus ruang akselerasi bagi pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan program-program kesejahteraan sosial agar dapat mendekati atau bahkan melampaui rata-rata capaian di tingkat regional.

e) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja

Untuk mewujudkan agar indikator ini tercapai, maka Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan berbagai upaya. Adapun program yang dilakukan untuk mendukung sasaran ini adalah :

1. Program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.
   - Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.
     Kegiatan ini dilaksanakan berupa :
     - Penyaluran bantuan sembako berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2025 diberikan kepada keluarga miskin berdasarkan data DTKS Kementerian Sosial RI, penyaluran bantuan melalui transfer kerekening KPM untuk pembelian kebutuhan sembako melalui PT POS Indonesia yang ditunjuk. Nilai bantuan yang disalurnya sebesar Rp. 200.000,00 per bulan. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 25.110 KPM dengan anggaran sebesar Rp. 60.264.000.000,00.
2. Program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan

anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp. 211.166.600,00 dan APBN sebesar Rp. 294.205.000,00. Kegiatan pada program ini diantaranya adalah :

- Kegiatan Penyediaan Permakanan

  Kegiatan ini berupa pemberian bantuan sembako dengan rincian sebagai berikut:
  - Pemberian bantuan sembako kepada 30 orang disabilitas terlantar dari anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya dan 61 orang disabilitas terlantar dari APBN Kemensos RI;
  - Pemberian bantuan sembako kepada 30 Orang lansia terlantar dari anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya dan 85 orang lansia terlantar dari APBN Kemensos RI.
  - Pemberian bantuan sembako kepada 40 orang anak terlantar dari anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya dan dan 39 orang anak terlantar dariAPBN Kemensos RI
- Kegiatan Penyediaan Sandang :

  Kegiatan ini berupa pemberian bantuan sandang dengan rincian sebagai berikut:
  - Pemberian bantuan sandang kepada 61 orang disabilitas terlantar dari APBN Kemensos RI
  - Pemberian bantuan sandang kepada 85 orang lansia terlantar dari APBN Kemensos RI.
  - Pemberian bantuan sandang kepada 50 orang anak terlantar dari anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya dan 39 orang anak terlantar dari APBN Kemensos RI.
- Kegiatan Pemberian Alat Bantu

  Kegiatan ini berupa pemberian bantuan alat bantu. Kegiatan tersebut menggunakan anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya, dengan rincian sebagai berikut :
  - Pemberian alat bantu kepada 10 orang lansia terlantar
- Kegiatan Pemberian Alat Bantu

  Kegiatan ini berupa pemberian bantuan alat bantu. Kegiatan tersebut menggunakan APBN Kemensos RI, dengan rincian sebagai berikut :
  - Pemberian alat bantu kepada 8 orang Disabilitas terlantar
  - Pemberian alat bantu kepada 27 orang lansia terlantar
  - Pemberian alat bantu kepada 4 orang Anak terlantar
- Kegiatan pemberian bimbingan sosial keluarga penyadang disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar serta gelandangan

  Kegiatan ini berupa pembinaan dan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga. Kegiatan tersebut menggunakan anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya, dengan rincian sebagai berikut :
  - Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas sebanyak 10 orang
  - Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lansia terlantar sebanyak 10 orang
  - Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar sebanyak 10 orang

Gambar 3.91
Penyerahan Bantuan Kursi Roda untuk Disabilitas dan Bantuan Sembako untuk Lansia Terlantar



***Sumber** : DinsosP3A Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

3. Program Perlindungan Jaminan Sosial
   Telah dilakukan fasilitasi penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah Keluarga penerima PKH 15.715 KPM dengan anggaran yang bersumber dari APBN Kemensos RI.
4. Program Penanganan Bencana
   Program ini bertujuan untuk meringankan kebutuhan dasar korban bencana dengan anggaran DAU yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp. 749.974.000,00
   - Penyedian Permakanan dan Sandang
     Telah disalurkan bantuan makanan dan sandang sebanyak 31.430 jiwa yang mengalami kejadian bencana alam dan bencana sosial.
   - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memberikan bantuan sembako kepada kelompok rentan sebanyak 15 orang.
   - TAGANA Masuk Sekolah
     Pada tahun 2025 DinsosP3A telah melaksanakan TAGANA (Taruna Siaga Bencana) Masuk Sekolah sebanyak 4 Sekolah Dasar Negeri.
   - Bantuan Penguatan Usaha :
     Plt Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Padang Pariaman Siska Primadona berikan bantuan kepada Yulidawati warga Korong Simpang Balai Kamih Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, pada Jumat (31/10).

Gambar 3.92
Bantuan usaha untuk ibu Yulidawati



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Padang Pariaman bersama petugas gabungan terus berjibaku mempercepat distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak bencana. Penyaluran dilakukan melalui wali nagari dan camat se-Kabupaten Padang Pariaman guna memastikan seluruh bantuan segera sampai kepada warga yang membutuhkan.

Gambar 3.93
Bantuan Logistik bencana



***Sumber** : DinsosP3A Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Setiap bantuan yang keluar dari Gudang Transit Logistik di Pendopo Bupati disalurkan berdasarkan kebutuhan dan data By Name By Address (BNBA). Mekanisme ini dilengkapi dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) sehingga seluruh proses dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing wali nagari sebagai pihak penyalur di wilayahnya. Pendekatan ini ditempuh untuk menjaga ketepatan sasaran, menghindari tumpang tindih penyaluran, serta memastikan tidak ada wilayah yang terlewat. Kepala Dinas Sosial P3A, Siska Primadona, menegaskan bahwa seluruh proses pendistribusian dilakukan secara akuntabel dan terkoordinasi lintas unsur.

Semua korban pasca bencana alam maupun sosial telah dibantu secara keseluruhan dengan berbagai program dan kegiatan yang telah diuraikan diatas. Keberhasilan pencapaian target kinerja 100 % tersebut di atas karena dukungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan berbagai pemangku kepentingan.

Pencapaian target kinerja penyaluran bantuan bagi korban bencana tidak terlepas dari dukungan ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kemanusiaan tersebut. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai merupakan syarat mutlak dalam memobilisasi bantuan bagi korban bencana. Dengan demikian masyarakat yang terkena bencana dapat terbantu tepat waktu.

f) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Serta Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam meraih realisasi kinerja yang positif dalam indikator Indeks Kesejahteraan Sosial ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain :

1. Komitmen Pemerintah Daerah
   - Dukungan kebijakan Bupati terhadap program pengentasan kemiskinan
   - Penguatan peran TKPKD dalam koordinasi lintas sektor

- Integrasi isu kesejahteraan sosial dalam RPJMD dan Renstra OPD.

2. Ketersediaan Program Perlindungan Sosial Nasional
   - Program PKH, BPNT/Sembako, dan bantuan sosial lainnya.
   - Dukungan APBN dalam penanganan keluarga miskin dan rentan.
   - Sinergi dengan program pusat untuk percepatan penurunan kemiskinan
3. Kelembagaan Sosial yang Aktif
   - Keberadaan PSM, Tagana, TKSK, Pendamping PKH, dan relawan sosial.
   - Peran nagari dalam pemutakhiran data dan deteksi dini PPKS.
   - Dukungan lembaga sosial dan CSR swasta.
4. Sistem Data Terpadu (DTSEN /SIKS-NG)
   - Adanya sistem basis data nasional sebagai dasar penetapan sasaran.
   - Dukungan digitalisasi dalam pengelolaan data kesejahteraan sosial.
5. Potensi Ekonomi Lokal
   - Pengembangan UMKM dan usaha berbasis nagari.
   - Sektor pertanian, perikanan, dan ekonomi kreatif sebagai sumber pemberdayaan.
6. Budaya Gotong Royong dan Solidaritas Sosial
   - Nilai sosial kemasyarakatan yang masih kuat
   - Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan bantuan kemanusiaan
7. Dukungan Penanganan Kebencanaan
   - Keberadaan TRC dan Tagana dalam respon cepat sosial.
   - Sinergi penanganan pasca bencana untuk mencegah peningkatan kemiskinan ekstrem

Disamping faktor pendukung tersebut, terdapat pula beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja, antara lain :

1. Keterbatasan Anggaran Sosial
   - Alokasi anggaran penanganan PPKS belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan riil di lapangan
   - Program pemberdayaan masih lebih dominan bersifat bantuan, belum sepenuhnya mendorong kemandirian
2. Validitas dan Integrasi Data yang Belum Optimal
   - Pemutakhiran DTSEN belum dilakukan secara berkala dan menyeluruh
   - Masih terjadi inclusion error (yang tidak layak menerima bantuan) dan exclusion error (yang layak belum menerima)
   - Keterbatasan SDM/operator SIKS-NG di Nagari
3. Kapasitas SDM Pelayanan Sosial
   - Jumlah pekerja sosial dan pendamping PKH terbatas dibandingkan jumlah KPM
   - Kompetensi teknis SDM perlu peningkatan, terutama dalam pendekatan pemberdayaan dan rehabilitasi sosial
4. Jangkauan Layanan yang Belum Merata
   - Wilayah geografis yang luas dan rawan bencana menghambat akses layanan
   - Sarana prasarana pelayanan sosial belum sepenuhnya memadai
5. Ketergantungan terhadap Bantuan Sosial

- Sebagian KPM belum mengalami graduasi mandiri
- Rendahnya literasi keuangan dan keterampilan usaha keluarga penerima manfaat

6. Koordinasi Lintas Sektor
   - Intervensi pengentasan kemiskinan belum sepenuhnya terpadu antar OPD
   - Belum optimalnya integrasi program sosial dengan sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan
7. Faktor Eksternal (Bencana dan Ekonomi)
   - Padang Pariaman rawan bencana yang berdampak pada peningkatan jumlah PPKS
   - Fluktuasi harga dan kondisi ekonomi memengaruhi daya beli masyarakat

Adapun solusi atau upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja antara lain :

1. Penguatan Intervensi Pengentasan Kemiskinan
   - Mendorong graduasi mandiri KPM PKH melalui pemberdayaan ekonomi
   - Penguatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan UEP berbasis nagari
   - Pendampingan kewirausahaan dan literasi keuangan bagi keluarga rentan
2. Perbaikan dan Integrasi Data Kesejahteraan Sosial
   - Pemutakhiran DTKS secara berkala dan partisipatif di tingkat nagari
   - Peningkatan kapasitas operator SIKS NG
   - Sinkronisasi data kemiskinan lintas OPD dan BPS
3. Peningkatan Kapasitas SDM Pelayanan Sosial
   - Pelatihan teknis pekerja sosial dan pendamping PKH
   - Penguatan peran PSM dan relawan sosial.
   - Monitoring dan evaluasi berbasis kinerja pendamping
4. Perluasan Jangkauan Layanan Sosial
   - Layanan jemput bola untuk wilayah terpencil dan pasca bencana
   - Penguatan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga dan komunitas
   - Kolaborasi dengan nagari dalam deteksi dini PPKS
5. Integrasi Program Lintas Sektor
   - Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
   - Integrasi program sosial dengan sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan
   - Perencanaan berbasis keluarga (family based intervention)
6. Mitigasi Dampak Bencana terhadap Kesejahteraan Sosial
   - Penguatan kesiapsiagaan dan respon cepat sosial
   - - Program pemulihan sosial ekonomi pasca bencana
   - - Penyediaan bantuan stimulan usaha bagi keluarga terdampak

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2025 anggaran program dan kegiatan yang berkaitan dengan "Indeks Kesejahteraan Sosial" memperoleh PAGU sebesar Rp. 808.267.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 534.878.051,00 dengan persentase sebesar 66,17%. Adapun efisiensi yang diperoleh sebesar Rp. 273.389.349,00 atau 33,83%.

Tabel 3.169
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Kinerja Indeks Kesejahteraan Sosial Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	79,16%	66,17%	12,99%

***Sumber** : DinsosP3A Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Berdasarkan tabel diatas, indikator Indeks Kesejahteraan Sosial tahun 2025 menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat signifikan dan terukur. Dari total alokasi PAGU sebesar Rp 808.267.400,00 realisasi belanja hanya terserap sebesar Rp 534.878.051,00 atau sekitar 66,17%. Hal ini menghasilkan penghematan anggaran sebesar Rp 273.389.349,00 yang setara dengan tingkat efisiensi 33,83%. Keberhasilan menekan biaya operasional ini mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengoptimalkan anggaran untuk mencapai output yang maksimal tanpa pemborosan sumber daya.

Optimalisasi ini semakin terlihat jelas ketika membandingkan serapan biaya dengan hasil fisik, di mana capaian kinerja mampu menyentuh angka 79,16% meskipun hanya menggunakan 66,17% anggaran. Dengan tingkat efisiensi sebesar 12,99%, data ini memberikan basis optimisme yang kuat bagi keberlanjutan program di masa depan. Keberhasilan dalam melakukan penghematan yang besar pada tahun ini memungkinkan adanya ruang fiskal yang lebih fleksibel untuk mendukung akselerasi pencapaian target-target progresif dalam sisa periode perencanaan mendatang.

SASARAN STRATEGIS 8

Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Terhadap Perekonomian Daerah

Sasaran strategis "Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap Perekonomian Daerah" merupakan turunan langsung dari Misi ke-3 yaitu "Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata". Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa struktur ekonomi daerah tetap bertumpu pada sektor unggulan yang menyentuh lapisan masyarakat luas, sehingga pertumbuhan yang dihasilkan bersifat inklusif dan tidak hanya terkonsentrasi pada sektor tertentu. Dengan memperkuat basis ekonomi primer ini, daerah berupaya menciptakan pemerataan kesejahteraan yang kokoh bagi seluruh pelaku usaha tani dan nelayan di Kabupaten Padang Pariaman.

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja utama Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai parameter kemajuan ekonomi yang mandiri dan kompetitif. Rasio ini mencerminkan sejauh mana transformasi ekonomi daerah mampu mendorong sektor primer untuk berkontribusi lebih besar dalam struktur PDRB, sejalan dengan semangat misi ketiga untuk mewujudkan ekonomi yang maju. Melalui keterkaitan ini, setiap peningkatan nilai tambah di sektor pertanian menjadi bukti nyata atas pencapaian pembangunan yang merata dan berkelanjutan bagi perekonomian daerah.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan =

(Nilai Tambah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan / Nilai PDRB Kab. ADHB) x100%

Berdasarkan data Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2026, realisasi indikator Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencatatkan angka sebesar **20,70%**. Pencapaian ini menegaskan bahwa sektor primer bukan sekadar penyedia pangan, melainkan motor penggerak utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, maju, dan merata sesuai dengan mandat Misi ke-3 pembangunan daerah.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.170
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	20,34	20,70	101,77	Sangat Berhasil

***Sumber** : Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2026*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa indikator Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ini berhasil mencatatkan angka 20,70%, melampaui target awal yang ditetapkan sebesar 20,34%. Persentase capaian ini memperoleh hasil sebesar 101,77% dengan interpretasi "Sangat Berhasil".

Pencapaian yang melampaui target ini menegaskan posisi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan bukan hanya sebagai penjaga stabilitas, tetapi juga sebagai mesin pertumbuhan yang sangat produktif dalam struktur ekonomi daerah. Sebagai kontributor terbesar kedua di bawah sektor transportasi dan pergudangan, capaian 20,70% ini memberikan fondasi optimisme yang kokoh bagi pemerintah daerah untuk terus mendorong modernisasi dan hilirisasi sektor primer.

(b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Adapun perbandingan realisasi Indikator Kinerja Utama "Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan" adalah sebagai berikut :

Tabel 3.171
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	-	20,17	-	20,34	20,70	101,77	Sangat Berhasil

***Sumber** : Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2026*

Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB meningkat sebesar 0,53 poin persentase, dari 20,17% pada tahun 2024 menjadi 20,70% pada tahun 2025. Pencapaian tahun 2025 ini menjadi semakin prestisius karena realisasi sebesar 20,70% tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar 20,34%, menghasilkan tingkat capaian kinerja sebesar 101,77%. Dengan predikat "Sangat Berhasil".

Besarnya kontribusi sektor ini, merupakan hasil dari perpaduan kekuatan tiga sub-sektor utama yang saling melengkapi. Sub-sektor Pertanian tetap menjadi kontributor dominan melalui pengelolaan lahan produktif untuk tanaman pangan dan hortikultura yang menjadi sumber pendapatan utama mayoritas masyarakat perdesaan. Namun, kekuatan ekonomi daerah juga ditopang secara signifikan oleh sub-sektor Kehutanan melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan fungsi ekologis yang mendukung keberlanjutan sumber daya, serta sub-sektor Perikanan yang mengoptimalkan potensi wilayah perairan, baik tangkap maupun budidaya, sebagai penyumbang protein dan komoditas ekspor daerah.

(c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU dengan Target Jangka Menengah

Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah :

Tabel 3.172
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan Target RPJMD Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	20,34%	20,83%	21,32%	21,8%	22,29%	20,70%	-	-	-	-

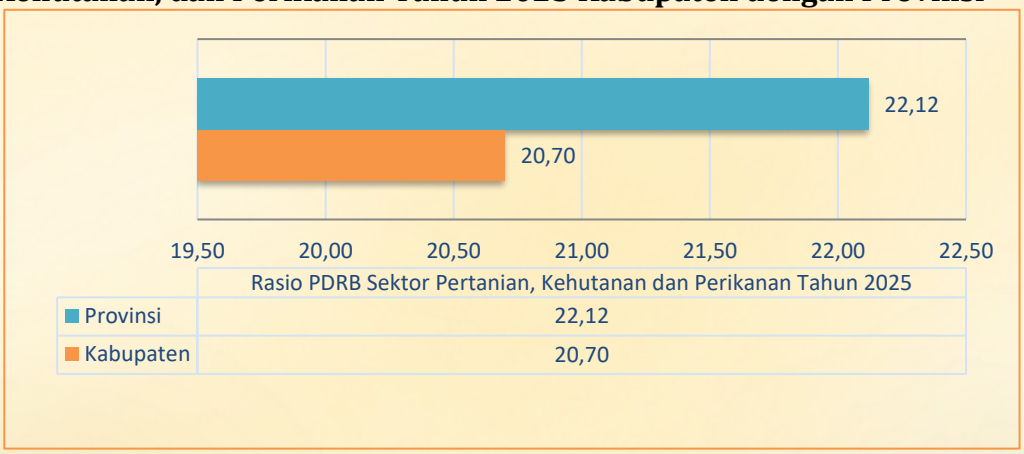
***Sumber** : Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2026 dan RJPMD Kab. Padang Pariaman Tahun 2025-2029*

Pencapaian sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun pertama periode RPJMD 2025-2029 menunjukkan performa yang sangat menjanjikan sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Dengan realisasi sebesar 20,70% pada tahun 2025, sektor ini berhasil melampaui target awal yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 20,34**%.** Keberhasilan di tahun awal ini memberikan modal optimisme yang kuat, mengingat sektor primer merupakan pilar utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan merata di Kabupaten Padang Pariaman.

Realisasi ini juga menjadi landasan penting untuk menghadapi tren target yang semakin meningkat secara progresif pada tahun-tahun mendatang, yang diproyeksikan mencapai 22,29% di tahun 2029. Dengan menjaga konsistensi produktivitas pada sub-sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, pemerintah daerah memiliki peluang besar untuk terus memperkuat dominasi ekonomi sektor primer sebagai kontributor strategis dalam struktur PDRB selama satu dekade ke depan.

d) Perbandingan Realisasi Capaian IKU dengan Realisasi Provinsi Tahun 2025

Grafik 3.40
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun 2025 Kabupaten dengan Provinsi



***Sumber** : Berita Resmi Statistik (BRS), BPS Provinsi Sumatera Barat, 2026*

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa realisasi Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kabupaten Padang Pariaman sebesar 20,70% menunjukkan performa yang sangat kompetitif jika disandingkan dengan realisasiprovinsi yang berada di angka 22,12%. Realisasi ini memiliki selisih yang tipis yaitu 1,42% di bawah rata-rata kontribusi sektor yang sama di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menegaskan

bahwa Padang Pariaman tetap menjadi salah satu basis utama ketahanan pangan dan ekonomi primer di Sumatera Barat.

Selain itu tingkat provinsi, sektor ini bahkan tumbuh sebesar 4,14% sepanjang tahun 2025, menjadikannya sektor dengan pangsa pasar terbesar dalam perekonomian Provinsi Sumatera Barat. Kedepan diharapkan adanya sinergi antara kebijakan lokal dan dinamika ekonomi provinsi dapat terus memacu sektor ini menjadi mesin pertumbuhan yang inklusif menuju target RPJMD selanjutnya.

e) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja

Capaian realisasi sebesar 20,70% ini didorong oleh pertumbuhan positif pada sub-sektor penyusunnya. Sub-sektor Pertanian tetap menjadi kontributor utama melalui program intensifikasi lahan, diikuti oleh Sub-sektor Perikanan yang mengalami peningkatan produksi hasil tangkap/budidaya, serta Sub-sektor Kehutanan yang memberikan nilai tambah melalui optimalisasi hasil hutan bukan kayu. Sinergi ketiga sub-sektor ini melalui program-program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dangan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 705.192.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 699.822.736,00. Persentase penyerapan anggaran program ini sebesar 99,24%.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dangan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 328.538.650,00 dan realisasi sebesar Rp. 309.449.400,00. Persentase penyerapan anggaran program ini sebesar 94,19%.
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dangan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 60.048.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 59.800.000,00. Persentase penyerapan anggaran program ini sebesar 99,59%.
4. Program Penyuluhan Pertanian dangan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 552.528.687,00 dan realisasi sebesar Rp. 529.269.650,00. Persentase penyerapan anggaran program ini sebesar 95,79%.

Adapun perbandingan hasil produksi tanaman pangan pada tahun 2025 yang terkait dengan pelaksanaan program-program diatas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.173
Perbandingan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2024 dan 2025

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Produktivitas tanaman pangan:		
1. Produktivitas padi (Ton/Ha)	4,40	4,76
2. Produktivitas jagung (Ton/Ha)	5,82	6,16
Produksi tanaman pangan:		
3. Produksi padi (Ton)	184.499	196.241
4. Produksi jagung (Ton)	39.200	29.449
5. Peningkatan produksi tanaman pangan (%)	2,94	0,89

***Sumber** : DistanKP Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Sedangkan perbandingan hasil produksi tanaman holtikultura pada tahun 2025 yang terkait dengan pelaksanaan program-program diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.174
Perbandingan Produksi Tanaman Holtikultura Tahun 2024 dan 2025

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Produksi tanaman hortikultura:		
1. Produksi jambu biji (Ton)	766	584
2. Produksi pisang (Ton)	23.026	18.827
3. Produksi durian (Ton)	16.749	25.056
4. Produksi papaya (Ton)	13.640	12.873
5. Produksi manggis (Ton)	6.716	4.674
6. Produksi cabe (Ton)	1.012	755
7. Peningkatan produksi tanaman hortikultura (%)	3,07	1,39

***Sumber** : DistanKP Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

5. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dangan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 24.762.200,00 dan realisasi sebesar Rp. 24.112.363,00. Persentase penyerapan anggaran program ini sebesar 97,38%

Tabel 3.175
Hasil Produksi Daging Tahun 2025 Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Sapi Potong Lokal	Sapi Perah	Kerbau	Kambing	Unggas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
Batang Anai	27.256	-	2.520	840	1.701.241	1.731.857
Lubuk Alung	58.207	-	50.580	150	1.304.964	1.413.901
Sintoga	30.951	-	7.020	450	520.173	558.594
Ulakan Tapakis	32.568	-	11.160	300	91.130	135.158
Nan Sabaris	72.759	-	22.500	120	852.340	947.719
2x11 Enam Lingkung	39.729	-	23.760	1.110	470.486	535.085
Enam Lingung	25.408	-	21.780	2.235	391.370	440.793
2x11 Kayu Tanam	41.114	1.522	1.080	1.170	2.031.906	2.076.792
VII Koto Sungai Sariak	91.699	-	24.480	300	182.541	299.020
VII Koto Patamuan	14.552	-	2.160	255	555.197	572.164
VII Koto Padang Sago	18.247	-	2.160	885	54.939	76.231
V Koto	37.650	-	31.140	2.580	144.877	216.247
V Koto Timur	24.484	-	17.280	105	415.022	456.891
Sungai Limau	23.560	-	20.520	30	352.046	396.156
Batan Gasan	18.016	-	3.060	825	32.512	54.413
Sungai Geringgiang	26.794	-	39.960	-	485.438	552.192
IV Koto Aur Malintang	51.047	-	4.140	-	80.512	135.699
Jumlah	634.041	1.522	285.300	11.355	9.666.696	10.598.914

***Sumber** : Disnakkeswan Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Disamping itu, juga terdapat produksi komoditas peternakan tahun yang terdiri atas 3 (tiga) jenis, sebagai berikut :

Tabel 3.176
Hasil Produksi Komoditas Peternakan Tahun 2024 dan Tahun 2025

No.	Hasil Produksi	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Susu (Kg)	21.420	2.060,8
2.	Telur (Kg)	28.701.686	37.127.190,81
3.	Pakan Ternak (Ton)	2.110,12	2.637,66

***Sumber** : Disnakkeswan Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

6. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dangan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 1.115.769.150,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.115.769.150,00. Persentase penyerapan anggaran program ini sebesar 97,64%.

   Jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun 2025 adalah sebesar 58.963,38 ton. Dimana produksi perikanan budidaya pada tahun ini meningkat 1,81% dari tahun 2024 (57.914,62 ton). Produksi perikanan budidaya pada tahun ini meningkat sebanyak 1.048,76.

Secara akumulatif, dukungan anggaran untuk program-program lingkup pertanian dan perikanan pada tahun 2025 mencapai Rp. 2.786.838.687,00 dengan tingkat penyerapan yang tinggi yakni sebesar Rp. 2.738.223.299,00 atau 98,26%.

f) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Serta Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam meraih realisasi kinerja yang positif dalam indikator Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain :

1. Bantuan benih/bibit tanaman pangan (Padi dan Jagung)
   Selama tahun 2025 Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyediakan benih padi unggul berlabel kepada masyarakat tani sebanyak 35 hektar dan benih jagung sebanyak 16 hektar, yang bersumber dari APBD Kabupaten Padang Pariaman. Disamping itu, melalui APBD Provinsi Sumatera Barat menyalurkan bantuan padi kepada 19 kelompok tani dan benih jagung kepada 7 kelompok tani. Melalui Dana APBN menyalurkan benih padi kepada 61 kelompok tani dan benih jagung kepada 92 kelompok tani.

Gambar 3.94
Bantuan Benih Unggul Bersertifikat Kepada Masyarakat Tani



2. Bantuan sarana produksi alsintan (alat mesin pertanian pertanian)
   Pada tahun 2025 DistanKP memberikan alat mesin pertanian kepada masyarakat melalu kelompok tani berupa tracktor roda 4 dan roda 2, pompa air, rice transplanter dan *handsprayer*. Kegiatan ini bersumber dari dana APBN, APBD Provinsi maupun dana APBD Kabupaten Padang Pariaman. Disamping Alsintan Prapanen, DistanKP juga menyalurkan bantuan alsintan pasca panen seperti *combine harvester, power tresher* dan *corn sheler.* Kegiatan ini bersumber dari penganggaran APBN.

Gambar 3.95
Bantuan Sarana Alsintan kepada Kelompok Tani



3. Pembangunan/rehabilitasi prasarana pertanian
   Pada tahun 2025 DistanKP melakukan pemeliharaan/rehabilitasi jaringan irigasi usaha tani/jaringan irigasi tersier sebanyak 39 unit. Disamping itu DistanKP juga melakukan pembangunan/rehabilitasi jjalan usaha tani (JUT) sebanyak 5. Kegiatan ini bersumber dari dana APBN.

Gambar 3.96
Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani



***Sumber** : DistanKP Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

4. Kultur bidaya masyarakat Padang Pariaman yang sudah terbiasa beternak secara turun-temurun.
5. Sumber daya alam yang mendukung antara lain : hamparan lahan potensial yang masih tersedia, bahan pakan tersedia yang bersumber dari rumput sisa hasil pertanian seperti : daun jagung, jerami dan lain-lain

6. Topografi wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari dataran rendah sehingga cocok untuk pemeliharaan sapi bali, sapi pesisir dan kerbau. Sedangkan dataran tinggi cocok untuk pemeliharaan sapi simental, sapi brahman, sapi limousin dan lain-lain.
7. Kompetensi petugas medik dan paramedik peternakan yang sudah memadai.
8. Adanya sarana prasarana peternakan yang memadai, seperti : pasar ternak di Kecamatan VII Koto Sungai Sarik dan 2 (dua) Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan).

Gambar 3.97
Berbagai Kegiatan dalam Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

<table>
<tr>
<td> 

Pendistribusan N2 Cair</td>
<td> 
Pelaksanaan IB</td>
</tr>
<tr>
<td> 
Monitoring dan Pembinaan Kelompok Tani Penerima Bantuan Ternak Unggas Pemerintah</td>
<td> 
Monitoring dan Pembinaan Kelompok Tani Penerima Bantuan Ternak Unggas Pemerintah</td>
</tr>
</table>

***Sumber** : Disnakkeswan Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

9. Potensi produksi ikan sebagai bahan baku pengolahan hasil perikanan cukup tinggi
10. Minat masyarakat terutama ibu rumah tangga untuk melakukan usaha hasil perikanan cukup tinggi
11. Usaha pengolahan hasil perikanan tidak membutuhkan modal yang tinggi
12. Peluang pemasaran cukup terbuka baik dalam pemasaran *offline* maupun *online* (media sosial)

Gambar 3.98
Kegiatan Sosialisasi Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN)



***Sumber** : Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Gambar 3.99
Budikdamber (Budidaya Ikan Dalam Ember)



***Sumber** : Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Disamping faktor pendukung tersebut, terdapat pula beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja, antara lain :

1. Serangan Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan
2. Bencana Hidrometeorologi (banjir/longsor)
   Bencana hidrometeorologi yang terjadi pada Bulan November 2025 sangat berdampak pada kerusakan lahan pertanian, terutama pada lahan tanaman pangan. Disamping itu selain menyebabkan kerusakan pada lahan, bencana ini juga menyebabkan kerusakan pada prasarana irigasi, baik irigasi primer, sekunder maupun pada jaringan irigasi tersier. Kerusakan yang terjadi pada lahan sawah seluas 1.263 ha, dengan rincian kerusakkan berat seluas 576 ha, kerusakkan sedang 240 ha dan kerusakkan ringan seluas 447 ha. Diperkirakan nilai kerugian akibat bencana ini pada lahan sawah sebesar Rp. 81.707.500.000,-. Berikut disajikan data kerusakan lahan sawah perkecamatan di Kabupaten Padang Pariaman.
3. Belum adanya petugas Pengambil Contoh Pakan (PPC) yang bersertifikat
4. Kurang pengetahuan peternak tentang nutrisi pakan
5. Kurang optimalnya pengawasan mutu pakan di lakukan oleh wastukan karena luasnya wilayah kerja di Kabupaten Padang Pariaman dan fasilitas sarana yang tidak tersedia
6. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang nilai gizi ikan dan manfaat ikan

7. Masih rendahnya diversifikasi produk olahan perikanan
8. Ketersediaan bahan baku ikan Fluktuatif
9. Kualitas SDM Pengolah hasil perikanan belum merata
10. Sarana dan Prasarana Pengolahan hasil perikanan belum memadai
11. Kurang aktifnya kelembagaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

Adapun solusi atau upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja antara lain :

1. Meningkatkan penggunaan sarana produksi seperti, bibit unggul bersertifikasi;
2. Melakukan pengendalian organisme penggagu tumbuhan (OPT) serta pengendalian serangan penyakit oleh jamur, bakteri maupun virus
3. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tani secara berkesinambungan
4. Melakukan mitigasi dan antisipasi pengusahaan usaha pertanian terhadap dampak perubahan iklim (DPA)
5. Perlu adanya pelatihan untuk peningkatan Kompetensi Petugas PPC
6. Pembinaan dan Sosilaisasi tentang pakan ternak
7. Perlunya ketersediaan sarana
8. Pembinaan berkelanjutan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Pariaman sehingga peternak selektif dalam memilih bahan pakan ternak yang ada di pasaran
9. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang nilai gizi dan makan ikan melalui sosialisasi gemarikan serta bimbingan teknis diversifikasi pengolahan hasil perikanan
10. Peningkatan kapasitas SDM pengolah hasil perikanan melalui pelatihan
11. Pemberian bantuan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan melalui APBD kab/prov dan APBN
12. Peningkatan pembinaan kelembagaan dan teknis kepada kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan oleh petugas teknis dinas dan penyuluh perikanan.

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2025 anggaran program dan kegiatan yang berkaitan dengan indicator "Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan" menetapkan pagu sebesar Rp. 2.786.838.687,00 dengan tingkat penyerapan yang tinggi yakni sebesar Rp. 2.738.223.299,00 atau 98,26%.

Tabel 3.177
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Terhadap Perekonomian Daerah	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	101,77%	98,26%	3,51%

***Sumber** : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Terhadap Perekonomian Daerah" pada tahun 2025

menunjukkan hasil yang sangat impresif, baik dari sisi output kinerja maupun optimalisasi anggaran. Indikator Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berhasil mencatatkan capaian kinerja sebesar 101,77%. Angka ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berhasil memenuhi target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan, namun mampu melampauinya. Keberhasilan kinerja tersebut didukung oleh pemanfaatan anggaran sebesar 98,26%. Sehingga efisiensi penggunaan sumber daya menghasilkan angka sebesar 3,51%.

Hal ini mengukuhkan bahwa penyelenggaraan program pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2025 telah memenuhi prinsip akuntabilitas kinerja, yakni tidak sekadar menghabiskan anggaran, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan perekonomian daerah secara efisien.

SASASARAN STRATEGIS 9

Meningkatnya Kontribusi Perdagangan, UMKM, dan Industri Berbasis Sektor Unggulan

Sasaran "Meningkatnya Kontribusi Perdagangan, UMKM dan Industri Berbasis Sektor Unggulan" merupakan penjabaran dari Misi ke-3 yaitu "Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata". Sasaran strategis ini diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi daerah melalui optimalisasi sektor-sektor non-primer yang memiliki nilai tambah tinggi. Fokus utama adalah menciptakan ekosistem usaha yang kondusif bagi sektor perdagangan, penguatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UMKM, serta pengembangan industri pengolahan yang berbasis pada potensi sektor unggulan daerah. Keberhasilan sasaran ini diharapkan dapat mendiversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi sehingga ketahanan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman semakin meningkat.

Untuk mengukur efektivitas pencapaian sasaran tersebut, digunakan 3 (tiga) indikator kinerja antara lain : Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB, Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB dan Rasio PDRB Industri Pengolahan.

A. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Aktivitas perdagangan berperan sebagai penghubung antara proses produksi dan konsumsi masyarakat, sehingga keberadaannya sangat menentukan kelancaran distribusi barang dan jasa. Melalui kegiatan perdagangan, berbagai produk hasil pertanian, industri, maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat dipasarkan secara lebih luas sehingga memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

Dalam struktur perekonomian daerah, sektor perdagangan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besarnya kontribusi tersebut mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi masyarakat, daya beli, serta perkembangan usaha perdagangan yang ada di suatu wilayah. Semakin besar kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, maka semakin besar pula peran sektor tersebut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain sebagai penggerak ekonomi, sektor perdagangan juga memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat jaringan distribusi barang dan jasa. Oleh karena itu, penguatan sektor perdagangan melalui kebijakan pemerintah daerah, peningkatan infrastruktur pasar, serta pengembangan usaha perdagangan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap PDRB.

Pengukuran kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dilakukan dengan membandingkan nilai tambah yang dihasilkan sektor perdagangan terhadap total nilai PDRB suatu daerah pada periode tertentu.

Rumus Perhitungan :

Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB =

$$\frac{PDRB\ Sektor\ Perdagangan}{Total\ PDRB}\ x\ 100\%$$

a) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025

Berikut ini adalah target dan realisasi indikator kinerja Indeks Konstribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025:

Tabel 3.178
Perbandingan Target dan Realisasi Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	11,85	10,38	87,59	Berhasil

***Sumber** : BPS Padang Pariaman Dalam Angka, 2025*

Realisasi Indikator Kinerja Utama Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 yaitu 10,38% dari target yang ditetapkan sebesar 11,85%, sehingga capaian ini melebihi target dengan capaian kinerja sebesar 87,59% dengan interpretasi " Berhasil".

b) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

Tabel 3.179
Perbandingan Realisasi Capaian Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	8,64	10,19	117,9	11,85	10,38	87,59	Berhasil

***Sumber** : BPS Padang Pariaman Dalam Angka, 2025*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Indikator Kinerja Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2024 sebesar 10,19 dari target sebesar 8,64 dengan persentase capaian sebesar 117,9%. Sedangkan realisasi pada tahun 2025 meningkat yaitu sebesar 10,38% dari target yang ditetapkan sebesar 11,85%, sehingga capaian ini melebihi target dengan capaian kinerja sebesar 87,59%.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025-2029 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan target pada RPJMD 2021-2026 dengan realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.180
Perbandingan Realisasi Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2025-2029 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	11,85	13,55	15,25	16,95	18,45	10,38	-	-	-	-

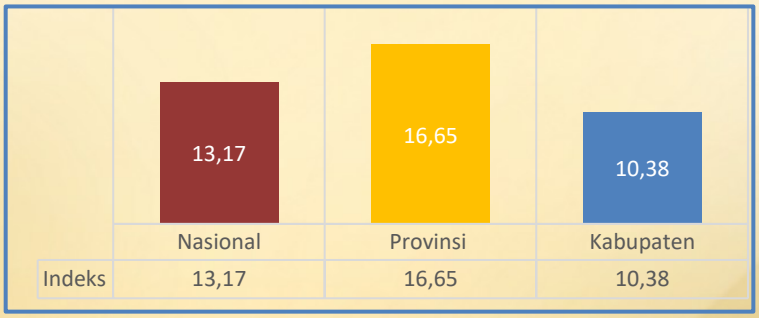
***Sumber** : BPS Padang Pariaman Dalam Angka, 2025*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Indikator Kinerja Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2021 sebesar 10,65% dari target yang ditetapkan sebesar 8,52%, sehingga persentase capaian kinerja mencapai 125,00%. Pada tahun 2022, realisasi kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tercatat sebesar 10,44% dari target 8,58%, sehingga persentase capaian kinerja mencapai sekitar 121,68%. Selanjutnya pada tahun 2023, realisasi kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sebesar 10,19% dari target 8,60%, dengan persentase capaian kinerja sekitar 118,49%. Pada tahun 2024, realisasi kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tercatat sebesar 10,19% dari target 8,64%, sehingga persentase capaian kinerja mencapai sekitar 117,94%. Sedangkan pada tahun 2025, realisasi kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB meningkat menjadi sebesar 10,38% dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 8,69%, sehingga capaian kinerja mencapai sekitar 119,45%. Dengan demikian, realisasi kinerja pada tahun 2025 kembali melampaui target yang telah ditetapkan.

d) Perbandingan Realisasi IKU Kabupaten, Provinsi dan Nasional IKU Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Berikut ini adalah perbandingan realisasi IKU Kabupaten, Provinsi dan Nasional terkait Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB adalah sebagai berikut :

Grafik 3.41
Perbandingan Realisasi Kinerja Kabupaten, Provinsi dan Nasional Terkait Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB



Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2025 adalah sebesar 10,38. Jika dibandingkan dengan capaian pada tingkat yang lebih tinggi, nilai tersebut masih berada di bawah capaian Provinsi Sumatera Barat yang sebesar 16,65 serta capaian Nasional sebesar 13,17.

Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Padang Pariaman masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat provinsi maupun nasional, sehingga masih diperlukan berbagai upaya dan strategi untuk meningkatkan peran sektor perdagangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun demikian, sektor perdagangan tetap menjadi salah satu sektor penting yang memberikan kontribusi terhadap struktur perekonomian daerah.

e) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB merupakan salah satu indikator yang menggambarkan peranan sektor perdagangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun pelaporan, target kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ditetapkan sebesar 11,85%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 10,38%. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor perdagangan tetap memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, namun peningkatannya belum optimal sesuai dengan yang direncanakan.

Belum tercapainya target tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Kondisi perekonomian masyarakat, perkembangan usaha perdagangan, serta daya beli masyarakat sangat mempengaruhi besarnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Selain itu, perkembangan sektor lain dalam struktur ekonomi daerah juga turut mempengaruhi besaran persentase kontribusi sektor perdagangan.

Faktor Pendukung :

1. Adanya pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang perdagangan sehingga mendorong aktivitas jual beli di masyarakat.
2. Dukungan pemerintah daerah melalui program pengembangan pasar rakyat, fasilitasi promosi produk unggulan daerah, serta pembinaan pelaku usaha perdagangan.

Faktor Penghambat :

1. Daya beli masyarakat yang belum stabil sehingga mempengaruhi tingkat transaksi perdagangan.
2. Persaingan usaha yang semakin tinggi serta keterbatasan akses pemasaran bagi sebagian pelaku usaha perdagangan.

Alternatif Solusi yang Diharapkan :

1. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha perdagangan, khususnya UMKM, melalui pelatihan, fasilitasi promosi, serta penguatan akses pemasaran produk.
2. Mengoptimalkan pengembangan dan revitalisasi pasar rakyat serta memperluas jaringan distribusi dan pemasaran produk lokal guna meningkatkan aktivitas perdagangan di daerah.

Gambar 3.100
Kegiatan Terkait dengan Sektor Perdagangan



Bupati Mengunjungi Pasar Rakyat



Wabup Mengunjungi Pasar Pambukoan



Bupati Mengunjungi Pasar Ternak



Bupati berdialog dengan Pedagang Pasar

f) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU

Adapun Program pendukung capaian indikator kinerja ini Adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan dengan anggaran sebesar Rp 6.978.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.875.500,00. Penyerapan pada program ini tergolong cukup tinggi dimana persentase realisasi anggaran mencapai 98,53% menunjukkan bahwa sebagian besar rencana kerja telah diimplementasikan secara efektif, meskipun masih terdapat sisa anggaran sekitar 1,47% yang belum terserap hingga akhir periode pelaporan.
2. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 200.841.600,00 dan realisasi Rp. 197.612.200,00. Penyerapan pada program ini tergolong cukup tinggi dimana persentase realisasi anggaran mencapai 98,39% menunjukkan bahwa sebagian besar rencana kerja telah diimplementasikan secara efektif, meskipun masih terdapat sisa anggaran sekitar 1,61% yang belum terserap hingga akhir periode pelaporan.
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan anggaran sebesar Rp. 13.500.500,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.

12.574.400,00. Penyerapan pada program ini tergolong cukup tinggi dimana persentase realisasi anggaran mencapai 93,14% menunjukkan bahwa sebagian besar rencana kerja telah diimplementasikan secara efektif, meskipun masih terdapat sisa anggaran sekitar 6,86% yang belum terserap hingga akhir periode pelaporan.

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.181
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kontribusi Perdagangan, UMKM dan Industri Berbasis Sektor Unggulan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	87,59%	96,68%	-9,09%

Dari tabel diatas, dilihat bahwa untuk pencapaian Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Tahun 2025, terjadi efisiensi sumber daya sebesar -9,09% hasil dari efisiensi kinerja, dan tidak terdapat efisiensi anggaran.

B. Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB

Koperasi merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Keberadaan koperasi tidak hanya berfungsi sebagai wadah usaha bersama bagi anggotanya, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat struktur perekonomian daerah. Melalui kegiatan usaha yang dijalankan, koperasi mampu mendorong perputaran ekonomi, memperluas kesempatan usaha, serta meningkatkan pendapatan anggota dan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, peran koperasi dapat dilihat dari besarnya kontribusi kegiatan usaha koperasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur peran tersebut adalah Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB. Indikator ini menggambarkan sejauh mana aktivitas ekonomi koperasi berkontribusi dalam keseluruhan aktivitas ekonomi daerah. Semakin tinggi rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB, maka semakin besar pula peran koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan koperasi, peningkatan kapasitas pengelolaan usaha, serta perluasan jaringan usaha menjadi langkah penting dalam meningkatkan kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah. Pengukuran kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dilakukan dengan membandingkan nilai tambah yang dihasilkan sektor perdagangan terhadap total nilai PDRB suatu daerah pada periode tertentu.

Berikut ini rumus perhitungan indikator kinerja Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB :

$$\text{Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB} = \frac{\text{Total Volume Usaha Koperasi}}{Total\ PDRB}\ x\ 100\%$$

a) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025

Tabel 3.182
Perbandingan Target dan Realisasi Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,150	0,38	253,33	Sangat Berhasil

***Sumber** : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa realisasi Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB mencapai 0,38%, sedangkan target yang telah ditetapkan sebesar 0,33%. Dengan demikian, capaian kinerja indikator tersebut mencapai 115,15%, yang berarti melampaui target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kriteria penilaian capaian kinerja, hasil tersebut termasuk dalam kategori "Sangat Berhasil". Capaian ini menunjukkan bahwa kontribusi volume usaha koperasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) telah menunjukkan perkembangan yang positif dan kinerja yang optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

b) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

Tabel 3.183
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	-	-	-	0,150	0,38	253,33	Sangat Berhasil

***Sumber** : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB pada Tahun 2024 tidak tersedia data baik target maupun realisasi, sehingga realisasi tahun 2024 dan tahun 2025 tidak bisa diperbandingkan.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025-2029 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan target pada RPJMD 2025-2029 dengan realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.184
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB dengan Target RPJMD 2025-2029

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,150	0,192	0,234	0,276	0,318	0,38	-	-	-	-

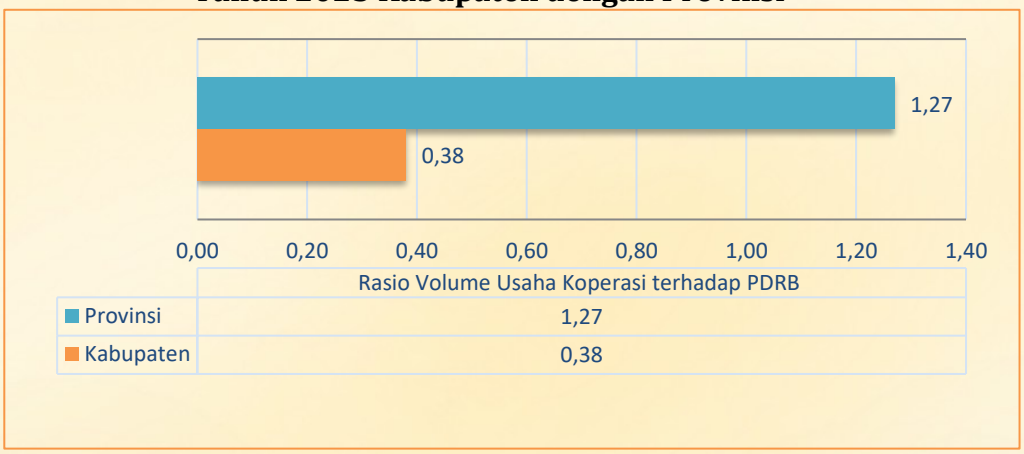
Sumber : *Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Pada tahun 2025, Indikator Kinerja Utama (IKU) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB ditetapkan dengan target sebesar 0,150%. Namun, pada pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, dan Koperasi UKM berhasil mencatatkan realisasi yang sangat signifikan, yaitu sebesar 0,38%. Jika dikalkulasikan secara persentase terhadap target, capaian kinerja indikator ini menyentuh angka 253,33%. Berdasarkan kriteria penilaian kinerja yang berlaku, angka tersebut menempatkan indikator ini dalam kategori "Sangat Berhasil".

Meskipun realisasi tahun 2025 telah melampaui target akhir RPJMD tahun 2029 (yang dipatok pada angka 0,318%), tren positif ini perlu dijaga konsistensinya. Keberhasilan melampaui target di tahun pertama periode perencanaan menunjukkan adanya akselerasi ekonomi di sektor koperasi yang kuat, yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak stabilitas ekonomi daerah di tahun-tahun mendatang.

d) Perbandingan Realisasi Capaian IKU dengan Realisasi Provinsi Tahun 2025

Grafik 3.42
Perbandingan Realisasi Indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Tahun 2025 Kabupaten dengan Provinsi



Sumber *: Laporan Capaian IUP Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Grafik di atas menyajikan perbandingan realisasi indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) antara tingkat Kabupaten dengan tingkat Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2025 dimana realisasi Provinsi Sumatera Barat mencatatkan rasio sebesar 1,27. Angka ini menunjukkan kontribusi volume usaha koperasi yang cukup signifikan terhadap total nilai tambah ekonomi di tingkat provinsi.

Di sisi lain, capaian untuk tingkat Kabupaten berada pada angka 0,38. Terdapat selisih atau *gap* yang cukup lebar antara capaian Kabupaten dengan rata-rata Provinsi. Angka 0,38 mengindikasikan bahwa peran serta atau penetrasi volume usaha koperasi dalam struktur ekonomi Kabupaten masih berada di bawah performa rata-rata wilayah Sumatera Barat secara keseluruhan.

e) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB merupakan indikator yang menggambarkan sejauh mana aktivitas usaha koperasi memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Pada tahun pelaporan, target rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB ditetapkan sebesar 0,150%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 0,38%. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan, yang menunjukkan bahwa aktivitas usaha koperasi di daerah mengalami perkembangan yang cukup baik serta memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah.
Tercapainya bahkan melampauinya target tersebut menunjukkan adanya peningkatan aktivitas usaha koperasi yang didukung oleh berbagai program pembinaan dan penguatan kelembagaan koperasi. Selain itu, meningkatnya partisipasi anggota dalam kegiatan usaha koperasi serta semakin berkembangnya unit usaha koperasi juga turut mendorong peningkatan volume usaha koperasi sehingga berdampak pada meningkatnya rasio kontribusi terhadap PDRB daerah.
Faktor Pendukung :

1. Adanya pembinaan dan pendampingan dari pemerintah daerah kepada koperasi sehingga meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha koperasi.
2. Meningkatnya partisipasi anggota koperasi dalam kegiatan usaha serta berkembangnya unit usaha koperasi yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan volume usaha.
3. Meningkatnya aktivitas usaha koperasi melalui penguatan manajemen, peningkatan jumlah anggota, serta bertambahnya volume transaksi usaha koperasi yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah.
4. Adanya dukungan pemerintah daerah melalui program pembinaan, pelatihan, fasilitasi legalitas, serta penguatan kapasitas kelembagaan koperasi sehingga koperasi mampu menjalankan usaha secara lebih produktif dan berkelanjutan.

Faktor Penghambat :

1. Masih terdapat koperasi yang belum aktif menjalankan kegiatan usaha secara optimal.
2. Keterbatasan kemampuan manajerial dan akses permodalan pada sebagian koperasi sehingga menghambat pengembangan usaha.
3. Masih terbatasnya kapasitas manajemen dan profesionalisme pengelola koperasi, sehingga belum semua koperasi mampu mengembangkan usaha secara optimal dan meningkatkan volume usaha secara signifikan.
4. Keterbatasan akses permodalan dan jaringan pemasaran, yang menyebabkan sebagian koperasi masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan skala usaha dan memperluas pasar.

Alternatif Solusi yang Diharapkan :

1. Meningkatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan koperasi melalui pelatihan manajemen usaha, tata kelola koperasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi.
2. Mendorong pengembangan unit usaha koperasi yang produktif serta memperluas akses permodalan dan kemitraan usaha guna meningkatkan volume usaha koperasi secara berkelanjutan.
3. Peningkatan pembinaan dan pendampingan koperasi secara berkelanjutan, khususnya dalam aspek manajemen usaha, tata kelola koperasi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan usaha.
4. Memperluas akses permodalan dan kemitraan usaha, melalui kerja sama dengan lembaga keuangan, program pembiayaan pemerintah, serta penguatan jaringan pemasaran produk koperasi agar volume usaha koperasi dapat terus meningkat dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDRB daerah.

Gambar 3.101
Dokumentasi Kegiatan terkait Koperasi


Menghadiri RAT Koperasi KPN


Pemberdayaan ke Kopwan


Penguatan KPN ke KPRI Sumbar



Konseling Koperasi


Penguatan KDMP


Zoom Penguatan KDMP

f) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU

Pencapaian IKU Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pengembangan koperasi di daerah. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi menjadi faktor utama

dalam mendorong peningkatan kapasitas usaha koperasi melalui berbagai kegiatan pembinaan, fasilitasi usaha, dan penguatan kelembagaan koperasi.

Selain itu, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian turut berperan dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia koperasi sehingga pengelolaan koperasi dapat dilakukan secara lebih profesional dan efektif. Di sisi lain, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi serta Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi berfungsi untuk memastikan koperasi berjalan secara sehat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui sinergi dari keempat program tersebut, diharapkan koperasi mampu meningkatkan kinerja usaha dan volume transaksi secara berkelanjutan. Dengan meningkatnya volume usaha koperasi, maka kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah juga akan semakin meningkat sehingga mendukung pencapaian IKU yang telah ditetapkan.

Adapun Program pendukung capaian indikator kinerja ini Adalah sebagai berikut: Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi dengan anggaran sebesar Rp 13.934.500,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.592.400,00 dengan persentase 97,54%. Penyerapan anggaran pada Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp13.934.500,00 terealisasi sebesar Rp13.592.400,00 atau mencapai 97,54% dari total anggaran. Tingkat realisasi tersebut tergolong sangat tinggi, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara efektif serta sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.185
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kontribusi Perdagangan, UMKM dan Industri Berbasis Sektor Unggulan	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	253,33%	97,54%	155,79%

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya untuk mendukung peningkatan kontribusi koperasi terhadap PDRB pada tahun 2025 dikategorikan "Sangat Efisien". Pemerintah daerah berhasil membuktikan bahwa dengan serapan anggaran sebesar 97,54%, mampu memberikan dampak kinerja dua setengah kali lipat (253,33%) dari target yang ditetapkan.

C. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB Industri Pengolahan merupakan Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan

oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah.

Berikut ini metode perhitungan realisasi kinerja Rasio PDRB Industri Pengolahan :

$$\text{Rasio PDRB Industri Pengolahan} = \frac{Nilai\ Tambah\ Sektot\ Industri\ Pengolahan}{Nilai\ PDRB\ Kab.ADHB}\ x\ 100\%$$

Berdasarkan data publikasi Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2026, realisasi indikator Rasio PDRB Industri Pengolahan tercatat mencapai angka 10,71%. Berikut ini perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025 indikator Rasio PDRB Industri Pengolahan:

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Berikut ini perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2025 :

Tabel 3.186
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Rasio PDRB Industri Pengolahan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	8,43	10,71	127,05	Sangat Berhasil

***Sumber** : Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2026*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Realisasi indikator Rasio PDRB Industri Pengolahan pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat signifikan dengan angka sebesar 10,71%. Pencapaian ini jauh melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 8,43%, sehingga menghasilkan persentase capaian kinerja sebesar 127,05%. Berdasarkan skala pengukuran akuntabilitas kinerja, hasil tersebut masuk ke dalam interpretasi predikat Sangat Berhasil. Hasill ini membuktikan upaya hilirisasi komoditas unggulan dan pengembangan sektor manufaktur di Kabupaten Padang Pariaman telah berjalan sangat efektif, melampaui ekspektasi perencanaan tahun berjalan.

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Adapun perbandingan realisasi Indikator Kinerja Utama "Rasio PDRB Industri Pengolahan" adalah sebagai berikut :

Tabel 3.187
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Rasio PDRB Industri Pengolahan Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	TAHUN 2024			TAHUN 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	-	10,25	-	8,43	10,71	127,05	Sangat Berhasil

***Sumber** : DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2026*

Pada tahun 2024, realisasi Rasio PDRB Industri Pengolahan tercatat sebesar 10,25%. Angka ini mengalami kenaikan pada tahun 2025 menjadi 10,71%, yang menunjukkan adanya peningkatan kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian daerah

sebesar 0,46%. Tahun 2025 tercatat sangat impresif karena realisasi sebesar 10,71% tersebut berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan sebesar 8,43%. Pencapaian yang melampaui target serta tren pertumbuhan dari tahun sebelumnya membuktikan bahwa program pengembangan industri berbasis sektor unggulan di Kabupaten Padang Pariaman telah berjalan sangat efektif. Hal ini memperkuat struktur ekonomi daerah melalui peningkatan nilai tambah produk yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU dengan Target Jangka Menengah

Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah :

Tabel 3.188
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Rasio PDRB Industri Pengolahan dengan Target RPJMD Tahun 2025-2029

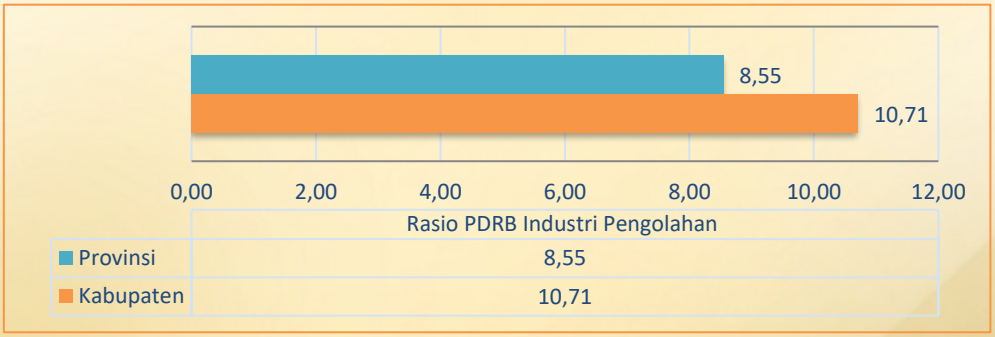
Indikator Kinerja Utama	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Rasio PDRB Industri Pengolahan	8,43%	8,6425%	8,855%	9,0675%	9,25%	10,71%	-	-	-	-

***Sumber** : DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2026*

Berdasarkan data pada tabel diatas, capaian tahun 2025 tersebut tercatat sudah melewati seluruh tahapan target tahunan yang direncanakan dalam RPJMD periode 2025-2029, mulai dari target awal tahun 2025 sebesar 8,43% hingga target akhir periode pada tahun 2029 yang dipatok pada angka 9,25%. Keberhasilan realisasi sebesar 10,71% ini mencerminkan akselerasi pembangunan sektor industri yang sangat progresif, di mana performa riil di lapangan pada tahun pertama perencanaan telah berhasil melampaui proyeksi pertumbuhan maksimal yang semula hanya ditargetkan tercapai dalam waktu lima tahun ke depan. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap target jangka menengah, mengingat baseline kinerja saat ini sudah berada jauh di atas proyeksi akhir periode untuk menghindari stagnasi pelaporan di tahun-tahun mendatang.

d) Perbandingan Realisasi Capaian IKU dengan Realisasi Provinsi Tahun 2025

Grafik 3.43
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Rasio PDRB Industri Pengolahan Tahun 2025 Kabupaten dengan Provinsi



***Sumber** : Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2026*

Berdasarkan data yang disajikan pada grafik diatas, performa sektor industri di Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan keunggulan kompetitif yang signifikan jika dibandingkan dengan capaian di tingkat regional. Realisasi Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2025 yang mencapai angka 10,71% tercatat berada jauh di atas rata-rata capaian Provinsi Sumatera Barat yang berada pada angka 8,55%. Selisih positif sebesar 2,16% ini menegaskan bahwa akselerasi hilirisasi produk unggulan dan penguatan sektor manufaktur di Kabupaten Padang Pariaman berjalan lebih progresif dan memberikan kontribusi ekonomi yang lebih kuat.

e) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja

Adapun Program dan kegiatan penunjang IKU Rasio PDRB Industri Pengolahan adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI, dengan Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan target yang di tetapkan yaitu 1 Dokumen sedangkan pagu Anggaran Rp. 16.250.000,00,- dan terealisasi 1 Dokumen dan realisasi anggaran Rp. 15.170.200,00,- atau 93,35% ditunjang oleh Sub Kegiatan:
   - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
   - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri.
   - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.
   - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.
   - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
   - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
2. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI, dengan Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan target yang di tetapkan yaitu 1 Dokumen sedangkan pagu anggaran Rp. 5.000.000,00,- dan terealisasi 1 Dokumen dan realisasi anggaran Rp. 4.510.000,00,- atau 90,2% ditunjang oleh Sub Kegiatan:
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
   - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
3. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL, dengan Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota. dengan target yang di tetapkan yaitu 12 Dokumen sedangkan pagu anggaran Rp. 4.800.000,00,- dan terealisasi 12 Dokumen dan realisasi anggaran Rp. 4.072.850,00,- atau 84,85% ditunjang oleh Sub Kegiatan:
   - Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas

- Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas.

Gambar 3.102
Sosialisasi Bagi IKM



Gambar 3.103
Pembinaan Bagi IKM



***Sumber** : DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

f) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Serta Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam meraih realisasi kinerja yang sangat positif dalam indikator Rasio PDRB Industri Pengolahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain :

1. Sumberdaya Pelaku Usaha (SDM) sudah meningkat, keterampilan dan keahlian dalam memproduksi produk sudah bertambah sehingga konsistensi produk tetap terjaga;
2. Sosialisasi kepada pelaku Industri Kecil dan menengah tentang ketersediaan akses permodalan dan pembiayaan (bank, Koperasi , KUR, Kredit Industri Padat Karya (KIPK);
3. Keinginan IKM untuk tetap produksi karena usaha mereka pada umumnya penunjang ekonomi keluarga
4. Keinginan IKM untuk terus mengembangkan produk yang dihasilkannya dengan melakukan pendampingan dalam produksi
5. Adanya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Disamping faktor pendukung tersebut, terdapat pula beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja, antara lain :

1. Keterbatasan Sumber Daya (SDM dan Dana)
   Kurangnya jumlah SDM, kompetensi yang rendah, serta keterbatasan anggaran atau buruknya pengelolaan modal untuk mencapai target.
2. Kurang Optimalnya Pemanfaatan Teknologi
   Belum maksimalnya penggunaan aplikasi dan teknologi yang ada.

Adapun solusi atau upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja antara lain :

1. Optimalisasi Anggaran dan SDM
   Melakukan analisis efektivitas anggaran untuk memastikan kegiatan berdampak langsung
2. Peningkatan Fasilitas dan Program Pendukung Capaian IKU
   Melengkapi fasilitas penunjang capaian IKU serta mengintensifkan program pendukung capaian IKU maksimal
3. Pembinaan dan Pelatihan Bagi IKM
   Melakukan kegiatan pembinaan dan pelatihan bagi IKM

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara akumulatif, pelaksanaan program pada sektor perindustrian tahun 2025 didukung oleh total pagu anggaran sebesar Rp. 26.050.000,00. Dari alokasi tersebut, realisasi keuangan yang berhasil dicapai adalah sebesar Rp. 23.753.050,00 dengan rata-rata persentase penyerapan anggaran secara keseluruhan mencapai 91,18%.

Tabel 3.189
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Kinerja Rasio PDRB Industri Pengolahan Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kontribusi Perdagangan, UMKM dan Industri Berbasis Sektor Unggulan	Rasio PDRB Industri Pengolahan	127,05%	91,18%	35,87%

***Sumber** : DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Sebagaimana tersaji pada tabel diatas, perhitungan tingkat efisiensi berada pada angka 35,87%. Nilai ini menunjukkan adanya penghematan sumber daya yang signifikan dalam mencapai target makro ekonomi daerah. Peningkatan kontribusi sektor industri berbasis sektor unggulan dapat dipacu secara maksimal melalui penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan berdaya guna tinggi.

Tingginya capaian kinerja yang menyentuh angka 127,05% di tengah penyerapan anggaran yang terkontrol di angka 91,18% menegaskan bahwa sektor perindustrian tahun 2025 telah berhasil menerapkan prinsip produktivitas maksimal dengan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Keberhasilan ini menjadi fondasi yang kokoh bagi penguatan ekonomi daerah di masa mendatang.

SASARAN STRATEGIS 10

Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dalam meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor strategis di Kabupaten Padang Pariaman, sebagai bagian dari upaya dalam meningkatkan perekonomian daerah yang maju dan inklusif, ditetapkan sasaran pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif adalah Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dilihat dari 3 indikator sebagai berikut :

A. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara

Indikator jumlah tamu wisatawan mancanegara didefinisikan sebagai jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel /*homestay* di daerah.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menetapkan target Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara sebanyak 0,125 Ribu Orang (125 Orang). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi kunjungan wisatawan mancanegara yang tercatat hingga akhir tahun adalah sebanyak 0,442 Ribu Orang (442 Orang), sehingga tingkat capaian kinerja **Sangat Berhasil** dari target yang telah ditetapkan dengan persentase mencapai 353,6%.

Berikut disajikan data kunjungan Wisatawan Mancanegara di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 dan tahun 2025 :

Tabel 3.190
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Berdasarkan Kebangsaan Tahun 2024 dan Tahun 2025

Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara		
Kebangsaan	Tahun	
	2024	2025
Malaysia	135	102
Brunai Darusalam	5	2
Inggris	10	12
Tiongkok	30	41
Jepang	-	7
India	-	6
Vietnam	-	2
Perancis	-	5
Polandia	-	2
Kanada	-	6
Brazil		6
Singapura	44	60
Australia	30	130
Jerman	6	11
Rumania	-	3
Belanda	-	15
Spanyol	-	4

Mexico	-	1
Amerika Serikat	-	27
Jumlah	**260**	**442**

***Sumber** : Disparpora Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel diatas, terlihat dinamika kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Padang Pariaman yang menunjukkan tren positif pada periode 2024 hingga 2025. Secara akumulatif, jumlah kunjungan mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 70%, yakni dari 260 kunjungan di tahun 2024 menjadi 442 kunjungan di tahun 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh lonjakan tajam wisatawan asal Australia yang meningkat dari 30 orang menjadi 130 orang, menjadikannya pangsa pasar terbesar pada tahun 2025. Selain itu, profil asal negara wisatawan kini jauh lebih beragam dibandingkan tahun sebelumnya dengan masuknya kunjungan dari berbagai negara baru seperti Jepang, India, Belanda, hingga Amerika Serikat. Meski beberapa pasar tradisional seperti Malaysia mengalami sedikit penurunan, peningkatan dari Singapura dan negara-negara Eropa lainnya mampu menutupi gap tersebut dan memperkuat performa sektor pariwisata secara keseluruhan.

Tabel 3.191
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang	0,125	0,442	353,60	Sangat Berhasil

***Sumber** : Disparpora Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Dalam konteks perencanaan kinerja, penetapan target indikator tersebut didasarkan pada asumsi pemulihan sektor pariwisata dan potensi destinasi daerah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, asumsi tersebut belum sepenuhnya dapat terwujud akibat dinamika kondisi eksternal dan keterbatasan internal yang mempengaruhi capaian kinerja. Dengan demikian, target yang ditetapkan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil dan daya dukung daerah pada periode berjalan.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) terus melakukan berbagai upaya strategis dalam rangka meningkatkan jumlah tamu wisatawan mancanegara. Upaya tersebut dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya pariwisata daerah, baik wisata alam, budaya, maupun wisata minat khusus yang memiliki daya tarik bagi pasar internasional.

b) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

Perbandingan dan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara pada tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.192
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara Tahun 2024 dan 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	TAHUN 2024			TAHUN 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang	-	0,260	-	0,125	0,442	353,60	Sangat Berhasil

***Sumber** : Disparpora Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, jumlah wisatawan mancanegara (ribu orang) tercatat sebesar 0,260 ribu orang, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 0,442 ribu orang. Dengan demikian, terjadi pertumbuhan sekitar 70 persen dari tahun 2024.

Dampak positif dari pengembangan wisata *masheer fishing* ini terlihat dari meningkatnya lama tinggal wisatawan, perputaran ekonomi lokal, serta semakin dikenalnya Padang Pariaman di pasar pariwisata internasional. Dengan promosi yang tepat dan pengelolaan yang konsisten, Ekowisata Nyarai berpotensi menjadi ikon wisata minat khusus yang mampu mendorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara secara berkelanjutan ke Kabupaten Padang Pariaman.

c) Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan target pada RPJMD 2025 – 2029 dengan realisasi Indikator Kinerja Utama 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.193
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang	0,125	0,127	0,130	0,135	0,140	0,442	-	-	-	-

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tahun 2025–2029, target Indikator Kinerja Utama (IKU) ini pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 0,125 dan terus meningkat hingga tahun 2029 sebesar 0,140 ribu orang. Sementara itu, realisasi Tahun 2025 tercatat sebesar 0,442 ribu orang. Dengan demikian, realisasi kinerja telah melampaui target yang ditetapkan, untuk Tahun 2025 dan bahkan melampaui target akhir RPJMD.

Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah pada indikator tersebut berjalan secara efektif dan memberikan hasil yang melebihi perencanaan awal. Keberhasilan ini tidak terlepas dari optimalisasi kebijakan, peningkatan kualitas pelaksanaan program, serta dukungan berbagai pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Meskipun realisasi telah melampaui target RPJMD, Pemerintah Kabupaten perlu terus menjaga konsistensi kinerja serta melakukan evaluasi berkelanjutan guna memastikan capaian yang tinggi tersebut dapat dipertahankan dan berkontribusi secara optimal terhadap tujuan pembangunan daerah jangka menengah.

d) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara dengan Propinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2026, kunjungan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sumatera barat Tahun 2025 adalah 90.021 orang.

Jika dibandingkan antara realisasi IKU dengan data kunjungan wisatawan mancanegara ke provinsi Sumatera Barat adalah sebagai Berkut :

$$Persentase = \frac{Capaian\ IKU\ Kabupaten}{Kunjungan\ Wisatawan\ Mancanegara\ ke\ Propinsi}\ x\ 100\%$$

$$Persentase = \frac{422}{90021}\ x\ 100\% = 0.49\%$$

Maka dapat dilihat jumlah tamu wisatawan manca negara ke Kabupaten Padang Pariaman masih sangat kecil yaitu hanya 0,49% dari seluruh kunjungan wisatawan manca negara ke Sumatera Barat. Hal ini tentu perlu upaya lebih kuat untuk meningkatkan ketertarikan wisatawan mancanegara berkunjung dan menginap di Kabupaten Padang Pariaman.

e) Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Indikator Kinerja Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan

Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan tren positif dalam peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Salah satu faktor pendorong utama peningkatan ini adalah hadirnya wisata minat khusus, khususnya wisata memancing ikan mahseer (masheer fishing) yang dikembangkan di kawasan Ekowisata Nyarai.

Ekowisata Nyarai tidak hanya menawarkan keindahan alam berupa hutan tropis, sungai yang jernih, dan air terjun, tetapi juga menghadirkan pengalaman memancing ikan mahseer yang dikenal sebagai *the king of freshwater fish* dan menjadi incaran para pemancing internasional. Keunikan ini menjadikan Nyarai sebagai destinasi yang berbeda dan memiliki daya tarik kuat bagi wisatawan mancanegara, terutama dari kalangan pecinta sport fishing, petualangan alam, dan ekowisata berkelanjutan.

Penerapan konsep *catch and release*, pelibatan masyarakat lokal sebagai pemandu, serta pengelolaan kawasan berbasis konservasi lingkungan semakin meningkatkan citra Ekowisata Nyarai sebagai destinasi ramah lingkungan dan bertaraf internasional. Hal ini sejalan dengan tren global pariwisata yang mengedepankan pengalaman autentik, keberlanjutan, dan aktivitas berbasis alam.

Dampak positif dari pengembangan wisata masheer fishing ini terlihat dari meningkatnya lama tinggal wisatawan, perputaran ekonomi lokal, serta semakin dikenalnya Padang Pariaman di pasar pariwisata internasional. Dengan promosi yang tepat dan pengelolaan yang konsisten, Ekowisata Nyarai berpotensi menjadi ikon wisata minat khusus yang mampu mendorong peningkatan kunjungan wisatawan

mancanegara secara berkelanjutan ke Kabupaten Padang Pariaman. Faktor–faktor yang menjadikan keberhasilan dalam pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Promosi dan Pemasaran: Intensifikasi promosi destinasi wisata melalui berbagai media, termasuk digital marketing.
2. Sarana dan Prasarana Wisata: aksesibilitas transportasi, dan layanan wisata yang ramah bagi wisatawan mancanegara.
3. Sinergi dan Kolaborasi: Koordinasi yang baik antara pemerintah, pelaku usaha pariwisata, komunitas lokal, dan stakeholder terkait.
4. Kondisi Eksternal yang Mendukung: meningkatnya minat wisatawan internasional, serta stabilitas keamanan dan kenyamanan daerah.
5. Pemanfaatan Teknologi: Penggunaan sistem informasi, aplikasi, dan platform digital untuk promosi, pemesanan, dan pelayanan wisatawan.

Meskipun realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) telah melampaui target yang ditetapkan, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi optimalisasi capaian kinerja sebagai berikut :

1. Keterbatasan kapasitas sarana dan prasarana pendukung, khususnya pada periode tertentu dengan tingkat aktivitas yang tinggi, sehingga belum sepenuhnya mampu mengakomodasi peningkatan kebutuhan secara optimal.
2. Faktor sumber daya manusia masih menjadi tantangan, terutama terkait pemerataan kompetensi teknis dan manajerial dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan juga belum sepenuhnya berjalan optimal, sehingga pada beberapa kegiatan diperlukan penyesuaian waktu dan mekanisme pelaksanaan.
4. Kondisi ekonomi global, perubahan kebijakan di tingkat nasional maupun internasional, serta fluktuasi situasi keamanan dan mobilitas yang dapat mempengaruhi stabilitas dan keberlanjutan capaian kinerja.

Upaya pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam meningkatkan Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara sebagai berikut :

1. Pengembangan dan peningkatan kualitas destinasi wisata melalui perbaikan infrastruktur pendukung, penataan kawasan wisata, serta penyediaan fasilitas dasar yang memenuhi standar kenyamanan dan keamanan wisatawan mancanegara. Pemerintah daerah juga mendorong penerapan konsep pariwisata berkelanjutan agar pengelolaan destinasi tetap menjaga kelestarian lingkungan dan kearifan lokal.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata melalui pelatihan dan pendampingan bagi pelaku wisata, pemandu wisata, serta kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Pelatihan tersebut meliputi peningkatan kompetensi pelayanan, kemampuan berbahasa asing, serta pemahaman standar pelayanan wisata internasional guna menciptakan pengalaman berwisata yang berkualitas bagi wisatawan mancanegara.
3. Memperkuat pemasaran destinasi wisata melalui media digital dan kerja sama dengan berbagai pihak. Promosi dilakukan dengan memanfaatkan platform media sosial, *website* resmi pariwisata, serta keikutsertaan dalam *event* dan pameran pariwisata tingkat nasional dan internasional.

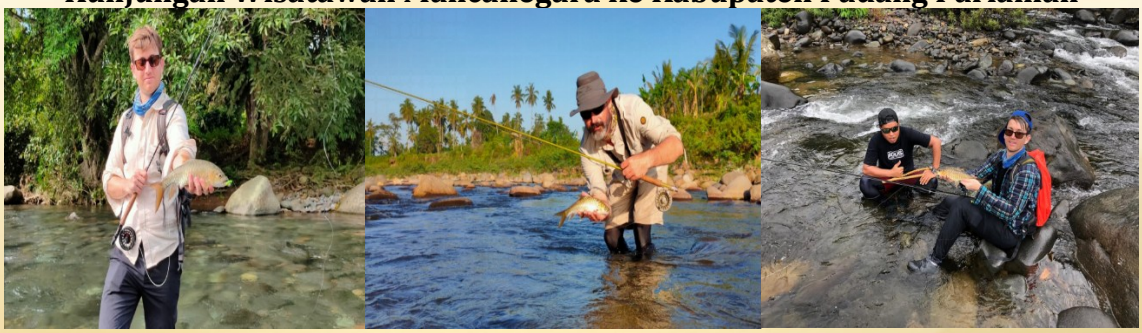
4. Menjalin kerja sama dengan agen perjalanan, pelaku industri pariwisata, dan pemerintah provinsi guna memperluas jaringan promosi ke pasar internasional.
5. Pengembangan event pariwisata dan atraksi budaya yang memiliki daya tarik internasional. Berbagai festival budaya, seni, dan olahraga berbasis kearifan lokal dikemas secara profesional sebagai daya tarik wisata, sekaligus sebagai sarana promosi identitas dan keunikan Kabupaten Padang Pariaman di tingkat global.
6. Meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, masyarakat lokal, dan investor, dalam pengembangan pariwisata. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong terciptanya produk wisata yang kompetitif serta memperluas peluang investasi di sektor pariwisata.

f) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Pencapaian Indikator Kinerja Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara

Seluruh upaya diatas, dilaksanakan dalam Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**
  - Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, Dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
    - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
    - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- **Program Pemasaran Pariwisata**
  - Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri.
  - Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
    - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Gambar 3.104
Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kabupaten Padang Pariaman



***Sumber** : Disparpora Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari hasil kinerja Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Utama Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara didapatkan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.194
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Kinerja Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	353,60%	98,63%	35,87%

***Sumber** : Disparpora Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Efisiensi Capaian Kinerja = 352,60% - 100% = 252,60%

Untuk efisiensi penyerapan anggaran didapatkan dari 100% dikurangi dengan persentase penyerapan anggaran pada anggaran sub kegiatan yang menunjang indikator ini. Pada tahun 2025 alokasi anggaran BPBD Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp. 6.236.143.087 dengan total realisasi pada akhir tahun sebesar Rp. 6.150.425.539 yang jika dipersentasekan sebesar 98,63 %. Sehingga didapatkan efisiensi penyerapan anggaran:

Efisiensi Penyerapan Anggaran = 100% - 98,63% = 1,37%

Dari kedua hasil capaian kinerja tersebut kemudian dijumlahkan sehingga didapatkan tingkat efisiensi sebagai berikut:

Tingkat Efisiensi = 252,60% + 1,37% = 253,97%

Angka ini merefleksikan dedikasi instansi dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga sangat mengedepankan efisiensi sumber daya untuk kemajuan daerah

h) Penghargaan Yang Diperoleh Tahun 2025

Gambar 3.105
Anugerah Harmoni Kontribusi Astra Tahun 2025



***Sumber** : Disparpora Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

B. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional

Indikator berikutnya dari sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif adalah Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional.

PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada satu daerah. Dengan demikian Rasio PDRB Ekonomi kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional adalah persentase kontribusi nilai tambah bruto ekonomi kreatif suatu daerah dibandingkan dengan total nilai tambah bruto ekonomi kreatif secara nasional pada periode tertentu.

Dalam penghitungan PDRB Ekonomi Kreatif menggunakan tujuh lapangan usaha yang termasuk, yaitu :

1. Industri Pengolahan
2. Perdagangan Besar dan Eceran
3. Reperasi Mobil dan Sepeda Motor
4. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
5. Informasi dan Komunikasi
6. Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan
7. Jasa Lainnya

Berdasarkan Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2026, Propinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2026 dan Berita Resmi Statistik Nasional No. 18/02/Th. XXIX, 5 Februari 2026, dapat diketahui PDRB dan PDB Ekonomi Kreatif sebagai berikut :

Tabel 3.195
PDRB dan PDB Ekonomi Kreatif

No.	Lapangan Usaha	PDRB Ekraf Kabupaten (Milyar Rupiah)	PDRB Ekraf Provinsi (Milyar Rupiah)	PDB Ekraf Nasional (Trilyun Rupiah)
1	Industri Pengolahan	2.974,93	30.114,67	4.541,5
2	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.883,05	58.632,18	3.136,6
3	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	349,25	4.815,71	639,0
4	Informasi dan Komunikasi	1.020,41	23.287,01	1.048,7
5	Jasa Perusahaan	21,45	1.501,91	471,7
6	Jasa Pendidikan	1.570,75	15.848,54	666,9
7	Jasa Lainnya	462,59	7.859,16	508,9
	Jumlah	**9.282,43**	**142.059,18**	**11.013,30**

Sumber : *Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2026 dan Berita Resmi Statistik*

Untuk penghitungan indikator kinerja Rasio PDRB Ekonomi Kreatif Kabupaten terhadap PDB Nasional dapat dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$Rasio\ PDRB\ Ekonomi\ Kreatif\ Kabupaten = \frac{Total\ PDRB\ Ekonomi\ Kreatif\ Kab}{PDB\ Ekonomi\ Kreatif}\ x\ 100\%$$

$$Rasio\ PDRB\ Ekonomi\ Kreatif\ Kabupaten = \frac{9.282{,}43}{\mathbf{11.013.300}}\ x\ 100\% = \mathbf{0{,}084}\%$$

Sedangkan penghitungan Rasio PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi terhadap PDB Nasional adalah :

$$Rasio\ PDRB\ Ekonomi\ Kreatif\ Kabupaten = \frac{Total\ PDRB\ Ekonomi\ Kreatif\ Prov}{PDB\ Ekonomi\ Kreatif}\ x\ 100\%$$

$$Rasio\ PDRB\ Ekonomi\ Kreatif\ Kabupaten = \frac{142.059{,}18}{\mathbf{11.013.300}}\ x\ 100\% = \mathbf{1{,}29}\%$$

a) Perbandingan Target dan Realisi Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2025

Tabel 3.196
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	%	1,622	0,084	5,18	Kurang Berhasil

***Sumber** : Disparpora Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Dengan capaian sebesar 5,18% terhadap target, indikator kinerja kurang berhasil dan memerlukan penguatan strategi, program, serta koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional. Capaian yang terlalu jauh dari target yang ditetapkan, mengindikasikan perlunya komitmen lebih besar dalam meningkatkan pembangunan sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Padang Pariaman.

b) Perbandingan Realisasi Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2024 dan 2025

Karena indikator ini merupakan Indikator Kinerja Utama yang baru digunakan di Tahun 2025, maka belum dapat dilakukan analisis perbandingan terhadap realisasi dan capaian tahun lalu.

c) Perbandingan Realisasi Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.197
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	Ribu Orang	1,622	1,612	1,602	1,582	1,572	0,084	-	-	-	-

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2025 sangat jauh dari target selama lima tahun perencanaan jangka menengah. Hal ini memperlihatkan perlunya Upaya lebih kuat dalam menumbuhkan ekonomi kreatif di Padang Pariaman.

d) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2025 dengan Provinsi

Berdasarkan pada perhitungan yang dituangkan di atas, dapat ditampilkan perbandingan realisasi rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2025 antara Kabupaten Padang Pariaman dengan Propinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

Tabel 3.198
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2025 dengan Provinsi

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025		Interpretasi
		Kabupaten	Provinsi	
Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	%	0,084	1,29	Tidak Berhasil

***Sumber** : Disparpora Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Dari tabel diatas, karena PDRB Ekonomi kreatif Kabupaten Padang Pariaman merupakan bagian dari PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat, maka nilai rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional tingkat Kabupaten Padang Pariaman akan selalu berada di bawah nilai rasio provinsi Sumatera Barat. Jika dihitung kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif Kabupaten Padang Pariaman terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat, hasilnya memiliki kontribusi yang kecil yaitu 6,51%. Dengan jumlah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sebanyak 19 Kabupaten/Kota, maka kontribusi rata-rata adalah 5,26%. Dengan demikian di tingkat Sumatera Barat, sektor Ekonomi Kreatif Kabupaten Padang Pariaman sedikit diatas rata-rata Kabupaten/Kota, sehingga tetap perlu upaya lebih dalam meningkatkan nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif.

e) Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan

Dengan realisasi capaian terhadap target yang telalu jauh, perlu dianalisis faktor penghambat yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya meningkatkan kinerja kedepan, yaitu antara lain :

1. Rendahnya Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Nasional Realisasi rasio sebesar 0,084% masih jauh di bawah target 1,622%, menunjukkan bahwa secara kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB Nasional belum optimal.
2. Skala Usaha Pelaku Ekonomi Kreatif yang masih didominasi UMKM sehinga pelaku ekonomi kreatif merupakan usaha mikro dan kecil dengan keterbatasan modal, kapasitas produksi, dan akses pasar, sehingga nilai tambah yang dihasilkan relatif kecil.

3. Belum meratanya pengembangan seluruh Subsektor pertumbuhan ekonomi kreatif, yang masih terkonsentrasi pada subsektor tertentu, sementara subsektor lainnya belum berkembang secara signifikan untuk mendorong peningkatan PDRB Ekonomi Kreatif secara keseluruhan.
4. Keterbatasan akses pembiayaan dan investasi. Akses terhadap pembiayaan formal dan investasi bagi pelaku ekonomi kreatif masih terbatas, sehingga menghambat ekspansi usaha dan peningkatan skala produksi.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional sebagai berikut :

1. Penguatan program peningkatan nilai tambah subsektor unggulan ekonomi kreatif untuk mendorong peningkatan kontribusi terhadap PDRB Nasional.
2. Fasilitasi peningkatan kapasitas dan skala usaha pelaku ekonomi kreatif, khususnya UMK, melalui pendampingan, pembiayaan, dan akses pasar.
3. Penguatan koordinasi dengan BPS dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka peningkatan kualitas dan cakupan data PDRB Ekonomi Kreatif.
4. Mendorong pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi sektor kreatif.

f) Analisis Program dan Kegiatan pencapaian Indikator Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional

Untuk mendukung upaya peningkatan capaian Indikator Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional, dilaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

- Program Pemasaran Pariwisata
  Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
  - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri dengan pagu anggaran Rp. 10.301.600,- dengan realisasi anggaran Rp. 9.800.000,- capaian keuangan 95,13 %
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
  - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan anggaran sebesar Rp. 36.039.400,00 dan realisasi Rp. 31.186.000,00 atau 86,53%.
  - Pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif.

  Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 318.959.000,00 dengan realisasi Rp. 285.860.099,00 atau 89,62%.
  Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diantaranya :
  1. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
  2. Kegiatan Padang Pariaman Creative Hub (Pachu Fest)
  3. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif

Kegiatan ini melibatkan 9 (sembilan) pelaku ekonomi kreatif dari berbagai subsektor (kuliner, kriya, fesyen, film, dan desain) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.200.000,- realisasi Rp. 6.300.000,- atau 56,25%

Gambar 3.106
Padang Pariaman Creative Hub (PACHU FEST)



***Sumber** : Disparpora Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Total alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung peningkatan capaian Indikator Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional adalah sebesar Rp. 376.500.000,00 dengan total realisasi mencapai Rp. 333.146.099,00. Jika dihitung secara kumulatif, tingkat penyerapan keuangan untuk seluruh kegiatan tersebut adalah sebesar 88,48%. Sedangkan untuk mengetahui Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.199
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Kinerja Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	5,18%	88,48%	-83,3%

Berdasarkan Tabel 3.181, terlihat realisasi penggunaan sumber daya untuk mendukung sasaran meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif melalui indikator Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional. Pada tahun 2025, capaian kinerja untuk indikator ini berada pada angka 5,18%, sementara penyerapan anggaran yang dialokasikan mencapai 88,48%. Kondisi ini menghasilkan tingkat efisiensi sebesar -83,3%.

Tingkat efisiensi yang menunjukkan angka negatif tersebut secara tegas mengindikasikan bahwa meskipun penyerapan anggaran sudah berjalan cukup optimal (mendekati 90%), namun output atau dampak kinerja yang dihasilkan pada variabel Rasio PDRB Ekonomi Kreatif belum menunjukkan peningkatan yang sebanding dengan sumber daya finansial yang telah dikeluarkan. Hal ini menggarisbawahi perlunya evaluasi mendalam terhadap strategi pelaksanaan program ekonomi kreatif, agar alokasi anggaran di masa mendatang dapat lebih efektif dalam mendorong kontribusi PDRB daerah terhadap skala nasional secara lebih masif

C. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional

Indikator selanjutnya dalam melihat keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Adalah Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum. Indikator ini dimaknai sebagai persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata yang meliputi penyediaan akomodasi bagi Wisatawan dan penyediaan jasa makan dan minum. Pada Tahun 2025. indikator ini ditargetkan mencapai 1,36% -94,82%

Berdasarkan Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2026, Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum dapat dihitung dari jumlah PDRB sektor lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, yang pada tahun 2025 mencapai 349,25 milyar rupiah, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Padang Pariaman Atas Dasar Harga Berlaku adalah sebesar 27.784,04 milyar rupiah.

Dari data diatas dapat dihitung Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 sebagai berikut :

$$Rasio = \frac{Total\ PDRB\ Sektor\ penyediaan\ akomodasi\ dan\ makan\ minum}{Total\ PDRB\ Daerah}\ x\ 100\%$$

$$Rasio\ PDRB\ Penyediaan\ Akomodasi\ Makan\ dan\ Minum = \frac{349{,}25}{\mathbf{27.784{,}04}}\ x\ 100\% = \mathbf{1{,}26\%}$$

a) Perbandingan Target dan Realisasi Rasio PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2025

Dari perhitungan di atas, dapat disajikan perbandingan target dan realisasi tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.200
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
		Target	Realisasi		
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,36	1,26	92,64%	Berhasil

***Sumber** : Disparpora Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Dari target Rasio PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang ditetapkan untuk Tahun 2025 sebesar 1,36%, sebagaimana perhitungan diatas baru dapat dicapai sebesar 1,26%, sehingga belum mencapai target yang telah ditetapkan. Namun demikian masih dapat dikatakan berhasil dengan nilai capaian 92,64%.

Kondisi ini dipengaruhi oleh belum optimalnya kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB daerah, yang antara lain disebabkan oleh terbatasnya aktivitas usaha, fluktuasi tingkat kunjungan wisata, serta belum meratanya pengembangan dan pemanfaatan potensi pariwisata daerah. Selain itu, tantangan daya saing usaha, keterbatasan permodalan pelaku usaha, serta faktor eksternal yang memengaruhi permintaan juga turut berkontribusi terhadap rendahnya capaian

kinerja. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis melalui penguatan promosi pariwisata, peningkatan kualitas layanan dan destinasi, serta pemberdayaan Ekonomi Kreatif sektor kuliner dan akomodasi agar kontribusi sektor ini terhadap PDRB daerah dapat meningkat pada periode selanjutnya.

b) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Rasio PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

Jika dibandingkan, capaian Indikator Kinerja Utama Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum pada tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.201
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Tahun 2024 dan 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	TAHUN 2024			TAHUN 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	-	1,25	-	1,36	1,26	92,64	Sangat Berhasil

***Sumber** : Disparpora Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Jika dilihat pada tabel diatas, rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 masih relatif sama dengan Tahun 2024, hanya bertumbuh 0,8%. Ini memperlihatkan bahwa sebagai bagian dari sektor unggulan kabupaten padang pariaman, lapangan usaha penyediaan akomodasi, makan dan minum perlu mendapat perhatian lebih besar guna dapat berkontribusi dalam meningkatkan nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Padang Pariaman.

c) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Rasio PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.202
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Rasio PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	1,36	1,38	1,40	1,42	1,44	1,26	-	-	-	-

***Sumber** : Disparpora Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Dilihat pada tabel di atas, realisasi Rasio Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2025, masih belum mencapai target jangka menengah, baik awal maupun sampai akhir RPJMD. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan upaya yang dilakukan untuk mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya sektor penyediaan akomodasi dan makan minum ini dapat berkembang lebih baik dan mencapai target jangka menengah yang telah direncanakan.

d) Perbandingan Realisasi Rasio PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2025 dengan Realisasi Provinsi

Berdasarkan Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2026, jumlah PDRB Sumatera Barat pada sektor lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum tahun 2025 mencapai 4.815,71 milyar rupiah, sedangkan total PDRB nya sebesar 352.189,40 milyar rupiah.

Dari data diatas dapat dihitung Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Sumatera Barat Tahun 2025 sebagai berikut :

$$Rasio\ PDRB\ Penyediaan\ Akomodasi\ Makan\ dan\ Minum = \frac{4.815,71}{352.189,40}\ x\ 100\% = \mathbf{1,37}\%$$

Dari perhitungan di atas, dapat disusun tabel perbandingannya sebagai berikut :

Tabel 3.203
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Tahun 2025 dengan Provinsi

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025		Ket
		Kabupaten	Provinsi	
Rasio PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	1,26	1,37	Dibawah provinsi

Capaian Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum di Kabupaten Padang Pariaman, sebesar 1,26 %, masih dibawah rata-rata propinsi yang mencapai rasio sebesar 1,37%. Hal ini memperlihatkan perlunya penguatan sektor ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan Kabupaten Padang Pariaman, khususnya sub sektor akomodasi makan dan minum.

e) Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Realisasi Indikator Kinerja Rasio PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Secara sektoral, pertumbuhan usaha akomodasi dan makan minum belum berlangsung secara merata, baik dari aspek sebaran wilayah maupun skala usaha di Kabupaten Padang Pariaman. Sebagian besar aktivitas ekonomi sektor ini masih terkonsentrasi pada lokasi tertentu, sementara potensi ekonomi di wilayah lainnya belum tergarap secara optimal. Selain itu, keterbatasan kapasitas produksi, rendahnya produktivitas tenaga kerja, serta belum optimalnya penerapan standar usaha dan inovasi layanan turut membatasi peningkatan nilai tambah sektor ini.

Sebagai langkah tindak lanjut, diperlukan upaya penguatan kebijakan pembangunan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang terintegrasi dengan pengembangan sektor pariwisata daerah.

Faktor Penghambat terhadap capaian indikator rasio PDRB akomodasi makan dan minum sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sehingga belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan rasio PDRB sektor terkait.

2. Keterbatasan kewenangan dan ruang lingkup dalam mendorong peningkatan nilai tambah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang bersifat tidak langsung sehingga mempengaruhi capaian indikator kinerja.
3. Partisipasi pelaku usaha yang belum merata dalam program pembinaan dan fasilitasi antar subsektor.
4. Keterbatasan data dan informasi pendukung kinerja/data sektoral yang digunakan yang masih memerlukan penyempurnaan dan pemutakhiran.
5. Pengaruh faktor eksternal ekonomi, sehingga dinamika kondisi ekonomi dan tingkat kunjungan berdampak terhadap kinerja sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB daerah, telah dan akan dilakukan berbagai upaya yang antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengembangan Pariwisata Daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang berlaku, sebagai upaya mendorong peningkatan aktivitas sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.
2. Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha dengan melakukan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi kepada pelaku usaha sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum untuk meningkatkan kapasitas usaha, kualitas layanan, dan kepatuhan terhadap standar usaha.
3. Peningkatan Promosi dan Informasi Pariwisata Daerah dengan melaksanakan kegiatan promosi dan penyebarluasan informasi pariwisata daerah melalui berbagai media guna meningkatkan minat kunjungan dan aktivitas ekonomi sektor terkait.
4. Penguatan Koordinasi dan Sinergi antar perangkat daerah terkait serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata dan sektor pendukungnya.
5. Peningkatan Kualitas Data dan Pelaporan Kinerja melalui penguatan pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data sektoral sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.
6. Penyusunan dan Penyesuaian Kebijakan Sesuai Kewenangan dengan melakukan penyesuaian kebijakan dan rencana kerja sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk mendukung pencapaian indikator kinerja sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

f) Analisa Prgram dan Kegiatan Pendukung Realisasi Indikator Kinerja Rasio PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Program dan Kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Rasio PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum adalah sama dengan Program dan Kegiatan yang mendukung capaian Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional, sebagaimana yang telah disampaikan analisisnya pada bagian sebelum ini.

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.204
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Kinerja Rasio PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rasio PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2025	92,64%	88,48%	4,16%

Berdasarkan data pada tabel diatas, pencapaian sasaran meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif melalui indikator Rasio PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menunjukkan performa yang sangat stabil dan efisien. Pada tahun 2025, capaian kinerja indikator ini tercatat sebesar 92,64%, yang berhasil direalisasikan dengan penyerapan anggaran sebesar 88,48%, menghasilkan tingkat efisiensi positif sebesar 4,16%. Hal ini menunjukkan bahwa instansi telah berhasil mengelola sumber daya keuangan dengan sangat baik, di mana target kinerja dapat tercapai secara optimal tanpa menghabiskan seluruh alokasi anggaran yang tersedia.

SASASARAN STRATEGIS 11

Meningkatnya Kemudahan Investasi

Dalam konteks pembangunan ekonomi, investasi atau penanaman modal merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan, sebab dengan investasi kita dapat mengubah sumber daya manusia menjadi kekuatan ekonomi nyata. Melalui kegiatan investasi akan dihasilkan barang dan jasa untuk memperluas kesempatan berusaha, melaksanakan alih teknologi dan sebagainya yang pada akhirnya akan menghasilkan dan meningkatkan pendapatan. Dengan meningkatnya investasi diharapkan akan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kapasitas produksi tersebut dapat diperoleh melalui investasi swasta (Private Investment) yang bisa disebut dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun investasi luar negeri yang disebut dengan Penanaman Modal Asing (PMA).

A. Persentase Peningkatan Investasi

Persentase peningkatan investasi merupakan indikator yang menggambarkan peningkatan atau penurunan realisasi investasi dari satu periode ke periode berikutnya. Nilai positif menunjukkan adanya kenaikan minat investor dan perbaikan iklim usaha, sedangkan nilai negatif menandakan terjadinya kontraksi yang perlu diantisipasi dengan kebijakan yang tepat. Indikator ini penting sebagai alat evaluasi kinerja pembangunan ekonomi daerah sekaligus dasar perumusan strategi peningkatan investasi secara berkelanjutan.

Adapun formulasi perhitungan untuk IKU ini adalah sebagai berikut :

$$Persentase\ Peningkatan\ Investasi = \frac{\text{Jumlah Investasi Tahun n} - \text{Jumlah Investasi Tahun (n} - 1)}{\text{Jumlah Investasi Tahun (n} - 1)} x100\%$$

Dengan menggunakan formulasi pengukuran diatas dan berdasarkan nilai realisasi investasi yang dihimpun Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman, maka dapat diuraikan persentase pertumbuhan investasi di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 sebagai berikut :

$$Persentase\ Peningkatan\ Investasi = \frac{10.391.656.928.848 - 3.434.127.422.221}{3.434.127.422.221} x100\% = \mathbf{202,60\%}$$

Peningkatan realisasi investasi Tahun 2025, tersebar pada berbagai sektor yaitu sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.205
Realisasi Investasi Menurut Sektor di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

No	Realisasi Investasi per Sektor	TW I sd TW IV (Rp)	Persentase Capaian (%)
1	Hotel dan Restoran	2.221.779.516	**0,02 %**
2	Industri	19.483.709.395	**0,19 %**
3	Jasa	6.010.530.000	**0,06 %**

4	Konstruksi	10.227.166.725.508	**98,42 %**
5	Listrik, Gas dan Air	44.506.730.535	**0,43 %**
6	Perdagangan dan Reparasi	22.742.096.226	**0,22 %**
7	Perikanan	12.008.800.000	**0,12 %**
8	Pertambangan	9.360.000.000	**0,09 %**
9	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	535.000.000	**0,01 %**
10	Tanaman Pangan, Perkebunan & Peternakan	10.984.596.297	**0,11 %**
11	Transportasi, Gedung & Telekomunikasi	36.636.961.364	**0,35 %**
	TOTAL	**10.391.656.928.841**	**100 %**

***Sumber** : Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Berdasarkan tabel di atas, Realisasi investasi Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 didominasi oleh Sektor Konstruksi dengan kontribusi sebesar 98,42%, menunjukkan fokus investasi pada pembangunan infrastruktur. Sektor lainnya seperti transportasi, peternakan, industri, dan perdagangan memberikan kontribusi pendukung meskipun dalam proporsi yang relatif kecil, namun tetap berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara sectoral dan berperan penting dalam diversifikasi ekonomi daerah.

Perkembangan investasi di sektor-sektor tersebut mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung diversifikasi ekonomi. Peningkatan investasi di sektor kontruksi diharapkan dapat meningkatkan lapangan kerja, pendapatan daerah, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Peningkatan Investasi Tahun 2025

Capaian indikator kinerja utama "Persentase Peningkatan Investasi" pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.206
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Investasi Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
		Target	Realisasi		
Persentase Peningkatan Investasi	%	2,58	202,60	7.852,71	Sangat Berhasil

***Sumber** : DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Indikator Persentase Peningkatan Investasi pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 2,58%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi yang dicapai adalah 202,60%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 7.852,71%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pada indikator ini berada pada kategori sangat tinggi/sangat berhasil, karena realisasi pertumbuhan investasi jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai

kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendorong peningkatan investasi telah berjalan secara efektif dan optimal.

Tingginya realisasi pertumbuhan investasi mencerminkan meningkatnya minat dan kepercayaan investor terhadap iklim investasi, yang didukung oleh perbaikan pelayanan perizinan, kemudahan berusaha, serta adanya peluang investasi yang menarik. Selain itu, masuknya investasi baru maupun pengembangan usaha dari investor yang sudah ada turut memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian indikator ini.

Meskipun capaian kinerja tergolong sangat berhasil, kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi dalam penetapan target ke depan. Target yang relatif rendah dibandingkan dengan potensi aktual dapat menyebabkan capaian terlihat sangat tinggi. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian target yang lebih realistis dan menantang pada periode selanjutnya, agar kinerja yang dihasilkan tetap terukur dan berorientasi pada keberlanjutan pertumbuhan investasi.

b) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Investasi Tahun 2024 dan Tahun 2025

Tabel 3.207
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Investasi Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase Peningkatan Investasi	%	10	185	1.850	2,58	202,60	7.852,71	Sangat Berhasil

***Sumber** : DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Pada tahun 2024, realisasi persentase pertumbuhan investasi berada pada angka 185%, sedangkan pada tahun 2025 sebesar 202,29% mengalami kenaikan dari tahun 2024 sebesar 17,29%. Hal ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan investasi di Padang Pariaman pada tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

c) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Investasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.208
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Investasi Tahun 2025 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi
Persentase Peningkatan Investasi	2025	2,58	202,60
	2026	3,44	-
	2027	4,12	-
	2028	5,16	-
	2029	6,55	
	2030	7,68	-

***Sumber:** BKPM dan DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Berdasarkan data target dan realisasi kinerja tahun 2025–2029 dan realisasi tahun 2025 di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator Persentase Peningkatan Investasi Tahun 2025 telah melampaui target tahun bersangkutan, bahkan jika dibandingkan dengan target akhir jangka menengah. Namun demikian karena ini merupakan indikator yang bersifat pertumbuhan dari tahun ke tahun, diperlukan konsistensi dalam pencapaiannya dan analisa yang terukur untuk menetapkan target pada tahun-tahun selanjutnya.

d) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Investasi Tahun 2025 dengan Realisasi Provinsi

Tabel 3.209
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Investasi Tahun 2025 Kabupaten dengan Provinsi

Indikator Kinerja Utama	Kabupaten	Provinsi	Keterangan
Persentase Peningkatan Investasi	202,60%	93,03%	Diatas Provinsi

Berdasarkan Sumatera Barat dalam Angka 2026, Realisasi Investasi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah 17.004.310,83 juta rupiah, sedangkan tahun 2024 terealisasi sebesar 8.809.090,48 juta rupiah. Dengan perhitungan sesuai rumus, didapat Persentase Peningkatan Investasi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah 93,03%.

Jika dibandingkan, realisasi persentase peningkatan investasi Kabupaten Padang Pariaman meningkat lebih besar dari rata-rata peningkatan investasi di Sumatera Barat.

e) Faktor Pendukung/Penghambat Pencapaian IKU Persentase Pertumbuhan Investasi di Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan

Faktor Pendukung tercapainya target indikator kinerja persentase pertumbuhan investasi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 antara lain :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan
   Optimalisasi pelayanan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) serta pendampingan langsung kepada pelaku usaha telah mempermudah proses perizinan dan mempercepat realisasi investasi di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Peran Aktif Pemerintah Daerah dalam Fasilitasi Investasi
   Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman secara aktif melakukan fasilitasi dan pendampingan kepada investor, mulai dari tahap perencanaan hingga realisasi usaha, sehingga mengurangi hambatan administratif dan teknis di lapangan.
3. Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah
   Pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah, seperti pertanian, perikanan, perdagangan, dan jasa, menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Padang Pariaman.
4. Stabilitas Kondisi Sosial dan Keamanan Daerah

Kondisi sosial yang kondusif serta dukungan masyarakat terhadap kegiatan usaha memberikan rasa aman dan kepastian bagi investor dalam menjalankan kegiatan investasinya

Faktor Penghambat tercapainya target indikator kinerja persentase pertumbuhan investasi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 yaitu:

Di samping capaian kinerja yang tinggi, masih terdapat beberapa faktor penghambat antara lain:

1. Keterbatasan Infrastruktur Pendukung Investasi
   Belum meratanya infrastruktur pendukung, seperti akses jalan ke lokasi usaha dan ketersediaan utilitas dasar, dapat menjadi kendala bagi investor dalam mengembangkan usahanya. Peran aktif Pemerintah Daerah dalam Fasilitasi Investasi
2. Ketergantungan pada Jenis Investasi Tertentu
   Pertumbuhan investasi masih didominasi oleh sektor tertentu, sehingga apabila sektor tersebut mengalami perlambatan, akan berdampak pada penurunan pertumbuhan investasi secara keseluruhan.
3. Kendala Koordinasi Lintas Sektor
   Pelaksanaan kegiatan investasi sering memerlukan koordinasi dengan berbagai perangkat daerah dan instansi vertikal, yang dalam beberapa kasus dapat mempengaruhi kecepatan realisasi investasi.
4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Lokal
   Ketersediaan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan investor masih terbatas, sehingga berpotensi menghambat pengembangan usaha.
5. Belum tersedianya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan Peta Potensi Peluang Investasi.

Langkah kedepan yang dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kimerja antara lain:

1. Peningkatan Kualitas dan Kecepatan Pelayanan Perizinan
   Penyederhanaan proses perizinan, peningkatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi layanan OSS dan pendampingan pelaku usaha
2. Penguatan Promosi Investasi Daerah
   Penyusunan dan penyebarluasan informasi peluang investasi daerah serta partisipasi dalam kegiatan promosi investasi tingkat provinsi dan nasional.
3. Peningkatan Koordinasi dan Sinergi
   Mendorong pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendukung secara bertahap sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
4. Peningkatan Infrastruktur Pendukung Investasi
   Mendorong pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendukung secara bertahap sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
5. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Investasi
   Pelaksanaan pemantauan secara berkala terhadap realisasi investasi guna memastikan keberlanjutan dan dampak ekonomi dari investasi yang masuk.

1) Penyusunan Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan Peta Potensi Peluang Investasi.

f) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Indikator Persentase Peningkatan Investasi

Program dan kegiatan yang menunjang Peningkatan Investasi Adalah :

- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

  Dengan Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah dengan target yang di tetapkan yaitu 80% sedangkan pagu Anggaran Rp. 18.390.900,00,- dan Terealisasi 80% dan realisasi anggaran Rp. 15.945.750,00,- atau 86,70% ditunjang oleh:

  Kegiatan: Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan target yang di tetapkan yaitu 1 dokumen sedangkan pagu Anggaran Rp. 3.112.500,00,- dan Terealisasi 1 dokumen dan realisasi anggaran Rp. 1.935.750,00,- atau 62,19%.

  Sub Kegiatan:
  - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
  - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
  - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

  Kegiatan:

  Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dengan target yang di tetapkan yaitu 1 dokumen sedangkan pagu Anggaran Rp. 15.278.400,00,- dan Terealisasi 1 dokumen dan realisasi anggaran Rp. 14.010.000,00,- atau 91,69%.

  Sub Kegiatan:
  - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
  - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)
  - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

- Program Promosi Penanaman Modal

  Program promosi penanaman modal merupakan instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Program ini harus dirancang secara komprehensif dengan memperhatikan kemudahan berinvestasi, penyediaan informasi yang akurat, serta pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia. Keberhasilan program promosi dapat terlihat dari meningkatnya volume investasi, terciptanya lapangan pekerjaan, dan berkembangnya sektor-sektor ekonomi lokal yang strategis, dengan target yang di tetapkan yaitu 1 dokumen sedangkan pagu Anggaran Rp. 9.683.000,00,- dan Terealisasi 1 dokumen dan realisasi anggaran Rp. 7.400.000,00,- atau 76,42%

  Kegiatan:

  Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan target yang di tetapkan yaitu 1 dokumen sedangkan pagu Anggaran Rp. 9.683.000,00,- dan Terealisasi 1 dokumen dan realisasi anggaran Rp. 7.400.000,00,- atau 76,42%.

  Sub Kegiatan:
  - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

➢ Program Pelayanan Penanaman Modal
Untuk mewujudkan Pelaksanaan program ini ada 1 kegiatan
Kegiatan:
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dialokasikan anggaran sebesar Rp. 26.222.015,00,- dengan realisasi anggaran Rp. 23.207.000,00 atau 88.50%.
Sub Kegiatan:
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
- Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik.
- Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
- Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

➢ Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Untuk mewujudkan Pelaksanaan program ini ada 1 Kegiatan yaitu Kegiatan:
Terlaksananya Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinanan Berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.250.000,00,- dengan realisasi anggaran Rp.1.290.000,00,- atau 57,33%.
Sub Kegiatan:
- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

➢ Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Untuk mewujudkan Pelaksanaan program ini ada 1 Kegiatan yaitu Kegiatan:
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaannya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 26.950.000,00, - terealisasi sebesar Rp. 26.256.200,00,- atau 97,42%.
Sub Kegiatan:
- Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
- Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
- Pengawasan Penanaman Modal

Melakukan Kegiatan kunjungan lapangan Dalam Rangka Pengawasan Perizinan Berusaha dan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ke PT. Dofla Land, Alana dan Dynamid Properti di Kec. Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman



- Melakukan Kegiatan kunjungan lapangan Dalam Rangka Pengawasan Perizinan Berusaha dan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ke PT. Obit Sejahtera Gemilang dan Olga Mulya gemilang di Kec. Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman



- Melakukan Kegiatan kunjungan lapangan Dalam Rangka Pengawasan Perizinan Berusaha dan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ke PT. Kunango Jantan di Kec. Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.



- Melakukan Kegiatan kunjungan lapangan Dalam rangka Peninjauan Lapangan menindak lanjuti laporan pengaduan masyarakat terkait Kandang Ayam Yang berlokasi Di Nagari Balah Aie Timur Kecamatan VII Koto Sungai Sariak.



g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.210
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Investasi Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kemudahan Investasi	Persentase Peningkatan Investasi	7.852,71%	88,48%	7.764,23%

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2025, sasaran "Meningkatnya Kemudahan Investasi" menunjukkan hasil yang sangat impresif. Capaian indikator Persentase Peningkatan Investasi berhasil terealisasi sebesar 7.852,71%. Angka ini merefleksikan keberhasilan yang melampaui ekspektasi dalam upaya mendorong iklim investasi.

Dilihat dari sisi kemanfaatan sumber daya anggaran, program ini menggunakan dana dengan Penyerapan Anggaran sebesar 88,48%. Dengan serapan anggaran yang berada di bawah pagu namun menghasilkan output kinerja yang masif, diperoleh nilai Tingkat Efisiensi sebesar 7.764,23%. Secara keseluruhan, pelaksanaan program pada indikator ini dikategorikan **Sangat Efisien**. Organisasi berhasil memaksimalkan sumber daya yang ada untuk menciptakan lompatan kinerja yang signifikan bagi daerah.

B. Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan *share* PMTB terhadap PRDB.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan indikator yang mengukur investasi fisik atau penambahan aset tetap dalam kurun waktu tertentu. Secara

sederhana, PMTB mencerminkan seberapa besar pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, maupun rumah tangga untuk membeli barang modal guna meningkatkan kapasitas produksi. Jika angka PMTB tumbuh positif, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman secara keseluruhan biasanya juga akan terdorong naik.

Berdasarkan Buku Padang Pariaman Dalam Angka 2026, Pembentukan Modal Bruto (%PDRB) dapat dihitung realisasi Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\text{PMTB (\%PDRB)} = \frac{\text{PMTB}}{\text{PDRB ADHK}} \; x \; 100\%$$

$$\text{PMTB (\%PDRB)} = \frac{4.497,15}{\mathbf{14.619,50}} \; x \; 100\% = 30,76\%$$

a) Perbandingan Target dan Realisasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PRDB) Tahun 2025

Tabel 3.211
Perbandingan Target dan Realisasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PRDB) Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
		Target	Realisasi		
Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	%	30,60	30,76	100,52	Sangat Berhasil

***Sumber** : DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Dari tabel di atas terlihat bahwa Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB) di Kabupaten Padang Pariaman sebesar 30,76% tercapai melebihi target yang ditetapkan yaitu 30,60%, dengan capaian sangat berhasil dengan persentase sebesar 100,52%.

b) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PRDB) Tahun 2024 dan 2025

Perhitungan Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PRDB) untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

$$\text{PMTB (\%PDRB)}Tahun\ 2024 = \frac{5.046,68}{\mathbf{1}4.369,24} \; x \; 100\% = 35,12\%$$

Dari perhitungan di atas, dapat dibandingkan realisasi PMTB (%PDRB) Tahun 2024 dan Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.212
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PRDB) Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	TAHUN 2024			TAHUN 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	%	--	35,12	-	30,60	30,76	100,52	Sangat Berhasil

***Sumber** : DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Melihat perhitungan dan tabel diatas, Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PRDB) untuk tahun 2025 mengalami penurunan baik dari sisi nilai rupiah maupun dari proporsinya terhadap PDRB. Hal ini memperlihatkan melemahnya investasi di Padang Pariaman pada Tahun 2025.

c) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PRDB) Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.213
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PRDB) Tahun 2025 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi
Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	2025	30,60	30,76
	2026	30,38	-
	2027	30,16	-
	2028	29,93	-
	2029	29,71	-

Sumber: *BKPM dan DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Dari perencanaan jangka menengah dapat dilihat bahwa Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) diproyeksikan menurun/melemah setiap tahunnya. Secara teori Pembentukan Modal Tetap Bruto yang melemah dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global, tingginya suku bunga, serta sikap *wait and see* pelaku usaha akibat transisi kebijakan (politik/fiskal). Faktor lain meliputi pola musiman awal tahun yang lebih rendah, pelemahan daya beli, dan risiko inflasi.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi PMTB (%PDRB) Tahun 2025 masih lebih tinggi dari proyeksi jangka menengah, yang mengindikasikan masih cukup positifnya minat investasi di Padang Pariaman.

d) Perbandingan Realisasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PRDB) Tahun 2025 dengan Realisasi Provinsi

Perhitungan Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PRDB) Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

$$\text{PMTB (\%PDRB)}\,Provinsi = \frac{56.249{,}97}{\mathbf{206.137{,}88}}\ x\ 100\% = 27{,}29\%$$

Dari perhitungan di atas, dapat dibandingkan realisasi PMTB (%PDRB) Tahun 2024 dan Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.214
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PRDB) Tahun 2025 Kabupaten dengan Provinsi

Indikator Kinerja Utama	Kabupaten	Provinsi	Keterangan
Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	30,76	27,29	Diatas Provinsi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi PMTB (%PDRB) Tahun 2025 Kabupaten Padang Pariaman masih lebih tinggi dari realisasi Provinsi Sumatera Barat. Hal ini memperlihatkan bahwa di Tahun 2025 realisasi pembentukan modal tetap bruto lebih baik dari rata-rata Kabupaten Kota di Sumatera Barat.

e) Analisa Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan

Faktor pendorong tercapainya realisasi pembentukan modal tetap bruto kabupaten padang pariaman tahun 2025 :

1. Penyelesaian dan keberlanjutan proyek infrastruktur fisik menjadi penggerak utama PMTB. Pelebaran jalan dan perbaikan akses menuju Bandara Internasional Minangkabau (BIM) serta jalur lingkar luar yang mempermudah mobilitas barang dan jasa. Selanjutnya keberadaan kawasan IKK Parit Malintang sebagai pusat pemerintahan baru terus mendorong pembangunan gedung perkantoran dan fasilitas publik yang tercatat sebagai penambahan aset tetap pemerintah.
2. Sektor properti menjadi penyumbang investasi yang signifikan pada tahun 2025. Realisasi investasi di sektor properti di wilayah sekitar (Pariaman dan Padang Pariaman) menunjukkan tren positif (mencapai puluhan miliar rupiah). Hal ini didorong oleh tingginya permintaan hunian bagi pekerja di sektor jasa dan transportasi yang berbasis di sekitar bandara.
3. Munculnya titik-titik ekonomi baru di sepanjang jalur utama (seperti Ulakan Tapakis dan wilayah utara kabupaten) telah mendorong investasi swasta seperti Pembangunan *homestay*, kafe, dan restoran baru yang meningkat seiring dengan pulihnya arus wisatawan dan mobilitas antar-kabupaten.
4. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Penanaman Modal (DPMPTP) melakukan langkah-langkah akselerasi :
   - Integrasi NIB dan Tata Ruang. Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) memberikan kepastian hukum bagi investor untuk menanamkan modal dalam bentuk bangunan dan mesin.
   - Pembentukan tim khusus di tahun 2025 melalui Keputusan Bupati untuk memastikan hambatan investasi di tingkat lokal dapat segera teratasi.
5. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah untuk pembangunan sarana kesehatan dan pendidikan merupakan komponen langsung yang membentuk nilai PMTB pemerintah daerah.

Faktor penghambat tercapainya realisasi pembentukan modal tetap bruto kabupaten padang pariaman tahun 2025 :

1. Keterbatasan Lahan dan Kendala Spasial. Sebagian besar lahan produktif di Padang Pariaman berstatus tanah ulayat. Proses negosiasi yang panjang antara investor, pemerintah, dan pemangku adat sering kali menghambat eksekusi proyek pembangunan gedung atau pabrik.
2. Fluktuasi harga bahan bangunan (seperti semen dan besi) yang dipicu oleh kenaikan biaya logistik menyebabkan beberapa proyek konstruksi swasta maupun pemerintah mengalami penyesuaian anggaran atau penundaan pengerjaan.

3. Tingginya suku bunga pinjaman perbankan di tahun 2025 membuat pelaku usaha lokal lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi aset tetap (seperti pembelian mesin atau renovasi bangunan usaha).
4. Meskipun sistem *Online Single Submission* (OSS) sudah berjalan, masih banyak pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di wilayah seperti Lubuk Alung atau Ulakan yang kesulitan mengoperasikan sistem perizinan digital secara mandiri, sehingga pelaporan realisasi investasi (LKPM) sering terlambat atau tidak tercatat.
5. Beberapa kawasan yang diproyeksikan sebagai zona industri atau jasa, ketersediaan daya listrik yang stabil dan jaringan air bersih (Perumda) belum sepenuhnya menjangkau lokasi-lokasi strategis, sehingga menurunkan minat investor untuk membangun fasilitas permanen.
6. Status Padang Pariaman sebagai daerah rawan bencana (gempa dan banjir) meningkatkan biaya asuransi dan risiko investasi fisik, yang menjadi pertimbangan berat bagi pemodal besar.

f) Analisa Program dan Kegiatan Pendukung Realisasi Pembentukan PMTB (%PRDB)

Program dan Kegiatan pendukung sama dengan kegiatan pada indikator kinerja Persentase Peningkatan Investasi

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.215
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PRDB) Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kemudahan Investasi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PRDB)	100,52%	88,48%	12,04%

Pencapaian ini mencerminkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik, di mana organisasi mampu menghasilkan output yang melampaui target dengan penggunaan sumber daya yang lebih rendah dari yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan investasi melalui pembentukan modal tetap bruto telah berjalan secara efektif dan efisien, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tanpa memerlukan pembiayaan yang berlebihan.

C. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB

Rasio Total Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap PDRB merupakan indikator penting yang menunjukkan tingkat kedalaman finansial (*financial deepening*) dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan di Kabupaten Padang Pariaman.

Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat Padang Pariaman memiliki budaya menabung yang baik dan sistem perbankan mampu menyerap likuiditas dari hasil aktivitas ekonomi daerah.

Berdasarkan data dari Padang Pariaman Dalam Angka 2026, Kabupaten Padang Pariaman, Dana yang tersimpan dalam bentuk Giro tercatat sebesar 106.651.000.000 rupiah, Simpanan Berjangka sebesar 138.572.000.000 rupiah, dan Tabungan sebesar 341.517.000.000 rupiah. Sehingga Total Dana Pihak Ketiga di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 sebesar 586.740 juta rupiah. Sedangkan Total nilai PDRB Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah 27.784,04 milyar rupiah. Sehingga dapat dihitung rasio Total Dana Pihak Ketiga/PDRB sebagai berikut :

Rasio Total Dana Pihak Ketiga/PDRB $= \frac{586,74}{27.784,04}\ x\ 100\% = 2,11\ \%$

a) Perbandingan Target dan Realisasi Total Dana Pihak Ketiga/PDRB Tahun 2025

Dari hasil perhitungan rasio Total Dana Pihak Ketiga/PDRB di atas, dapat disajikan perbandingan target dan realisasinya sebagai berikut :

Tabel 3.216
Perbandingan Target dan Realisasi Total Dana Pihak Ketiga/PDRB Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian (%)	Interpretasi
		Target	Realisasi		
Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	8,76	2,11	24,09	Kurang Berhasil

Sumber: *Bagian Perekonomian dan DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat realisasi rasio Total Dana Pihak Ketiga/PDRB Tahun 2025 Kabupaten Padang Pariaman hanya mencapai 24,09% dari target yang ditetapkan sebesar 8,76%, dan dinyatakan Kurang Berhasil. Ini memperlihatkan bahwa budaya menabung dan kemmapuan bank untuk menyerap likuiditas dana masyarakat masih relatif rendah.

b) Perbandingan Realisasi Capaian Total Dana Pihak Ketiga/PDRB Tahun 2024 dan 2025

Dikarenakan indikator Total Pihak Ketiga/PDRB merupakan indikator baru yang digunakan sejak tahun 2025, maka tidak didapatkan data untuk tahun 2024, sehingga belum dapat dilakukan analisisnya.

c) Perbandingan Realisasi Total Dana Pihak Ketiga/PDRB Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Berikut disajikan perbandingan realisasi Total Dana Pihak Ketiga/PDRB Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah :

Tabel 3.217
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama
Total Dana Pihak Ketiga/PDRB Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	8,76	11,59	14,42	17,26	02,09	2,11	-	-	-	-

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Total Dana Pihak Ketiga/PDRB Tahun 2025 masih jauh lebih kecil dari target jangka menengah tahun 2025 maupun akhir masa perencanaan jangka menengah. Hal ini mengindikasikan perlunya intervensi lebih kuat sehingga minat menabung masyarakat dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan lebih meningkat.

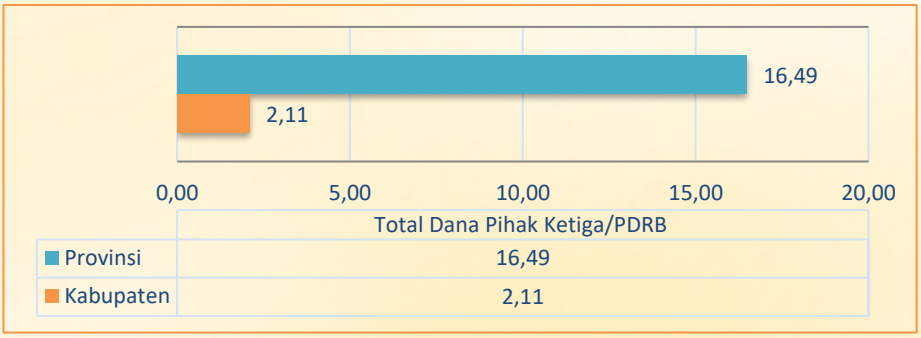
d) Perbandingan Realisasi Total Dana Pihak Ketiga/PDRB Tahun 2025 dengan Realisasi Provinsi

Berdasarkan data dari Sumatera Barat Dalam Angka 2026, Dana yang tersimpan dalam bentuk Giro tercatat sebesar 7.579.687,67 juta rupiah, Simpanan Berjangka sebesar 14.412.541,83 juta rupiah, dan Tabungan sebesar 36.093.818,42 juta rupiah. Sehingga Total Dana Pihak Ketiga di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebesar 58.086.047,92 juta rupiah. Sehingga bisa dihitung Total Dana Pihak Ketiga / PDRB di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, sebagai berikut :

$$\text{Rasio Total Dana Pihak Ketiga/PDRB Provinsi} = \frac{58.086,05}{352.189,40}\ x\ 100\% = 16,49\ \%$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diperbandingkan Total Dana Pihak Ketiga Kabupaten Padang Pariaman dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebagai berikut :

Grafik 3.44
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Total Dana Pihak Ketiga/PDRB Tahun 2025 Kabupaten dengan Provinsi



Dari grafik diatas diketahui bahwa Total Dana Pihak Ketiga Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 berada dibawah rata-rata Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, dengan selisih diatas 10%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat budaya menabung dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan di Kabupaten Padang Pariaman jauh lebih rendah dari rata-rata Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

e) Analisa Faktor Pendukung dan Penghambat Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%PRDB)

Faktor pendorong tercapainya realisasi Total Dana Pihak Ketiga/PDRB kabupaten padang pariaman tahun 2025 :

1) Masifnya pertumbuhan agen-agen bank (seperti Agen BRILink atau sejenisnya) hingga ke tingkat korong dan nagari memudahkan masyarakat di wilayah rural untuk menabung tanpa harus ke pusat kota atau kecamatan.

2) Keberhasilan petani cokelat, kelapa, dan padi dalam menjaga produktivitas tahun 2025 meningkatkan pendapatan rumah tangga tangga. Surplus pendapatan ini sebagian besar disimpan dalam bentuk tabungan atau deposito di bank lokal (Bank Nagari maupun Bank Nasional).
3) Tingginya realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Padang Pariaman seringkali diikuti dengan kewajiban kepemilikan rekening aktif, yang secara tidak langsung meningkatkan agregat dana pihak ketiga.
4) Penyaluran gaji ASN, perangkat nagari, serta dana desa melalui rekening perbankan memastikan adanya aliran dana masuk yang stabil setiap bulannya ke sistem perbankan daerah.
5) Realisasi proyek-proyek pembangunan di Padang Pariaman pada tahun 2025 melibatkan kontraktor dan vendor yang wajib memiliki rekening bank, sehingga dana termin proyek mengendap sementara sebagai DPK sebelum dibelanjakan.
6) Aliran dana dari orang Piaman di perantauan untuk keluarga di kampung halaman (terutama menjelang hari raya atau musim sekolah) meningkatkan saldo tabungan masyarakat di bank-bank lokal secara signifikan pada periode tertentu di tahun 2025.
7) Keberhasilan TPID dalam menjaga stabilitas harga/pengendalian inflasi (khususnya komoditas pangan) membuat masyarakat memiliki sisa pendapatan (*disposable income*) yang lebih besar untuk ditabung, alih-alih habis hanya untuk konsumsi pokok.

Faktor penghambat tercapainya realisasi Total Dana Pihak Ketiga/PDRB kabupaten padang pariaman tahun 2025 :

1) Peningkatan gaya hidup dan kemudahan akses belanja *online* seringkali menyerap likuiditas masyarakat sebelum sempat masuk ke rekening tabungan perbankan.
2) Masih kuatnya budaya menyimpan kekayaan dalam bentuk emas, tanah, atau hewan ternak (sapi/kerbau) daripada produk perbankan seperti deposito. Hal ini menyebabkan nilai ekonomi yang dihasilkan (PDRB) tidak tercatat sebagai DPK.
3) Adanya kekhawatiran terhadap penipuan siber (*cyber crime*) membuat sebagian kelompok masyarakat, khususnya generasi tua, ragu untuk menyimpan dana dalam jumlah besar di rekening bank digital.

f) Analisa Program dan Kegiatan Pendukung Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%PRDB)

Program Simpanan Pelajar (SimPel) dengan gerakan Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) di Kabupaten Padang Pariaman merupakan inisiatif strategis untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sejak dini. Program ini menyasar seluruh pelajar tingkat SMP/sederajat di Kabupaten Padang Pariaman.

Program ini merujuk pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung. Di Padang Pariaman, program ini dijalankan dengan tujuan:

a. Menanamkan budaya menabung dan pengelolaan uang kepada siswa.
b. Memastikan setiap siswa memiliki akses ke sistem perbankan resmi.
c. Membantu siswa memiliki aset atas nama sendiri untuk masa depan pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bekerjasama dengan Bank Nagari dengan melibatkan Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan serta Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Padang Pariaman untuk menjangkau sekolah-sekolah di pelosok kecamatan, mulai dari Lubuk Alung hingga ke wilayah utara kabupaten.Setoran Awal tabungan yaitu Rp 5.000 dengan setoran selanjutnya minimal Rp 1.000 dan tidak ada potongan bulanan.

Selain itu, indikator Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%PRDB) pada tahun 2025 ini didukung oleh Program Perekonomian Dan Pembangunan yang diakselerasi melalui kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian. Dukungan finansial yang dialokasikan untuk kegiatan ini yaitu anggaran sebesar Rp. 52.759.600,00 dan total realisasi anggaran Rp. 51.123.600,00 (96,90%).

Gambar 3.107
Kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Program Kejar



***Sumber** : Bagian Perekonomian dan SDA, 2025*

g) Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel 3.218
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Kinerja Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%PRDB) Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kemudahan Investasi	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%PRDB)	24,09%	96,90%	-72,81%

Nilai efisiensi yang menunjukkan angka negatif (-72,81%) memberikan gambaran bahwa penyerapan anggaran yang sangat optimal (mendekati 100%) belum mampu mendorong capaian kinerja indikator investasi secara proporsional pada tahun evaluasi ini. Kondisi ini mengindikasikan bahwa instrumen investasi di daerah masih menghadapi tantangan eksternal yang kompleks, sehingga suntikan anggaran yang besar belum sepenuhnya terkonversi menjadi pertumbuhan dana pihak ketiga yang signifikan terhadap PDRB.

Kesimpulan: Evaluasi ini menjadi basis bagi pemerintah daerah untuk meninjau kembali strategi promosi dan kemudahan investasi. Fokus ke depan tidak hanya pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada efektivitas program dalam menciptakan daya tarik investasi yang lebih kompetitif guna meningkatkan daya ungkit ekonomi daerah.

D. Nilai Transaksi Saham per Kapita

Total transaksi saham adalah total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor berdasarkan domisili (Kabupaten). Nilai transaksi saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham. Peningkatan Transaksi Saham Per Kapita di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2025 mencerminkan pergeseran perilaku investasi masyarakat dari aset tradisional ke pasar modal.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nilai Transaksi Saham Per Kapita Kabupaten Padang Pariaman adalah sebesar Rp. 533.131,21,00.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Transaksi Saham per Kapita Tahun 2025

Tabel 3.219
Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Transaksi Saham per Kapita Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian (%)	Interpretasi
		Target	Realisasi		
Nilai Transaksi Saham per Kapita	Rupiah	413.768	533.131,21	128,85	Sangat Berhasil

***Sumber** : Bagian Perekonomian dan SDA, 2025*

Dari tabel diatas, pencapaian target Nilai Transaksi Saham Per Kapita Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 sangat berhasil dengan capaian mencapai 128,25%. Dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 413.768,- dapat nilai realisasi sebesar Rp. 533.131,25, mengindikasikan perilaku masyarakat dalam menginvestasikan modalnya pada pasar saham relatif baik.

b) Perbandingan Realisasi Nilai Transaksi Saham Per Kapita Tahun 2024 dan 2025

Dikarenakan Nilai Transaksi Saham Per Kapita merupakan indikator baru yang digunakan sejak tahun 2025, maka tidak didapatkan data untuk tahun 2024, sehingga belum dapat dilakukan analisisnya.

c) Perbandingan Realisasi Nilai Transaksi Saham Per Kapita Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.220
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama
Nilai Transaksi Saham Per Kapita 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	Rupiah	413.768	493.821	573.874	653.927	733.980	533.131,21	-	-	-	-

Dari tabel diatas, terlihat bahwa realisasi Nilai Transaksi Saham Per Kapita Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 telah melebihi target tahun 2025 dan tahun 2026, namun masih dibawah target tahun 2027 sampai akhir tahun perencanaan jangka menengah. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun sudah lebih besar dari target tahun 2025 dan 2026, namun perlu konsistensi dan peningkatan intervensi program dan kegiatan untuk merealisasikan target jangka menengah indikator Nilai Transaksi Saham Per Kapita ini.

d) Perbandingan Realisasi Nilai Transaksi Saham per Kapita Tahun 2025 dengan Realisasi Provinsi

Grafik 3.45
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Transaksi Saham per Kapita Tahun 2025 Kabupaten dengan Provinsi



Berdasarkan data dari OJK, Nilai Transaksi Saham Sumatera Barat Tahun 2025 mencapai 19.281.908.000.000 rupiah. Untuk mendapatkan angka per kapita, nilai tersebut harus dibagi dengan total penduduk sumatera Barat yaitu 5.914.300 jiwa, sehingga didapat Nilai Transaksi Saham per Kapita Sumatera Barat Tahun 2025 adalah 3.260.218 rupiah.

Berdasarkan perhitungan tersebut, jika dibandingkan, Nilai Transaksi Saham per Kapita Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 jauh lebih sedikit jika dibandingkan rata-rata propinsi. Hal ini menggambarkan bahwa edukasi dan sosialisasi terhadap pasar modal masih harus terus ditingkatkan di Padang Pariaman.

e) Analisa Faktor Pendukung dan Penghambat Indikator Kinerja Nilai Transaksi Saham per Kapita serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Faktor pendorong tercapainya realisasi Transaksi Saham Per Kapita kabupaten padang pariaman tahun 2025 :

1) Kehadiran berbagai platform sekuritas daring yang memungkinkan pembukaan rekening efek secara *full digital* tanpa harus ke Kota Padang atau Jakarta.
2) Peningkatan kualitas jaringan internet di wilayah strategis seperti Lubuk Alung, Batang Anai, dan parit Malintang memudahkan akses *real-time* ke bursa saham.
3) Tumbuhnya komunitas-komunitas trader dan investor lokal di Sumatera Barat yang saling berbagi informasi melalui media sosial, memicu minat beli saham di kalangan masyarakat umum.
4) Dengan inflasi daerah yang terkendali, masyarakat memiliki sisa pendapatan lebih yang mulai dialokasikan ke instrumen investasi dengan potensi imbal hasil lebih tinggi daripada tabungan konvensional.

Faktor penghambat tercapainya realisasi Transaksi Saham Per Kapita kabupaten padang pariaman tahun 2025 :

1) Dana menganggur (*idle money*) lebih banyak dialokasikan untuk membeli tanah ulayat, sawah, atau emas perhiasan. Hal ini dianggap lebih aman dan sesuai dengan nilai-nilai lokal dibandingkan angka-angka digital di bursa saham.
2) Di tingkat kabupaten Padang Pariaman, akses terhadap sosialisasi langsung dari sekuritas atau BEI masih terbatas untuk menjangkau masyarakat di nagari-nagari.
3) Maraknya kasus investasi bodong atau robot trading yang pernah merugikan warga di wilayah Sumatera Barat menciptakan sikap skeptis terhadap segala bentuk investasi berbasis aplikasi digital, termasuk saham legal sekalipun.
4) Sebagian besar pemilik modal besar di daerah adalah generasi senior yang kurang akrab dengan aplikasi *trading* saham yang kompleks, sehingga mereka tetap bertahan pada deposito perbankan.

f) Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Realisasi Nilai Transaksi Saham per Kapita

Program dan kegiatan peningkatan nilai transaksi pasar modal di Kabupaten Padang Pariaman difokuskan pada edukasi masif dan inklusi keuangan untuk meningkatkan jumlah investor lokal. Kegiatan utamanya meliputi Sosialisasi Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT) oleh OJK, pendirian gerai BEI di institusi pendidikan, serta pelatihan bagi generasi muda dan UMKM. Dalam hal ini Pemerintah Daerah berkontribusi dalam memberikan koordinasi dan komunikasi kegiatan yang dilakukan oleh OJK Sumatera Barat.

Keberhasilan pencapaian indikator Nilai Transaksi Saham per Kapita pada tahun 2025 tidak terlepas dari dukungan strategis Program Perekonomian Dan Pembangunan yang diakselerasi melalui kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian. Dukungan finansial yang dialokasikan untuk kegiatan ini yaitu anggaran sebesar Rp. 52.759.600,00 dan total anggaran terserap sebesar Rp. 51.123.600,00 (96,90%).

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.221
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Kinerja Nilai Transaksi Saham per Kapita Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kemudahan Investasi	Nilai Transaksi Saham per Kapita	128,85%	96,90%	31,95%

Hasil efisiensi sebesar 31,95% ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara produktif. Dengan serapan anggaran yang belum mencapai 100%, daerah mampu menghasilkan capaian kinerja yang justru jauh melampaui target. Kondisi ini membuktikan bahwa program peningkatan literasi keuangan dan iklim investasi yang dijalankan memiliki efektivitas yang sangat tinggi dan mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

SASASARAN STRATEGIS 12

Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau

Pangan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat keberhasilan kebijakan dalam meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau di Kabupaten Padang Pariaman, dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Ketahanan Pangan.

Indeks ini menunjukkan kemampuan daerah dalam menjamin ketersediaan pangan yang cukup, bergizi, aman, dan terjangkau. Indeks tersebut mencakup tiga pilar utama, yaitu ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan, serta menjadi acuan untuk menilai potensi kerentanan maupun keberhasilan program ketahanan pangan. Indeks yang tinggi mencerminkan bahwa suatu daerah memiliki ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan gizi penduduknya.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan indeks komposit yang mengukur ketahanan dan kerentanan pangan wilayah dari 3 (tiga) aspek, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang digunakan dalam penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA).

a) Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2025

Dalam Buku Ringkasan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Badan Pangan Nasional, dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 223.1 Tahun 2025 tentang Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2025, Nilai Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 ditetapkan sebesar 69,14 yaitu berada di area atau kategori "Agak tahan".

Tabel 3.222
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Interpretasi
Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	86,20	69,14	86,21	Berhasil

***Sumber** : DistanKP Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Jika dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan, maka realisasi Indeks Ketahanan Pangan pada tahun 2025 jauh dibawah angka target yang ditetapkan, dimana terpaut 17,06 point dari taget. Walaupun masih dapat dikatakan berhasil dengan capaian 86,21%, namun capaiannya masih belum menggembirakan.

Jika dirinci lebih jauh, Indeks IKP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 ini terdiri dari Indeks Ketersediaan 51,64, Indeks Keterjangkauan adalah 84,99 dan Indeks Pemanfaatan sebesar 71,02. Dengan demikian dapat kita pahami faktor ketersediaan merupakan faktor yang perlu mendapat perhatian lebih besar.

b) Perbandingan Realisasi Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2024 dan Tahun 2025

Tabel 3.223
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	TAHUN 2024			TAHUN 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	-	70,85	-	86,20	69,14	86,21	Berhasil

***Sumber** : DistanKP Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Nilai Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024. Dimana terjadi penurunan sebesar 14,23 point. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya variable indeks komposit ketersediaan pangan yang rendah.

Sebagaimana telah disampaikan di atas, Nilai Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 sebesar 69,14 diperoleh dari 3 indeks komposit, yaitu indeks ketersediaan pangan dengan nilai 51,64, indeks keterjangkauan pangan sebesar 84,99 dan indeks pemanfaatan pangan sebesar 71,02. Dari ketiga indeks tersebut terlihat bahwa indeks ketersediaan pangan di Kabupaten Padang Pariaman yang mempunyai nilai paling rendah jika dibandingkan dengan indeks yang lain. Dimana indeks ketersediaan pangan ini bersumber dari indikator produksi pangan Padang Pariaman dan sarana prasarana pangan yang masih kurang, walaupun pada tahun 2025 indikator produksi tanaman pangan lebih beragam, selain produksi padi, terdapat jagung, sagu, ubi jalar dan pisang.

Disamping itu, penyusunan IKP 2025 bersumber data tahun 2024. Pada aspek ketersediaan selain faktor produksi juga ditentukan oleh Cadangan Pangan Pemerintah dan ketersediaan pangan hewani. Pada tahun 2024 Kabupaten Padang Pariaman belum memiliki Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).

c) Perbandingan Realisasi Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.224
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Ketahanan Pangan 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	86,2	87,15	88	88,7	89,45	69,14	-	-	-	-

Dilihat dari tabel di atas, relalisasi Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 cukup jauh dari target jangka menengah yang telah ditetapkan, dimana sampai akhir jangka menengah diharapkan berada pada angka 90,00 sementara realisasi pada tahun 2025 baru mencapai 69,14. Hal ini mengharuskan komitmen dan upaya lebih besar pada peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau di Kabupaten Padang Pariaman.

d) Perbandingan Realisasi Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2025

Tabel 3.225
Perkembangan Nilai Indeks Katahanan Pangan (IKP) Kab. Padang Pariaman Tahun 2022 s.d 2025

Tahun	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)			
	Realisasi Kab. Padang Pariaman	Peringkat Nasional	Peringkat Provinsi	Ket.
2022	81,14	132	10	
2023	83,13	148	11	
2024	70,85	119	10	
2025	69,14	330	18	

Dilihat dari tabel di atas, nilai IKP Kabupaten Padang Pariaman cenderung mengalami penurunan. Namun demikian, suatu hal yang positif yang dapat dilihat adalah angka penurunan satu tahun terakhir menunjukan angka yang melandai jika di bandingkan dengan angka penurunan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun mengalami penurunan, IKP Padang Pariaman mulai mengalami penguatan.

Dilihat dari peringkat nasional maupun propinsi, ketahanan pangan kabupaten padang pariaman perlu mendapatkan perhatian serius untuk segera ditingkatkan.

e) Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Indeks Ketahanan Pangan

- Faktor Penghambat

Terjadinya bencana *hidrometeorologi* pada akhir tahun 2025 merupakan salah satu tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Padang Pariaman. Bencana *hidrometeorologi* berdampak langsung terhadap kerusakan prasarana pertanian, perikanan dan peternakan. Hal ini berpengaruh pada produksi dan produktivitas pertanian baik tanaman pangan, peternakan maupun perikanan. Pada sektor pertanian terjadi kerusakan lahan pertanian (sawah) seluas 1.263 ha, dengan rincian rusak berat 576 ha, sedang 240 ha dan 447 ha rusak ringan.

- Faktor Pendukung

Adanya program makan bergizi gratis (MBG) tentunya akan berdampak positif pada pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak sekolah. Hal ini secara langsung akan mendongkrak nilai pemanfaatan pangan masyarakat yang merupakan indeks komposit mendukung nilai IKP.

Selain itu, gerakan pasar murah (GPM) juga merupakan salah satu upaya meningkatkan pemenuhan pangan masyarakat. Gerakan pasar murah dapat meningkatkan akses pangan masyarakat yang juga merupakan indeks komposit pendukung nilai IKP.

f) Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Indeks Ketahanan Pangan

1. Pemanfataan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
   Kegiatan ini merupakan pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan untuk memenuhi sumber pangan dan gizi keluarga. Masyarakat

diberikan stimulant atau bantuan berupa bibit berbagai jenis sayuran yang dapat mereka tanam disekitar pekarangan. Pada tahun 2025, DistanKP menyalurkan bantuan kepada 10 KWT.

Gambar 3.108
Bantuan Bibit Sayuran untuk Pengembangan Pangan Pekarangan



***Sumber** : DistanKP Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

2. Pengawasan makanan segar asal tumbuhan
   Kegiatan ini berutujuan untuk mengawasi peredaran pangan segara asal tumbuhan di masyarakat. Masyarakat akan terlindungi dari zat-zat yang berbahaya pada kandungan pangan segar. Sehingga akan terwujud pangan segar yang aman untuk dikonsumsi masyarakat.

Gambar 3.109
Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan



***Sumber** : DistanKP Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

3. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)
   Tujuan pengadaan cadangan pangan pemerintah adalah untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup dan stabil bagi masyarakat, terutama dalam kondisi tertentu. Pada tahun 2025 Kabupaten Padang Pariaman mengadakan CPPD sebesar 38,71 Ton, angka ini sebesar 44,59% dari target CPPD yang ditetapkan untuk Kabupaten Padang Pariaman yaitu sebesar 86,81 Ton.

Gambar 3.110
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPPD)



***Sumber** : DistanKP Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Berikut ini program penunjang capaian indikator kinerja Indeks Ketahanan Pangan :

Tabel 3.226
Realisasi Anggaran Program Penunjang Capaian
Indikator Kinerja Utama Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 705.192.000,00	Rp. 699.822.736,00	99,24%
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 100.000.000,00	Rp .91.020.000,00	91,02%
Total		Rp. 805.192.000,00	Rp. 790.842.736,00	98,22%

Sumber : *BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Secara kumulatif, total anggaran yang dikelola untuk mendukung Indeks Ketahanan Pangan tahun 2025 adalah sebesar Rp805.192.000,00. Dari jumlah tersebut, total realisasi yang berhasil dicapai adalah Rp790.842.736,00. Dengan demikian, rata-rata persentase realisasi anggaran untuk seluruh program penunjang ini mencapai 98,22%. Angka penyerapan sebesar 98,22% mengindikasikan bahwa pelaksanaan program-program penunjang ketahanan pangan di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2025 telah berjalan dengan sangat baik sisi penggunaan anggaran.

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.227
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan	86,21%	98,22%	-12,01%

Nilai efisiensi -12,01% ini menunjukkan bahwa persentase penyerapan anggaran (98,22%) lebih besar dibandingkan dengan persentase capaian kinerjanya (86,21%). Hal ini mengindikasikan bahwa untuk mencapai target kinerja tersebut, diperlukan penggunaan sumber daya anggaran yang maksimal. Dalam konteks laporan akuntabilitas, hal ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi apakah terdapat kendala teknis di lapangan yang menyebabkan capaian fisik tidak setinggi penyerapan anggarannya. Terdapat kendala eksternal dalam pencapaian Indeks Ketahanan Pangan yang berada di luar kendali anggaran, seperti perubahan iklim atau fluktuasi harga pangan di tingkat produsen, sehingga meskipun anggaran telah diserap secara optimal untuk intervensi, hasil akhirnya belum sepenuhnya mencapai target fisik yang ditetapkan.

h) Penghargaan yang Diraih dalam Pencapaian Target Indeks Ketahanan Pangan

1. Juara 1 Festuval Minang Day Culinary Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, katergori: "Smart Food B2SA Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Untuk Ranah Minang Tagok Pangan"
2. Penghargaan dari Badan Pangan Nasional kepada OKKPD Kabupaten Padang Pariaman dengan Kategori: B (baik), yang telah melaksanakan sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar di daerah.

Gambar 3.111
Penghargaan yang diraih dalam Pencapaian Indeks Ketahanan Pangan





***Sumber** : DistanKP Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

SASASARAN STRATEGIS 13

Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pembangunan ekonomi yang maju dan inklusif bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dengan memperluas akses, kesempatan kerja, dan mengurangi ketimpangan. Fokus utamanya adalah memberdayakan kelompok rentan, mengembangkan UMKM, serta menyediakan lapangan kerja produktif untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan secara adil. Di sisi tenaga kerja, hal ini perlu dicapai dengan meningkatkan kesempatan dan produktifitas tenaga kerja di Kabupaten Padang Pariaman. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, ditetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang komprehensif, sebagai berikut: Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi dan Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal.
Berikut ini penjabaran capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja utama :

A. Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT menggambarkan persentase jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau sudah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja. Indikator ini penting untuk mengetahui sejauh mana pasar kerja mampu menyerap tenaga kerja yang tersedia.

Semakin rendah nilai Tingkat Pengangguran Terbuka, maka semakin baik kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah karena menunjukkan bahwa sebagian besar angkatan kerja telah terserap dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, berbagai program seperti pelatihan kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja terus diupayakan guna menekan angka pengangguran dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pengukuran Tingkat Pengangguran Terbuka dilakukan dengan membandingkan jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Berdasarkan Buku Padang Pariaman Dalam Angka 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 adalah 6,48.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2025

Tabel 3.228
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian (%)	Interpretasi
		Target	Realisasi		
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,17	6,48	94,98	Berhasil

Sumber *: Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2026*

Realisasi Indikator Kinerja Utama Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 yaitu 6,48% masih sedikit lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu 6,17%, sehingga capaian ini dinyatakan berhasil mencapai target dengan capaian sebesar 94,98%.

b) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2024 dan 2025

Tabel 3.229
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	TAHUN 2024			TAHUN 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	-	6,59	-	6,17	6,48	94,98	Berhasil

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2025 mengalami penurunan dari 6,59 persen di tahun 2024 menjadi 6,48 persen di tahun 2025. Berdasarkan data dari BPS Angka TPT ini lebih tinggi terjadi pada perempuan daripada laki-laki dengan perbandingan 6,65 persen banding 6,37 persen.

c) Perbandingan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.230
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Pengangguran Terbuka 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,17	5,89	5,76	5,59	5,42	6,48	-	-	-	-

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Padang Pariaman saat ini masih belum mencapai target jangka menengah baik tahun 2025 maupun akhir perencanaan jangka menengah pada tahun 2029. Hal ini perlunya dilaksanakan upaya intervensi lebih besar, sehingga angkatan kerja yang tersedia dapat terserap lebih besar dalam kegiatan ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman dan Tingkat Pengangguran Terbuka dapat diturunkan sesuai dengan target RPJMD.

d) Perbandingan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2025 dengan Realisasi Provinsi

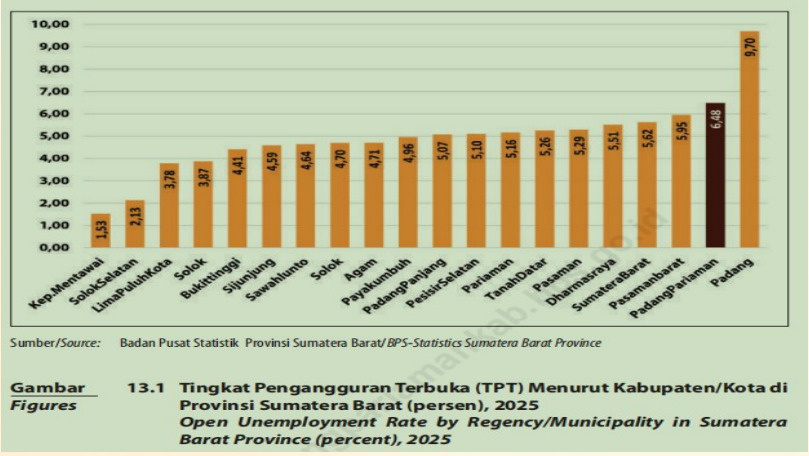
Tabel 3.231
Perbandingan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten dengan Provinsi

Indikator Kinerja	Realisasi Kabupaten	Realisasi Provinsi	Keterangan
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,48	5,62	Lebih Besar

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Barat, realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 lebih besar dari Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat. Hal ini memperlihatkan bahwa pengangguran terbuka di Kabupaten Padang Pariaman lebih banyak dari rata-rata Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Padang Pariaman berada di urutan ke 2 terbesar setelah Kota Padang. Dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.46
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat



Sumber/*Source:* Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat/*BPS-Statistics Sumatera Barat Province*

Gambar/*Figures* 13.1 **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (persen), 2025**
Open Unemployment Rate by Regency/Municipality in Sumatera Barat Province (percent), 2025

Sumber *: Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2026*

Berdasarkan grafik perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) antar Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat tahun 2025, terlihat variasi capaian yang cukup signifikan di seluruh wilayah. Kabupaten Padang Pariaman tercatat memiliki angka pengangguran sebesar 6,48%, yang menempatkan daerah ini pada posisi kedua tertinggi di Sumatera Barat setelah Kota Padang yang mencatatkan angka 9,70%. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Padang Pariaman masih berada di atas rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang berada pada angka 5,95%. Guna merespons kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Padang Pariaman yang berada pada angka 6,48%, diperlukan langkah-langkah strategis yang terfokus pada penguatan ekosistem ketenagakerjaan. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan program revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memastikan adanya peningkatan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar industri saat ini.

e) Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja dalam suatu wilayah. Pada tahun 2025, meskipun capaiannya dinyakan berhasil mencapai target, namun secara persentase realisasi masih sedikit lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di daerah masih menghadapi tantangan dalam penyerapan tenaga kerja secara optimal. Meskipun berbagai program peningkatan keterampilan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta fasilitasi penempatan tenaga kerja telah dilaksanakan, namun pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan menyebabkan angka pengangguran masih berada di atas target yang direncanakan.

Faktor Pendukung :

1. Adanya program pelatihan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja.
2. Dukungan program perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan kewirausahaan, penempatan tenaga kerja, serta fasilitasi informasi pasar kerja.

Faktor Penghambat :

1. Pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan.
2. Keterbatasan kesempatan kerja di sektor formal serta belum optimalnya kesesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Alternatif Solusi yang Dapat Dilaksanakan:

1. Meningkatkan program pelatihan berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri guna meningkatkan daya serap tenaga kerja.
2. Mendorong pengembangan kewirausahaan dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagai upaya menciptakan lapangan kerja baru serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

f) Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka

Adapun Program pendukung capaian indikator kinerja ini adalah Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan anggaran sebesar Rp 17,399,200 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.379.200 dengan realisasi 99,98%. Tingginya realisasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan.

Pemanfaatan anggaran pada program ini difokuskan pada pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, kompetensi, dan produktivitas tenaga kerja. Peningkatan kompetensi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja sehingga memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan atau membuka usaha secara mandiri.

Dengan demikian, pelaksanaan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja memberikan kontribusi dalam mendukung upaya pemerintah daerah dalam menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penciptaan tenaga kerja yang lebih kompeten dan siap kerja.

Optimalnya penyerapan anggaran juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi jumlah pengangguran.

Gambar 3.112
Dokumentasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka



Penerbitan AK I pencari Kerja



Pelatihan berbasis Kompetensi BLK



Penerbitan AK I pencari Kerja



Pelatihan Tambang Bawah Tanah





Pelatihan Tambang Bawah Tanah dengan UPT Pertembangan Sawah Lunto

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.232
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kesempatan Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	94,98%	99,98%	-5%

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya dalam mendukung sasaran strategis meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan capaian kinerja sebesar 94,98%, sementara penyerapan anggaran yang direalisasikan untuk mendukung program tersebut mencapai angka yang sangat optimal, yaitu sebesar 99,98%. Dari perbandingan antara capaian kinerja dengan penyerapan anggaran tersebut, diperoleh tingkat efisiensi sebesar -5%. Nilai efisiensi negatif ini menunjukkan bahwa penyerapan dana hampir terserap sepenuhnya guna mengejar target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program-program penekanan angka pengangguran di Kabupaten Padang Pariaman memerlukan dukungan sumber daya keuangan yang maksimal demi menjaga stabilitas pasar kerja dan memastikan program keberlanjutan perluasan kesempatan kerja dapat terlaksana sesuai rencana.

B. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja pembangunan ekonomi suatu daerah. Tingkat produktivitas tenaga kerja menggambarkan kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan output atau nilai tambah dalam kegiatan ekonomi. Semakin tinggi produktivitas tenaga kerja, maka semakin besar pula kontribusi tenaga kerja dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Produktivitas tenaga kerja tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja yang tersedia, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia, tingkat pendidikan, keterampilan, penggunaan teknologi, serta efisiensi dalam proses produksi. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas tenaga kerja menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan ketenagakerjaan guna menciptakan tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan mampu bersaing di pasar kerja.

Dalam konteks pembangunan daerah, Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja digunakan untuk melihat seberapa besar nilai output ekonomi yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja yang bekerja. Indikator ini juga dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan, pelatihan, serta pengembangan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Pengukuran tingkat produktivitas tenaga kerja dilakukan dengan membandingkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada suatu wilayah dalam periode tertentu, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Produktivitas Tenaga Kerja} = \frac{\text{PDRB ADHK}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}}$$

Dari rumus diatas dapat dihitung Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, sebagai berikut :

$$\text{Produktifitas Tenaga Kerja} = \frac{\mathbf{14.619.500.000.000}}{\mathbf{223.142}} = 65.516.576{,}89$$

Interpretasi:

- Produktivitas tinggi menunjukkan bahwa tenaga kerja mampu menghasilkan output ekonomi yang besar.
- Produktivitas rendah menunjukkan bahwa kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan output ekonomi masih perlu ditingkatkan.
- Peningkatan produktivitas tenaga kerja biasanya dipengaruhi oleh peningkatan keterampilan, penggunaan teknologi, efisiensi kerja, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Produktifitas Tenaga Kerja Tahun 2025

Berikut ini adalah target dan realisasi indikator kinerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025:

Tabel 3.233
Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian (%)	Interpretasi
		Target	Realisasi		
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta	71,78	65,52	91,28	Berhasil

Sumber : *Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi Dan UKM Kab. Padang Pariaman, 2026*

Realisasi Indikator Kinerja Utama Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 yaitu 65,52% dari target yang ditetapkan sebesar 71,78%, sehingga ini belum mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 91,28% dengan interpretasi " Berhasil".

b) Perbandingan Realisasi Capaian Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2024 dan 2025

Tabel 3.234
Perbandingan Realisasi Capaian Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2024			TAHUN 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta	-	67,08	-	71,78	65,52	91,28	Berhasil

Sumber : *Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi Dan UKM Kab. Padang Pariaman, 2026*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Indikator Kinerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada tahun 2024 sebesar 67,08 juta/orang sedangkan realisasi pada tahun 2025 menurun menjadi sebesar 65,52 juta/orang. Kondisi ini memperlihatkan produktifitas tenaga kerja di Kabupaten Padang Pariaman secara umum perlu ditingkatkan, baik peningkatan disisi kapasitas tenaga kerja maupun efisiensi kerja dan penggunaan teknologi dalam bekerja.

c) Perbandingan Realisasi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.235
Perbandingan Realisasi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Tahun 2025 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta	71,78	72,30	73,10	73,85	74,60	65,52	-	-	-	-

Sumber : *Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi Dan UKM Kab. Padang Pariaman, 2026*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman selama periode Tahun 2025 menunjukkan kondisi yang masih belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Pada Tahun 2025, realisasi produktivitas tenaga kerja tercatat sebesar 65,52 Juta, masih berada di bawah target RPJMD sebesar 71,78 Juta diawal tahun RPJMD dan 75,28 Juta target pada akhir tahun RPJMD.

Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Padang Pariaman masih perlu ditingkatkan melalui berbagai upaya seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan keterampilan tenaga kerja, serta peningkatan kesempatan kerja di berbagai sektor ekonomi guna mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja di daerah.

d) Perbandingan Realisasi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2025 dengan Realisasi Provinsi

Setelah dilakukan perhitungan dengan rumus sebagaimana di atas, didapat realisasi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025 berada pada angka 68,29%. Berikut ini adalah perbandingan realisasi IKU Kabupaten dan Provinsi terkait Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.236
Perbandingan Realisasi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Kabupaten dengan Provinsi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun 2025		Keterangan
	Realisasi Kabupaten	Realisasi Provinsi	
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	65,52	68,29	Dibawah Provinsi

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2025 adalah 65,52 Juta dimana angka ini berada dibawah capaian Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat yaitu 68,29 Juta. Hal ini memperlihatkan bahwa tenaga kerja di Kabupaten Padang Pariaman memiliki produktifitas dibawah rata-rata tenaga kerja Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat. Dengan demikian perlunya peningkatan produktifitas tenaga kerja melalui berbagai upaya baik pada sisi kapasitas tenaga kerjanya maupun pada penggunaan teknologi dan sistem bekerjanya.

e) Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Realisasi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada tahun berjalan ditargetkan sebesar 71,78 Juta, namun realisasi yang dicapai sebesar 65,52 Juta. Capaian ini menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja relatif cukup baik, namun masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target secara optimal.

Faktor Pendukung

1. Pelaksanaan program pelatihan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui pelatihan berbasis kompetensi sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan tenaga kerja.
2. Pertumbuhan sektor ekonomi daerah, seperti sektor perdagangan, jasa dan usaha mikro kecil menengah yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Faktor Penghambat

1. Masih terbatasnya kualitas dan keterampilan tenaga kerja, dimana sebagian tenaga kerja masih didominasi oleh lulusan pendidikan menengah ke bawah sehingga produktivitas kerja belum optimal.
2. Masih tingginya tenaga kerja di sektor informal, yang umumnya memiliki tingkat produktivitas lebih rendah dibandingkan sektor formal karena keterbatasan teknologi, modal dan akses pasar.

Alternatif Solusi yang Diharapkan

1. Meningkatkan pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi dan kewirausahaan, sehingga tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
2. Mendorong pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta sektor produktif lainnya, melalui pendampingan, akses permodalan dan peningkatan teknologi agar dapat meningkatkan nilai tambah dan produktivitas tenaga kerja.

f) Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Realisasi Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja

Adapun Program pendukung capaian indikator kinerja ini adalah Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan anggaran sebesar Rp 17,399,200 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.379.200 dengan realisasi 99,98%. Tingginya tingkat realisasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan dengan sangat baik dan optimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Program yang mendukung capaian indikator kinerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja salah satunya adalah Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, serta daya saing tenaga kerja agar mampu bekerja secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Melalui pelaksanaan pelatihan kerja, diharapkan tenaga kerja memiliki kemampuan teknis dan non-teknis yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas dalam bekerja.

Pelaksanaan program pelatihan ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja di daerah, sehingga diharapkan dapat mendorong

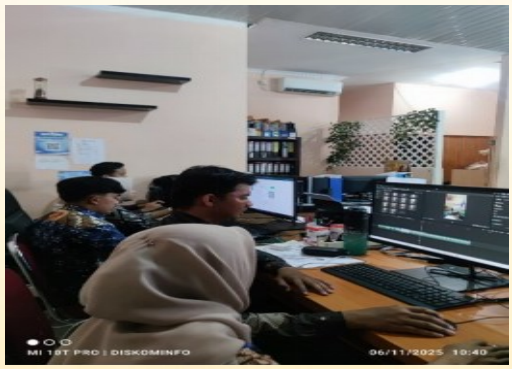
peningkatan produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan. Dengan meningkatnya keterampilan dan kemampuan tenaga kerja, maka peluang kerja juga semakin terbuka, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja indikator Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di daerah.

Gambar 3.113
Dokumentasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

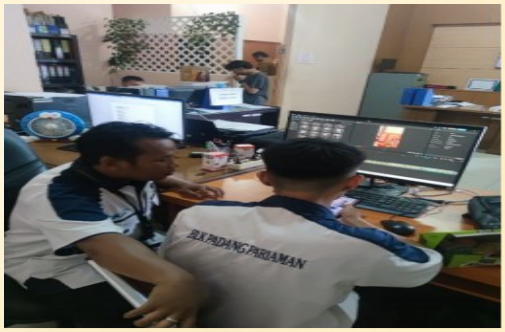



Pelatihan Konten Visual Untuk Media Sosial





Magang di Diskominfo




Pelatihan Konten Visual Untuk Media Sosial

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.237
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Kinerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kesempatan Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	91,28%	99,98%	-8,7%

Nilai efisiensi negatif ini mengindikasikan bahwa penyerapan sumber daya keuangan yang tinggi diperlukan untuk merealisasikan target produktivitas tenaga kerja yang telah direncanakan. Hal ini mencerminkan komitmen instansi dalam mengoptimalkan seluruh alokasi dana guna memastikan program-program peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga kerja di Kabupaten Padang Pariaman tetap berjalan efektif, meskipun secara proporsional serapan anggaran sedikit melampaui persentase capaian kinerjanya.

C. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Pembangunan ketenagakerjaan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja, tetapi juga untuk memastikan adanya partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam kegiatan ekonomi. Perempuan merupakan salah satu potensi sumber daya manusia yang memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, peningkatan keterlibatan perempuan dalam pasar kerja menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan. Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat keterlibatan tersebut adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan menggambarkan persentase perempuan usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan, terhadap total penduduk perempuan usia kerja. Indikator ini penting untuk mengetahui sejauh mana perempuan berkontribusi dalam aktivitas ekonomi serta menggambarkan akses dan kesempatan kerja yang tersedia bagi perempuan di suatu wilayah.

Pengukuran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan dilakukan dengan membandingkan jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk perempuan usia kerja (15 tahun ke atas). Adapun rumus pengukurannya adalah sebagai berikut:

$$\text{TPAKp} = \frac{\text{PAKp}}{\text{P(15+)}}\ x\ 100\%$$

Keterangan:

- PAKp = Angkatan Kerja Perempuan adalah perempuan usia 15 tahun ke atas yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan.
- P(15+) = Penduduk Perempuan Usia Kerja adalah seluruh perempuan yang berusia 15 tahun ke atas, baik yang bekerja, mencari kerja, maupun yang tidak termasuk dalam angkatan kerja.

Berdasarkan Buku Padang Pariaman Dalam Angka 2026, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Padang Pariaman adalah 53,44, artinya hampir separo perempuan di Kabupaten Padang Pariaman bukan angkatan kerja.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2025

Tabel 3.238
Perbandingan Target dan Realisasi
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian (%)	Interpretasi
		Target	Realisasi		
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	57,53 - 58,91	53,44	92,87	Berhasil

Sumber : *Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi Dan UKM Kab. Padang Pariaman, 2026*

Realisasi Indikator Kinerja Utama Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 yaitu 53,44 % dari target yang ditetapkan sebesar antara 57,53% - 58,91%, sehingga capaian ini belum sesuai target dengan capaian kinerja sebesar 92,87% dengan interpretasi " Berhasil".

b) Perbandingan Realisasi Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2024 dan 2025

Tabel 3.239
Perbandingan Realisasi Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	57,53 - 58,91	57,53	-	57,5- 58,91	53,44	92,87	Berhasil

Sumber : *Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi Dan UKM Kab. Padang Pariaman, 2026*

Dari tabel diatas, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yang sebesar 57,53%, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 sebesar 53,4% mengalami penurunan sebesar 4,09%.

c) Perbandingan Realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.240
Perbandingan Realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2025 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	57,53 - 58,91	57,84 - 59,45	58,14 - 59,99	58,45 - 60,53	58,75 - 61,07	53,44	-	-	-	-

Sumber : *Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi Dan UKM Kab. Padang Pariaman, 2026*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2025 masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam perencanaan jangka menengah, baik tahun 2025 emaupun sampai akhir perencanaan RPJMD.

d) Perbandingan Realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2025 dengan Realisasi Provinsi

Tabel 3.241
Perbandingan Realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten dengan Provinsi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi Kabupaten	Realisasi Provinsi	Keterangan
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	53,44%	59,40%	Dibawah Provinsi

Berdasarkan tabel diatas, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 sebesar 53,44% berada dibawah realisasi propinsi yang berada pada 59,40%. Hal ini memperlihatkan bahwa persentase perempuan yang bekerja di Kabupaten Padang Pariaman lebih sedikit dari rata-rata Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Barat.

e) Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Pencapaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan di Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang cukup penting dalam kegiatan ekonomi daerah. Tingkat partisipasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat keterlibatan perempuan dalam pasar kerja. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap faktor pendukung dan penghambat serta alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia kerja.

Faktor Pendukung :

1. Meningkatnya kesempatan kerja di berbagai sektor usaha Perkembangan sektor perdagangan, jasa, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Padang Pariaman memberikan peluang yang cukup besar bagi perempuan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pelaku usaha.
2. Adanya program pelatihan dan pemberdayaan tenaga kerja Program pelatihan kerja, peningkatan keterampilan, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun instansi terkait turut mendorong peningkatan kompetensi perempuan sehingga lebih siap memasuki dunia kerja.

Faktor Penghambat :

1. Masih adanya keterbatasan keterampilan dan tingkat pendidikan sebagian perempuan
   Sebagian perempuan usia kerja masih memiliki keterampilan yang terbatas sehingga sulit bersaing dalam memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
2. Faktor sosial dan peran domestik dalam rumah tangga
   Peran perempuan dalam mengurus rumah tangga dan keluarga masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi, sehingga tidak semua perempuan usia kerja dapat berpartisipasi secara aktif di pasar kerja.

Alternatif Solusi yang Diharapkan :

1. Meningkatkan program pelatihan kerja dan kewirausahaan bagi perempuan
   Pemerintah daerah diharapkan dapat terus memperluas program pelatihan keterampilan, kewirausahaan, serta pengembangan usaha bagi perempuan agar mereka memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memasuki dunia kerja atau membuka usaha mandiri.
2. Mendorong penciptaan lapangan kerja yang ramah perempuan
   Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan sektor UMKM, industri rumah tangga, serta kegiatan ekonomi produktif yang memungkinkan perempuan untuk tetap berperan dalam kegiatan ekonomi tanpa mengabaikan peran dalam keluarga.

Dengan adanya dukungan kebijakan dan program yang tepat, diharapkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Padang Pariaman dapat terus meningkat pada masa yang akan datang sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

f) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Adapun Program pendukung capaian indikator kinerja ini adalah Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan anggaran sebesar Rp 17,399,200 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.379.200 dengan realisasi 99,98%.

Program yang mendukung capaian indikator kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan salah satunya adalah Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, serta daya saing tenaga kerja agar mampu bekerja secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Melalui pelaksanaan pelatihan kerja, diharapkan tenaga kerja memiliki kemampuan teknis dan non-teknis yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas dalam bekerja.

Selain fokus pada peningkatan kompetensi teknis, program ini juga diarahkan untuk memperluas jejaring kerja dan akses informasi pasar kerja bagi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Padang Pariaman. Melalui sinergi antara pelatihan yang berbasis kompetensi dan pendampingan pasca-pelatihan, diharapkan para peserta tidak

hanya memiliki kemandirian secara ekonomi, tetapi juga mampu beradaptasi dengan dinamika kebutuhan industri modern.

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.242
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kesempatan Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	92,87%	99,98%	-7,11%

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel mengenai Efisiensi Penggunaan Sumber Daya diatas diketahui bahwa untuk indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan tahun 2025, terlihat adanya komitmen kuat dalam mendorong tenaga kerja di Kabupaten Padang Pariaman. Capaian kinerja untuk indikator ini berhasil menyentuh angka 92,87%, yang didukung oleh realisasi penyerapan anggaran yang sangat optimal sebesar 99,98%. Dari perbandingan kedua variabel tersebut, diperoleh nilai tingkat efisiensi sebesar -7,11%.

Nilai efisiensi negatif ini mengindikasikan bahwa untuk mencapai target partisipasi perempuan yang tinggi, diperlukan pemanfaatan sumber daya anggaran secara maksimal guna mendanai berbagai program intervensi, seperti pelatihan kompetensi dan perluasan akses kerja bagi kelompok perempuan.

D. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja Di Bidang Keahlian Menengah Tinggi

Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kesesuaian antara tingkat pendidikan tenaga kerja dengan jenis pekerjaan yang dijalani. Indikator ini menggambarkan sejauh mana tenaga kerja yang memiliki kualifikasi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dapat terserap pada lapangan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan serta kompetensi sesuai dengan tingkat pendidikannya. Semakin tinggi persentase indikator ini, maka semakin baik pula tingkat pemanfaatan sumber daya manusia yang terdidik dalam dunia kerja.

Selain itu, indikator ini juga menjadi ukuran efektivitas sistem pendidikan dan pelatihan dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Apabila lulusan pendidikan menengah dan tinggi banyak bekerja pada pekerjaan yang membutuhkan keahlian menengah hingga tinggi, maka hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan serta keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri telah berjalan dengan baik. Sebaliknya, rendahnya persentase indikator ini dapat mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.

Dengan demikian, pengukuran persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi sangat penting sebagai dasar

dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan, pendidikan, serta pengembangan sumber daya manusia guna meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja.

Pengukuran Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi dihitung dengan menggunakan rumus. Adapun rumus pengukurannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi} = \frac{\text{Jumlah Pekerja dengan Bidang Kerja Susuai Latar Belakang Pendidikan}}{\text{Total Pekerja Lulusan Menengah Tinggi}} x\ 100\%$$

Keterangan:

- Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi meliputi lulusan SMA/SMK/MA/sederajat serta Diploma dan Perguruan Tinggi.
- Pekerjaan keahlian menengah dan tinggi adalah pekerjaan yang memerlukan keterampilan teknis, profesional, atau manajerial yang umumnya diklasifikasikan dalam kelompok jabatan profesional, teknisi, tenaga ahli, dan manajerial.

Berdasarkan Padang Pariaman Dalam Angka 2026, jumlah pekerja dengan bidang kerja sesuai latar belakang pendidikan menengah tinggi berjumlah 57.383 orang, sedangkan total pekerja lulusan menengah tinggi berjumlah 105.149 orang. Sehingga dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{57.383}{105.149}\ x\ 100\% = 54{,}57\%$$

a) Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi Tahun 2025

Tabel 3.243
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian (%)	Interpretasi
		Target	Realisasi		
Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	%	71,20	54,57	76,64	Berhasil

Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi bekerja di bidang keahlian menengah tinggi Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 yaitu 54,57% dari target yang ditetapkan sebesar 71,20%, sehingga capaian ini belum mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 76,64% dengan interpretasi masih termasuk Berhasil.

b) Perbandingan Realisasi Capaian Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi Tahun 2024 dan 2025

Dikarenakan indikator ini adalah indikator kinerja utama yang baru digunakan tahun 2025, maka tidak diketahui data realisasi dan capaian pada tahun 2024, sehingga tidak dapat dianalisisi perbandingannya.

c) Perbandingan Realisasi Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja Di Bidang Keahlian Menengah Tinggi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.244
Perbandingan Realisasi Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi Tahun 2025 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	%	71,20	71,65	72,16	72,63	73,11	54,57	-	-	-	-

Sumber : *Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi Dan UKM Kab. Padang Pariaman, 2026*

Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tingkat pendidikan tenaga kerja dengan jenis pekerjaan yang dijalani. Indikator ini juga menunjukkan sejauh mana tenaga kerja terdidik dapat terserap pada lapangan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan menengah hingga tinggi sehingga mencerminkan kualitas pemanfaatan sumber daya manusia di suatu daerah.

Berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman, persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 71,20 persen. Target tersebut direncanakan mengalami peningkatan secara bertahap hingga mencapai 73,11 persen pada tahun 2029. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyerapan tenaga kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan kompetensinya.

Namun demikian, berdasarkan data BPS Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2025, realisasi indikator pada tahun 2025 tercatat sebesar 54,57 persen. Capaian ini masih berada di bawah target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat tenaga kerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja pada pekerjaan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan bidang keahlian atau tingkat keterampilannya.

Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan kesesuaian antara pendidikan dan pekerjaan, antara lain melalui peningkatan kualitas pelatihan kerja, penguatan keterkaitan antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri, serta perluasan kesempatan kerja yang sesuai dengan kompetensi tenaga kerja terdidik. Dengan demikian diharapkan pada tahun-tahun mendatang capaian indikator ini dapat meningkat dan mendekati target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

d) Perbandingan Realisasi Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja Di Bidang Keahlian Menengah Tinggi Tahun 2025 dengan Realisasi Provinsi

Tabel 3.245
Perbandingan Realisasi Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja Di Bidang Keahlian Menengah Tinggi dengan Realisasi Provinsi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi Kabupaten	Realisasi Provinsi	Keterangan
Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	54,57	59,17	Dibawah Provinsi

Tabel diatas menunjukkan perbandingan realisasi kinerja indikator persentase pekerja lulusan pendidikan menengah–tinggi yang bekerja pada bidang keahlian menengah–tinggi antara Kabupaten Padang Pariaman dan Tingkat Provinsi Pada tahun 2025, realisasi Kabupaten Padang Pariaman tercatat sebesar 54,57 persen. Capaian ini masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian antara latar belakang pendidikan dengan bidang pekerjaan yang dijalani oleh tenaga kerja di Kabupaten Padang Pariaman masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan keterkaitan antara dunia pendidikan, pelatihan kerja, serta kebutuhan dunia usaha dan dunia industri agar lulusan pendidikan menengah dan tinggi dapat lebih terserap pada pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.

e) Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Realisasi Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja Di Bidang Keahlian Menengah Tinggi

Pencapaian indikator pekerja lulusan pendidikan menengah–tinggi yang bekerja pada bidang keahlian menengah–tinggi dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain tersedianya lembaga pendidikan menengah dan perguruan tinggi yang menghasilkan tenaga kerja terdidik, adanya program pelatihan kerja dari pemerintah, serta meningkatnya sektor jasa, perdagangan, dan usaha kecil yang mampu menyerap tenaga kerja berpendidikan. Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan kompetensi tenaga kerja dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan berbasis kompetensi turut menjadi faktor yang mendorong peningkatan kesesuaian antara pendidikan dan pekerjaan.

Faktor Pendukung :

a. Tersedianya lembaga pendidikan menengah dan perguruan tinggi yang menghasilkan tenaga kerja terdidik.
b. Adanya program pelatihan kerja dan peningkatan kompetensi dari pemerintah.
c. Pertumbuhan sektor jasa, perdagangan, dan UMKM yang menyerap tenaga kerja terdidik.
d. Dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas SDM.
e. Adanya program sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja.

Faktor Penghambat :

a. Terbatasnya lapangan kerja yang sesuai dengan bidang keahlian lulusan.
b. Masih rendahnya keterkaitan (link and match) antara pendidikan dan kebutuhan dunia usaha/dunia industri.
c. Kurangnya informasi pasar kerja bagi pencari kerja.
d. Sebagian lulusan bekerja pada sektor informal yang tidak sesuai dengan bidang keahlian.
e. Keterampilan teknis dan pengalaman kerja lulusan masih terbatas.

Alternatif Solusi yang Diharapkan

a. Meningkatkan kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia usaha/dunia industri.
b. Mengembangkan pelatihan kerja berbasis kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja.
c. Memperluas layanan informasi pasar kerja dan bursa kerja.
d. Mendorong program magang atau praktik kerja bagi lulusan pendidikan menengah–tinggi.
e. Mendukung pengembangan kewirausahaan dan UMKM untuk membuka peluang kerja baru.

f) Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Realisasi Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi bekerja di bidang keahlian menengah tinggi

Adapun Program pendukung capaian indikator kinerja ini adalah Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan anggaran sebesar Rp 17,399,200 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.379.200 dengan realisasi 99,98%.

Program yang mendukung pencapaian indikator Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah–Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah–Tinggi salah satunya adalah Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja. Pada tahun anggaran berjalan, program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp17.399.200 dengan realisasi anggaran sebesar Rp17.379.200 atau 99,98 persen dari total anggaran yang tersedia. Tingginya tingkat realisasi anggaran menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan secara optimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Melalui program ini dilaksanakan berbagai kegiatan peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi lulusan pendidikan menengah dan tinggi agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan adanya pelatihan berbasis kompetensi tersebut, diharapkan para lulusan dapat memiliki kemampuan teknis yang lebih baik sehingga mampu terserap di dunia kerja pada bidang yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Program ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengurangi kesenjangan antara kompetensi lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja di daerah.

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.246
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Kinerja Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja Di Bidang Keahlian Menengah Tinggi Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kesempatan Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja Di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	76,64%	99,98%	-23,34%

Dari data diatas, tercatat capaian kinerja berada pada angka 76,64%, yang direalisasikan melalui penyerapan anggaran yang sangat optimal hingga mencapai 99,98%. Interaksi antara kedua variabel ini menghasilkan nilai tingkat efisiensi sebesar -23,34%.

Angka efisiensi negatif ini mencerminkan dinamika yang menantang dalam upaya penyelarasan antara kualifikasi pendidikan dengan kebutuhan spesifik pasar kerja di Kabupaten Padang Pariaman. Meskipun serapan anggaran dilakukan secara maksimal guna mendanai program-program strategis seperti bursa kerja khusus dan sertifikasi keahlian, besarnya nilai efisiensi tersebut mengindikasikan bahwa akselerasi penyerapan tenaga kerja terampil memerlukan investasi sumber daya yang besar untuk mengatasi hambatan struktural di lapangan. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat sinergi dengan sektor industri, sehingga setiap rupiah yang dialokasikan mampu memberikan dampak yang lebih progresif terhadap penyerapan tenaga kerja ahli di masa mendatang.

E. Persentase Disabilitas Bekerja Di Sektor Formal

Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal di Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat keterlibatan dan kesempatan kerja yang setara bagi penyandang disabilitas dalam dunia kerja. Indikator ini menggambarkan sejauh mana penyandang disabilitas dapat mengakses pekerjaan di sektor formal yang umumnya memiliki kepastian kerja, perlindungan hukum, serta jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan adanya kesempatan tersebut, diharapkan penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Peningkatan persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal juga mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Melalui berbagai program dan kebijakan ketenagakerjaan, pemerintah daerah terus mendorong terciptanya lingkungan kerja yang ramah disabilitas serta memperluas peluang kerja bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam dunia kerja dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Pengukuran Persentase disabilitas bekerja di sektor formal dihitung dengan menggunakan rumus. Adapun rumus pengukurannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal} = \frac{\text{Jumlah Disabilitas Bekerja di Sektor Formal}}{\text{Jumlah Disabilitas}} \; x\; 100\% = 2{,}11\ \%$$

Sehingga dapat dihitung sebagai berikut :

Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal $= \frac{7}{28}\; x\; 100\% = 25\ \%$

Keterangan:

- Jumlah penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah jumlah penyandang disabilitas yang bekerja pada pekerjaan formal, seperti pegawai pemerintah, pegawai swasta, atau pekerjaan lain yang memiliki hubungan kerja yang jelas serta mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan.
- Jumlah total penyandang disabilitas yang bekerja adalah seluruh penyandang disabilitas yang memiliki pekerjaan, baik di sektor formal maupun di sektor informal.
- 100% merupakan nilai pengali untuk mengubah hasil perhitungan menjadi bentuk persentase sehingga dapat menunjukkan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal dibandingkan dengan seluruh penyandang disabilitas yang bekerja.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal Tahun 2025

Tabel 3.247
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian (%)	Keterangan
		Target	Realisasi		
Persentase Disabilitas Bekerja Di Sektor Formal	%	26,39	25	94,73	Berhasil

Sumber : *Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman , 2026*

Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase disabilitas bekerja di sektor formal Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 yaitu 25% dari target yang ditetapkan sebesar 26,39%, sehingga capaian ini melebihi target dengan capaian kinerja sebesar 94,73% dengan interpretasi “Berhasil”.

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal Tahun 2024 dan 2025

Dikarenakan indikator ini adalah indikator kinerja utama yang baru digunakan tahun 2025, maka tidak diketahui data realisasi dan capaian pada tahun 2024, sehingga tidak dapat dianalisisi perbandingannya.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.248
Perbandingan Realisasi Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal Tahun 2025 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	26,37	27,45	28,50	29,56	30,61	25	-	-	-	-

Dari tabel di atas, realisasi Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal di Tahun 2025 masih belum mencapai target tahun-tahun perencanaan jangka menengah. Perlu Upaya lebih untuk dapat mencapai target dimaksud.

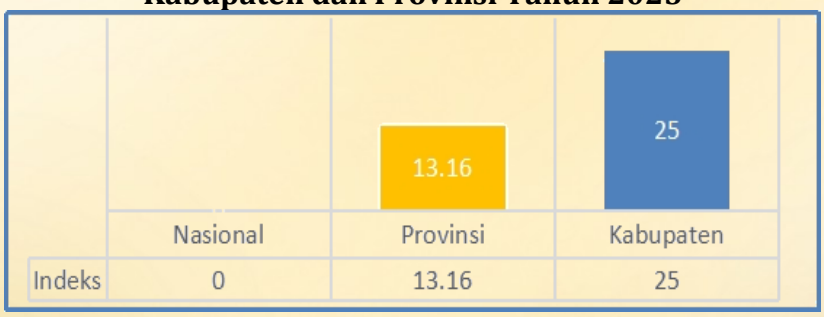
Selanjutnya, dalam RPJMD telah ditetapkan target peningkatan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya, yaitu 27,45 persen pada tahun 2026, 28,50 persen pada tahun 2027, 29,56 persen pada tahun 2028, dan 30,56 persen pada tahun 2029. Target tersebut menggambarkan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di sektor formal setiap tahunnya.

Dengan adanya target yang meningkat secara bertahap tersebut, diharapkan berbagai program dan kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif dapat terus diperkuat. Upaya ini penting agar partisipasi penyandang disabilitas dalam dunia kerja formal dapat meningkat sehingga kesetaraan kesempatan kerja bagi seluruh masyarakat dapat terwujud secara lebih optimal.

d) Perbandingan Realisasi Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal Tahun 2025 dengan Realisasi Provinsi

Berikut ini adalah perbandingan realisasi IKU Persentase disabilitas bekerja di sektor formal tahun 2025 Kabupaten dengan Provinsi sebagai berikut :

Grafik 3.47
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal Kabupaten dan Provinsi Tahun 2025



Grafik di atas menunjukkan perbandingan realisasi kinerja indikator persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal antara Kabupaten Padang Pariaman dan Tingkat Provinsi Pada tahun 2025. Realisasi Kabupaten Padang Pariaman tercatat sebesar 25 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada tingkat Provinsi Sumatera Barat sebesar 13,16 persen.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa akses kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Padang Pariaman relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata provinsi. Kondisi ini mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah dalam mendorong terciptanya kesempatan kerja yang lebih inklusif melalui berbagai program peningkatan keterampilan tenaga kerja, fasilitasi penempatan kerja, serta sosialisasi kepada dunia usaha mengenai pentingnya memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

Dengan demikian, capaian indikator ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas di Kabupaten Padang Pariaman telah mulai memperoleh akses yang lebih luas untuk bekerja pada sektor formal. Ke depan, melalui penguatan program pelatihan kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja disabilitas, serta perluasan kerja sama dengan dunia usaha dan industri, diharapkan jumlah penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal dapat terus meningkat sehingga mampu meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan penyandang disabilitas di daerah.

e) Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Realisasi Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Pencapaian indikator persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain adanya kebijakan pemerintah yang mendorong kesempatan kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas, tersedianya program pelatihan kerja dan peningkatan keterampilan yang ditujukan bagi penyandang disabilitas, serta adanya dukungan dari perusahaan atau dunia usaha yang mulai memberikan kesempatan kerja yang setara. Selain itu, keberadaan Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang ketenagakerjaan serta program fasilitasi penempatan tenaga kerja disabilitas juga menjadi faktor penting dalam memperluas akses penyandang disabilitas untuk bekerja pada sektor formal. Dukungan pemerintah daerah melalui kegiatan pembinaan, pendampingan, dan sosialisasi kepada dunia usaha mengenai pentingnya penerapan kesempatan kerja yang setara turut mendorong peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam dunia kerja formal.

Faktor Pendukung

a. Kebijakan Pemerintah yang mendukung adanya regulasi dan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang mendukung pengembangan ketenagakerjaan, UMKM, koperasi, dan sektor perdagangan.
b. Program dan Kegiatan yang Relevan
   Pelaksanaan program seperti pelatihan tenaga kerja, fasilitasi sertifikasi kompetensi, pemberdayaan UMKM, serta pembinaan koperasi yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan indikator kinerja.
c. Koordinasi Antar Perangkat Daerah dan Stakeholder
   Kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pelatihan kerja, serta organisasi masyarakat dalam mendukung pencapaian target kinerja.
d. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha
   Tingginya minat masyarakat mengikuti pelatihan, program pemberdayaan UMKM, maupun kegiatan peningkatan keterampilan kerja.
e. Dukungan Anggaran dan Sarana Prasarana
   Tersedianya dukungan anggaran serta fasilitas pendukung kegiatan seperti balai latihan kerja, sarana pelatihan, dan sistem informasi.

Faktor Penghambat

a. Alokasi anggaran yang terbatas menyebabkan tidak semua program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.
b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
   Jumlah dan kompetensi SDM pelaksana program masih perlu ditingkatkan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan.
c. Rendahnya Akses Informasi dan Teknologi
   Sebagian pelaku UMKM maupun tenaga kerja masih memiliki keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi dan informasi.
d. Kondisi Ekonomi dan Pasar yang Berfluktuasi
   Perubahan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi perkembangan usaha, kesempatan kerja, serta daya beli masyarakat.
e. Rendahnya Kesadaran Sertifikasi dan Legalitas Usaha
   Masih banyak pelaku usaha dan tenaga kerja yang belum memiliki sertifikasi kompetensi maupun legalitas usaha.

Alternatif Solusi yang Diharapkan

a. Optimalisasi Perencanaan dan Penganggaran Program
   Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dengan memprioritaskan program yang memiliki dampak langsung terhadap indikator kinerja.
b. Peningkatan Kapasitas SDM
   Melaksanakan pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi aparatur maupun masyarakat guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program.
c. Penguatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha dan Lembaga Terkait
   Meningkatkan kolaborasi dengan sektor swasta, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan untuk memperluas kesempatan kerja dan pengembangan usaha.
d. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Digitalisasi
   Mendorong pelaku usaha dan tenaga kerja memanfaatkan platform digital untuk pemasaran produk, akses informasi, serta peningkatan produktivitas.
e. Peningkatan Sosialisasi dan Pendampingan
   Melakukan sosialisasi secara intensif mengenai program pemerintah, sertifikasi kompetensi, serta legalitas usaha bagi masyarakat dan pelaku UMKM.

f) Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Realisasi Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Adapun Program pendukung capaian indikator kinerja ini adalah Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan anggaran sebesar Rp 17,399,200 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.379.200 dengan realisasi 99,98%.

Capaian indikator kinerja utama Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal didukung oleh pelaksanaan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, serta produktivitas tenaga kerja, termasuk bagi penyandang disabilitas, agar memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Melalui pelaksanaan program ini diharapkan penyandang disabilitas dapat memperoleh keterampilan kerja yang memadai sehingga mampu bersaing dan mendapatkan kesempatan bekerja pada sektor formal.

Pada tahun berjalan, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dialokasikan anggaran sebesar Rp17.399.200, dengan realisasi anggaran sebesar Rp17.379.200 atau 99,98% dari total anggaran yang tersedia. Tingginya tingkat realisasi anggaran menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan dengan baik dan optimal dalam mendukung peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja, termasuk penyandang disabilitas. Dengan adanya peningkatan kompetensi melalui pelatihan kerja, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja sehingga peluang mereka untuk bekerja di sektor formal dapat terus meningkat.

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.249
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Kinerja Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kesempatan Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	94,73%	99,98%	-5,25

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Indikator Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal ini mencatatkan capaian kinerja yang cukup baik sebesar 94,73%, yang diimbangi dengan realisasi penyerapan anggaran yang sangat maksimal mencapai 99,98%. Sinergi antara serapan dana dan capaian fisik tersebut menghasilkan angka tingkat efisiensi sebesar -5,25%.

Nilai efisiensi tersebut menunjukkan bahwa investasi anggaran telah dikelola secara optimal guna meruntuhkan hambatan aksesibilitas di sektor formal bagi penyandang disabilitas. Keberhasilan dalam mendekati target kinerja ini menegaskan komitmen daerah dalam menciptakan pasar kerja yang adil dan bermartabat, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi secara profesional tanpa diskriminasi.

SASASARAN STRATEGIS 14

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa

Meningkatkan perekonomian yang inklusif bukan hanya tentang angka pertumbuhan, melainkan memastikan setiap individu memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk sejahtera. Masyarakat yang selama ini hanya sebagai objek pembangunan harus mendapat kesempatan bertransformasi menjadi subjek pembangunan melalui pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan perekonomian dengan mengubah warga dari tidak berdaya menjadi mandiri, produktif, dan mampu mengelola potensi lokal untuk memacu pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi kemiskinan, serta menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa merupakan salah satu kunci peningkatan perekonomian yang maju, mandiri dan inklusif.

Keberhasilan dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa, dapat diukur dengan indicator kinerja Indeks Desa.

Indeks Desa sebelumnya dikenal sebagai Indeks Desa Mandiri (IDM). Perubahan nomenklatur ini mengacu pada Permendesa Nomor 9 Tahun 2024, yang memperbarui konsep pengukuran kemandirian desa/nagari. Indeks Desa merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa berdasarkan enam dimensi utama, yaitu:

1) Layanan Dasar
2) Sosial
3) Ekonomi
4) Lingkungan
5) Aksesibilitas
6) Tata Kelola Pemerintahan

Indeks Desa (ID) disusun dengan landasan bahwa peningkatan kemandirian desa yang berkelanjutan merupakan proses akumulasi dari dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas dan dimensi tata kelola pemerintahan Desa. Keenam Dimensi menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan yang mengedepankan pembangunan manusia didasarkan pada ruang dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas dan dimensi tata kelola pemerintahan Desa. Dalam penyusunan Indek Desa, 6 dimensi dibentuk oleh sejumlah 13 Sub Dimensi dan 48 indikator. Data pembentuk Indeks Desa bersumber dari survei lapangan yang dilakukan oleh enumerator desa, pendamping desa, dan BPD, kemudian diverifikasi secara nasional untuk memastikan validitas datanya.

Selanjutnya mengacu pada Permendesa Nomor 9 Tahun 2024 tersebut, formulasi perhitungan Indeks Desa adalah sebagai berikut :

$$Indeks\ Desa = \frac{\text{Total Skor Kab}}{Nilai\ Maksimum\ Skor\ Indeks\ Desa}\ x\ 100\%$$

Selanjutnya hasil perhitungan tersebut dapat diklasifikasikan untuk mengetahui status Desa/Nagari dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.250
Klasifikasi Status Desa/Nagari

Klasifikasi Status	Definisi Operasional	Nilai Indeks
Mandiri	Merupakan Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik	79,63% ≤ ID ≤ 100%
Maju	Merupakan Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah baik	69,35% ≤ ID ≤ 79,62%
Berkembang	Merupakan Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah cukup baik	57,39% ≤ ID ≤ 69,34%
Tertinggal	Merupakan Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih terbatas	49,49% ≤ ID ≤ 57,38%
Sangat Tertinggal	Merupakan Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih sangat terbatas	0% ≤ ID ≤ 49,48%

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Desa melalui sistem berbasis web dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan telah ditetapkan dengan Keputusan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Republik Indonesia Nomor 343 Tahun 2025 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Tahun 2025, data status nagari di Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

Tabel 3.251
Data Status Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

No	Status Nagari	Jumlah
1	Mandiri	28 Nagari
2	Maju	46 Nagari
3	Berkembang	29 Nagari
4	Tertinggal	0
5	Sangat tertinggal	0
Total		**103 Nagari**

Dari 103 Nagari di Kabupaten Padang Pariaman, terdapat 28 nagari berstatus Mandiri, 46 nagari berstatus Maju, dan 29 nagari berstatus Berkembang. Data ini menggambarkan bahwa sebagian besar nagari telah mencapai tingkat kemandirian dan kemajuan yang signifikan, serta menjadi indikator positif terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan nagari dan pembangunan berbasis Masyarakat.

Selanjutnya dapat dihitung Indeks Desa Kabupaten Padang Pariaman dari rata-rata Indeks Desa/Nagari se Kabupaten Padang Pariaman dengan hasil sebagai berikut :

$$Indeks\ Desa\ Kabupaten = \frac{\text{Total Indeks Desa/Nagari}}{Jumlah\ Desa/Nagari}$$

$$Indeks\ Desa\ Kabupaten\ \frac{7545{,}36\ \%}{103} = 73{,}26\%$$

a) Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Desa (ID) Tahun 2025

Tabel 3.252
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Desa Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian (%)	Interpretasi
		Target	Realisasi		
Indeks Desa	%	70,00	73,26	104,66	Sangat Berhasil

Sumber : *DPMD Kabupaten Padang Pariaman , 2025*

Realisasi Indeks Desa Kabupaten Padang Pariaman sebesar 73,26% pada Tahun 2025 lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu 70,00% dan dinyatakan sangat berhasil dengan capaian 104,66%. Capaian Indeks Desa ini menunjukkan bahwa perkembangan status nagari di Kabupaten Padang Pariaman secara umum mengalami peningkatan, yang ditandai dengan bertambahnya nagari berstatus berkembang dan maju. Peningkatan tersebut didukung oleh pelaksanaan program pembinaan pemerintahan nagari, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan kelembagaan masyarakat, serta pembangunan infrastruktur dasar dan layanan sosial. Selain itu, intervensi program lintas perangkat daerah juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan skor pada dimensi sosial dan lingkungan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa nagari yang berada pada status berkembang dan belum beralih ke status maju atau mandiri. Hal ini dipengaruhi oleh masih terbatasnya kinerja usaha ekonomi nagari, belum optimalnya pengelolaan dan produktivitas BUMNag, serta belum meratanya kapasitas tata kelola pemerintahan nagari. Pada dimensi lingkungan, tantangan yang dihadapi antara lain pengelolaan sanitasi, persampahan, dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana di beberapa wilayah.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Desa (ID) Tahun 2024 dan 2025

Realisasi Indeks Desa Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian Indeks Desa Membangun Tahun 2024 karena telah mengalami perubahan formulasi perhitungan indeks. Disamping itu, Indeks Desa merupakan Indikator yang baru digunakan di awal RPJMD saat ini.

c) Perbandingan Realisasi Indeks Desa dengan Target Jangka Menengah

Dari hasil Indeks Desa Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dapat dibandingkan dengan target jangka menengah sebagai berikut :

Tabel 3.253
Perbandingan Realisasi Indeks Desa Tahun 2025 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Desa	%	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	73,26	-	-	-	-

Sumber : *DPMD Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

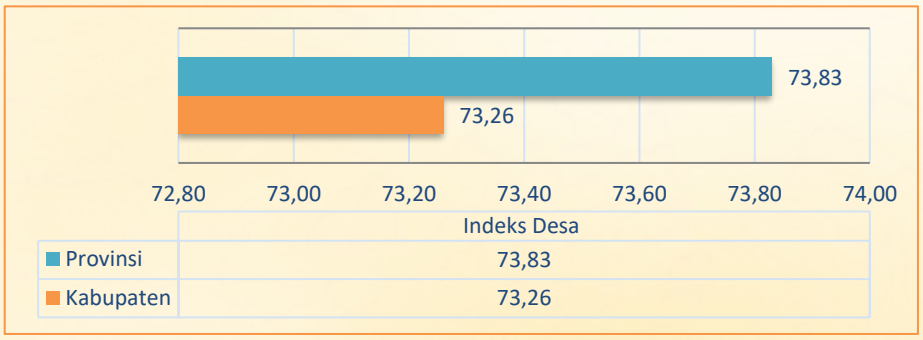
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Indeks Desa Kabupaten Padang Pariaman sebesar 73,26 telah dapat melebihi dari target jangka menengah tahun 2028, namun belum melewati target akhir jangka menengah sebesar 75,00 %. Capaian ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan desa dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman yang menargetkan peningkatan jumlah nagari berstatus maju dan mandiri secara berkelanjutan.

d) Perbandingan Realisasi Indeks Desa Tahun 2025 dengan Realisasi Provinsi

Realisasi Indeks Desa Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 sebesar 73,26%, jika dimasukkan dalam klasifikasi Status Desa masih berada pada stastus "Maju". Artinya sebagian besar Nagari di Kabupaten Padang Pariaman masih merupakan Nagari Maju dan belum memenuhi semangat nasional yang mengharapkan Desa/Nagari menjadi Desa/Nagari yang Mandiri. Desa dianggap sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Ketika desa kuat secara ekonomi dan tata kelola, maka negara akan lebih kuat menuju Indonesia Emas 2045.

Berikut ini disajikan perbandingan antara realisasi Indeks Desa Kabupaten Padang Pariaman dengan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 :

Grafik 3.48
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Desa
Tahun 2025 Kabupaten dengan Provinsi



***Sumber** : Laporan Capaian IUP Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Realisasi indikator kinerja Indeks Desa menunjukkan tren yang lebih kompetitif dan setara. Provinsi mencatatkan indeks sebesar 73,83, sedangkan Kabupaten berhasil meraih angka 73,26. Dengan selisih yang sangat tipis, yakni hanya 0,57 poin, capaian Kabupaten dapat dikatakan sangat baik dan telah selaras dengan standar pembangunan desa di tingkat provinsi. Angka indeks di level 73 menunjukkan bahwa secara umum desa-desa di wilayah Kabupaten telah berada pada kategori yang maju. Fokus selanjutnya dapat diarahkan pada peningkatan aspek-aspek spesifik yang belum maksimal guna melampaui rata-rata capaian provinsi di masa mendatang.

e) Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Indeks Desa

Dalam upaya meningkatkan Indeks Desa, perlu dilaksanakan intervensi percepatan terhadap 6 dimensi pembentuk Indeks Desa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya.

Adapun faktor pedukung untuk pencapaian target ini yaitu :

1. Pembinaan pemerintahan nagari yang berkelanjutan

2. Peningkatan kapasitas aparatur nagari
3. Penguatan kelembagaan masyarakat dan BUMNag
4. Pembangunan infrastruktur dasar dan layanan sosial
5. Sinergi lintas perangkat daerah dalam intervensi pembangunan nagari

Sementara faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan dan program ini yaitu :

1. Masih terbatasnya kinerja ekonomi nagari di beberapa wilayah
2. Pengelolaan dan produktivitas BUMNag yang belum optimal
3. Ketimpangan kapasitas tata kelola pemerintahan nagari
4. Tantangan pada dimensi lingkungan, terutama sanitasi, persampahan, dan kesiapsiagaan bencana

Untuk meningkatkan capaian Indeks Desa ke depan, Kabupaten Padang Pariaman telah dan akan melakukan:

1. Pendampingan intensif pada nagari berstatus berkembang
2. Penguatan perencanaan pembangunan berbasis data Indeks Desa
3. Revitalisasi dan penguatan BUMNag
4. Peningkatan sinergi lintas OPD
5. Fokus intervensi pada dimensi dengan nilai terendah

f) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Indikator Kinerja Indeks Desa

Dalam rangka meningkatkan capaian indikator Indeks Desa, telah dilakukan langkah-langkah strategis melalui pendampingan nagari, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan perencanaan berbasis data Indeks Desa, serta mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal dan revitalisasi BUMNag. Ke depan, strategi peningkatan Indeks Desa diarahkan pada intervensi yang lebih terfokus pada nagari dengan nilai dimensi terendah, penguatan sinergi lintas Perangkat Daerah, serta peningkatan pemanfaatan data Indeks Desa sebagai dasar penentuan prioritas program pemberdayaan dan pembangunan nagari.

Program yang menunjang peningkatan Indeks Desa adalah sebagai berikut :

Tabel 3.254
Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Realisasi Indikator Kinerja Indeks Desa Tahun 2025

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1.	Program Penataan Desa	Rp. 118.223.000,00	Rp. 63.397.000,00	53,62%
2.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 93.168.500,00	Rp. 43.736.400,00	46,94%
3.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 686.127.800,00	Rp. 513.952.126,00	74,91%
Total		Rp. 897.519.300,00	Rp. 621.085.526,00	69,20%

Penyerapan untuk program penunjang Indeks Desa ini berada di angka 69,20%. Penyerapan tertinggi ada pada Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (74,91%), sedangkan yang terendah pada Program Administrasi Pemerintahan Desa (46,94%).

Total pagu anggaran: Rp. 897.519.300,00 dengan total realisasi anggaran: Rp. 621.085.526,00. Persentase penyerapan keseluruhan sebesar 69,20%.

Gambar 3.114
Kegiatan Bazar UMKM di InJourney 2025



Sumber : *DPMD Kabupaten Padang Pariaman , 2025*

Gambar 3.115
Monitoring dan Pembinaan BuMnag Desa/nagari Tahun 2025



Sumber : *DPMD Kabupaten Padang Pariaman , 2025*

Gambar 3.116
Pembinaan Kelompok Dasawsima dan PKK Tahun 2025



Sumber : *DPMD Kabupaten Padang Pariaman , 2025*

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut tabel perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggaran indikator kinerja Indeks Desa tahun 2025 :

Tabel 3.255
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Kinerja Indeks Desa Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Indeks Desa	104,66 %	69,20%	35,46%

Berdasarkan Tabel 3.253, analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Indeks Desa pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat impresif dan melampaui ekspektasi. Sasaran strategis untuk meningkatkan status perkembangan desa berhasil mencatatkan capaian kinerja fisik yang luar biasa, yakni sebesar 104,66%. Capaian yang melampaui target ini menjadi semakin bermakna karena direalisasikan dengan penyerapan anggaran yang cukup efisien, yaitu sebesar 69,20%.

Sinergi antara tingginya capaian kinerja dan serapan anggaran ini menghasilkan tingkat efisiensi positif yang signifikan sebesar 35,46%. Angka ini merefleksikan bahwa program-program penguatan kemandirian desa di Kabupaten Padang Pariaman telah dikelola secara sangat cerdas dan ekonomis.

SASARAN STRATEGIS 15

Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas

Pada sasaran Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas terdapat 3 (tiga) indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait sasaran strategis ini, yaitu Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI), Akses rumah tangga terhadap sumber air minum jaringan perpipaan, dan Kapasitas Air Baku.

A. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) adalah ukuran komprehensif untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat atas kualitas pembangunan, pemeliharaan, dan layanan infrastruktur yang disediakan pemerintah yang dilakukan melalui survei terhadap masyarakat pengguna infrastruktur. Survey ini mencakup infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, drainase, bangunan gedung, dan pelayanan perizinan.

Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah 76,33.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Tahun 2025

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 :

Tabel 3.256
Perbandingan Target dan Realisasi
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian (%)	Interpretasi
		Target	Realisasi		
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	60,02	76,33	127,17	Sangat Berhasil

Sumber : *DPUPR Kabupaten Padang Pariaman , 2025*

Pada tahun 2025 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) sebesar 76,33 dari target yang ditetapkan 60,02 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 127,17% dengan kategori Sangat Berhasil. Hal ini memperlihatkan bahwa Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman cukup puas dengan layanan infrastruktur daerah, dengan indeks 76,33%.

b) Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Tahun 2024 dan Tahun 2025

Dikarenakan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan indikator yang baru dipakai Tahun 2025, tidak terdapat data target dan realisasi tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan.

c) Perbandingan Realisasi Capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.257
Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Tahun 2025 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	60,02	62,03	64,05	66,08	68,12	76,33	-	-	-	-

***Sumber** : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Padang Pariaman telah melebihi target tahun 2025, bahkan juga melebihi target akhir RPJMD. Hal ini memungkinkan dilakukannya analisa lebih lanjut untuk menyesuaikan target pada jangka menengah terhadap IKU ini.

d) Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Tahun 2025 dengan Provinsi

Dikarenakan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan indikator yang baru dipakai Tahun 2025, belum didapatkan informasi capaiannya di tingkat Propinsi maupun Nasional, sehingga tidak dapat diperbandingkan.

e) Analisis Faktor Pendukungan dan Penghambat Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Faktor pendukung utama indeks kepuasan layanan infrastruktur meliputi kualitas fisik yang baik (availability & quality), kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, serta efektivitas manfaat ekonomi. Sebaliknya, faktor penghambat utamanya adalah pembebasan lahan, keterbatasan dana, perencanaan yang lemah, serta kurangnya partisipasi masyarakat. Peningkatan kepuasan tercapai melalui transparansi dan pengelolaan yang partisipatif.

Berikut adalah rincian faktor-faktor tersebut:

Faktor Pendukung :

- Kualitas & Ketersediaan Fisik: Infrastruktur dalam kondisi baik, kokoh, dan tersedia saat dibutuhkan.
- Kesesuaian dengan Kebutuhan: Pembangunan yang selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat setempat, bukan sekadar proyek fisik.
- Efektivitas Pemanfaatan : Infrastruktur yang dibangun tepat sasaran, fungsional, dan memberikan dampak positif pada perekonomian.
- Kemudahan Akses dan Prosedur: Akses layanan yang mudah dan prosedur yang jelas bagi masyarakat.
- Kompetensi Petugas: Petugas yang disiplin, bertanggung jawab, dan ramah dalam pelayanan.

Faktor Penghambat :

- Pembebasan Lahan: Masalah klasik yang sering menghambat proyek infrastruktur.

- Keterbatasan Dana/Anggaran: Keterbatasan anggaran yang membatasi kualitas dan kuantitas pembangunan.
- Perencanaan dan Persiapan yang Lemah: Kurangnya studi kelayakan dan perencanaan yang matang.
- Ketidakmerataan Pembangunan: Kesenjangan infrastruktur antara wilayah maju dan tertinggal.
- Minimnya Partisipasi Masyarakat: Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan.
- Kerusakan Cepat (Maintenance Rendah): Kurangnya pemeliharaan setelah infrastruktur dibangun, sehingga cepat rusak.

f) Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Program yang menunjang peningkatan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur adalah sebagai berikut :

Tabel 3.258
Anggaran dan Realisasi Program Penunjang Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Tahun 2025

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 6.009.534.800,00	Rp. 5.109.716.152,00	85,03%
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp. 556.538.700,00	Rp. 474.916.000,00	85,33%
3.	Program Bangunan Gedung	Rp. 22.210.694.914,00	Rp. 20.307.499.597,00	91,43%
Total		**Rp. 28.776.768.414,00**	**Rp. 25.892.131.749,00**	**89,98%**

Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel diatas, terlihat bahwa pagu anggaran dalam mendukung peningkatan kualitas infrastruktur di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2025 yang dialokasikan untuk ketiga program strategis tersebut mencapai Rp28.776.768.414,00, dengan realisasi sebesar Rp25.892.131.749,00 atau setara dengan 89,98%.

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut tabel perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggaran indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur tahun 2025 :

Tabel 3.259
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	127,17%	89,98%	37,19%

Indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur pada tahun 2025 berhasil mencatatkan capaian kinerja fisik yang melampaui ekspektasi, yakni sebesar 127,17%. Luar biasanya, performa yang melampaui target ini diwujudkan melalui penyerapan anggaran yang terkendali dan efisien di angka 89,98%.

Perbandingan antara tingginya kualitas output kinerja dan optimalnya penggunaan anggaran ini menghasilkan nilai tingkat efisiensi yang sangat signifikan sebesar 37,19%. Angka ini menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan infrastruktur di Kabupaten Padang Pariaman telah menerapkan prinsip *high impact, low cost.* Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan ketepatan dalam penentuan skala prioritas pembangunan, tetapi juga menunjukkan adanya efektivitas kerja yang luar biasa di lapangan, di mana kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur dapat ditingkatkan secara drastis tanpa harus menghabiskan seluruh alokasi dana yang tersedia.

B. Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan

Jaringan irigasi merupakan saluran, bangunan dan struktur tambahan membentuk satu kesatuan untuk mengatur air irigasi mulai dari penyediaan, pengumpulan, pendistribusian, pengelolaan, penggunaan dan pembuangan. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah indikator kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman yang perlu dilaksanakan demi pemberdayaan terhadap masyarakat.

Untuk mengkitung persentase Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan digunakan formulasi dan perhitungan sebagai berikut :

$$Akses\ RT\ Terhadap\ Sumber\ Air\ Minum\ Jaringan\ Perpipaan = \frac{\text{Jumlah RT yang mendapat akses SPAM Jaringan Perpipaan}}{Total\ Jumlah\ Rumah\ Tangga}\ x\ 100\%$$

Pada Tahun 2025 jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum jaringan perpipaan sebanyak 24.717 RT, sedangkan total jumlah rumah tangga di Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 144.529 RT, sehingga didapatkan realisasi persentase akses rumah tangga terhadap air minum jaringan perpipaan adalah :

$$= \frac{24717}{144529}\ x\ 100\% = 17{,}10\%$$

Dengan demikian realisasi Indikator Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah 17,10 %

a) Perbandingan Target dan Realisasi Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan Pada Tahun 2025

Dari hasil perhitungan realisasi Indikator Kinerja Utama “Akses rumah tangga terhadap sumber air minum jaringan perpipaan “ tahun 2025 sebagaimana diatas, dapat dilihat perbandingan dengan target yang ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.260
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan	%	19,00	17,10	90%	Berhasil

***Sumber** : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa realisasi Akses rumah tangga terhadap sumber air minum jaringan perpipaan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, belum sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 19%. Namun realisasi sebesar 17,10% tersebut dapat dikatakan Berhasil mencapai target dengan persentase capaiannya sebesar 90%.

b) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan Tahun 2024 dan Tahun 2025

Dikarenakan Indikator Kinerja Akses rumah tangga terhadap sumber air minum jaringan perpipaan merupakan indikator yang baru dipakai Tahun 2025, tidak terdapat data target dan realisasi tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan.

c) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.261
Perbandingan Realisasi Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan Tahun 2025 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan	Indeks	19,00	20,50	22,00	23,50	25,00	17,10	-	-	-	-

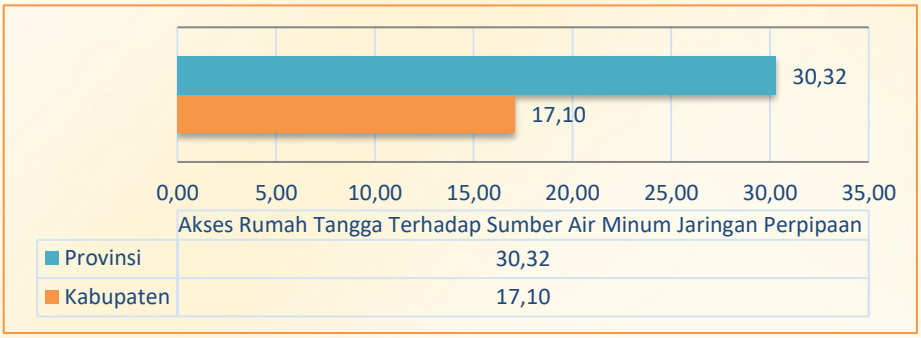
***Sumber** : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 masih belum mencapai target sebesar 19%. Demikian juga dengan target-target jangka menengah yang ditargetkan relatif naik setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan perlunya intervensi lebih terhadap peningkatan dan pengembangan sumber air minum jaringan perpipaan di Kabupaten Padang Pariaman sehingga target pada jangka menengah yang telah direncanakan tersebut dapat tercapai secara bertahap.

d) Perbandingan Realisasi Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan Tahun 2025 dengan Realisasi Provinsi

Berikut ini disajikan perbandingan antara realisasi Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan Kabupaten Padang Pariaman dengan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 :

Grafik 3.49
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan Tahun 2025 Kabupaten dengan Provinsi



***Sumber** : Laporan Capaian IUP Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Grafik diatas memaparkan perbandingan realisasi indikator kinerja akses rumah tangga terhadap sumber air minum melalui jaringan perpipaan antara Kabupaten Padang Pariaman dengan rata-rata Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025. Capaian akses air minum jaringan perpipaan di tingkat Provinsi Sumatera Barat menyentuh angka 30,32%. Sedangkan untuk tingkat Kabupaten Padang Pariaman, realisasi akses tercatat sebesar 17,10%. Terdapat selisih sebesar 13,22% antara capaian Kabupaten dengan rata-rata Provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan infrastruktur jaringan perpipaan di Kabupaten Padang Pariaman masih memerlukan akselerasi yang signifikan untuk dapat mengejar standar layanan di tingkat regional provinsi. Rendahnya angka ini mengindikasikan bahwa mayoritas rumah tangga di kabupaten masih mengandalkan sumber air minum non-perpipaan.

e) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian realisasi indikator kinerja yaitu :

- Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah nagari serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM
- Penguatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara berkelanjutan
- Dukungan dari Perumda Air Minum Tirta Anai yang mempunyai tujuan meningkatkan pelayanan air bersih dan menambah jumlah sambungan rumah.

Dalam mencapai target Indikator Kinerja Utama “Akses rumah tangga terhadap sumber air minum jaringan perpipaan” terdapat beberapa hambatan yaitu sebagai berikut :

- Keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan SPAM yang baik
- Terbatasnya kapasitas kelembagaan pembangunan di daerah untuk melanjutkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air minum.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mencapai realisasi Indikator Kinerja Utama "Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan". terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk pemecahan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

- Mendorong pembentukan dan perkuatan kelembagaan SPAM ditingkat masyarakat ;
- Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM ;
- Mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya SPAM.
- mampu mewujudkan realisasi yang nyata dalam pencapaian Indikator Kinerja.

f) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU

Pada Tahun 2025 Program penunjang untuk IKU "Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan" tidak memiliki anggaran yang disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran. Namun dalam pencapaian kinerja diperoleh dari Perumda Air Minum Tirta Anai sebagai pengelola, penyedia, dan distribusi air bersih kepada Masyarakat.

Gambar 3.117
Pemasangan Sambungan Rumah (SR)



***Sumber** : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut tabel perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggaran indikator kinerja Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan tahun 2025 :

Tabel 3.262
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas	Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan	90%	-	90%

Nilai tingkat efisiensi yang tercatat sebesar 90% ini menjadi indikator kuat bahwa langkah-langkah perluasan jaringan perpipaan di Kabupaten Padang Pariaman telah dilaksanakan secara taktis dan tepat sasaran. Meskipun penyerapan anggaran pendukung bergerak secara dinamis, konsistensi antara perencanaan dan eksekusi di lapangan telah mampu menjaga ritme pembangunan infrastruktur air minum tetap berada di jalur yang optimal. Hal ini menegaskan komitmen daerah untuk memastikan ketersediaan sumber daya dikelola dengan prinsip akuntabilitas yang tinggi guna mewujudkan pemerataan akses air bersih bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan.

C. Kapasitas Air Baku (m3/detik)

Kapasitas air baku untuk pengolahan air merupakan jumlah maksimum air baku yang dapat diolah oleh suatu Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) dalam waktu tertentu yang menunjukkan kemampuan sistem pengolahan air untuk mengolah air baku menjadi air bersih. Di Kabupaten Padang Pariaman terdapat 30 Nama Sumber Air Baku beserta kapasitasnya sebagai berikut :

Tabel 3.263
Nama Sumber Air Baku di Kabupaten Padang Pariaman Beserta Kapasitasnya

No	Nama Sumber Air Baku	Kapasitas *Intake* (ltr/detik)
1.	Salisikan I	20
2.	Salisikan II	20
3.	Salisikan III	50
4.	Lubuk Lonsong	100
5.	Sikuliek	20
6.	Tapian Puti	5
7.	IPA Stadion	10
8.	Andaleh Lubuk Bonta	225
9.	KFW Lubuk Bonta	20
11.	Jawi-Jawi	10
12.	Toboh Ketek	20
13.	Tirta Alami	35
14.	Air Tawar	10
15.	Tandikat Asli	20
16.	Air Kelok	20
17.	Durian Daun	5
18.	Baburai	30
19.	Hungaria V Koto Timur	20
20.	Limau Purut	20
21.	Kudu Ganting	5
22.	Hungaria Batang Gasan	40
23.	Batang Gasan	5
24.	Lambeh	15
25.	Ladang Rimbo	20
26.	Padang Olo	10
27.	Kampung Kaciak Koto Bangko	15

28.	Kampung Tanjung Aur Malintang	5
29.	Aur Malintang	15
30.	Kampung Jambak Batu Basa	5
TOTAL		795

***Sumber** : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Masing-masing SPAM memiliki kapasitas yang berbeda yang dipengaruhi oleh ketersediaan sumber air baku, kualitas air baku, teknologi pengolahan air, kapasitas infrastruktur pengolahan, biaya operasional dan pemeliharaan.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kapasitas Air Baku Tahun 2025

Pada tahun 2025 total kapasitas air baku Kabupaten Padang Pariaman sebesar 795 ltr/detik yang terdiri dari 30 Nama Sumber Air Baku, sehingga didapatkan rata-rata kapasitas air baku adalah 26,5 ltr/dtk. Indikator Kapasitas Air Baku dihitung dalam satuan m3/detik, sehingga rata-rata tersebut dikonversikan dan menjadi sebesar 0,03 m3/detik.

Tabel 3.264
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Kapasitas Air Baku (m3/detik) Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Kapasitas Air Baku (m3/detik)	(m3/detik)	0,95	0,03	3,16	Kurang Berhasil

***Sumber** : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

b) Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kapasitas Air Baku Tahun 2024 dan 2025

Dikarenakan Indikator Kinerja Kapasitas Air Baku (m3/detik) merupakan indikator yang baru dipakai Tahun 2025, tidak terdapat data target dan realisasi tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan.

c) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kapasitas Air Baku Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.265
Perbandingan Realisasi Kapasitas Air Baku (m3/detik)
Tahun 2025 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Kapasitas Air Baku (m3/detik)	(m3/detik)	0,95	0,992	1,034	1,096	1,128	0,03	-	-	-	-

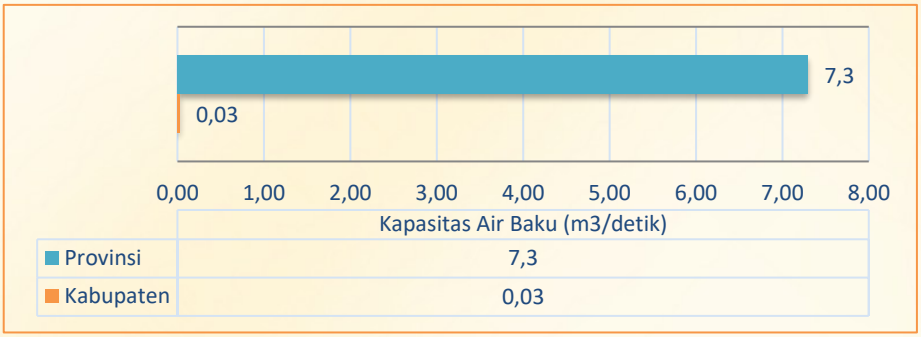
***Sumber** : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Dilihat dari realisasi Kapasitas Air Baku Tahun 2025 yang hanya 0,03 m3/detik, dan dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan optimis meningkat setiap tahun sampai tahun 2029 mencapai 1,128 m3/detik, mengindikasikan harus dilaksanakan Upaya yang sangat kuat dalam meningkatkan kapasitas air baku di Kabupaten Padang Pariaman.

d) Perbandingan Realisasi Kapasitas Air Baku Tahun 2025 dengan Realisasi Provinsi

Berikut ini disajikan perbandingan antara realisasi Kapasitas Air Baku Kabupaten Padang Pariaman dengan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 :

Grafik 3.50
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kapasitas Air Baku Tahun 2025 Kabupaten dengan Provinsi



***Sumber** : Laporan Capaian IUP Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 memiliki kapasitas air baku sebesar 7,3 m^3/detik. Sedangkkan pada tingkat Kabupaten Padang Pariaman, realisasi kapasitas air baku tercatat sebesar 0,03 m^3/detik. Terlihat adanya perbedaan yang sangat signifikan antara kapasitas air baku yang dikelola di tingkat Kabupaten Padang Pariaman dibandingkan dengan total kapasitas di tingkat Provinsi. Angka 0,03 m^3/detik menunjukkan bahwa kontribusi atau penguasaan kapasitas air baku di wilayah kabupaten masih berada jauh di bawah rata-rata capaian provinsi. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya strategis dari Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan pembangunan sarana prasarana pengambilan air baku guna meningkatkan volume ketersediaan air, melakukan identifikasi potensi sumber air baku baru yang dapat dikelola secara teknis untuk mendukung kebutuhan domestik maupun industri dan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah provinsi dalam hal konservasi dan pemanfaatan sumber daya air yang melintasi wilayah administratif.

e) Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja Kapasitas Air Baku serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian realisasi indikator kinerja yaitu :

1. Kualitas air baku yang baik sehingga memudahkan proses pengolahan dan menurunkan biaya
2. Manajemen dan tata kelola yang baik oleh Perumda Air Minum Tirta Anai serta didukung regulasi yang kuat

Faktor penghambat keberhasilan pencapaian realisasi indikator kinerja yaitu :

1. Perubahan iklim yang menyebabkan sumber air mengering pada saat musim kemarau
2. Pencemaran sumber air oleh aktifitas pertanian

3. Tingginya tingkat kebutuhan air bersih yang tidak diiringi dengan ketersedian sarana dalam pengelolaaan sumber air baku

Beberapa upaya yang dilakukan untuk pemecahan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan efisiensi pengolahan air
2. Pembangunan infrastruktur pengolahan air baru
3. Penggunaan teknologi pengolahan air yang lebih efektif
4. Konservasi air dan pengurangan kebocoran
5. Pengembangan sumber air alternatif (misalnya air hujan, air tanah)
6. Pengelolaan sumber daya air yang lebih baik

f) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator Kinerja Kapasitas Air Baku

Pada Tahun 2025 Program penunjang untuk IKU "Kapasitas Air Baku" tidak memiliki anggaran yang disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran. Namun dalam pencapaian kinerja diperoleh dari Perumda Air Minum Tirta Anai.

Gambar 3.118
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)



***Sumber** : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut tabel perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggaran indikator kinerja Kapasitas Air Baku (m3/detik) tahun 2025 :

Tabel 3.266
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Kapasitas Air Baku (m3/detik) Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	3,16%	-	3,16%

Indikator Kinerja Kapasitas Air Baku (m3/detik) tahun 2025 menunjukkan realisasi capaian kinerja fisik yang masih berada pada angka 3,16%. Rendahnya capaian kinerja pada indikator ini secara teknis berkolerasi dengan tidak adanya alokasi maupun realisasi anggaran yang secara spesifik ditujukan untuk mendukung program/kegiatan yang terkait langsung dengan peningkatan kapasitas air baku pada tahun anggaran berjalan.

Kedepannya, diperlukan sinkronisasi yang lebih tajam antara penetapan target IKU dengan perencanaan anggaran agar setiap indikator strategis memiliki basis dukungan pendanaan yang memadai untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

D. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak Dan Terjangkau

Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau adalah keluarga yang menempati tempat tinggal dengan memenuhi 4 kriteria utama yaitu:

- Ketahanan Bangunan (*Durable Housing*): Memiliki atap, dinding, dan lantai yang memenuhi standar keselamatan dan keawetan tertentu (misalnya, bukan beralaskan tanah).
- Kecukupan Luas Tempat Tinggal (*Sufficient Living Space*): Luas lantai minimal adalah 7,2 m^2 per kapita atau per orang.
- Akses Air Minum Layak: Memiliki sumber air minum yang terlindungi dan memenuhi syarat kesehatan.
- Akses Sanitasi Layak: Memiliki fasilitas sanitasi sendiri atau bersama yang dilengkapi dengan kloset leher angsa dan tangki septik

Untuk realisasi tahun 2025 digunakan angka Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau yang dirilis oleh BPS yaitu sebesar 61,48%.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Tahun 2025

Adapun capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.267
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau	%	60,25	61,48	102,04	Sangat Berhasil

***Sumber** : DLHPKPP Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Realisasi indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Tahun 2025 sebesar 61,48% melebihi target yang ditetapkan sebesar 60,25 dengan Tingkat ketercapaian 102,04% dan dapat dikategorikan sangat berhasil. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan dan upaya program dan kegiatan di Tahun 2025 efektif untuk mencapai target yang direncanakan.

b) Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Tahun Tahun 2024 dan Tahun 2025

Berdasarkan data BPS, dapat disajikan perbandingan realisasi Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Tahun 2024 dan 2025, sebagai berikut :

Tabel 3.268
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2024			TAHUN 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau	%	-	59,03	-	60,25	61,48	102,04	Sangat Berhasil

***Sumber** : DLHPKPP Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 59,03, Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Tahun 2025 meningkat menjadi 61,48. Hal ini memperlihatkan upaya yang dilakukan efektif dalam meningkatkan capaian kinerja dimaksud.

c) Perbandingan Realisasi Capaian Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tahun 2025 merupakan tahun pertama perencanaan jangka menengah RPJMD 2025–2029. Realisasi Indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau pada tahun 2025 telah melebihi target yang ditetapkan untuk tahun pertama RPJMD, namun belum melewati target tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian kedepan perlu konsistensi dan penguatan untuk meningkatkan capaian, sehingga sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan dalam perencanaan jangka menengah dimaksud. Berikut disajikan tabel perbandingannya :

Tabel 3.269
Perbandingan Realisasi Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Tahun 2025 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau	%	60,25	62,03	64,83	67,12	70,71	61,48	-	-	-	-

***Sumber** : DLHPKPP Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

d) Perbandingan Realisasi Capaian Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Tahun 2025 dengan Realisasi Provinsi

Melihat data yang ada pada BPS, dapat dibandingkan realisasi Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Tahun 2025 dengan Realisasi Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

Tabel 3.270
Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Tahun 2025 dengan Realisasi Provinsi

Indikator Kinerja	Tahun 2025		Keterangan
	Realisasi Kabupaten	Realisasi Provinsi	
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau	61,48	63,70	Dibawah Prov

Dari tabel perbandingan di atas, terlihat bahwa realisasi Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Tahun 2025 Kabupaten Padang Pariaman masih dibawah rata-rata provinsi, yang mengindikasikan perlunya penguatan program untuk mengejar ketertinggalan dengan rata-rata Kabupaten/Kota terkait Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau ini.

e) Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan/Faktor Penghambat Pencapaian Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Tahun 2025 dan Solusi Yang Telah Dilakukan

Capaian Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung yaitu :

a. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
b. Program penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
c. Program CSR perumahan dan permukiman
d. Kesadaran RT terhadap standar hunian layak

Sedangkan beberapa hal yang menghambat pencapaian kinerja antara lain :

a. Keterbatasan Daya Beli Rumah Tangga
b. Tingginya Harga Lahan dan Rumah
c. Kurangnya pemahaman standar hunian layak
d. Konflik dan sengketa lahan

Adapun upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan Kualitas Hunian Tidak Layak
b. Penyediaan Hunian Terjangkau bagi MBR
c. Pemutakhiran data rumah tangga dan kondisi hunian secara berkala.
d. Monitoring capaian indikator persentase RT dengan hunian layak dan terjangkau.
e. Evaluasi program untuk perbaikan kebijakan berkelanjutan.

Jumlah rumah tangga yang mendapat bantuan perbaikan rumah tidak layak huni pada tahun 2025 sebanyak 45 Rumah Tangga, dengan rincian :

1. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 10 rumah tangga, dan
2. Bantuan Perbaikan RTLH dari Program Baznas Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 35 rumah tangga.
3.

f) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau

Program yang mendukung kegiatan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau yaitu Program Pengembangan Perumahan dengan anggaran Rp. 41.525.010,00 dan realisasi sebesar Rp. 12.164.500,00 (29,29%). Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut yaitu Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah koban bencana atau relokasi program kabupaten/kota, dengan berbagai aktifitas kegiatan antara lain :

1. Melakukan koordinasi dan konsultasi perihal data rumah yang terkena bencana.
2. Melakukan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terkait Kegiatan SPM Perumahan Rakyat serta data rumah korban bencana.
3. Melakukan pendataan rumah yang terkena bencana, dan
4. Melakukan survey lanjutan rumah yang terdampak korban bencana di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

Gambar 3.119
Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Program Bantuan RTLH dari Baznas Kabupaten Padang Pariaman



g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut tabel perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggaran indikator kinerja Persentase Rumah Tangga Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau tahun 2025 :

Tabel 3.271
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja
Persentase Rumah Tangga Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya akses Masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Persentase rumah tangga terhadap hunian layak dan terjangkau	102,04%	29,29%	72,75%

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk sasaran "Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas" menunjukkan hasil yang sangat positif. Pada indikator Persentase Rumah Tangga Terhadap Hunian Layak Dan Terjangkau, diperoleh capaian kinerja sebesar 102,04%, yang berarti target kinerja telah berhasil dilampaui.

Capaian tersebut berhasil diraih dengan penyerapan anggaran yang relatif rendah, yaitu sebesar 29,29%. Dengan membandingkan antara realisasi kinerja fisik dan penyerapan anggaran, diperoleh Tingkat Efisiensi sebesar 72,75%. Angka efisiensi yang tinggi ini menunjukkan bahwa program/kegiatan mampu menghasilkan output yang optimal meskipun dukungan anggaran yang terserap belum sepenuhnya maksimal, atau terdapat penghematan biaya yang signifikan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

SASARAN STRATEGIS 16

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan menjadi penting untuk dicapai dalam rangka melaksanakan aktifitas pembangunan dengan tetap mempertahankan dan menjaga sumber daya yang ada. Dalam konteks lingkungan, berkelanjutan merujuk pada cara penggunaan sumber daya alam yang dapat diteruskan tanpa merusak ekosistem atau mengakibatkan dampak lingkungan yang tidak dapat diperbaiki. Hal ini mencakup upaya untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, menjaga keanekaragaman hayati, keadaan lingkungan yang sehat dan terjaga dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Makna berkelanjutan mencerminkan kesadaran terhadap tanggung jawab kita terhadap generasi mendatang dan lingkungan di sekitar kita.

A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Berdasarkan amanat undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pembangunan daerah harus memperhatikan aspek lingkungan sehingga pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mendorong penggunaan IKLH sebagai salah satu indikator utama dalam mengukur kinerja pembangunan berkelanjutan di daerah.

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan/atau Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Dengan menggunakan Formulasi pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Status Dan Kondisi Lingkungan Hidup Serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup, maka dapat disajikan nilai IKLH Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :

IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)
= (0.376 x 75.53) + (0.405 x 85.31) + (0.219 x 66.67)
= 28.40 + 34.55 + 14.60
= 77.55

a) Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2025

Sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Padang Pariaman Tahun 2025-2029, target IKLH Tahun 2025 ditetapkan sebesar 76,96. dari perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Pariaman di atas, dapat disajikan perbandingan target dan realisasi capaian IKU tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.272
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	76,96	77,55	100,77%	Sangat Berhasil

***Sumber** : DLHPKPP Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Nilai Indeks IKLH Tahun 2025 Kabupaten Padang Pariaman sebesar 77,55 melebihi target yang ditetapkan sebesar 76,69, tercapai sebesar 100,77% (Sangat Berhasil).

b) Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2024 dan 2025

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2024 dengan Tahun 2025 :

Tabel 3.273
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun 2024				Tahun 2025			Interpretasi
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67,17	67,02	99,78	76.96	77,55	100.77	Sangat Berhasil

***Sumber :** DLHPKPP Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2024 adalah 67.02 dari 67.17 target yang ditetapkan (99.76%). Sedangkan realisasi pada tahun 2025 mengalami peningkatan dari target 76.96 menjadi 77.55 dengan persentase capaian 100.77 % dengan interprestasi "sangat Berhasil".

Nilai IKLH meningkat tahun ini dikarenakan terjadinya peningkatan nilai IKA dan IKL Kabupaten Padang Pariaman. Nilai IKA meningkat karena semua parameter wajib untuk perhitungan IKA telah dipenuhi. Dalam hal ini dilakukan kerjasama dengan Laboratorium Lingkungan Kota Pariaman untuk 4 parameter yang tidak dapat diuji di Laboratorium Lingkungan Kab. Padang Pariaman. Sedangkan nilai IKL meningkat karena terjadinya perubahan rumus dalam perhitungan nilai IKL berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/ Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup Serta Respon terhadap Perubahan Lingkungan Hidup.

Adapun rincian peningkatan nilai IKLH, IKA, IKU dan IKL Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.274
Nilai IKLH, IKA, IKU dan IKL Tahun 2024 dan 2025

Kab/Kota	Tahun	IKLH	IKA	IKU	IKL
Padang Pariaman	2024	67,02 (Sedang)	53,53 (Buruk)	93,06 (Baik)	42,02 (Buruk)
	2025	77,55 (Sedang)	75,53 (Sedang)	85,31 (Baik)	66,67 (Sedang)

Berdasarkan tabel diatas, secara umum kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan tren peningkatan yang signifikan pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami kenaikan dari 67,02 pada tahun 2024 menjadi 77,55 pada tahun 2025, meskipun keduanya masih berada dalam kategori "Sedang".
Peningkatan paling mencolok terlihat pada dua indikator utama, yaitu:

- Indeks Kualitas Air (IKA): Mengalami perbaikan status dari kategori "Buruk" (53,53) di tahun 2024 menjadi kategori "Sedang" (75,53) di tahun 2025.
- Indeks Kualitas Lahan (IKL): Juga menunjukkan peningkatan drastis dari nilai 42,02 (Buruk) menjadi 66,67 (Sedang).

Di sisi lain, Indeks Kualitas Udara (IKU) mengalami sedikit penurunan dari 93,06 menjadi 85,31. Walaupun menurun secara angka, kualitas udara di Padang Pariaman tetap terjaga dengan sangat baik dan masih bertahan dalam kategori "Baik". Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan kualitas air dan lahan di wilayah tersebut berjalan efektif pada periode 2025.

c) Perbandingan Realisasi Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan Target RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

Tabel 3.275
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,96	77,17	77,38	77,59	77,80	77,55	-	-	-	-

Sumber : *DLHPKPP Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun awal RPJMD yakni 2025 realisasi indikator IKLH 76,96 dengan target 77,55. Jika dibandingkan dengan target keseluruhan pada jangka menengah, angka capaian ini telah melampaui target tahun 2027, sehingga dapat dilakukan penyesuaian target kedepannya. Namun masih perlu konsistensi dan peningkatan untuk mencapai target akhir RPJMD yaitu 78,02.

d) Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2025 dengan Realisasi Provinsi

Sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Status Dan Kondisi Lingkungan Hidup Serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup, pada lampiran VIII huruf B, memberikan kategori perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

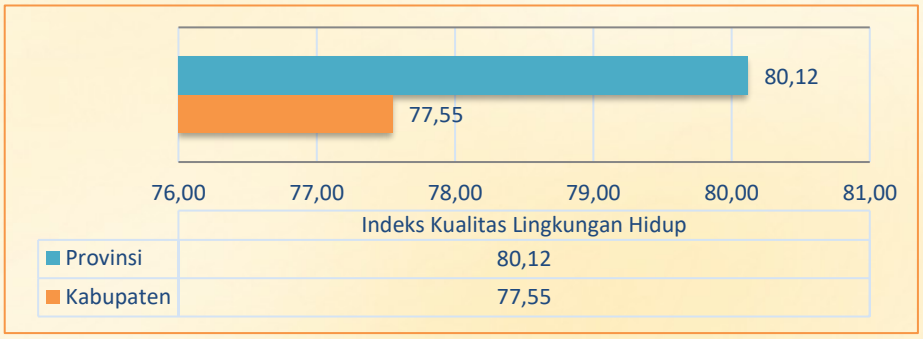
Tabel 3.276
Kategori Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Kategori	Angka Rentang
1.	Baik	85 < x ≤ 100
2.	Sedang	60 < x ≤ 85
3.	Kurang	0 < x ≤ 60

Berdasarkan kriteria kategori di atas, dengan hasil perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 masih berada pada kategori Sedang.

Untuk memperoleh gambaran tentang perbandingan realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Padang Pariaman dengan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.51
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 Kabupaten dengan Provinsi



***Sumber** : Laporan Capaian IUP Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Capaian IKLH di tingkat Provinsi Sumatera Barat berada pada angka 80,12. Sementara itu, realisasi IKLH untuk tingkat Kabupaten Padang Pariaman tercatat sebesar 77,55. Berdasarkan data tersebut, terdapat selisih sebesar 2,57 poin antara capaian Kabupaten dengan rata-rata Provinsi. Meskipun capaian Kabupaten sedikit berada di bawah angka Provinsi, nilai 77,55 menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Padang Pariaman secara umum berada pada kategori yang baik. Kesenjangan yang relatif kecil ini mengindikasikan bahwa upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan di tingkat kabupaten telah berjalan cukup selaras dengan arah kebijakan provinsi. Masih diperlukan upaya yang lebih maksimal sehingga Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Pariaman dapat masuk dalam kategori Baik, yaitu dengan nilai indeks diatas 85.

e) Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Serta Solusi Yang Telah Dilakukan

Meningkatnya capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung yaitu:

- Pemantauan kualitas udara ambien didanai oleh pemerintah pusat (APBN)
- Dalam pemantauan kualitas air bekerjasama dengan Labling PerkimLH Kota Pariaman
- Adanya data tutupan lahan yang terus diupdate oleh kementerian sebagai data dasar perhitungan IKLH

Disamping faktor pendukung tersebut, terdapat beberapa hal yang menghambat pencapaian kinerja antara lain :

- Minimnya sarana dan prasarana pendukung seperti kendaraan dinas untuk pengumpulan data dan pemantauan
- Keterbatasan anggaran sehingga untuk pemantauan kualitas udara hanya mengandalkan pemantauan yang dilakukan melalui APBN;
- Labling DLHPKPP belum mampu menguji semua parameter wajib untuk pemantauan kualitas air;
- Taman kehati yang dibebaskan untuk pembangunan jalan tol belum ada penggantinya dan luasan saat ini belum di SK kan.
- Indeks Kualitas Lahan di Kabupaten Padang Pariaman dipengaruhi oleh dinamika pemanfaatan lahan, tekanan pembangunan, serta pengelolaan sumber daya lahan.

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- Memastikan semua parameter wajib uji dalam pemantauan kualitas air telah dilaksanakan. Pada beberapa parameter uji yang tidak dapat dilakukan pengujiannya di Laboraturium Lingkungan pada DLHPKPP Kabupaten Padang Pariaman telah dilaksanakan kerjasama dengan Laboratorium Lingkungan Dinas PERKIMLH Kota Pariaman (Laboratorium lingkungan yang terakreditasi) untuk pengujiannya.
- Melaksanakan pemantauan kualitas lahan dengan melakukan inventaris luas RTH dan RHL tahun berjalan.
- Melakukan Rehabilitasi dan penghijauan lahan kritis
- Peningkatan tutupan vegetasi dan ruang terbuka hijau di permukiman Masyarakat.
- Upaya pengendalian alih fungsi lahan, rehabilitasi lahan kritis, serta penerapan praktik pengelolaan lahan berkelanjutan menjadi langkah penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lahan di daerah.

f) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Program yang mendukung kegiatan pengujian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut

   Sub kegiatan untuk pencapaian IKU dengan anggaran Rp. 70.816.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 68.399.213,00 dengan capaian 96,59%. Kab. Padang Pariaman telah menetapkan 13 titik sumber air yang menjadi objek pemantauan dalam rangka menghitung nilai IKA. Sumber air tersebut terdiri dari 5 sungai dan 3 mata air. Pemantauan dilakukan 1 kali pada musim kemarau dan 1 kali pada musim hujan. Adapun parameter wajib yang harus diuji pada air sungai yaitu pH, TSS, BOD, COD, DO, NO_3-N, Total Phospat dan Fecal Coliform (8 parameter), sdangkan parameter wajib yang harus diuji pada air mata air/danau/situ yaitu pH, TSS, BOD, COD, DO, NO3-N, Total Phospat, kecerahan, klorofil-a, total nitrogen dan Fecal Coliform (10 parameter).

Tabel 3.277
Objek Pemantauan Indeks Kualitas Air

NO	Nama Lokasi	Alamat Lokasi
1	Lubuk Bonta	Kec. 2x11 Kayu Tanam
2	Tirta Alami	Kec. 2x11 Kayu Tanam
3	Lubuk Cimantung	Kec. Lubuk Alung
4	Sungai Limau Hulu	Kec. Sungai Geringging
6	Sungai Batang Nareh Hulu	Kec. V Koto Kampung Dalam
7	Sungai Batang Nareh Hilir	Kec. Sungai Limau
8	Sungai Batang Ulakan Hulu	Kec. 2x11 Enam Lingkung
9	Sungai Batang Ulakan Hilir	Kec. Ulakan Tapakis
10	Sungai Batang Tapakis Hulu	Kec. Sintuk Toboh Gadang
11	Sungai Batang Tapakis Hilir	Kec. Ulakan Tapakis
12	Sungai Batang Kamumuan Hulu	Kec. Sungai Geringging
13	Sungai Batang Kamumuan Hilir	Kec. Sungai Limau

Untuk pemantauan kualitas udara, Kab. Padang Pariaman dibantu oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). KLHK memiliki kegiatan rutin yaitu memetakan penyebaran polutan udara di daerah-daerah di seluruh Indonesia dan hasil pemantauannya digunakan dalam Penyusunan Laporan Indeks Kualitas Udara (IKU) Nasional. Pemantauan dilakukan serentak se Indonesia menggunakan metode passive sampler setiap semester (2 kali dalam 1 tahun). Metode ini mengukur parameter NO_2 dan SO_2. Media filter akan dikirimkan oleh KLHK, kemudian di pasang oleh pemerintah daerah pada titik pantau. Setelah dipasang, alat akan dibiarkan selama 14 hari, kemudian media pada alat tersebut akan di kirim kembali ke KLHK untuk dilakukan pengujian. Dan yang melakukan penginputan data/pelaporan data ke Sistem Informasi Tata Lingkungan dan Amdal (SITALA) dilakukan oleh KLHK. Di Kabupaten Padang Pariaman ada 4 titik pemantauan yaitu:

Tabel 3.278
Titik Pemantauan Kualitas Udara di Kabupaten Padang Pariaman

No	Nama Lokasi	Alamat Lokasi
1	Transportasi	Jl. Raya Lubuk Alung Bukit Tinggi (Terminal Pasar Sicincin)
2	Industri/Agro Industri	Padang Industrial Park (PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk)
3	Permukiman	Perumahan Lubuk Alung
4	Perkantoran/Komersial	Kawasan Ibu Kota Kabupaten Nagan Parit Malintang, Kec. Enam Lingkung (Parkiran Kantor Bupati Padang Pariaman)

Sedangkan untuk IKL didapat dari data luasan tutupan lahan (22 kelas penutupan lahan), Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Untuk sumber data luas tutupan lahan berasal dari KLHK (KLHK yang melakukan penginputan ke dalam SITALA), sedangkan sumber data luasan RTH dan RHL adalah hasil inventarisasi dari Pemerintah Kab./Kota (pemerintah daerah yang melakukan penginputan ke dalam SITALA).

2. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
   Kegiatan ini membantu melakukan pengujian lapangan, analisa di laboratorium terhadap sungai – sungai, sumber mata air yang menjadi target pemantauan pada seksi pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta melengkapi peralatan penunjang laboratorium lingkungan. Pengujian lapangan untuk pengujian air meliputi analisa pH, kekeruhan, DHL, suhu. Analisa laboratorium meliputi TSS, TDS, COD, BOD, DO, Total Posfat, Merkuri serta Klorida.
3. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

Pemerintah pusat sampai dengan tahun 2024 telah menempatkan 2 unit alat Online Monitoring (ONLIMO) dan 1 unit alat *Air Quality Monitoring System* (AQMS) di Kabupaten Padang Pariaman. ONLIMO merupakan sistem pemantauan kualitas air yang beroperasi secara kontinue, otomatis, dan daring (online) melalui aplikasi, yang terhubung dengan sistem server KLHK dan dapat diakses pada link *https://ppkl.menlhk.go.id/onlimo-2022/*. Sedangkan AQMS adalah sistem yang digunakan untuk memantau dan mengukur kualitas udara di suatu lokasi tertentu secara real-time, yang terhubung dengan sistem server KLHK dan dapat diakses pada link *https://ispu.menlhk.go.id/internal/web/site/*.

Pelaksanaan pemantauan kualitas air pada sumber air secara otomatis bertujuan untuk mencatat/merekam perubahan kualitas air sebagai instrument peringatan dini (*early warning*) terkait pencemaran air kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, penangungjawab usaha/kegiatan dan masyarakat umum. Analisis dan interpretasi data hasil pemantauan kualitas air tersebut akan menghasilkan informasi sebagai berikut:

- Data kualitas air real time;
- Status mutu air dalam waktu pendek (per jam atau harian).

Pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien menggunakan AQMS bertujuan untuk mencatat/merekam perubahan kualitas udara sebagai instrument peringatan dini (*early warning*) terkait pencemaran udara kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, penangungjawab usaha/kegiatan dan masyarakat umum. Analisis dan interpretasi data hasil pemantauan kualitas udara tersebut akan menghasilkan informasi sebagai berikut:

- Data kualitas udara real time;
- Status mutu udara dalam waktu pendek (per jam atau harian).

Kegiatan utama pada sub kegiatan ini adalah mengawasi dan memastikan keberfungaian alat-alat tersebut (sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk alat berstatus milik KLHK). Adapun stasiun pemantauan lingkungan hidup yang ada di Kab. Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

Tabel 3.279
Stasiun Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Padang Pariaman

No	Nama Stasiun	Alamat Lokasi
1	Stasiun Padang Pariaman-1-Batang Tapakis (ONLIMO)	Nagari Sintuak Kec. Sintuak Toboh Gadang
2	Stasiun KLHK227-Batang Ulakan (ONLIMO)	Nagari Sicincin Kec. 2x11 Anam Lingkuang
3	Stasiun Kabupaten Padang Pariaman (AQMS)	Nagari Parik Malintang Kec. Anam Lingkuang

Gambar 3.120
Pemantauan Kualitas Air Tahun 2025



Sumber : *DLHPKPP Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Gambar 3.121
Pemantauan Kualitas Udara Tahun 2025



Sumber : *DLHPKPP Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut tabel perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggaran indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2025 :

Tabel 3.280
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	100,77%	96,59%	4,18%

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk sasaran "Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan" menunjukkan performa yang sangat selaras antara capaian fisik dan penyerapan anggaran. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2025 berhasil mencapai angka 100,77%, yang mengindikasikan bahwa target kinerja yang ditetapkan telah terealisasi sepenuhnya bahkan melampaui target.

Efektivitas capaian kinerja tersebut didukung oleh penyerapan anggaran yang optimal, yaitu sebesar 96,59%. Melalui perbandingan antara persentase capaian kinerja terhadap realisasi anggaran, diperoleh Tingkat Efisiensi sebesar 4,18%. Angka ini mencerminkan adanya efisiensi biaya yang positif. Artinya, organisasi mampu melampaui target kinerja yang ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang sedikit lebih rendah dari total alokasi yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen sumber daya dalam program pengelolaan lingkungan hidup telah dilakukan secara terukur, efektif, dan ekonomis.

B. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Undang-undang dan peraturan utama yang menjadi acuan dalam pengelolaan sampah di Indonesia berpusat pada UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang ini menjadi landasan hukum utama yang mendefinisikan sampah, mengatur pengelolaan sampah, serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam penanganan sampah padat. Selanjutnya ada beberapa peraturan pelaksanaannya mencakup PP No. 81 Tahun 2012 (sampah rumah tangga/sejenis), PP No. 27 Tahun 2020 (sampah spesifik), serta Permen LHK No. 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen Melalui Tindakan Timbulan Sampah, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Padang Pariaman, dapat dilihat dari data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.281
Neraca Pengelolaan Sampah Berdasarkan Data SIPSN

No	Keterangan	Nilai (Ton/Tahun)
I	JUMLAH TIMBULAN SAMPAH	8.379,85
	(Jumlah Penduduk X Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)	
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	166,00
	Persentase pengurangan sampah	1.98
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	1.040,68
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali sampah	166,00
c	Jumlah Pendaur Ulang Sampah	0.00
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	430.00
	Persentase penanganan sampah	5,13
d	Pemilahan / Pengumpulan	
e	Pengangkutan	0.00
	Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan)	
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)	
f	Pengolahan	430,00
	Jumlah sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	430,00
	Jumlah sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	0.00
g	Pemrosesan akhir	5.781,60
	Jumlah sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	5.781,60
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II +III)	596,00
	Persentase sampah terkelola	7,11
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I-IV)	7.783,85
	Persentase sampah tidak terkelola	92.89

Dengan melihat data pengelolaan sampah diatas, Indikator Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$Timbulan\ Sampah\ Terolah = \frac{\text{Jumlah sampah yang diolah di fasilitas}}{Total\ Timbulan\ Sampah}\ x\ 100\%$$

$$Timbulan\ Sampah\ Terolah = \frac{596{,}00}{8.379{,}85}\ x\ 100\% = 7{,}11\ \%$$

Dengan demikian realisasi Indikator Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah 7,11%.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2025

Sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Padang Pariaman Tahun 2025 – 2029, target IKU Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Tahun 2025 ditetapkan sebesar 16,34%. Dari perhitungan Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Tahun 2025 di atas, dapat disajikan perbandingan target dan realisasi capaian IKU tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.282
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Kinerja Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	16,34	7,11	43,51	Kurang Berhasil

Sumber : *DLHPKPP Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Tahun 2025 Kabupaten Padang Pariaman sebesar 7,11% belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 16,34% dengan tingkat ketercapaian hanya sebesar 43,51% (Kurang Berhasil).

b) Perbandingan Target dan Realisasi Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2024 dan 2025

Dikarenakan Indikator Kinerja Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah merupakan indikator yang baru dipakai Tahun 2025, tidak terdapat data target dan realisasi tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan.

c) Perbandingan Realisasi Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan Target RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Realisasi Indikator Kinerja timbulan sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.283
Perbandingan Realisasi Kinerja Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	16,34	20,31	24,23	27,78	31,66	7,11	-	-	-	-

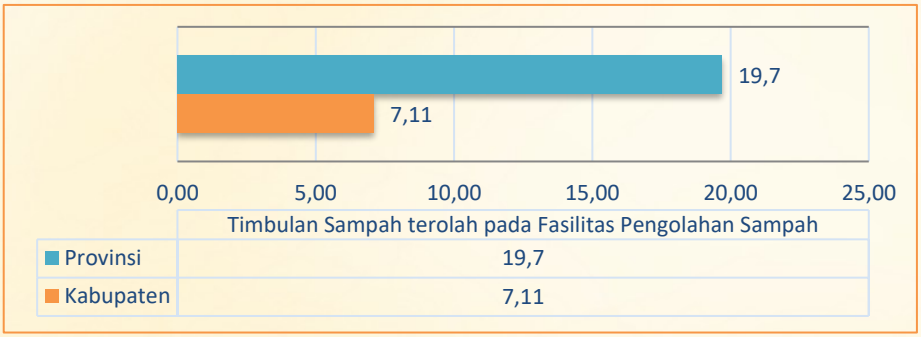
Sumber : *DLHPKPP Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Realisasi Indikator Kinerja Timbulan Sampah terolah pada Fasilitas Pengolahan Sampah pada tahun awal RPJMD yakni Tahun 2025 dengan realisasi 7,11 sementara target yang ditetapkan sebesar 16,32. Jika dibandingkan dengan target keseluruhan pada jangka menengah, angka capaian ini masih jauh dari yang diharapkan, sehingga sangat perlu ditingkatkan upaya pencapaiannya.

d) Perbandingan Realisasi Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2025 dengan Realisasi Provinsi

Berikut ini disajikan grafik perbandingan realisasi Timbulan Sampah Terolah pada Fasilitas Pengolahan Sampah Kabupaten Padang Pariaman dengan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 :

Grafik 3.52
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Timbulan Sampah Terolah pada Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2025 Kabupaten dengan Provinsi



***Sumber** : Laporan Capaian IUP Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Capaian timbulan sampah yang berhasil terolah di tingkat Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar 19,7. Sementara itu, realisasi untuk tingkat Kabupaten Padang Pariaman berada pada angka 7,11. Berdasarkan data tersebut, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara capaian Kabupaten dengan rata-rata Provinsi, di mana realisasi Kabupaten Padang Pariaman masih berada di bawah angka capaian regional. Angka 7,11 ini mengindikasikan bahwa kapasitas atau jangkauan fasilitas pengolahan sampah di tingkat kabupaten masih perlu dioptimalkan agar dapat mendekati standar pengelolaan sampah di tingkat provinsi.

e) Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Serta Solusi Yang Telah Dilakukan

Capaian Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung yaitu:

- Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat (Tinggi/Positif): Perilaku masyarakat dalam pemilahan sampah dari sumber (rumah tangga) sangat krusial.
- Infrastruktur dan Sarana (Ketersediaan): Adanya bank sampah, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan TPS 3R mempermudah pengelolaan.
- Kebijakan Pemerintah (Dukungan Regulasi)

- Teknologi Pengolahan: Penggunaan metode seperti pengomposan (komposting) dan daur ulang (recycling) yang tepat.

Terdapat beberapa hal yang menghambat pencapaian kinerja antara lain :

- Sarana dan Prasarana Minim (Tinggi): Kurangnya tempat pembuangan akhir (TPA) dan fasilitas daur ulang/TPS, serta peralatan yang tidak terawat.
- Kesadaran Masyarakat Rendah (Negatif): Kurangnya pemahaman mengenai pemilahan dan pembuangan sampah sembarangan.
- Manajemen Operasional Lemah: Kurangnya tenaga terlatih, lemahnya pembinaan, dan koordinasi birokrasi yang rendah.
- Faktor Geografis & Ekonomi: Lokasi geografis sulit dan keterbatasan anggaran.

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) adalah sebagai berikut :

- Penguatan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu
- Pemilahan Sampah dari Sumbernya
- Pengolahan Organik
- Pengaturan dan Kebijakan
- Edukasi & Kampanye Publik
- Monitoring & Evaluasi

f) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Indikator Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Program yang mendukung kegiatan Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah yaitu Program Pengelolaan Persampahan dengan total pagu tahun 2025 sebesar Rp. 801.572.949,00 dan realisasi sebesar Rp. 755.487.067,00 (94,25%). Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penanganan sampah melalui pengangkutan

   Bentuk kegiatan ini berupa pengangkut sampah di 30 (tiga puluh) lokasi yaitu di PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk, SMA Negeri 1 Batang Anai, PT. PLN Unit Induk Pembangkitan sumatera bagian selatan unit pelaksana pembangkitan bukittinggi plta singkarak,SMP Negeri 1 Lubuk Alung, Rumah Makan Kiambang Raya , Pasar Nagari Sungai Limau, PT. Bumi Sarimas Indonesia, PT. Usaha Inti Padang, SMP Negeri 1 Sintuak Toboh Gadang, Pasar Usang, SMP Negeri 1 Enam Lingkung, Pasar Nagari Cimpago Kampung Dalam, Pasar Sicincin, Rumah Sakit Paru Prov. SUMBAR, Pasar Pakandangan, RSUD Padang Pariaman, Pesantern Nurul Yaqin, PT. Sumatera Tropical Spices, Pesantren Subbulusalam, PT. Angkasa Pura II, PT. HKI, Dinas Kesehatan, PT. Jaya Sentrikon, SMA Negeri 1 Lubuk Alung, Klinik RMC Ringan-Ringan, Pasar Pauh Kamba, Klinik Utama Mata Padang Eye Center Padang Pariaman, SMP N 1 Sintoga. Kegiatan ini merupakan Penanganan Sampah melalui pengangkutan dengan uraian tugas Petugas sampah mengambil sampah dari perusahaan atau pasar yang sudah melakukan kerjasama dan membuang sampah

tersebut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ada di Ladang Laweh Sicincin Kecamatan 2x11 Enam Lingkung.

2. Pengurangan sampah melali pendauran ulang sampah
   Rencana kegiatan pengurangan asampah melalui daur ulang fokus pada pemilahan sampah di sumber, pengolahan organik menjadi kompos (biopori/komposter) dan anorganik menjadi produk baru (ecobrick, kerajinan, bahan baku) melalui program seperti bank sampah didukung edukasi Masyarakat tentang 3R (Reduce, Reuse, Recycle), serta pemasaran produk daur ulang untuk menciptakan nilai ekonomis dan lapangan kerja baru dengan tujuan utama mengurangi timbulan sampah TPA. Kegiatan ini merupakan pengurangan sampah melalui pendauran ulang dilaksanakan menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang dimulai dari pemilahan sampah disumbernya (organic dan anorganik) membersihkan sampah anorganik, memanfaatkan Kembali barang layak pakai (*ReuseI*), mendur ilang sampah menjadi produk baru (*Recycle*), serta memanfaatkan bank sampah untuk pengelolaan lebih lanjut seperti pembuatan kompos dari sampah organic atau mengubah plastik menjadi kerajinan dan bahan baku.

Gambar 3.122
Sosialisasi terkait Perda Pengelolan Sampah



Sumber : *DLHPKPP Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Gambar 3.123
Melakukan Koordinasi Dengan Camat Terkait Pengelolaan Sampah



Sumber : *DLHPKPP Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut tabel perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggaran indikator kinerja Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah tahun 2025 :

Tabel 3.284
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	43,51%	94,25%	-50,74%

Capaian Kinerja untuk indikator Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah hanya mencapai 43,51%, sementara Penyerapan Anggaran sudah sangat tinggi, yaitu sebesar 94,25%.

Kesenjangan yang cukup besar ini menghasilkan nilai Tingkat Efisiensi sebesar -50,74% (minus). Nilai negatif ini mengindikasikan bahwa penggunaan sumber daya belum berjalan secara efisien, di mana alokasi anggaran yang terserap hampir maksimal tidak berbanding lurus dengan output volume sampah yang berhasil terolah di fasilitas pengolahan. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap proses operasional atau kemungkinan adanya kendala teknis di lapangan yang menyebabkan biaya operasional tinggi namun hasil produksi atau layanan pengolahan sampah belum mencapai target yang ditetapkan atau bisa mengevaluasi target kinerja yang ditetapkan terlalu tinggi pada tahun 2025 ini.

C. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh pengumpulan sampah

Selain indikator persentase timbulan sampah terolah pada fasilitas pengolahan, sebagai ukuran keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, khususnya dalam upaya meningkatkan pengelolaan sampah dilihat juga pada indikator Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah.

Berdasarkan data yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, dapat dihitung proporsi Rumah Tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah Tahun 2025 sebagai berikut :

$$Proporsi\ RT\ dg\ Layanan\ Penuh\ Pengumpulan\ Sampah = \frac{\text{Jumlah RT yang terlayani penuh}}{Total\ RT}\ x\ 100\%$$

$$Proporsi\ RT\ dg\ Layanan\ Penuh\ Pengumpulan\ Sampah = \frac{780}{144.529}\ x\ 100\% = 0{,}54\ \%$$

Dari perhitungan diatas, proporsi RT dengan layanan penuh pengumpulan sampah di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah sebesar 0,54%.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Tahun 2025

Sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Padang Pariaman Tahun 2025 – 2029, target IKU proporsi RT dengan layanan penuh pengumpulan sampah Tahun 2025 ditetapkan sebesar 40,87%. Dari perhitungan proporsi RT dengan layanan penuh pengumpulan sampah Tahun 2025 di atas, dapat disajikan perbandingan target dan realisasi capaian IKU tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.285
Perbandingan Target Dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025
Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	40,87	0,54	1,32%	Kurang Berhasil

Sumber : *DLHPKPP Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Tahun 2025 Kabupaten Padang Pariaman hanya sebesar 0,76% sangat jauh dari target yang ditetapkan sebesar 40,87%, dengan tingkat ketercapaian hanya sebesar 1,86% (Kurang Berhasil).

b) Perbandingan Target dan Realisasi Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Tahun 2024 dan 2025

Dikarenakan Indikator Kinerja Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah merupakan indikator yang baru dipakai Tahun 2025, tidak terdapat data target dan realisasi tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan.

c) Perbandingan Realisasi Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan penuh pengumpulan sampah Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan Target RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Realisasi Indikator Kinerja Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.286
Perbandingan Realisasi Kinerja Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	40,87	46,7	52,53	58,36	64,19	0,54	-	-	-	-

Sumber : *DLHPKPP Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Realisasi Indikator Kinerja Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah pada tahun awal RPJMD yakni Tahun 2025 dengan realisasi 0,76 sementara target yang ditetapkan sebesar 40,87. Jika dibandingkan dengan target keseluruhan pada jangka menengah, angka capaian ini masih sangat jauh dari yang diharapkan, sehingga

perlu upaya sangat ekstra untuk pencapaiannya hingga akhir RPJMD yang ditargetkan mencapai 70,02%.

d) Perbandingan Realisasi Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Tahun 2025 dengan Target Nasional

Realisasi Indikator Kinerja Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah pada tahun 2025 dengan realisasi 0,54%, memperlihatkan masih sangat sedikitnya persentase rumah tangga yang diberikan layanan pengumpulan sampah di Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini memperlihatkan belum optimalnya pengelolaan sampah di Kabupaten Padang Pariaman.

Jika dibandingkan dengan target nasional yang mengharapkan 100% sampah terkelola, capaian indikator Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan penuh pengumpulan sampah yang masih sangat kecil, menjadi tantangan besar bagi Kabupaten Padang Pariaman dalam peningkatan pengelolaan persampahan.

e) Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan penuh pengumpulan sampah Serta Solusi Yang Telah Dilakukan

Meningkatnya capaian Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung yaitu :

- Sarana & Infrastruktur: Ketersediaan armada pengangkut sampah, tempat sampah terpilah, dan TPS/TPS3R yang dekat.
- Kesadaran Masyarakat: Pemahaman tinggi mengenai pentingnya pengelolaan sampah dan partisipasi aktif dalam pemilahan dari sumber.
- Kebijakan/Regulasi: Adanya Peraturan Pemerintah (No. 81/2012) dan peraturan daerah yang mengatur tata cara pengelolaan sampah.
- Sistem Pengangkutan Teratur: Jadwal pengangkutan sampah yang konsisten oleh petugas ke TPA.

Terdapat beberapa hal yang menghambat pencapaian kinerja antara lain :

- Minim Infrastruktur: Kurangnya sarana pemilahan (58,82%) dan aksesibilitas tempat pembuangan sampah.
- Belum adanya TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) : Kabupaten Padang Pariaman belum mempunyai lahan sendiri untuk tempat pemrosesan akhir sampah. TPA yang ada sekarang masih bersifat open dumping . sehingga belum adanya tempat untuk melakukan pengolahan sampah untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.
- Perilaku/Kebiasaan: Kurangnya kesadaran, keterbatasan waktu (23,53%), dan kebiasaan membuang sampah sembarangan atau dibakar.
- Kurang Edukasi: Minimnya pemahaman teknis pengelolaan sampah rumah tangga.
- Faktor Geografis/Teknis: Kesulitan jangkauan armada ke permukiman. Dan armada di Dinas lIngkungan hidup minim.

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah sebagai berikut :

- Perluasan Cakupan Layanan Pengumpulan Sampah

- Penyediaan dan Peningkatan Sarana Prasarana
- Penguatan Regulasi dan Kebijakan
- Digitalisasi dan Monitoring Layanan
- Membuat inovasi dengan cara mengajak Masyarakat melakukan pemilahan sampah dari sumber nya dan pelayanan penjemputan sampah ke rumah Masyarakat

f) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan penuh pengumpulan sampah

Program yang mendukung kegiatan dalam pencapaian indikator kinerja Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah yaitu Program Pengelolaan Persampahan dengan total pagu tahun 2025 sebesar Rp. 801.572.949,00 dan realisasi sebesar Rp. 755.487.067,00 (94,25%). Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penanganan sampah melalui pengangkutan
   Bentuk kegiatan ini berupa pengangkut sampah di 30 (tiga puluh) lokasi yaitu di PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk, SMA Negeri 1 Batang Anai, PT. PLN Unit Induk Pembangkitan sumatera bagian selatan unit pelaksana pembangkitan bukittinggi plta singkarak,SMP Negeri 1 Lubuk Alung, Rumah Makan Kiambang Raya , Pasar Nagari Sungai Limau, PT. Bumi Sarimas Indonesia, PT. Usaha Inti Padang, SMP Negeri 1 Sintuak Toboh Gadang, Pasar Usang, SMP Negeri 1 Enam Lingkung, Pasar Nagari Cimpago Kampung Dalam, Pasar Sicincin, Rumah Sakit Paru Prov. SUMBAR, Pasar Pakandangan, RSUD Padang Pariaman, Pesantern Nurul Yaqin, PT. Sumatera Tropical Spices, Pesantren Subbulusalam, PT. Angkasa Pura II, PT. HKI, Dinas Kesehatan, PT. Jaya Sentrikon, SMA Negeri 1 Lubuk Alung, Klinik RMC Ringan-Ringan, Pasar Pauh Kamba, Klinik Utama Mata Padang Eye Center Padang Pariaman, SMP N 1 Sintoga. Kegiatan ini merupakan Penanganan Sampah melalui pengangkutan dengan uraian tugas Petugas sampah mengambil sampah dari perusahaan atau pasar yang sudah melakukan kerjasama dan membuang sampah tersebut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ada di Ladang Laweh Sicincin Kecamatan 2x11 Enam Lingkung.
2. Pengurangan sampah melali pendauran ulang sampah
   Rencana kegiatan pengurangan asampah melalui daur ulang fokus pada pemilahan sampah di sumber, pengolahan organik menjadi kompos (biopori/komposter) dan anorganik menjadi produk baru (ecobrick, kerajinan, bahan baku) melalui program seperti bank sampah didukung edukasi Masyarakat tentang 3R (Reduce, Reuse, Recycle), serta pemasaran produk daur ulang untuk menciptakan nilai ekonomis dan lapangan kerja baru dengan tujuan utama mengurangi timbulan sampah TPA. Kegiatan ini merupakan pengurangan sampah melalui pendauran ulang dilaksanakan menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang dimulai dari pemilahan sampah disumbernya (organic dan anorganik) membersihkan sampah anorganik, memanfaatkan Kembali barang layak pakai (*Reusel*), mendur ilang sampah menjadi produk baru (*Recycle*), serta memanfaatkan bank sampah untuk pengelolaan lebih lanjut seperti pembuatan kompos dari sampah organic atau mengubah plastik menjadi kerajinan dan bahan baku.

Gambar 3.124
Melakukan Sosialisasi dan MoU SSK



Sumber : *DLHPKPP Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Gambar 3.125
Monitoring dan Pemasangan Spanduk Dilarang Membuang Sampah



Sumber : *DLHPKPP Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut tabel perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggaran indikator kinerja Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah tahun 2025 :

Tabel 3.287
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	1,86 %	94,25%	-92,39%

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk sasaran "Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan" menunjukkan kondisi yang memerlukan perhatian khusus. Indikator kinerja Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah pada tahun 2025 tercatat hanya mencapai realisasi fisik sebesar 1,86%. Rendahnya capaian fisik ini berbanding terbalik dengan Penyerapan Anggaran yang sudah mencapai angka 94,25%.

Kondisi tersebut menghasilkan nilai Tingkat Efisiensi sebesar -92,39%. Defisit efisiensi yang sangat signifikan ini mengindikasikan bahwa penggunaan sumber daya finansial yang telah terserap hampir sepenuhnya belum mampu mendorong peningkatan jangkauan layanan pengumpulan sampah secara luas kepada rumah tangga.

Berdasarkan tingkat efisiensi yang menunjukkan angka -92,14%, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap penetapan target kinerja maupun mekanisme operasional di lapangan.

SASASARAN STRATEGIS 17

Menurunnya Risiko Bencana

Kabupaten Padang Pariaman terletak pada dua jalur patahan lempeng dunia, yaitu Lempeng Eurasia dan Lempeng Indo-Australia, serta memiliki kondisi topografi yang dilalui oleh banyak anak sungai sehingga menjadikan wilayah ini memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi.

Berdasarkan data Pusdalops Kabupaten Padang Pariaman, pada Tahun 2025 telah terjadi 332 kejadian bencana dari 10 jenis ancaman bencana di Kabupaten Padang Pariaman. Dampak dari kejadian bencana tersebut mengakibatkan 46.028 jiwa yang menjadi korban bencana, dengan rincian 11 korban meninggal, 4 korban hilang , 36.364 jiwa yang menderita dan 2.861 jiwa yang mengungsi. Kejadian bencana ini juga mengakibatkan berbagai kerusakan seperti rumah warga, fasiltas dan infrastruktur masyarakat. Sebanyak 9.674 rumah terdata rusak baik yang rusak ringan, rusak sedang, maupun rusak berat. Sebanyak 22 sarana pendidikan mengalami kerusakan, 51 sarana ibadah, 3 unit sarana, 4 unit perkantoran dan 52 bangunan lainnya dan 60 jembatan juga mengalami kerusakan. Dari semua kerusakan tersebut taksiran kerugian mencapai 1.378.810.308.133 rupiah.

Berikut disajikan data kejadian bencana di Kabupaten Padang Pariaman selama Tahun 2025 :

Tabel 3.288
Data Kejadian Bencana di Kabupaten Padang Pariaman Selama Tahun 2025

No.	Jenis Bencana	Banyak Kejadian/Bencana
1	Abrasi Pantai/Gelombang Pasang	2
2	Erosi Sungai	1
3	Banjir	89
4	Banjir Bandang	-
5	Karhutla	1
6	Tanah Longsor	54
7	Orang Hilang	5
8	Angin Kencang/Puting Beliung/Cuaca Ektream	178
9	Tenggelam	2
10	Gempa Bumi	-
Jumlah		**332**

Sumber : *BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Menurunya risiko bencana di Kabupaten Padang Pariaman, dilihat dari capaian indikator Indeks Risiko Bencana dari tahun ke tahun. Indeks Risiko Bencana dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar,

kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Formulasi yang digunakan untuk menghitung Indeks Risiko Bencana adalah sebagai berikut :

$$Indeks\ Resiko\ Bencana = Bahaya\ x\ \frac{\text{Kerentanan}}{Kapasitas}$$

Perhitungan dan penetapan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dilaksanakan melalui portal aplikasi **https://inarisk.bnpb.go.id** yang disediakan dan diverifikasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Melalui surat BNPB Nomor B-32/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026 tanggal 30 Januari 2026 perihal Penyampaian IKD 2025 dan IRB 2025 di Provinsi Sumatera Barat, didapat Indeks Risiko Bencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah sebesar 163,66.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Risiko Bencana Tahun 2025

Tabel 3.289
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Risiko Bencana Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Indeks Risiko Bencana	Indeks	150,89	163,66	92,19	Berhasil

Sumber : *BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja Indeks Risiko Bencana pada tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 150,89, tapi masih dapat dikatakan berhasil dengan capaian 92,19%. Capaian ini mengindikasikan bahwa upaya-upaya penanggulangan bencana yang dilaksanakan telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan tingkat risiko bencana di daerah, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

b) Perbandingan Realisasi Indeks Risiko Bencana Tahun 2024 dan 2025.

Tabel 3.290
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Risiko Bencana Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun 2024				Tahun 2025			Interpretasi
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Risiko Bencana	Indeks	-	152,17	-	150,89	163,66	92,19	Berhasil

Sumber : *BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Indeks Risiko Bencana (IRB) pada prinsipnya merupakan indikator yang diharapkan menurun. Sehingga diharapkan setiap tahunnya nilainya dapat diturunkan yang berarti nilai resikonya berkurang.

Dilihat dari tabel diatas, nilai IRB Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 terjadi kenaikan dari nilai Tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa resiko bencana padang pariaman meningkat dari tahun 2024. Hal ini dapat terjadi karena beberapa fakor diantara meningkatnya tingkat bahaya dan kerentanan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman, salah satunya karena bertambahnya jenis ancaman bencana yaitu ”Likuifaksi”.

Selan ini faktor lain yang mengakibatkan peningkatan nilai IRB dikarenakan berbedanya *baseline* data perhitungan IRB pada komponen Bahaya dan Kerentanan yang digunakan oleh BNPB dalam penilaian IRBI tahun 2024 dan 2025.

c) Perbandingan Realisasi Indeks Risiko Bencana Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah.

Tabel 3.291
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Risiko Bencana Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Risiko Bencana	Indeks	150,89	150,88 - 149,61	149,60 - 148,33	148,32 - 147,05	145,76 - 144,49	163,66	-	-	-	-

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka menengah, sasaran strategis menurunnya risiko bencana yang diukur melalui Indeks Risiko Bencana (IRB) bahwa realisasi tahun 2025 perlu mendapatkan penguatan lebih besar. Realisasi Tahun 2025 sebesar 163,66 masih belum mencapai Target awal RPJMD yang ditetapkan 150,89. Demikian juga dengan target target-target tahun berikutnya yang ditargetkan penurunan secara bertahap hingga mencapai 144,49 pada tahun 2029. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana masih perlu upaya lebih kuat untuk dapat memberikan dampak positif terhadap pengendalian dan penurunan risiko bencana. Secara keseluruhan, capaian ini mendukung arah pencapaian sasaran strategis jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

d) Perbandingan Realisasi Indeks Risiko Bencana Tahun 2025 dengan Provinsi

Tabel 3.292
Perbandingan Realisasi Indeks Risiko Bencana Tahun 2025 Kabupaten dengan Provinsi

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025		Keterangan
		Kabupaten	Provinsi	
Indeks Risiko Bencana	Indeks	163,66	176,82	Dibawah Provinsi

Sumber : *BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Berdasarkan tabel diatas, dapat diperbandingan realisasi Indeks Risiko Bencana (IRB) tahun 2025 antara Kabupaten Padang Pariaman dengan provinsi Sumatera Barat, yang memperlihatkan bahwa IRB Padang Pariaman lebih rendah dari IRB Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa resiko bencana di Kabupaten Padang Pariaman lebih rendah dari resiko bencana rata-rata daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat.

e) Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Realisasi Indeks Risiko Bencana Tahun 2025 dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa nilai IRB Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2025 terjadi kenaikan jika dibandingkan dengan nilai IRB pada tahun 2024. Hal ini terjadi dikarenakan perbedaan *baseline* data yang digunakan oleh

BNPB dalam menghitung nilai IRBI pada tahun 2024 dan 2025. IRBI pada tahun 2024 dihitung dengan data pada komponen Ancaman *(Hazard)* dan Kerentanan *(Vulberability)* yang mengacu pada KRB 2013. Sedangkan pada tahun 2025 terdapat pemutakhiran *baseline* dimana ancaman (H) digunakan adalah yang mengacu pada KRB Provinsi 2022-2026 dan Kerentanan (V) digunakan dasar kerentanan Tahun 2025.

Selain itu yang menyebabkan kenaikan nilai IRB Kabupaten Padang Pariaman dikarenakan ditambahkannya jenis ancaman bencana yang terdapat di Kabupaten Padang Pariaman yaitu bencana Likuifaksi, sehingga otomatis akan menngkatkan nilai pada komponen H (Hazard).

Sedangkan pada komponen Kapasitas (C) yang berfungsi sebagai penyebut dalam perhitungan rumus IRBI akan semakin baik jika nilai pada Komponen C semakin meningkat setiap tahunnya. Komponen C dimaksud pada rumus diatas mengacu pada nilai IKD (Indeks Ketahanan Daerah) yang dikeluarkan oleh BNPB. Semakin meningkat nilai IKD memperlihatkan semakn meningkat ketahanan suatu daerah dalam menghadapi ancaman dan kerentanan bencana. Semakin meningkat nilai IKD maka semakin menurun tingkat resiko bencana daerah tersebut.

Berdasarkan surat BNPB perihal Penyampaian IKD 2025 dan IRB 2025 di Provinsi Sumatera Barat, nilai IKD Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan sebesar 0,52, meningkat dari tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 0,49. Hal ini menandakan telah meningkat nilai ketahanan Kabupaten Padang Pariaman yang selanjutnya menjadikan peningkatan pada komponen Kapasitas (C) pada perhitungan nilai IRBI.

Adapun faktor yang dapat mendukung upaya penurunan nilai IRB ini diantaranya :

1. Peningkatan kapasitas daerah, dengan peningkatan kapasitas pada Nagari Tangguh Bencana, pemberian pelatihan dan simulasi kebencanaan rutin kepada masyarakat dan penguatan sistem komando dan koordinasi.
2. Penguatan sistem peringatan dini, dengan adanya pemberian batuan dari program IDRIP yang memberikan bantuan Penyediaan dan pemsangan EWS, serta sosialisasi pengunaan EWS. Selain itu pengutan sistem peringatan dini dapat ditingatkan degan pemerian inforasi bencana secara cepat melalui berbagai media serta kerja sama aktif BPBD dengan BKMG dan PVMBG dalam penyampaian informasi kepada masyaraat terkait potensi bencana yang akan terjadi.
3. Integrasi PRB dalam perencanaan pembangunan, Pengarusutamaan PRB dalam penyusunan RPJMD dan RKPD.
4. Dukungan kebijakan dan anggaran, Ketersediaan anggaran kesiapsiagaan, adanya dukungan kepala daerah dan meningkatnya kolaborasi lintas sektor dan dunia usaha.

Selanjutnya faktor yang dapat menghambat kinerja IRBI ini diantaranya adalah :

1. Keterbatasan kapasitas BPBD, SDM BPBD yang masih terbatas dan masih belum tersertifikasi, sarana prasarana tidak memadai dan masih minimnya pelatihan dan simulasi.
2. Tingginya kerentanan wilayah, Permukiman di kawasan rawan bencana dan tingginya kepadatan penduduk dan dampak dari kerusakan lingkungan.
3. Ancaman bencana yang meningkat akibat dampak perubahan iklim yang mengakibatkan intensitas dan frekuensi bencana meningkat dan munculnya jenis bencana baru.

4. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor, PRB belum menjadi prioritas OPD lain dan data dan informasi belum terintegrasi serta peran masyarakat dan dunia usaha belum maksimal
5. Perencanaan dan penganggaran belum berbasis risiko, IRBI belum dijadikan dasar penentuan program dan pembangunan belum mempertimbangkan peta rawan bencana

Dari berbagai faktor pendukung dan penghambat yang telah dijelaskan diatas dapat diambil beberapa alternative solusi yang dapat dilakukan untuk mencapai target nilai IRBI yang telah ditentukan, yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas Bencana
   Peningkatan kapasitas dapat dilakukan dengan cara peningkatan kompetensi SDM BPBD dan relawan, pelatihan teknis kebencanaan dan manajemen risiko serta penguatan program Desa/Nagari Tangguh Bencana
2. Pengurangan Kerentanan Bencana
   Pengurangan kerentanan dapat dilakukan dengan cara penataan kawasan rawan bencana dan peningkatan perlindungan kelompok rentan.
3. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana
   Untuk dapat melakukan penguatan sistem kesiapsiagaan maka dapat dilakukan pengembangan sistem peringatan dini, penyusunan rencana kontinjensi serta simulasi dan gladi rutin kesiapsiagaan bencana.
4. Peningkatan Kolaborasi Penanggulangan Bencana
   Upaya kolaboratif dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak seperti perguruan tinggi, media dan dunia usaha. Pelibatan masyarakat dan komunitas lokal juga perlu ditingkatkan serta pemanfaatan teknologi informasi untuk penanggulangan bencana.

Selain itu, upaya pengurangan risiko bencana tidak dapat dilaksanakan oleh BPBD secara sendiri, melainkan memerlukan sinergi dan kerja sama lintas perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Oleh karena itu, penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan OPD terkait seperti perangkat daerah yang menangani pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, sosial, kesehatan, pendidikan, serta lingkungan hidup terus dilakukan agar upaya penanggulangan bencana dapat berjalan lebih efektif dan terpadu.

f) Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Indeks Risiko Bencana

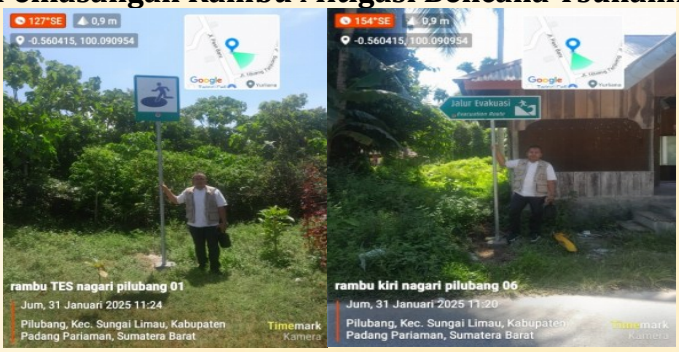
Program yang digunakan dalam mendukung pencapaian kinerja adalah Program Penanggulangan Bencana. Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan upaya pengurangan risiko bencana di daerah. Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja antara lain Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana. Melalui kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana, BPBD melakukan pengumpulan, pengolahan, serta penyebarluasan informasi terkait potensi dan kerawanan bencana kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Informasi tersebut menjadi dasar dalam meningkatkan kewaspadaan masyarakat serta sebagai

bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah agar lebih memperhatikan aspek mitigasi bencana.

Sementara itu, melalui Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, BPBD melaksanakan berbagai upaya peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam menghadapi potensi bencana, antara lain melalui sosialisasi kebencanaan, pelatihan, simulasi penanggulangan bencana, serta pembinaan desa/kelurahan tangguh bencana. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat sehingga mampu mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi bencana. Selain itu, dalam mendukung penanganan pada saat terjadi bencana juga dilaksanakan Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, yang mencakup sub kegiatan Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan penanganan korban bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi sehingga dapat meminimalisir korban jiwa serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Di samping itu, terdapat pula Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang mencakup Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota, yang meliputi upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana serta pemulihan kondisi masyarakat dan infrastruktur yang terdampak bencana. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan proses pemulihan pascabencana dapat berjalan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Pada tahun 2025 alokasi anggaran BPBD Kabupaten Padang Pariaman sebesar untuk mendukung indikator kinerja Indeks Risiko Bencana Rp. 6.236.143.087,00 dengan total realisasi pada akhir tahun sebesar Rp. 6.150.425.539,00 yang jika dipersentasekan sebesar 98,63%.

Gambar 3.126
Pemasangan Rambu Mitigasi Bencana Tsunami



Sumber : *BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Gambar Gambar 3.127
Sosialisasi dan Latihan Evakuasi Mandiri Bencana Gempa Bumi



Sumber : *BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Gambar 3.128
Kegiatan Survey dan Sosialisasi Pemasangan *Early Warning System (EWS)* dan Survey Lokasi di Nagari Ulakan dan Nagari Katapiang



Sumber : *BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Gambar 3.129
Sosialisasi Pemasangan HF Radar Tsunami di Nagari Tapakih



Sumber : *BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Gambar 3.130
Apel Siaga Bencana di Tugu Gempa, Korong Lubuak Laweh, Nagari Tandikat Utara, Kec. VII Koto Patamuan



Sumber : *BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut tabel perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggaran indikator kinerja Indeks Risiko Bencana tahun 2025 :

Tabel 3.293
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja
Indeks Risiko Bencana Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Menurunya Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	92,19%	98,63%	-6,44%

Sasaran Strategis "Menurunnya Risiko Bencana" menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Indikator Indeks Risiko Bencana pada tahun 2025 berhasil mencapai angka realisasi sebesar 92,19%. Capaian ini selaras dengan dukungan pembiayaan yang optimal, di mana Penyerapan Anggaran tercatat mencapai 98,63%.

Meskipun secara fungsi operasional target telah mendekati angka 100%, namun berdasarkan perhitungan efisiensi anggaran dan efisiensi kinerja, diperoleh nilai Tingkat Efisiensi sebesar -6,44% (minus). Angka ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target penurunan risiko bencana yang ditetapkan, BPBD Kabupaten Padang Pariaman sebagai perangkat daerah pengampu memerlukan serapan anggaran yang hampir maksimal. Hal ini umum terjadi pada program penanggulangan bencana yang bersifat preventif dan mitigatif, di mana operasionalisasi program memerlukan biaya yang cukup besar untuk memastikan kesiapsiagaan infrastruktur dan sumber daya manusia tetap terjaga sepanjang tahun anggaran berjalan.

SASARAN STRATEGIS 18

Meningkatnya Rasa Aman dan Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Kehidupan Masyarakat

Kabupaten Padang Pariaman memiliki karakter sosial yang berlandaskan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat. Nilai tersebut tercermin dalam tata kelola kehidupan nagari, peran ninik mamak dan alim ulama, serta aktivitas keagamaan dan sosial budaya yang masih terjaga. Kondisi ini menjadi modal sosial dalam mendukung mewujudkan kehidupan sosial yang religius, harmonis, dan berbudaya.

Dalam kerangka tersebut, kehidupan masyarakat yang tentram dan harmonis dalam keberagaman agama diharapkan tercapai melalui meningkatnya rasa aman dan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dalam 2 (dua) indikator utama yaitu Indeks Keamanan Daerah dan Angka Kriminalitas Daerah.

A. Indeks Keamanan Daerah

Indeks Keamanan Daerah merupakan indikator yang menggambarkan tingkat keamanan, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat dalam suatu wilayah. Indeks ini dipengaruhi oleh angka kriminalitas, tingkat penyelesaian gangguan trantibum, kepatuhan terhadap Peraturan Daerah, serta efektivitas penanganan kejadian darurat. Indeks Keamanan Daerah dihitung berdasarkan tiga komponen utama yaitu angka kriminalitas, persentase perempuan korban kekerasan, dan persentase capaian layanan waktu tanggap kebakaran. Ketiga indikator tersebut menggambarkan kondisi keamanan wilayah dari sisi tingkat kriminalitas, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta kesiapsiagaan layanan darurat kebakaran. Dengan demikian, nilai Indeks Keamanan Daerah memberikan gambaran umum mengenai tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat serta efektivitas pelayanan penanganan keadaan darurat di Kabupaten Padang Pariaman.

Rumus Perhitungan Indeks Keamanan Daerah Adalah sebagai berikut :

$$Indeks\ Keamanan\ Daerah = ((100 - AK)x40\%) + (PrKTPPOx30\%) + (RTx30\%)$$

Keterangan :

AK = Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk
PrKTPPO = Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Terlayani
RT = Persentase Capaian Layanan Waktu Tanggap Darurat Kebakaran

Sementara angka kriminalitas per 10.000. penduduk dapat dihitung dengan rumus :

$$Angka\ Kriminalitas/10.000 = \frac{\text{Jumlah Kriminalitas Tahun t}}{Jumlah\ Penduduk\ Tahun\ t}\ x\ 10.000$$

Berdasarkan data pada Buku Padang Pariaman Dalam Angka 2026, didapat data jumlah kriminalitas Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah 879 kejadian dan Jumlah Penduduk Tahun 2025 adalah 467.040 jiwa. Dengan data tersebut dapat dihitung Angka Kriminalitas (AK) sebagai berikut :

$$Angka\ Kriminalitas\ (AK)/10.000 = \frac{879}{467.040}x\ 10.000 = 18{,}82$$

Sedangkan berdasarkan data dari Dinas Sosial, Perempuan dan Perlindungan Anak, PrKTPPO = 100% dan Angka Respon Time (RT) Kebakaran adalah RT = 120/124 x100%

= 97% berdasarkan kompilasi data pemadaman kebakaran tahun 2025 dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Padang Pariaman.

Dari data-data di atas, dapat dihitung Indeks Kemanan Daerah sebagai berikut :

$$Indeks\ Keamanan\ Daerah = ((100 - AK)x40\%) + (PrKTPPOx30\%) + (RTx30\%)$$
$$Indeks\ Keamanan\ Daerah = (81{,}18x40\%) + (100x30\%) + (97x30\%)$$
$$Indeks\ Keamanan\ Daerah = 32{,}47 + 30 + 29{,}1 = 91{,}57$$

a) Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Keamanan Daerah Tahun 2025

Tabel 3.294
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Keamanan Daerah Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Indeks Keamanan Daerah	Indeks	67,37	91,57	135,92	Sangat Berhasil

Sumber : *Satpol PP dan Damkar Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Indikator Kinerja Utama Indeks Keamanan Daerah pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari target yang ditetapkan sebesar 67,37 realisasinya mencapai 91,57 melampaui target yang ditetapkan dengan tingkat ketercapaian mencapai 135%. Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi keamanan daerah relatif kondusif dan terkendali, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, termasuk melalui upaya pencegahan gangguan keamanan, koordinasi antar Instansi, serta peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan. Keberhasilan ini menjadi indikator bahwa upaya peningkatan keamanan daerah telah berjalan optimal dan perlu dipertahankan serta ditingkatkan secara berkelanjutan pada tahun berikutnya.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Keamanan Daerah Tahun 2024 dan 2025

Sehubungan indikator Indeks Keamanan Daerah merupakan indikator yang baru digunakan pada tahun 2025, maka data nilai realisasi dan capaian tahun sebelumnya tidak tersedia, sehingga tidak dapat dilakukan analisa perbandingan realisasi dan capaian terhadap tahun sebelumnya.

c) Perbandingan Realisasi Indeks Keamanan Daerah Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.295
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Keamanan Daerah Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Keamanan Daerah	Indeks	67,37	66,88	67,49	67,89	68,38	91,57	-	-	-	-

Sumber : *Satpol PP dan Damkar Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Dari tabel diatas, dapat dilihat realisasi Indeks Keamanan Daerah Tahun 2025 sebesar 91,57 telah melampaui target, bahkan sampai target akhir jangka menengah. Untuk itu perlu dipertimbangkan kembali penyesuaian target yang ditetapkan.

d) Perbandingan Realisasi Indeks Keamanan Daerah Tahun 2025 dengan Realisasi Provinsi

Sehubungan indikator Indeks Keamanan Daerah merupakan indikator yang baru digunakan pada tahun 2025, maka data nilai realisasi propinsi maupun standar nasional belum diketahui. Sehingga tidak dapat dilakukan analisa terkait hal tersebut.

e) Analisa Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Capaian Indeks Keamanan Daerah

Dalam mencapai realisasi Indeks Keamanan Daerah, sesuai formulasi yang digunakan, maka dapat dijelaskan faktor-faktor yang mungkin menjadi pendukung dan penghambat pencapaian indikator ini, sebagai berikut :

1) Faktor Pendukung Keberhasilan
   - Kondisi keamanan daerah yang relatif kondusif, ditunjukkan dengan terkendalinya angka kriminalitas di masyarakat.
   - Meningkatnya koordinasi antarinstansi seperti pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pemerintah nagari dalam menjaga ketertiban umum.
   - Pelaksanaan patroli, pengawasan, dan penertiban oleh Satpol PP yang berjalan secara rutin dalam mencegah potensi gangguan trantibum.
   - Respons layanan penanggulangan kebakaran yang cukup baik, sehingga kejadian kebakaran dapat ditangani dengan cepat.
   - Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan yang cukup baik melalui kegiatan pengawasan dan pelaporan.
2) Faktor yang berpotensi menjadi Penghambat
   - Masih adanya potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di beberapa wilayah.
   - Keterbatasan sarana prasarana dan jumlah personel dalam mendukung pengawasan dan pelayanan keamanan.
   - Kemungkinan masih adanya kejadian yang tidak dilaporkan, sehingga data gangguan keamanan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil.
3) Solusi yang Telah Dilakukan
   - Meningkatkan kegiatan patroli dan pengawasan wilayah guna mencegah terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
   - Memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan perangkat nagari/desa.
   - Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga keamanan lingkungan serta pelaporan kejadian gangguan keamanan.
   - Peningkatan kesiapsiagaan layanan penanggulangan kebakaran, termasuk optimalisasi personel dan peralatan yang tersedia.

Secara umum, langkah-langkah tersebut telah mendukung tercapainya Indeks Keamanan Daerah yang sangat baik pada tahun 2025, sehingga kondisi keamanan di Kabupaten Padang Pariaman dapat tetap terjaga secara kondusif.

f) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Indikator Kinerja Indeks Keamanan Daerah

Program yang langsung menyentuh Indikator Kinerja Utama Indeks Keamanan Daerah adalah Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Pada tahun anggaran 2025 pada Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dialokasi pagu anggaran sebesar Rp. 235.198.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 233.551.505,00 total persentase realisasi anggaran untuk program ini adalah 99,30%.

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut tabel perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggaran indikator kinerja Indeks Keamanan Daerah tahun 2025 :

Tabel 3.296
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja
Indeks Kemanan Daerah Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Rasa Aman Dan Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Kehidupan Masyarakat	Indeks Kemanan Daerah	135,92%	99,30%	36,62%

Sasaran "Meningkatnya Rasa Aman Dan Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Kehidupan Masyarakat" menunjukkan performa efisiensi yang sangat impresif. Indikator Indeks Keamanan Daerah berhasil mencapai realisasi kinerja fisik sebesar 135,92%, yang berarti melampaui target yang ditetapkan sebesar 35,92%. Capaian tersebut didukung oleh Penyerapan Anggaran yang sangat optimal, yaitu sebesar 99,30% Tingkat efisiensi sebesar yang dihasilkan dari penyandingan efisiensi kinerja dan efisiensi anggaran adalah sebesar 36,62%. Tingginya efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator Indeks Keamanan Daerah mengindikasikan bahwa alokasi anggaran telah efektif digunakan untuk langkah-langkah preventif. Efisiensi ini menggambarkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk deteksi dini dan penyuluhan mampu menekan angka gangguan keamanan secara drastis, sehingga stabilitas daerah terjaga dengan biaya yang tetap terkendali.

B. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kejadian tindak pidana dalam suatu wilayah pada periode tertentu, biasanya dihitung per jumlah penduduk. Indikator ini mencerminkan tingkat keamanan dan stabilitas sosial masyarakat. Rendahnya angka kriminalitas menjadi prasyarat penting dalam menjaga iklim sosial yang kondusif serta mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan tertib.

Meskipun penanganan tindak pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum, Pemerintah Daerah melalui Dinas Satpol PP dan Damkar memiliki peran preventif melalui pengawasan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, serta deteksi dini potensi gangguan sosial. Upaya tersebut berkontribusi dalam mencegah berkembangnya

pelanggaran yang dapat bermuara pada tindak kriminal, sehingga turut mendukung pengendalian angka kriminalitas di Kabupaten Padang Pariaman.

Angka kriminalitas dihitung dengan membandingkan jumlah tindak pidana dalam satu tahun dengan jumlah penduduk, lalu dikalikan 100.000 agar hasilnya proporsional. Hasilnya menunjukkan jumlah kejahatan per 100.000 penduduk dalam satu tahun.

$$Angka\ Kriminalitas\ (AK) = \frac{\text{Jumlah Tindak Pidana}}{Jumlah\ Penduduk}\ x\ 100.000$$

Dengan rumus diatas, dapat dihitung angka kriminalitas di Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :

$$Angka\ Kriminalitas\ (AK) = \frac{879}{467.040}\ x\ 100.000 = 188{,}21$$

a) Perbandingan Target dan Realisasi Angka Kriminalitas Tahun 2025

Tabel 3.297
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Angka Kriminalitas Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Angka Kriminalitas	Angka	196,25	188,21	104,10	Sangat Berhasil

Sumber : *Satpol PP dan Damkar Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi Angka Kriminalitas Tahun 2025 sebesar 188,21 adalah lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 196,25. Sehubungan dengan Angka Kriminalitas merupakan indikator negatif, yaitu semakin rendah capaian dari target, maka diartikan semakin baik pencapaiannya, maka capaian sebesar 188,291 yang lebih rencah dari target pada tahun 2025 dimaknai sebagai capai yang sangat berhasil dengan persentase capaian sebesar 104,10%.

Hal ini dapat mengindikasikan bahwa upaya pengendalian dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berjalan efektif, serta berkontribusi pada peningkatan kondisi keamanan daerah. Ke depan, konsistensi langkah preventif, penguatan patroli, serta sinergi lintas sektor perlu terus dipertahankan agar tren positif ini dapat dijaga secara berkelanjutan.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Angka Kriminalitas Tahun 2024 dan 2025

Data pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terkait Indikator Angka Kriminalitas Tahun 2020 sd Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.298
Angka Kriminalitas Di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2025

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Tindak Kriminal	592	453	430	645	907	879
Jumlah Penduduk	430.626	438.022	447.170	451.388	459.169	467.040
Angka Kriminalitas	137,47	103,42	96,16	142,89	197,53	188,21

Sumber : *Satpol PP dan Damkar Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Berdasarkan data tersebut dapat disajikan perbandingan realisasi indikator Angka Kriminalitas Tahun 2025 dengan realisasi Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.299
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Angka Kriminalitas Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun 2024				Tahun 2025			Interpretasi
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Angka Kriminalitas	Angka	-	197,53	-	196,25	188,21	104,10	Sangat Berhasil

Sumber : *Satpol PP dan Damkar Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas Tahun 2025 sebesar 188,21 lebih rendah dari angka kriminalitas Tahun 2024 yang sebesar 197,53. Hal ini memperlihatkan bahwa tingkat kriminalitas di Kabupaten Padang Pariaman semakin menurun dan sesuai dengan arah upaya meningkatkan rasa aman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman.

Angka kriminalitas Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 tercatat sebesar 142,89, kemudian meningkat cukup signifikan pada tahun 2024 menjadi 197,53. Kenaikan ini menunjukkan adanya eskalasi tingkat kriminalitas dalam tahun tersebut. Namun pada tahun 2025 angka kriminalitas menurun menjadi 188,21. Meskipun masih lebih tinggi dibanding tahun 2023, penurunan dari 197,53 menjadi 188,21 mengindikasikan adanya perbaikan dan pengendalian situasi keamanan. Secara tren, pola yang terlihat adalah kenaikan tajam pada 2024 yang kemudian berhasil ditekan pada 2025, sehingga kondisi mulai menunjukkan stabilisasi. Ke depan, tantangannya adalah menurunkan angka tersebut kembali mendekati atau lebih rendah dari capaian tahun 2023 agar tren positif benar-benar konsisten.

c) Perbandingan Realisasi Angka Kriminalitas Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.300
Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Kriminalitas Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Angka Kriminalitas	Angka	196,25	186,44	177,12	168,27	159,86	188,21	-	-	-	-

Sumber : *Satpol PP dan Damkar Kabupaten Padang Pariaman, 2025*

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi Angka Kriminalitas Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 sebesar 188,21 telah melebihi target tahun 2025, namun masih belum melampaui target-target tahun berikutnya dalam perencanaan jangka menengah. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan upaya dalam mengendalikan ketentraman dan ketertiban, sehingga angka kriminalitas dapat meningkat pencapaiannya.

Untuk mencapai target penurunan angka kriminalitas sesuai RPJMD 2025–2029 hingga 159,86 pada tahun 2029, Kabupaten Padang Pariaman perlu memperkuat pendekatan preventif berbasis data melalui pemetaan wilayah rawan, peningkatan patroli pada jam dan lokasi risiko tinggi, serta penguatan deteksi dini di tingkat nagari.

Selain itu, sinergi lintas sektor dengan aparat penegak hukum dan perangkat daerah terkait perlu dioptimalkan untuk menangani faktor pemicu kriminalitas secara komprehensif. Evaluasi berkala secara triwulanan juga penting dilakukan agar setiap kenaikan tren dapat segera diintervensi, sehingga penurunan angka kriminalitas dapat berlangsung konsisten dan berkelanjutan setiap tahunnya.

d) Perbandingan Realisasi Angka Kriminalitas Tahun 2025 dengan Realisasi Provinsi

Untuk melihat makna capaian indikator Angka Kriminalitas Tahun 2025 pada tingkat regional, perlu dibandingkan dengan capaian Angka Kriminalitas Provinsi Sumatera Barat, yang dapat dimaknai sebagai rata-rata Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Berdasarkan data pada buku Provinsi Sumatera Barat dalam Angka 2026, dapat dihitung Angka Kriminalitas Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

$$Angka\ Kriminalitas\ (AK) = \frac{13.501}{5.914.300} x\ 100.000 = 228{,}28$$

Dengan demikian Angka Kriminalitas Provinsi Sumatera Barat adalah 228,28. Jika dibandingkan, Angka Kriminalitas Kabupaten Padang Pariaman sebesar 188,21, berada sedikit di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat, sehingga secara regional menunjukkan kondisi yang relatif terkendali. Namun demikian, upaya penurunan tingkat kriminalitas masih perlu diperkuat agar lebih kompetitif. Secara komparatif, posisi Padang Pariaman berada pada kategori menengah dan menunjukkan perlunya konsistensi langkah preventif, peningkatan deteksi dini, serta penguatan sinergi lintas sektor guna menekan angka kriminalitas secara berkelanjutan pada tahun berikutnya.

e) Analisa Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Capaian Angka Kriminalitas

Turunnya angka kriminalitas biasanya bukan terjadi kebetulan. Ada faktor yang bekerja secara sistematis. Berikut adalah beberapa faktor pendukung dalam menurunkan angka kriminalitas, antara lain:

1. Peningkatan patroli dan pengawasan
   Kehadiran aparat di lapangan (Satpol PP, Polri, Linmas) memberi efek cegah *(deterrent effect).* Pelaku jadi berpikir dua kali.
2. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten
   Ketika pelanggaran cepat ditindak dan kasus diselesaikan, muncul efek jera dan kepercayaan publik meningkat.
3. Sinergi lintas instansi
   Koordinasi antara Satpol PP, Kepolisian, TNI, pemerintah nagari/desa, dan tokoh masyarakat membuat pengawasan lebih menyeluruh.
4. Partisipasi masyarakat meningkat
   Sistem pelaporan cepat, siskamling aktif, dan kepedulian warga membantu deteksi dini gangguan keamanan.
5. Perbaikan kondisi sosial-ekonomi
   Lapangan kerja membaik, program bantuan tepat sasaran, dan pembinaan pemuda mengurangi motivasi melakukan kejahatan.
6. Pendekatan preventif dan edukatif

Sosialisasi Perda, pembinaan pelaku usaha, serta kegiatan kepemudaan dan keagamaan menekan potensi konflik sosial.

Jika dikaitkan dengan konteks daerah seperti Kabupaten Padang Pariaman, biasanya penurunan angka kriminalitas terjadi ketika strategi preventif diperkuat, patroli konsisten, dan koordinasi Forkopimda berjalan solid.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi yang dapat meningkatkan Angka Kriminalitas adalah :

1. Peningkatan Mobilitas dan Aktivitas Ekonomi
   Padang Pariaman memiliki posisi strategis sebagai wilayah penyangga Kota Padang dan dekat dengan Bandara Internasional Minangkabau. Tingginya mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi dapat meningkatkan peluang terjadinya tindak pidana, terutama kejahatan konvensional seperti pencurian dan penipuan.
2. Dinamika Sosial Masyarakat
   Pertumbuhan penduduk usia produktif serta interaksi sosial yang semakin terbuka dapat memicu konflik sosial ringan, kenakalan remaja, maupun pelanggaran hukum lainnya.
3. Faktor Ekonomi
   Tekanan ekonomi rumah tangga, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan dapat menjadi faktor pendorong terjadinya tindak kriminal tertentu.
4. Pengaruh Penyalahgunaan Narkoba dan Pergaulan Bebas
   Penyalahgunaan narkotika dan perilaku menyimpang pada kelompok usia muda seringkali menjadi pemicu tindak pidana turunan.
5. Optimalisasi Sistem Pelaporan
   Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melapor serta pencatatan yang lebih tertib juga dapat menyebabkan angka kriminalitas tercatat lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, meskipun tingkat kejadian riil tidak meningkat signifikan.

Berdasarkan data angka kriminalitas di atas, diperlukan upaya penurunan yang signifikan dan terencana. Penurunan ini harus dilakukan melalui penguatan langkah preventif, peningkatan pengawasan wilayah rawan, serta sinergi lintas sektor di Kabupaten Padang Pariaman. Mengingat karakter masyarakat berbasis nagari dan kuatnya nilai adat serta agama, pendekatan kolaboratif menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keamanan daerah.

Dengan langkah yang konsisten dan terukur, target penurunan angka kriminalitas dapat lebih realistis untuk dicapai. Beberapa langkah yang perlu dilakukan, yaitu

1. Melakukan pemetaan dan pengawasan intensif pada wilayah dan waktu rawan kriminalitas.
2. Meningkatkan patroli terpadu Satpol PP bersama Polres dan pemerintah nagari.
3. Mengoptimalkan peran Linmas, ninik mamak, dan tokoh agama dalam deteksi dini gangguan keamanan.
4. Melaksanakan sosialisasi hukum dan pencegahan kenakalan remaja secara berkelanjutan.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian angka kriminalitas secara triwulanan.

f) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Indikator Kinerja Angka Kriminalitas

Program yang langsung menyentuh Indikator Kinerja Utama Angka Kriminalitas adalah Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Sementara itu, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran bersifat tidak langsung (indirect impact) karena lebih berfungsi sebagai penguat kapasitas organisasi dan stabilitas lingkungan, bukan sebagai intervensi langsung terhadap indikator angka kriminalitas.

Pada tahun anggaran 2025 pada Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dialokasi pagu anggaran sebesar Rp 235.198.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.301
Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 235.198.000,00	Rp. 233.551.505,00	99,30%
Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 190.006.000,00	Rp. 188.509.505,00	99,21%
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Rp. 15.856.000,00	Rp. 14.890.000,00	93,91%
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 65.340.000,00	Rp. 65.247.500,00	99,86%
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 5.570.000,00	Rp. 5.494.005,00	98,64%
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Rp. 53.480.000,00	Rp. 53.249.000,00	99,57%
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Rp. 49.760.000,00	Rp. 49.629.000,00	99,74%
Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp. 45.192.000,00	Rp. 45.042.000,00	99,67%

Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Rp. 20.300.000,00	Rp. 20.265.000	99,83%
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp. 24.892.000,00	Rp. 24.777.000	99,54%
Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-	
Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	-	-	
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	-	-	

- **Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**
  Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota di Kabupaten Padang Pariaman memiliki keterkaitan langsung dengan pengendalian angka kriminalitas. Kegiatan ini terealisasi sebanyak Rp. 188.509.505,00 dengan capaian realisasi anggaran 99 %. Berikut bentuk kegiatannya :
  1. Patroli rutin dan terpadu untuk mencegah kejahatan jalanan dan gangguan ketertiban.
  2. Penertiban pelanggaran Perda (miras, PKL liar, penyakit masyarakat) dalam rangka mengurangi faktor pemicu kriminalitas.
  3. Penanganan cepat laporan masyarakat
  4. Pembinaan dan Sosialisasi oleh SATLINMAS
- **Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**
  Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota di Kabupaten Padang Pariaman memiliki keterkaitan langsung dengan pengendalian angka kriminalitas. Kegiatan ini terealisasi sebanyak Rp. 45.042.000,00 dengan capaian realisasi anggaran 99 %. Berikut bentuk kegiatannya :
  1. Sosialisasi dan pembinaan Perda/Perkada kepada masyarakat dan pelaku usaha.
  2. Patroli pengawasan dan monitoring kepatuhan terhadap Perda/Perkada.
  3. Penertiban pelanggaran (PKL di zona terlarang, reklame ilegal, jam operasional usaha).
  4. Tindakan administratif (teguran lisan/tertulis, penghentian sementara, pencabutan izin).
  5. Penyidikan oleh PPNS terhadap pelanggaran Perda.
  6. Koordinasi penegakan hukum dengan OPD terkait, Polri, dan kejaksaan.

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut tabel perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggaran indikator kinerja Angka Kriminalitas tahun 2025 :

Tabel 3.302
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja
Angka Kriminalitas Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Rasa Aman Dan Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Kehidupan Masyarakat	Angka Kriminalitas	104,10%	99,30%	4,8%

Sasaran "Meningkatnya Rasa Aman Dan Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Kehidupan Masyarakat" menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Indikator Angka Kriminalitas pada tahun 2025 berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 104,10%, yang melampaui target yang ditetapkan. Capaian fisik yang tinggi ini didukung oleh penggunaan anggaran yang sangat terukur dengan tingkat Penyerapan Anggaran sebesar 99,30%. Kondisi ini menghasilkan nilai Tingkat Efisiensi sebesar 4,8%.

Capaian ini menunjukkan bahwa situasi keamanan di daerah berada dalam kondisi yang terkendali melebihi target yang direncanakan. Angka kriminalitas yang rendah atau penurunan potensi gangguan keamanan membuktikan bahwa program-program pencegahan telah berjalan dengan efektif.

SASARAN STRATEGIS 19

Meningkatnya Pelestarian Cagar dan Warisan Budaya

Meningkatnya Pelestarian Cagar dan Warisan Budaya merupakan sasaran strategis untuk mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat yang tentram dan harmonis dalam keberagaman agama di Kabupaten Padang Pariaman. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait sasaran strategis ini adalah Persentase Warisan Cagar Budaya Yang di Lestarikan dan Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang di Lestarikan.

Mengingat indikator Persentase Warisan Cagar Budaya Yang di Lestarikan dan Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang di Lestarikan merupakan indikator yang terdapat dalam dua periode perencanaan sekaligus, yakni RPJMD 2021–2026 dan RPJMD 2025–2029, maka uraian detail mengenai realisasi kinerjanya telah dipaparkan dan dapat dilihat pada bagian evaluasi RPJMD periode 2021–2026 guna menjaga konsistensi pelaporan capaian antar-periode.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan & pelaksanaan kebijakan serta sumber daya yang di telah dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025, pagu dan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :

Tabel 3.303
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025			
Uraian	**Pagu**	**Realisasi**	**Capaian**
Pendapatan Daerah	Rp. 1.382.388.487.709,06	Rp. 1.393.989.924.755,42	100,83%
Belanja Daerah	Rp. 1.420.388.030.413,60	Rp. 1.329.966.255.978,00	93,63%

***Sumber** : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2026*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 1.382.388.487.709,06 dan realisasi sebesar Rp. 1.393.989.924.755,42 (100,83%). Sedangkan dilihat dari aspek belanja daerah di targetkan sebesar Rp. 1.420.388.030.413,60 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 1.329.966.255.978,00 dengan persentase capaian realisasi sebesar 93,48%. Adapun perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.304
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025

NO	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 176.741.930.578,00	Rp. 174.089.709.025,42	98,49%
2	Pendapatan Transfer	Rp. 1.201.646.557.131,06	Rp. 1.215.900.215.730,00	101,18%
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 4.000.000.000,00	Rp. 4.000.000.000,00	100%

***Sumber** : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2026*

3.3.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah pada tahun 2025 yang ditargetkan sebesar Rp. 176.741.930.578,00 dan terealisasi sebesar Rp. 174.089.709.025,42 (98,49%). Adapun perbandingan antara target dan realisasi masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.305
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025

No	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Pendapatan Pajak Daerah	Rp. 85.859.270.526,00	Rp. 84.061.584.978,00	97,90%
2	Pendapatan Restribusi Daerah	Rp. 74.094.672.200,00	Rp. 75.436.647.214,00	101,81%
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp. 8.728.317.039,00	Rp. 8.931.467.131,00	102,32%
4	Lain-lain PAD yang Sah	Rp. 8.059.670.813,00	Rp. 5.660.009.702,42	70,22%
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		**Rp. 176.741.930.578,00**	**Rp. 174.089.709.025,42**	**98,49%**

***Sumber** : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2026*

3.3.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer yang terdiri dari :

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID) Dan Dana Desa
2. Pendapatan Transfer antar daerah yang terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Pendapatan Transfer pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 1.317.214.256.483,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.282.716.851.539,00 (97,38%). Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.306
Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp. 1.139.034.894.000,00	Rp. 1.150.772.734.928,00	101,03%
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp. 62.611.663.131,06	Rp. 65.127.480.802,00	104,01%
Jumlah Pendapatan Transfer		**Rp. 1.201.646.557.131,06**	**Rp. 1.215.900.215.730,00**	**101,18%**

***Sumber** : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2026*

3.3.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan. Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.307
Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Dana Darurat	Rp. 4.000.000.000,00	Rp. 4.000.000.000,00	100%
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp. 4.000.000.000,00	Rp. 4.000.000.000,00	**100%**

***Sumber** : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2026*

Adapun pagu dan Realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target, sasaran strategis, dan indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.420.338.030.413,60 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.329.966.255.978,00 atau 93,63%. Pagu dan realisasi anggaran per sasaran strategis tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran Laporan Kinerja ini.

3.4 PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Tabel 3.308
Prestasi dan Penghargaan Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2025

No	Tahun	Nama Penghargaan	Tingkat	Instansi/Lembaga Penyelenggara
1	2025	Penghargaan Anugerah Harmoni Kontribusi Astra Tahun 2025	Nasional	**PT Astra International Tbk**
2	2025	Penghargaan BAZNAS Award 2025 sebagai Kepala Daerah Pendukung Gerakan Zakat Indonesia	Provinsi	**Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Barat**
3	2025	Juara 1 Festival Minang Day Culinary Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, katergori: "Smart Food B2SA Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Untuk Ranah Minang Tagok Pangan	Provinsi	**Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**
4	2025	Penghargaan kepada Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Kabupaten Padang Pariaman dengan Kategori: B (baik), yang telah melaksanakan sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar di daerah.	Nasional	**Badan Pangan Nasional**
5	2025	Penghargaan dan apresiasi sebagai peraih perangkat Kedua pada kategori Penilaian Penyaluran Dana Desa TA 2025 Terbaik	Nasional	**Kementerian Keuangan**
6.	2025	Penghargaan dan apresiasi dalam ketepatan	Nasional	**PT. TASPEN**

		penyetoran Iuran Wajib Pegawai (IWP 8%), Iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Iuran Program Jaminan Kematian (JKM) Tahun 2025		**(Persero)**
7	2025	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun Anggaran 2024	Provinsi	**Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat**
9	2025	Penghargaan Terbaik Ke- 3 Kategori Jumlah Pasar Tradisional Terbanyak Yang Melayani Kb Pada Kegiatan Pelayanan Kb Serentak Di Pasar Tradisional	Nasional	**Kementrian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga**
8	2025	Penghargaan Anugerah Kebudayaan PWI yang diserahkan dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026	Nasional	**Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat**
10	2025	Penghargaan Indeks Inovasi Daerah Tertinggi Tahun 2025	Nasional	**Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia**

Gambar 3.131
Daftar Penghargaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

PENGHARGAAN ANUGERAH KEBUDAYAAN PWI YANG DISERAHKAN DALAM RANGKAIAN PERINGATAN HARI PERS NASIONAL (HPN)



PENGHARGAAN BAZNAS AWARD 2025 SEBAGAI KEPALA DAERAH PENDUKUNG GERAKAN ZAKAT INDONESIA



JUARA 1 FESTIVAL MINANG DAY CULINARY TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025, KATERGORI: "SMART FOOD B2SA BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL UNTUK RANAH MINANG TAGOK PANGAN


Piagam Penghargaan
No. : 510 / 1923 / Pangan/2025
Diberikan kepada :
KARUPUAK SALA BAJASO&HANANA CHIPS
sebagai
JUARA 1
Festival Minang Day Culinary
Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025
"Smart Food B2SA Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Untuk Ranah Minang Tagok Pangan"
Padang, 05 November 2025
Kepala Dinas Pangan
Provinsi Sumatera Barat
Drs. Iqbal Remadi Payana, M.Si
NIP. 19680803 198809 1 001

PENGHARGAAN KEPADA OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH (OKKPD) KABUPATEN PADANG PARIAMAN


Sertifikat
SISTEM MANAJEMEN
PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR
Nomor : 335.19/PK.02.03/K/10/2025
Diberikan kepada
OKKPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN
dengan kategori
B (baik)
yang telah melaksanakan sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar di daerah sesuai :
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan
Sub Urusan Keamanan Pangan
Kepala Badan Pangan Nasional
Arief Prasetyo Adi, S.T., M.T.
Ditetapkan pada : 07 Oktober 2025
Berlaku hingga : 07 Oktober 2028

PENGHARGAAN DAN APRESIASI SEBAGAI PERAIH PERANGKAT KEDUA PADA KATEGORI PENILAIAN PENYALURAN DANA DESA TA 2025 TERBAIK


KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SERTIFIKAT
APRESIASI
diberikan kepada
Pemerintah Kab Padang Pariaman
sebagai peraih Peringkat Kedua pada Kategori Penilaian
Penyaluran Dana Desa TA 2025 Terbaik
berdasarkan data Penyaluran Dana Desa per tahun 2024 - Agustus 2025
Padang, 22 September 2025
Kepala Kanwil DJPb Provinsi
Sumatera Barat
MOHAMMAD DODY FACHRUDIN

PENGHARGAAN DAN APRESIASI DALAM KETEPATAN PENYETORAN IWP 8%, IURAN PROGRAM JKK DAN IURAN PROGRAM JAMINAN KEMATIAN (JKM) TAHUN 2025


Danantara Indonesia
taspen
PIAGAM PENGHARGAAN DAN APRESIASI
diberikan kepada :
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Atas Kerjasama Seluruh Jajaran Pemerintah Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten
Yang Telah Mendukung Program Pemerintah Dalam Ketepatan Penyetoran Iuran
Wajib Pegawai (IWP 8%), Iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
dan Iuran Program Jaminan Kematian (JKM) Tahun 2025
Branch Manager
taspen
LULUS HERIYANTO

OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) ATAS LKPD TAHUN ANGGARAN 2024



PENGHARGAAN TERBAIK KE- 3 KATEGORI JUMLAH PASAR TRADISIONAL TERBANYAK YANG MELAYANI KB PADA KEGIATAN PELAYANAN KB SERENTAK DI PASAR TRADISIONAL


KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BKKBN

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 654/KB.08/E4/2025

DIBERIKAN KEPADA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

TERBAIK III
REGIONAL LUAR JAWA BALI I

Kategori Jumlah Pasar Tradisional Terbanyak yang Melayani KB
pada Kegiatan Pelayanan KB Serentak di Pasar Tradisional

Jakarta, 11 April 2025
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd.

PENGHARGAAN ANUGERAH HARMONI KONTRIBUSI ASTRA TAHUN 2025



PENGHARGAAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KENAIKAN INDEKS INOVASI DAERAH TERTINGGI TAHUN 2025





Bab IV
Penutup

4.1 KESIMPULAN

Secara keseluruhan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 menunjukkan tren pencapaian yang positif terhadap target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap [Jumlah] indikator kinerja utama (IKU), dapat disimpulkan bahwa:

I. RPJMD Tahun 2021-2026

Pencapaian indikator sasaran terhadap capaian kinerja *(Performance Results)* Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 menggambarkan bahwa hampir semua dapat dipenuhi dan secara umum mencerminkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan dari 14 (empat belas) Sasaran Strategis, 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran seluruh sasaran tersebut telah dapat direalisasikan dengan sangat baik dengan rata-rata capaian kinerja yakni sebesar 552,55%.

Pencapaian indikator kinerja utama tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terdapat 13 (tiga belas) indikator (59,10%) dengan Kategori Sangat Berhasil, antara lain :
   1) Indikator Kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dengan realisasi 78,08 dari target 72,15;
   2) Indikator Kinerja Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah dengan realisasi 100% dari target 100%;
   3) Indikator Kinerja Persentase Warisan Cagar Budaya yang dilestarikan dengan realisasi 100% dari target 100%;
   4) Indikator Kinerja Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan dengan realisasi 100% dari target 100%;
   5) Indikator Kinerja Persentase Ketaatan Terhadap RTRW dengan realisasi 83,70% dari target 83%;
   6) Indikator Kinerja PDRB Per Kapita dengan realisasi 59,49 (Rp. Juta) dari target 58,38 (Rp. Juta);
   7) Indikator Kinerja Pengeluaran Per Kapita dengan realisasi 12,089 (Rp. Juta) dari target 11,756 (Rp. Juta);
   8) Indikator Kinerja Rata - Rata Lama Sekolah dengan realisasi 8,78 Tahun dari target 8,54 Tahun.
   9) Indikator Kinerja Opini BPK RI terhadap LKPD Atas Laporan Keuangan Daerah dengan realisasi WTP dari target WTP;
   10) Indikator Kinerja Indeks SPBE dengan realisasi 4,07 dari target 4,00;
   11) Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik dengan realisasi 4,58 dari target

4,57;

12) Indikator Kinerja Angka Usia Harapan Hidup dengan realisasi 74,04 Tahun dari target 71 Tahun;
13) Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Investasi dengan realisasi 202,60% dari target 2%.

2. Terdapat 7 (tujuh) indikator (31,82%) dengan Kategori Berhasil, yaitu:
   1) Indikator Kinerja Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah dengan realisasi 78,48% dari target 80%;
   2) Indikator Kinerja Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang dengan realisasi 63,53% dari target 73% ;
   3) Indikator Kinerja Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten dengan realisasi 71,54 (BB) dari target 73 (BB);
   4) Indikator Kinerja Indeks Merit System dengan realisasi 211,5 dari target 250;
   5) Indikator Kinerja Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik dengan realisasi sebesar 70,78 dari target sebesar 91,00;
   6) Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan dengan realisasi sebesar 5,86% dari target sebesar 5,80%;
   7) Indikator Kinerja Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB dengan realisasi 59,95% dari target 65%.

3. Terdapat 1 (satu) indikator (4,54%) dengan Kategori Cukup Berhasil, antara lain:
   1) Indikator Kinerja Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik dengan realisasi 47,17% dari target 71,04%;

4. Terdapat 1 (satu) indikator (4,54%) dengan Kategori Kurang Berhasil, antara lain:
   1) Indikator Kinerja Prevalensi Stunting dengan realisasi yang digunakan adalah realisasi sebesar 26,6% dari target 14%.

II. RPJMD Tahun 2025-2029

Pencapaian indikator sasaran terhadap capaian kinerja *(Performance Results)* Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 secara umum mencerminkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan dari 19 (sembilan belas) Sasaran Strategis, 47 (empat puluh tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran seluruh sasaran tersebut telah dapat direalisasikan dengan sangat baik dengan rata-rata capaian kinerja yakni sebesar 259,18%.

Pencapaian indikator kinerja utama tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terdapat 22 (dua puluh dua) indikator (46,81%) dengan Kategori Sangat Berhasil, antara lain :

1) Indikator Kinerja Nilai SAKIP Pemerintah Daerah dengan realisasi 71,54 dari target 71,4;
2) Indikator Kinerja Indeks SPBE dengan realisasi 4,07 dari target 4,00;
3) Indikator Kinerja Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asessment Tingkat Nasional (Literasi) dengan realisasi 62,4% dari target 54,00%;
4) Indikator Kinerja Indikator Kinerja Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asessment Tingkat Nasional (Numerasi) dengan realisasi 53,9% dari target 46,50%;
5) Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup dengan realisasi 74,04 Tahun dari target 73,97 Tahun;
6) Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Keluarga dengan realisasi 58,4 dari target 57,8;
7) Indikator Kinerja Indeks Kesejahteraan Sosial dengan realisasi 57,50 dari target 57,50;
8) Indikator Kinerja Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) dengan realisasi 20,70% dari target 20,34%;
9) Indikator Kinerja Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB dengan realisasi 0,38% dari target 0,150%;
10) Indikator Kinerja Rasio PDRB Industri Pengolahan dengan realisasi 10,71% dari target 8,43%;
11) Indikator Kinerja Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara dengan realisasi 0,442 Ribu. Orang dari target 0,125 Ribu. Orang;
12) Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Investasi dengan realisasi 202,60% dari target 2,58%;
13) Indikator Kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PDRB) dengan realisasi 30,76% dari target 30,6%;
14) Indikator Kinerja Nilai Transaksi Saham per Kapita dengan realisasi 533.131,21 Rupiah dari target 413.768 Rupiah;
15) Indikator Kinerja Indeks Desa dengan realisasi 73,26 dari target 70,00;
16) Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) dengan realisasi 76,33 dari target 60,02;
17) Indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau dengan realisasi 61,48% dari target 60,25%;
18) Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan realisasi 77,55 dari target 76,96;
19) Indikator Kinerja Indeks Keamanan Daerah dengan realisasi 91,57 dari target 67,37;
20) Indikator Kinerja Angka Kriminalitas dengan realisasi 188,21 dari target 196,25;
21) Indikator Kinerja Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan dengan realisasi 100% dari target 100%;
22) Indikator Kinerja Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan dengan realisasi 100% dari target 100%.

2. Terdapat 19 (sembilan belas) indikator (40,43%) dengan Kategori Berhasil, antara lain :
   1) Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi dengan realisasi 76,34 (data sementara) dari target 80,00;
   2) Indikator Kinerja Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK dengan realisasi 65,50% dari target 78,00%;
   3) Indikator Kinerja Indeks Inovasi Daerah dengan realisasi sebesar 82,48 dari target sebesar 87,72;
   4) Indikator Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah dengan realisasi sebesar 8,78 Tahun dari target sebesar 8,79 Tahun;
   5) Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah dengan realisasi 14,21 Tahun dari 14,42 Tahun;
   6) Indikator Kinerja Prevalensi Stunting dengan realisasi yang digunakan adalah realisasi tahun 2024 sebesar 26,6% dari target 23,9%;
   7) Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan realisasi yang digunakan adalah realisasi tahun 2024 sebesar 93,92 dari target 94,3;
   8) Indikator Kinerja Indeks Ketimpangan Gender (IPG) dengan realisasi yang digunakan adalah realisasi tahun 2024 sebesar 0,722 dari target 0,715;
   9) Indikator Kinerja Indeks Perlindungan Anak dengan realisasi yang digunakan adalah realisasi tahun 2024 sebesar 61,57 dari target 69,68;
   10) Indikator Kinerja Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB dengan realisasi 10,38% dari target 11,85%;
   11) Indikator Kinerja Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum dengan realisasi 1,26% dari target 1,36%;
   12) Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Pangan dengan realisasi yang digunakan adalah realisasi tahun 2024 sebesar 69,14 dari target 86,2;
   13) Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka dengan realisasi 6,48% dari target 6,17%;
   14) Indikator Kinerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja dengan realisasi 65,52 Juta dari target 71,78 Juta;
   15) Indikator Kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dengan realisasi 53,44% dari target 57,53-58,91%;
   16) Indikator Kinerja Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi dengan realisasi 54,57% dari target 71,20%;
   17) Indikator Kinerja Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal dengan realisasi 25% dari target 26,39%;
   18) Indikator Kinerja Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum

Jaringan Perpipaan dengan realisasi 61,48% dari target 60,25%;

19) Indikator Kinerja Indeks Risiko Bencana dengan realisasi 163,66 dari target 150,89;

3. Terdapat 6 (enam) indikator (12,76%) dengan Kategori Kurang Berhasil, antara lain:
   1) Indikator Kinerja Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) dengan realisasi 89 Orang per 100.000 Kelahiran Hidup dari target 50 Orang per 100.000 Kelahiran Hidup;
   2) Indikator Kinerja Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Nasional dengan realisasi 0,084% dari target 1,622%;
   3) Indikator Kinerja Total Dana Pihak Ketiga/PDRB dengan realisasi 2,11% dari target 8,76%;
   4) Indikator Kinerja Kapasitas Air Baku (m^3/detik) dengan realisasi 0,03 m^3/detik dari target 0,95 m^3/detik;
   5) Indikator Kinerja Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah dengan realisasi 7,11% dari target 16,34%;
   6) Indikator Kinerja Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah dengan realisasi 0,54% dari target 40,87%.

Pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman didukung dengan adanya alokasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2025 sebesar Rp. 1.382.388.487.709,06 dengan realisasi sebesar Rp. 1.393.989.924.755,42 dengan persentase capaian realisasi sebesar 100,83% dan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 1.420.388.030.413,60 dan realisasi sebesar Rp. 1.329.966.255.978,00 dengan persentase capaian realisasi sebesar 93,63%.

3.2 KENDALA DAN HAMBATAN

Meskipun mencapai hasil yang positif, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, antara lain:

1. Terjadinya bencana banjir dan tanah longsor yang signifikan pada tanggal 25 November 2025 mengakibatkan kerusakan pada sejumlah infrastruktur
2. Adanya fluktuasi harga komoditas yang berdampak pada daya beli masyarakat lokal.
3. Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur sarana dan prasarana dasar.
4. Ekonomi digital dan akses permodalan belum terintegrasi secara maksimal.
5. Keterbatasan fasilitas pengolahan sampah dan sistem manajemen limbah di tingkat rumah tangga.

6. Terdapat beberapa indikator di mana realisasinya cukup tinggi secara angka mutlak, namun belum mampu mengejar target yang ditetapkan sangat tinggi (progresif).
7. Kualitas SDM: perlu adanya akselerasi peningkatan kompetensi SDM apatur dalam mengadopsi teknologi baru di bidang pemerintahan.

4.3 LANGKAH PERBAIKAN KE DEPAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat capaian realisasi untuk beberapa indikator yang belum memenuhi terget kinerja, hal ini tidak terlepas dari adanya beberapa hambatan dan kendala. Untuk itu sebagai upaya perbaikan kedepan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan melakukan langkah konkrit melalui analisis dan evaluasi baik internal dan eksternal agar dapat dilakukan perbaikan dimasa mendatang. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan melakukan upaya akselerasi untuk pencapaian tahun berikutnya, dan akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan, sehingga resiko kegagalan dapat ditekan dan dicarikan solusi untuk mengatasinya.

Langkah-langkah kedepan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi mendalam terhadap indikator yang memiliki selisih terlalu jauh antara target dan realisasi. Perlu dilakukan penyesuaian target pada dokumen perencanaan (Perubahan RPJMD atau RKPD) agar lebih realistis (SMART: *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*);
2. Mengalokasikan anggaran pemulihan pascabencana untuk perbaikan permanen pada titik-titik rawan banjir dan longsor, serta memastikan standar pembangunan infrastruktur ke depan memiliki ketahanan terhadap anomali cuaca ekstrim;
3. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam memperkuat sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan bencana guna meminimalisir dampak kerusakan infrastruktur publik di masa mendatangaten guna mendukung konektivitas ekonomi dan ketahanan pangan;
4. Digitalisasi dan Inovasi Pelayanan Publik;
5. Mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif dengan memfasilitasi akses pasar dan modal, serta mempertahankan tren pertumbuhan investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru;
6. Mengoptimalkan sistem pengelolaan dan pelaporan data kinerja yang terintegrasi (SIMAK Kinerja) yang selaras dengan target-target daerah dalam dokumen perencanaan daerah dan di manfaatkan oleh seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;

7. Memastikan setiap indikator yang belum tercapai pada periode 2021-2026 mendapatkan perhatian khusus dalam implementasi strategi di periode RPJMD 2025-2029 demi keberlanjutan pembangunan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang berpartisipasi aktif membangun Kabupaten Padang Pariaman.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ini disusun, Kami menyadari bahwa keberhasilan Pembangunan adalah hasil kolaborasi antara pemerintah, Masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi yang bermanfaat demi terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang lebih maju , mandiri dan sejahtera.

LAMPIRAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 38 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2024-2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;

b. bahwa perubahan Indikator Kinerja Utama dapat terjadi jika terdapat perubahan dalam strategi atau prioritas pembangunan pemerintah yang harus tercermin dalam kinerja instansi yang didasarkan pada evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan kinerja tetap relevan dengan sasaran yang ingin dicapai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024-2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 6041);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk:
a. perencanaan jangka menengah;
b. perencanaan tahunan;
c. penyusunan Indikator Kinerja Individu;
d. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
e. pengukuran kinerja;
f. penyusunan laporan kinerja;
g. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
h. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 18 Januari 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 38/KEP/BPP/2024
TANGGAL 18 Januari 2024
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024-2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama	Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an Ajaran Agama yang menghasilkan Hafizh/Hafizah	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Pendidikan Al Qur'an yang menghasilkan Hafizh dan Hafizhah}}{\text{Jumlah Lembaga Pendidikan Al Qur'an Keseluruhan}} x\ 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Daerah (Bagian Kesra), Kecamatan
2.	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	$\frac{\text{Skor Toleransi} + \text{Skor Kesetaraan} + \text{Skor Kerjasama Sosial}}{3}$	Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)
3.	Meningkatnya Ketertiban Umum/Stabilitas	Persentase Penanganan Konfik Sosial di Daerah	$\frac{\text{Jumlah Konflik Sosial yang Ditangani}}{\text{Jumlah Konflik Sosial yang Terlaporkan}}$ x 100%	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
4.	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Persentase Warisan Cagar Budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang telah dilestarikan}}{\text{Jumlah Cagar Budaya yang Terdata}}$ x100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah Warisan Cagar Budaya Tak Benda yang dilestarikan}}{\text{Jumlah Warisan Budaya tak benda yang terdata}}$ x100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayah	Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang (%)	$\frac{\text{Panjang Jalan memenuhi kondisi jaringan jalan baik dan sedang}}{\text{Panjang Jalan Kabupaten}}$ x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

		Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (%)	$\frac{\text{Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas Irigasi Kabupaten}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase ketaatan terhadap RTRW	$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah/ Jiwa)	$\frac{\text{Nilai PDRB ADHB (Juta)}}{\text{Jumlah Penduduk (Jiwa)}}$ Keterangan: $PDRB_{ADHB}$ = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
		Pengeluaran Per Kapita (Rupiah)	$\frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama setahun}}{\text{banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan prioritas daya beli}}$	
7.	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata - Rata Lama Sekolah (Tahun)	$Rata - rata\ Lama\ Sekolah\ 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Keterangan: $P15+$ = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas xi = Lama sekolah penduduk ke- i	
8.	Meningkatnya Penyelenggaraan	Opini BPK RI terhadap LKPD	Hasil Opini BPK RI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Seluruh Perangkat Daerah

	Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	$Nilai\ Evaluasi\ AKIP = \sum_{k=0}^{n} nilai\ komponen$ Keterangan: Komponen 1: Perencanaan Kinerja Komponen 2: Pengukuran Kinerja Komponen 3: Pelaporan Kinerja Komponen 4: Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Seluruh Perangkat Daerah
9.	Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Merit Sistem	Hasil Penilaian Indeks Merit System dari BKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Indeks SPBE	Indeks SPBE Hasil Penilaian Kemenpan RB	Dinas Komunikasi dan Informatia
10.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai Indeks Pelayanan Publik/ Hasil Evaluasi Kemenpan RB	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	Hasil Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
11.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah mencapai umur x, pada tahun tertentu dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Stunting	Hasil SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Misikin}}{\text{Jumlah Penduduk Seluruhnya}} \text{x } 100\%$	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

12.	Meningkatnya Investasi di Daerah	Persentase Pertumbuhan Investasi	$\frac{\text{Nilai investasi periode sekarang} - \text{nilai investasi periode sebelumnya}}{\text{Nilai investasi periode sebelumnya}} \times 100\%$	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian,
13.	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB	$\frac{\text{PDRB Sektor Rill}}{\text{PDRB Total}} \times 100\%$ Keterangan: • PDRB Sektor Riil adalah total nilai tambah dari sektor riil dalam ekonomi regional. • PDRB Total adalah total nilai tambah seluruh sektor dalam PDRB.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang :

a. bahwa Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan yang bersifat strategis dan digunakan untuk menilai kinerja instansi pemerintah secara keseluruhan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan;
b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang di tetapkan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhr

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
6. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
7. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
8. Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat IKU Tahun 2025-2029 adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan:

a. menyediakan tolok ukur yang obyektif dan terukur dalam menilai keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis pembangunan daerah;
b. memberikan arah dan fokus kinerja bagi Perangkat Daerah agar selaras dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan Daerah
c. mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah melalui sistem pelaporan kinerja yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
d. menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kinerja, evaluasi kinerja, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

IKU Tahun 2025-2029 digunakan untuk:

a. perencanaan jangka menengah;
b. perencanaan tahunan dan anggaran;
c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
e. evaluasi kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 4

IKU Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini:

a. Sekretaris Daerah memfasilitasi dan membina pelaksanaan pencapaian IKU Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan bagian yang mengkoordinasikan kebijakan kinerja dan Reformasi Birokrasi;
b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan mengkoordinasikan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi Pemerintah Daerah;
c. Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengukuran dan pelaporan IKU, memeriksa keakuratan data, memberikan rekomendasi tindak lanjut untuk peningkatan kinerja, serta melaporkan hasil pengawasan kepada pimpinan daerah;

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan

Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2030

A. Target Indikator Kinerja Utama

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	3,68	4,3	4,9	5,4	5,9	6,4
Sasaran 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	80,00	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00
	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	71,4	72,19	72,99	73,79	74,59	75,39
	Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK	%	78,00	78,4	78,8	79,2	79,6	80,00
Sasaran 2 : Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung Pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	87,72	88,3	88,87	89,44	90,04	90,64
Sasaran 3 : Meningkatnya Transformasi Digital Pelayanan Publik	Indeks SPBE	Indeks	3,51	3,91	4,10	4,21	4,26	4,3
	Indeks Pemerintahan Digital Indonesia (Pemdi)	Indeks	-	1,7	2,00	2,1	2,5	2,7

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tujuan 1 : Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berdaya Saing dan Inklusif	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75,82	76,37	76,99	77,59	78,20	78,82
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,79	8,95	9,14	9,34	9,55	9,77
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,42	14,56	14,68	14,85	14,98	15,12
	Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asessment tingkat Nasional							
	Literasi	%	54,00	54,46	54,92	55,38	55,84	56,30
	Numerasi	%	46,50	46,97	47,44	47,90	48,38	48,85
Sasaran 2 : Tercapainya Masyarakat sehat dan Produktif sesuai siklus Hidup	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,97	74,07	74,17	74,27	74,37	74,47
	Prevalensi Stunting	%	23,90	22,65	21,40	20,15	18,90	17,65
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Orang/ 100.000 Kelahiran Hidup	50	50	50	50	50	80
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	57,8	59,2	60,5	61,8	63,1	64,2
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,3	94,68	95,06	95,44	95,82	96,2
	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,715	0,708	0,701	0,694	0,687	0,673
	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	69,68	69,87	70,052	70,238	70,424	70,61

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sasaran 4 : Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusi	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	57,50	60,30	66,30	72,30	75,30	81,25
Tujuan 1: Meningkatnya Perekonomian Daerah Yang Maju dan Inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,37	5,55	6,92	6,62	7,81	6,55
	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	Rp.Juta	63,57	69,14	74,81	81,6	88,77	96,26
	Eksport Barang dan Jasa	%	4,57	5,01	5,45	5,88	6,32	13,92
	Gini Ratio	%	0,251	0,250	0,249	0,248	0,247	0,246
	Tingkat Kemiskinan	%	5,01	4,79	4,55	4,29	4,03	3,78
Sasaran 1 : Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, Kehutanan, dan perikanan terhadap perekonomian daerah	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	%	20,34	20,83	21,32	21,8	22,29	22,78
Sasaran 2 : Meningkatnya kontribusi perdagangan, UMKM dan industri berbasis sektor unggulan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	11,85	13,55	15,25	16,95	18,45	20,00
	Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB	%	0,150	0,192	0,234	0,276	0,318	0,620
	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	8,43	8,6425	8',855	9,0675	9,28	11,46
Sasaran 3 : Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu.Orang	0.125	0.127	0.13	0.135	0.14	0.145
	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Nasional	%	1,622	1,612	1,602	1,582	1,572	1,831
	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,36	1,38	1,40	1,42	1,44	1,54

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sasaran 4 : Meningkatnya Kemudahan Investasi	Persentase Peningkatan Investasi	%	2,58	3,44	4,12	5,16	6,55	7,68
	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PDRB)	%	30,6	30,38	30,16	29,93	29,71	29,49
	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	%	8,76	11,59	14,42	17,26	20,09	22,93
	Nilai Transaksi Saham per Kapita	Rupiah	413.768	493.821	573.874	653.927	733.98	814.033
Sasaran 5 : Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	86,2	87,15	88,00	88,7	89,45	90,00
Sasaran 6 : Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,17	5,89	5,76	5,59	5,42	5,28
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	71,78	72,3	73,1	73,85	74,6	75,28
	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	%	57,53-58,91	57,84-59,45	58,14-59,99	58,45-60,53	58,75-61,07	59,06-61,61
	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	71,20	71,68	72,16	72,63	73,11	73,59
	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal	%	26,39	27,45	28,50	29,56	30,61	31,67
Sasaran 7 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Indeks Desa	Indeks	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00
Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	60,5	63,00	65,2	67,8	70,00	72,00

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
yang Berkelanjutan, berketahanan terhadap bencana dan Perubahan Iklim								
Sasaran 1 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	60,02	62,03	64,05	66,08	68,12	70,17
	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan	%	19,00	20,50	22,00	23,50	25,00	26,50
	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	m3/detik	0,95	0,992	1,034	1,096	1,128	1,160
	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	%	60,25	62,54	64,83	67,12	70,71	72,73
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	76,96	77,17	77,38	77,59	77,80	78,02
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	16,34	20,31	24,23	27,78	31,66	35,45
	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan penuh pengumpulan sampah	%	40,87	46,7	52,53	58,36	64,19	70,02
Sasaran 3 : Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	150,89	150,88-149,61	149,6-148,33	148,32-147,05	147,04-145,77	145,76-144,49
Tujuan 1 : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tentram dan harmonis dalam keberagaman agama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	72,15	72,5	72,9	73,2	73,55	73,87
Sasaran 1 : Meningkatnya rasa	Indeks Keamanan Daerah	Indeks	67,37	66,88	67,49	67,89	68,38	68,81

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
aman dan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan masyarakat	Angka Kriminalitas	%	196,25	186,44	177,12	168,27	159,86	151,87
Sasaran 2 : Meningkatnya pelestarian cagar dan warisan budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	85,00	86,00	87,00	88,00	88,5	89,00
	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	66,00	68,00	70,00	71,00	72,00	74,00

B. Metadata Indikator Kinerja Utama

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (KPPD) diperoleh melalui akumulasi capaian kinerja makro (CKM), capaian kinerja urusan pemerintahan (CKUP) dan perubahan kinerja makro (PKM). Ilustrasi sebagai berikut: KPPD = [CKM+CKUP] x 0.75 + [PKM] x 0.25 Berdasarkan skor kinerja yang diperoleh di atas, maka disusun ranking kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota. Status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut: No Skor Kinerja Status Kinerja 1 1.00 – 1.80 Sangat Rendah 2 1.81 - 2.60 Rendah 3 2.61 – 3.40 Sedang 4 3.41- 4.20 Tinggi 5 4.21 – 5.00 Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah Bag.Organisasi

Sasaran 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks = (Skor seluruh area perubahan / Skor maksimal) x 100	Sekretariat Daerah Bag.Organisasi
	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai = Hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB (skor akhir evaluasi)	Sekretariat Daerah Bag.Organisasi
	Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK	Metodologi yang dilakukan dalam perhitungan nilai SPI adalah: 1. Teknik sampling terdiri dari Propotional Stratified Random Sampling (Probability Sampling) yang dilakukan secara acak pada populasi unit kerja dengan memperhatikan keterwakilan setiap Unit Eselon I, zona wilayah, dan level risiko dan pemilihan sampel mendapat pengawalan dari BPS; 2. Kuisioner survei penilaian integritas (SPI) oleh KPK; 3. Variabel penliaian terdiri dari: internal (43 variabel penilaian) dan eksternal (12 variabel penilaian); 4. Perhitungan indeks: penilaian internal (0,45) + penilaian eksternal (0,45) + pendalaman FGD (0,1) – Faktor koreksi (berupa angka absolut, maksimal -17); 5. Komponen & dimensi penilaian yang terdiri dari perdangan pengaruh, pengelolaan PBJ, pnegelolaan anggaran, pengelolaan SDM, integritas dalam pelaksanaan tugas, sosialisasi anti korupsi, transparansi, pencegahan korupsi, transparansi dan keadilan layanan, dan integritas pegawai.	Inspektorat Daerah
Sasaran 2 : Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung Pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah	Perhitungan Skor Total $SPD = \sum_{i=1}^{15} Skor\ Indikator\ Satuan\ Pemda\ ke - i$ $Skor\ Jumlah\ Inovasi = Jumlah\ Inovasi\ x\ 0{,}38$ $SID = \frac{\sum_{j=1}^{n}(\sum_{i=16}^{35} Skor\ Indikator\ Satuan\ Inovasi\ ke\ i)\ Inovasi\ ke\ j}{MAX\ (10, n)} + Skor\ Jumlah\ Inovasi$ $\boldsymbol{Skor\ Total = SPD + SID}$	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

		Keterangan : n adalah Jumlah Inovasi Daerah suatu Pemerintahan Daerah Perhitungan Indeks Inovasi Daerah $$Indeks\ Inovasi\ Daerah = \frac{Skor\ Total}{Skor\ Total\ Maksimum}\ x\ 100$$ Keterangan : • Skor Total diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerinttah Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID) • Skor Total Maksimum adalah 250 • Skala IID 0 s.d 100	
Sasaran 3 : Meningkatnya Transformasi Digital Pelayanan Publik	Indeks SPBE	Indeks SPBE = (Jumlah skor dari semua domain penilaian / Skor maksimal) × 100	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Indeks Pemerintahan Digital Indonesia (Pemdi)	IPEMDI = (0,25 × A) + (0,20 × B) + (0,35 × C) + (0,20 × D) Keterangan: A : Skor Infrastruktur Digital Pemerintahan (0–100) B : Skor Kapasitas SDM Digital Pemerintah (0–100) C : Skor Layanan Pemerintah Berbasis Digital (0–100) D : Skor Tata Kelola dan Strategi Transformasi Digital (0–100)	Dinas Komunikasi Dan Informatika
Tujuan 1 : Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berdaya Saing dan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks pembangunan manusia diukur melalui tiga komponen utama: 1. Angka/Umur Harapan Hidup saat Lahir Angka Angka Harapan Hidup (AHH) saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Inklusif		ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Indikator ini merefleksikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Metodologi penghitungan indikator ini adalah pendekatan tak langsung (indirect estimation) dan distandardisasi menggunakan standar penghitungan UNDP. 2. Dimensi Pengetahuan (Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kedua indikator ini merupakan representasi dari kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan formal. HLS menggambarkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar, sementara RLS menggambarkan tingkat pendidikan stok modal manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah dan dihitung berdasarkan jumlah tahun yang ditempuh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan kedua indikator ini memanfaatkan data yang bersumber dari Susenas bulan Maret, data jumlah siswa yang menjalani pendidikan dengan bermukim dari Kementerian Agama, serta hasil inventarisasi data sektoral di kabupaten/kota. 3. Pengeluaran riil per Kapita Disesuaikan Pengeluaran riil per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas dayabeli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas modul konsumsi bulan Maret, indeks harga konsumen, serta harga komoditas non makanan hasil survei harga konsumen.	

		❖ $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ ❖ $I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ • $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ • $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ ❖ $I_{pengeluran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$ IPM=$\sqrt[3]{\text{Indeks Kesehatan} \times \text{Indeks Pendidikan} \times \text{Indeks Pengeluaran}}$	
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing	Rata-Rata Lama Sekolah	$Rata - rata\ Lama\ Sekolah\ 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ Keterangan: $P15+$ = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas xi = Lama sekolah penduduk ke- ?	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Harapan Lama Sekolah	$nEt\ Harapan\ Lama\ Sekolah = FK\ iPti = <i$ Keterangan: FK : Faktor koreksi pesantren Et : Jumlah penduduk usia I yang bersekolah pada tahun t iPt i : Jumlah penduduk usia i pada tahun t Usia (7,8, ……., n)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asessment tingkat Nasional	$\%satdik\ min.SKM = \frac{\sum_{i=1}^{n} satdik\ min.SKM}{n}$ Keterangan: $satdik\ min.\ SKM$ = Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

		nasional untuk literasi membaca atau numerasi n = Jumlah satuan pendidikan	
	Literasi	Indeks Literasi = Skor rata-rata literasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Numerasi	Indeks Numerasi = Skor rata-rata numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sasaran 2 : Tercapainya Masyarakat sehat dan Produktif sesuai siklus Hidup	Angka Harapan Hidup	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate*/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Microcomputer Program *for Demographic Analysis* (MCPDA) atau *Mortpack*	Dinas Kesehatan
	Jumlah Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000. $AKI = (JKI / JLH) X\ 100.000$ Keterangan: AKI : Angka Kematian Ibu JKI : Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu	Dinas Kesehatan
	Prevalensi Stunting	Cara perhitungan (1) Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $\text{PAB (5)P stunting} = \frac{\text{aJAB (5)P stunting}}{\text{JAB (5)}} X\ 100\%$ Keterangan $PAB(5)P$ = Prevalensi anak balita yang stunting menderita pendek (stunting)	Dinas Kesehatan

		$JAB(5)Pstunting$ = Jumlah anak balita pendek (stunting) pada waktu tertentu $JAB(5)$ = Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (2) Jumlah Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $\text{PAB (5)SP stunting} = \frac{\text{JAB (5)P } stunting}{\text{JAB (5)}} X\ 100\%$ $\text{PAB (5)SP stunting} = \frac{\text{JAB (5)SP } stunting}{\text{JAB (5)}} X\ 100\%$ Keterangan $PAB(5)P$ = Prevalensi anak balita yang stunting menderita pendek (stunting) $JAB(5)Pstunting$ = Jumlah anak balita pendek (stunting) pada waktu tertentu $JAB(5)$ = Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (3) $Prevalensi\ stunting=PAB(5)P+PAB(5)SP$	
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Keluarga	iBangga = (Skor Dimensi Ketenteraman + Skor Dimensi Kemandirian + Skor Dimensi Kebahagiaan) / 3	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IPG = (IPM Perempuan / IPM Laki-laki) × 100	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Indeks Ketimpangan Gender	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut Formula yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki laki	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

		$G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times \left(PR_p \times SE_p\right)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_p}$ $G_L = \sqrt[3]{1 \times \left(PR_L \times SE_L\right)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}$ 2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki- laki dengan rata-rata harmonic $HARM\left(G_P, G_L\right) = \left[\frac{\left(G_P\right)^{-1} + \left(G_L\right)^{-1}}{2}\right]^{-1}$ 3. Menghitung indeks masing – masing dimensi $IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}} + 1\right)}{2}$ $IPK = \frac{TPAK_P + TPAK_L}{2}$ $IP = \frac{\left(\sqrt{PR_P \times SE_P} + \sqrt{PR_L \times SE_L}\right)}{2}$ 4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata rata geometrik $G_{P,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ 5. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender $Indeks\ Kesetaraan\ Gender = \frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$ 6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender $IKG = 1 - \frac{HARM\left(G_P, G_L\right)}{G_{P,L}}$ Keterangan:	

		• GP = Indeks Perempuan • GL = Indeks Laki-laki • MTF = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan • MHPK20 = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun • PRP = Persentase perempuan di legislatif • PRL = Persentase laki-laki di legislatif • SEP = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas • SEL = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas • TPAKP = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja • TPAKL= Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja • HARM(GP,GL)= Agregasi indeks perempuan dan lakilaki dengan rata-rata harmonik • IKR = Indeks dimensi kesehatan reproduksi • IP = Indeks dimensi pemberdayaan • IPK = Indeks dimensi pasar tenaga kerja • GPL= Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik • IKG = Indeks Ketimpangan Gender	
	Indeks Perlindungan Anak	$IPA = \sum_{J=1}^{5} (W_j \; x \; Indeks \; K_j)$ Metode Perhitungan: Menghitung angka indikator penyusun Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang terdiri dari 5 klaster dengan 27 indikator: KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN 1. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang memiliki	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

		akta kelahiran 2. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah mengunjungi perpustakaan /memanfaatkan taman bacaan masyarakat 3. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah menggunakan internet 4. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang pernah mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar 5. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang ikut serta dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja atau sekolah KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF 1. Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun 2. Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak 3. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang tidak tinggal bersama kedua orang tua 4. Angka kesiapan sekolah KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN 1. Persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 Tahun yang melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan 2. Persentase balita stunting 3. Persentase anak berusia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif 4. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang konsumsi kalorinya < 1400 kkal 5. Persentase anak berusia 0-17 Tahun yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak 6. Persentase Anak berusia 0-17 Tahun yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak 7. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang merokok 8. Persentase anak berusia 12-23 Bulan yang	

		mendapatkan imunisasi dasar lengkap KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA 1. Persentase anak berusia 7-17 tahun yang tidak sekolah 2. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengunjungi peninggalan sejarah dan warisan budaya Indonesia 3. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengikuti kursus (selain bimbingan belajar) Nama Indikator Indeks Perlindungan Anak (indeks 0-100) 4. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang masih bersekolah yang pernah mengikuti ekstrakurikuler 5. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang terlibat dalam pertunjukan seni KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS 1. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja 2. Rasio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet 3. Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak berusia 7-17 Tahun (disabilitas/non disabilitas) 4. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan 5. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang telantar II. melakukan normalisasi indikator penyusun Indeks Perlindungan Anak (IPA) III. menghitung Indeks Perlindungan Anak (IPA)	
Sasaran 4 : Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusi	Indeks Kesejahteraan Sosial	IKS = (∑ nilai dimensi × bobot masing-masing dimensi) ÷ total bobot $IKS = 1/n \sum_{i=1}^{n} X_i$ • IKS = Indeks Kesejahteraan Sosial • X_1, X_2, …, X_n = Skor masing-masing dimensi kesejahteraan sosial (sudah dinormalisasi dalam skala 0–	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

		100) • n = Jumlah dimensi indikator	
Tujuan 1: Meningkatnya Perekonomian Daerah Yang Maju dan Inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	LPE=$r(k)=\frac{PDRB(k)\text{t}}{PDRB\ (k)t-1} x\ 100\%$ k : Komponen t : tahun berjalan t-1 : tahun sebelum tahun berjalan	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta $PDRB\ per\ kapita = \frac{PDRB_{ADHB}}{populasi}$ PDRBADHB = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Populasi = jumlah penduduk regional t = periode	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
	Eksport Barang dan Jasa	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) $=\frac{Ekspor\ Barang\ dan\ Jasa}{PDRB\ ADHK} x\ 100\%$ Keterangan: Ekspor Barang dan Jasa = Total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
	Gini Ratio	Rasio Gini = $1 - \sum_{i=1}^{n} (pi - pi\text{-}1)(Yi - Yi\text{-}1)$ Keterangan: pi : Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i Yi : Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i n : jumlah observasi	
	Tingkat Kemiskinan	$P_\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{z - y_i}{z}\right]^\alpha$ Keterangan: α : 0	

		z : garis kemiskinan yi : ata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i=1,2,3, ..., qi q : banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n : jumlah penduduk	
Sasaran 1 : Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, Kehutanan, dan perikanan terhadap perekonomian daerah	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	(Nilai Tambah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan / Nilai PDRB Kab.ADHB) × 100%	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Sasaran 2 : Meningkatnya kontribusi perdagangan, UMKM dan industri berbasis sektor unggulan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	(PDRB sektor perdagangan / Total PDRB) × 100%	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB	(Total volume usaha koperasi / Total PDRB Kab.ADHB) × 100%	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Rasio PDRB Industri Pengolahan	(Nilai Tambah Sektor industri pengolahan / Total PDRB Kab.ADHB) × 100%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
Sasaran 3 : Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Data jumlah tamu wisatawan mancanegara (di setiap hotel / *homestay* di daerah tertentu)	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB	(PDRB ekonomi kreatif / Total PDB) × 100%	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	(Nilai tambah penyediaan akomodasi dan makan minum / Total PDRB Kab. ADHB) × 100%	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Sasaran 4 : Meningkatnya Kemudahan Investasi	Persentase Peningkatan Investasi	((Total nilai investasi tahun berjalan - Total nilai investasi tahun sebelumnya) / Total nilai investasi tahun sebelumnya) × 100%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PDRB)	$Pembentukan\ PMTB\ (\%PDRB) = \frac{PMTB}{PDRB\ ADHK} \times 100\%$ Keterangan: Pembentukan Modal Tetap Bruto = Total PMTB berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) PDRB *ADHK*= Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	(Total Dana Pihak Ketiga / PDRB) × 100% Total Dana Pihak Ketiga (DPK) =Total DPK Bank Umum + Total DPK BPR-BPRS (di suatu provinsi) PDRB =Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku)	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
	Nilai Transaksi Saham per Kapita	Total nilai transaksi saham / Jumlah penduduk	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
Sasaran 5 : Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan	$Y(j)=\sum 9n=1 a_i X_{ij}$ 1. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan zscore dan distance to scale (0 – 100) 2. Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus: Indeks Ketahanan Pangan = penjumlahan dari Bobot masing-masing indikator dikalikan dengan Nilai standarisasi masingmasing indikator	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

		3. Mengelompokan wilayah ke dalam 6 kelompok berdasarkan cut off point IKP Keterangan Rumus: i = Indikator 1-9 j = Kab/kota a = Bobot masing-masing indikator ke-i X = Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada kab/kota ke-j	
Sasaran 6 : Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\text{TPT} = \frac{PP}{PAK}\ x\ 100\%$ Keterangan: TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah 41ingkat41 kerja (orang)	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB atas dasar harga konstan / Jumlah tenaga kerja	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	$TPAK_p = \frac{PAK_p}{P_{(15+,p)}} \times 100\%$ Keterangan: TPAKp = Tingkat Partisipas Angkatan Kerja Perempuan (%) PAKp = Jumlah angkatan kerja perempuan (orang) P(15+,p) = Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas (orang)	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	(Jumlah pekerja dengan bidang kerja sesuai latar belakang pendidikan / Total pekerja lulusan menengah-tinggi) × 100%	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal	Persentase Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal = (Pekerja penyandang disabilitas sektor formal / Angkatan Kerja Penyandang Disabillitas) × 100%	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sasaran 7 : Meningkatnya	Indeks Desa	Indeks Desa = $(IKS+IKL+IKE)/3$ Keterangan:	Dinas Pemberdayaan

Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa		IKS = Indeks Ketahanan Sosial IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan	Masyarakat Dan Desa
Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, berketahanan terhadap bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Infrastruktur Daerah	$I = \sum_{i=1}^{n} W_i x X_i$ Keterangan : I : Indeks Infrastruktur Wi : Bobot untuk indikator ke – i Xi : Nilai indikator ke-i yang telah di normalisasi n : Jumlah indikator yang digunakan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Sasaran 1 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Skor rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan	$\mathbf{PASMPP} = \frac{JRTASMPP}{JRT} X100\%$ PASMPP: Persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. JRTASMPP: Jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. JRT: Jumlah rumah tangga seluruhnya diperkotaan.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	Total kapasitas debit pengambilan air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri dan lain-lain di setiap sumber air meliputi mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, dan atau sumber air lainnya	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	1. Bagi kabupaten/kota yang telah menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut: Persentase Rumah Tangga yang mengakses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Penduduk

		$PHLTB = \frac{JRTHLHTB}{JRT\ X\ 100}$ PHLTB = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRTHLTB = Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRT = Jumlah rumah tangga 2. Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak). $\text{PHLTB (proksi)} = \frac{JRTHLHTB\ (proksi)}{JRT\ X\ 100}$ PHLTB (proksi) = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRTHLTB (proksi) = Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRT = Jumlah rumah tangga Segregasi pengolahan data ini dapat digunakan untuk tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, perkotaanperdesaan, dan desil pengeluaran	
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Perhitungan IKLH Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks di Kabupaten/Kota (IKA, IKU, dan IKL) yang dikalikan masing-masing bobot sesuai dengan rumus penghitungan IKLH Kabupaten/Kota. a. IKLH Kabupaten/ Kota dengan Ekosistem Gambut $IKLH$ = (0,3760 x IKA) + (0,4050 x IKU) + (0,1712 x IKTL) +	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

		(0,0478 x IKEG) b. IKLH Kabupaten/ Kota tanpa Ekosistem Gambut $IKLH$ = (0,3760 x IKA) + (0,4050 x IKU) + (0,1712 x IKTL) Keterangan: IKA : Indeks Kualitas Air IKU : Indeks Kualitas Udara IKTL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan IKEG : Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah Terdapat dua alternatif menghitung jumah sampah terolah: Cara (1) $SO = ST - MFPA + RDP$ Keterangan: SO : Sampah terolah (ton/hari) ST Sampah terkumpul (ton/hari MFPA Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari RPD Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari Cara (2) $SO = MFPD + DPA - RPD$ Keterangan: SO : Sampah terolah (ton/hari) MFPD : Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan- daur ulang sampah (ton/hari) Material daur ulang yang	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

		diambil dari DPA : fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah $TS = TP\ x\ (TPRT + TPNRT)$ Keterangan: TS : Timbulan sampah (kg/hari) TP : Total populasi (orang) TPRT : Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari) TPNRT : Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari) Jika tidak terdapat informasi TPNRT, maka pendekatan dapat diestimasi menggunakan perhitungan berikut. $TS = 70\%\ dari\ rumah\ tangga + 30\%\ dari\ non - rumah\ tangga$ $\text{TS} = \frac{TSRT}{70\%}$ Langkah ke-3: Menghitung Tingkat Sampah Terolah $\%\text{SO} = \frac{SO\ x\ 100\%}{ts}$ Keterangan: %SO : Tingkat sampah terolah (%) SO : Sampah terolah (ton/hari)	

		TS : Timbulan sampah (ton/hari)	
	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan penuh pengumpulan sampah	$\mathbf{PRTLP} = \frac{JRTLA}{JRTS} X\ 100\%$ Keterangan: PRTLA = Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah JRTLA = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Sasaran 3 : Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	$Risk = Hazard\ x\ \frac{Vulnerability}{Capacity}$ Keterangan Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Kapasitas (Capacity) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: 1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; 2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; 3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; 4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana; 5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; 6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan 7. Pengembangan sistem pemulihan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan 1 : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tentram dan harmonis dalam keberagaman agama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	$IKUB = \frac{\sum_{j=1}^{3} Indeks\, D_j}{3}$ Keterangan: • IPK = Indeks Kerukunan Umat Beragama • Dj = Dimensi ke-j Rumus menghitung indeks dimensi (Dj): $Indeks\, D_j = \frac{\sum_{i=1}^{n} SX_{ji}}{n_j}$ Keterangan: • Dj = Dimensi ke-j • SX{ji} = Nilai indikator i pada dimensi ke-j • nj = Jumlah indikator dimensi ke-j	Sekretariat Daerah
Sasaran 1 : Meningkatnya rasa aman dan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan masyarakat	Indeks Keamanan Daerah	Indeks Keamanan Daerah = (AK x 40%) + (PrKTPPO x 30%) + (RT x 30%) Keterangan: AK = Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk PrKTPPO = Persentase Perempuan Korban Kekerasan RT = Persentase Capaian Layanan Waktu Tanggap Kebakaran (bobot 30%)	Dinas Satpol PP Damkar
	Angka Kriminalitas	(Jumlah kasus kriminal / Jumlah penduduk) × 100.000	Dinas Satpol PP Damkar
Sasaran 2 : Meningkatnya pelestarian cagar dan warisan budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	(Jumlah cagar budaya yang dilestarikan / Jumlah cagar budaya yang terdata) × 100%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	(Jumlah WBTB yang dilestarikan / Total WBTB terdaftar) × 100%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUHATRI BUR
Jabatan : BUPATI PADANG PARIAMAN

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Parit Malintang, 02 Januari 2025
BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama	Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah	80%
2	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	72,15
3	Meningkatnya Ketertiban Umum/Stabilitas	Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah	100%
4	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Persentase Warisan Cagar Budaya yang dilestarikan	100%
		Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	100%
5	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayah	Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang	73%
		Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	71,04%
		Persentase Ketaatan terhadap RTRW	83%
6	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi	PDRB/Income Per Kapita	58,38 (Rp. Juta)
		Pengeluaran Per Kapita	12,056 (Rp. Juta)
7	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata - Rata Lama Sekolah	8,54 Tahun
8	Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	73,00 (BB)
		Opini BPK RI terhadap LKPD	WTP
9	Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Merit System	250
		Indeks SPBE	4,00
10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4,57
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	91
11	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	71 Tahun
		Prevalensi Stunting	14%
12	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	5,80%
13	Meningkatnya Investasi di Daerah	Persentase Pertumbuhan Investasi	2%
14	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB	65%

No	Program	Anggaran	
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp	4.400.000.000
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp	201.075.000
3	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp	410.142.000
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	68.962.580.153
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	2.161.411.600
6	Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Rp	484.350.000
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp	440.773.799
8	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp	89.580.545.600
9	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp	711.000.000
10	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	8.500.500
11	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp	16.600.500
12	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp	40.994.700
13	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp	208.299.600
14	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp	21.400.000
15	Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Rp	15.500.000
16	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp	213.560.000
17	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp	55.000.000
18	Program Rehabilitasi Sosial	Rp	499.942.600
19	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp	1.987.000.000
20	Program Penanganan Bencana	Rp	347.341.200
21	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp	60.203.012.708
22	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp	13.593.139.500
23	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp	17.020.875.000
24	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp	1.139.996.500
25	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	2.314.984.180
26	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp	292.710.000
27	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp	1.217.078.000
28	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	921.934.054.386
29	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	1.116.005.000

30	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	420.000.000
31	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	2.532.527.500
32	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	1.047.015.000
33	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp	109.031.000
34	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	205.930.723.853
35	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	3.767.501.000
36	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	960.944.800
37	Program Kepegawaian Daerah	Rp	1.235.739.450
38	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	774.006.400
39	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	755.070.000
40	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	20.640.000
41	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp	15.160.000
42	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp	2.566.557.400
43	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	355.193.700
JUMLAH		**Rp**	**1.410.087.982.629**

Parit Malintang, 02 Januari 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JOHN KENEDY AZIS
Jabatan : BUPATI PADANG PARIAMAN

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Parit Malintang, 23 Oktober 2025
BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
	Tujuan :		
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,68
	Sasaran :		
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	80,00
		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	71,40
		Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK	78,00
2	Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	87,72
3	Meningkatnya Transformasi Digital Pelayanan Publik	Indeks SPBE	3,51
	Tujuan :		
	Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berdaya Saing dan Inklusif	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,82
	Sasaran :		
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas dan Berdaya Saing	Rata-Rata Lama Sekolah	8,79 Tahun
		Harapan Lama Sekolah	14,42 Tahun
		Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asessment tingkat Nasional:	
		Literasi	54,00%
		Numerasi	46,50%
2	Tercapainya Masyarakat Sehat dan Produktif Sesuai Siklus Hidup	Angka Harapan Hidup	73,97 Tahun
		Prevalensi Stunting	23,9%
		Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	50 per 100.000 Kelahiran Hidup
3	Meningkatnya Kualitas Keluarga, Kesetaraan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Keluarga	57,8
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,3
		Indeks Ketimpangan Gender	0,715
		Indeks Perlindungan Anak	69,68%
4	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusi	Indeks Kesejahteraan Sosial	81,10%
	Tujuan :		
	Meningkatnya Perekonomian Daerah Yang Maju dan Inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,37%
		PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	63,57 (Rp. Juta)
		Eksport Barang dan Jasa	4,37%
		Gini Ratio	0,251%
		Tingkat Kemiskinan	5,01%
	Sasaran :		
1	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, Kehutanan, dan perikanan terhadap perekonomian daerah	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	20,34%

2	Meningkatnya kontribusi perdagangan, UMKM dan industri berbasis sektor unggulan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	11,85%
		Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB	0,150%
		Rasio PDRB Industri Pengolahan	8,43%
3	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	125 Ribu Orang
		Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Nasional	1,622%
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	1,36%
4	Meningkatnya Kemudahan Investasi	Persentase Peningkatan Investasi	2,58%
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (PDRB)	30,6%
		Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	8,76%
		Nilai Transaksi Saham per Kapita	Rp. 413.768
5	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan	86,2
6	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,17%
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	71,78%
		Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	57,53-58,91%
		Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	71,20%
		Persentase disabilitas bekerja di sektor formal	26,39%
7	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Indeks Desa	70,00%
	Tujuan :		
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, berketahanan terhadap bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Infrastruktur Daerah	60,5%
	Sasaran :		
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	60,02%
		Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan	19%
		Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,95 m3/detik
		Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	60,25%
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	76,96%
		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	16,34%
		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan penuh pengumpulan sampah	40,87%
3	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	150,89%
	Tujuan :		
	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tentram dan harmonis dalam keberagaman agama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	72,15%
	Sasaran :		
1	Meningkatnya rasa aman dan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan masyarakat	Indeks Keamanan Daerah	67,37%
		Angka Kriminalitas	196,25%
2	Meningkatnya pelestarian cagar dan warisan budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	85%
		Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	66%

No	Program	Anggaran	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	874.121.128.952
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp	5.274.458.200
3	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	592.335.047
4	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp	82.060.000
5	Program Kepegawaian Daerah	Rp	1.243.348.965
6	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	513.781.800
7	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	728.642.500
8	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	241.736.800
9	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	198.960.166.909
10	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	1.063.707.140
11	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	1.228.805.800
12	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp	131.957.000
13	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp	507.802.400
14	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp	2.572.643.300
15	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp	1.126.609.400
16	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp	4.730.000
17	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	10.170.000
18	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp	95.804.784.671
19	Program Pengembangan Kurikulum	Rp	51.999.000
20	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp	208.747.400
21	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp	252.982.745
22	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp	728.293.201
23	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	134.220.848.105
24	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	2.101.525.600
25	*Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman*	Rp	474.341.000
26	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp	525.622.901
27	Program Pengendalian Penduduk	Rp	493.445.000
28	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Rp	7.452.049.500
29	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Rp	1.987.000.000
30	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp	194.045.200
31	Program Perlindungan Perempuan	Rp	46.057.200
32	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	231.840.800
33	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp	107.606.900
34	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Rp	84.352.400

35	Program Rehabilitasi Sosial	Rp	245.235.200
36	Program Penanganan Bencana	Rp	422.124.200
37	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp	358.331.850
38	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	60.048.000
39	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	24.762.200
40	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp	50.946.460
41	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp	1.115.769.150
42	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp	12.440.938
43	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp	200.841.600
44	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp	13.500.500
45	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	17.399.200
46	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro	Rp	613.286.400
47	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Rp	13.934.500
48	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rp	366.198.400
49	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp	182.881.000
50	Program Pemasaran Pariwisata	Rp	10.301.600
51	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	18.390.900
52	Program Promosi Penanaman Modal	Rp	9.683.000
53	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	26.222.015
54	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp	374.858.352
55	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp	3.570.847.000
56	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp	17.437.300
57	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	705.192.000
58	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp	100.000.000
59	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	17.399.200
60	*Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan* Masyarakat Hukum Adat	Rp	713.127.800
61	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	93.168.500
62	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp	4.422.790.500
63	Program Pengembangan Perumahan	Rp	41.525.010
64	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp	235.198.000
65	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Rp	2.386.538.700
66	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp	616.400.000
67	Program Kawasan Permukiman	Rp	330.786.258
68	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp	16.388.764.714
69	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Rp	19.323.091.100

70	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rp	1.440.300
71	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	431.302.950
72	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	147.606.800
73	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Rp	3.327.000
74	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp	34.041.800
75	Program Pengelolaan Persampahan	Rp	801.572.949
76	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp	11.775.000
77	Program Penanggulangan Bencana	Rp	723.251.900
78	*Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan* Penyelamatan Non Kebakaran	Rp	780.649.787
79	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp	335.428.000
80	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp	9.350.000
81	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp	1.721.909.700
82	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp	23.725.000
83	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp	468.887.500

Parit Malintang, 23 Oktober 2025
BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran Indikator Kinerja	Rumus Pengukuran Kinerja	Kinerja		Program	Anggaran		Keterangan	
						Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%	
1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Persentase Lembaga Pendidikan Alqur'an yang menghasilkan Hafizh / Hafizah	80%	(Jumlah Lembaga Pendidikan Aquran yang menghasilkan hafiz dan hafizah)/("JumlahLembaga Pendidikan Alquran" keseluruhan) x 100 %	realisasi / taget x 100	78,48%	98,1%	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	5.274.458.200,00	4.582.060.183,00	86,87%	
2	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	72,15	(Skor Toleransi + Skor Kesetaraan + Skor Kerjasama Sosial) / 3	realisasi / taget x 100	78,08	103,90%					
3	Meningkatnya Ketertiban Umum/Stabilitas	Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah	100%	Jumlah konflik sosial yang tertangani / Jumlah konflik sosial yang terlaporkan keseluruhan dikali 100%	realisasi / taget x 100	100%	100%	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	34.571.500,00	22.934.900,00	66,34%	
								Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	335.428.000,00	252.188.500,00	75,18%	
4	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Persentase Warisan Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	(Jumlah cagar budaya yang telah dilestarikan / Jumlah Cagar Budaya yang Terdata) x100%	realisasi / taget x 100	100%	100%	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	468.887.500,00	113.797.589,00	24,27%	
		Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	100%	(Jumlah Warisan Cagar Budaya Tak Benda yang dilestarikan / Jumlah Warisan Budaya tak benda yang terdata) x100%	realisasi / taget x 100	100%	100%	Program Pengembangan Kebudayaan	1.721.909.700,00	1.271.470.618,00	73,84%	
5	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayah	Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang	73%	Panjang jalan memenuhi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang / Panjang jaringan jalan Kabupaten X 100%	realisasi / taget x 100	65,53%	87,03%	Program Penyelenggaraan Jalan	6.009.534.800,00	5.109.716.152,00	85,03%	
		Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	71,04%	Luas irigasi dalam kondisi baik / Luas irigasi Kabupaten X 100%	realisasi / taget x 100	47,17%	66,40%	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	556.538.700,00	474.916.000,00	85,33%	
		Persentase Ketaatan terhadap RTRW	83%	(Realisasi RTRW/(Rencana Pembentukan) x 100%	realisasi / taget x 100	83,70%	100,84%	Program Penataan Bangunan Gedung	2.670.847.000,00	2.446.541.800,00	90,48%	
								Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	300.426.100,00	256.165.608,00	85,27%	
6	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi	PDRB Per Kapita	Rp. 58,38 Juta	Nilai PDRB ADHB (Juta) / Jumlah Penduduk (Jiwa)	realisasi / taget x 100	Rp. 59,49 Juta	101,90%	Program Perekonomian dan Pembangunan	326.293.500,00	276.461.870,00	84,73%	
		Pengeluaran Per Kapita	Rp. 12,056 Juta	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama setahun / banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan prioritas daya beli	realisasi / taget x 100	Rp. 12,089 Juta	100,27%					
7	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata - Rata Lama Sekolah	8,54 Tahun	$Rata-rata\ Lama\ Sekolah\ 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$	realisasi / taget x 100	8,78 Tahun	102,81%	Program Pengelolaan Pendidikan	84.298.508.555,00	22.606.904.407,00	26,82%	
8	Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK RI terhadap LKPD	WTP	Hasil Opini BPK RI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	realisasi / taget x 100	WTP	100%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.629.224.760,00	1.419.544.456,00	87,13%	
								Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.228.805.800,00	585.209.446,00	47,62%	
								Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.063.707.140,00	816.307.299,00	76,74%	
		Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	73 (BB)	$Nilai\ Evaluasi\ AKIP = \sum_{k=0}^{n} nilai\ komponen$	realisasi / taget x 100	71,54 (BB)	98%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	854.020.293.551,74	874.457.106.085,00	102,39 %	
								Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	728.642.500,00	688.471.008,00	94,49%	
								Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	241.736.800,00	229.194.305,00	94,81%	
								Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	507.802.400,00	446.447.349,00	87,92%	
								Program Penyelenggaraan Pengawasan	592.335.047,20	584.399.699,00	98,66%	
								Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	82.060.000,00	75.871.800,00	92,46%	

9	Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Merit System	250	Hasil Penilaian Indeks Merit System dari BKN	$\frac{realisasi}{taget} \times 100$	211,5	84,60	Program Kepegawaian Daerah	1.243.348.965,00	851.769.114,00	68,51%	
								Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	513.781.800,00	416.795.406,00	81,12%	
		Indeks SPBE	4,00	Indeks SPBE Hasil Penilaian Kemenpan RB	$\frac{realisasi}{taget} \times 100$	4,07	101,75%	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.126.609.400,00	1.116.594.850,00	99,11%	
								Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	10.170.000,00	10.050.000,00	98,82%	
								Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	4.730.000,00	4.600.000,00	97,25%	
								Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.449.995.900,00	2.385.223.063,00	97,36%	
10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4,57	Nilai Indeks Pelayanan Publik/ Hasil Evaluasi Kemenpan RB	$\frac{realisasi}{taget} \times 100$	4,58	100,22%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	125.207.000,00	106.848.130,00	85,34%	
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	91	Hasil Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	$\frac{realisasi}{taget} \times 100$	70,78	77,78%					
11	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	71 Tahun	Jumlah usia orang yang meninggal satu tahun / Jumlah orang yang meninggal satu tahun	$\frac{realisasi}{taget} \times 100$	74,04 Tahun	104,79%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	35.757.336.277,99	32.252.368.894,00	90,20%	
								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.101.525.600,00	1.262.412.600,00	60,07%	
								Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	474.341.000,00	183.131.174,00	38,61%	
								Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	341.290.000,00	324.751.444,00	95,15%	
		Prevalensi Stunting	14%	Hasil SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) Kementerian Kesehatan	$\frac{(2 \times target) - realisasi}{taget} \times 100$	26,6*	10%*	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	101.945.199.994,00	90.361.156.027,00	76,33%	
								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.776.495.600,00	2.073.905.900,00	98,71%	
12	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	5,80%	(Jumlah Penduduk Miskin)/(Jumlah Penduduk Seluruhnya) x 100%	$\frac{(2 \times target) - realisasi}{taget} \times 100$	5,86%	98,97%	Program Rehabilitasi Sosial	245.235.200,00	187.198.101,00	54,54%	
								Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.987.000.000,00	1.961.433.600,00	94,04%	
								Program Penanganan Bencana	422.124.200,00	230.214.711,00	57,33%	
13	Meningkatnya Investasi di Daerah	Persentase Pertumbuhan Investasi	2%	$\frac{\text{Nilai investasi periode sekarang} - \text{nilai investasi periode sebelumnya}}{\text{Nilai investasi periode sebelumnya}} \times 100\%$	$\frac{realisasi}{taget} \times 100$	202,60%	10.130%	Program Pelayanan Penanaman Modal	26.222.015,00	24.657.800,00	94,19%	
								Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	2.250.000,00	1.290.000,00	99,59%	
14	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Kontribusi Ekonomi Sektor Riil Terhadap PDRB	65%	$\frac{\text{PDRB Sektor Rill}}{\text{PDRB Total}} \times 100\%$	$\frac{realisasi}{taget} \times 100$	59,65%	92,23%	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	328.538.650,00	309.449.400,00	96,07%	
								Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	60.048.000,00	59.800.000,00	98,53%	
								Program Penyuluhan Pertanian	11.010.000,00	10.576.900,00	93,14%	
								Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	6.978.000,00	6.875.500,00	93,35%	
								Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	13.500.500,00	12.574.400,00	90,20%	
								Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	16.250.000,00	15.170.200,00	60,07%	

Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran Indikator Kinerja	Rumus Pengukuran Kinerja	Kinerja		Program	Anggaran		Keterangan	
						Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%	
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	80,00	Indeks = (Skor seluruh area perubahan / Skor maksimal) x 100 Nilai Indeks RB dari Kementerian PAN RB	$\frac{Realisasi}{Target} x\ 100\%$	76,34*	95,42*	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	874.121.128.952,14	671.542.877.846,00	76,82	
								Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	5.274.458.200,00	4.582.060.183,00	86,87	
								Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	131.957.000,00	112.598.130,00	85,33	
								Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	264.919.750,00	227.136.596,00	85,74	
								Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	17.459.870.603,00	15.649.284.336,00	89,63	
								Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	
								Program Pengelolaan Arsip	44.278.850,00	42.711.250,00	96,46	
								Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	7.683.000,00	5.772.500,00	75,13	
								Perizinan Penggunaan Arsip	3.970.900,00	3.946.400,00	99,38	
								Program Kepegawaian Daerah	1.243.348.965,00	851.769.114,00	68,51	
								Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	513.781.800,00	416.795.406,00	81,12	
								Program Pegelolaan Keuangan Daerah	203.560.166.909,00	188.911.596.381,00	92,80	
								Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.063.707.140,00	816.307.299,00	76,74	
								Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.228.805.800,00	585.209.446,00	47,62	
		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	71,4%	Nilai = Hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB (skor akhir evaluasi)	$\frac{Realisasi}{Target} x\ 100\%$	71,54%	106,69	Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	728.642.500,00	688.471.008,00	94,49	

								Program Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	241.736.800,00	229.194.305,00	94,81	
		Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK	78,00%	Nilai Survey dari KPK RI	$\frac{Realisasi}{Target}$ x 100%	65,50%	83,97	Progran Penyelenggaraan Pengawasan	592.335.047,20	584.399.699,00	98,66	
								Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	82.060.000,00	75.871.800,00	92,46	
2	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung Pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah	87,72	$Indeks\ Inovasi\ Daerah = \frac{Total\ Skor}{Skor\ Total\ Maksimum}\ x\ 100$	$\frac{Realisasi}{Target}$ x 100%	82,48	94,03	Program Penelitian Dan Pengembangan	507.802.400,00	446.447.349,00	87,92	
3	Meningkatnya Transformasi Digital Pelayanan Publik	Indeks SPBE	3,51	Indeks SPBE = (Jumlah skor dari semua domain penilaian / Skor maksimal) × 100 Nilai Indeks SPBE dari Kementerian PAN RB	$\frac{Realisasi}{Target}$ x 100%	4,07	101,75	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.126.609.400,00	1.116.594.850,00	99,11	
								Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.572.643.300,00	2.458.356.813,00	95,56	
								Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	4.730.000,00	4.600.000,00	97,25	
								Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	10.170.000,00	10.050.000,00	98,82	
4	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing	Rata-Rata Lama Sekolah	8,79 Tahun	$Rata - rata\ Lama\ Sekolah\ 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ Keterangan: P15+ = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas xi = Lama sekolah penduduk ke- ?	$\frac{Realisasi}{Target}$ x 100%	8,78 Tahun	99,89	Program Pengelolaan Pendidikan	95.804.784.671,00	91.481.028.265,00	95,49	
		Harapan Lama Sekolah	14,42 Tahun	nEt Harapan Lama Sekolah = FK iPti=<i Keterangan: FK : Faktor koreksi pesantren Et : Jumlah penduduk usia I yang bersekolah pada tahun t iPt i : Jumlah penduduk usia i pada tahun t Usia (7,8, ..., n)	$\frac{Realisasi}{Target}$ x 100%	14,21 Tahun	98,54	Program Pengembangan Kurikulum	51.999.000,00	51.544.000,00	99,12	
								Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	208.747.400,00	195.861.700,00	93,83	
								Program Pengendalian dan Perizinan Pendidikan				
		Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asessment tingkat Nasional:										
		-Literasi	54,00%	Indeks Literasi = Skor rata-rata literasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	$\frac{Realisasi}{Target}$ x 100%	62,4%	115,56	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra				
		-Numerasi	46,50%	Indeks Numerasi = Skor rata-rata numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	$\frac{Realisasi}{Target}$ x 100%	53,9%	115,91	Program Pembinaan Perpustakaan	252.982.745,00	247.725.380,00	97,92	

								Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	11.392.500,00	9.315.000,00	81,76	
5	Tercapainya Masyarakat sehat dan Produktif sesuai siklus Hidup	Angka Harapan Hidup	73,97 Tahun	dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Microcomputer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack	$\frac{Realisasi}{Target}$ x 100%	74,04 Tahun	100,09	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	134.220.848.105,49	124.460.415.280,00	92,73	
		Prevalensi Stunting	23,9%	$PAB\ (5) P\ Stunting = \frac{JAB\ (5) P\ Stunting}{JAB\ (5)}$ x 100% Keterangan PAB (5) P Stunting = Prevalensi anak balita yang stunting menderita pendek (stunting) JAB(5)P Stunting = Jumlah anak balita pendek (stunting) pada waktu tertentu JAB (5) = Jumlah anak balita pada waktu yang sama	$\frac{(2x\ Target) - Realisasi}{Target}$ x 100%	26,6%*	88,70	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.101.525.600,00	1.262.412.600,00	60,07	
		Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	50 Orang/100.000 Kelahiran Hidup	AKI = (JKI/JLH) x 100.000 Keterangan: AKI : Angka Kematian Ibu JKI : Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu	$\frac{(2x\ Target) - Realisasi}{Target}$ x 100%	89 Orang/100.000 Kelahiran Hidup	12,36	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	474.341.000,00	183.131.174,00	38,61	
								Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	525.622.901,00	409.269.448,00	77,86	
6	Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Keluarga	57,8	iBangga = (Skor Dimensi Ketenteraman + Skor Dimensi Kemandirian + Skor Dimensi Kebahagiaan) / 3	$\frac{Realisasi}{Target}$ x 100%	58,4	101,10	Program pengendalian Penduduk	493.445.000,00	486.671.700,00	98,63	
								Program pembinaan Keluarga berencana (KB)	7.452.049.500,00	7.051.857.151,00	94,63	
								Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.987.000.000,00	1.961.433.600,00	98,71	
								Program Peningkatan Kualitas Keluarga	231.840.800,00	192.711.585,00	83,12	
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,3	IPG = (IPM Perempuan / IPM Laki-laki) x 100	$\frac{Realisasi}{Target}$ x 100%	93,92*	99,59*	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	21.800,00	-	0,00	
		Indeks Ketimpangan Gender	0,715	$IKG = 1 - \frac{HARM\ (Gp,Gl)}{G\ p,l}$ Keterangan : • HARM(GP,GL)= Agregasi indeks perempuan dan Laki-laki dengan rata-rata harmonik • GPL= Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata Geometrik • IKG = Indeks Ketimpangan Gender	$\frac{(2x\ Target) - Realisasi}{Target}$ x 100%	0,722*	81,67*	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	194.045.200,00	116.895.239,00	60,24	
								Program Perlindungan Perempuan	46.057.200,00	26.566.000,00	57,68	
		Indeks Perlindungan Anak	69,68	$IPA = \sum_{j=1}^{5} (W_j\ x\ Indeks\ K_j)$ Metode Perhitungan: Menghitung angka indikator penyusun Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang terdiri dari 5 klaster dengan 27 indikator	$\frac{Realisasi}{Target}$ x 100%	61,57*	88,36*	Program Pemenuhan Hak Anak	84.352.400,00	69.506.200,00	82,40	
								Program Perlindungan Khusus Anak	107.606.900,00	84.998.000,00	78,99	

7	Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusi	Indeks Kesejahteraan Sosial	57,50	IKS = (Σ nilai dimensi × bobot masing-masing dimensi) ÷ total bobot $IKS = 1/n \sum_{i=1}^{n} X_i$ • IKS = Indeks Kesejahteraan Sosial • $X_1, X_2, ..., X_n$ = Skor masing-masing dimensi kesejahteraan sosial (sudah dinormalisasi dalam skala 0–100) • n = Jumlah dimensi indikator	$\frac{Realisasi}{Target} x\ 100\%$	57,50	100	Program Pemberdayaan Sosial				
								Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan				
								Program Rehabilitasi Sosial	245.235.200,00	187.198.101,00	76,33	
								Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				
								Program Penanganan Bencana	422.124.200,00	230.214.711,00	54,54	
								Program pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1.122.000,00	570.000,00	50,80	
8	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, Kehutanan, dan perikanan terhadap perekonomian daerah	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	20,34%	(Nilai Tambah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan / Nilai PDRB Kab.ADHB) × 100%	$\frac{Realisasi}{Target} x\ 100\%$	20,70%	101,77	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	358.331.850,00	338.959.720,00	94,59	
								Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	60.048.000,00	59.800.000,00	99,59	
								Program Pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian	-	-		
								Program perizinan usaha Pertanian	-	-		
								Program Penyuluhan Pertanian	563.538.687,00	539.846.550,00	95,80	
								Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	24.762.200,00	24.112.363,00	97,38	
								Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.115.769.150,00	1.089.422.165,00	97,64	
								Program Pengelolaan Perikanan Budi daya	50.946.460,00	50.676.000,00	99,47	

								Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	12.440.938,00	11.990.000,00	96,38	
9	Meningkatnya kontribusi perdagangan, UMKM dan industri berbasis sektor unggulan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	11,85%	(PDRB sektor perdagangan / Total PDRB) × 100%	$\frac{Realisasi}{Target} x\ 100\%$	10,38%	87,59	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	13.679.800,00	12.539.800,00	91,67	
								Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	6.978.000,00	6.875.500,00	98,53	
								Program Stabilisasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting	13.500.500,00	12.574.400,00	93,14	
								Program Pengembangan Eksport	-	-		
								Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	22.859.000,00	21.929.418,00	95,93	
								Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam negeri	200.841.600,00	197.612.200,00	98,39	
		Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB	0,150%	(Total volume usaha koperasi / Total PDRB Kab.ADHB) × 100%	$\frac{Realisasi}{Target} x\ 100\%$	0,38%	253,33	Program pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	6.864.000,00	6.854.000,00	99,85	
								Program Penilaian Kesehatan KSP/USP koperasi	9.504.200,00	9.161.200,00	96,39	
								Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	26.500.000,00	22.493.900,00	84,88	
								Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	13.934.500,00	13.592.400,00	97,54	
								Program Penguatan badan Hukum Koperasi	-	-		
								Program Pelayanan izin usaha Simpan Pinjam	-	-		
		Rasio PDRB Industri Pengolahan	8,43%	(Nilai Tambah Sektor industri pengolahan / Total PDRB Kab.ADHB) × 100%	$\frac{Realisasi}{Target} x\ 100\%$	10,71%	127,05	Program pemberdayaan Usaha Menengah, usaha Kecil dan usaha Mikro (UMKM)	613.286.400,00	208.145.900,00	33,94	
								Program pengembangan UMKM	-	-		
								Program Perencanaan Pembangunan Industri	16.250.000,00	15.170.200,00	93,36	

								Program Pengendalian izin Usaha Industri	5.000.000,00	4.510.000,00	90,20	
								Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	4.800.000,00	4.072.850,00	84,85	
10	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	0,125 Ribu Orang	Data jumlah tamu wisatawan mancanegara (di setiap hotel / *homestay* di daerah tertentu)	$\frac{Realisasi}{Target} x\ 100\%$	0,442 Ribu Orang	353,60	Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	182.881.000,00	175.999.489,00	96,24	
								Program Pemasaran pariwisata	10.301.600,00	9.800.000,00	95,13	
		Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Nasional	1,622%	(PDRB ekonomi kreatif / Total PDB) × 100%	$\frac{Realisasi}{Target} x\ 100\%$	0,084%	5,18	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	-	-		
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	1,36%	(Nilai tambah penyediaan akomodasi dan makan minum / Total PDRB Kab. ADHB) × 100%	$\frac{Realisasi}{Target} x\ 100\%$	1,26%	92,65	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	366.198.400,00	323.346.099,00	88,30	
11	Meningkatnya Kemudahan Investasi	Persentase Peningkatan Investasi	2,58%	(Total nilai investasi tahun berjalan - Total nilai investasi tahun sebelumnya) / Total nilai investasi tahun sebelumnya) × 100%	$\frac{Realisasi}{Target} x\ 100\%$	202,60%	7.852,71	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	18.390.900,00	15.945.750,00	86,70	
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (PDRB)	30,6%	$PMTB\ (PDRB) = \frac{PMTB}{PDRB\ ADHK} x\ 100\%$ Keterangan: Pembentukan Modal Tetap Bruto = Total PMTB berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) PDRB *ADHK*= Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	$\frac{Realisasi}{Target} x\ 100\%$	30,76%	100,52	Program Promosi Penanaman Modal	9.683.000,00	7.400.000,00	76,42	
								Program pelayanan Penanaman Modal	26.222.015,00	24.657.800,00	94,03	
								Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	26.950.000,00	26.256.200,00	97,43	
								Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	2.250.000,00	1.290.000,00	57,33	
		Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	8,76%	(Total Dana Pihak Ketiga / PDRB) × 100% Total Dana Pihak Ketiga (DPK) =Total DPK Bank Umum + Total DPK BPR-BPRS (di suatu provinsi) PDRB =Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku)	$\frac{Realisasi}{Target} x\ 100\%$	2,11%	24,09	Program Perekonomian Dan Pembangunan	326.293.500,00	276.461.870,00	84,73	
		Nilai Transaksi Saham per Kapita	Rp. 413.768	Total nilai transaksi saham / Jumlah penduduk	$\frac{Realisasi}{Target} x\ 100\%$	Rp. 533.131,21	128,85					
12	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan	86,2	Indeks Ketahanan Pangan = penjumlahan dari Bobot masing-masing indikator dikalikan dengan Nilai standarisasi Masing-masing indikator	$\frac{Realisasi}{Target} x\ 100\%$	69,14	86,21	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian Pangan				
								Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	705.192.000,00	699.822.736,00	99,24	

								Program Penanganan Kerawanan pangan	100.000.000,00	91.020.000,00	91,02	
								Program Pengawasan keamanan pangan				
13	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,17%	$TPT = \frac{PP}{PAK} x\,100\%$ Keterangan: TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah Angkatan kerja (orang)	$\frac{(2x\ Target) - Realisasi}{Target} x\,100\%$	6,48	94,98	Program perencanaan tenaga kerja				
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	71,78 Juta	PDRB atas dasar harga konstan / Jumlah tenaga kerja	$\frac{Realisasi}{Target} x\,100\%$	65,52 Juta	91,28	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	17.399.200,00	17.379.200,00	99,89	
		Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	57,53-58,91 %	$TPAK_p = \frac{PAK_p}{P_{(15+,p)}} \times 100\%$ Keterangan: TPAKp = Tingkat Partisipas Angkatan Kerja Perempuan (%) PAKp = Jumlah angkatan kerja perempuan (orang) P(15+,p) = Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas (orang)	$\frac{Realisasi}{Target} x\,100\%$	53,44%	92,87	Program Penempatan tenaga Kerja	-	-		
		Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	71,20%	(Jumlah pekerja dengan bidang kerja sesuai latar belakang pendidikan / Total pekerja lulusan menengahtinggi) × 100%	$\frac{Realisasi}{Target} x\,100\%$	54,57%	76,64	Program Hubungan Industrial	24.149.950,00	16.587.600,00	68,69	
		Persentase disabilitas bekerja di sektor formal	26,39%	Persentase Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal = (Pekerja penyandang disabilitas sektor formal / Angkatan Kerja Penyandang Disabillitas) × 100%	$\frac{Realisasi}{Target} x\,100\%$	25%	94,73	Program pengawasan Ketenagakerjaan				
14	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Indeks Desa	70,00	Indeks Desa = (IKS+IKE+IKL)/3 Keterangan: IKS = Indeks Ketahanan Sosial IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan	$\frac{Realisasi}{Target} x\,100\%$	73,26	104,66	Program Penataan Desa	118.223.000,00	63.397.000,00	53,62	
								Program Peningkatan Kerja Sama Desa	-	-		
								Program Administrasi pemerintahan Desa	93.168.500,00	43.736.400,00	46,94	
								Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	713.127.800,00	540.895.326,00	75,85	
								Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	37.477.000,00	31.749.500,00	84,72	
								Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	289.784.450,00	234.386.350,00	80,88	
15	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	60,02	Skor rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur	$\frac{Realisasi}{Target} x\,100\%$	76,33	127,17	Program penyelenggaraan jalan	16.388.764.714,00	14.650.427.597,00	89,39	
								Program Penataan Bangunan Gedung	3.570.847.000,00	3.270.533.300,00	91,59	

								Program Penataan Bangunan dan Lingkungan				
								Program Pengembangan Jasa Konstruksi				
								Program penyelenggaraan penataan ruang	374.858.352,00	262.302.200,00	69,97	
								Program penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)	19.323.091.100,00	19.233.398.549,00	99,54	
								Program Pengelolaan Perkeretaapian	1.440.300,00	657.500,00	45,65	
								Program Pengelolaan Pelayaran				
								Program Pengelolaan Penerbangan				
		Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,95 m3/detik	Total kapasitas debit pengambilan air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri dan lain-lain di setiap sumber air meliputi mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, dan atau sumber air lainnya	$\frac{Realisasi}{Target}\ x\ 100\%$	0,03	3,16	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	2.386.538.700,00	2.251.083.200,00	94,32	
		Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	19%	$\text{PHLTB (proksi)} = \frac{JRTHLHTB\ (proksi)}{JRT\ X\ 100}$ Keterangan : PHLTB (proksi) = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRTHLTB (proksi) = Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRT = Jumlah rumah tangga	$\frac{Realisasi}{Target}\ x\ 100\%$	17,10	90	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.422.790.500,00	4.384.543.900,00	99,14	
								Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	616.400.000,00	616.400.000,00	100,00	
								Program Pengembangan Permukiman				
								Program pengembangan dan Perumahan	41.525.010,00	12.164.500,00	29,29	
								Program Kawasan Permukiman	330.786.258,00	305.053.609,00	92,22	
								Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)				
								Program peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				

		Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan	60,25%	$\textbf{PASMPP} = \frac{JRTASMPP}{JRT} X100\%$ Keterangan : PASMPP: Persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. JRTASMPP: Jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. JRT: Jumlah rumah tangga seluruhnya diperkotaan.	$\frac{Realisasi}{Target} x\ 100\%$	61,48	102,04	Program Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum				
16	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	76,96	IKLH Kabupaten/ Kota tanpa Ekosistem Gambut IKLH = (0,3760 x IKA) + (0,4050 x IKU) + (0,1712 x IKTL) Keterangan: IKA : Indeks Kualitas Air IKU : Indeks Kualitas Udara IKTL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$\frac{Realisasi}{Target} x\ 100\%$	77,55	100,77	Program perencanaan Lingkungan Hidup	147.606.800,00	145.934.900,00	98,87	
								Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	431.302.950,09	422.256.093,00	97,90	
								Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	17.437.300,00	16.499.710,00	94,62	
								Program pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan Lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH				
								Program Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	11.775.000,00	10.636.500,00	90,33	
								Program penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	7.987.500,00	7.730.250,00	96,78	
								Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	-	-		
								Program pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	34.041.800,00	30.875.000,00	90,70	
								Program Pengendalian Bahan berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (Limbah B3)	3.327.000,00	2.940.300,00	88,38	
		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	16,34%	% SO = (SO/TS) x 100% Keterangan: % SO : Tingkat sampah terolah (%) SO : Sampah terolah (ton/hari) TS : Timbulan sampah (ton/hari)	$\frac{Realisasi}{Target} x\ 100\%$	7,11%	43,51	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional				
		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan penuh pengumpulan sampah	40,87%	$\textbf{PRTLP} = \frac{JRTLA}{JRTS} X\ 100\%$ Keterangan: PRTLA = Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah JRTLA = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya	$\frac{Realisasi}{Target} x\ 100\%$	0,54%	1,32	Program Pengelolaan persampahan	801.572.949,00	755.487.067,00	94,25	
17	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	150,89	$Risk = Hazard\ x\ \frac{Vulnerability}{Capacity}$ Keterangan Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Kapasitas (Capacity) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas	$\frac{(2x\ Target) - Realisasi}{Target} x\ 100\%$	163,66	92,19	Program Penanggulangan bencana	723.251.900,00	717.074.170,00	99,15	

18	Meningkatnya rasa aman dan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan masyarakat	Indeks Keamanan Daerah	67,37	Indeks Keamanan Daerah = (AK x 40%) + (PrKTPPO x 30%) + (RT x 30%) Keterangan: AK = Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk PrKTPPO = Persentase Perempuan Korban Kekerasan RT = Persentase Capaian Layanan Waktu Tanggap Kebakaran (bobot 30%)	$\frac{Realisasi}{Target} x\ 100\%$	91,57	135,92	Program Penanggulangan penyelamatan kebakaran dan Non kebakaran	780.649.787,68	762.419.704,00	97,66	
								Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	9.350.000,00	5.295.000,00	56,63	
								Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	335.428.000,00	252.188.500,00	75,18	
								Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	667.526.000,00	594.178.458,00	89,01	
								Program Peningkatan Peran Parta Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1.015.380.000,00	1.014.580.300,00	99,92	
								Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	6.670.000,00	5.560.300,00	83,36	
		Angka Kriminalitas	196,25	(Jumlah kasus kriminal / Jumlah penduduk) × 100.000	$\frac{Realisasi}{Target} x\ 100\%$	188,21	104,10	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	235.198.000,00	233.551.505,00	99,30	
								Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	36.371.500,00	24.544.900,00	67,48	
19	Meningkatnya pelestarian cagar dan warisan budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	85,00%	(Jumlah cagar budaya yang dilestarikan / Jumlah cagar budaya yang terdata) × 100%	$\frac{Realisasi}{Target} x\ 100\%$	100	100	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	468.887.500,00	113.797.589,00	24,27	
								Program Pengelolaan Permuseuman				
		Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	66,00%	(Jumlah WBTB yang dilestarikan / Total WBTB terdaftar) × 100%	$\frac{Realisasi}{Target} x\ 100\%$	100	100	Program Pengembangan Kebudayaan	1.721.909.700,00	1.271.470.618,00	73,84	
								Program Pembinaan Sejarah	66.355.000,00	22.308.198,00	33,62	
								Program Pengembangan Kesenian Tradisional	23.725.000,00	-	0,00	



LKJIP 2025

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa